

B 1,355,356



**SEPEREMPAT ABAD
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
REPUBLIK INDONESIA**



Disusun oleh :
SEKRETARIAT DPR-GR



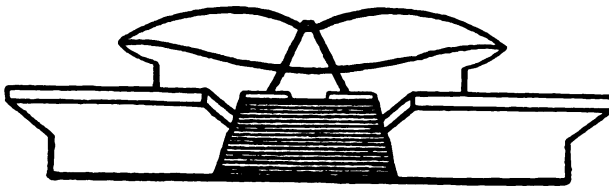






10 0 1-1

SEPEREMPAT ABAD DEWAN PERWAKILAN RAKJAT REPUBLIK INDONESIA



Disusun oleh :
SEKRETARIAT DPR-GR.

G-lib.

36

773

15

S47

PENDAHULUAN

Dua belas hari setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, jaitu pada tanggal 29 Agustus 1945 Presiden Republik Indonesia melantik Komite Nasional Pusat. Pada hari itu lahirlah lembaga perwakilan rakyat yang kemudian tumbuh menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Negara Republik Indonesia. Dihitung mulai saat itu hingga tanggal 29 Agustus 1970 usia Dewan Perwakilan Rakyat genap 25 tahun.

Penerbitan Buku 1/4 Abad Dewan Perwakilan Rakyat yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1970 mengingatkan kita pada hubungan sedjarah antara Negara Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah Republik Indonesia berdiri banjak kedjadian² bersejarah dibukukan, tetapi dalam pada itu tjukup banjak pula terdapat kedjadian² bersedjarah yang belum atau belum lengkap dibukukan, diantaranya sedjarah Dewan Perwakilan Rakyat sendiri. Mengenai DPR telah dikeluarkan buku² :

1. 5 tahun Parlemen (1950 — 1955)
2. 10 tahun Parlemen (1950 — 1960)
3. 20 tahun Perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat
(1950 — 1965)

Dalam buku² tersebut diatas dapat diikuti perkembangan yang terdjadi di DPR selama periode² tersebut, namun masih dirasakan adanya berbagai kekurangan. Dengan terbitnja buku ini kami mentjoba untuk mengisi kekurangan² tersebut dengan menjadikan buku sedjarah DPR yang menjeluruh dan selengkap mungkin.

Dengan adanya penerbitan² yang kami sebutkan diatas ditambah dengan diterbitkannja Buku 1/4 Abad Dewan Perwakilan Rakyat, generasi sekarang dan lebih² generasi yang akan datang, dapat mengenal lebih baik sedjarah Dewan Perwakilan Rakyat kita sendiri, jaitu segi² positif dan negatifnja, saat-saat pasang dan surutnja. Dengan demikian kita dapat beladjar daripadanjaja, tidak mengulang hal² negatif dan dapat memupuk hal² yang positif, menudju kepada penjempurnaan demokrasi di Indonesia berdasarkan UU Dasar 45 yang berfalsafah Pantja Sila.

Kami menjadari bahwa penulisan sedjarah Dewan Perwakilan Rakjat memerlukan waktu jang tjukup lama. Dalam penjun-an buku sedjarah ini kami menghadapi kesulitan antara lain tidak tjukup tersedianja bahan, terutama jang berkenaan dengan masa Revolusi Physik tahun 1945—1950. Sebabnja ialah tempat Ibu Kota Republik Indonesia Jogjakarta diduduki oleh Belanda dari tanggal 19 Desember 1948 sampai 6 Djuli 1949 sehingga seluruh arsip Badan Pekerdja serta bahan² lainnja praktis tidak dapat diketemukan lagi.

Untuk mengatasi kesulitan ini pertama-tama dalam Pembentukan Team Penjunan Sedjarah ini diikut-sertakan 3 orang jang pernah mendjabat Sekertaris Djenderal atau Pimpinan Sekertariat Lembaga Legislatif R.I. ialah Sdr. Rusli S.H., Sdr. Sumarsono Pringgodiredjo S.H. dan Sdr. Djoko Sumarjono S.H. Mereka ini mengikuti masa perdjuaan fisik, walaupun tidak semuanya mengabdikan diri setjara penuh sedjak pembentukan Komite Nasional Pusat. Namun demikian bahan² jang sudah tidak dapat diketemukan lagi berupa tulisan kiranja sedikit banyak masih ada jang dapat diungkapkan kembali berdasarkan hal² jang masih diingat oleh para bekas Pimpinan Sekertariat tersebut. Dalam pada itu diperoleh bahan² dari Perpustakaan Musium Djakarta, Departemen Penerangan dan lain² instansi dan untuk menambah bahan² tersebut Team menemui pula beberapa tokoh jang kami pandang mempunjai hubungan erat dengan Badan Pekerdja atau Komite Nasional Pusat, diantaranya ialah Bapak² :

1. Dr. Moh. Hatta, bekas Wakil Presiden R.I.
2. Assaat S.H., bekas Ketua Badan Pekerdja dan Komite Nasional Pusat.
3. Kasman Singodimedjo S.H., bekas Ketua Komite Nasional Pusat.
4. M. Sutardjo Kartohadikusumo, bekas Wakil Ketua I Komite Nasional Pusat.
5. Sjafruddin Prawiranegara S.H., bekas Penulis Badan Pekerdja.
6. Subadio Sastrosatomo, bekas Anggota Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat.
7. Dr. A. Halim, bekas Anggota Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat.

Untuk memperoleh tambahan bahan² mengenai hal² yang kurang lengkap dan untuk menjaga supaya buku sedjarah ini dapat lebih dipertanggung-djawabkan lagi isinja, maka telah kami sampaikan konsep² naskahnja sebelum diterbitkan kepada:

1. Semua Departemen dari Kabinet Pembangunan dan Lembaga² Negara.
2. Tokoh² yang kami pandang banjak mengetahui perkembangan D. P. R.
3. Fraksi² di D.P.R. - G.R.

Bahan-bahan itu telah dijadikan pertimbangan untuk mengoreksi bagian² yang dipandang perlu.

Mengenai sistematika penguraian materi buku ini diadakan IX Bab, ialah :

- Bab I tentang Komite Nasional Pusat dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.
- Bab II tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat R.I.S.
- Bab III tentang Dewan Perwakilan Rakyat Sementara.
- Bab IV tentang Dewan Perwakilan Rakyat Hasil Pemilihan Umum.
- Bab V tentang Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum berlandaskan UUD 1945.
- Bab VI Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 1960—1965.
- Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Minus P.K.I.
- Bab VIII tentang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Mulai 1966 (Orde Baru).
- Bab IX Hal-hal khusus.

Demikianlah bab² serta judul² buku sedjarah ini yang disesuaikan dengan tonggak² sedjarah yang terdapat dalam pertumbuhan Dewan Perwakilan Rakyat.

Tiap-tiap bab tersebut terbagi dalam 7 paragraf, masing-masing terdiri dari :

1. Pembentukan.
2. Keanggotaan.
3. Kedudukan dan wewenang.
4. Peraturan Tata Tertib dan pelaksanaannja.
5. Kedjadian² bersedjarah.
6. Hasil² pekerdjaan.
7. Sekertariat.

Sedangkan Bab IX memuat hal-hal khusus yang belum terdampung dalam Bab-bab tersebut diatas.

Maksud pembagian masing-masing bab ini selain memudahkan arah penulisan yang sama dapat menjengah pula jangan sampai terdjadi hal-hal yang tertjetjer. Sistematika demikian dimaksudkan pula supaya persoalan² yang menjangkut DPR tertjakup dalam masing-masing bab setjara keseluruhan.

Adapun Team Penjusunan Buku Sepcrempat Abad DPR terdiri dari :

- | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|
| 1. Sri Hardiman SH. | — | Ketua merangkap Anggota |
| 2. Ruslan Salamun BA. | — | Sekretaris merangkap Anggota |
| 3. S. Poerwadi | — | Anggota |
| 4. Rusli SH. | — | „ |
| 5. Djoko Sumarjono SH. | — | „ |
| 6. S. Pringgodiredjo SH. | — | „ |
| 7. M.D. Djunaedi | — | „ |
| 8. E. Chandra | — | „ |
| 9. Sumardi | — | „ |
| 10. Husein Hadji SH. | — | „ |
| 11. Drs Muslim Jasim | — | „ |
| 12. Rosida Amir | — | „ |

Team ini sudah berusaha sedjauh mungkin agar tiap² kelompok penulis dapat menjusun buku ini dengan tjara² yang sama, akan tetapi disana-sini tetap dirasakan adanya tjara yang sedikit berbeda-beda, terutama mengenai gaja bahasa dan rempah-rempah tutur kata. Namun menurut hemat kami perbedaan-perbedaan tjara demikian tidak mengetjilkan arti buku ini dan tidak akan merintangikan para pembatja yang kami adjak mendjeladjah, berpariwisata melihat kedjadian-kedjadian berse-djarah yang penuh variasi. Dapat diibaratkan seperti kita melakukan perdjalananan djauh melalui lereng-lereng gunung dan lembah-lembah yang tanaman²nja disesuaikan dengan naik turunnja djalan.

Team mengutjapkan banjak terima kasih kepada Bapak² : Presiden, Ketua MPRS, Ketua DPR-GR, Menteri Penerangan, Menteri P & K dan Menteri Negara Penghubung antara Pemerintah dengan M.P.R.S./DPR-GR/D.P.A. yang telah berkenan menjampaikan „Kata Sambutan” berhubung dengan penerbitan buku ini.

Team mengutjapkan pula terimakasih kepada tokoh-tokoh masyarakat yang kami sebut diatas, kepada Museum Djakarta,

semua Departemen dan lain-lain instansi serta semua fihak yang telah memberikan bantuan hingga dapat diselesaikannya buku ini. Terutama kepada PN Balai Pustaka yang telah bersedia mentjetak serta menerbitkan buku ini kami mengutjapkan penghargaan dan terima kasih.

Harapan kami dengan terbitnja buku ¼ Abad Dewan Perwakilan Rakjat ini ialah mudah²an para pedjabat politisi, negarawan serta para Anggota Badan Legislatif baik dipusat maupun didaerah, para tjendikiawan, golongan-golongan masyarakat lainnja dapat mempeladjarinja untuk mendapatkan gambaran dan pengertian lebih mendalam mengenai praktek demokrasi di Indonesia. Kiranja buku ini dapat pula memudahkan para dosen, mahasiswa dan peladjar tingkat menengah didalam mengikuti perkembangan parlementaria kita.

Achirnja kami mengharapkan tegur sapa dari para pembatja untuk didjadikan tjermin guna mengadakan koreksi lebih lanjut serta perbaikan penulisan, bila kelak diadakan penerbitan ke-II.

Mudah²an buku ini akan mentjapai tudjuannja dan berguna bagi para pembatja

Djakarta, 29 Agustus

TANPA SABDA WIWARANING BUMI
0 7 9 1

Ketua

Team Penjusun Sedjarah
1/4 Abad DPR,

Sri Hardiman SH.

Sek. Djen. DPR-GR.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Buku Sedjarah Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakjat ini, merupakan dokumentasi dari sebahagian sedjarah politik Indonesia dan sedjarah pertumbuhan demokrasi dinegara kita. Buku-buku dokumentasi jang demikian, terasa masih sangat kurang kita miliki, oleh karenanja penerbitan buku ini tentu sangat berharga.

Dengan mempeladjar kembali fakta² objektif jang ditjoba dituliskan kembali dalam buku ini, maka kita sekarang akan dapat pula meneliti setjara djudjur segi² positif maupun segi-segi negatif dalam pertumbuhan Dewan Perwakilan Rakjat kita.

Waktu seperempat abad, pantas dianggap sebagai djangka waktu jang tjukup lama untuk mengadakan penelitian-penelitian tadi, dan untuk memberikan kesempatan kepada kita guna melakukan penilaian kembali setjara lebih djudjur lepas dari perasaan² subjektif jang tjenderung melihat pada kita masing-masing.

Renungan kembali mengenai sedjarah Dewan Perwakilan Rakjat kita lebih-lebih mempunjai arti jang penting, sebab, Insja Allah, kurang dari setahun lagi kita akan melaksanakan Pemilihan Umum.

Mudah-mudahan, dengan terbitnja buku ini, kita akan dapat mengambil segala peladjaran jang berguna : jang baik kita pupuk terus, jang kurang baik kita tinggalkan. Dengan demikian, kita

akan dapat lebih dewasa dan lebih bidjaksana dalam melaksanakan demokrasi berdasarkan Pantja Sila.

Dengan ini, saya ikut mengantarkan buku ini kepada masyarakat Indonesia.

Djakarta, 29 Agustus 1970
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SOEHARTO
DJENDERAL TNI

DJENDEBAL ABDUL HARIS NASUTION
KETUA MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT
SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

MENJAMBUAT SEPEREMPAT ABAD DPR - RI.

Assalamu'alaikum W. W.



1. Dalam menjambuat seperempat abad DPR-RI perkenankanlah pertama-tama saja utjapkan selamat kepada DPR-GR atas Ultah ke-25 DPR-RI., dan kedua mendo'akan semoga dengan berkat lindungan Allah SWT, DPR-RI, terutama sesudah pemilu nanti, semakin sanggup/mampu melakukan peranan konstitusi-onilnja :

- (1) perundang-undangan,
- (2) anggaran belandja negara dan
- (3) pengawasan terhadap pemerintah.

Dan semoga semakin sanggup/mampu pula dalam tekad perdjungan Orde Baru : „Melaksanakan UUD '45 setjara murni dan konsekwen”.

„Dalam rangka masa pembangunan ini, untuk melaksanakan tudjuan kemerdekaan, sebagaimana ditentukan oleh Pembukaan UUD '45 : „Memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa”, maka menondjollah posisi/peranan DPR seperti didjelaskan oleh UUD '45 :

„Betapa tjaranja Rakjat — sebagai bangsa — akan hidup dan dari mana didapatnja belandja buat hidup, harus ditetapkan oleh Rakjat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilannja. Rakjat menentukan nasibnja sendiri, karena itu djuga tjara hidupnja.

Pasal 23 menjatakan, bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belandja, kedudukan DPR lebih kuat daripada kedudukan Pemerintah”.

2. Kedua kalinja, perkenankanlah saja dalam sambutan ini mengingatkan kepada tekad kita bersama untuk menegakkan Demokrasi Pantjasila, dalam sistim politik kita jang oleh UUD disebut sistim negara „berdasar atas kedaulatan rakjat dan berdasar atas permusjawaratan/perwakilan.”

UUD '45 bersifat kekeluargaan, sebagaimana dinjatakan dalam pendjelasannja, jang mana beda dari sifat liberal dan totaliter, dan jang mana diartikan harmoni antara pribadi dengan keseluruhan.

Sehubungan dengan itu pula, maka TAP XXXVII MPRS menegaskan :

„Bahwa prinsip musjawarah untuk mufakat dalam kemurniannja pada hakikatnja adalah tata-tjara chas dalam pelaksanaan Sila Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan untuk merumuskan dan/atau memutuskan sesuatu hal dengan berdasarkan pada kebulatan kehendak Rakjat dan bukan pada kehendak pimpinan se-mata² setjara berselimut.

Bahwa dalam masjarakat dan negara Indonesia modern jang bersifat Bhinneka Tunggal Eka dan jang sedang berkembang pesat kearah modernisasi disegala bidang tidaklah mungkin untuk selalu mentrapkan prinsip musjawarah untuk mufakat setjara berhasil dalam segala hal dan dalam segala keadaan tanpa membawa akibat² jang membahayakan bagi kelandjutan hidupnja prinsip Kedaulatan Rakjat itu sendiri dan bagi kelandjutan dan kelantjaran kegiatan²/usaha² negara jang mengabdikan pada kepentingan umum demi terpenuhinja Amanat Penderitaan Rakjat dalam perwujudan masjarakat adil dan makmur dan oleh karena itu disamping prinsip musjawarah untuk mufakat perlu bahkan merupakan suatu keharusan dilaksanakannja tjara² mengambil putusan berdasarkan persetudjuan suara terbanjak sesuai ketentuan UUD 1945 jang harus dilaksanakan setjara murni dan konsekwen”.

3. Sebagai penutup sambutan, perkenankanlah saja sampaikan penghargaan atas usaha penerbitan ini, berisi hasil-hasil DPR-RI selama 25 tahun, sehingga sekaligus merupakan pula pelaporan menjeluruh kepada Rakjat.

Djakarta, Agustus 1970.

Wassalam,

A.H. NASUTION.

**SAMBUTAN KETUA DPRGE. H.A. SJAICHU
UNTUK
PENERBITAN BUKU „SEPEREMPAT ABAD DPR-RI”**

Assalamualaikum War.Wab.

Para Pambatja jang terhormat,



Sjukur Alhamdulillah dan terima kasih kami sampaikan kepada semua fihak jang telah ikut serta mentjurahan tenaga, fikiran dan bantuan dalam bentuk apapun djuga terhadap penerbitan Buku ” Seperempat Abad DPR-RI” ini.

Kepada Team Penjusun Buku ini jang telah bekerdja dan berusaha dengan susah pajah serta dengan segala daja mampu jang ada padanja, jang telah menggunakan waktu dan mentjurahan tenaga, fikiran dan kebaktiannja, maka sudah sewadjarnja kami menjampaiakan penghargaan dan terima kasih.

Buku ini diberi nama „SEPEREMPAT ABAD DPR-RI”, nama ini serasi dengan 25 tahun usia Republik Indonesia. Maka untuk dapat lebih mengenal dan mengetahui terhadap pertumbuhan dan perkembangan DPR-RI, kiranja buku ini dapat memberi sumbangan bagi para pambatjanja, terutama sekali bagi jang mau mengenal dan mengetahui DPR-RI selama seperempat abad.

Memang sebelum diterbitkan buku ini, telah ada djuga buku² jang mengenai perkembangan DPR-RI, akan tetapi kebanyakan dari buku² itu ada jang hanja mengenai DPR 5 tahun, ada djuga hanja jang 20 tahun, bahkan ada pula jang hanja mentjeritakan sekelumit sadja, sehingga tidak terdapat kelengkapannya. Disamping itu ada jang menulis dan menjusun tentang DPR-RI itu setjara subjectif sekali, menurut pandangan katja mata politiknya.

Buku Seperempat Abad DPR-RI jang disadjikan kepada para pambatja sekarang ini, setelah kami mambatja dan meneliti lebih banjak objectifnja, baik dalam penjusunannja, maupun dalam pengambilan bahan²nja. Selain dari pada itu Team Para

Penjusunnja sebagian besar terdiri dari tenaga² jang mengikutu dan menghajati pertumbuhan dan perkembangan DPR-RI selama seperempat abad itu, dengan ditambah beberapa tenaga jang mengerti dan menguasai bidang ini.

Oleh Team Penjusun buku ini telah berusaha dengan segala daja mampu jang ada untuk mengumpulkan bahan² jang ada seobjectif mungkin berdasarkan facta dan data tentang pertumbuhan dan perkembangan DPR-RI selama seperempat abad itu.

Namun demikian, sebagai manusia jang tidak luput dari sifat² manusia pelupa, chilaf dan alpa, maka kalau disana-sini andaikata terdapat kekurangan² atau ketidak sempurnanja dalam penjusunan buku ini, kiranja dapat dimengerti dan difahaminja.

Menurut hemat kami buku ini sangat bermanfaat dan besar artinja bagi sedjarah pertumbuhan dan perkembangan DPR-RI selama 25 tahun,djuga mempunjai makna jang penting bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia, baik untuk masa kini maupun untuk masa mendatang.

Achirnja dalam kesempatan jang baik ini kami menjampai-kan utjapan terima kasih jang tiada berhingga kepada Presiden R.I., Ketua MPRS, Menteri Penerangan, Menteri P dan K dan Menteri Penghubung MPR/DPR/DPA jang telah berkenan memberikan kata sambutan pada penerbitan buku ini.

Djuga kepada para penjumbang bahan² dan fikiran serta bantuan² dalam wujud apapun dan Penerbit Balai Pustaka, kesemuanja ini kami menjampai-kan terima kasih banjak.

Semoga Buku „SEPEREMPAT ABAD DPR-RI” ini bermanfaat dan berguna kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Mudah²an Tuhan Jang Maha Esa selalu melimpahkan Rachmat dan Kurnia, Hidajah dan Taufiq-Nja kepada kita semua. Amien !

Sekian dan terima kasih !

Wassalamualaikum War.Wab.-

Djakarta, 29 Agustus 1970.

Ketua DPRGR,

H.A. SJAICHU.-

**SEPATAH KATA SAMBUTAN
MENTERI PENERANGAN R.I.**

untuk Penerbitan Buku

SEPEREMPAT ABAD DPR — R.I.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh,



Per-tama² saja mengutjapkan selamat serta menjambut gembira terhadap kegiatan maupun hasil baik jang telah terwujud, jaitu dengan diterbitkannja buku SEPEREMPAT ABAD DPR — R.I.

Dari segi dokumenter saja melihat manfaat jang amat besar dari penerbitan ini, dimana kita semua dapat memperoleh data sedjarah mengenai perkembangan lembaga perwakilan rakjat di tanah air selama seperempat abad.

Dengan tjatatan-tjatatan dokumenter-dokumenter tersebut dapatlah kita mengkadji serta mempeladjadi perkembangan pengetrapan tata kehidupan demokrasi dinegara kita. Kita mengetahui bahwa warisan atau pikiran kita mempunyai tjorak serta watak-watak jang berubah ragamnja sesuai dengan perubahan-perubahan kondisi djamannja. Kita mengenal banjak ketentuan-ketentuan dan peristiwa-peristiwa jang setjara tersirat menggambarkan tipisnja arti demokrasi didjaman lampau itu. Tetapi sementara itu kita tetap mengenal adanja pemilihan-pemilihan langsung oleh rakjat terhadap sesama rakjat, entah untuk kedudukan lurah, pesirah ataupun kedudukan pemimpin rakjat jang lain.

Alhamdulillah, bahwa dengan tertjapainja kemerdekaan Bangsa Indonesia, kita telah dapat meletakkan suatu landasan jang kokoh tentang alam fikiran demokrasi didalam kita melakukan serta mengisi kehidupan merdeka, jaitu seperti apa jang setjara pokok telah tertuang didalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Walaupun demikian kita tahu bahwa didalam pengembangan landasan pokok demokrasi setelah alam kemerdekaan ini telah pula mengalami pengetrapan-pengetrapan jang menjimpang dari makna demokrasi itu sendiri.

Banyak faktor yang dapat dikemukakan untuk membenarkan atau menganggap benar "kesalahan-kesalahan" mengenai demokrasi kita tersebut, tetapi yang jelas bahwa pemikiran yang lebih djernih serta hati yang lebih lapang turun tangan sebagai salah satu aspirasi Orde-Baru untuk setahap demi setahap mengembalikan pengertian demokrasi itu kedalam bentuk serta jiwa yang sebenarnja jaitu dengan apa yang kita kenal sebagai Demokrasi Pantjasila.

Dengan melampaui masa dua puluh lima tahun kemerdekaan yang penuh dengan pengalaman ini kita mendapat bekal untuk menempuh masa tak terbatas yang akan datang, dan dengan pengalaman-pengalaman itu pula kita menjempurnakan arti hakiikat serta pelaksanaan Demokrasi Pantja Sila sebagai salah satu sarana mentjiptakan masyarakat Pantja Sila yang sedjahtera lahir maupun bathin.

Pada kesimpulannja, saja benar-benar menganggap bahwa penyerbitan ini sungguh dapat diambil gunanja oleh kita sekarang maupun bagi generasi yang akan datang, didalam rangka memelihara kelanggengan hidup kita sebagai Bangsa yang merdeka.

Semoga buku ini dapat pula lengkap-melengkapi dengan buku-buku dokumentasi sedjarah Bangsa Indonesia yang telah ada maupun yang akan ada kemudian.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh,

Djakarta, 29 Djuli 1970.

MENTERI PENERANGAN R.I.

ttd.

(B O E D I A R D J O)

SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN UNTUK PENERBITAN „BUKU SEPEREMPAT ABAD DPR-RI”

Saudara² sebangsa dan setanah air,



Bersjukurlah kita kehadiran Tuhan Jang Maha Esa jang telah melimpahkan rachmat dan karunia-Nja, sehingga kita sekalian dapat memperingati seperempat abad kemerdekaan negara kita dan sekaligus memperingati seperempat abad usia Badan Legislatif di Negara Republik Indonesia jang disebut Dewan Perwakilan Rakjat (D.P.R.).

Lahirnja DPR-RI sebagai Lembaga Demokrasi dinegara kita adalah merupakan perwujudan dari tjita demokrasi salah satu Sila dari Pantjasila, falsafah dan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Lembaga Demokrasi ini dinegara kita adalah mutlak adanja. Tetapi jang lebih penting daripada itu ialah bahwa Lembaga tersebut harus benar-benar melaksanakan fungsinja sebagai alat pelaksanaan tjita Demokrasi. Apabila tidak demikian, maka dia mengingkari fungsinja sendiri dan adanja dinegara kita adalah sebagai sesuatu jang tidak ada manfaatnja sama sekali.

Kita teringat pada pengalaman beberapa tahun jang lalu, pada zaman djajanja Orde Lama dimana roda demokrasi tidak berdjalan sebagaimana mestinja, melainkan terhambat atau dihambat dan malah didjuruskan ke arah diktatorisme dengan dalih „demokrasi terpimpin” jang sebenarnja „demokrasi semu” belaka.

Bahagiaalah bagi Bangsa Indonesia, jang atas perkenan Tuhan Jang Maha Esa telah timbul kekuatan Orde Baru, telah bangkit Angkatan 66 jang telah berhasil mendjalankan kembali roda demokrasi-kembali kerel Pantjasila dan U.U.D.'45 setjara murni.

Sehubungan dengan ini, Pemerintah Orde Baru cq Departemen Perguruan Tinggi (pada waktu itu) dengan Keputusan De-

puty Menteri Perguruan Tinggi No. 1. tahun 1966 tanggal 12 April 1966 mengembalikan kebebasan ilmiah dan kebebasan mimbar di Perguruan-perguruan Tinggi di Indonesia. Tindakan ini adalah sangat penting, mengingat bahwa Perguruan Tinggi adalah pusat kebudayaan sumber dan benteng demokrasi serta agent of modernization and development. Ternyata Keputusan itu meniupkan angin baru dan menggugah masyarakat untuk menjatakan setjara bebas tanpa kechawatiran akan diambil tindakan. Hak azasi manusia telah mulai diperhatikan. Berdasarkan keputusan itu pulalah Universitas Indonesia pada bulan Mei 1966 telah mengadakan simposium dengan djudul: „Angkatan 66 — Mendjeladjah tracee baru” jang merupakan test-case jang berhasil karena dalam simposium ini para tjendekiawan telah mengumandangkan pendapatnja dengan bebas dan dengan penuh tanggung djawab.

Saudara-saudara sekalian jang terhormat,

Demikianlah gambaran mengenai timbul tenggelamnja pelaksanaan tjita demokrasi dinegara kita ini. Didalam buku „Seperempat abad DPR-RI” inipun dapat kiranja kita latjak dje-djak demokrasi sedjak awal sampai pada saat sekarang.

Achirnja melalui kesempatan ini, kita sama-sama berharap, semoga DPR-RI benar-benar dapat menjalurkan aspirasi rakyat Indonesia dan dapat memenuhi fungsinja sebagai alat demokrasi.

Sekian dan terima kasih.

Djakarta Agustus 1970

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

t.t.d.

(M A S H U R I)

SAMBUTAN MENTERI NEGARA

PENGHUBUNG ANTARA PEMERINTAH DENGAN MPRS/DPR—GR/DPA H.M.S. MINTAREDJA S.H.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.



Saja sambut dengan gembira iniatief DPR-RI dalam menjongsong seperempat abat Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan menerbitkan buku jang isinja akan meliputi sedjarah DPR-RI selama seperempat abad itu.

Saja katakan, bahwa saja bergembira, karena dengan buku sematjam itu akan tertulislah dalam sedjarah kehidupan bangsa Indonesia semua perkembangan/kegiatan kehidupan parlementarisme selama seperempat abad, jang pula nanti-nja mempunjai nilai jang sangat berharga bagi generasi-generasi jang akan memegang pimpinan negara dan bangsa. Lebih-lebih lagi sewaktu Kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, belumlah terbajang pada kita, bagaimana tentuk dan praktknja nanti dalam menegakkan demokrasi melalui parlemen, karena pada waktu itu, kita sedikit banjknja masih dipengaruhi oleh alam fikiran demokrasi Barat.

Memang djalan menudju bentuk demokrasi jang sesuai dengan way of life bangsa Indonesia harus melalui beberapa proses jang kita semuanya telah mengalaminja, baik segi positifnja maupun segi-segi kegagalannja. Proses itu kadang-kadang memakan waktu banjak jang djika dibandingkan dalam usaha² nation dan characterbuilding adalah relatif tak seberapa. Dalam menegakkan demokrasi semendjak Proklamasi, kitapun telah mempunjai beberapa Undang-undang Dasar seperti Undang-undang Dasar RIS, Undang-undang Dasar Sementara 1950, jang sedikit banjknja mempunjai pengaruhnja dalam pertumbuhan demokrasi. Selama periode ini tetap dipertahankan terpisahnja dua lembaga ialah lembaga Eksekutief dan Lembaga Legislatief. di-

sertai hak kontrol oleh badan Legislatief terhadap badan Eksekutief.

Akan tetapi semendjak Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 jang membubarkan DPR pada waktu itu dan dinjatakan kembalinja berlakunja Undang-undang Dasar 1945, terdjadilah sebenarnja dalam kehidupan berparlemen dan berdemokrasi suatu set-back, jang luar biasa, dimana garis pemisah antara Badan Legislatief dan Badan Eksekutief ditiadakan, karena berfalsafah pada **DEMOKRASI TERPIMPIN**. Dalam masa inipun dibentuk suatu lembaga Menteri Penghubung jang menghubungi lembaga legislatief dalam alam Demokrasi terpimpin dengan Pemerintah, sehingga kadang-kadang apa jang diinginkan oleh pemerintah sudah mendjadi suatu sikap dari Badan Legislatief.

Fungsi DPR sebagai "nebengeordnet" terhadap Badan Eksekutief mulai pudar batas-batasnja. Akan tetapi, sjukur Alhamdulillah, hal demikian ini telah berlalu, "Orde Lama" telah hantjur dan timbullah "Orde Baru" jang menginginkan demokrasi dan falsafah seperti djelas tertjantum dalam Undang-undang Dasar 1945. Pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 telah dimulai dan DPR-RI telah memulai lembaran barunja, dimana telah dijelaskan oleh Presiden Soeharto, bahwa Anggota-anggota DPR tidak akan dianggap olehnja sebagai "YESMEN", bahkan telah dengan tandas diterangkan oleh Presiden Soeharto, bahwa dalam rangka pembijtaraan RAPBN kedudukan DPR adalah lebih penting dan sama sekali tidak "UNTERGEORDNET" akan tetapi sebaliknya "NEBENGORDNET". Oleh karena itu agar kerdjasama antara Badan Legislatief dan Badan Eksekutief akan lebih serasi, maka sewaktu pembentukan kabinet Pembangunan dalam tahun 1968 diangkatlah lagi oleh Presiden Soeharto, seorang Menteri Penghubung DPR, MPRS dan DPA, agar pengertian jang timbal balik antara Eksekutief dan Legislatief dapat dibina berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Bukan sadja pengertian, akan tetapi kerdjasama jang erat sambil menegakkan DEMOKRASI berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 jang berfalsafah **PANTJASILA**, jaitu Demokrasi Pantjasila.

Sekalipun DPR sekarang sudah mendjalankan Demokrasi Pantjasila disertai segala hak dan wewenangnja terutama dibidang Kontrol terhadap Badan Eksekutief, namun harapan saja kiranja tak berkelebihan djika disini saja ber-"angan-angan", bahwa prosedur dalam pengesjahan R.U.U. masih dapat diperpendek.

Selama saja bertugas sebagai Menteri Penghubung sedikit demi sedikit kerdja sama telah dapat dibina dan telah atjapkali apa jang masih merupakan Crucial points lambat laun demi pengertian, telah mendjadi konsensus bersama antara pemerintah dan DPR.

Semoga Allah S.W.T. tetap melindungi para Anggota DPR dalam menjalankan tugasnja dan dalam menegakkan Demokrasi Pantjasila.

Menteri Negara

ttd.

H.M.S. MINTAREDJA SH.

B A B I

KOMITE NASIONAL PUSAT DAN BADAN PEKERDJA KOMITE NASIONAL PUSAT

§ 1. PEMBENTUKAN.

A. Komite Nasional Pusat.

Sedjarah Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia dimulai pada hari² pertama kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya.

Proklamasi dibatjarkan oleh Ir. Sukarno, didampingi oleh Drs. Moh. Hatta, jaitu masing² Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan menambah keanggotaan panitia tersebut dengan 6 orang. Panitia Persiapan Kemerdekaan itu jang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 (10 hari sebelum Proklamasi Kemerdekaan), semula terdiri dari 21 tokoh² perdjuaan nasional dan/atau pemuka² masjarakat dari berbagai daerah/golongan sebagai berikut :

1. Ir. Sukarno (Ketua),
2. Drs. Moh. Hatta (Wk. Ketua),
3. K.R.T. dr. Radjiman Wedyodiningrat,
4. Prof Mr. Dr. Supomo,
5. Pangeran Purbojo,
6. K.H. Wachid Hasjim,
7. dr. Moh. Amir,
8. Mr. Teuku Moh. Hasan,
9. Mr. J. Latuharhary,
10. Mr. I Gusti Ketut Pudje,
11. A.A. Hamidan,
12. Oto Iskandar di Nata,
13. Abdul Kadir,
14. R. Pardji Suroso,
15. M. Sutardjo Kartohadikusumo,
16. Pangeran Surjohamidjojo,

17. Ki Bagus Hadikusumo,
18. Mr. Abdul Abbas,
19. Dr. G.S.S. Ratulangi,
20. Andi Pangeran dan
21. Drs. Yap Tjwan Bing.

6 orang anggota yang ditambahkan ialah :

1. R.A.A. Wiranata Kusumah, 4. Sajuti Melik,
2. Ki Hadjar Dewantoro, 5. Mr. Iwa Kusuma Sumantri
3. Mr. Kasman Singodimedjo, 6. Mr. A. Subardjo.

Pada hari tersebut Panitia Persiapan Kemerdekaan menetapkan Undang² Dasar Republik Indonesia (Undang² Dasar 1945), memilih Ir. Sukarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, serta menetapkan bahwa untuk sementara Presiden dibantu oleh Komite Nasional.

Penetapan yang ketiga itu dimuat setjara lebih lengkap dalam Pasal IV Aturan Peralihan Undang² Dasar, dengan kata² sebagai berikut :

„Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang² Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional Pusat.” Pasal IV Aturan Peralihan inilah merupakan dasar hukum bagi pembentukan Komite Nasional Pusat, yang disebut djuga Komite Nasional Indonesia Pusat dan kemudian lebih terkenal dengan nama singkatnja K.N.P. atau KNIP. (Dibawah ini selandjutnja akan digunakan singkatan K.N.P.).

Pada hari berikutnya, tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan melanjutkan usahanya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dengan membitjarakan dan menetapkan hal² yang bersangkutan dengan struktur Negara menurut Undang² Dasar yang baru ditetapkannya itu.

Mengenai daerah Negara Republik Indonesia ditetapkan antara lain :

1. Untuk sementara Daerah Negara dibagi dalam 8 Propinsi yang masing² dikepalai oleh seorang Gubernur, jaitu propinsi² :
 - 1) Djawa Barat,
 - 2) Djawa Tengah,
 - 3) Djawa Timur,
 - 4) Sumatera,

- 5) Borneo,
 - 6) Sulawesi ,
 - 7) Maluku dan
 - 8) Sunda Ketjil.
2. Daerah Propinsi dibagi dalam Keresidenan jang dikepalai oleh seorang Residen.
 3. Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah.

Adapun pemerintahan Republik Indonesia terdiri dari 12 Departemen sebagai berikut :

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| 1) Dalam Negeri, | 7) Pengadjaran, Pendidikan dan |
| 2) Luar Negeri, | Kebudajaan, |
| 3) Kehakiman, | 8) Sosial, |
| 4) Keuangan, | 9) Pertahanan, |
| 5) Kemakmuran, | 10) Penerangan, |
| 6) Kesehatan, | 11) Perhubungan dan |
| | 12) Pekerdjaan Umum. |

Selanjutnja ditetapkan personalia aparatur Negara di Pusat dan Daerah² sebagai berikut :

Menteri² :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Dalam Negeri | : R.A.A. Wiranata Kusumah, |
| 2. Luar Negeri | : Mr. A. Subardjo, |
| 3. Kehakiman | : Prof. Mr. Dr. Supomo, |
| 4. Keuangan | : dr. Samsi (kemudian diganti Mr. A.A. Maramis), |
| 5. Kemakmuran | : Ir. R.P. Surachman, |
| 6. Kesehatan | : dr. Buntaran Martoatmodjo, |
| 7. P. P. K. | : Ki Hadjar Dewantoro, |
| 8. Sosial | : Mr. Iwa Kusuma Sumantri, |
| 9. Pertahanan | : (Suprijadi, diganti Suljodikusumo), |
| 10. Penerangan | : Mr. Amir Sjarifudin, |
| 11. Perhubungan | : R. Abikusno Tjokrosujoso, |
| 12. Pekerdjaan Umum | : idem. |

Menteri² Negara :

dr. Amir,
K.H. Wachid Hasjim,
Mr. Sartono,
Mr. A.A. Maramis dan
Oto Iskandar di Nata

Ketua Mahkamah Agung : Mr. Dr. Kusumah Atmadja,
Djaksa Agung : Mr. Gatot,
Sekretaris Negara : Mr. A.G. Pringgodigdo,
Djurubitjara Negara : Sukardjo Wirjopranoto.

Gubernur² :

Djawa Barat : M. Sutardjo Kartohadikusumo,
Djawa Tengah : R.P. Suroso,
Djawa Tmur : R.T.A. Surjo,
Sumatera : Mr. Teuku Moh. Hasan,
Borneo : Ir. Pangeran Moh. Noor,
Sulawesi : Dr. G.S.S. Ratulangi,
Sunda Ketjil : Mr. I Gusti Ktut Pudje,
Maluku : Mr. J. Latuharhary.

Demikian pula ditundjuk Residen².

Achirnja Panitia Kemerdekaan (tanggal 22 Agustus 1945) menetapkan pokok² mengenai Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia dan Badan Keamanan.

Mengenai Komite Nasional ditetapkan antara lain sbb :

1. Komite Nasional dibentuk diseluruh Indonesia dengan pusatnja di Djakarta,
2. Komite Nasional adalah pendjelmaan kebulatan tudjuan dan tjita² Bangsa Indonesia untuk menjelenggarakan kemerdekaan Indonesia jang berdasarkan kedaulatan rakjat,
3. Usaha Komite Nasional ialah :
 - a. Menjatakan kemauan rakjat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa jang merdeka,
 - b. Mempersatukan rakjat dari segala lapisan dan djabatan, supaya terpadu pada segala tempat diseluruh Indonesia persatuan kebangsaan jang bulat dan erat,
 - c. Membantu menentramkan rakjat dan turut mendjaga keselamatan umum,
 - d. Membantu pemimpin dalam menjelenggarakan tjita² Bangsa Indonesia dan didaerah membantu Pemerintah Daerah untuk kesedjahteraan umum.
4. Komite Nasional Pusat memimpin dan memberi petundjuk kepada Komite² Nasional Daerah.

Mengenai Partai Nasional Indonesia antara lain ditetapkan :

1. Tudjuan Partai Nasional Indonesia ialah : Negara Republik Indonesia jang berdaulat, adil dan makmur berdasarkan ke-
daulatan rakjat ;
2. Usaha untuk mentjapai tudjuan itu ialah :
 - a. Memperkuat persatuan Bangsa dan Negara,
 - b. Memperbesar rasa tjinta, setia dan bakti kepada Tanah Air ;
 - c. Mengichtiarkan program ekonomi dan sosial : Pereko-
nomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
azas gotong rojong, dsb.

Adapun pokok² mengenai Badan Keamanan Rakjat adalah sebagai berikut :

1. Sebagai ibu organisasi jang harus mengerdjakan dan me-
melihara keselamatan masjarakat, maka didirikan satu ba-
dan jang diberi nama „Badan Penolong Keluarga Korban
Perang”.
2. Memelihara keselamatan masjarakat dan keamanan itu ada-
lah satu, karena itu didalam Badan Penolong Keluarga Kor-
ban Perang diadakan satu bagian jang bernama : „Badan
Keamanan Rakjat”.
3. Jang mengepalai Badan Keamanan Rakjat harus mendjalan-
kan pekerdjaannja dengan sukarela.
4. Badan Keamanan Rakjat harus memelihara keamanan ber-
sama² dengan Djawatan² Negeri jang bersangkutan.
5. Badan Penolong Keluarga Korban Perang dan Badan Ke-
amanan Rakjat ada dibawah pengawasan dan pimpinan
Komite Nasional.

Setelah menetapkan pokok² mengenai Komite Nasional, Par-
tai Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Rakjat itu, Panitia
Kemerdekaan menganggap telah menjelesaikan tugasnja dan
membubarkan diri.

Njatalah dari ketentuan² jang ditetapkan oleh Panitia Ke-
merdekaan itu, bahwa Komite Nasional Pusat merupakan pem-
bantu Presiden dan Komite Nasional Daerah membantu Peme-
rintah Daerah. Pada permulaan Revolusi, pada tanggal 18
Agustus dan hari² berikutnya Pemerintah Pusat maupun Pe-
merintah Daerah baru sadja dibentuk dan roda pemerintahan

belum berdjalan. Maka tugas Komite Nasional selaku pembantu badan eksekutif, seperti dirumuskan oleh Panitia Kemerdekaan sesuai dengan keadaan pada waktu itu pada pokoknja ialah :

Menjatakan kemauan rakjat untuk hidup sebagai bangsa merdeka, mempersatukan rakjat serta membantu penjelenggaraan tjita² kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Sementara itu oleh Presiden dan Wakil Presiden diadakan usaha² untuk membentuk Komite Nasional Pusat bertempat di Gambir Selatan 10 pada tanggal 19 Agustus 1945 malam, jaitu ber-sama² dengan beberapa tokoh² masjarakat, diantaranya :

Mr. Sartono,	dr. Buntaran Martoatmodjo,
Suwirjo,	Mr. A.G. Pringgodigdo,
Oto Iskandar di Nata,	M. Sutardjo Kartohadikusumo,
Sukardjo Wirjopranoto,	dr. Tadjuluddin.

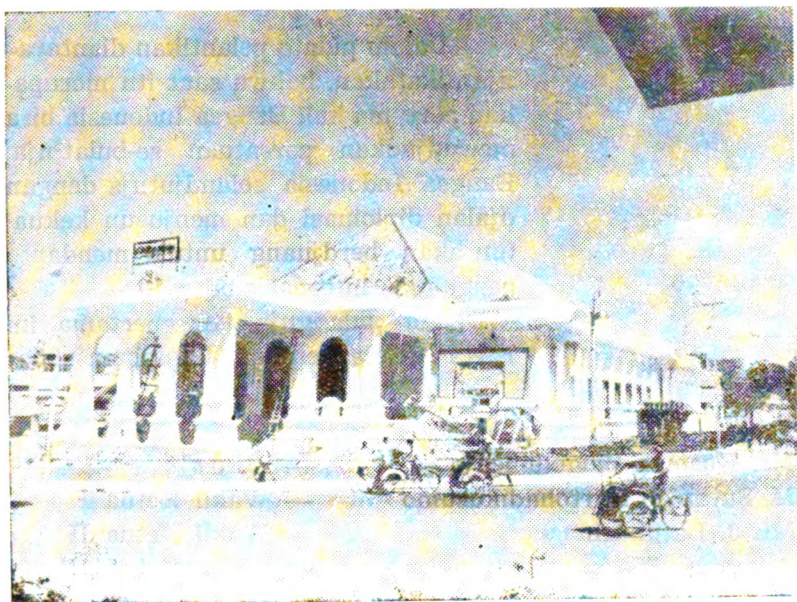
„Menjatakan kemauan rakjat untuk hidup sebagai bangsa golongan jang ada dalam masjarakat pada waktu itu. Djumlahnja diperkirakan lebih kurang 60 orang jang dapat ditambah dengan wakil² aliran dan golongan baru dalam masjarakat.

Maka terbentuklah pada hari² berikutnja. Komite Nasional Pusat jang pertama, terdiri dari pemuka² masjarakat dari berbagai golongan dan daerah, diantaranya djuga bekas anggota² Panitia Persiapan Kemerdekaan. (Sebagian bekas anggota² Panitia Persiapan Kemerdekaan itu ada pula jang telah ditinggalkan menjadi Menteri atau Kepala Daerah).

Dan dengan terbentuknja K.N.P. itu, maka bekas anggota² Panitia Persiapan Kemerdekaan, terutama mereka jang berasal dari Daerah², pulang ke-daerah² masing² untuk melaksanakan tugas membentuk Komite² Nasional Daerah, dengan mendapat mandat sebagai wakil² dari Komite Nasional Pusat.

Komite Nasional Pusat dilantik oleh Presiden di Gedung Kesenian Pasar Baru Djakarta, 12 hari setelah hari proklamasi, jaitu pada tanggal 29 Agustus 1945.

Peristiwa ini dipandang penting sekali. Maka diandjurkan agar diseluruh Indonesia dikibarkan bendera Sang Merah Putih dan tanggal 29 Agustus 1945 disambut sebagai Hari Nasional Indonesia.



Gedung Kesenian Pasar Baru tempat pelantikan dan Sidang Pertama Komite Nasional Pusat. KNP dilantik oleh Presiden Soekarno tanggal 29 Agustus 1945.

(Photo Humas DPR—GR)

Djakarta pada waktu itu masih dalam suasana kekuasaan Djepang, walaupun Djepang sudah kalah perang. Maka dalam rangka siap-siaga pada waktu itu diadakan pendjagaan serta pengawalan sebaik-baiknya oleh Barisan Pelopor yang kebanyakan bersenjata bambu runtjing.

Ketua Panitia atau yang disebut Ketua executive Mr. Kasman Singodimedjo memimpin sidang dan diantarnya menjatakan sebagai berikut :

„Setelah Presiden dan Wakil Presiden dipilih, kewadajiban² selanjutnya ialah mewujudkan kemerdekaan dan perjuang-an, supaya Republik Indonesia diakui dan dihormati oleh seluruh dunia. Diminta supaya seluruh Rakyat bersatu lahir dan bathin serta berdiri dibelakang Pemerintah.”

Setelah pidato pembukaan oleh Mr. Kasman Singodimedjo, Presiden melantik dengan resmi berdirinya Komite Nasional Pusat.



Dalam pidato pelantikan diantaranya dikatakan, bahwa saat itu merupakan pertama kali Bangsa Indonesia bisa mewujudkan persatuan se-bulat²nja. Bangsa Indonesia selanjutnja dengan djalan diplomasi dan menjusun kekuatan akan berdjuang untuk mendapat pengakuan internasional.

Dalam sidangnja jang pertama ini K.N.P. telah menjusun Pimpinan sbb. :

Mr. Kasman Singodimedjo	— Ketua
M. Sutardjo Kartohadikusumo	— Wakil Ketua I
Mr. J. Latuharhary	— Wakil Ketua II
Adam Malik	— Wakil Ketua III.

Keputusan² lainnja jang diambil dalam sidang tersebut ialah: Djandji Anggota K.N.P., Mosi Rakjat Indonesia untuk mempertahankan serta menjempurnakan kemerdekaan Indonesia dan Maklumat tentang kewajiban Rakjat Indonesia untuk menjokong Pemerintah Negara Republik Indonesia.

B. Badan Pekerdja K.N.P.

Selama lebih dari satu bulan Komite Nasional Pusat melaksanakan tugasnja dengan melakukan berbagai tindakan² dibidang eksekutif selaku pembantu Presiden, jang berdasarkan pasal IV Peraturan Peralihan U.U. Dasar 1945 memegang seluruh kekuasaan Negara untuk sementara waktu.

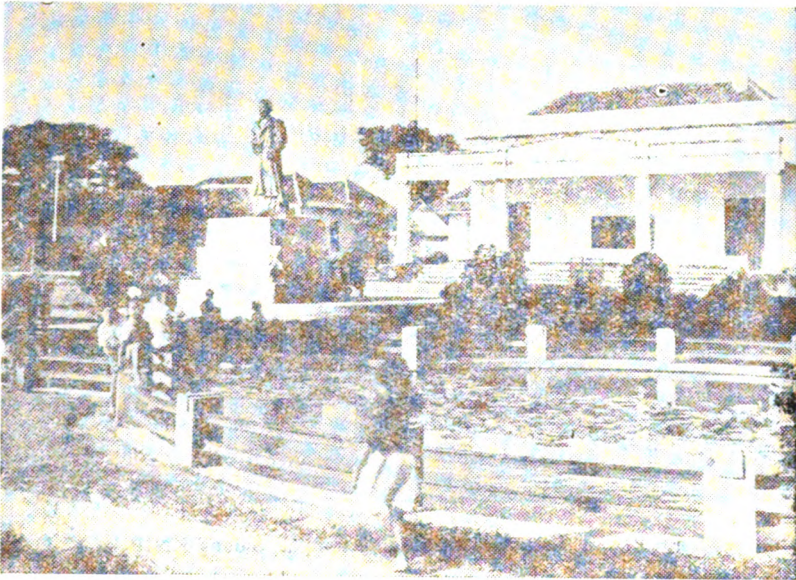
Keadaan demikian tidak memuaskan sementara golongan, jang kemudian dalam Sidang ke-II K.N.P. pada tanggal 16 - 17 Oktober 1945, mengusulkan agar diadakan perubahan mengenai pembagian kekuasaan dalam Negara.

Berhubung dengan usul itu lahirlah Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, jang menetapkan, sesuai dengan usul dari K.N.P. :

„Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat, dise-

rahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis² besar haluan Negara, serta menjetudjui, bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat se-hari² berhubungan dengan gentingnja keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih diantara mereka dan jang bertanggung-djawab kepada Komite Nasional Pusat”.

Berdasarkan ketentuan bagian kedua dalam Maklumat Wakil Presiden No. X itu pada tanggal 17 Oktober 1945 Komite Nasional Pusat membentuk sebuah Badan Pekerdja, jang kemudian dikenal sebagai Badan Pekerdja K.N.P. atau BP. KNIP, terdiri dari 15 orang, dengan St. Sjahrir dan Mr. Amir Sjarifuddin sebagai Ketua dan Wakil Ketua, serta Mr. Suwandi sebagai Penulis.



Gedung ini digunakan untuk Sidang² Badan Pekerdja K.N.P. dan Sekertariat BP. KNP. dari tahun 1947-1950. Sekarang dipakai sebagai gedung DPRD Daerah Istimewa Jogjakarta.

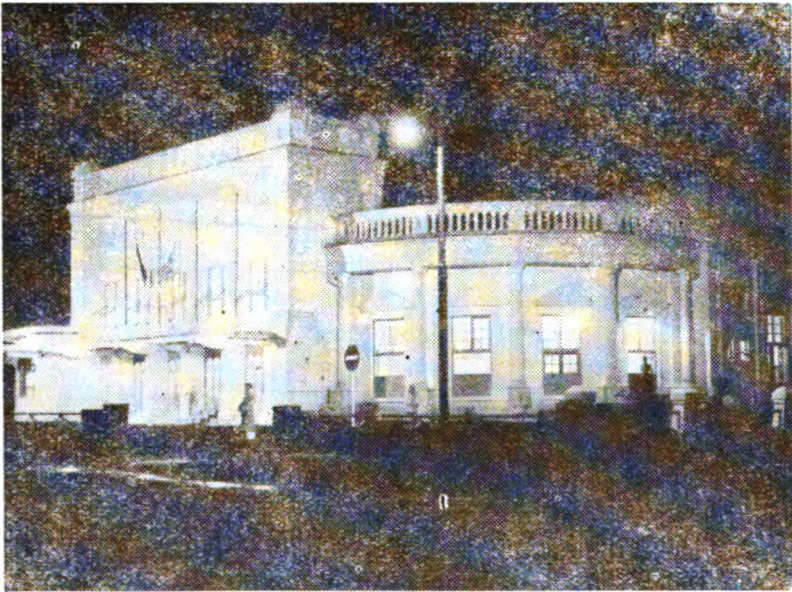
(Photo Deppen)

Badan Pekerdja itulah jang selandjutnja se-hari² melaksanakan tugas Komite Nasional Pusat :

1. bersama-sama dengan Presiden membentuk undang²,
2. ikut menetapkan garis² besar haluan Negara,

dengan memberikan pertanggung-jawab kepada Komite Nasional Pusat, jang sedjak itu hanjalah bersidang 4 kali jaitu :

1. Sidang ke-III pada tanggal 25 — 27 Nopember 1945 di Djakarta,
2. Sidang ke-IV pada tanggal² 28 Pebruari — 3 Maret 1946 di Solo,
3. Sidang ke-V pada tanggal² 25 Pebruari — 6 Maret 1947 di Malang,
4. Sidang ke-VI pada tanggal² 6 — 15 Desember 1949 di Jogjakarta.



Gedung Rakjat Indonesia di Malang tempat Sidang KNIP ke V. Dahulunya gedung ini adalah Societet. „Concordia” jang kemudian dirobah mendjadi gedung Sidang K.N.P. dan dapat menampung 1000 orang. Rapat² diadakan siang malam. Pada gedung ini djuga disediakan ruangan khusus untuk Pers, telegraf dan telepon.

(Photo Deppen)

Achirnja perlu kiranja dalam hubungan dengan pembentukan Komite Nasional Pusat dikemukakan, bahwa menurut Maklumat Pemerintah tgl. 31 Agustus 1945 maka „berhubung dengan ma-ha pentingnja kedudukan dan arti Komite Nasional Pusat untuk

memutuskan segala tindakan dan susunan persatuan rakjat, gerakan dan persiapan Partai Nasional Indonesia untuk sementara waktu ditunda dan segala aktiviteit harus ditjurahkan kedalam Komite Nasional Pusat". Bahkan kemudian pembentukan partai tunggal Partai Nasional Indonesia itu diurungkan sama sekali.

Dalam pada itu setelah Komite Nasional Pusat terbentuk, pada tanggal 25 September 1945 Presiden telah mengangkat Dewan Pertimbangan Agung, terdiri dari 11 orang anggota sebagai berikut : 1. dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, 2. Sjech Djamil Djambek, 3. H. Agus Salim, 4. K.R.M.T. Wurjaningrat, 5. K.H. Adnan, 6. R.M. Margono Djojohadikusumo, 7. Moch. Enoch, 8. dr. Latumeten, 9. Ir. Pangeran Moh. Noor, 10. dr. Sukiman Wirjosandjojo dan 11. Nj. Suwarni Pringgodigdo. Sebagai Ketua diangkat R.M. Margono Djojohadikusumo, jang setelah mengundurkan diri sebagai Ketua pada tanggal 6 Nopember 1945, diganti oleh R.T.A.A. Wiranata Kusumah pada tanggal 5 Desember 1945.

§ 2. KEANGGOTAAN.

A. Komite Nasional Pusat.

Anggota² Komite Nasional Pusat jang pertama ditundjuk oleh Presiden dan Wakil Presiden, setelah berkonsultasi dengan beberapa orang² terkemuka. Anggota² pertama itu adalah tokoh² masjarakat dari berbagai daerah dan golongan, termasuk pula bekas anggota² Panitia Persiapan Kemerdekaan.

Mengenai keanggotaan K.N.P. jang pertama itu, jang ditetapkan antara tanggal 19 dan tanggal 23 Agustus 1945, tidak terdapat sesuatu surat keputusan pengangkatan ataupun pengumuman resmi dalam Berita Republik Indonesia. Maka tidak dapat diketahui dengan pasti, siapa²-kah dan berapakah jumlah anggota² K.N.P. jang pertama itu.

Menurut bekas Wakil Presiden Dr. Moh. Hatta dalam bukunya „Sekitar Proklamasi”, jumlah anggota² K.N.P. jang pertama diperkirakan 60 orang. Akan tetapi dari sumber² tidak resmi, antara lain harian „Asia Raya” tanggal 25 Agustus 1945 dapat diketahui, bahwa jumlah anggota² K.N.P. pada tanggal 23 Agustus 1945 adalah 103 orang. Dan jumlah ini kemudian mengalami penambahan², dengan masuknja mendjadi anggota tokoh² masjarakat lain², jang dianggap perlu mendjadi anggota K.N.P. Mendjelang dan sewaktu diadakan Sidang Kedua K.N.P. pada tgl. 16—17 Oktober 1945 misalnja, ditetapkan mendjadi anggota² K.N.P. beberapa tokoh² jang langsung dipilih mendjadi anggota² Badan Pekerdja K.N.P. pula, diantaranya Mr. Sjafrudin Prawira Negara, Subadio Sastrosatomo, Tan Ling Djie. Dan ketika berlangsung Sidang ke-III K.N.P. (25 — 27 Nopember 1945) dikabarkan, bahwa pada hari pertama hadir 132 anggota : tetapi pada pemungutan suara mengenai mosikepertjaan kepada Kabinet-Sjahrir pada hari ketiga (sewaktu sebagian anggota telah meninggalkan Sidang) hanjalah 107 anggota jang memberikan suaranya, jaitu : 81 suara setuju, 8 tidak setuju dan 15 blanko.

Susunan keanggotaan K.N.P. jang pertama itu agaknja tidak memuaskan bagi partai² politik jang mulai berdiri sedjak akhir tahun 1945 maupun bagi Badan Pekerdja K.N.P. Pada tanggal 16 Pebruari 1946 Badan Pekerdja K.N.P. menjampaikan usul kepada Pemerintah, agar susunan K.N.P. (dan djuga Pemerin-

tah) diperbaiki „atas dasar seperti diusulkan dalam Mosi PNI dalam kongresnja tanggal 29, 30, 31 Djanuari 1946, putusan Konperensi PKI di Tjirebon tanggal 8 dan 9 Pebruari 1946 dan resolusi Masjumi dalam kongresnja tgl. 10 sampai 13 Pebruari 1946”.

Penambahan anggota² terdjadi djuga mendjelang Sidang ke-IV K.N.P. di Solo tanggal 28 Pebruari — 2 Maret 1946 : Menurut pengumuman Badan Pekerdja K.N.P. tentang Sidang ke-IV tersebut, jang dislarkan dalam surat² kabar antara tanggal 22 dan 26 Pebruari 1946, anggota² K.N.P. jang diundang untuk menghadiri Sidang berdjumlah 203 orang, ditambah mereka jang diminta mendjadi anggota dengan kawat (kalau mereka menerima permintaan mendjadi anggota) dan para Wakil Ketua K.N.I. Daerah Keresidenan, jang dianggap mendjadi anggota K.N.P. pula. Dalam rapat pertama tanggal 28 Pebruari 1946 ternjata hadir 203 anggota dan 15 wakil² dari K.N.I. Daerah, sedangkan dalam rapat pada tanggal 1 Maret 1946 ada 225 anggota jang mengeluarkan suaranya mengenai Laporan Badan Pekerdja politik luar negeri Pemerintah.

Dalam Sidang ke - IV K.N.P. itu timbul pula keinginan anggota² K.N.P. untuk membaharui susunan K.N.P., agar didapatkan susunan perwakilan jang lebih baik.

Akan tetapi K.N.P. tidak sampai menyelesaikan soal pembaharuan susunan ini, karena pada waktu akan diambil keputusan, sebagian besar dari anggota² telah meninggalkan rapat, jaitu pulang kedaerah masing² berhubungan dengan gentingnja keadaan di - daerah²nja.

Mengingat keinginan dalam Sidang ke - IV K.N.P. tersebut, maka pada taggal 29 April 1946 oleh Pemerintah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1946 tentang Pembaharuan K.N.P. Akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dibatalkan dan diganti dengan Undang² No. 12 tahun 1946 tentang Pembaharuan susunan K.N.P. jang dibuat oleh Pemerintah bersama dengan Badan Pekerdja K.N.P. dan berlaku mulai tanggal 8 Djuli 1946. Menurut Undang² itu (demikian pula menurut Peraturan Pemerintah No. 2/1946, dengan sedikit perbedaan) K.N.P. akan terdiri dari 200 anggota, 110 diantaranya ditetapkan menurut pemilihan Daerah², 60 merupakan wakil partai² politik dan 30 anggota ditundjuk oleh Presiden.

Untuk melaksanakan Undang² tersebut oleh Presiden telah diangkat Pusat Badan Pembaharuan Susunan K.N.P. dibawah pimpinan Supeno, jaitu dengan Penetapan Pemerintah tanggal 16-9-1945 No. 19/S.D./1946. Akan tetapi sebelum Undang² terlaksana, pada tanggal 29-12-1946 oleh Presiden ditetapkan Peraturan Presiden No. 6/1946 tentang Penjempurnaan K.N.P., dengan pertimbangan, bahwa perlu :

1. Diadakan penjempurnaan K.N.P. jang sesuai dengan aliran² politik serta golongan² besar dalam masjarakat ;
2. penjesuaian susunannja dengan pertanggungan-djawab Pemerintah kepada K.N.P.

Peraturan Presiden itu memberi hak kepada partai² politik besar dan golongan² besar, jang dianggap belum tjukup diwakili dalam K.N.P., untuk mengajukan tjalon², sedangkan Gubernur diberi wewenang untuk menetapkan wakil² Daerah, ber-sama² dengan badan² perdjuaan politik didaerahnja. Dengan peraturan itu K.N.P. ditambah anggotanja dengan 256 orang, sehingga seluruh djumlah anggota mendjadi lebih dari 407 orang, sewaktu K.N.P. mengadakan Sidangnja ke-V di Malang antara tanggal 25 Pebruari dan 6 Maret 1947.

Anggota² tambahan semuanja diangkat oleh Presiden dengan Maklumat Presiden, jang diumumkan dalam penerbitan resmi Pemerintah „Berita Republik Indonesia”. Maka berbeda dengan anggota² K.N.P. jang lama, mengenai anggota² baru K.N.P. sedjak Peraturan Presiden No. 6/1946, ada sumber² resmi tentang pengangkatannja.

Peraturan Presiden itu jang menurut pendirian Pemerintah didasarkan pada hak prerogatif Presiden untuk memilih anggota² K.N.P., menimbulkan pertentangan pendapat dalam masjarakat maupun dalam Badan Pekerdja K.N.P. dan dalam K.N.P. Golongan² jang menentang peraturan itu menjangkal adanja hak prerogatif Presiden dan berhasil mengusahakan penetapan usul irisiatif rantjangan Undang² Pembatalan Peraturan Presiden No. 6/1946 oleh Badan Pekerdja K.N.P.

Akan tetapi usul inisiatif itu ditarik kembali oleh Badan Pekerdja didalam Sidang ke-V di Malang, setelah Wakil Presiden menjatakan, bahwa lebih baik oleh K.N.P. ditjari Presiden dan Wakil Presiden lain, kalau Peraturan Presiden No. 6/1946 tidak disetudjui.

Dalam susunan K.N.P. jang lama belum njata, bagaimana perbandingan perwakilan partai² politik jang telah berdiri sedjak achir tahun 1945 maupun perwakilan golongan² lainnja. Baru dengan berlakunja Peraturan Presiden No. 6/1946 nampak dengan djelas perwakilan partai² politik dan golongan² dalam K.N.P. sebagai berikut :

Partai² :

Masjumi 60, P.N.I. (Partai Nasional Indonesia) 45 orang, Partai Sosialis 35 orang, P.B.I. (Partai Buruh Indonesia) 35 orang, P.K.I. (Partai Komunis Indonesia) 35 orang, Parkindo 8 orang, P.K.R.I. (Partai Katolik Republik Indonesia) 4 orang ;

Golongan² :

Buruh 40 orang, Tani 40 orang ;

Daerah² :

Sumatera 51 orang, Kalimantan 12 orang, Sulawesi 15 orang, Maluku 7 orang dan Sunda Ketjil 7 orang ;

Golongan² warga-negara keturunan asing :

Tionghoa 7 orang, Arab 3 orang dan Belanda 3 orang.

Disamping itu ada pula anggota² „tidak berpartai”, jang tidak termasuk perwakilan partai² politik, golongan² atau Daerah².

Dalam tahun 1948 terdjadi perubahan² dalam dunia kepartaian, diantaranya pemisahan diri Partai Sosialis Indonesia dibawah pimpinan St. Sjahrir dari Partai Sosialis pimpinan Amir Sjarifudin pada tanggal 13 Pebruari 1948 dan terbentuknja Partai Murba pada tanggal 7 Nopember 1948. Namun demikian pengaruhnja atas susunan perwakilan K.N.P. belum nampak, karena selama tahun 1948 tidak ada Sidang K.N.P.

Perubahan mengenai susunan keanggotaan K.N.P. baru terdjadi dalam tahun 1949, setelah ditetapkan Undang² No. 6/1949 tentang Penambahan djumlah anggota K.N.P., jang mulai berlaku tanggal 28 Nopember 1949. Undang² itu ditetapkan dengan pertimbangan :

1. bahwa beberapa partai politik belum mempunyai perwakilan dalam K.N.P. (dan dalam Badan Pekerdja K.N.P.),

2. bahwa sebelum terbentuk D.P.R. berdasarkan Undang² Pemilihan perlu diberi kesempatan kepada partai² itu menempatkan wakil²nja dalam K.N.P. (dan Badan Pekerja K.N.P.), agar semua aliran² dalam masjarakat dapat mendengarkan suaranya.

Berdasarkan Undang² tersebut oleh Presiden diangkat anggota² K.N.P. baru sebagai wakil² dari P.S.I.I. (Partai Sjarikat Islam Indonesia) 12 orang, P.K.R.I. (Partai Katholik Republik Indonesia) 10 orang dan Partai Murba 6 orang. Pengangkatan tersebut dilakukan dengan „Penetapan Presiden”, bukan dengan „Maklumat Presiden” seperti dalam tahun 1947.

Dengan adanya pengangkatan² itu dan berbagai mutasi lainnja, maka sewaktu diadakan Sidang ke-VI K.N.P. di Jogjakarta tanggal 6 - 15 Desember 1949, anggota² K.N.P. seluruhnja berdjumlah 536 orang, dengan susunan sebagai berikut :

Partai² :

Masjumi 60, P.N.I. 45, Partai Sosialis (Indonesia) 36, P.B.I. 34, P.K.I. 32, Parkindo 12, P.K.R.I. 12, P.S.I.I. 12, Partai Murba 8 orang ;

Golongan² :

Buruh 38, Tani 40 orang ;

Daerah² :

Sumatera 50, Kalimantan 8, Sulawesi 16, Maluku 8, Sunda Ketjil 6 orang ;

Minoritet (keturunan bangsa asing). : Tionghwa 6, Arab 3, Belanda 1 orang ;

Tidak berpartai : 109 orang.

Karena Sidang ke-VI tersebut merupakan Sidang K.N.P. jang terachir, maka susunan keanggotaan tersebut diatas ini adalah susunan jang terachir pula.

Selandjutnja akan diuraikan beberapa hal mengenai Pimpinan K.N.P.

Dalam Sidangnja jang pertama, jaitu Sidang pelantikan pada tgl. 29 Agustus 1945, K.N.P. memilih sebagai Ketua K.N.P. : Mr. Kasman Singodimedjo dan sebagai Wakil² Ketua : Sutardjo Kartohadikoesoemo, Mr. J. Latuharhary dan Adam Malik.

Ketika diadakan Sidang ke-II K.N.P. pada tanggal 16 - 17 Oktober 1945 terhadap kebidjaksanaan Pimpinan K.N.P. tersebut dilantjarkan ketjaman² oleh sebagian anggota². Dengan penundjukan St. Sjahrir mendjadi Ketua Badan Pekerdja K.N.P., maka Pimpinan K.N.P. jang pertama meletakkan djabatannja dan menjerahkan pimpinan kepada St. Sjahrir dan anggota² pimpinan lainnja, jaitu Wakil Ketua Mr. Amir Sjarifudin dan Penulis Mr. Suwandi.

Dengan terbentuknja Kabinet-Sjahrir I, seluruh pimpinan Badan Pekerdja K.N.P. jang merangkap pula pimpinan K.N.P., masuk dalam Kabinet, jaitu : St. Sjahrir sebagai Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri, Mr. Amir Sjarifuddin sebagai Menteri Keamanan/Penerangan, dan Mr. Soewandi sebagai Menteri Kehakiman. Maka dalam Sidang ke-III K.N.P. ketiga orang pimpinan K.N.P. itu meletakkan djabatannja dan oleh Sidang ditetapkan Soepeno sebagai Ketua sementara Badan Pekerdja/K.N.P.

Pada permulaan Djanuari 1964 Mr. Assaat terpilih mendjadi Ketua Badan Pekerdja K.N.P. dan Mr. Sjafrudin Prawiranegara sebagai Penulis, setelah Soepeno diangkat mendjadi pemimpin Balai Pemuda. Sedjak saat itu Mr. Assaat tetap mendjadi Ketua Badan Pekerdja K.N.P. dan dalam jabatan itu memimpin Sidang² K.N.P. ke-IV di Solo, dan ke-V di Malang.

Dalam Sidang ke-IV di Solo Mr. Assaat didampingi oleh Penulis Badan Pekerdja K.N.P. Mr. Sjafrudin Prawiranegara, sedangkan dalam Sidang ke-V di Malang oleh Wakil Ketua Badan Pekerdja Mr. Sartono.

Dalam Sidang ke-V K.N.P. di Malang Badan Pekerdja seluruhnja meletakkan djabatannja, termasuk Ketuanja, Mr. Assaat. Maka K.N.P. dalam rapatnja pada tgl. 28 Pebruari 1947 malam mengadakan pemilihan Ketua K.N.P. dari tjalon jang diadjukan, jaitu : Mr. Assaat (P.S.I.), Suwirjo (P.N.I.), Patty (Parpim). (Semula ada tjalon ke-empat, dr. Abu Hanifah dari Masjumi ; akan tetapi pihak Masjumi menarik kembali pentjalonannja). Setelah diadakan pemungutan suara ternjata, bahwa Mr. Assaat memperoleh 299 suara, Suwirjo 81 suara dan Patty 6 suara, sehingga Mr. Assaat terpilih mendjadi Ketua K.N.P. dan sekaligus Ketua Badan Pekerdja K.N.P.

Maka Sidang ke-VI di Jogjakarta dipimpin oleh Mr. Assaat,

dengan didampingi oleh Wakil² Ketua Badan Pekeraja Mr. Sar-tono dan Prawoto Mangkoesasmito.

B. Badan Pekeraja K.N.P.

Berbeda dengan K.N.P., maka mengenai keanggotaan Badan Pekeraja K.N.P., terdapat pengumuman² resmi dalam Berita Republik Indonesia. Maka keadaan dan perkembangan keanggotaan Badan Pekeraja K.N.P. pada umumnja dapat diketahui.

Menurut „Pertelaan Pekerajaan Badan Pekeraja”, jang merupakan laporan Badan Pekeraja K.N.P. kepada Sidang ke-III K.N.P. tanggal 25 — 27 Nopember 1945 jang termuat dalam Berita Republik Indonesia, maka sewaktu dibentuk pada tanggal 17 Oktober 1945, Badan Pekeraja terdiri dari 15 anggota sebagai berikut :

1. St. Sjahrir (Ketua),
2. Mr. Amir Sjarifudin (Wakil Ketua),
3. Mr. Soewandi (Penulis),
4. Mr. Sjafrudin Prawiranegara,
5. K.H. Wachid Hasjim,
6. Mr. Hindromartono,
7. Mr. Sunario Kolopaking,
8. dr. A. Halim,
9. Subadio Sastrosatomo,
10. Tan Ling Djie,
11. Supeno,
12. S. Mangunsarkoro,
13. Adam Malik,
14. Tadjuludin dan
15. dr. Sudarsono.

Dalam Sidang ke-III K.N.P. diputuskan oleh K.N.P. untuk menambah djumlah anggota Badan Pekeraja mendjadi 25 orang, termasuk Ketuanja, 17 diantaranja langsung dipilih oleh Sidang. Mengenai 8 anggota² lainnja diserahkan kepada 17 anggota jang telah terpilih untuk memilihnja dari orang² „jang hidup di-tengah² masjarakat didaerah dan disetudjui oleh daerahnja”, jaitu seorang dari tiap² propinsi.

17 anggota² Badan Pekeraja jang langsung dipilih oleh K.N.P. adalah :

1. dr. Sudarsono,
2. Adam Malik,
3. Subadio Sastrosatomo,
4. Supeno,
5. dr. A. Halim,
6. Mr. Assaat,
7. Sukarni,
8. Mr. Sjafrudin Prawiranegara,
9. Susilowati,
10. M. Natsir,
11. Mr. Jusuf Wibisono,
12. S. Mangunsarkoro,
13. Mr. Sunarjo,
14. Sjamsuddin St. Makmur,
15. M. Pardi,
16. dr. W.Z. Johannes dan
17. Tan Ling Djie.

Dari 15 orang anggota² Badan Pekeraja jang pertama ternjata terpilih kembali 8 anggota (jaitu nomor² 1 s/d 5, 8, 12 dan 17); 9 anggota² lainnja adalah anggota² baru.

Menurut Pengumuman Badan Pekeraja No. 7 tanggal 3 Desember 1945, maka 17 anggota² tersebut mewakili aliran/golongan sebagai berikut :

No. 1 s/d 9 mewakili aliran² buruh-tani, sosialis dan pemuda. 10 dan 11 aliran Islam, 12 s/d 15 aliran nasional-demokrat, 16 aliran Keristen dan 17 mewakili golongan Tionghoa.

Dengan memperhatikan usul² dari Daerah² dan dengan masuknja dr. Sudarsono dalam Kabinet-Sjahrir I sebagai Menteri Sosial, maka Badan Pekeraja menggantikan dr. Sudarsono dengan Sugondo Djojopuspito dan melengkapi keanggotaan Badan Pekeraja dengan 8 wakil² Daerah sebagai berikut :

1. Mr. A.M. Tambunan,
2. Awibowo,
3. Moh. Zain Djambek,
4. P. de Quelju,
5. Wijono Surjokusumo,
6. V.E. Maramis,
7. Dul Arnowo dan
8. M. Gozali.

Djumlah anggota tetap 25 orang sampai Sidang ke-V K.N.P. di Malang. Hanya dalam periode antara Sidang ke-III dan Sidang ke-V K.N.P. tersebut orang²nja ada jang diganti, karena memangku djabatan lain jang tidak dapat dirangkap ataupun sebab² lain. Penggantinya ditetapkan oleh Badan Pekerdja atas usul aliran/golongan Daerah jang diwakili. Misalnja : Mr. Sjafrudin Prawiranegara, M. Natsir (jang ber-turut² mendjadi Wakil Menteri Keuangan dan Menteri Penerangan dalam Kabinet Sjahrir I) dan Mr. Jusuf Wibisono (mendjadi Menteri Muda Kemakmuran dalam Kabinet Sjahrir II) diganti oleh Drs. Sigit, Prawoto Mangkusasmito dan Burhanuddin Harahap, jang sealiran. Dul Arnowo dari Daerah Djawa Timur diganti oleh Sjafiudin Surjoamidarmo. V.E. Maramis (Sulawesi) diganti oleh Manai Sophiaan. Wijono Surjokusumo (mendjadi Menteri Muda Dalam Negeri dalam Kabinet Sjahrir III) diganti oleh S. Sardjono.

Pimpinan Badan Pekerdja dalam periode tersebut diatas mula² dipegang oleh Supeno, jang ditundjuk oleh Sidang ke-III K.N.P. mendjadi Ketua Sementara, dengan dr. A. Halim sebagai Penulis.

Pada tanggal 27 Desember 1945 Badan Pekerdja memilih sebagai pimpinannya : Ketua Supeno, Wakil Ketua M. Natsir dan Penulis Mr. Sjafrudin Prawiranegara. Karena pada permulaan Djanuari 1946 Supeno diangkat mendjadi Pemimpin Balai Pemuda dan M. Natsir mendjadi Menteri Penerangan, maka pimpinan Badan Pekerdja diserahkan untuk sementara kepada Mr. Sjafrudin Prawiranegara. Mendjelang Sidang ke-IV di Solo Mr. Assaat dipilih mendjadi Ketua, dan dalam kedudukan itu mengetuai Sidang tersebut, dengan Mr. Sjafrudin sebagai Penulis. Setelah Mr. Sjafrudin mendjadi Menteri Muda Keuangan, djabatan Penulis dipegang oleh Supeno, sampai tanggal 5 Djanuari 1947 Badan Pekerdja mengangkat Mr. Kuntjoro Purbopranoto sebagai pimpinan Sekretariat /bukan anggota Badan Pekerdja. Pada tanggal tersebut Badan Pekerdja memilih pula sebagai Wakil Ketua Mr. Sartono, jang kemudian mendampingi Ketua Mr. Assaat dalam memimpin Sidang ke-V K.N.P. di Malang.

Perubahan besar mengenai keanggotaan Badan Pekerdja K.N.P. terdjadi sesudah Sidang ke-V K.N.P. di Malang tersebut.

Seperti telah dikemukakan diatas, dalam Sidang ke-V K.N.P.

Mr. Assaat terpilih kembali mendjadi Ketua K.N.P. dan sekaligus pula Ketua Badan Pekerdja K.N.P.

Mengenai Badan Pekerdja oleh Sidang K.N.P. diputuskan, bahwa djumlah anggotanja 47 orang, 7 diantaranya Wakil² dari Daerah² diluar Djawa-Sumatera (jaitu Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Ketjil) serta wakil² golongan Tionghoa, Arab dan Belanda, masing² seorang. Adapun 40 orang lainnja dipilih dari dan oleh anggota² K.N.P., dengan ketentuan bahwa tiap² 12 orang anggota K.N.P. dapat mempunjai seorang wakil dalam Badan Pekerdja.

Selandjutnja K.N.P. memutuskan pula, bahwa Ketua Badan Pekerdja bukan anggota dan tidak mempunjai hak suara dalam Badan Pekerdja, tetapi Wakil Ketua, jang pemilihannja diserahkan kepada Badan Pekerdja, mempunjai hak suara.

Berdasarkan keputusan² Sidang ke-V K.N.P. itu dan dengan memperhatikan usul² dari pihak² jang bersangkutan, maka dengan Penetapan No. 2 tahun 1947 tanggal 24 Maret 1947 Presiden mengesahkan 42 orang anggota K.N.P. mendjadi anggota² Badan Pekerdja K.N.P., jaitu :

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Gusti Djohan, | 21. Zainul Baharuddin, |
| 2. dr. A. Halim, | 22. Manai Sophiaan, |
| 3. J.D. Syaranamual, | 23. Krissubanu, |
| 4. I.R. Lobo, | 24. Subadio Sastrosatomo, |
| 5. Susilowati, | 25. Sugondo Djojopuspito, |
| 6. Sundjoto, | 26. Tan Ling Djie, |
| 7. S. Sardjono, | 27. Supeno, |
| 8. Rh. Kusnan, | 28. Mr. A.M. Tambunan, |
| 9. Asrarudin, | 29. Hutomo Supardan, |
| 10. K. Werdojo, | 30. dr. Rustam, |
| 11. Siauw Giok Tjhan, | 31. N j o t o, |
| 12. Hamid Algadrie, | 32. Mr. Sjamsudin, |
| 13. A. de Roock, | 33. Prawoto Mangkusasmito. |
| 14. S.M. Abidin, | 34. S.M. Kartosuwirjo, |
| 15. Tjugito, | 35. Moh. Sardjan, |
| 16. Suwarti, | 36. Mahmud L. Latjuba B.A., |
| 17. Luat Siregar, | 37. S. Mangunsarkoro, |
| 18. Zainal Abidin Achmad, | 38. Mr. Sartono, |
| 19. Mr. Moh. Nasrun, | 39. Sjamsudin St. Makmur, |
| 20. Iskandar Tedjasukmana, | |

40. Mr. Sujono Hadinoto
Brotokusumc

41. Sidik Djojosukarto, dan
42. Abu Umar.

Dalam Penetapan Presiden No. 2/1947 itu tidak disebut partai, golongan atau Daerah, yang diwakili oleh 42 anggota² Badan Pekeraja itu masing². Namun demikian, dari keanggotaannya dalam K.N.P. djelaslah asal anggota² Badan Pekeraja itu. Maka dalam daftar² keanggotaan di Sekretariat Badan Pekeraja 42 anggota² itu tertjatat sebagai wakil² dari partai/golongan/daerah sebagai berikut :

No. 1, 3, 4 dan 22 : daerah² Kalimantan, Maluku, Sunda
Ketjil dan Sulawesi ;

No. 6, 7 dan 42 (3 orang): Golongan Tani ;

No. 8, 9 dan 10 (3 orang): Golongan Buruh ;

No. 11, 12 dan 13 : Golongan² Tionghoa, Arab dan Belanda, masing² seorang ;

No. 14, 15 dan 16 (3 orang): P.B.I. (Partai Buruh Indonesia) ;

No. 17, 18, 19, 20 dan 21 (5 orang): Daerah Sumatera ;

No. 24, 25, 26 dan 27 (4 orang): Partai Sosialis ;

No. 28 : Parkindo (Partai Kristen Indonesia) ;

No. 29, 30 dan 31 (3 orang): P.K.I. (Partai Komunis Indonesia) ;

No. 32, 33, 34, 35 dan 36 (5 orang): Masjumi ;

No. 37, 38, 39, 40 dan 41 (5 orang): P.N.I.

Adapun anggota² No. 2, 5 dan 23 tertjatat sebagai „tidak berpartai”.

Dalam susunan keanggotaan Badan Pekeraja itu kemudian terdjadi perubahan², berhubungan dengan :

1. perkembangan dalam dunia kepartaian, jang a.l. menyebabkan masuknja seorang wakil dari Partai Rakjat (Maruto Nitimihardjo) jang kemudian mendjadi wakil dari Partai Murba ; mentjulnja P.S.I. (Partai Sosialis Indonesia) dan penggabungan sebagian dari anggota² Partai Sosialis dengan P.K.I. ;
2. pengangkatan dalam djabatan² jang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Badan Pekeraja, seperti Menteri, Gubernur, anggota Delegasi Perundingan dengan Belanda ;

3. ada anggota² jang meninggal dunia selama pemberontakan P.K.I. di Madiun ;
4. ada anggota² jang mengundurkan diri, misalnja wakil golongan Belanda pada achir tahun 1947 ; dan lain²

Dengan adanja perubahan² itu, maka mendjelang Sidang ke-VI K.N.P. susunan keanggotaan Badan Pekerdja (diluar Ketua Mr. Assaat) adalah sebagai berikut :

Masjumi :

Prawoto Mangkusasmito, Burhanuddin Harahap, Mahmud L. Latjuba B.A., Nj. Sunarjo Mangunpuspito dan H. Zainul Arifin (5 orang) ;

P. N. I. :

Mr. Sartono, Mr. Djody Gondokusumo, Sabilal Rasjad, Sidik Djojokusarto dan Sjamsudin St. Makmur (5 orang) ;

P. S. I. : (Partai Sosialis Indonesia) :

Subadio Sastrosatomo, Djohan Sjahrusah dan Sugondo Djojopuspito ;

P. K. I. :

Tan Ling Djie, Tjugito, Suwarti, Hutomo Supardan dan Njoto (5 orang ; seorang dr. Rustam, meninggal dunia selama pemberontakan Madiun) ;

P. B. I. :

S. M. Abidin (1 orang) ;

Parkindo :

Mr. A.M. Tambunan (1 orang) ;

Partai Murba :

Maruto Nitimihardjo (1 orang) ;

Golongan Buruh :

Asrarudin, K. Werdojo dan Kobarsjih (3 orang) ;

Golongan Tani :

Sadjarwo, Sundjoto dan Mr. Moh. Dalijono (3 orang) ;

Daerah Sumatera :

I. Tedjakusuma, Mr. Luat Siregar, Rangkajo Rasuna Said, Zainal Abidin Ahmad dan Zainul Baharudin (5 orang) ;

Daerah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Ketjil :

masih tetap Gusti Djohan, Manai Sophiaan, J.D. Syarana-mual dan I.R. Lobo (masing² 1 orang) ;

Golongan Tionghwa :

Mr. Tan Po Goan (1 orang) ;

Golongan Arab :

Hamid Algadrie (1 orang) ;

Tidak berpartai :

dr. A. Halim, Krissubanu dan Susilowati (tetap).

Dari 42 orang anggota² tersebut ada 2 orang jang praktis tidak dapat mendjalankan tugasnja, jaitu Hamid Algadrie dan Mr. Tan Po Goan, jang ke-dua²nja tinggal di Djakarta Selandjutnja ada beberapa anggota jang sedjak pemberontakan Madiun tidak lagi melakukan tugasnja, jaitu Tan Ling Djie, Hutomo Supardan, Njoto, Tjugito dan K. Werdojo. Ada pula anggota² jang sedjak peristiwa tsb. absen dan baru mendjelang Sidang ke-VI K.N.P. (mulai bulan Nopember 1949) melakukan kembali tugasnja sebagai anggota Badan Pekerdja, misalnja : Suwarti dan Mr. Luat Siregar.

Adapun mendjelang Sidang ke-VI K.N.P. itu susunan keanggotaan bertambah dengan 2 orang berdasarkan Undang² No. 6/1949 tentang Penambahan Anggota K.N.P., jaitu : Mr. A.A. Suhardi (Partai Katholik Republik Indonesia) dan W. Wondoamiseno (Partai Sjarikat Islam Indonesia).

Sesudah Sidang ke-VI K.N.P. dan terbentuknja Republik Indonesia Serikat terdjadi beberapa mutasi lagi, karena :

- a. sebagian anggota² mendjadi anggota² Dewan Perwakilan Rakjat R.I.S., a.l. Mr. Sartono dan Mr. Tambunan, jang keduanja kemudian dipilih mendjadi Ketua dan Wk. Ketua ;
- b. beberapa anggota mendjadi Menteri² dalam Kabinet Halim, a.l. dr. A. Halim jang mendjadi Perdana Menteri ;
- c. ada jang mengundurkan diri, atau sebab² lain.

Dengan adanya mutasi itu masuklah antara lain sebagai anggota² baru Badan Pekerdja K.N.P. setelah R.I.S. berdiri :

Sumartojo (P.S.I.),
Ngadiman Hardjosubroto (P.K.I.),
Djaitun Dirdjowijoto (P.K.I.),
Hindrosudarmo (Golongan Tani),
Maizir Ahmaddyns (Daerah Kalimantan),
IGG. Raka (Daerah Sunda Ketjil).

Dalam susunan terachir itulah anggota² Badan Pekerdja K.N.P. sedjumlah 46 orang (termasuk Ketuanja) semuanja mendjadi anggota² D.P.R. Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

Adapun mengenai pimpinan Badan Pekerdja K.N.P. dalam masa sesudah Sidang ke-V di Malang dapat dikemukakan hal² sebagai berikut :

Pada bulan April 1947 terpilih sebagai Wakil² Ketua Badan Pekerdja anggota² I. Tedjasukmana (wakil Sumatera) dan I.R. Lobo (wakil Sunda Ketjil), jang mendampingi Ketua (Badan Pekerdja) K.N.P. Mr. Assaat.

Sesudah pemberontakan Madiun dan perang kolonial kedua diadakan pemilihan Wakil² Ketua lagi dan kedua Wakil² Ketua itu pada tanggal 25 Djuli 1949 diganti oleh Mr. Sartono (Wakil Keua I, dari P.N.I.) dan Prawoto Mangkusasmito (Wakil Ketua II, dari Masjumi).

Berdasarkan inisiatif Badan Pekerdja K.N.P. pada tanggal 5 Desember 1949 telah ditetapkan Undang² No. 7/1949, jang menentukan :

1. Djika Presiden/Wakil Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewadajibannja, maka Ketua D.P.R. mendjalankan kewadajiban itu;
2. Djika Ketua D.P.R. tidak dapat mendjalankan kewadajiban itu, ia digantikan oleh Wakil Ketua D.P.R.

Dalam hubungan dengan Undang² itu pada tanggal 15 Desember 1949 Sidang ke-VI K.N.P. memilih Prawoto Mangkusasmito, Wakil Ketua Badan Pekerdja, mendjadi Wakil Ketua K.N.P., jang kemudian disahkan oleh Presiden dengan Surat Keputusan No. 116/A/49 tanggal 27-12-1949. Djadi berbeda dengan keadaan sewaktu Sidang² K.N.P. sebelumnja, Wakil Ketua Badan Pekerdja tidak dengan sendirinja mendjadi Wakil Ketua K.N.P.

Setelah Presiden Sukarno terpilih mendjadi Presiden R.I.S., maka berdasarkan Undang² No. 7/1949 tersebut pada tanggal 27-12-1949 Ketua K.N.P. Mr. Assaat dilantik mendjadi Pemangku Sementara Djabatan Presiden R.I. dan menjerahkan pimpinan Badan Pekerdja K.N.P. kepada Wakil Ketua Prawoto Mangkusasmito. Pada bulan Pebruari 1950 Badan Pekerdja memilih

Sjamsuddin St. Makmur dan Mr. Luat Siregar sebagai Wakil² Ketua.

Dengan terbentuknja Negara Kesatuan R.I., pada tanggal 15 Agustus 1950 Pd. Ketua Badan Pekerdja K.N.P. Prawoto Mangkusasmito menjerahkan kembali pimpinan Badan Pekerdja kepada Ketua Mr. Assaat, setelah Mr. Assaat lebih dahulu menjerahkan pimpinan Negara R.I. kepada Presiden Sukarno. Pada hari itu djuga seluruh Badan Pekerdja turut terbang dengan Presiden Sukarno ke Djakarta uituk mendjadi anggota² Dewan Perwakilan Rakjat Sementara.

§ 3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG.

A. Kedudukan dan tugas.

Pasal IV Aturan Peralihan Undang² Dasar 1945 menentukan, bahwa sebelum M.P.R., D.P.R. dan D.P.A. dibentuk menurut Undang² Dasar, segala kekuasaannja didjalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.

Maka K.N.P. jang dibentuk antara tanggal 19 dan tanggal 23 Agustus 1945 serta dilantik oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945, berkedudukan sebagai pembantu Presiden.

Sesuai dengan kedudukannja itu, K.N.P. dalam Sidangnja jang pertama, membuat mosi dan maklumat, jang tidak sadja berisikan pendapat dan andjuran, melainkan djuga „perintah”.

Dalam Mosi tanggal 29 Agustus 1945 itu antara lain dinjatakan :

- Mewadajibkan tiap² orang Indonesia berusaha dengan segiat²nja dan dengan hati jang tulus-ichlas untuk menjempurnakan bangsa
- Mengandjurkan kepada Daerah² supaya se-tjepat²nja menjusun Pemerintah Daerah Republik Indonesia
- Memerintahkan supaya ketetapan² dan keinginan² jang tersimpul dalam Mosi diinsafkan dan didjalankan oleh Rakjat Indonesia seluruhnja

Selanjutnja sesudah Sidang ke-I itu Pimpinan maupun para anggota K.N.P. mendjalankan tugas jang terletak dibidang eksekutif: memberi penerangan di Daerah², memberi petunjuk², bahkan perintah² kepada Kepala² Daerah atau Kepala² Djawatan didaerah-daerah mengenai berbagai hal dibidang pe-

merintahan, menyelesaikan perselisihan antara rakyat Indonesia dan Djepang dan sebagainya.

Memang keadaan dan suasana Revolusi agaknya menghendaki pula, bahwa K.N.P. melakukan berbagai tindakan² dibidang pemerintahan.

Namun tidak berapa lama kemudian terdjadi perubahan besar, jaitu dalam Sidang ke-II K.N.P. pada tanggal 16 — 17 Oktober 1945.

Atas usul dari Sjahrir cs. Sidang K.N.P. pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan untuk menjampaikan usul kepada Pemerintah mengenai perubahan kedudukan dan tugas K.N.P.

Usul tersebut diterima baik oleh Pemerintah dan Wakil Presiden, jang hadir dalam sidang, seketika itu menetapkan Maklumat No. X, jang sepenuhnya sesuai dengan usul dari K.N.P., menetapkan :

1. Sebelum terbentuk M.P.R. dan D.P.R., Komite Nasional Pusat disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis² besar haluan Negara ;
2. berhubungan dengan gentingnja keadaan pekerdjaan sehari-hari Komite Nasional Pusat didjalankan oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih diantara dan bertanggung-djawab kepada K.N.P.

(X bukan angka Romawi 10, melainkan huruf ke-24 dari abjad !)

Maklumat Wakil Presiden No. X itu pada hakekatnja merubah pasal IV Aturan Peralihan Undang² Dasar 1945.

Dengan berlakunja Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 tersebut, Komite Nasional Pusat tidak lagi berkedudukan sebagai pembantu Presiden. K.N.P. mendjadi badan kenegaraan jang sedjadjar dengan Presiden dan bersama² dengan Presiden (jang dibantu oleh Menteri²) :

1. membuat undang² (tugas D.P.R. menurut pasal 5 UUD 1945);
2. menetapkan garis² besar haluan Negara (tugas M.P.R. berdasarkan pasal 3 UUD 1945).

Berdasarkan diktum nomor 2 Maklumat Wakil Presiden No. X/1945, K.N.P. membentuk sebuah Badan Pekerdja pada tanggal 17 Oktober 1945. Maka sedjak tanggal 17 Oktober 1945 itu

Badan Pekerdja K.N.P. -lah jang melakukan tugas se-hari² K.N.P. itu.

Salah satu tjontoh bahwa Badan Pekerdja melaksanakan tugas K.N.P. „ikut menetapkan garis² besar haluan Negara’ adalah usulnja kepada Pemerintah, tentang politik dalam Negeri dan luar Negeri. Pemerintah menjetudjui usul itu dan menetapkanja sebagai „Maklumat Politik” tanggal 1 Nopember 1945.

Perkembangan baru mengenai kedudukan K.N.P./Badan Pekerdja K.N.P. terdjadi belum berselang 2 minggu kemudian.

Usul Badan Pekerdja K.N.P. tentang pertanggung jawaban Menteri kepada Perwakilan Rakjat disetudjui oleh Presiden dan Presiden menggantikan Kabinet presidensiil jang pertama dengan Kabinet Sjahrir I pada tanggal 14 Nopember 1945.

Usul mengenai pertanggung-jawab Menteri itu didjelaskan oleh Badan Pekerdja dalam Pengumuman Badan Pekerdja No. 5 tahun 1945 tanggal 11 Nopember 1945 sebagai berikut :

„Supaja lebih tegas adanja kedaulatan rakjat dalam susunan Pemerintah Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan Undang² Dasar jang dirubah, Badan Pekerdja dalam rapatnja telah membitjarakan soal pertanggung-jawab para Menteri kepada Badan Perwakilan Rakjat (menurut sistim sementara kepada Komite Nasional Pusat).

Seperti diketahui, maka dalam Undang² Dasar kita tidak terdapat pasal, baik jang mewadajibkan maupun jang melarang para Menteri bertanggung-djawab. Pada lain pihak pertanggung-jawab kepada Badan Perwakilan Rakjat itu adalah sesuatu djalan untuk memperlakukan kedaulatan rakjat.

Maka berdasarkan alasan tersebut, Badan Pekerdja mengusulkan kepada Presiden untuk mempertimbangkan adanja pertanggung-jawab itu dalam susunan Pemerintahan. Presiden menerima baik usul Badan Pekerdja, hingga dengan persetudjuan tadi dimulai adanja pertanggung-jawab para Menteri kepada Badan Perwakilan Rakjat dalam susunan Pemerintahan Negara Republik Indonesia.”

Persetudjuan Presiden atas usul Badan Pekerdja itu hanjalah dimuat dalam suatu pengumuman tentang pembentukan Kabinet II (jaitu Kabinet-Sjahrir I) dengan „Maklumat Pemerintah” tanggal 14 Nopember 1945, jang antara lain menjatakan :

„Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami udjian² jang hebat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanja menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk mendjalankan matjam² tindakan darurat guna menjempurnakan tata-usaha Negara kepada susunan demokrasi.

Jang terpenting dalam perubahan² susunan Kabinet baru itu ialah, tanggung-djawab adalah didalam tangan Menteri”.

Selanjutnja pada tanggal 24 Nopember 1945 Menteri Penerangan mengumumkan pendjelasan tentang pertanggung-djawab Menteri itu.

Achirnja perlu kiranja dikemukakan, bahwa Komite Nasional Pusat dalam Sidangnja ke-III tanggal 25 — 27 Nopember 1945 telah menjetudjui pula adanja pertanggung-djawab Menteri dengan kata² : „membenarkan kebidjaksanaan Presiden perihal mendudukkan Perdana Menteri dan Menteri² jang bertanggung-djawab kepada Komite Nasional Pusat sebagai suatu langkah jang tidak dilarang oleh Undang² Dasar dan perlu dalam keadaan sekarang”.

Djadi dengan demikian Presiden ber-sama² dengan (Badan Pekerdja) K.N.P. telah mengubah Undang² Dasar 1945 tanpa mengubah rumusan pasal²nja :

Sistim Kabinet presidensil telah diganti dengan sistim Kabinet Parleментар.

Menteri² bukan lagi pembantu² Presiden jang bertanggung-djawab kepada Presiden, akan tetapi Menteri² bertanggung djawab kepada Perwakilan Rakjat. Maka sedjak tanggal 14 Nopember 1945 para Menteri bertanggung-djawab kepada K.N.P./Badan Pekerdja K.N.P.

B. Hak² dan kewadjiban

Mula² tidak terdapat sesuatu peraturan tentang hak² kewadjiban K.N.P. dan Badan Pekerdja K.N.P. sebagai badan legislatif, jang bersama dengan Presiden menetapkan undang² dan garis² besar haluan Negara.

Menurut praktek dalam tahun² 1945 dan 1946, Badan Pekerdja telah melaksanakan beberapa hak jang bersangkutan dengan tugas legislatif itu. Per-tama² Badan Pekerdja telah menggunakan hak inisiatif, jang menurut pasal 21 Undang² Dasar '45 dipunjai oleh DPR, misalnja pada achir tahun 1945 oleh Badan

Pekerdja disusun usul inisiatif rantjangan undang² tentang K.N.I./Badan Perwakilan Daerah, jang kemudian mendjadi Undang² jang pertama dalam Republik Indonesia, jaitu Undang² No. 1/1945. Dan pada achir tahun 1946 oleh Badan Pekerdja disusun usul inisiatif tentang Pembatalan Peraturan Presiden No. 6/1946, jang telah disinggung diatas.

Selandjutnja dalam tahun² itu Badan Pekerdja telah pula menggunakan hak² jang bersangkutan dengan pertanggungjawaban Menteri, hak interpelasi, minta keterangan² dari Pemerintah. Misalnja :

1. Tanja-djawab/interpelasi dengan Perdana Menteri Sjahrir pada tanggal 29 Mei 1946 tentang soal² politik-ekonomi, a.l. perundingan dengan pihak Belanda, jang ketika itu baru akan diadakan.
2. Tanja-djawab/interpelasi dengan Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprodjo tentang soal² tahanan politik, „3 Daerah” dll., pada tanggal 5 Desember 1946 dst.

Dalam pada itu perlu dikemukakan, bahwa agaknja masih ada perbedaan pendapat antara Badan Pekerdja dan Pemerintah mengenai sifat atau isi sesuatu „hak”. Pada achir interpelasi mengenai soal² tahanan politik dan „3 Daerah” itu. misalnja, oleh Menteri Kehakiman antara lain dinjatakan, bahwa interpelasi Badan Pekerdja dengan Pemerintah adalah tanja-djawab dengan mengajukan fakta², bukan penilaian terhadap Pemerintah. Sebaliknya pihak Badan Pekerdja malahan menginginkan lebih djauh lagi, karena pada achir tanja-djawab itu oleh anggota² Supeno dan Mangunsarkoro dikemukakan gagasan, agar Badan Pekerdja mengadakan angket, karena keterangan² jang diberikan oleh Pemerintah dianggap kurang memuaskan.

Baru pada pertengahan tahun 1947, dengan berlakunja Peraturan Tata-tertib Badan Pekerdja tanggal 10 Djuni 1947, terdapat ketentuan² tentang hak² Badan Pekerdja, disamping tugas atau kewadjabannja membuat Undang².

Hak² Badan Pekerdja atau jang menurut anggapan Badan Pekerdja dipunjainja sebagai badan legislatif adalah : mengajukan usul, interpelasi (minta keterangan), mengadakan „pengusutan” (jang dimaksud adalah angket) dan mengajukan pertanyaan. Badan Pekerdja menganggap hak² itu sebagai konsekwensi hak inisiatif menurut pasal 21 Undang² Dasar 1945

dan sistim pertanggung-jawab Menteri jang berlaku sedjak Nopember 1945. Maka Badan Pekerdja mengatur hak² itu dalam Peraturan Tata-tertib, sekalipun Undang² Dasar 1945 tidak menjebut adanja hak² itu pada Dewan Perwakilan Rakjat.

Karena mengenai Peraturan Tata-tertib jang dibuat oleh Badan Pekerdja sendiri itu tidak diadjukan keberatan oleh pihak Pemerintah, maka ketentuan² Peraturan Tata-tertib mengenai hak² itu kemudian terlaksana djuga dalam praktek kehidupan parlementer Badan Pekerdja.

Tugas membentuk Undang² dilakukan oleh Badan Pekerdja dengan bantuan Panitia² Tetap atau suatu Panitia Khusus jang dapat dibentuk insidentil, djuga untuk keperluan² lain daripada per-undang²an.

Panitia² Tetap itu mengadakan pemeriksaan persiapan se-rentak atas rantjangan Undang². Mengenai pemeriksaan-persiapan itu oleh para pelapor dari Panitia² Tetap, jang bersamasama merupakan Panitia Pelapor, disusun suatu Laporan Gabungan. Laporan Gabungan kemudian disampaikan kepada Pemerintah (Menteri jang bersangkutan) untuk memperoleh djawaban tertulis (jang kemudian biasanja disebut „Memori Djawaban“). Dengan menggunakan Laporan Gabungan dan Memori Djawaban tersebut sebagai bahan pembijtaraan, rapat pleno Badan Pekerdja merundingkan rantjangan Undang² jang bersangkutan dan akhirnya mengambil keputusan.

Tjara Badan Pekerdja atau Anggota² Badan Pekerdja mempergunakan hak²nja adalah sebagai berikut :

1. **Mengadjukan usul :** Se-kurang²nja 3 orang anggota minta keputusan Badan Pekerdja tentang suatu hal, baik jang bersangkutan dengan atjara rapat ataupun tidak. Usul jang bersangkutan disertai pendjelasan dibitjarakan dalam rapat pleno Badan Pekerdja berikutinja.
2. **Interpelasi :** Interpelasi untuk minta keterangan² dari Pemerintah tentang soal² „jang tidak termasuk atjara pembijtaraan“, dapat diadjukan oleh 3 orang anggota. Djika interpelasi diadakan atas nama Badan Pekerdja, perlu pertanjaan² jang bersangkutan dirundingkan lebih dahulu. Dan kemudian Ketua Seksi jang bersangkutan mengadjuakannja dalam rapat dengan Pemerintah. Setelah Pemerintah memberikan keterangan², diadakan tanja-djawab dengan Peme-

rintah. Achirnja Badan Pekerdja mengadakan rapat tertutup untuk merundingkan tindakan apakah jang perlu diambil lebih landjut. Kalau keterangan² Pemerintah tidak memuaskan dapat diadakan pengusutan (angket).

3. **Mengadakan pengusutan² :** Atas usul 3 orang anggota Badan Pekerdja dapat mengadakan pengusutan. Untuk keperluan itu Kementerian atau Djawatan jang bersangkutan diberitahu tentang putusan angket dan anggota² jang ditundjuk untuk mengadakan angket membawa surat resmi dari Ketua Badan Pekerdja. Laporan anggota² dirundingkan dalam rapat tertutup Badan Pekerdja dan kesimpulan perundingan dijadikan bahan bagi sesuatu usul inisiatif rantjangan undang² atau usul lain.
4. **Mengajukan pertanjaan.²** Tiap² anggota dapat mengajukan pertanjaan tertulis kepada Pemerintah dengan perantaraan Ketua. Pertanjaan anggota dan djawaban Pemerintah dibatjkan dalam rapat Badan Pekerdja, mula² rapat tertutup, akan tetapi kemudian mendjadi kebiasaan Badan Pekerdja untuk mengadakan tanya-djawab dengan para Menteri² dalam rapat² pleno terbuka pada „Hari² Pertanjaan”.

C. Hubungan dengan Pemerintah.

Sebagaimana dikemukakan diatas, maka sedjak tanggal 14 Nopember 1945 berlaku sistim pertanggungan-djawab Menteri. berdasarkan persesuaian pendapat antara Badan Pekerdja K.N.P. dan Presiden, jang kemudian disetudjui pula oleh Komite Nasional Pusat.

Maka sedjak tanggal tersebut pada umumnja Kabinet² Republik Indonesia jang terbentuk kemudian, — tidak semuanya —, bertanggung-djawab kepada Badan Pekerdja K.N.P. atau Komite Nasional Pusat. Kabinet² jang terbentuk selama ada Komite Nasional Pusat dan Badan Pekerdja K.N.P. adalah :

1. Kabinet Sjahrir I dari tanggal 14 Nopember 1945 — 28 Pebruari 1946.
2. Kabinet Sjahrir II dari tanggal 3 Maret 1946 — 29 Djuni 1946,
3. Kabinet Presidensiil, jang dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri, dari 29 Djuni 1946 sampai 2 Oktober 1946, setelah Presiden dengan Maklumat No. 1 tahun 1946 berhubung

dengan kedjadian² jang membahayakan keselamatan Negara dan perdjungan kemerdekaan (pentjulikan Perdana Menteri St. Sjahrir dan pembesar² lain, dan sebagainya) mengambil kekuasaan pemerintah sepenuhnya untuk sementara waktu.

4. Kabinet Sjahrir III dari tanggal 2 Oktober 1946 sampai 26 Djuni 1947, ketika Kabinet mengembalikan mandatnja, disusul dengan pengambilan kekuasaan Pemerintah sepenuhnya oleh Presiden Sukarno buat sementara waktu untuk kedua kalinya pada hari berikutnya (dengan Maklumat Presiden No. 5 tahun 1947).
5. Kabinet Amir Sjarifuddin dari tanggal 3 Djuli 1947 sampai tanggal 23 Djanuari 1948,
6. Kabinet Presidensiil, jang pimpinan sehari-harinja dipegang oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, dari tanggal 29 Djanuari 1949 sampai terbentuknja R.I.S. pada tanggal 27 Desember 1949, dengan mengalami waktu non-aktif selama pendudukan Belanda di Jogjakarta dari tanggal 19 Desember 1948 sampai 6 Djuli 1949 (diwakili oleh Pemerintah Darurat) dan reshuffle pada tanggal 9 Agustus 1949.
7. Kabinet (Pemerintah Darurat) Sjafrudin Prawiranegara dari tanggal 19 Desember 1948 sampai 6 Djuli 1949,
8. Kabinet Halim dari Djanuari 1950 sampai pulihnja Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

Terketjuali Kabinet Presidensiil tersebut pada nomor 3 dan Kabinet darurat termaksud pada angka 7, Kabinet² tersebut diatas merupakan Kabinet² jang bertanggung-djawab kepada (Badan Pekerdja) Komite Nasional Pusat.

Dalam praktek sistim pertanggungan-djawab Menteri terwujud sebagai berikut :

1. Atas permintaan Badan Pekerdja K.N.P. atau Komite Nasional Pusat atau atas kehendak Kabinet sendiri, oleh Kabinet jang bersangkutan diberikan Keterangan Pemerintah mengenai program Kabinet atau kebidjaksanaan Kabinet. Lambat laun mendjadi tradisi parlementer bahwa djika terdjadi penggantian Kabinet, maka Kabinet baru memberikan keterangan tentang programnja kepada Badan Pekerdja K.N.P., dan dalam tiap² Sidang K.N.P. Pleno, Kabinet jang bersangkutan memberikan keterangan tentang kebidjaksa-

naan jang telah ditempuhnja. Keterangan Pemerintah itu diperdebatkan dalam (Badan Pekerdja) K.N.P. Dalam Sidang K.N.P. senantiasa perdebatan diachiri dengan keputusan jang mengandung sikap K.N.P. tentang kebidjaksanaan Pemerintah, misalnja dalam Sidang ke-V mengenai Persestudjuan Linggardjati. Akan tetapi perdebatan dalam Badan Pekerdja K.N.P. lazimnja tidak diachiri dengan sesuatu pernjjataan sikap.

2. Badan Pekerdja mengadakan interpelasi (minta keterangan), mengadakan pengusutan (angket) atau mengajukan pertanyaan² (kebanjakaan anggota² perseorangan), (seper dikemukakan diatas sub. B).
3. Dalam rapat kerdja tertutup antara Seksi² Tetap Badan Pekerdja K.N.P. dengan Menteri² jang bersangkutan dirundingkan berbagai soal², peristiwa² dan lain² jang termasuk kebidjaksanaan Menteri².
4. Menteri² jang bersangkutan turut serta menanda-tangani (membubuhi contraseignnja pada) Undang², Peraturan² Pemerintah dan lain² mengenai hal² jang termasuk lingkungan tanggung-djawabnja.

Diatas telah dikemukakan, bahwa perdebatan dalam Badan Pekerdja K.N.P. mengenai program atau kebidjaksanaan Pemerintah lazimnja diachiri begitu sadja, tanpa penentuan sikap oleh Badan Pekerdja. Memang selama ada Badan Pekerdja K.N.P., jang se-hari² melakukan tugas Komite Nasional Pusat, tidak pernah ada satu Kabinet-pun, jang djatuh karena votum Badan Pekerdja K.N.P. Kabinet² mengundurkan diri karena sebab-sebab diluar (Badan Pekerdja) K.N.P., misalnja Kabinet Sjahrir I karena oposisi dari Persatuan Perdjuaan dibawah pimpinan Tan Malaka ; Kabinet Sjahrir III karena oposisi dari Sajap Kiri dibawah pimpinan Amir Sjarifudin.

Lain dari itu, dari hal² jang dikemukakan diatas ternjata pula, bahwa sekalipun telah diadakan sistim pertanggung-djawab Menteri mulai tanggal 14 Nopember 1945, maka dalam keadaan genting dibentuk pula Kabinet presidensiil atau kekuasaan pemerintahan sepenuhnya kembali dipegang oleh Presiden, sedang para Menteri bertanggung-djawab kepada Presiden, tidak kepada (Badan Pekerdja) Komite Nasional Pusat.

D. Kedudukan Hukum

Sudah lama dirasakan oleh Badan Pekerdja perlunya suatu peraturan yang mengatur kedudukan hukum para anggota Badan Pekerdja/K.N.P. yang menegaskan kedudukan wakil² rakyat itu dalam „hidup bernegara” serta memberi kesempatan kepada mereka melaksanakan hak²-kewajiban² mereka sebaik²nja, dalam rapat² maupun ditengah-tengah masyarakat.

Pada achir tahun 1946 telah ada ketentuan mengenai kedudukan anggota² K.N.P., jaitu dalam Peraturan Presiden No. 6/1946 tentang Penjempurnaan Susunan KNP sewaktu menghadapi Sidang ke-V di Malang. Akan tetapi ketentuan itu hanyalah khusus mengenai djabatan² yang tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan K.N.P.

Menurut Peraturan Presiden No. 6/1946 tersebut „dibebaskan untuk melakukan kewajiban sebagai anggota K.N.P., mereka yang mendjabat pangkat² sebagai berikut ;

Presiden, Wakil Presiden Negara R.I.,
Menteri, Wakil Menteri,
Direktur Djenderal dan Sekretaris Djenderal Departemen,
Sekretaris Negara,
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung,
Ketua dan Hakim Mahkamah Agung,
Ketua Pengadilan Tinggi,
Djaksa Agung,
Presiden dan Wakil Presiden Bank Negara Indonesia,
Gubernur,
Residen dan Pradjurit Tentara dari pangkat Kolonel keatas.

Peraturan mengenai kedudukan hukum yang lebih lengkap baru ada dalam tahun 1948, dengan berlakunya Undang² No. 9/1948 sedjak 14 April 1948, jaitu suatu undang² yang berdasarkan usul inisiatif Badan Pekerdja K.N.P.

Undang² tersebut per-tama² menentukan djabatan yang tidak boleh dirangkap. tidak sadja bagi anggota² K.N.P. melainkan djuga anggota Badan Pekerdja K.N.P. Dan rumusan yang digunakan berupa larangan. Peraturan Presiden No. 6/1946 menentukan, bahwa anggota² K.N.P. yang memangku djabatan² tinggi tertentu „dibebaskan dari keanggotaan K.N.P.”. Tetapi Undang² No. 9/1948 menentukan, bahwa anggota² K.N.P. „tidak boleh merangkap” djabatan² tinggi tertentu, jaitu djabatan² menurut Peraturan Presiden itu, ditambah dengan djabatan²:

Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri,

Komisaris Negara,

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan,

Ketua, Wakil dan Anggota Mahkamah Tentara Agung,

Djaksa Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi, sedangkan jabatan

„Wakil Menteri” diganti dengan „Menteri Muda”. Bagi anggota²

Badan Pekerdja larangan² diperluas lagi ; mereka tidak boleh

merangkap jabatan² pegawai Negeri, anggota Badan Ekseku-

tif Badan Perwakilan Daerah dan pegawai daerah otonom.

Adapun anggota² K.N.P. jang karena keanggotaannya harus

mendjalankan pekerdjaan tertentu dalam waktu terbatas, ha-

rus dibebaskan dari pekerdjaan djawatannya sampai pekerdjaan

itu selesai.

Pada achir tahun 1949. menghadapi Sidang ke-VI K.N.P.

di Jogjakarta, sewaktu oleh Belanda telah didirikan negara²

boneka dikeliling daerah de facto Republik Indonesia, keten-

tuan mengenai jabatan itu ditambah dengan ketentuan seba-

gai berikut :

Anggota² K.N.P. jang memangku jabatan Kepala Negara

atau Daerah, Menteri, anggota² Dewan Perwakilan Negara/

Daerah dan pegawai tinggi (hoofdamtenaar) bukan dari Re-

publik Indonesia, dianggap tidak menjadi anggota K.N.P.

lagi.

Undang-undang tersebut selandjutnja mengatur sumpah, hak

imunitet, sematjam forum privilegiatum, kewadjiban instansi²

pemerintah untuk membantu dan kedudukan khusus anggota

(Badan Pekerdja) K.N.P. sebagai berikut :

1. Sebelum mulai memangku tugas-kewadjibannya anggota K.N.P. dan Badan Pekerdja mengutjapkan sumpah (djan-dji) dan sumpah atau pernyataan/djandji kebersihan, jaitu anggota K.N.P. dihadapan Presiden atau dalam rapat K.N.P. dihadapan Ketua K.N.P., sedangkan anggota Badan Pekerdja dalam suatu rapat Badan Pekerdja dihadapan Ketua.
2. Anggota K.N.P. tidak boleh dituntut karena sesuatu jang dilahirkannya dengan lisan dalam rapat-rapat pleno, panitia atau Seksi K.N.P./Badan Pekerdja, atau dalam surat jang disampaikan kepada rapat² tersebut.
3. Anggota K.N.P. jang melakukan kedjahatan/pelanggaran sewaktu mendjalankan hak-kewadjibannya diluar rapat

(Badan Pekerdja) K.N.P., diadili oleh Mahkamah Agung dalam peradilan pertama dan terachir.

Perkara² lain tetap diadili oleh pengadilan biasa.

4. Semua Kementerian, djawatan²/badan² diwadjibkan memberi bantuan dan keterangan² kepada anggota K.N.P. dalam melakukan kewadjabannja.
5. Anggota K.N.P. tidak mempunjai kedudukan sebagai pegawai Negeri dan karena itu menerima uang kehormatan (bagi anggota Badan Pekerdja) atau uang Sidang, uang djalan dan uang harian (bagi anggota K.N.P.), bukan gadji.
6. Anggota² Badan Pekerdja berhak menerima pensiun, anggota² K.N.P. tidak.

E. Kedudukan Keuangan

Kedudukan keuangan Ketua Badan Pekerdja telah diatur sedjak tahun 1945, dalam Penetapan Pemerintah No. I/O.P. tanggal 26 Okotber 1945, jang mengatur pula kedudukan keuangan Presiden, Menteri dan pedjabat² tinggi lainnja.

Menurut penetapan itu Ketua Badan Pekerdja mendapat gadji pokok Rp. 650,—, sama dengan gadji pokok Wakil Menteri, Sekretaris Negara, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Djaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Pemimpin Tinggi T.K R., Komisaris Tinggi dan Gubernur. Hanja pedjabat² itu sebagian menerima dan sebagian lain tidak menerima ongkos representasi.

Ketua Badan Pekerdja menerima ongkos representasi sama dengan Gubernur, ialah Rp. 200,—. Adapun Menteri menerima gadji pokok dan ongkos representasi lebih tinggi, jaitu Rp. 700 dan Rp. 300,—.

Dengan keluarnja ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) berdasar Undang² No. 17/1947 jang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1946, maka peraturan gadji tersebut diubah sedikit, ialah dengan Peraturan Presdien No. 5/1946 tanggal 28-12-46.

Perubahan itu menjangkut djumlah gadji pokok maupun ongkos representasi dan perbandingan antara gadji/ongkos representasi pedjabat-pedjabat tinggi. Ketua menerima gadji pokok Rp. 700,—, sama dengan Wakil Menteri, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Panglima Besar; tetapi diantara 4 pedjabat-pedjabat tinggi itu Ketua Badan Pekerdja mendapat ongkos representasi jang tertinggi, Rp. 150,—. Fedjabat-pedjabat lainnja mendapat gadji pokok dan ongkos

representasi jang sedikit lebih rendah, ketjuali Menteri dan Perdana Menteri, jang menerima lebih.

Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1947 Peraturan Presiden tersebut diubah dengan Peraturan Presiden No. 1/1947, jang mengubah lagi perbandingan kedudukan keuangan beberapa pedjabat² tinggi Negara.

Kembali kedudukan keuangan Ketua Badan Pekerdja disamakan dengan Gubernur, jaitu : gadji pokok antara Rp. 650,— dan Rp. 700,— dengan ongkos representasi Rp. 150,— Sekretaris Negara dan Pedjabat² lainnja mendapat gadji pokok jang sama atau sedikit kurang, tetapi ongkos representasinja semuanya lebih rendah.

Jang berbeda sekali ialah : gadji pokok dan ongkos representasi para Menteri tidak disebut sama sekali dalam peraturan itu. Rupa²nja mengenai para Menteri masih berlaku peraturan tahun 1946 tersebut.

Perubahan berikutnja baru terdjadi lebih-kurang 2½ tahun kemudian. Dengan pertimbangan, bahwa berhubungan berlakunja P.G.P. 1948 untuk pegawai sipil perlu diatur kembali djabat² jang tidak termasuk P.G.P. 1948 tersebut, oleh Pemerintah dikeluarkan Peraturan Presiden No. 2/1949, dengan membatalkan Peraturan² Presiden No. 5/1946 dan No 1/1947 tersebut diatas.

Menurut peraturan baru itu gadji pokok Ketua Badan Pekerdja sama dengan gadji Wakil Menteri dan Presiden Direktur Bank Negara, jaitu Rp. 750,— tetapi ongkos representasinia berbeda : Wakil Menteri Rp. 200,— Ketua Badan Pekerdja Rp. 150,—, Presiden Direktur Bank Negara tidak mendapat ongkos representasi. Selain dari itu kepada pedjabat² tinggi jang disebut dalam peraturan tersebut diberikan pula tondjangan keluarga dan tondjangan kemahalan menurut peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri.

Pada tahun 1950 terdjadi perubahan dua kali, tetapi perubahan² itu meliputi semua pegawai Negeri maupun pedjabat² tinggi tersebut diatas jang gadjinja diatur tersendiri. Perubahan pertama dilakukan dengan Peraturan Pemerintah No. 2/1950, jang mulai berlaku tanggal 1 Djanuari 1950 setelah Negara R.I.S. terbentuk.

Mengingat djauhnya perbedaan antara gadji pegawai R. I. dan pegawai² jang digadji menurut B.A.G. (pegawai² R.I.S.),

maka kepada pegawai² R.I. (termasuk pedjabat² tinggi termasuk diatas) diberikan tambahan gaji 75%. Perubahan kedua dilakukan dengan Peraturan Pemerintah No. 11/1950 terhitung mulai tanggal 1 Maret 1950. Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah R.I.S. No. 2/1950 tentang gaji upah pegawai R.I.S. yang bukan Belanda, gaji pokok pegawai² R.I. dinaikkan dengan 50% lagi.

Djelaslah kiranya dari hal² yang diuraikan diatas, bahwa kedudukan keuangan Ketua Badan Pekeraja K.N.P. kurang-lebih disamakan dengan kedudukan keuangan Wakil Menteri, jadi kurang dari kedudukan keuangan Menteri. Lain dari itu sedjak dari permulaan revolusi kedudukan keuangan itu telah diatur.

Berbeda dengan Ketua Badan Pekeraja, maka tentang kedudukan keuangan anggota Badan Pekeraja atau anggota K.N.P. mula² sama sekali tidak ada sesuatu peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kedudukan keuangan anggota (Badan Pekeraja) K.N.P. mula² ditetapkan oleh Badan Pekeraja sendiri, dengan persetujuan Kementerian Keuangan dalam hal pembayarannya, tanpa memuatnya dalam sesuatu peraturan, ataupun mengumumkannya dalam Berita Republik Indonesia. Maka kini tidak dapat djatakan dengan pasti bagaimanakah mula² kedudukan keuangan anggota (Badan Pekeraja) K.N.P. itu. Hanjalah dapat diketahui dari keterangan² beberapa bekas anggota² Badan Pekeraja, bahwa kepada anggota² K.N.P. maupun Badan Pekeraja mula² hanjalah diberikan sekedar uang sidang dan penggantian ongkos jalan.

Baru pada tahun 1948 ada ketentuan mengenai kedudukan keuangan itu, ialah dalam Undang² No. 9/1948 tentang kedudukan hukum anggota-anggota (Badan Pekeraja) K. N. P. tersebut diatas. Akan tetapi ketentuan itu baru merupakan ketentuan pokok, bahwa anggota K.N.P. menerima uang sidang, uang jalan dan uang harian ; sedangkan anggota Badan Pekeraja menerima uang kehormatan.

Peraturan yang diperintji mengenai kedudukan keuangan Badan Pekeraja untuk pertama kali baru dikeluarkan pada akhir bulan Djuli 1949. Peraturan itu berupa Peraturan Pemerintah No. 2/1949 tentang Penghargaan kedudukan anggota² Badan Pekeraja K.N.P. yang bersifat sementara berhubung dengan keadaan Badan Pekeraja maupun keadaan umum Negara

Republik Indonesia pada waktu itu. (Sewaktu itu Republik Indonesia baru pulih kembali setelah mengalami pendudukan Belanda setengah tahun dan daerah Republik Indonesia hanjalah meliputi daerah Istimewa Jogjakarta).

Menurut Peraturan Pemerintah tersebut anggota Badan Pekerdja mendapat :

- a. uang kehormatan sebesar Rp. 400,—,
- b. uang duduk sebesar Rp. 20,— untuk tiap² kali menghadiri rapat resmi dengan maksimum Rp. 300,— sebulan.

Akan tetapi hanjalah anggota² jang bertempat-tinggal di daerah Jogjakarta dapat menerima uang kehormatan maupun uang duduk itu. Adapun uang hadiah, uang kehormatan dan lain² jang telah diterima oleh Badan Pekerdja dari Kementerian Keuangan untuk anggota² jang tidak bertempat-tinggal di Jogjakarta, harus dikembalikan kepada Kas Negeri.

Peraturan tersebut diatas ini ditjabut kembali dengan Peraturan Pemerintah No. 29/1949 tentang Penghasilan anggota Badan Pekerdja K.N.P., jang mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1949 dan ditetapkan atas usul dari pihak Badan Pekerdja.

Menurut Peraturan jang baru itu anggota Badan Pekerdja diberi penghasilan Rp. 700,— sebulan, ditambah dengan tunjangan kemahalan menurut peraturan jang berlaku bagi pegawai negeri. Akan tetapi penghasilan itu hanjalah diberikan penuh kepada anggota jang memenuhi seluruh tugas-kewadajibanja, jaitu menghadiri semua rapat² pleno, Seksi maupun panitya-tetap. Anggota² jang tidak memenuhi tugas-kewadajibanja dikenakan potongan atas penghasilannja, jaitu kalau tidak menghadiri rapat² resmi 1 sampai 5 kali dipotong Rp. 40.— setiap kali, 6 sampai 10 kali Rp. 50,— setiap kali dan 11 kali atau lebih dikurangi Rp. 60 setiap kali. Anggota² jang tidak hadir terus-menerus dalam satu sidang tidak menerima pembajaran sama sekali.

Sebagaimana halnja dengan Ketua Badan Pekerdja dan pedjabat²/pegawai² Republik Indonesia Jogja pada umumnya, maka mulai 1 Djanuari 1950 penghasilan anggota Badan Pekerdja ditambah dengan 75% dan kemudian terhitung mulai tanggal 1 Maret 1950 dinaikkan lagi dengan 50%, untuk menyesuaikan dengan tingkatan gadji pegawai² R.I.S.

Pada tanggal 14 Agustus 1950 ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 29/1950 yang mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950. Peraturan Pemerintah tersebut memuat suatu peraturan khusus bagi anggota² Badan Pekeraja K.N.P. dan anggota² Dewan Pertimbangan Agung R.I., mengingat bahwa anggota² itu semuanya akan dimasukkan dalam D.P.R. Sementara Negara Kesatuan berdasarkan Undang² Dasar Sementara 1950. Kepada anggota² Badan Pekeraja K.N.P. dan anggota² D.P.A. yang ketika itu bertempat tinggal di daerah Jogjakarta tetapi berasal dari Daerah lain, diberikan penggantian ongkos jalan kalau mereka hendak kembali menetap di Daerah asalnya. Akan tetapi penggantian itu hanyalah diberikan untuk perjalanan pindah yang dilakukan dalam waktu 3 bulan terhitung dari tanggal 17 Agustus 1950.

Adapun dengan Peraturan Pemerintah No. 22/1950 tentang Tundjangan kepada Bekas Presiden dan pejabat² lain, kepada Ketua dan para anggota Badan Pekeraja K.N.P. diberi tundjangan yang bersifat pensiun.

Djumlah tundjangan untuk Ketua Badan Pekeraja adalah Rp. 50 sebulan untuk tiap² setengah tahun jabatan sebagai Ketua, dengan maksimum Rp. 400, sedangkan kepada para anggota Badan Pekeraja Rp. 25 untuk tiap² setengah tahun jabatan sebagai anggota, dengan maksimum Rp. 200 sebulan. Kalau pejabat² itu memangku jabatan sampai dua kali atau lebih, maka penetapan besarnya tundjangan didasarkan atas djumlah semua waktu² jabatan, yang dalam hal ini dianggap sebagai suatu waktu yang berlangsung terus-menerus, dengan membulatkan waktu yang kurang dari setengah tahun keatas menjadi satu tahun. Selandjutnja diberikan tundjangan kepada isteri (atau anak² dalam hal isteri telah meninggal) jika Ketua atau anggota Badan Pekeraja yang bersangkutan meninggal dunia. Tundjangan isteri/anak tersebut berdjumlah separoh dari tundjangan pejabat yang bersangkutan.

Mengenai anggota² K.N.P. perlu dikemukakan, bahwa tidak ada sesuatu peraturan mengenai kedudukan keuangannya selain ketentuan pokok dalam Undang² No. 9/1948 tentang Kedudukan Hukum anggota (Badan Pekeraja) K.N.P., yang telah dikemukakan diatas. Maka kepada anggota² K.N.P. yang menghadiri Sidang Pleno K.N.P. diberikan uang sidang dan uang harian selama Sidang serta penggantian ongkos perjalanan,

jang djumlah²nja disesuaikan dengan keadaan dan waktu sidang jang bersangkutan. Kepada bekas anggota² K.N.P. tidak diberikan tundjangan jang bersifat pensiun, seperti jang diberikan kepada bekas Ketua dan bekas anggota Badan Pekerdja K. N. P.

§ 4. PERATURAN TATA-TERTIB DAN PELAKSANAAN-NJA

A. Badan Pekerdja K.N.P.

Sewaktu Badan Pekerdja K.N.P. masih berkedudukan di Purwokerto, dari tanggal 17 Oktober 1945 sampai permulaan Maret 1946, tjara bekerdja Badan Pekerdja masih diliputi oleh suasana Revolusi. Rapat² Badan Pekerdja, baik dikalangan sendiri (mula-mula hanjalah 15 orang dan achir Desember 1945 25 orang, jang tidak selalu semuanya hadir) maupun bersama-sama dengan Pemerintah, dilakukan dalam suasana ramah-tamah/sederhana, tanpa formalitas-formalitas, tanpa sesuatu peraturan tata-tertib. Rapat-rapat Badan Pekerdja dalam periode itu semuanya bersifat tertutup bagi umum. Supaja rakjat umum dapat mengetahui pemitjaraan-pemitjaraan dalam Badan Pekerdja, sewaktu-waktu dikeluarkan pengumuman-pengumuman, jang tidak sadja disiarkan dalam surat²kabar, melainkan djuga diumumkan dalam penerbitan resmi Pemerintah, jaitu Berita Republik Indonesia.

Sebaliknya dari kalangan rakjat diharapkan usul², agar Badan Pekerdja dimana perlu dapat menjesuaikan diri dalam melakukan tugasnja sebagai badan legislatif.

Mengenai pemitjaraan dalam rapat² Badan Pekerdja hanjalah dibuat tjatatan ringkas (notulen).

Setelah berkedudukan di Purworedjo mulai bulan Maret 1946, Badan Pekerdja dapat melakukan tugasnja setjara lebih teratur daripada sebelumnya.

Di Purworedjo sistim sidang, jaitu rangkaian rapat² dalam waktu tertentu (beberapa hari), jang diselingi dengan "reces" pada waktu mana para anggota pulang ketempat tinggalnja masing² diluar Purworedjo, mulai dilaksanakan. Rapat² Badan Pekerdja mula² masih tertutup, tetapi kira² achir tahun 1946 mulai terbuka dan dihadiri oleh wakil² pers.

Selain melaksanakan tugas legislatif, membuat undang² ber-

sama² dengan Pemerintah, Badan Pekerdja mendjalankan pula pengawasan atas Pemerintah (para Menteri), jang dianggap terkandung dalam sistim pertanggungangan djawab Menteri.

Untuk melaksanakan tugas legislatif Badan Pekerdja mempunyai panitia² jang mengadakan pemeriksaan-persiapan atas suatu rantjangan undang², sebelum rantjangan itu dibitjarakan dalam rapat pleno Badan Pekerdja bersama dengan Menteri jang bersangkutan untuk diputuskan.

Untuk memperhatikan urusan kerumah-tangga, Badan Pekerdja telah pula mempunyai suatu Panitia Rumah-Tangga. Selandjutnja dalam rangka tugas pengawasan, Badan Pekerdja mengadakan tanja-djawab (interpelasi dengan Menteri²), seperti telah dikemukakan diatas dalam paragraf 3.

Tata-kerdja Badan Pekerdja dalam periode itu telah mulai diatur dalam suatu Peraturan Tata-tertib sederhana, jang sa-jang sekali kini tidak dapat diketemukan kembali. Maka tidak dapat diaturnya dengan selengkapnja, bagaimakah tatakerdja Badan Pekerdja dalam melaksanakan tugasnja pada masa itu.

Peraturan Tata-tertib Badan Pekerdja satu²nja, jang kini masih ada adalah Peraturan Tata-tertib tanggal 10 Djuni 1947.

Peraturan Tatatertib itu terdiri dari 9 Bab sebagai berikut :

1. Tentang Ketua dan Wakil Ketua,
2. Tentang Sekretaris,
3. Tentang penjelidikan soal², dengan paragraf²nja mengenai Panitia Tetap, Seksi dan Panitia Rumah Tangga,
4. Tentang Sidang, Rapat terbuka, Rapat tertutup, dan penetapan atjara, *
5. Tentang perundingan (dalam rapat pleno),
6. Tentang pemungutan suara (lisan maupun mengenai orang),
7. Tentang tjara anggota mempergunakan haknja (jaitu : mengajukan usul interpelasi, mengadakan pengusutan dan pengadjuan pertanyaan).
8. Tentang perhubungan dengan rakjat,
9. Tentang penindjau.

Menurut Peraturan Tata-tertib tersebut Ketua Badan Pekerdja adalah Ketua K.N.P. Ini sesuai dengan kenyataan, bahwa dalam Sidang ke-V K.N.P. di Malang (Maret 1947) K.N.P. telah memilih Mr. Assaat sebagai Ketua K.N.P. Bukan seba-

liknja seperti dalam Sidang² ke-III dan ke-IV, pada waktu mana Ketua Badan Pekerdja (kebetulan Mr. Assaat pula) mengetuai (mendjadi Ketua) K.N.P. Ketua tidak mempunyai hak suara; akan tetapi Wakil² Ketua Badan Pekerdja (jaitu Wakil Ketua I dan II), jang dipilih diantara dan oleh para anggota setjara rahasia keduanya mempunyai hak suara.

Kalau pada tahun-tahun 1945 dan 1946 masih ada djabatn „Penulis” Badan Pekerdja, jang dipangku oleh salah seorang anggota, maka sedjak tahun 1947 Sekretariat Badan Pekerdja dipimpin oleh seorang Sekretaris pegawai negeri, bukan anggota. Dan hal ini ditegaskan dalam Peraturan Tata-Tertib, jang selandjutnja mewadjibkan Sekretaris untuk menjelenggarakan pemberitaan stenografis mengenai tiap-tiap rapat Badan Pekerdja.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam paragraf 3, maka pembentukan undang-undang dilakukan dengan bantuan Panitia-Panitia Tetap atau panitia khusus, jang mengadakan pembitjaraan persiapan. Seluruh anggota-anggota Badan Pekerdja dibagi dalam 5 Panitia Tetap demikian rupa, sehingga dalam tiap-tiap Panitia Tetap terdapat perwakilan dari berbagai aliran jang ada dalam Badan Pekerdja. Djumlah Panitia Tetap itu kemudian dikurangi mendjadi 3 buah. Panitia khusus dibentuk setjara insidental untuk mengadakan penjelidikan (pemeriksaan-persiapan) atas sesuatu rantjangan undang-undang atau usul-usul lain.

Selain Panitia-panitia Tetap dan panitia khusus Badan Pekerdja mempunyai Seksi-seksi dan Panitia Rumah Tangga.

Seksi-seksi Badan Pekerdja berdjumlah enam, ialah :

- 1) Luar negeri,
- 2) Dalam Negeri,
- 3) Pembangunan,
- 4) Penerangan,
- 5) Pertahanan Negara dan
- 6) Kemasjarakatan.

Seksi-seksi itu berkewadjiban :

- a. Memperhatikan kebidjaksanaan Pemerintah dalam hal-hal jang masuk urusan Seksi,
- b. Memperhatikan kesulitan-kesulitan Pemerintah dalam menjalankan Undang-undang,
- c. Mendengar suara rakjat dalam hal-hal tersebut sub a, a.l.

dengan menerima rakjat pada hari-hari tertentu dan memperhatikan surat-surat masuk,

- d. Melakukan penjelidikan atas peristiwa-peristiwa penting atas kehendak sendiri atau atas keputusan Badan Pekerdja.
- e. Mengajukan usul-usul dan laporan-laporan tentang soal² yang termasuk urusannja kepada Badan Pekerdja.

Panitia Rumah Tangga terdiri dari 4 orang anggota, jang bersama-sama dengan Ketua Badan Pekerdja berkewajiban mengawasi Sekretariat dalam mengurus kerumah-tanggaaan Badan Pekerdja, mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai Sekretariat ketjuali Sekretaris dan membuat rantjangan anggaran belandja Badan Pekerdja/K.N.P.

Mengenai tata-kerdja Badan Pekerdja pleno, Peraturan Tata-tertib 1947 menentukan bahwa Sidang-sidang Badan Pekerdja dilakukan tiap-tiap bulan antara tanggal 10 dan 25, dengan mengadakan rapat-rapat terbuka atau djika perlu, atas usul Pemerintah, Ketua atau sekurang-kurangnya 3 orang anggota, djuga rapat-rapat tertutup. Anggota-anggota berkewajiban menghadiri Sidang-sidang dan kalau berhalangan, harus memberitahukannya sebelum Sidang dimulai, disertai alasan-alasan jang tjukup; demikian pula kalau setelah datang menghadiri Sidang hendak meninggalkan. Kalau sampai berturut-turut tidak menghadiri Sidang tanpa alasan-alasan, anggota dikenakan sanksi dan Badan Pekerdja dapat mengusulkan pemberhentiannja dari keanggotaan.

Rapat Badan Pekerdja adalah sah, djika dihadiri lebih dari separoh anggota-anggota. Djika pada djam pembukaan jang telah ditetapkan diurelah tersebut belum tertjapai, maka Ketua dan anggota-anggota jang hadir menentukan waktu rapat jang akan datang. (Djadi tidak diadakan penundaan untuk menunggu tertjapainja quorum).

Atjara rapat-rapat ditetapkan oleh Ketua Badan Pekerdja bersama-sama dengan Ketua-ketua Seksi dan dalam rapat pleno para anggota-anggota dapat mengusulkan perubahan-perubahan.

Untuk tertibnja perundingan para anggota harus mengindahkan beberapa ketentuan : Harus mendapat izin Ketua untuk berbitjara, berbitjara pada tempat tertentu dan menurut giliran, tidak menggunakan kata-kata jang menghina/menjinggung perasaan, tidak menjimpang dari persoalan perundingan atau mengganggu ketertiban.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran, Ketua dapat mengambil tindakan-tindakan seperlunya, yaitu: melarang anggota yang bersangkutan berbitjara, mengusulkan rapat agar anggota itu dilarang menghadiri rapat selanjutnya, bahkan menghentikan rapat atau mengundurkannya pada hari lain.

Perundingan dapat dilakukan dalam tiga giliran, dengan kewajiban bagi para anggota menuliskan pidatonya dalam giliran pertama dan pokok-pokok pidatonya dalam giliran kedua, untuk disampaikan kepada Sekretaris. Anggota-anggota yang tidak minta bitjara tidak diberi giliran, sedangkan anggota-anggota yang telah mentjatatkan namanya tetapi tidak berbitjara dalam giliran pertama maupun kedua, tidak boleh berbitjara dalam giliran ketiga. Adapun mengenai giliran berbitjara itu Ketua dapat menentukan waktu lamanya.

Setelah perundingan tentang sesuatu soal selesai, rapat memungut suara, yaitu setjara lisan atau setjara tertulis (rahasia) kalau mengenai orang.

Pemungutan suara setjara lisan dilakukan dengan memanggil para anggota seorang demi seorang, pada waktu mana yang bersangkutan berkewajiban memberikan suaranya dengan kata-kata „setudju” atau „tidak” (suara „blanko” tidak dibolehkan) atau setjara duduk berdiri, dengan menghitung para anggota-anggota yang bersangkutan, yaitu yang duduk berarti tidak setuju dan yang berdiri berarti setuju. Keputusan baru sah, kalau tertjapai suara terbanyak mutlak. Dalam hal suara setuju sama banyaknya dengan suara tidak setuju, pemungutan suara diulangi; tetapi kalau sampai dua kali hasilnya sama, diadakan undian untuk memperoleh keputusan.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam paragraf 3. Peraturan Tata-tertib 1947 memuat pula ketentuan-ketentuan tentang tjara anggota mempergunakan haknya, ialah hak-hak: memajukan usul, interpelasi, mengadakan pengusutan dan memajukan pertanyaan.

Hanya perlu ditambahkan, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, kemudian menjadi kebiasaan Badan Pekerja pula, yang tidak diatur dalam Peraturan Tata-tertib, untuk mengadakan „Hari Pertanyaan”—, mendengar Keterangan Pemerintah tentang kebidjaksanaan yang telah atau akan dijalankan oleh Pemerintah. Keterangan Pemerintah itu kemudian diperdebatkan, dengan mengadakan pemandangan umum, biasanya

sampai dalam dua babak, (atau menurut istilah Peraturan Tata-tertib „giliran”) dan djawaban Pemerintah. Dalam perdebatan itu sebagian besar anggota turut serta, sehingga seluruh perdebatan sering sampai memakan waktu beberapa hari. Biasanya perdebatan diachiri begitu sadja: sehabis djawaban Pemerintah jang terachir tidak diambil suatu keputusan atau kesimpulan, berupa mosi atau pertanyaan lain-lain.

Achirnja perlu dikemukakan, bahwa Peraturan Tata-tertib Badan Pekerdja itu memuat ketentuan-ketentuan mengenai hubungan dengan rakjat/umum, jang pokoknja adalah sebagai berikut :

Selama Badan Pekerdja bersidang sekurang-kurangnya satu hari disediakan untuk menerima rakjat jang ingin menjampaikan keluh-kesah, keberatan, pendapat atau usul; jang berkewadajiban menerima adalah Seksi jang bersangkutan. Adapun dalam rapat-rapat pleno terbuka Badan Pekerdja, umum (para penindjau) dilarang menjatakan persetudjuannya/tjelaan dengan tjara apapun djuga. Ketua dapat menjuruh mengeluarkan penindjau jang mengganggu ketertiban.

B. Komite Nasional Pusat.

Peraturan Tata-tertib Komite Nasional Pusat biasanya dibuat oleh Badan Pekerdja djika menghadapi suatu sidang K.N.P., misalnja menghadapi Sidang ke-IV K.N.P. di Solo sebelum Maret 1946; menghadapi Sidang ke-V K.N.P. di Malang sebelum Maret 1947. Akan tetapi jang kini masih ada hanjalah Peraturan Tata tertib K.N.P. terachir, jang digunakan untuk Sidang ke-VI K.N.P. di Jogjakarta achir tahun 1949 dan ditetapkan oleh Badan Pekerdja tanggal 1 Desember 1949. Namun demikian kiranja dapat disimpulkan, bahwa pokok-pokok tata-kerdja dalam sidang-sidang K.N.P. sebelum sidang terachir di Jogjakarta tersebut, praktis sama dengan tata-kerdja jang diatur dalam Peraturan Tata tertib K.N.P. tanggal 1 Desember 1949, hanja perumusannya dalam peraturan tata tertib terachir itu lebih sempurna.

Peraturan Tata-tertib tersebut memuat 7 Bab sebagai berikut:

1. Tentang Ketua dan Wakil Ketua, ,
2. Tentang Sekretaris,
3. Tentang Panitia,

4. Tentang Rapat, ,
5. Tentang pemungutan suara,
6. Tentang penindjau dan
7. Tentang memadjukan usul dan lain-lain oleh anggota.

Menurut Peraturan Tata-tertib tersebut Ketua (dan Wakil Ketua kalau Ketua berhalangan) berkewadajiban terutama: merantjag daftar pekerdjaan, mengatur dan memimpin pekerdjaan K.N.P., mendjaga ketertiban rapat, mendjalankan putusan rapat, dsb.

Djika Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, maka mereka diwakili oleh anggota jang paling tinggi usianja.

Sekretaris berkewadajiban menjelenggarakan pemberitaan stenografis dari tiap-tiap rapat K.N.P.

Djika perlu Ketua, setelah berembug dengan Wakil Ketua, dapat membentuk Panitia-panitia, dengan persetudjuan K.N.P., ialah untuk melakukan pekerdjaan bagi K.N.P. dan memberikan laporan kepadanya.

Tata-kerdja rapat pleno K.N.P. pada pokoknja sama dengan rapat pleno Badan Pekerdja, jang diuraikan diatas, termasuk djuga pemungutan suara setelah perundingan mengenai suatu soal selesai. Demikian pula halnja kewadajiban bagi para penindjau. Hanja mengenai rapat-rapat pleno K.N.P. ditambahkan ketentuan, bahwa dalam rapat pleno K.N.P., Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri dan para Menteri mempunyai tempat duduk jang tertentu; sedangkan atjara rapat-rapat disusun oleh Badan Pekerdja, dengan pengesahan K.N.P.

Selandjutnja perlu dikemukakan, bahwa ketentuan-ketentuan Peraturan Tata-tertib K.N.P. tentang „Memadjukan usul dan lain-lain oleh anggota“, adalah mirip dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Tata-tertib Badan Pekerdja 1947 tentang „tjara anggota menggunakan haknja“. Hanja sadja rumusan-rumusan dalam Peraturan Tata-tertib K.N.P. adalah sangat ringkas dan hanjalah memuat ketentuan-ketentuan pokok, bahwa 10 orang anggota dapat :

1. Minta putusan rapat tentang suatu soal jang bersangkutan dengan pokok pembijtaraan atau soal-soal lain;
2. minta persetudjuan rapat untuk minta keterangan Pementah mengenai soal jang tidak termasuk atjara;
3. mengusulkan, agar diadakan pengusutan (angket),

Selain itu tiap-tiap anggota K.N.P. berhak memajukan pertanjan-pertanjan tertulis kepada Pemerintah melalui Ketua.

Ketentuan-ketentuan tentang „hak-hak” K.N.P. itu praktis tidak pernah terlaksana.

Achirnja perlu kiranja diutarakan, bahwa baik dalam Peraturan Tata-tertib Badan Pekerdja 1947 maupun dalam Peraturan Tata-tertib K.N.P. 1949 tidak terdapat ketentuan-ketentuan mengenai wewenang atau tugas K.N.P./Badan Pekerdja „ikut menetapkan garis-garis besar haluan Negara” menurut Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945.

Hanja dalam praktek Badan Pekerdja pernah menggunakan wewenang itu, jaitu dengan menjampaikan usul kepada Pemerintah, jang kemudian didjadikan „Maklumat Politik” tanggal 1 Nopember 1945. Dan K.N.P., dengan keputusan-keputusannja dalam Sidang-sidangnja, chususnja Sidang Pleno ke-V dan ke-VI mengenai Persetujuan Linggardjati dan Hasil² K.M.B., pada hakekatnja melaksanakan wewenang „ikut menetapkan garis-garis besar haluan Negara” itu.

§ 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH

Dalam periode Komite Nasional Pusat dan Badan Pekerdja K.N.P., dari Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai pulihnja kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, banjak sekali terdjadi peristiwa-peristiwa bersedjarah. Tetapi jang akan diuraikan dalam paragraf ini hanjalah beberapa kedjadian-kedjadian bersedjarah jang mempunjai hubungan dengan (tugas-tugas) Komite Nasional Pusat atau Badan Pekerdja K.N.P., dari tahun 1945 sampai tahun 1950.

A. Permulaan Perdjjuangan Fisik

Suatu hal jang harus dihadapi oleh Republik Indonesia segera setelah lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, adalah soal tentara Djepang.

Djepang pada waktu itu merupakan negara jang kalah perang dan Komando Asia Tenggara dari Tentara Serikat telah memerintahkan Pemerintah Balatentara Djepang di Indonesia untuk memelihara status quo politik, jaitu tetap melakukan pemerintahannja sampai Tentara Serikat itu tiba.

Segera setelah Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, Pemerintah Balatentara Djepang telah memerintahkan pembubaran Peta, Heiho dan organisasi-organisasi bersendjata Indonesia lainnja. Namun demikian, di banjak daerah-daerah kesatuan-kesatuan Peta, tidak mentaati perintah itu dan tetap memegang sendjatanja, bahkan dengan semangat kemerdekaan jang berkobar-kobar bersama organisasi² pemuda lainnja, melutjuti kesatuan-kesatuan tentara Djepang. Dan dimana ditempat-tempat tentara Djepang tidak menjerahkan sendjatanja setjara sukarela, terdjadilah bentrokan-bentrokan sendjata antara pemuda-pemuda Indonesia dan tentara Djepang. Dari organisasi-organisasi bersendjata itu terbentuklah pada bulan Agustus 1945 berdasarkan keputusan-keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan tanggal 22 Agustus 1945 dan atas usaha Komite-komite Nasional : BKR (Badan Keamanan Rakjat), jang pada tanggal 5 Oktober 1945 mendjadi TKR (Tentara Keamanan Rakjat) dan lebih landjut berkembang mendjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) dan achirnja TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Masalah Djepang ini baru berachir, setelah Tentara Serikat datang di Indonesia dan kemudian selesai mengangkut pulang tentara Djepang kenegerinja (baru bulan Djuni 1946).

Tentara Serikat (di Djawa : Inggris), jang mulai mendarat di Djakarta pada tanggal 29 September 1945 berkewadjiban : melutjuti dan menerima penyerahan diri tentara Djepang serta mengurus pengembaliannja ke Djepang, mengurus tawanan perang dan tahanan Sekutu (APWI, Allied Prisoners and War Interneers), serta memelihara keamanan dan ketertiban sampai „Pemerintah Hindia Belanda” dapat berkuasa kembali. Maka bersama Tentara Serikat turut masuk pula ke Indonesia: tentara dan pedjabat-pedjabat pemerintahan Belanda NICA (Netherland Indies Civil Administration), jang segera berusaha memulihkan pemerintahan djadjahan di Indonesia. NICA itu kemudian diganti dengan AMACAB (Allied Military Civil Administration Branch).

Dalam hubungan dengan usaha-usaha NICA/AMACAB itu, maka menurut Pengumumannja No. 6 tanggal 11 Nopember 1945, Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat antara lain mengusulkan kepada Pemerintah, „untuk menghindarkan kedaulatan

Negara dari gangguan-gangguan orang-orang Belanda yang bernaung dibawah lindungan AMACAB", supaya Pemerintah mengirimkan protes kepada pimpinan Tentara Serikat dan supaya memberikan rasa ketenteraman pada rakyat dengan menempatkan beberapa bataljon T.K.R. di kota-kota yang tidak aman".

Usaha-usaha Belanda itu, yang telah dimulai di Australia agaknya tidak mendapat simpati dari Pemerintah dan rakyat Australia pada waktu itu, yang memberikan bantuan lahir-bathin kepada perjuangan bangsa Indonesia, jaitu dengan turut sertanja kaum buruh Australia dalam pemogokan pelaut-pelaut Indonesia (yang ditudjukan kepada Belanda) dipelabuhan-pelabuhan Brisbane dan Melbourne serta pengembalian pelaut-pelaut Indonesia itu ketanah air. Berkenaan dengan bantuan itu Komite Nasional Pusat dalam Sidang Plenonja ke-III pada tanggal 27 Nopember 1945 menetankan Resolusi utjapan terima kasih kepada rakyat dan Pemerintah Australia umumnja, kaum buruh chususnja.

Sewaktu Tentara Serikat tiba di Indonesia banjak Daerah-daerah sudah dikuasai oleh bangsa Indonesia sendiri dan tidak lagi ditangan Djepang. Maka dalam melaksanakan tugasnja tersebut diatas. Tentara Serikat mendahulukan pemulihan keamanan dan ketertiban daripada perlutjutan tentara Djepang. Tentara Serikat (Inggris dan India), bahkan menggunakan tentara Djepang untuk menjerang dan menguasai beberapa kota, yang telah ditangan bangsa Indonesia. Demikianlah terdjadi pertempuran-pertempuran antara bangsa Indonesia dan Tentara Serikat itu, yang dibantu oleh tentara Djepang dan kemudian djuga Belanda. Pertempuran-pertempuran tidak hanja terdjadi di Djawa, Sumatera, melainkan djuga di Bali, Sulawesi dan sebagainja, dan diantaranya yang dahsiat adalah pertempuran Surabaja selama lebih dari dua minggu sekitar tanggal 10 Nopember 1945, pada waktu mana tentara Inggris menggunakan kekuatan-kekuatan darat, laut dan udara untuk menundukkan pedjuang-pedjuang bangsa Indonesia, berhubung dengan matinja Brigadir Diedern Mallaby. Pertempuran Surabaja yang banjak menimbulkan korban dikalangan bangsa Indonesia itu, kemudian meniebabkan penetapan tanggal 10 Nopember mendjadi Hari Pahlawan. Dan disamping perlawanan-perlawanan yang diberikan oleh bangsa Indonesia didaerah-daerah lain, per-

lawanannya di Surabaya itu menundukkan kepada Tentara Serikat, bahwa Republik Indonesia benar-benar didukung oleh seluruh Bangsa Indonesia, sehingga menyebabkan Tentara Serikat mendesak Belanda, agar bersedia berunding dengan Republik Indonesia.

Berkenaan dengan penjerangan Inggris atas Surabaya itu, Badan Pekeraja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 Nopember 1945 mentjela dengan keras perbuatan tentara Inggris yang melukai perasaan peri kemanusiaan dan bertentangan dengan inti sari „San Francisco Charter” (Piagam P.B.B.).

Selanjutnya Komite Nasional Pusat dalam Sidang Plenonja ke-III pada tanggal 27 Nopember 1945 dengan Resolusinja antara lain menetapkan :

1. Menjatakan protes yang sekeras-kerasnya kepada Putjuk Pimpinan Tentara Inggris di Indonesia atas penjerangan-penjerangan angkatan laut, darat dan udaranya atas rakyat dan daerah-daerah Indonesia,
2. Menuntut kepada Putjuk Pimpinan United Nations untuk menjuruh Inggris memperhentikan serangannya yang kedjam atas rakyat Indonesia dengan segera,
3. Menjatakan, bahwa tindakan-tindakan rakyat di Surabaya, Semarang, Magelang dan lain-lainnya, adalah semata-mata tindakan-tindakan pembelaan diri dari rakyat yang mendjung-djung tinggi kedaulatan dan kehormatan bangsanya terhadap penjerangan-penjerangan Inggris - Belanda yang tidak ber-alasan,
4. Mengandjurkan kepada Pemerintah Republik Indonesia, supaya menjampaikan permintaan kepada Putjuk Pimpinan United Nations untuk menarik kembali tentara pendudukan Inggris-Belanda dari Indonesia, dengan perdjandjian, bahwa penjelenggaraan tawanan Djepang dan keamanan tawanan Serikat, diselesaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan bekerdja-sama dengan suatu Komisi dari wakil-wakil United Nations,
5. Menjelesaikan soal pertikaian politik di Indonesia dengan tjara damai dan langsung dihadapan wakil-wakil Negara-negara United Nations.

Dan berhubung dengan keputusan Dewan Negara Ceylon tanggal 23 Nopember 1945 yang berisi pernyataan simpati kepada

perjuangan kemerdekaan Indonesia dan permintaan kepada Pemerintahnya agar jangan memberi bantuan untuk menindas kemerdekaan bangsa Indonesia, Komite Nasional Pusat selanjutnya menetapkan :

1. mengutjapkan terima kasih kepada Dewan Negara Ceylon atas putusan tersebut,
2. mengandjurkan kepada bangsa Ceylon dan India serta seluruh dunia jang menghendaki keadilan, supaya memberi tondjangan lahir-bathin kepada Bangsa Indonesia dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaannya dan mentjegah Indonesia didjadikan Mansuria jang kedua oleh Inggris untuk kepentingan Belanda.

Demikianlah peristiwa-peristiwa bersedjarah dalam tahun 1945 dalam menghadapi Tentara Djepang, Inggris dan Belanda, serta permulaan usaha-usaha Belanda untuk memulihkan pendjadjahannya atas Indonesia.

B. Timbulnja partai-partai politik

Sebagaimana telah disinggung dalam paragraf-paragraf sebelumnya, maka berdasarkan keputusan-keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan tanggal 22 Agustus 1945, semula telah diadakan usaha-usaha persiapan untuk mendirikan satu partai tunggal bernama „Partai Nasional Indonesia“. Akan tetapi usaha-usaha itu kemudian dibatalkan dengan berdirinja Komite Nasional Pusat dan Komite-komite Nasional Daerah. Dan atas usul Badan Pekerdja K.N.P., selanjutnya Pemerintah dengan Maklumat tanggal 3 Nopember 1945 menjatakan sebagai pendiariannya :

1. Pemerintah menjukai timbulnja partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin kedjalan jang teratur segala aliran paham jang ada dalam masjarakat,
2. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakjat. (Pemilihan ini diharapkan dapat dilakukan pada bulan Djanuari 1946, tetapi kemudian ternjata tidak terlaksana dalam masa K.N.P./B.P.-K.N.P. ini),

Sesuai dengan usul Badan Pekeraja K.N.P. diberikan kesempatan seluas-luasnja kepada rakyat untuk mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi, bahwa partai-partai itu hendaknja memperkuat perjuangannya mempertahankan kemerdekaan dan mendjamin keamanan masyarakat.

Berhubung dengan Maklumat Pemerintah itu kemudian berturut-turut berdiri sebagai partai politik, diantaranya sebagai berikut :

Pada tanggal 7 Nopember 1945 muntjul P.K.I. (Partai Komunis Indonesia) dibawah pimpinan Mr. Moh. Jusuf, yang telah mendirikanja pada tanggal 21 Oktober. Mr. Moh. Jusuf kemudian diganti oleh Sardjono.

Pada permulaan Nopember 1945 itu didirikan pula : Partai Islam Masjumi (Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia) dibawah pimpinan dr. Sukiman Wirjosandjojo pada tanggal 7 Nopember, P.B.I. (Partai Buruh Indonesia) dengan Njono sebagai Ketua Umum dan Partai Rakyat Djelata dibawah pimpinan Sutan Dewanis pada tanggal 8 Nopember, Parkindo (Partai Kristen Indonesia) diketuai oleh Ds. Probowinoto dan Partai Sosialis Indonesia dibawah pimpinan Mr Amir Sjarifuddin pada tanggal 10 Nopember, disusul oleh Partai Rakyat Sosialis dibawah pimpinan Sutan Sjahrir pada tanggal 20 Nopember.

Dalam bulan Desember 1945 dibentuk P.K.R.I. (Partai Katholik Republik Indonesia) pada tanggal 8, diketuai oleh I.J. Kasimo, Permai (Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia) dengan J.B. Assa sebagai Ketua Umum dan Partai Sosialis, sebagai gabungan dari Partai Sosialis Indonesia — Amir Sjarifudin dan Partai Rakyat Sosialis — Sutan Sjahrir tersebut diatas, jaitu pada tanggal 17 Desember. Partai Sosialis itu dipimpin oleh Sutan Sjahrir, Amir Sjafirudin dan Oei Hwee Goat.

Dalam bulan-bulan Nopember/Desember 1945 itu lahir pula Partai Republik Indonesia. Gerakan Republik Indonesia dan Serikat Rakyat Indonesia, yang kemudian pada tanggal 29 Januari 1946 mendjelma mendjadi P.N.I. (Partai Nasional Indonesia) dibawah pimpinan Sidik Djojokusarto.

Partai-partai yang didirikan pada akhir tahun 1945 dan permulaan tahun 1946 itu kemudian kebanyakan memegang peranan dalam perjuangan politik, baik didalam Komite Nasional Pusat dan Badan Pekeraja Komite Nasional Pusat maupun di-

luar kedua badan perwakilan rakjat itu, disamping berbagai organisasi-organisasi perdjuaan lainnja.

Sebagaimana telah disinggung dalam paragraf 2, maka mula-mula tidak djelas perwakilan dari berbagai partai-partai jang telah berdiri sedjak achir tahun 1945 dan permulaan tahun 1946 itu, akan tetapi lambat laun (sedjak kira-kira pertengahan/achir tahun 1946) nampak dengan njata susunan perwakilan dari partai-partai itu dalam Komite Nasional Pusat maupun dalam Badan Pekerdja K.N.P.

Pada tahun-tahun berikutnja timbul partai-partai lain pula, seperti. P.S.I. (Partai Sosialis Indonesia), P.S.I.I. (Partai Sjarikat Islam Indonesia), Partai Murba, P.I.R. (Persatuan Indonesia Raya) dan lain-lain.

Dalam hubungan dengan partai-parti ini perlu kiranja diemukakan pula terbentuknja konsentrasi partai-partai dan organisasi-organisasi lainnja sebagai berikut : Pada tanggal 15 Djanuari 1946. setelah lebih dahu'u pada tanggal 4-5 Djanuari 1946 diadakan pertemuan di Purwokerto, terbentuklah di Solo Persatuan Perdjuaan dibawah pimpinan Tan Malaka. Dalam Persatuan Perdjuaan itu bergabung berbagai partai-partai politik dan organisasi-organisasi lain sebanyak lebih kurang 140 buah, jang tidak dapat mendukung politik Kabinet Sjahrir.

Kemudian atas andjuran dari Pemerintah (Kabinet Sjahrir) didirikan pada tanggal 11 Mei 1946 suatu organisasi baru : Konsentrasi Nasional, dalam mana masuk berbagai partai/organisasi jang mendukung Kabinet Sjahrir, termasuk beberapa partai/organisasi jang semula mendjadi anggota Persatuan Perdjuaan tetapi kemudian meninggalkannja. Dalam hubungan dengan Persetudjuan Linggardjati selandjutnja terbentuk pada achir Desember 1946 dua koalisi-koalisi baru, jaitu Benteng Republik jang kontra persetudjuan tersebut, dengan antara lain Masjumi, P.N.I. dan golongan Tan Malaka sebagai anggota, berhadapan dengan Sajap Kiri jang pro Persetudjuan Linggardjati, dalam mana duduk antara lain Partai Sosialis, P.B.I. dan P.K.I.

Setelah terdjadi pemisahan diri P.S.I. dari Partai Sosialis (djuga dari Sajap Kiri) dan tertjapai Persetudjuan Renville, terbentuklah F.D.R. (Front Demokrasi Rakjat). jang menentang Kabinet-Hatta dan terdiri dari Partai Sosialis, P.B.I., P.K.I. dan lain-lain.

C. Perdjuaan Indonesia melawan Belanda.

Hubungan Indonesia — Nederland sedjak tahun 1946 sampai tahun 1950 merupakan silih-bergantinja serta djalin-mendjalin-nja perundingan-perundingan dan pertempuran.

Persetudjuan Linggardjati dan Perang Kolonial pertama.

Inggris sudah banjak membantu Belanda dengan menduduki kota-kota jang semula dikuasai penuh oleh bangsa Indonesia dengan kekerasan dan kemudian menjerahkannya kepada Belanda. Menghadapi kenyataan bahwa pelaksanaan tugas jang dipikulkan kepadanya oleh Serikat mengalami kesulitan-kesulitan dengan telah berdirinja Negara Republik Indonesia, maka Inggris mendesak Belanda supaya menyelesaikan masalah Indonesia-Belanda melalui djalan perundingan. Untuk memprakarsai perundingan Indonesia—Belanda oleh Inggris mula-mula dikirimkan Duta Inggris di Moskow Sir Archibald Clark Kerr sebagai Duta Istimewa ke Djakarta. Pembitjaraan tidak resmi pertama antara Clark Kerr, Sjahrir dan Van Mook diadakan pada permulaan Pebruari 1946. Sementara itu Kabinet Sjahrir mengundurkan diri sewaktu Sidang Pleno K.N.P. berlangsung di Solo pada achir Pebruari 1946 disebabkan oleh oposisi „Persatuan Perdjuaan”, jang berusaha menduduki Kabinet agar dapat melaksanakan program 7 pasalnja, diantaranya :

1. Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%,
2. Menjita serta menjelenggarakan pertanian (perkebunan) dan perindustrian dari musuh.

Usaha Persatuan Perdjuaan jang tampaknya berhasil dengan djatuhnja Kabinet Sjahrir ke-I, kenyataannja tidak menjapai maksudnja, karena Presiden menundjuk kembali Sjahrir sebagai formateur Kabinet, dengan program sbb :

1. Berunding atas dasar pengakuan Republik Indonesia Merdeka 100%.
2. Mempersiapkan rakjat negara disegala lapangan : politik, ketentaraan, ekonomi dan sosial untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.
3. Menjusun pemerintahan pusat dan daerah jang demokratis.
4. Berusaha segiat-giatnja untuk menjempurnakan pembagian makanan dan pakaian.

5. Tentang perusahaan dan perkebunan hendaknja oleh Pemerintah diambil tindakan-tindakan seperlunya hingga memenuhi maksud sebagai termaktub dalam UUD pasal 33.

Penundjukan Sjahrir sebagai formateur Kabinet itu diumumkan oleh Presiden dalam Sidang Pleno Komite Nasional Pusat pada tanggal 2 Maret 1946.

Setelah Kabinet Sjahrir ke-II terbentuk pada 12 Maret 1946, diadakan dua kali pembijtaraan dengan pihak Belanda dibawah pimpinn Sir Archibald Kerr, jaitu pada tanggal 13 dan 30 Maret 1946.

Sementara itu 9 bataljon tentara Belanda mendarat di Djakarta, dan Perdana Menteri Sjahrir memprotesnja.

Perundingan dilandjutkan di De Hoge Veluwe Nederland tanpa hasil. Pada waktu itu Republik Indonesia diwakili oleh Mr. Suwandi, dr. Sudarsono dan Mr. A.K. Pringgodigdo, ditambah dengan Mr. Setiadjud (ketika itu anggota Tweede Kamer Belanda) dan Drs. Maruto Darusman (Ketua Perhimpunan Indonesia).

Pada tanggal 2 Mei 1946 Belanda menjampaikan usul sbb :

1. Mengakui Republik Indonesia sebagai bagian dari Commonwealth Indonesia jang berbentuk federasi (Serikat).
2. Commonwealth Indonesia Serikat disatu fihak dan Nederland Guyana dan Antillen dilain fihak akan merupakan bagian-bagian dari Keradjaan Belanda.
3. Keradjaan Belanda akan mengakui Republik Indonesia de facto menguasai seluruh Djawa, Madura dan Sumatera, ketjuai daerah-daerah jang sudah diduduki oleh Inggris dan Belanda.

Usul tersebut ditolak oleh Indonesia dan diadjukan kontra usul :

1. Belanda supaja mengakui Republik Indonesia de facto menguasai seluruh Djawa, Sumatera dan Madura.
2. Pembentukan negara Indonesia jang merdeka, jang meliputi seluruh Indonesia jang mengadakan perhubungan persahabatan dengan Nederland.

Kontak dan perundingan permulaan antara Republik Indonesia dan Belanda itu tidak luput dari perhatian Badan Pekerdja

K.N.P.: Segera setelah Delegasi Mr Suwandi cs ke De Hoge Veluwe tiba di Tanah Air. Badan Pekerdja K.N.P. melalui „Badan Penghubung”nja (jaitu anggota-anggota jang tetap bertempat tinggal di Djakarta sesudah Badan Pekerdja K.N.P. berkedudukan di Purworedjo), mengadakan pertemuan dengan delegasi tersebut

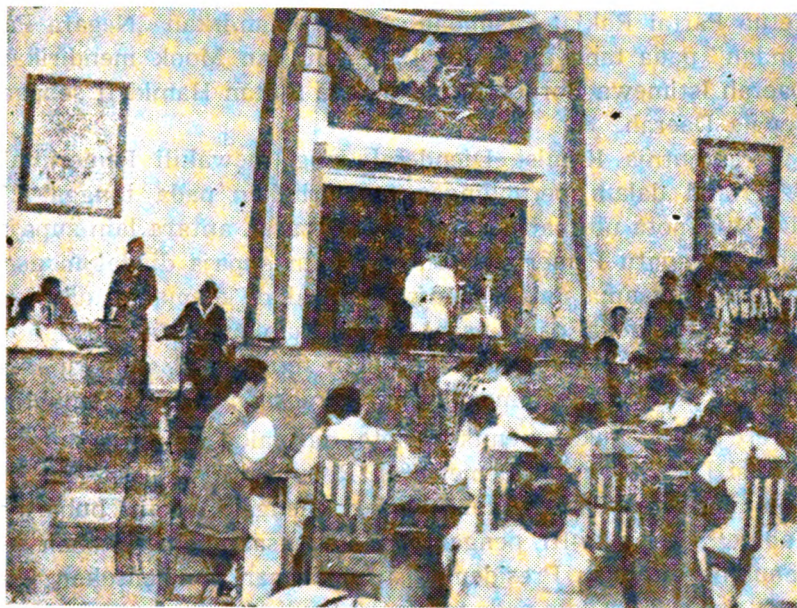
Kemudian pada tanggal 29 Mei 1946 Badan Pekerdja K.N.P. mengadakan apa jang disebut „interpelasi” dengan Perdana Menteri Sjahrir untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai perundingan dengan Belanda selanjutnja.

Sementara itu pada tanggal 27 Djuni 1946 Perdana Menteri Sjahrir dan rombongan ditjuluk oleh gerombolan tak bertanggung-djawab, sehingga Presiden untuk sementara mengambil seluruh kekuasaan pemerintah ditangannja. Dan tanggal 3 Djuli terdjadi pertjobaan coup d’etat oleh Maj. Djen. Sudarsono dkk. Adapun dipihak Belanda Dr. H.J. Van Mook memulai usaha² separatisme dengan mengadakan Konperensi Malino mulai tanggal 16 Djuli 1946.

Inggris berusaha sekali lagi supaya sengketa Indonesia-Belanda diselesaikan dalam perundingan, maka diutuslah pada tanggal 25-8-1946 Lord Killearn, Duta Istimewa di Asia Tenggara. Setelah Kabinet Sjahrir ke-III terbentuk pada tanggal 2 Oktober 1946 diadakan beberapa kali perundingan dan achirnja tertjapai persetudjuan dengan diparafnja Persetudjuan Linggardjati pada tanggal 15 Nopember 1946. Naskah Persetudjuan Linggardjati terdiri dari 17 pasal dan diantaranja mentjantumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanda mengakui Republik Indonesia de facto diseluruh Djawa, Madura dan Sumatera.
2. Akan didirikan suatu Negara Indonesia Serikat, meliputi seluruh Indonesia jang terdiri atas Republik Indonesia, Indonesia Timur dan Borneo. Kedaulatan dan kemerdekaan Negara Indonesia Serikat ini selambat-lambatnja harus sudah ditjapai pada tanggal 1 Djanuari 1949.
3. Negara Indonesia Serikat dan Nederland akan mendjadi anggota Uni Indonesia — Nederland, dengan Mahkota Belanda sebagai kepala.

Sementara itu Dr. H.J. Van Mook melanjutkan usaha memetjah belah : Konperensi Den Pasar tanggal 10 Desember 1946 berachir dengan pembentukan „Negara Indonesia Timur”, jang kemudian disusul dengan pembentukan Negara-negara/Daerah-daerah lain diluar Republik Indonesia.



*Presiden Sukarno sedang membuka Sidang KNIP ke V di Malang
tgl. 25 Februari 1947*

(Photo Deppen)

Baru pada tanggal 25 Maret 1947, persetudjuan ditandatangani di Djakarta setelah Komite Nasional Pusat dalam Sidang Pleno ke-V di Malang (pada tanggal 6 Maret 1947) menjetudjuai Persetudjuan Linggardjati, demikian pula (lebih dahulu) Parlemen Belanda.

Sebagaimana akan dikemukakan dalam paragraf 6, maka persetudjuan Komite Nasional Pusat itu hanjalah dapat diperoleh melalui pertentangan jang sengit antara golongan-golongan jang pro (Sajap Kiri) dan kontra (Benteng Republik), baik dalam Komite Nasional Pusat maupun dalam Badan Pekerdja K.N.P.

Tetapi dalam kenjataanja Belanda tidak mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia di Djawa, Madura dan Sumatera

itu. Belanda bukan hanya mempertahankan kota-kota yang sudah diduduki, malahan memperluas kedudukannya. Belanda melakukan pemboman kota Palembang pada tanggal 1 Januari 1947, selanjutnya dibom pula Medan, Krian dan Sidoarjo di Jawa Timur diserbu. Semuanya terdjadi pada waktu berlakunya „cease fire”. Lain dari itu Belanda „membiarkan” Surja Kartalegawa, Ketua Partai Rakjat Pasundan, memproklamirkan „Negara Pasundan” pada tanggal 4 Mei 1947 dan Van Mook mendirikan Daerah Istimewa Borneo-Barat dengan Sultan Hamid II sebagai Kepala Daerah.

Selanjutnya Komisi Djenderal yang mewakili Pemerintah Nederland dalam perundingan mengirimkan pada tanggal 27 Mei 1947 nota ultimatif, yang isinya 5 pasal, antara lain supaya dibentuk suatu Pemerintah Interim dan supaya diadakan gendarmerie-bersama untuk menjelenggarakan keamanan dan ketertiban. Mengenai pasal-pasal tersebut umumnya pihak R.I. ada kesediaan untuk give and take, akan tetapi soal gendarmerie-bersama ditolak, sebab mengurangi kekuasaan de facto Republik.

Terdjadilah tukar-menukar nota dan aide memoire antara Komisi Djenderal dan Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini menimbulkan suasana genting dan mengakibatkan bubarnya Kabinet Sjahrir ke-III, pengambilan kekuasaan pemerintahan sepenuhnya ditangan Presiden, disusul dengan pembentukan Kabinet Amir Sjarifudin pada tanggal 3 Djuli 1947. Tukar-menukar nota dilandjutkan. Akan tetapi tanpa mengindahkan ketentuan dalam Persetudjuan Linggardjati, bahwa dalam menghadapi perselisihan harus menjerahkan keputusannya pada sebuah arbitrage, Belanda mengadakan „aksi polisionilnya” pada tanggal 21 Djuli 1947: Tentara Belanda menjerang Republik Indonesia dari segala jurusan, dengan alat perang modern.

Dengan „aksi polisionil” atau perang kolonial yang pertama ini Belanda bermaksud menjadikan soal Indonesia soal dalam negerinya, tetapi akhirnya malahan menjadi soal luar negeri yang panas sekali, sebab Dewan Keamanan P.B.B. lebih aktif lagi menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda.

Persetudjuan Rouville dan Perang Kolonial Kedua.

Dengan tertjapainya Persetudjuan Linggardjati yang ditandatangani tanggal 25-3-1947, deradkat Indonesia diluar negeri makin naik; antara lain Inggris dan Amerika Serikat mengakui ke-

kuasaan de facto Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret dan 23 April 1947; Mesir, Libanon, Syria dan Irak mengakui de facto dan de jure Republik Indonesia serta mengadakan perdjandjian persahabatan.

Pelanggaran sefihak oleh Belanda dengan perang kolonialnja jang pertama, dengan mengatakan bahwa agresinya itu dianggap perlu dilakukan untuk mendjamin keamanan dan ketertiban supaya Persetudjuan Linggardjati dapat dilaksanakan dengan baik, mendapat tjelaan jang hebat dari dunia internasional. Inggris, Amerika Serikat, negara-negara Arab, India, Australia dan lain-lain menyalahkan fihak Belanda, hingga menimbulkan perdebatan-perdebatan sengit didalam Dewan Keamanan P.B.B.

Pada achir bulan Djuli 1947 Australia minta supaya Indonesia dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan dan mengusulkan supaya kedua fihak menghentikan permusuhan. Selandjutnja India minta supaya Dewan Keamanan mengambil tindakan mengenai soal Indonesia, karena dipandang membahayakan perdamaian dunia, dan Amerika mengharapkan agar Dewan Keamanan menawarkan djasa-djasa baiknja, karena Republik Indonesia menghendaki arbitrage dibawah pengawasan P.B.B. Maka Dewan Keamanan mengambil keputusan pada tanggal 1 Agustus 1947:

1. Berseru kepada Indonesia dan Belanda supaya segera menghentikan tembak menembak.
2. Konsul-konsul jang ada di Djakarta supaya membuat laporan tentang keadaan di Indonesia jang sesungguhnya.
3. Membentuk Komisi Tiga Negara (KTN), jang memberikan djasa-djasa baik untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda.

Penjusunan KTN selesai dibentuk pada tanggal 19 September 1947 dengan Belgia jang ditundjuk oleh Belanda, Australia ditundjuk oleh Indonesia dan Amerika sebagai negara ketiga jang ditundjuk oleh Belgia dan Australia.

Karena tidak terdapat persesuaian mengenai tempat dimana diadakan perundingan permulaan, maka disetudjui untuk memakai kapal Amerika „Renville” jang sedang berlabuh diteluk Djakarta, sebagai tempat perundingan.

Delegasi Nederland dipimpin oleh Abdulkadir Widioioatmodjo dan Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifudin.

Pada tanggal 17 Djanuari 1948 ditanda-tangani Persetujuan Renville, jang terdiri atas 3 dokumen jang merupakan kesatuan, ialah :

- a. Persetujuan tentang gendjatan sendjata.
- b. Dua belas pokok jang merupakan dasar untuk perundingan politik, diantaranya termasuk 3 pokok dalam Persetujuan Linggardjati.
- c. Enam dalil tambahan (additional principles) dari KTN.

Dalam pada itu pada tanggal 23 Djanuari 1948 Kabinet Amir Sjarifudin bubar, diganti oleh Kabinet Hatta (Kabinet Presiden-siil) pada tanggal 29 Maret 1948, dengan frogramnja :

1. Menjelenggarakan Persetujuan Renville.
2. Melckaskan terbentuknja Negara Indonesia Serikat.
3. Mengadakan rasionalisasi kedalam.
4. Pembangunan.

Persetudjuan Renville itu tidak dibitjarakan dalam Komite Nasional Pusat, jang sesudah Sidang Pleno ke-V di Malang (untuk membitjarakan Persetujuan Linggardja'i) 25 Pebruari - 6 Maret 1947, baru bersidang kembali tanggal 6—15 Desember 1949 untuk membitjarakan Perdjangjian K.M.B.

Badan Pekerdja K.N.P.-lah jang senantiasa memperhatikan dan mengikuti perundingan-perundingan Indonesia — Belanda selama itu. Dan Badan Pekerdja K.N.P. membitjarakan Persetujuan Renville, sesudah pada tanggal 16 Pebruari 1948 Perdana Menteri Hatta memberikan Keterangan Pemerintah mengenai Program Kabinet, termasuk mengenai Persetujuan Renville.

Dalam menjelenggarakan Persetujuan Renville dengan rasa berat beberapa tuntutan-tuntutan Belanda terpaksa dipenuhi oleh Republik Indonesia, misalnja sadja menerima garis status quo Van Mook, jang akibatnja TNI harus dihidjrahkan dari daerah-daerah kantong dalam daerah jang diduduki Belanda. Berkat kepatuhan pada Pimpinan Negara, 35.000 tentara R.I. hidjrah ke daerah Republik Indonesia.

Namun soal-soal jang sangat prinsipiil, supaja R.I. tidak mempunjai tentara, supaja R.I. tidak mengadakan hubungan keluar negeri, hingga R.I. kedudukannja sama sadja dengan Negara-negara Bagian buatan Belanda, tidak mungkin dipenuhi.

Berbagai matjam kesulitan jang dihadapi dalam pemetjahan perselisihan Indonesia — Belanda sebenarnja terletak dalam hakekat pendirian masing-masing jang belum bertemu dan pangkal tolaknja berbeda. Belanda menghendaki tetap berdaulat di Indonesia, sesuai dengan jang dianggapnja hak sedjarahnja menguasai Indonesia selama 3½ abad, apalagi karena dalam pasal 1 Additional Principles ditjantumkan: „Kedaulatan atas Hindia Belanda seluruhnja ada dan akan tetap ditangan Keradjaan Nederland sampai waktu jang ditetapkan”.

Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa kedaulatan adalah ditangan bangsa Indonesia, jang sedjak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah mempunyai Negara Republik Indonesia. Pemerintah R.I. menerima pasal 1 Additional Principles K.T.N. diatas, dan mau bekerdja-sama dengan Belanda dalam suatu Pemerintahan Sementara, karena pertimbangan, bahwa segala sesuatu ini diperlukan untuk melantjarkan pembentukan Negara Indonesia Serikat jang berdaulat. Djadi pada hakekatnja R.I. tidak melepaskan kedaulatannja, dan karena itu tidak mau melepaskan alat-alat jang sangat vital berupa tentara dan hubungan luar negeri

Maka tuduh-menuduh, protes-memprotes dilantjarkan oleh kedua fihak, sedangkan KTN belum menampakkan hasil-hasil positif. Malahan dalam laporannja tanggal 17 Djuni 1948 diakuinja, bahwa pelaksanaan Persetudjuan Renville masih sama saja mengalami kesulitan-kesulitan seperti Persetudjuan Linggardjati. Djuga andjuran Dewan Keamanan kepada KTN supaya perhubungan ekonomi dengan luar negeri dilaksanakan dalam waktu singkat, supaya Negara Indonesia Serikat dibentuk sejara demokratis dan supaya Uni Indonesia-Belanda dibentuk atas dasar 2 negara sederajat, tidak menghasilkan apa-apa.

Sementara itu Van Mook terus membentuk „Negara-negara” didaerah-daerah jang diduduki Belanda: „Negara Madura” tanggal 20 Pebruari 1948, „Negara Pasundan” tanggal 23 Pebruari 1948, disusul dengan pembentukan „Pemerintah Federal Sementara” dibawah pimpinan Van Mook pada tanggal 9 Maret 1948.

Achirnja penjelenggaraan Persetudjuan Renville, jang diawasi langsung oleh KTN ini dengan nekad dilanggar oleh Belanda, ialah dengan mengadakan perang kolonial („aksi polisionil”)—nja kedua. Tanggal 19 Desember 1949 Republik Indonesia diserbu.Ibukota R.I. Jogja dan kota-kota lain diduduki, para

pemimpin² Republik Indonesia ditawan: Presiden Soekarno, Wakil Presiden/Perdana Menteri Moh. Hatta, Ketua (Badan Pekerja) K.N.P. Assaat dan lain-lain. Belanda merasa mentjapai kemenangan besar ; tetapi achirnja arus perdjoangan berbalik, Belanda mau tidak mau mengakui keunggulan perdjoangan Republik Indonesia.

Konperensi Medja Bundar

Belanda membanggakan diri telah menduduki seluruh wilayah Republik Indonesia. Akan tetapi dalam kenjataanja Belanda hanjalah berkuasa dikota-kota. Dipinggir-pinggir kota, didesa-desa dan daerah-daerah lain masih tetap berkuasa alat pemerintahan Republik Inonesia, dengan T.N.I.-nja, jang melaksanakan perang gerilja bersama dengan rakjat.

Perang Kolonial Belanda jang kedua ini segera mendapat perhatian dunia internasional.

India mengambil prakarsa mengadakan Konperensi Asia di New Delhi, jang pada tanggal 32 Djanuari 1949 mengutuk agresi Belanda dan mengadjudkan resolusi kepada Dewan Keamanan. Dan pada tanggal 28 Djanuari 1949 Dewan Keamanan P.B.B. menjetudjui sebuah resolusi jang pada pokoknja memerintahkan:

- a. Supaja segera dilakukan „cease fire” (penghentian tembakan-menembak).

- b. supaja pemimpin-pemimpin Republik Indonesia segera dibebaskan dan dikembalikan ke Jogja.

K.T.N. berubah mendjadi United Nations Commision for Indonesia (Unci, Komisi P.B.B. untuk Indonesia); dan Unci dibawah pimpinan anggota dari Amerika Serikat Cochran mengusahakan perundingan antara Dr. Van Royen dari Belanda dan Mr. Moh. Rum dari R.I.

Tertjapailah pada tanggal 7 Mei 1949 „Persetudjuan Rum-Royen”, jang antara lain mengandung kesediaan Belanda untuk membebaskan pemimpin-pemimpin R.I. dan mengembalikannja ke Jogja, serta kesediaan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta untuk memerintahkan penghentian perang gerilja dan turut serta dalam Konperensi Medja Bundar di Den Haag.

Tanggal 7 Djuni 1949 Presiden dan Wakil Presiden kembali di Jogjakarta dan pada tanggal 13 Djuni 1949 Kabinet pleno R.I. dapat bersidang kembali. Dalam sidang itu Mr. Sjafrudin Prawiranegara mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno.

Pada tanggal 19—22 Djuli dan tanggal 2 Agustus 1949 berikutnya diadakan Konperensi Inter Indonesia antara Republik Indonesia dan daerah-daerah negara buatan Belanda, yang tergabung dalam B.F.O. (Bijeenkomst voor Federaal Overleg = Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal) .Kesimpulan-kesimpulan Konperensi itu merupakan bahan-bahan untuk K.M.B., yang akan diselenggarakan.

Pada tanggal 23 Agustus 1949 dimulai K.M.B. di Den Haag. Delegasi R.I. dipimpin oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, delegasi B.F.O. oleh Sultan Hamid II, delegasi Belanda oleh Mr. J.H. Van Maarseveen, sedangkan 4 anggota U.N.C.I. yang turut serta adalah: Cochran, Critchlev, Herremans dan Romanos.

Adapun diantara anggota-anggota dan staf ahli-ahli Delegasi R.I. terdapat juga anggota-anggota/bekas anggota Badan Pekerdja K.N.P., yaitu Mr. Sujono Hadinoto, Mr. Sunario Kolopaking, Hamid Algadrie dan Mr. Tan Po Goan.

K.M.B. berakhir pada tanggal 29 Oktober 1949 dan menghasilkan pada pokoknja :

1. Induk Persetujuan,
2. Persetujuan-persetujuan :
 - a. Piagam Penjerahan Kedaulatan (dari Keradjaan Nederland kepada Republik Indonesia) dengan tidak bersyarat.
 - b. Statut Uni, mengenai kerdja-sama dalam hal Uni Indonesia — Nederland ;
dengan lampiran-lampiran dan persetujuan-persetujuan lampiran :
 1. Persetujuan mengatur kerdja-sama dalam lapangan perhubungan luar negeri,
 2. Persetujuan untuk melaksanakan pasal 2 dan 21 Statut Uni,
 3. Persetujuan Keuangan dan Perekonomian,
 4. Persetujuan tentang kerdja-sama dilapangan kebudayaan.

Pada tanggal 29 Oktober 1949 oleh R.I. dan B.F.O. ditandatangani pula Piagam Persetujuan tentang Konstitusi R.I.S. sebagai tanda paraf atas naskah Konstitusi R.I.S.

Konperensi Medja Bundar itu diikuti dengan seksama oleh B.P.K.N.P., baik selama konperensi berlangsung maupun sesudahnja. Pada tanggal 23 Oktober 1949 misalnja, B.P.K.N.P. mendengarkan keterangan Pemerintah, jang disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Sultan Hamengkubuwono ke IX.

Adapun hasil-hasil K.M.B. itu, jang disetudjui oleh Kabinet R.I., pada tanggal 18 Oktober 1949. kemudian dibawa kedalam Sidang Pleno K.N.P. ke VI jang berlangsung antara tanggal 6—15 Nopember 1949 (mengenai Sidang akan diuraikan lebih landjut dalam § berikutnja).

Sekitar Pemberontakan Madiun.

Setelah Persetujuan Renville ditanda-tangani pada tanggal 17 Djanuari 1948, pertentangan politik di Tanah air makin tadjam.

Pertentangan mengenai persetujuan itu menjebabkan antara lain penggantian Kabinet Amir Sjarifudin oleh Kabinet-presidensiil Moh. Hatta.

Kabinet Hatta jang terbentuk pada tanggal 29 Djanuari 1948 itu, berprogram :

1. Menjelenggarakan Persetujuan Renville.
2. Melekaskan terbentuknja Negara Indonesia Serikat.
3. Mengadakan rasionalisasi kedalam.
4. Pembangunan.

Sajap Kiri jang kemudian mendjelma mendjadi F.D.R., tidak menjetudjui kebidjaksanaan Kabinet Hatta dan melakukan oposisi.

Pada bulan Agustus 1948 tiba kembali di Indonesia dari Eropa Suripno dan Muso, tokoh-tokoh P.K.I. jang bertahun-tahun bertempat tinggal diluar negeri (Sovjet Rusia/Tjekoslowakia).

Atas andjuran Muso maka kemudian P.B.I. dan Partai Sosialis berfusi dengan P.K.I. dan terbentuklah P.K.I. baru dibawah pimpinan Muso.

Oposisi terhadap Pemerintah makin meningkat.

Dalam rapat umum pada tanggal 22 Agustus 1948 di Jogjakarta, Muso antara lain menuntut supaya Pemerintah menghentikan perundingan dengan Belanda, mengadakan pertukaran duta dengan Sovjet Rusia dan supaya sepertiga (1/3) dari kursi Kabinet disediakan untuk anggota PKI/FDR.

Pertentangan politik dalam masjarakatpun meningkat, mi-

salnja antara golongan P.K.I./F.D.R. dengan golongan Persatuan Perjuangan, terutama di Surakarta, antara golongan P.K.I./F.D.R. dan Barisan Banteng jang dipimpin oleh dr. Muwardi. Terdjadilah pentjulikan-pentjulikan, pemogokan-pemogokan, insiden-insiden bersendjata, diantaranya pentjulikan pembunuhan terhadap dr. Muwardi, pemogokan Delanggu, dsb.

Keadaan tanah air sewaktu itu sudah barang tentu mendapat perhatian Badan Pekerdja K.N.P., antara lain B.P. K.N.P: mengadakan penindjauan ke „daerah-daerah statusquo”, menugaskan Panitia Angket jang diketuai oleh Mr. Sartono untuk menjelidiki Pemogokan Delanggu, mendengar dan membitjarakan keterangan Pemerintah tentang Program Kabinet Hatta dan lain².

Pada tanggal 18 September 1948 pagi P.K.I./F.D.R. merebut kekuasaan pemerintahan di Madiun. Komandan-komandan kesatuan, kepala pemerintah setempat dan lain-lain pedjabat/tokoh-tokoh masjarakat dilutjuti, ditangkap, ditawan dan/atau dibunuh, Supardi diangkat mendjadi Residen dan Kolonel Djojokusono mendjadi Gubernur militernja. Selandjutnja kota-kota lain dikeresidenan Madiun dikuasainja dengan kekerasan.

Berhubung dengan peristiwa itu pada tanggal 19 September 1948 diadakan Sidang Kabinet, jang mengambil keputusan : Menjatakan gerakan P.K.I./F.D.R. sebagai pemberontakan terhadap Pemerintah, memerintahkan Angkatan Perang beserta alat-alat negara lainnja untuk memulihkan kekuasaan Negara.

Selandjutnja pada hari berikutnya, tanggal 20 September 1949, Wakil Presiden/Perdana Menteri Moh. Hatta memberikan keterangan Pemerintah tentang peristiwa Madiun tersebut kepada B.P. K.N.P. disertai permintaan persetudjuan atas rantjangan undang-undang tentang „Pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya”.

Dengan menjadari sepenuhnja bahaya jang mengantjam Negara B.P. K.N.P. menjetui RUU tersebut. jang pada hari tersebut ditetapkan mendjadi Undang-undang No. 30 tahun 1948. Satu-satunja pasal Undang-undang tersebut berbunji : „Selama 3 bulan terhitung mulai tanggal 15 September 1948 kepada Presider diberikan kekuasaan penuh (plein puvoir) untuk mendialankan tindakan-tindakan dan mengadakan peraturan-peraturan, dengar menjimpang dari undang-undang dan peraturan-peraturan jang ada, guna mendjamin keselamatan Negara dalam menghadapi keadaan bahaya jang memuntjak”.

Dalam pada itu berdasarkan perintah Presiden untuk memulihkan kekuasaan negara di Madiun, kesatuan-kesatuan T.N.I. segera bergerak kedaerah Madiun, baik dari arah Timur dibawah pimpinan Kolonel Sungkono maupun dari arah Barat (Divisi I Siliwangi) dibawah pimpinan Let. Kol. Sadikin.

Pada tanggal 30 September 1948 kota Madiun dapat dikuasai kembali dan selandjuinja kota-kota/daerah lainnja. Setelah kemudian Mr. Amir Sjarifudin dan kawan-kawannja dapat ditangkap hidup, dan pada tanggal 31 Oktober 1948 Muso ditembak mati, berachirlah pemberontakan P.K.I./F.D.R. di Madiun.

Namun demikian pembersihan sisa-sisa pemberontak masih terus berlangsung. Pembersihan² tersebut terhenti karena adanya agresi kedua Belanda dan kemudian mengenai pemberontakan P.K.I./F.D.R. tidak adanya penjelesaian lebih landjut, politis maupun juridis.

Oleh karena itu pada waktu² sesudah agresi Belanda kedua anggota² P.K.I. berangsur-angsur muntjul kembali setelah Pemerintah R.I. kembali ke Djokja.

§ 6. HASAL-HASIL PEKERDJAAN

A. Badan Pekerdja K.N.P.

Sedjak Proklamasi Kemerdekaan sampai pulihnja kembali Negara Kesatuan R.I. tanggal 17 Agustus 1950, Badan Pekerdja K.N.P. disamping menghasilkan pekerdjaan-pekerdjaan berupa mosi, resolusi, usul dan lain-lain telah menjetudjui 133 Rantjangan Undang-undang, jang perintjian tiap-tiap tahunnja adalah sebagai berikut :

Tahun 1945	—	1 buah
Tahun 1946	—	24 buah
Tahun 1947	—	41 buah
Tahun 1948	—	35 buah
Tahun 1949	—	12 buah
Tahun 1950	—	20 buah.

Mengenai hasil-hasil pekerdjaan dalam tahun 1945 jang penting-penting diantaranya dapat disebutkan dibawah ini :

1. U.U. No. 1/1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Undang-undang ini ialah undang-undang jang pertama dalam

Republik Indonesia dan undang-undang satu-satunya pada tahun 1945. Undang-undang ini dilahirkan atas usul inisiatif Badan Pekerdja jang merupakan usul inisiatif pertama dalam sedjarah D.P.R. Undang-undang tersebut memberikan latif kepada Komite Nasional Daerah, dengan sebagian angkedudukan Badan Perwakilan Daerah dengan tugas legisgota-anggotanja sebagai Badan Eksekutif dibawah pimpinan Kepala Daerah.

2. Usul Badan Pekerdja tentang Politik Luar dan Dalam Negeri, berdasarkan usul tersebut lahirlah Maklumat Politik Pemerintah tanggal 1 Nopember 1945.

Pemerintah pada waktu itu menitik-beratkan perdjoaanja pada lapangan diplomasi. Maka Badan Pekerdja dengan usulnja jang memberikan arah bagaimana politik luar dan dalam negeri harus didjalankan, untuk pertama kali melakukan tugas M.P.R. „ikut menetapkan garis-garis besar haluan Negara”.

Maklumat Politik Pemerintah jang berdasarkan usul Badan Pekerdja termaksud, mengandung pernyataan kepada dunia luar, bahwa atas dasar pengakuan kedaulatan Negara dan Pemerintah Republik Indonesia, Bangsa Indonesia bersedia :

- a. Bekerdja-sama dengan semua bangsa-bangsa, terutama Amerika Serikat, Australia, Philipina, dan Belanda. dengan menerima pula bantuan kredit/penanaman modal asing;
 - b. Mengakui segala hutang „Hindia-Belanda” jang patut ditanggung;
 - c. Mengembalikan milik bangsa asing dan membayar ganti kerugian untuk milik jang diperlukan oleh Negara;
- Mengenai usaha-usaha didalam negeri akan dilakukan :
- a. Pelaksanaan kedaulatan rakjat dengan aturan kewarganegaraan.
 - b. Penielenggaraan pemilihan umum.
 - c. Penjelenggaraan rentjana kemakmuran dsb.

Maklumat Politik ini mendjadi pedoman Pemerintah untuk mendjalankan kebidjaksanaan perdjoaanja pada waktu² berikutnya.

Hasil-hasil pekerdjaan Badan Pekerdja dalam tahun 1945 tidak begitu banjak mengingat bahwa selama kurang dari 6 bulan

itu pemimpin-pemimpin kita sibuk sekali dengan melaksanakan pengambilan alih kekuasaan dari tangan Djepang dan peneragaan Pemerintah Republik Indonesia, dengan mengerahkan setjara maximum seluruh potensi rakyat menghadapi kembalinja pendjadjahan Belanda di Indonesia.

Selama tahun 1946 Badan Pekerdja disamping menjelesaikan 24 Undang-undang bersama-sama dengan Pemerintah mengambil pula keputusan-keputusan lainnja.

Jang penting diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No.2/1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara dengan sistim passifnja, jang dimaksudkan untuk menegakkan kedudukan Negara dan kemudian antara lain mendjadi dasar bagi orang-orang asing untuk mendjadi warga-negara Republik Indonesia,
 2. Undang-undang No. 4/1946 tentang Pindjaman Nasional untuk mendapatkan uang guna keperluan² pertahanan dan pembangunan,
 3. Undang-undang No. 6/1946 tentang Keadaan Bahaja, jang diadakan untuk mendjamin keselamatan Negara dalam menghadapi bahaja, baik dari luar maupun dari dalam. Undang-undang ini pada hari mulai berlakunja (tanggal 6 Djuni 1946) dan hari berikutnya sudah segera dipakai sebagai dasar untuk menjatakan Djawa dan Madura dalam keadaan bahaja, berhubung telah terdjadinja serangan-serangan dan adanja bahaja serangan dari pihak Belanda/Inggris. Pada tanggal 28 Djuni 1946 bahkan seluruh Indonesia dinjatakan dalam keadaan bahaja, berhubung adanja serangan dan bahaja serangan tersebut serta adanja pen-tjulikan Perdana Menteri beserta rombongannja sehari sebelumnya.
- Selanjutnja Undang-undang tersebut digunakan pula untuk membentuk Dewan Pertahanan Negara, dan Dewan-dewan Pertahanan Daerah baik di Pusat maupun didaerah
4. Undang-undang No. 17 dan 19 tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia jang menundjukkan kedudukan Republik sebagai negara merdeka, dengan menghentikan berlakunja uang asing (Djepang).
 5. Undang-undang No. 12/ 1946 jang dimaksudkan sebagai

dasar untuk memperbaharui susunan Komite Nasional Pusat, agar dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat (a.l. juga kepartaian), tetapi kemudian ternyata tidak sampai dilaksanakan dan diganti dengan Peraturan Presiden No. 6/1946 tentang Penjempurnaan Komite Nasional Pusat.

Sebagai pendjelasan perlu dikemukakan, bahwa per-undang²-an ketika itu meliputi pula undang-undang pengesahan, yang menetapkan Peraturan-peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi undang-undang atau mengesahkan/memperpanjang berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara. Peraturan-peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ditetapkan oleh Pemerintah „dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa” menurut pasal 22 UUD 1945, sedangkan peraturan-peraturan lainnya ditetapkan oleh Dewan Pertahanan Negara dalam keadaan bahwa diseluruh wilayah Negara dan pada umumnya mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam keadaan Negara ketika itu, misalnya : soal kewadajiban memberi tempat/makan kepada pengungsi, pendjagaan bahwa udara, pengawasan pemantjar-pemantjar radio, pengaturan lasjkar rakjat yang diluar T.R.I. (Tentara Republik Indonesia).

Hasil-hasil lainnya :

1. Pada tanggal 15 Djanuari 1946, oleh Badan Pekerdja KNP disampaikan andjuran kepada partai-partai politik supaya mengutamakan politik persatuan dan kepada Tentara Keamanan Rakjat (TKR) dan organisasi-organisasi perdjuaan supaya mengusahakan persatuan siasat.
2. Pada tanggal 16 Pebruari 1946 ditetapkan Mosi-kepertjajaan atas kebidjaksanaan Pemerintah dalam menghadapi fihak Belanda. Dan kepada Presiden (pada tanggal 16 Pebruari 1946) disampaikan usul agar diadakan perbaikan-perbaikan dalam susunan Pemerintah maupun Komite Nasional, mengingat perlunya ada persatuan yang sekokoh-kokohnja, ialah atas dasar usul-usul dalam mosi P.N.I., keputusan konperensi P.K.I. dan resolusi Masjumi.
3. Kepada Pemerintah pada tanggal 19 Pebruari 1946 disampaikan usul agar mendesak P.B.B. untuk mengirimkan suatu komisi penindjau keadaan di Indonesia dan/atau mengadakan plebisit.

4. Dalam Rapat Istimewa pada tanggal 8 Djuli 1946 Badan Pekeraja K.N.P. menjetudjui Pengambilan kekuasaan pemerintahan oleh Presiden untuk sementara waktu, berhubungan dengan keadaan genting (pentjulikan Perdana Menteri Sjah-rir dan lain-lain).

Dinjatakan pula persetudjuan kepada Pemerintah setelah mendengarkan Keterangan Pemerintah dalam Rapat Istimewa tersebut untuk melandjutkan perundingan atas dasar pengakuan kemerdekaan sebagaimana termaksud dalam pasal 1 Program Pemerintah, jaitu „Berunding atas dasar pengakuan Pemerintah Republik Indonesia 100%”.

5. Pada tanggal 13 Agustus 1946 diambil suatu Mosi untuk mengachiri keadaan luar biasa (pengambilan kekuasaan di-tangan Presiden) dengan pembentukan Kabinet baru dibawah pimpinan Perdana Menteri. jang bertanggung-djawab kepada (Badan Pekeraja) Komite Nasional Pusat.
6. Berhubung dengan telah diparapnja persetudjuan Linggar-djati oleh kedua Delegasi Belanda—Indonesia pada tanggal 15 Nopember 1946, Badan Pekeraja menjatakan pendapatnja, bahwa :
 - a. Pengesahannja supaja dilakukan oleh K.N.P.
 - b. K.N.P. lebih dahulu susunannja harus diperbaharui atau ditambah, sehingga mendjadi lebih sesuai dengan aliran-aliran besar dalam masjarakat.

Hasil-hasil per-undang²an jang dibuat bersama-sama dengan Pemerintah dalam tahun 1947 diantaranja adalah sebagai berikut :

Dalam bidang Kehakiman :

1. Undang-undang No. 7 tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kedjaksan Agung dikeluar-arkan sebagai pelaksanaan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, maka dengan Undang-undang ini diadakan pusat pengawasan dalam bidang kehakiman. Demikian pula diadakan pusat pengawasan atas para Djaksa dan Polisi Pengusut.
2. Undang-undang No. 36 tahun 1947 tentang Susunan dan Atjara Pengadilan Tentara.
3. Undang-undang No. 39 tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara.

4. Undang-undang No. 40 tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara.
5. Undang-undang No. 41 tahun 1947 tentang Kependjaraan Tentara.

Undang-undang dalam bidang perpajakan berdjumlah 8 buah, diantaranya :

1. Undang-undang No. 10 tahun 1947 tentang mengadakan perubahan Aturan Bea Meterai 1921.
2. Undang-undang No. 12 tahun 1947 tentang Pajak Radio.
3. Undang-undang No. 14 tahun 1947 tentang Pajak Pemakaian I.

Dalam hubungan dengan hasil-hasil per-undang²an perlu kiranya dikemukakan, bahwa pada tanggal 17 Djanuari 1947 Badan Pekerdja, setelah diadakan perdebatan sengit, telah menetapkan usul inisiatif RUU Pembatalan Peraturan Presiden No. 6/1946 tentang Penjempurnaan Susunan K.N.P.

Akan tetapi usul inisiatif itu kemudian ditarik kembali oleh Badan Pekerdja dalam Sidang ke-V K.N.P. di Malang.

Hasil-hasil dibidang legislatif dalam tahun 1948 diantaranya adalah :

1. Undang² No. 2/1948 tentang Perdjangjian Persahabatan dengan Keradjaan Mesir, yang mengandung pengakuan Negara Republik Indonesia de facto dan de jure, sekalipun fihak Belanda berusaha terus menantangnja.
2. Undang-undang No. 3/1948 tentang Organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang, berdasarkan usul inisiatif dari Badan Pekerdja, yang dimaksudkan mengatur pimpinan Angkatan Perang, agar tidak dualistis dan menjederhanakan organisasi Kementerian Pertahanan.
3. Undang-undang Kerdja 1948 (UU No. 12/1948), yang merupakan pernyataan politik sosial Negara Republik Indonesia mengenai djaminan pekerdjaan serta penghidupan lajak bagi buruh; undang-undang ini kemudian dengan undang-undang No. 1/1951 dinjatakan berlaku untuk seluruh Indonesia, jaitu sesudah Negara Kesatuan yang meliputi seluruh wilayah Indonesia pulih kembali, ketjuali Irian Barat.
4. Undang-undang No. 22/1948, Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah, yang sewaktu itu dianggap dapat memenuhi

harapan akan pemerintahan daerah yang kolegial berdasarkan kedaulatan rakyat.

5. Undang-undang No. 27/1948 tentang Susunan dan pemilihan anggota D.P.R., yaitu undang-undang yang sudah dinantikan sedjak tahun 1945, akan tetapi kemudian ternyata tidak terlaksana juga berhubung dengan perang kolonial Belanda ke-2 dan lain-lain kesulitan.
6. Undang² No. 30/1948 tentang Pemberian Kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya : berhubung dengan peristiwa Madiun, maka dengan Undang-undang ini kepada Presiden diberikan „plein pouvoir” (kekuasaan penuh) selama 3 bulan.
Kemudian oleh Presiden ditetapkan l.k. 30 Peraturan² Pemerintah, diantaranya mengenai Pemerintah Militer di daerah-daerah, militerisasi D.K.A. dan P.T.T. pertjepatan pemeriksaan perkara-perkara pidana dalam keadaan bahaya.
7. Undang² No. 2/1949 tentang Kedudukan dan Kekuasaan Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di Sumatera. Mengingat sukarnja perhubungan antara Sumatera dan Pemerintah Pusat di Jogjakarta ketika itu, maka wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di Sumatera dikuasakan djika keadaan memaksa membuat peraturan yang masalahnja seharusnya diatur dengan undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

Dalam tahun 1948 Badan Pekerdja mengadakan 2 kali inter-pelasi, yaitu :

1. Untuk meminta keterangan dari Pemerintah bagaimana pendapatnja mengenai hasil-hasil Panitia Angket Badan Pekerdja tentang pemogokan dan keadaan Badan Tekstil Negara Delanggu (Solo), dan tindakan apakah yang telah/akan diambilnja.
2. Untuk meminta keterangan tentang soal bahan makanan dan harga bahan makanan yang membumbung tinggi, dalam hubungan dengan Peraturan Pemerintah No. 54/1948 tentang penimbunan barang-barang penting.

Interpelasi pertama belum dapat diselesaikan berhubung dengan pendudukan Belanda atas daerah Jogjakarta pada tanggal 19 Desember 1948, sedangkan Interpelasi kedua ditutup dengan sebuah mosi yang mendesak Pemerintah agar mengambil tin-

dakan meninjau kembali penetapan harga-harga maksimum bahan makanan dan lain-lain.

Hasil-hasil pekerdjaan lainnja ialah berupa mosi-mosi mengenai soal-soal/peristiwa-peristiwa penting pada waktu itu, antara lain :

1. Mosi-Baharuddin dkk. tentang perlunya reorganisasi/rasionalisasi Angkatan Perang, yang kemudian dikonkritkan dengan rantjangan undang-undang usul inisiatif tersebut diatas.
2. Mosi tentang Peristiwa Pegangsaan Timur 56, dimana Badan Pekerdja mendesak supaya Pemerintah memutuskan perundingan dengan Belanda, selama Belanda belum memberikan djaminan imunitet bagi Delegasi Republik Indonesia dan belum mengembalikan milik Delegasi Republik Indonesia yang telah disitanja. Peristiwa Pegangsaan Timur 56 ini adalah suatu penjerbuan dari tentara Belanda pada saat diadakan Peringatan Hari Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1948 ditempat tersebut, yang menjebabkan seorang pandu tertembak mati dan kemudian Belanda menduduki gedung tersebut dan menjita dokumen-dokumen Delegasi R.I.
3. Mosi Mangunsarkoro dkk. yang mendesak Pemerintah supaya melepaskan „sikap ikat diri” (sikap goodwill) yang diambil oleh Pemerintah terhadap Belanda, jaitu tidak akan memperluas hubungan luar negeri selama perundingan dengan Belanda, (September 1948).

Diantara 12 buah Undang-undang yang telah diselesaikan dalam tahun 1949 terdapat pula beberapa undang-undang mengenai naturalisasi bangsa asing mendjadi warga-negara Republik Indonesia dan undang-undang yang khusus mengenai Komite Nasional Pusat dan Badan Pekerdja. Undang-undang yang disebut terachir adalah :

1. Undang-undang No. 6/1949 tentang Penambahan djumlah Anggota Komite Nasional Pusat.
2. Undang-undang No. 9/1949 tentang Mengadakan peraturan istimewa Sidang ke-VI Komite Nasional Pusat.

Undang-undang No. 6/1949 diadakan berdasarkan pertimbangan, bahwa :

- a. Beberapa partai politik belum mempunyai perwakilan dalam Komite Nasional Pusat atau Badan Pekerdja, sedangkan :

- b. Sebelum terbentuk D.P.R. berdasarkan Undang-undang Pemilihan perlu diberi kesempatan kepada partai-partai menempatkan wakil-wakilnya dalam Komite Nasional Pusat dan Badan Pekeraja, agar semua aliran-aliran dalam masyarakat dapat mendengarkan suaranya. Berdasarkan Undang-undang ini Presiden pada akhir tahun 1949 (dengan Penetapan No. 19 dan No. 22/1949) menambahkan Anggota-anggota baru dalam Komite Nasional Pusat dan Badan Pekeraja sebagai wakil-wakil dari Partai Katholik dan Partai Sjarikat Islam Indonesia.

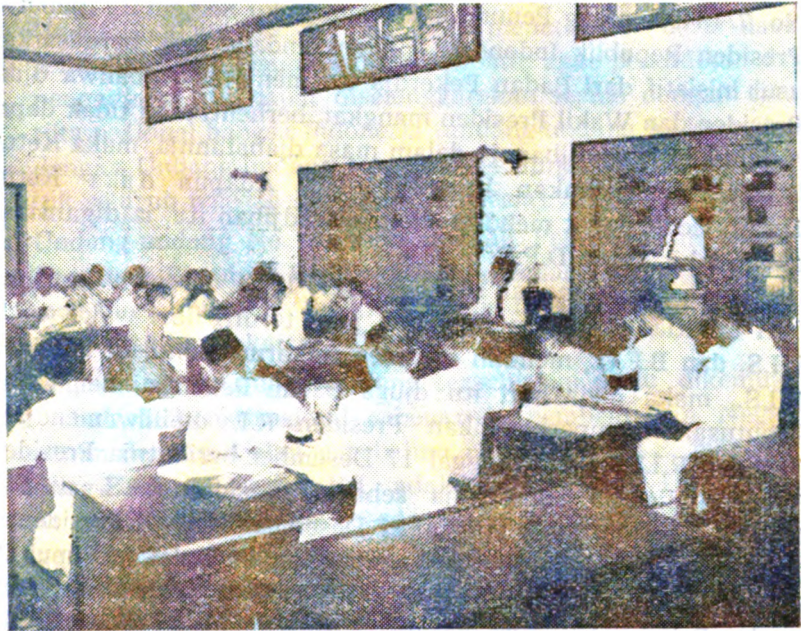
Undang-undang No. 9/1949 ditetapkan berhubung perlunya Komite Nasional Pusat bersidang untuk mengambil keputusan tentang Persetujuan K.M.B. pada tanggal yang telah ditentukan, sedangkan tidak dapat dipastikan kedatangan Anggota-anggota Komite Nasional Pusat pada waktunya berhubung dengan kenja-taan-kenjataan :

- a. Alamat dan keadaan Anggota-anggota tidak dapat diketahui selengkapnja sebagai akibat agresi Belanda ke-II,
- b. Alat-alat perhubungan dari daerah-daerah ketempat sidang di Jogjakarta sukar.

Menurut pasal 37 U.U.D. 1945 untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ daripada jumlah Anggota M.P.R. harus hadir, sedangkan keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ daripada jumlah Anggota yang hadir.

Supaya Sidang Komite Nasional Pusat itu dapat berlangsung juga dan mengambil keputusan yang sah, sekalipun quorum menurut pasal 37 U.U.D. tersebut tidak tertjapai, maka dengan Undang-undang No. 9/1949 ditetapkan : „Rapat-rapat Sidang Komite Nasional Pusat Pleno ke-VI sah, jika dihadiri oleh lebih dari separo dari jumlah Anggota ditambah 1, dan segala keputusan dalam rapat-rapat itu diambil dengan suara terbanyak mutlak”.

Sebagai suatu hal chas dapat dikemukakan, bahwa ada beberapa rantjangan undang² yang telah selesai dibitjarakan oleh Badan Pekeraja bersama dengan Pemerintah ketika Belanda menyerbu Jogja pada tanggal 19 Desember 1948, tetapi belum dapat diundangkan sampai akhir tahun 1949, karena naskahnya hilang sewaktu pendudukan Belanda di Jogjakarta. Diantaranya



emandangan dalam sidang Senat RIS jang pertama 17 Februari 1950.
(Photo Deppen)

terdapat pula sebuah Rantjangan undang-undang jang pembi-tjaraannja telah dimulai sebelum perang kolonial Belanda ke-II dan kemudian dilandjutkan sesudah waktu pendudukan Belanda di Jogjakarta selesai pada bulan Oktober 1949, sedangkan pengundangannja baru dilakukan sesudah Republik Indonesia Jogjakarta mendjadi Negara Bagian dalam RIS pada bulan April 1950. Undang-undang itu diantaranya adalah Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengadjaran disekolah.

Sebuah undang-undang jang chas pula dan ditetapkan dengan memperhatikan perkembangan Negara, ialah undang-undang No. 7/1949 tentang Penundjukan Pemangku Sementara djabatatan Presiden Republik Indonesia. Undang-undang jang berdasarkan usul inisiatif dari Badan Pekerdja itu menjatakan, bahwa djika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewadjabannja dalam masa djabatannja, maka Ketua D.P.R. mendjalankan kewadjabannja. Adapun djika Ketua D.P.R. tidak dapat mendjalankan kewadjaban itu, ia digantikan oleh Wakil Ketua D.P.R.

Setelah pada tanggal 16 Desember 1949 „Dewan Pemilih” dari Panitia Persiapan Nasional, jang terdiri dari wakil-wakil R.I.S. dan B.F.O., memilih Presiden Sukarno mendjadi Presiden R.I.S., maka pada hari itu djuga Badan Pekerdja mengambil keputusan memperkenankan Presiden R.I. dipilih mendjadi Presiden R.I.S. Pada tanggal 17 Desember berikutnja Presiden Sukarno diambil sumpahnja sebagai Presiden R.I.S. di Siti Hinggil Keraton. Pada tanggal 27 Desember 1949 di Presidenan Jogjakarta diadakan upatjara penjerahan kedaulatan Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat, jaitu oleh Ketua (Badan Pekerdja) Komite Nasional Pusat kepada Presiden R.I.S., disusul dengan pelantikan Mr. Assaat sebagai Pemangku Djabatatan Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 7/1949 tersebut. Selandjutnja Mr. Assaat selaku Ketua (Badan Pekerdja) Komite Nasional Pusat menjerahkan tugasnja kenada Wakil Ketua Prawoto Mangkusasmito.

Dibawah pimpinan Pd. Ketua Prawoto Mangkusasmito itu Badan Pekerdja melandjutkan tugasnja sebagai badan perwakilan dari Negara Bagian Republik Indonesia Jogjakarta.

Dalam zaman R.I.S. pada tahun 1950 Badan Pekerdja melakukan tugasnja sebagai badan perwakilan rakjat sementara dari

Negara Republik Indonesia — Jogjakarta. Selama masa-kerdja jang berlangsung lebih kurang 6 bulan telah dapat diselesaikan 20 undang-undang, separoh diantaranya mengatur pembentukan daerah-daerah propinsi, kabupaten dan daerah istimewa sebagai kelanjutan Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah (U.U. No. 22/1948).

Dari Undang-undang lainnja dapat disebutkan beberapa jang penting, ialah :

1. Undang-undang No. 1/1950, jang mengatur djenis dan tjara pembentukan dan pengundangan serta berlakunja peraturan-peraturan Pemerintah Pusat.
2. Undang-undang No. 4/1950, jang menetapkan dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah, agar pendidikan dan pengadjaran itu dapat diselenggarakan sesuai dengan tjita-tjita nasional bangsa Indonesia (undang-undang ini kemudian dengan Undang-undang No. 12/1954 dinjatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia).
3. Undang-undang No. 20/1950 tentang Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ialah undang-undang terachir jang ditetapkan oleh Badan Pekerdja bersama dengan Pemerintah R.I. Jogjakarta.

Mengenai undang-undang jang terachir ini perlu dikemukakan, bahwa konstitusionil sebenarnja pembentukan Negara Kesatuan dengan djalan perubahan Konstitusi R.I.S. mendjadi Undang-Undang Dasar R.I. adalah kompetensi D.P.R. dan Senat R.I.S. Akan tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politis-psychologis dan berhubungan dengan pasal 1 Program Pemerintah, maka pada tanggal 5 Agustus 1950 Pemerintah R.I. — Jogjakarta mengajukan soal pembentukan Negara Kesatuan ini kepada Badan Pekerdja, dengan menjem- paikan R.U.U. tentang Pembentukan Negara Kesatuan tersebut.

Dalam rangka pemitjaraan rantjangan undang-undang tersebut mula-mula dipersoalkan tentang berhak-tidaknja Badan Pekerdja menjelenggarakan pembentukan Negara Kesatuan. Dalam hubungan ini diadjukan Usul mosi Hutomo Supardan dkk, jang menjatakan bahwa Komite Nasional Pusat Pleno-lah jang berhak membubarkan R.I. — Jogja, menghapuskan Undang-undang Dasar 1945 dan menetapkan U.U.

Dasar Sementara Negara Kesatuan. Akan tetapi setelah usul mosi tersebut ditolak oleh Badan Pekerdja pada tanggal 5 Agustus 1950, maka pada tanggal 12 Agustus berikutnya Badan Pekerdja menjatuhkan R.U.U. Pembentukan Negara Kesatuan tersebut, termasuk Rantjangan Undang-undang Dasar Sementara R.I. Persetujuan itu diberikan tanpa mengadakan perubahan-perubahan, berhubungan dengan permintaan sangat dari Pemerintah, agar Badan Pekerdja jangan menggunakan hak amandemennja. Akan tetapi persetujuan itu disertai pernyataan dalam Mosi Wondoamiseno dkk (yang diterima oleh Pemerintah), agar selambat-lambatnja dalam waktu satu bulan sesudah Negara Kesatuan diinjatakan berdiri, Madjelis Perubahan Undang-Undang Dasar (yang menurut pasal 140 U.U.D.S. 1950 terdiri dari Anggota-anggota DPRS dan anggota-anggota Komite Nasional Pusat yang tidak menjadi anggota D.P.R.S.) mengadakan sidang untuk membitjarkan perubahan Undang-undang Dasar Sementara R.I. (Keinginan ini kemudian ternyata tidak terlaksana).

B. Komite Nasional Pusat.

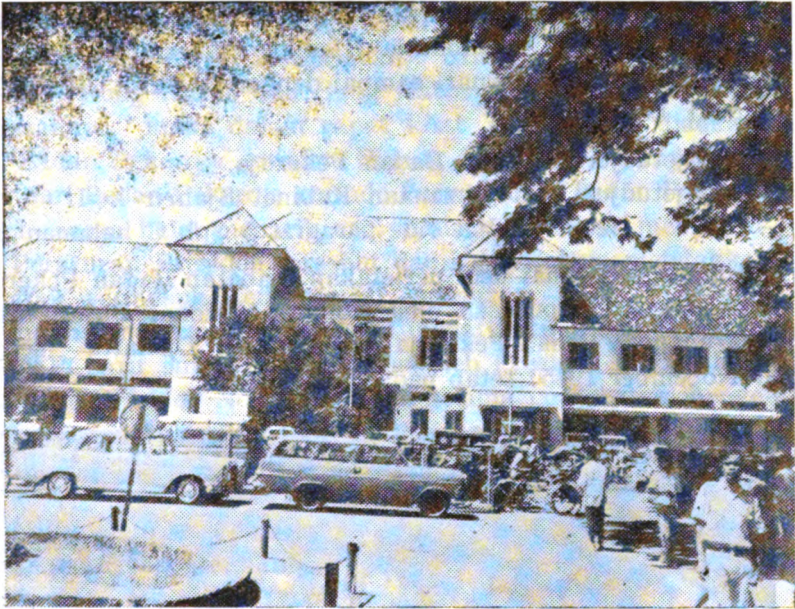
Sebagaimana telah beberapa kali disinggung dalam paragraf-paragraf dimuka, maka selama ada Komite Nasional Pusat telah dilangsungkan Sidang Pleno K.N.P. lima kali.

Mengenai hasil-hasil Sidang Pleno ke-I tanggal 29 Agustus 1945 dan Sidang Pleno ke II tanggal 16 dan 17 Oktober 1945, telah diuraikan setjukupnja dalam paragraf I tentang Pembentukan Badan Pekerdja/K.N.P.

Maka dibawah ini akan diutarakan hasil-hasil Sidang-Sidang K.N.P. ke-III sampai dengan ke-VI.

Sidang ke-III Komite Nasional Pusat yang diadakan pada tanggal 25 sampai dengan 27 Nopember 1945 bertempat digedung „Sekolah Ahli Obat-Obatan” (dimuka RSUP Dr. Tjiptomangunkusumo sekarang) mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut :

1. Menerima baik pertanggungan-djawab Badan Pekerdja tentang pekerdjaan-pekerdjaan yang sudah dilakukan sedjak tanggal 17 Oktober 1945, termasuk penjusunan rumusan haluan politik, yang oleh Pemerintah dijadikan Maklumat Politik tanggal 1 Nopember 1945 dan mengubah susunan Badan Pekerdja.



Gedung jang terletak dimuka RSUP Tjipto Mangunkusumo ini pernah dipakai Sidang ke III Komite Nasional Pusat dari tgl. 25-27 Nopember 1945

(Photo Humas DPR)

2. Membenarkan kebidjaksanaan Presiden perihal mendudukan Perdana Menteri dan Menteri-menteri jang bertanggung-djawab kepada K.N.P. sebagai suatu langkah jang tidak dilarang oleh U.U.D. dan perlu sekali.
3. Menjatakan memberikan kepertjajaan kepada Kabinet Sjahrir ke-I.
4. Menetapkan 3 buah resolusi :
 - a. Pernyataan terima kasih kepada Dewan Negara Ceylon atas simpatinja terhadap perdjjuangan Bangsa Indonesia.
 - b. Pernyataan kepada rakjat dan Pemerintah Australia atas bantuannja
 - c. Pernyataan protes terhadap tindakan-tindakan tentara Inggris disertai andjuran kepada Pemerintah, agar mengusahakan kepada P.B.B. penarikan kembali tentara itu serta penyelesaian pertikaian politik di Indonesia dihadapan wakil-wakil P.B.B.

Dalam Sidang ke-IV Komite Nasional Pusat yang diadakan di Gedung Republik Indonesia (Gedung Gubernur) di Solo mulai tanggal 28 Februari sampai dengan 3 Maret 1946 telah diambil keputusan :

1. Menjetudjui Laporan Badan Pekerdja.
2. Menjetudjui kebidjaksanaan Kabinet Sjahrir ke-I.
(lebih lanjut vide paragraf 5 Sub C halaman 65).

Adapun mengenai usul perletakan djabatan Badan Pekerdja tidak diambil keputusan oleh Komite Nasional Pusat, maka para anggota Badan Pekerdja dari periode Djakarta (sedjak 27 Nopember 1945) tetap pada djabatannja.



Perdebatan dalam Sidang KNIP ke-V di Malang. Ketua Mr Assaat (berdiri) sedang berbitjara dengan anggota K Mangunsarkoro.

Dalam sidang tersebut diperdebatkan Peraturan Presiden No. 6/1946 dan Persetudjuan Linggardjati.

(Photo Deppen)

Dalam Sidang ke-V K.N.P. yang berlangsung di Malang dari tanggal 25 Februari sampai 6 Maret 1947 bertempat di Gedung Rakjat Indonesia timbul perdebatan yang sengit sekali mengenai Peraturan Presiden No. 6/1946 tentang Pe-

njempurnaan Susunan K.N.P. Akan tetapi setelah Wakil Presiden dengan tegas menjatakan, bahwa kalau Peraturan ditolak, Bung Karno dan Bung Hatta terpaksa meletakkan djabatannya, maka dalam rapat kilat yang khusus diadakan oleh Badan Pekeraja sewaktu Sidang K.N.P., yaitu rapat terakhir dari Badan Pekeraja periode Purworedjo, Badan Pekeraja dengan suara bulat menarik usul inisiatifnya untuk membatalkan Peraturan Presiden tersebut dan selanjutnya meletakkan djabatan, termasuk Ketuanya Mr. Assaat.

Dengan penarikan kembali usul inisiatif itu, anggota-anggota K.N.P. baru yang telah diangkat oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 6/1946 dan selama perdebatan mengenai peraturan tersebut hanyalah hadir sebagai peninjau, mulailah ikut bersidang sebagai anggota-anggota K.N.P.

K.N.P. dalam susunannya yang baru mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut :

1. Memilih Mr. Assaat sebagai Ketua K.N.P. dan Ketua Badan Pekeraja K.N.P.
2. Menetapkan, bahwa Badan Pekeraja K.N.P. baru terdiri dari 47 orang, 7 diantaranya mewakili Daerah-daerah diluar Djawa — Sumatera (yaitu Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil) serta golongan-golongan Tionghoa, Arab dan Belanda masing-masing seorang ; adapun 40 orang lainnya dipilih dari dan oleh anggota-anggota K.N.P., dengan ketentuan, bahwa tiap-tiap 12 orang anggota K.N.P. dapat mempunyai seorang wakil dalam Badan Pekeraja.
3. Bahwa Ketua Badan Pekeraja tidak mempunyai hak suara, tetapi Wakil Ketua Badan Pekeraja mempunyai hak suara dan pemilihannya diserahkan kepada Badan Pekeraja sendiri.
4. Memberikan kepertajaan atas kebijaksanaan Pemerintah dan menyetujui penanda-tanganan Persetujuan Linggar-djati.

Dalam Sidang ke VI Komite Nasional Pusat, yang merupakan sidang terakhir badan tersebut dan berlangsung di Siti Hinggil Keraton Jogjakarta dari tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 1949, telah disetujui Hasil-hasil K.M.B., dengan suara 226 setuju, 62 tidak setuju dan 31 blanko.

Persetudjuan Komite Nasional Pusat itu diberikan dalam bentuk sebuah Maklumat dan 2 buah undang-undang. Dua undang-undang ini mempunyai sifat unik, sebab kalau undang-undang lainnja semuanya merupakan hasil kerdja-sama Pemerintah dan Badan Pekerdja, maka 2 undang-undang ini dibuat oleh Presiden bersama dengan Komite Nasional Pusat.

Dengan Maklumat Presiden Republik Indonesia dan Komite Nasional Pusat tanggal 14 Desember 1949 itu dinjatakan ;

1. bahwa hanjalah Negara Republik Indonesia Serikat yang diakui merdeka berdaulat sepenuh-penuhnja atas seluruh daerah,
2. bahwa segala alat perlengkapan R.I., yang diperlukan untuk menegakkan dan menjempurnakan Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat, disumbangkan kepada Republik Indonesia Serikat.

Dua buah undang-undang, yang diumumkan pada tanggal 14 Desember itu djuga, sebagai Undang-undang No. 10 dan 11/1949, masing-masing mengesahkan :

1. Induk Persetudjuan bersama-sama rantjangan persetudjuan dan segala pertukaran surat-menjurat mengenai penyerahan kedaulatan oleh Keradjaan Nederland kepada Republik Indonesia Serikat.
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Selain menjetudjui Hasil-hasil K.M.B., maka Komite Nasional Pusat mengambil pula beberapa keputusan-keputusan lain diantaranya :

1. Menentukan 3 tjalon-tjalon Anggota Senat R.I.S.
2. Menentukan tjara penundjukan 50 Anggota D.P.R. — R.I.S. utusan-utusan dari Republik Indonesia Jogja.
3. Memilih Prawoto Mangkusasmito sebagai Wakil Ketua K.N.P.

§ 7. SEKRETARIAT

Komite Nasional Pusat, yang dilantik oleh Presiden Sukarno pada tanggal 29 Agustus 1945, berkantor dibekas Gedung Djawa Hookookai di Lapangan Banteng Timur, jaitu gedung yang kemudian dipakai oleh Mahkamah Agung dan Kedjaksaan Agung..

Tenaga-tenaga Sekretariat K.N.P. djumlahnja hanjalah sedikit dan terdiri dari sebagian ketjil dari bekas pegawai-pegawai Djawa Hookookai tersebut. Mereka itulah jang membantu Ketua Panitia Eksekutif, kemudian Ketua Komite Nasional Pusat, Mr. Kasman Singodimedjo, menjelenggarakan Sidang pertama (pelantikan) K.N.P. pada tanggal 29 Agustus dan Sidang ke-II pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1945.

Setelah Badan Pekerdja K.N.P. terbentuk pada tanggal 17 Oktober 1945, dibawah pimpinan Ketua St. Sjahrir, Wakil Ketua Mr. Amir Sjarifudin dan Penulis Mr. Suwandi, Badan Pekerdja berkantor di Djalan Tjilatjap 4, dalam gedung bertingkat jang digunakan djuga oleh Departemen Penerangan dan djawatan-djawatan lain. Badan Pekerdja menggunakan 2-3 ruangan ditingkat atas untuk rapat-rapatnja dan untuk tempat-bekerdja tenaga-tenaga Sekretariatnja.

Tenaga-tenaga Sekretariat Badan Pekerdja pada waktu itu hanja berdjumlah lebih kurang 17 orang, jaitu sebagian ex pegawai-pegawai Hookookai dan sebagian lagi berasal dari atau diperbantukan oleh berbagai djawatan lain, diantaranya sebagai tenaga² senior terdapat Mr. Sumarman (sekarang Sekretaris Djenderal Dep. Dalam Negeri) dan Osa Maliki (terakhir dalam hajatnja pernah mendjabat Wakil Ketua MPRS), keduanja kemudian berturut-turut meninggalkan Sekertariat.

Sekretariat Badan Pekerdja dipimpin oleh Penulis Badan Pekerdja dan belum mempunyai susunan tertentu; untuk membantu Badan Pekerdja dalam melakukan tugasnja hanjalah diadakan pembagian pekerdjaan sekedarnja diantara tenaga-tenaga Sekretariat jang tidak seberapa banyak itu.

Dengan adanja penggantian pimpinan Badan Pekerdja beberapa kali dalam waktu singkat, setelah pada tanggal 14 Nopember 1945 seluruh pimpinan mendjadi Menteri-Menteri dalam Kabinet-Sjahrir I, maka pimpinan Sekertariat berganti pula beberapa kali:: Penulis Mr. Suwandi untuk sementara waktu diganti oleh dr. A. Halim dan pada achir Desember 1945 oleh Mr. Sjafrudin Prawiranegara.

Dibawah pimpinan Penulis-penulis/anggota² Badan Pekerdja itu Sekretariat menjelenggarakan Sidang ke-III K.N.P. dari tgl. 25 sampai 27 Nopember 1945 digedung „Sekolah Ahli Obat² an” dimuka R.S.U.P. Djakarta (R.S.U.P. Dr. Tjiptomangunkusumo) dan kemudian Sidang ke-IV K.N.P. di „Gedung Re-

publik Indonesia" (gedung Gubernur) di Solo antara tanggal 28 Pebruari — 3 Maret 1946.

Penjelenggaraan Sidang ke-IV di Solo itu dilakukan bersama-sama dengan pegawai-pegawai Kantor Gubernur : tenaga-tenaga Sekretariat Badan Pekerdja melakukan pekerjaan-pekerdjaan jang langsung mengenai rapat-rapat, seperti pembuatan laporan stenografis, membuat notulen, meroneo dan membagikan bahan-bahan rapat dan sebagainya. Pekerdjaan-pekerdjaan lainnja dilakukan oleh tenaga² setempat. Perlu kiranja dikemukakan, bahwa pentjataan dan pembuatan laporan stenografis dilaksanakan oleh E. Karundeng dengan pembantu-pembantunja, penulis-penulis tjepat jang bekerdja diberbagai djawatan dan dikerahkan untuk keperluan tersebut. Hanja dua orang adalah pegawai-pegawai Sekertariat Badan Pekerdja.

Sehabis Sidang ke-IV K.N.P. di Solo, pada pertengahan bulan Maret 1946 Badan Pekerdja maupun Sekretariatnja memindahkan kedudukannja ke Purworedjo, ibukota Kabupaten, jang terletak lebih kurang 60 kilometer sebelah barat Jogjakarta. Sebagian besar tenaga-tenaga Sekretariat Badan Pekerdja ikut pindah dari Djakarta ke "daerah pedalaman" itu bersama Ketua Badan Pekerdja Mr. Assaat dan Penulis Badan Pekerdja Supeno jang sementara itu telah menggantikan Penulis Mr. Sjafrudin Prawiranegara ; hanjalah beberapa orang tetap tinggal di Djakarta.

Badan Pekerdja maupun Sekertariatnja menempati gedung bekas "Hotel Van Laar" pada zaman Belanda. Gedung itu tjukup besar, sehingga tidak sadja dapat digunakan untuk rapat-rapat Badan Pekerdja dan tempat bekerdja pegawai-pegawai Sekertariat, melainkan djuga untuk tempat menginap para anggota sewaktu Sidang, karena hampir semuanya (ketjuali Ketua dan Penulis tersebut diatas) bertempat tinggal diluar Purworedjo.

Di Purworedjo djumlah pegawai Sekretariat berangsur-angsur bertambah dengan masuknja mendjadi pegawai Sekertariat pegawai-pegawai dari berbagai djawatan. Sebagian dari mereka adalah pegawai-pegawai jang mengungsi kedaerah Purworedjo, karena merasa dirinja tidak aman ditempat kedudukan semula djawatannja dengan adanya tindakan-tindakan teror jang dilakukan oleh serdadu-serdadu Nica. Djumlah

pegawai meningkat menjadi lebih kurang 35 orang. Organisasi Sekertariat mulai diatur oleh "Penulis" Badan Pekerdja, yang kemudian disebut "Sekretaris", dengan mengadakan beberapa Bagian, diantaranya: Bagian Pegawai, Bagian Keuangan, Bagian Pemberitaan. Bagian yang terakhir adalah bagian yang mengurus pentjataan pembijaraan dalam rapat² Badan Pekerdja serta penjelesaian putusan² rapat² itu. Dengan adanya 3 orang penulis tjepat, maka dalam Bagian tersebut kemudian diadakan pula suatu „Urusan Pemberitaan Tulisan Tjepat“, yang mulai berusaha membuat laporan stenografis dari rapat² pleno Badan Pekerdja.

Pada akhir tahun 1946 Badan Pekerdja memutuskan untuk mengangkat seorang pegawai negeri bukan anggota Badan Pekerdja sebagai Sekertaris. Maka sedjak tanggal 5 Djanuari 1947 mulai mendjabat pimpinan Sekretariat Badan Pekerdja Mr. Kuntjoro Purbopranoto, seorang pedjabat dari Kantor Gubernur Djawa Tengah dan ex Adjunct Secretaris Volksraad pada zaman Belanda.

Dibawah pimpinan Sekertaris Mr. Kuntjoro Purbopranoto tersebut serta para „pembantu Sekretaris“ J. Pulungan dan Sumarsono Pringgoredjo, Sekretariat Badan Pekerdja menjelenggarakan Sidang ke-V K.N.P. di „Gedung Rakjat Indonesia“ Malang antara tanggal 25 Pebruari dan 6 Maret 1947. Sebagaimana halnya sewaktu Sidang ke-IV, Sekretariat dibantu oleh penulis² tjepat dari berbagai djawatan lain (terutama dari Djakarta) maupun tenaga² setempat.

Sesudah Sidang ke-V K.N.P., pada akhir bulan Maret 1947, Sekretariat Badan Pekerdja ikut pindah kedudukannya dengan Badan Pekerdja dari Purworedjo ke Jogjakarta. Mula² selama beberapa minggu, Sekretariat Badan Pekerdja berkantor disebagian dari Gedung Palang Merah Indonesia di Djalan Gondokusuman. Akan tetapi kemudian pindah dan menetap dibekas Gedung Theosofi Loge Mataram, Djalan Malioboro 16, bersama-sama dengan Sekretariat Dewan Pertahanan Negara. Gedung Malioboro 16 itu menjadi tempat rapat² bagi Badan Pekerdja dan tempat bekerdja bagi Sekretariat sampai (Sekertariat) Badan Pekerdja bergabung dengan (Sekertariat) Dewan Perwakilan Rakjat Senat R.I.S. di Djakarta, diselingi dengan masa pendudukan Belanda antara 19 Desember 1948 dan 6 Djuli 1949.

Di Jogjakarta susunan pegawai dan organisasi Sekretariat disempurnakan oleh Panitia Rumah Tangga Badan Pekerdja. Pada bulan April 1947 organisasi Sekretariat diubah, sehingga terdiri dari 2 Bagian, jaitu Bagian Undang² dan Pemberitaan serta Bagian Tata Usaha, jang masing² meliputi beberapa Urusan, jaitu :

- a. Bagian Undang-undang dan Pemberitaan dengan Urusan-urusan :
 1. Redaksi,
 2. Pemberitaan Tulisan Tjepat,
 3. Penjimpanan dan Pembagian,
 4. Perpustakaan dan Dokumentasi.
- b. Bagian Tata Usaha, dengan Urusan-urusan :
 1. Pegawai,
 2. Keuangan,
 3. Arsip/Ekspedisi,
 4. Tik/Roneo dan
 5. Perumahan dan Barang-barang.

Selandjutnja Panitia Rumah Tangga, dengan persetujuan Badan Pekerdja, menundjuk Mr. Kuntjoro Purbopranoto, jang resmi dipindahkan dari Kementerian Dalam Negeri ke Sekretariat Badan Pekerdja, mendjadi Sekretaris Badan Pekerdja, disamping tenaga-tenaga pimpinan sebagai berikut :

1. Sumarsono Pringgodiredjo, sebagai Wakil Sekretaris merangkap Kepala Bagian Undang-undang dan Pemberitaan,
2. J. Pulungan, sebagai Wakil Kepala Bagian Undang-undang dan Pemberitaan merangkap Kepala Urusan Redaksi,
3. Slamet Hadisubroto, sebagai Kepala Bagian Tata Usaha merangkap Kepala Urusan Pegawai,
4. Suhardi, sebagai Wakil Kepala Bagian Tata Usaha merangkap Kepala Urusan Keuangan.

Djumlah maupun kualitas pegawai-pegawai berangsur-angsur bertambah, diantaranya djuga penulis² tjepatnja dan Sekretariat lambat laun berhasil membuat laporan-laporan tulisan tjepat mengenai semua rapat-rapat pleno Badan Pekerdja.

Dalam keadaan genting jang mendahului perang kolonial Belanda pertama tanggal 21 Djuli 1947 maupun selama perang kolonial itu berlangsung, baik Badan Pekerdja maupun pegawai-pegawai Sekretariatnja, dengan semangat perjuangan jang tinggi jang pada umumnja meliputi dada tiap-tiap patriot Indonesia, tetap melakukan tugasnja. Untuk menghadapi segala kemungkinan dan khususnja agar Badan Pekerdja dapat tetap melaksanakan tugasnja disamping Pemerintah, maka Badan Pekerdja telah membentuk Teras (= inti) Badan Pekerdja dan Teras Sekretariat, jang berkewadajiban bekerdja terus dalam keadaan apapun djuga.

Dalam hubungan dengan gagasan untuk memindahkan tempat kedudukan Pemerintah ke satu tempat pengungsian, djika keadaan mendesak, maka dua orang pegawai-teras telah mengadakan persiapan-persiapan seperlunja didaerah Sarangan (Madiun) atas perintah Badan Pekerdja. Rentjana pengungsian itu kemudian tidak djadi terlaksana, dengan berachirnja agresi Belanda.

Ketika keadaan genting memuntjak lagi mendjelang perang kolonial Belanda jang kedua, Badan Pekerdja telah merentjanakan mengadakan rapat kilat pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948. Sebelum djam 8 pagi beberapa pegawai Sekretariat, demikian pula Ketua Mr. Assaat dan beberapa anggota Badan Pekerdja, telah masuk kekantor di Djalan Malioboro 16, ketika tiba-tiba tentara Belanda membomi lapangan terbang Maguwo (sekarang : Adisutjipto) dan menembaki kota Jogjakarta dari udara. Dalam keadaan demikian beberapa pegawai masih sempat membakar dekumen-dekumen jang dianggap perlu dibumi hanguskan. Tetapi setelah serangan-serangan Belanda menghebat, maka berangsur-angsur Ketua, anggota-anggota maupun pegawai-pegawai Sekretariat tersebut meninggalkan kantor dan halaman Badan Pekerdja. Kemudian ternjata, bahwa Ketua Badan Pekerdja Mr. Assaat langsung menudju ke Istana Presiden, sehingga turut ditawan olch Belanda bersama-sama dengan Presiden, Wakil Presiden serta beberapa Menteri/pedjabat² tinggi lainnja dan selandjutnja diasingkan pula kepulau Bangka.

Selama Jogjakarta diduduki Belanda (dari tanggal 19 Desember 1948 sampai 6 Djuli 1949) segala aktivitas Badan Pekerdja maupun Sekretariatnja terhenti sama sekali. Selama

itu gedung Malioboro 16 dipakai oleh „Tijgerbrigade” tentara Belanda, yang kemudian memusnahkan dan/atau mengangkut habis seluruh dokumen², arsip², perabot kantor dan sebagainya, sehingga ketika mereka pergi, gedung tersebut kosong sama sekali.

Sehabis pendudukan Belanda itu djumlah pegawai² Sekertariat Badan Pekerdja berkurang, karena sebagian ternjata telah „menjeberang” (bekerdja pada Belanda) dan atau meninggalkan serta tidak kembali lagi kedearah Jogjakarta. Akan tetapi sebagian pegawai² Sekertariat masih tetap bertahan di Jogjakarta atau sekitarnja (bergerilja). Maka setelah kepada Menteri Negara Hamengku Buwono ke IX diberi kuasa penuh untuk mengatur pengembalian kekuasaan atas Daerah Istimewa Jogjakarta dari tangan Belanda (jaitu dengan Penetapan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal Menumbing 1 Mei 1949), dapatlah Sekertariat Badan Pekerdja tersusun kembali atas usaha Kepala² Bagian Urusan yang masih bertahan, diantaranya Sumarsoro Pringgodiredjo. A. Manaf, Suwardjo dan B.M. Sitompul. Kemudian Sekertariat Badan Pekerdja telah dapat membantu kembali Badan Pekerdja K.N.P. yang untuk pertama kali sesudah pendudukan Belanda bersidang lagi pada tanggal 19 Djuli 1949.

Djumlah pegawai Sekretariat ber-angsur² dilengkapi, termasuk pimpinannja. Pada tanggal 24 Djuli 1949 Badan Pekerdja K.N.P. mengangkat Mr. Rusli, reperendaris pada Kementerian Dalam Negeri, mendiadi Pds. Sekertaris (kemudian Sekertaris tetap) Badan Pekerdja K.N.P. Dibawah pimpinan Sekertaris Mr. Rusli dan Kepala² Bagian/Urusan yang lama, Sekertariat Badan Pekerdja menjelenggarakan Sidang ke VI K.N.P., jaitu sidang terachir K.N.P., di Siti Hinggil Keraton Jogjakarta dari 5 sampai 12 Desember 1949. Berbeda dari 2 Sidang yang sebelumnya, Sidang terachir itu diselenggarakan oleh pegawai² Sekertariat Badan Pekerdja sendiri. Hanja karena pegawai²nja tidak mentjukupi, Sekertariat dibantu oleh beberapa tenaga² perbantuan selama sidang berlangsung.

Setelah R.I.S. terbentuk ada beberapa pegawai Sekertariat yang berasal dari Djakarta dan sedjak Maret 1946 ikut ke „Daerah pedalaman”, meninggalkan Sekertariat dan kembali ke Djakarta. Diantaranja ada yang pindah bekerdja di Sekertariat D.P.R. — R.I.S.

Pada pertengahan tahun 1950 oleh Panitia Rumah Tangga Badan Pekeraja K.N.P. diadakan perubahan dalam organisasi Sekretariat, sehingga terhitung tanggal 1 Djuli 1950 Sekretariat Badan Pekeraja terdiri dari 3 Bagian, jaitu :

1. Bagian Umum,
2. Bagian Redaksi dan
3. Bagian Tata-Usaha.

Bagian Umum terdiri dari 4 Urusan dan langsung dibawah pimpinan Sekertaris Badan Pekeraja Mr. Rusli. 4 Urusan dalam Bagian Umum ini ialah :

1. Urusan Umum, dibawah pimpinan langsung Mr. Rusli,
2. Urusan Keanggotaan,
3. Urusan Dokumentasi/Perpustakaan, keduanya dirangkap oleh A. Manaf sebagai Kepala,
4. Urusan Pemberitaan Tulisan Tjepat, dikepalai oleh B.M. Sitompul.

Bagian Redaksi berkewajiban untuk melakukan pekerjaan² yang menjangkut tugas Seksi² dan Panitia² maupun tugas legislatif Badan Pekeraja pada umumnya. Bagian tersebut tidak dibagi dalam Urusan², melainkan meliputi kepaniteraan² Seksi/Panitia² Badan Pekeraja. Sebagai Kepalanja ditundjuk Sumarsono Pringgodiredjo.

Bagian Tata-Usaha dipimpin oleh K.R.T. Wahjono Hardjodiningrat dan meliputi Urusan² :

1. Pegawai, dengan Sudojo sebagai Kepala,
2. Keuangan, dikepalai oleh Surojo,
3. Perumahan, dipimpin oleh Suwardjo,
4. Arsip/Ekspedisi, dengan Slamet Hadisubroto sebagai Kepala, dan
5. Tik/Roneo, dikepalai oleh Suprpto.

Dengan susunan/organisasi seperti tersebut diatas ini, dibawah pimpinan Mr. Rusli sebagai Sekertaris serta K.R.T. Wahjono Hardjodiningrat dan Sumarsono Pringgodiredjo sebagai wakil-wakilnja, Sekretariat Badan Pekeraja bergabung dengan Sekretariat D.P.R. — R.I.S., Sekretariat Senat R.I.S. dan Sekretariat D.P.A. menjadi Sekretariat D.P.R. Sementara, setelah Negara Kesatuan R.I. terbentuk kembali pada tanggal 17 Agustus 1950.

B A B II

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAN SENAT R.I.S

§ 1. PEMBENTUKAN

Dengan pulihnja kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai salah satu hasil dari Konperensi Medja Bundar antara Delegasi-delegasi Keradjaan Belanda, Republik Indonesia — Jogja dan B.F.O. (wakil-wakil dari Daerah-daerah/Negara-negara buatan Belanda diluar Republik Indonesia), lahirlah Republik Indonesia Serikat, selandjutnja disebut R.I.S.

Menurut pasal-pasal 1 dan 2 Konstitusi Sementara R.I.S adalah negara hukum jang demokratis dan berbentuk federasi, terdiri dari :

- a. Negara Republik Indonesia — Jogja (menurut wilajah seperti tersebut dalam Persetudjuan Renville tanggal 17 Djanuari 1948)
- b. Negara-negara bagian dan daerah-daerah lainnja jang didirikan oleh Belanda ketika melawan Republik Indonesia, antara 1946-1949, jaitu :

Negara-negara bagian
Indonesia Timur,
Djawa Timur,
Madura
Pasundan,
Sumatera Timur,
Sumatera Selatan, dan daerah-daerah:
Djawa Tengah,
Bangka,
Belitung,
Riau,
Kalimantan Barat,
Dajak Besar,
Kalimantan Tenggara,
Kalimantan Timur dan
Bandjar.

Adapun kedaulatan R.I.S. dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat jang merupakan Parlemen R.I.S.



15 Februari 1950. Presiden Sukarno sedang memberikan amanat pada rapat gabungan DPR dan Senat R.I.S. (Parlemen R.I.S.).

Saat itu juga Presiden melantik Parlemen R.I.S. Tempat rapat adalah bekas gedung „Concordia” Djl. Dr Wahidin I (waktu itu Djl. Sipayer).

(Photo Deppen)

Dewan Perwakilan Rakyat R.I.S. mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri dari 150 anggota, yaitu 50 orang dari Daerah-bagian Republik Indonesia-Jogja dan 100 orang dari Daerah-daerah selebihnja.

Menurut pasal-pasal 109 dan 110 Konstitusi Sementara R.I.S. maka Dewan Perwakilan Rakyat yang pertama dibentuk menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tjara mengutus anggota ke D.P.R.-R.I.S. diatur oleh Daerah-daerah bagian, dengan ketentuan, bahwa djika tidak dapat dilakukan dengan djalan pemilihan umum, pengutusan itu dilakukan dengan penundjukan oleh Perwakilan-perwakilan rakyat Daerah yang bersangkutan atau dengan djalan lain menurut kehendak rakyat Daerah ;
2. Pengutusan 100 orang dari Daerah-daerah diluar Republik Indonesia-Jogja diselenggarakan pula dengan perundingan

bersama-sama oleh Daerah-daerah jang bersangkutan. Untuk pembagian djumlah-djumlah anggota jang akan diutus diantara Daerah-daerah itu diambil sebagai dasar perbandingan djumlah djiwa rakjat Daerah-daerah bagian tersebut.

Adapun golongan-golongan ketjil Tionghoa, Eropa dan Arab menurut pasal 100 harus mempunyai wakil-wakil berturut-turut 9, 6 dan 3 orang. Dan kalau djumlah-djumlah itu tidak tertjapai dengan pengutusan menurut ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Pemerintah R.I.S. mengangkat wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan ketjil itu.

Menurut pasal-pasal 80 dan seterusnya Konstitusi R.I.S., Senat merupakan perwakilan-perwakilan Daerah-daerah-bagian, jaitu setiap Daerah-bagian diwakili oleh dua orang anggota. Anggota-anggota tersebut ditundjuk oleh Pemerintah Daerah-bagian dari tiga tjalon jang diadjukan oleh Perwakilan-perwakilan Rakjat Daerah-bagian masing-masing. Daerah-daerah-bagian mengadakan sendiri peraturan-peraturan jang perlu untuk menundjuk anggota-anggota dalam Senat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas terbentuk Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat R.I.S. jang pertama, jang mengadakan rapat-gabungan pada tanggal 15 Pebruari 1950, dipimpin oleh anggota D.P.R. jang tertua usianja, Sonda Daeng Mattajang. Dalam rapat gabungan itu, Presiden R.I.S. Ir. Sukarno menjampaikan amanatnja dengan menguraikan kedudukan Pemerintah dan Parlemen R.I.S. serta program dan kebidjaksanaan Pemerintah R.I.S.

Selandjutnja Presiden melantik Parlemen R.I.S., dengan menjatakan bahwa Sidang Parlemen pertama R.I.S. resmi dibuka.

§ 2. KEANGGOTAAN

A. Sjarat², djumlah anggota, dsb.

Berbeda dengan keadaan sebelumnya mengenai anggota² Komite Nasional Pusat dan Badan Pekerdja K.N.P., maka mengenai keanggotaan D.P.R. dan Senat R.I.S. terdapat berbagai ketentuan dalam Konstitusi Sementara R.I.S., jaitu berturut-turut dalam Bagian III dan II dari Bab III Konstitusi tersebut.

Jang boleh mendjadi anggota D.P.R. ialah warga-negara jang telah berusia 25 tahun dan bukan orang jang tidak diperkenankan mendjalankan hak-pilih atau orang jang haknja untuk di-

pilih telah ditjabut. Sjarat ini berlaku pula bagi keanggotaan Senat, hanja umur ditetapkan minimum 30 tahun. (pasal 101 dan pasal 82).

Anggota² D.P.R. maupun anggota² Senat sebelum memangku djabatannja mengangkat sumpah (keterangan/djandji) dihadapan Presiden atau dihadapan Ketua D.P.R./Senat jang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, masing² menurut rumusan sumpah/djandji jang ditetapkan dalam Konstitusi (pasal 83 dan 104).

Anggota² D.P.R. dan Senat boleh meletakkan djabatannja, dengan djalan pemberitahuan setjara tertulis kepada Ketua Dewan jang bersangkutan (pasal 108 jo 84).

Ketua dan Wakil² Ketua D.P.R. dipilih oleh dan diantara anggota² D.P.R. dan pemilihan itu disahkan oleh Presiden. Selama pemelihan belum disahkan, rapat diketuai oleh anggota jang tertua umurnja (pasal 103).

Akan tetapi Ketua Senat diangkat oleh Presiden dari andjuran jang dimadjukan oleh Senat dan andjuran itu memuat sekurang²nja dua orang, baik dari antara anggota² Senat sendiri maupun tidak. Berbeda djuga dengan Ketua D.P.R., Ketua Senat bukan anggota dan hanja mempunjai suara penasehat.

Apabila salah seorang anggota telah diangkat mendjadi Ketua, maka Pemerintah Daerah jang bersangkutan menundjuk orang lain mendjadi anggota Senat sebagai penggantinja. Wakil² Ketua ditundjuk Senat sendiri diantara Anggotanja, dan tetap mempunjai status keanggotaan dan hak suara (pasal 85).

Dengan memperhatikan ketentuan² mengenai keanggotaan itu maupun ketentuan² tentang pembentukan D.P.R. dan Senat R.I.S. jang disebut diatas dalam paragraf 1 Bab ini, oleh Daerah-daerah bagian jang bersangkutan telah diadakan penundjukan wakil-wakil, sehingga tersusun keanggotaan D.P.R. dan Senat RIS pertama sebagai berikut :

D.P.R. terdiri dari 146 anggota, jaitu wakil² dari 16 Negara / Daerah-bagian :

- 1) Republik Indonesia 49 orang,
- 2) Indonesia Timur 17 orang,
- 3) Djawa Timur 15 orang,
- 4) Madura 5 orang,
- 5) Pasundan 21 orang,

- 6) Sumatera Timur 4 orang,
- 7) Sumatera Selatan 4 orang,
- 8) Djawa Tengah 12 orang,
- 9) Bangka 2 orang,
- 10) Belitung 2 orang,
- 11) Riau 2 orang,
- 12) Kalimantan Barat 4 orang,
- 13) Dajak Besar 2 orang,
- 14) Bandjar 3 orang,
- 15) Kalimantan Tenggara 2 orang dan
- 16) Kalimantan Timur 2 orang.

Adapun Senat terdiri dari 32 anggota, jaitu utusan² dari 16 Negara/Daerah-bagian tersebut, masing² 2 orang. Akan tetapi tidak semua anggota itu kemudian dapat melakukan tugas ke-anggotaannja karena berbagai sebab, sebagai mana akan diuraikan dibawah ini.

Dalam rapat pertama pada tanggal 16 Pebruari 1950 baik D.P.R. maupun Senat masing² membentuk Panitia Pemeriksa Surat² Kepertjajaan diantara anggota² atau tjalon² anggota jang telah hadir, dengan tugas untuk menjelidiki apakah para tjalon anggota itu sudah sah keanggotaannja.

Berdasarkan laporan Panitia Pemeriksa Surat² Kepertjajaan dari Senat, jang diketuai oleh Moch. Enoch (dari Pasundan) dalam rapat pertama Senat itu, Senat menjatakan sah keanggotaan semua tjalon anggota jang telah hadir sebanjak 28 orang ; 4 tjalon anggota belum dapat disahkan karena tidak hadir. Maka 28 orang anggota² Senat itu pada tanggal 16 Pebruari 1950 sore mengangkat sumpah dihadapan Presiden.

Adapun sesuai dengan laporan Panitia Pemeriksa Surat² Kepertjajaan dari D.P.R., jang diketuai oleh Mr. A.M. Tambunan (dari R.I.), pada tanggal 17 Pebruari 1950 D.P.R. belum menganggap sah keanggotaan 5 wakil² dari Daerah Djawa Tengah (1 orang), Dajak Besar (1 orang) dan Bandjar (3 orang, belum hadir), sedangkan pemeriksaan maupun pembijtaraan mengenai 21 wakil² dari Pasundan ditunda, karena masih dalam persoalan : 21 orang wakil² itu dipilih oleh „Parlemen Pasundan“, akan tetapi kemudian 16 partai² politik dan organisasi² lainnja didaerah tersebut memperotes dan tidak mengakui pemilihan itu. Dan mengingat keadaan itu Komisaris R.I.S. untuk Daerah

Pasundan pada tanggal 14 Pebruari 1950 malam hari telah membatalkan pemilihan 21 wakil² tersebut. Dengan demikian pada tanggal 17 Pebruari 1950 petang baru l.k. 120 anggota² D.P.R. jang mengangkat sumpah dihadapan Kepala Negara.

Kemudian masih ada beberapa anggota jang dinjatakan sah keanggotaannja oleh D.P.R.-R.I.S. berdasarkan laporan dari Panitia Surat² Kepertjajaan. Tetapi persoalan 21 wakil² dari Pasundan baru dapat diselesaikan pada achir sedjarah D.P.R.-R.I.S., jaitu pada tanggal 15 Agustus 1950, sehingga selama ada D.P.R.-R.I.S. dalam badan perwakilan itu tidak terdapat wakil² dari Daerah Pasundan. 21 Anggota² tsb. kemudian langsung menjadi anggota² D.P.R. Sementara.

Djumlah maksimal anggota² D.P.R.-R.I.S. jang telah sah keanggotaannja dan mengangkat sumpah adalah 127 orang. Akan tetapi 2 orang diantaranya sementara itu telah meninggal dunia, ialah Moh. Nur (wakil Riau) dan H. Bunjamin (wakil R.I.).

Maka setelah pada tanggal 7 Agustus 1950 anggota terbaru Mr. Indra Kasumah mengangkat sumpah, dalam rapat pleno D.P.R. tgl. 8 Agustus 1950, jaitu seminggu sebelum D.P.R.-R.I.S. riwayatnja berachir, hanjalah tertjatat 126 anggota jang telah sah mengangkat sumpah.

Anggota² Senat, sesuai dengan kedudukan Senat sebagai badan perwakilan Daerah², senantiasa tertjatat sebagai utusan sesuatu Daerah. Demikian pula para anggota² D.P.R.-R.I.S. masing² semula tertjatat sebagai wakil² dari Negara/Daerah jang menundjuknja. Akan tetapi kemudian para anggota itu kebanyakan tertjatat pula sebagai wakil² partai politik, setelah dalam D.P.R. ber-angsur² dibentuk fraksi², jang pada umumnja terdiri dari anggota² jang berasal dari berbagai Daerah; misalnja: Fraksi Masjumi dibentuk pada tanggal 7 Maret 1950, terdiri dari 21 anggota dan diketuai oleh dr. Sukirman Wirjosandjojo ; pada tanggal 13 Maret berikutnja dibentuk Fraksi P.N.I. terdiri dari 23 anggota, dengan Mr. Sujono Hadinoto sebagai Ketuanja.

B. Pimpinan

Mengenai Pimpinan D.P.R. dan Senat R.I.S. dapat dikemukakan hal² sebagai berikut :

Pemilihan Ketua D.P.R. dilakukan menurut „Peraturan Pemilihan” jang ditetapkan oleh D.P.R. pada tanggal 22 Pebruari

berdasarkan pasal 108 jo 95 Konstitusi, berlangsung pada tanggal 21 Pebruari 1950. Tjalon²nja ialah: Mr. Sartono, Mr. A.M. Tambunan dan Mr. Moh. Yamin ke-tiga²nja wakil dari R.I.. Setelah dalam pemilihan dua kali tidak tertjapai suara terbanyak mutlak, dalam pemilihan ketiga Mr. Sartono memperoleh 51 suara dan Mr. Moh. Yamin 39 suara, sehingga Mr. Sartono dinjatakan terpilih mendjadi Ketua D.P.R. Dan pemilihan itu disahkan oleh Presiden pada tanggal 22 Pebruari 1950 dengan Keputusan No. 99/1950. Pada hari tersebut diadakan pemilihan Wakil² Ketua D.P.R. dan terpilihlah Mr. M.A. Tambunan mendjadi Wakil Ketua I dengan memperoleh suara 70 lawan 23 suara untuk tjalon kedua Mr. J. Latuharhary, sedangkan satu-satunja tjalon untuk Wakil Ketua II Arudji Kartawinata terpilih mendjadi Wakil Ketua II D.P.R. Rapat² mengenai pemilihan Ketua dan Wakil Ketua itu diketuai oleh anggota jang tertua umurnja, Sonda Daeng Mattajang. Baru pada tanggal 23 Pebruari 1950, setelah pemilihan kedua Wakil² Ketua D.P.R. disahkan djuga oleh Presiden (dengan Keputusan No. 82/1950), Mr. Sartono mulai melakukan tugas kewajibannja sebagai Ketua D.P.R.-R.I.S.

Setelah membuat Peraturan Pemilihan pada tanggal 17 Pebruari 1950, ke-esokan harinja Senat mengadakan pemilihan Ketua Senat diantara 5 tjalon, jaitu :

Ki Hadjar Dewantoro (R.I.),
Mr. Djaidin Purba (Sumatera Timur),
M.A. Pellaupessy (Indonesia Timur),
Mr. M. Tadjuddin Noor (Kalimantan Tenggara) dan
Mr. Teuku Moh. Hasan (R.I.).

Pemilihan pertama hasilnja tidak memenuhi sjarat ; dalam pemilihan kedua M.A. Pellaupessy memperoleh 14 suara dan Mr. Teuku Moh. Hasan 12 suara, tjalon² lainnja tidak memperoleh suara dan Ki Hadjar Dewantoro mendapat 1 suara, dua tjalon lainnja tidak mendapat suara. Maka sebagai tjalon² Ketua Senat oleh Senat diadjukan M.A. Pellaupessy dan Mr. Teuku Hasan kepada Presiden. Penetapan Wakil Ketua oleh Senat sendiri baru dilakukan pada tanggal 25 Pebruari 1950 setelah diterima berita, bahwa M.A. Pellaupessy telah diangkat mendjadi Ketua Senat oleh Presiden. Pada hari tersebut Senat memutuskan untuk menetapkan tjalon kedua untuk djabatan Ke-

tua, jaitu Mr. Teuku Hasan, mendjadi Wakil Ketua Senat. M.A. Pellaupessy baru mulai mengetuai rapat² Senat pada tanggal 27 Pebruari 1950, setelah mengangkat sumpah sebagai Ketua Senat dihadapan Presiden. Sebelum itu Senat dipimpin oleh Ketua² sementara Moch. Enoch (Pasundan) dan R.T.A. Sujadi (Djawa Timur).

Dengan penetapan M.A. Pellaupessy mendjadi Ketua Senat, djumlah anggota² Senat berkurang dengan seorang. Kemudian masih terdjadi mutasi pula, tetapi sampai achir masa djabatannya Senat terdiri dari 29 orang, dengan Ketuanja.

D.P.R. dan Senat R.I.S. menurut Konstitusi R.I.S., mempunjai masa djabatan selama setahun untuk kemudian diganti dengan D.P.R. hasil pemilihan umum (jang akan diadakan dalam tempo satu tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949) serta dengan Senat baru. Akan tetapi Negara RIS usianja tidak sampai satu tahun, karena pergolakan di-daerah² telah mempertjepat pembubaran negara federal dan pembentukan kembali negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tanggal 15 Agustus 1950 baik Ketua maupun anggota² D.P.R. dan Senat R.I.S. menurut susunannya terachir seperti dikemukakan diatas, semuanya mendjadi anggota² DPR Sementara Republik Indonesia.

§ 3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

A. D.P.R. Dan Senat R.I.S.

Sebagaimana dikemukakan dalam paragraf 1, menurut Konstitusi R.I.S. kedaulatan Negara R.I.S. dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan D.P.R. dan Senat R.I.S. Adapun jang dimaksud dengan Pemerintah, ialah Presiden dan Menteri² bersama², jaitu Presiden dengan seorang atau beberapa Menteri menurut tanggung-djawabnja khusus masing² atau tanggung-djawab umum.

Pemerintah melakukan kekuasaan legislatif (per-undang²an) federal, kekuasaan membuat undang² jang berlaku untuk seluruh wilajah Negara R.I.S., ber-sama² dengan D.P.R./Senat

Kekuasaan per-undang²an itu dilaksanakan :

- a. oleh Pemerintah ber-sama² dengan D.P.R. dan Senat tentang hal² jang mengenai satu, beberapa atau semua Daerah-bagian ataupun mengenai hubungan antara R.I.S. dengan Daerah²-bagian ;

- b. oleh Pemerintah bersama-sama dengan D.P.R., tanpa Senat, mengenai seluruh lapangan pengaturan diluar jang tersebut sub a. (pasal 127).

Chusus mengenai kedudukan D.P.R. jang pertama, jaitu D.P.R.-R.I.S. jang belum terbentuk dengan djalan pemilihan umum, melainkan berdasarkan penundjukan oleh Daerah²-bagian, Konstitusi menentukan, bahwa D.P.R. tidak dapat memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan djabatannja dalam hal politik jang didjalankan oleh Pemerintah tidak sesuai dengan pendapat D.P.R. (Pasal 122). Ketentuan ini, sebagaimana antara lain didjelaskan djuga oleh Presiden Sukarno sewaktu melantik Parlemen RIS jang pertama pada tanggal 15 Pebruari 1950, menurut sedjarahnja timbul karena pertimbangan, bahwa Parlemen R.I.S. jang pertama belum mentjerminkan kemauan rakjat seluruhnja. Peraturan itu tidak bermaksud mengurangi demokrasi.

Untuk membuat undang² Pemerintah harus bekerdjasama dengan D.P.R. Tanpa persetudjuan D.P.R./Senat, Pemerintah tidak dapat membuat undang².

Parlemen mempunyai beberapa hak, jang ditegaskan dalam Konstitusi : D.P.R. maupun Senat mempunyai hak inisiatif ; hanja hak inisiatif Senat terbatas pada hal² jang tersebut pada sub a.

D.P.R. mempunyai hak amandemen, hak untuk mengadakan perubahan² dalam rantjangan undang² jang diajukan oleh Pemerintah. (Senat tidak memiliki hak ini).

Rantjangan undang² jang menjangkut Daerah-bagian (hal² tersebut sub a.) dibitjarakan oleh Senat atas kehendak sendiri atau djika Pemerintah/D.P.R. menganggap perlu. Apabila Senat menolak rantjangan undang² itu, jang sebelumnya telah disetudju oleh D.P.R., maka rantjangan undang² itu dapat djuga disahkan mendjadi undang² oleh Pemerintah, kalau D.P.R. kemudian memutuskan menerima baik rantjangan undang² tersebut tanpa mengubahnja lagi, tetapi dengan se-kurang²nja 2/3 anggota-sidang jang menentukan quorum.

Anggaran Negara harus ditetapkan dengan undang². Maka D.P.R. (dan sedikit banjak djuga Senat) mempunyai hak budget, sekalipun hak ini belum dappat dilaksanakan selama ada D.P.R./Senat R.I.S.

Pemerintah atas kuasa dan tanggung-djawab sendiri berhak

menetapkan undang² darurat untuk mengatur hal² jang seharusnya diatur dengan undang² (ber-sama² dengan Parlemen). tetapi karena keadaan mendesak perlu segera ditetapkan. Hanja sadja lebih dahulu harus didengar pertimbangan Senat atas rantjangan undang² darurat itu dan segera setelah ditetapkan, undang² darurat tersebut harus disampaikan kepada D.P.R. untuk mendapat persetudjuannja.

Selain melakukan kekuasaan per-undang²an, D.P.R. berwenang pula mengontrol Pemerintah : Presiden tidak dapat mengganggu-gugat ; tetapi Menteri² bertanggung-djawab kepada D.P.R. atas seluruh kebidjaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnja maupun masing² untuk bagiannja sendiri². Hanja wewenang ini sedikit terbatas oleh ketentuan, bahwa D.P.R. tidak dapat mendjatuhkan Menteri². Berhubung dengan fungsinja sebagai badan pengontrol Pemerintah, D.P.R. mempunyai hak² menanja (demikian djuga anggota² perseorangan), interpelasi dan hak menjelidik (angket). (pasal² 120 dan 121). Menteri² berkewadajiban memberikan kepada D.P.R. baik dengan lisan maupun tertulis, segala penerangan jang dikehendaki oleh D.P.R. dan jang dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum RIS.

Berbeda dari D.P.R., maka Senat disamping melakukan kekuasaan legislatif (jang agak terbatas itu) berfungsi pula sebagai madjelis penasehat bagi Pemerintah. Pemerintah mendengar Senat tentang segala hal jang dianggap perlu oleh Pemerintah, Pemerintah bahkan berkewadajiban mendengar Senat tentang urusan² penting jang khusus mengenai Daerah² bagian atau hubungan R.I.S. dengan Daerah²-bagian. Dan hanjalah djika perlu diambil tindakan² segera dalam keadaan mendesak. sedangkan djika Senat tidak bersidang, Pemerintah dapat menjimpang dari kewadajiban itu. Selandjutnja, seperti telah disinggung diatas, Pemerintah berkewadajiban pula mendengar Senat tentang segala rantjangan undang² darurat. Sebaliknya Senat dapat memberikan nasehat² kepada Pemerintah atas kehendaknja sendiri mengenai segala hal jang dianggapnja perlu.

Dalam hubungan dengan fungsinja itu Senat dapat minta keterangan² dari Pemerintah, baik dengan lisan maupun tertulis. Sebagaimana halnja terhadap D.P.R., Pemerintah memberikan keterangan² jang diminta, ketjuali kalau menurut per-

timbangannja hal itu bertentangan dengan kepentingan umum R.I.S. (pasal 123).

Demikianlah kedudukan D.P.R. dan Senat R.I.S. terhadap Pemerintah.

Mengenai pelaksanaan kekuasaan legislatif, jang mengandung kedudukan atau hubungan-kerdja antara D.P.R. dan Senat maupun antara kedua perwakilan rakjat itu dengan Pemerintah, dapat dikemukakan lebih landjut sebagai berikut :

Semua rantjangan undang² Pemerintah disampaikan kepada D.P.R. dengan Amanat Presiden untuk dirundingkan dan serentak djuga kepada Senat untuk diketahui. Senat berhak mengajukan usul inisiatif rantjangan undang² kepada DPR, khusus mengenai Daerah²-bagian. Dan apabila Senat menggunakan hak itu, Senat serentak menjampaiakan salinan usulnja kepada Pemerintah.

Apabila D.P.R. menjetudjui rantjangan undang² Pemerintah, dengan atau tanpa perubahan², maka rantjangan itu dikirimkan oleh D.P.R. :

- a. kepada Senat untuk dirundingkannja, kalau mengenai pengaturan Daerah-bagian, dengan pemberitahuan kepada Presiden ;
- b. kepada Presiden untuk disahkan djika mengenai pengaturan hal-hal lain.

Rantjangan undang² dari Senat jang disetudjui oleh D.P.R. dikirimkan oleh D.P.R. :

- a. kepada Senat untuk dirundingkan lebih landjut, kalau ada perubahan² ;
- b. kepada Presiden untuk disahkan, kalau tanpa perubahan.

Demikianlah pula D.P.R. bertindak mengenai usul inisiatifnja sendiri, jaitu jang mengenai pengaturan Daerah²-bagian disampaikan kepada Senat, jang mengenai pengaturan hal² lain langsung kepada Presiden untuk disahkan.

Baik kalau Senat menjetudjui rantjangan undang² jang telah disetudjui lebih dahulu oleh D.P.R. maupun kalau Senat menolakknja, Senat mengirimkan rantjangan jang bersangkutan kepada Presiden, dengan pemberitahuan serentak kepada D.P.R. Adapun bedanja :

- a. dalam hal pertama Pemerintah tinggal mengesahkan rantjangan undang² jang bersangkutan ;

- b. dalam hal kedua, jaitu dalam hal Senat menolak rantjangan jang telah disetudju oleh D.P.R., Pemerintah dapat sekali lagi menjampaikan rantjangan jang bersangkutan kepada D.P.R. untuk dirundingkan kembali. Pemerintah hanjalah dapat mengesahkan rantjangan undang² tersebut kalau dalam perundingan ulangan D.P.R. menjetudju lagi rantjangan tersebut tanpa sesuatu perubahan, lagi pula dengan se-kurang²nja $\frac{2}{3}$ suara dari $\frac{2}{3}$ anggota-sidang (jaitu anggota² jang menentukan quorum).

Apabila D.P.R. menolak suatu rantjangan undang², baik dalam perundingan pertama maupun dalam perundingan ulangan, maka D.P.R. memberitahukan penolakan itu kepada Pemerintah dan (djika mengenai pengaturan Daerah-bagian) kepada Senat djuga.

Selama suatu rantjangan undang² belum disetudju oleh DPR. dan (djika mengenai pengaturan Daerah²-bagian) belum dirundingkan oleh Senat, rantjangan itu dapat ditarik kembali oleh pengusulnja. Dalam pada itu Pemerintah harus mengesahkan rantjangan undang² jang telah disetudju oleh D.P.R., ketjuali djika Pemerintah dalam waktu sebulan sesudah rantjangan disampaikan kepadanya untuk disahkan, menjatakan keberatannja jang tak dapat dihindarkan. Baik pengesahan maupun keberatan Pemerintah diberitahukan kepada D.P.R. dan Senat dengan Amanat Presiden.

B. Ketua dan Anggota

Mengenai kedudukan, hak² serta kewadajiban para anggota Parlemen dapat dikemukakan hal² sebagai berikut :

Hak Ketua dan anggota² D.P.R. maupun Senat untuk menjatakan pendapatnja setjara bebas didjamin oleh Konstitusi. Mereka tidak dapat dituntut dimuka hakim karena jang dikatakannja dalam rapat atau jang dikemukakannja dengan surat kepada madjelis² itu, ketjuali djika mereka dengan itu mengemukakan apa jang harus dirahasiakan (pasal 108 jo 89).

Anggota² D.P.R. maupun anggota² Senat mengeluarkan suaranya sebagai orang jang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsjafan batinnja, tidak atas perintah atau dengan kewadajiban berembug dahulu dengan mereka jang menundjuknja sebagai anggota.

Selain itu Ketua dan para anggota D.P.R. maupun Senat, seperti djuga Presiden, Menteri² dan lain² pedjabat² tinggi, dalam tingkat pertama dan tertinggi diadili dimuka Mahkamah Agung, djuga setelah berhenti, untuk kedjahatan/pelanggaran jang dilakukannja dalam masa djabatan (pasal 148).

Keanggotaan D.P.R. tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Senat atau sebaliknja dan tidak pula dengan djabatan-djabatan federal Presiden, Menteri, Djaksa Agung, Ketua, Wakil Ketua atau anggota Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank Sirkulasi serta dengan djabatan-djabatan Daerah-bagian Wakil Negara, Menteri atau Kepala Departemen. (pasal 108 jo 91).

Adapun gadji atau tundjangan, ongkos perdjalan dan sebagainya, jang diberikan kepada Ketua dan para anggota D.P.R. dan Senat, diatur dengan undang² federal, jaitu bagi D.P.R. Undang² R.I.S. No. 4 tahun 1950 jang berdasarkan usul inisiatif dari D.P.R. itu sendiri, sedangkan bagi Senat Undang² R.I.S. No. 20 tahun 1950, jang menjatakan Undang² No. 4 tahun 1950 jang disebut lebih dahulu itu berlaku sepenuhnya bagi Ketua dan anggota Senat. Undang² tersebut baru disahkan ber-turut² pada tanggal 20 dan 24 Djuli 1950, akan tetapi keduanja mulai berlaku tanggal 1 Pebruari 1950.

Panitia D.P.R. — R.I.S., jang merantjang usul inisiatif tentang kedudukan keuangan tersebut, sebenarnja ditugaskan untuk merantjang peraturan tentang kedudukan hukum para anggota D.P.R. pada umumnja. Akan tetapi panitia tersebut baru berhasil menjusun peraturan mengenai kedudukan keuangan itu dan Peraturan Tata-tertib D.P.R. — R.I.S., jang akan dikemukakan lebih landjut dibawah.

Menurut undang² tersebut diatas Ketua D.P.R. dan Ketua Senat menerima penghasilan, ongkos perdjalan, dan sebagainya, sama dengan Menteri; Gadji Rp. 1.500,— sebulan, ditambah turdjangan² kemahalan dan keluarga menurut peraturan jang ditetapkan untuk pegawai negeri. Selama memangku djabatan disediakan rumah-kediaman milik Negara beserta perabot rumah-tangga dan mobil dengan pengemudinja dan untuk menutupi ongkos pelajaran dan pemeliharaan rumah itu diberikan tundjangan kepada Ketua D.P.R./Senat. Selandjutnja diberikan ongkos representasi Rp. 300,— sebulan, jang dapat ditambah oleh Menteri Keuangan djika ternyata tidak mentjukupi. Ongkos

perjalanan/penginapan untuk keperluan dinas diganti menurut peraturan yang berlaku, tetapi juga ongkos² selebihnya dapat diganti dengan memajukan pertelaan kepada Djawatan Perjalanan.

Para Wakil Ketua mendapat uang bulanan sebesar uang bulanan anggota, yaitu Rp. 750,— sebulan, ditambah dengan uang duduk, tundjangan dan/atau fasilitas² lain sebagai berikut :

- a. Selama diluar rapat bertindak sebagai Ketua atau atas nama Ketua : Uang duduk Rp. 30,— sehari, tundjangan representasi Rp. 10,— sehari, sebuah mobil dinas, jang ongkos pemakaian dan pemeliharaannya ditanggung oleh Negara;
- b. Selama bertindak sebagai Ketua diluar Ibukota : Ongkos perjalanan/penginapan seperti jang diberikan kepada Ketua.

Mengenai penghasilan anggota² D.P.R. dan Senat R.I.S. diadakan tiga katagori, yaitu : anggota² umumnja, anggota² pegawai negeri dan anggota² bukan pegawai negeri.

Anggota² D.P.R. dan Senat (ketjuali Ketua) mendapat uang-bulanan Rp. 750,— uang sidang Rp. 20,— sehari djika menghadiri rapat dan untuk bersidang penggantian ongkos perjalanan/penginapan seperti diberikan kepada pegawai negeri golongan I (bagi anggota² jang bertempat-tinggal diluar Djakarta) atau penggantian ongkos pengangkutan (bagi anggota² jang bertempat tinggal di Djakarta). Penggantian ongkos perjalanan/penginapan itu diberikan djuga untuk perjalanan atas perintah D.P.R./Senat atau Ketua D.P.R./Senat anggota berhak memakai alat pengangkutan umum Negara atau Negara-bagian dengan pertjuma dan mendapat potongan tertentu kalau memakai pengakuan K.P.M. dan Garuda Indonesian Airways.

Chusus anggota²-pegawai negeri hanjalah menerima uang-bulanan sebesar selisih antara gadji kotor mereka sebagai pegawai negeri dan uang-bulanan anggota tersebut diatas, yaitu kalau gadji kotor itu kurang dari Rp. 750,—. Tetapi kalau Rp. 750,— atau lebih, mereka tidak menerima uang bulanan D.P.R. Selandjutnja mereka jang karena keanggotaan D.P.R. tidak dapat merangkap pekerdjaannya, didjamin dapat kembali kepada djabatannya, djika tidak mendjadi anggota D.P.R. lagi.

Dan waktu mendjadi anggota D.P.R. dihitug sebagai masa-kerdja.

Adapun anggota² bukan pegawai negeri jang karena meng-hadiri sidang/rapat² kehilangan pendapatannja, mempunjai hak atas penggantian kerugian se-tinggi²nja Rp. 1.500,— sebulan. Penggantian kerugian itu ditetapkan oleh sebuah panitia jang diangkat oleh Ketua D.P.R./Senat dan terdiri dari Ketua Dewan Pengawas Keuangan sebagai anggota merangkap Ketua serta dua anggota D.P.R./Senat selaku anggota.

Panitia tersebut berkuasa minta kepada anggota jang bersangkutan membuktikan haknja dan minta kepada Djawatan Pajak memberikan keterangan² jang diperlukannja.

C. Hubungan dengan Dewan Pengawas Keuangan/Mahkamah Agung.

Menjingga Ketua Dewan Pengawas Keuangan, perlu kiranja sekaligus dikemukakan, bagaimana kedudukan D.P.R. dan Senat terhadap (atau hubungan antara kedua perwakilan rakjat itu dengan) Dewan Pengawas Keuangan pada umumnya. Dewan Pengawas Keuangan menurut pasal² 111 dan seterusnya dari Konstitusi R.I.S. bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas keuangan Negara, jang diurus oleh Pemerintah. Hasil pengawasan dan pemeriksaan itu harus diberitahukan oleh Dewan Pengawas Keuangan kepada D.P.R. Selandjutnja Pemerintah harus mempertanggung-djawabkan pengeluaran dan penerimaan Negara kepada D.P.R., sambil mengajukan perhitungan jang telah disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan. Demikianlah ketentuan² Konstitusi jang belum sampai terlaksana selama sedjarah D.P.R. — R.I.S. jang hanja berlangsung lebih-kurang enam bulan.

Adapun antara Senat R.I.S. dan Dewan Pengawas Keuangan tidak ada sesuatu hubungan-kerdja apapun, ketjuali jang telah disinggung diatas mengenai panitia penggantian kerugian bagi anggota²-bukan pegawai negeri.

Hubungan-kerdja antara D.P.R dan Senat R.I.S. dengan Mahkamah Agung tidak ada pula, terutama karena pasal 103 Konstitusi R.I.S. menentukan bahwa „segala tjampur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat² perlengkapan jang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang ketjuali djika diizinkan oleh

undang²". Satu²nja pengetjualian terdapat dalam pasal 6 undang² R.I.S. No. 1 tahun 1950, tentang Susunan, kekuasaan dan djalalan pengadilan Mahkamah Agung. Menurut pasal tersebut Ketua, Wakil Ketua dan anggota² Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden atas andjuran D.P.R. dari se kurang²nja dua tjalon bagi tiap² pengangkatan (lowongan). Dengan adanja ketentuan itu, maka DPR ada sedikit tjampur tangan mengenai susunan Mahkamah Agung. Akan tetapi mengenai djalalan pengadilan DPR tidak ada hubungan langsung dengan Mahkamah Agung. Namun demikian setjara tidak langsung, D.P.R. sebagai badan legislatif tertinggi ber-sama² dengan Pemerintah, sedikit banjak mempunyai pengaruhnja djuga terhadap djalannja pengadilan maupun susunan Mahkamah Agung, dengan mengatur hal² tersebut.

Adapun Senat berdasarkan pasal 114 Konstitusi mempunyai wewenang sedikit mengenai susunan pertama Mahkamah Agung, jaitu : untuk pertama kali dan sebelum undan² federal menetapkan lain, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden setelah mendengar Senat.

§ 4. PERATURAN TATA-TERTIB DAN PELAKSANAANNJA

A. Penjusunan

Menurut pasal² 108 dan 95 Konstitusi R.I.S. maka D.P.R. dan Senat harus selekas mungkin menetapkan „peraturan ketertibannja". Berhubung dengan ketentuan itu baik D.P.R. maupun Senat segera setelah dilantik, membentuk sebuah Panitia Peraturan Tata-tertib dikalangan masing², jaitu D.P.R. pada tanggal 23 Pebruari dan Senat pada tanggal 17 Pebruari 1950, setelah masing² lebih dahulu menyelesaikan peraturan khusus mengenai pemilihan Ketua dan Wakil Ketua, jang langsung dilaksanakan.

Panitia jang dibentuk oleh D.P.R. sebagaimana disinggung diatas, sebenarnya diberi tugas dua, ialah menjusun peraturan mengenai kedudukan anggota D.P.R. dan Peraturan Tata-tertib. Panitia tersebut diketuai oleh I.J. Kasimo (dari R.I.) dan terdiri dari 9 orang.

Rantiangan Peraturan Tata-tertib hasil karva Panitia tersebut disetujui oleh D.P.R. dengan beberapa perubahan dan disahkan menjadi Peraturan Tata-tertib D.P.R. — R.I.S. pada tanggal 28 Pebruari 1950.

B. Peraturan Tata-tertib D.P.R. — R I S.

Peraturan Tata-tertib DPR-RIS lebih lengkap dari Peraturan Badan Pekeraja K.N.P. tahun 1947. Selain banjak persamaan Peraturan Tata-tertib D.P.R. tersebut memuat pula ketentuan² jang berbeda ataupun ketentuan² baru jang tidak terdapat dalam Peraturan Tata-tertib Badan Pekeraja K.N.P., misalnja mengenai Pemeriksaan Surat² kepertjajaan, Panitia Permohonan, dan lain²

Menurut Peraturan Tata-tertib tersebut DPR—RIS dalam melakukan tugasnja mempunyai a'at² sebagai berikut :

1. Panitia Permusjawaratan, jang mula² pada pokoknja bertugas mengadakan hubungan dengan Pemerintah dan memberi pertimbangan kepada Ketua, tetapi kemudian ikut meniusun atjara rapat² D.P.R. ;
2. Panitia Rumah-tangga, dengan tugas mengurus soal² kerumah-tanggaa² D.P.R. dan memutuskan, apabila timbul perselisihan mengenai isi laporan tulisan tjepat ;
3. Panitia Permohonan, jang harus memeriksa dan meneliti sura² permohonan/petisi dari rakjat ;
4. 6 buah Bagian² (I s/d VI). jang berkewadajiban mengadakan pemeriksaan-persiapan serentak atas suatu rantjangan undang² ;
5. 6 buah Panitia² Persiapan Tetap, jang mempunyai tugas-kewadajiban :
 - a. memelihara dan mempererat hubungan dengan Pemerintah,
 - b. membantu Pemerintah menghadapi dan memetjahkan kesulitan²,
 - c. memperhatikan kebidiaksanaan Pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap tindakan² Pemerintah,
 - d. mendengar suara rakiat;
6. Panitia Pusat, jang terdiri dari Ketua D.P.R. dan para Ketua Panitia² Tetap serta berkewadajiban menetapkan atjara rapat² D.P.R.

Enam buah Panitia Persiapan Tetap (kemudian seringkali hania disebut Panitia Tetap dan kadang² dinamakan diuga „Seksi“, seperti badan jang bersangkutan dari Badan Pekeraja K.N.P.), susunannja disesuaikan dengan bidang² pemerintahan. 6 buah Panitia Tetap itu ialah Panitia² Tetap :

1. Luar Negeri.
2. Dalam Negeri dan Kehakiman,
3. Pertahanan,
4. Kemakmuran, Keuangan, Perhubungan/Tenaga dan Peker-
djaan Umum,
5. Agama, Pendidikan/Pengadjaran dan Penerangan,
6. Kesehatan, Sosial dan Perburuhan.

Para anggota D.P.R. terketjuali Ketua, memasuki Panitia² Tetap menurut keinginannya masing². Panitia² Tetap itu mengadakan rapat² dilingkungan sendiri untuk membitjarakan surat² masuk atau soal²/kedjadian² jang penting, ataupun mengadakan rapat² dengan Menteri² jang bersangkutan untuk meminta keterangan² atau membitjarakan soal² jang mengenai bidangnya masing², termasuk pula kebidjaksanaan Menteri. Hasil² pemitjaraan dalam Panitia² Tetap digunakan sebagai bahan pemitjaraan dalam rapat pleno D.P.R.

Ketjuali Ketua setiap anggota D.P.R. diharuskan menjadi anggota salah satu Bagian. 6 Bagian² itu mengadakan pemeriksaan-persiapan serentak mengenai rantjangan undang² dika-
langan sendiri (tanpa Menteri² jang bersangkutan). Dari pemer-
iksaan persiapan itu, seperti pemeriksaan oleh „Panitia² Tetap”
Badan Pekerdja K.N.P., dibuat laporan², jang disampaikan ke-
pada Menteri² jang bersangkutan untuk dijawab. Setelah dite-
rima djawaban Pemerintah, rantjangan undang² dibitjarakan
dalam rapat pleno terbuka.

Prosedur pemitjaraan rantjangan undang² dalam rapat pleno
terbuka D.P.R. adalah sebagai berikut : Para anggota mengada-
kan pemandangan umum dalam dua babak. Sehabis pemandang-
an umum dan djawaban Menteri jang bersangkutan atas pema-
ndangan umum, diadakan pemitjaraan pasal demi pasal. Pada
waktu pemitjaraan itu para anggota dapat mengajukan usul²
amandemen terhadap pasal² rantjangan undang². Keputusan
D.P.R. atas amandemen² dan kemudian atas pasal² rantjangan
undang² diambil dengan pemungutan suara berdasarkan djumlah
suara terbanyak mutlak dari suara jang dikeluarkan.

Peraturan Tata-tertib mengatur pula tjara D.P.R. melaksa-
nakan hak² lain jang dipunyai oleh D.P.R. menurut Konstitusi
R.I.S., ialah : hak² inisiatif, menanja . interpelasi dan angket.
Untuk melaksanakan hak² itu diperlukan usul dari se-kurang²

nja 5 anggota dan kalau D.P.R. menyetujui usul itu, barulah D.P.R. menggunakan hak yang bersangkutan.

Dalam pada itu dalam praktek dilakukan pula tata-kerja yang lebih dahulu telah dilaksanakan oleh Badan Pekerja K.N.P., yaitu :

- a. pertanyaan² tertulis para anggota dijawab oleh Menteri² yang bersangkutan pada hari² tertentu („Hari² Pertanyaan”) setjara lisan dalam rapat pleno terbuka ;
- b. Pemerintah memberikan keterangan tentang kbidjaksanaan Pemerintah dan para anggota D.P.R. mengadakan pemandangan umum atas keterangan Pemerintah itu, yang dijawab oleh Pemerintah.

C. Peraturan Tata-tertib Senat R.I.S.

Panitia Tata-tertib Senat, yang diketuai oleh R. Moch. Enoch (dari Pasundan) menyelesaikan tugasnya pada tanggal 22 Pebruari 1950 dan pada hari tersebut Senat menetapkan Peraturan Tata-tertibnya berdasarkan hasil-karya panitia tersebut.

Panitia Tata-tertib Senat tanggal 22 Pebruari 1950 terdiri dari 15 Bab dengan ketentuan² yang banjak sama atau mirip dengan ketentuan² dalam Peraturan Tata-tertib DPR-RIS, misalnja mengenai pemeriksaan surat² kepertjaan, pemeriksaan persiapan, surat² permohonan, dan sebagainya. Disamping itu ada pula ketentuan² yang chas, seperti ketentuan² tentang usul-usul undang² yang diajukan oleh Senat kepada D.P.R., tentang adpis' yang diberikan oleh Senat, dan lain².

Menurut Peraturan Tata-tertib tersebut, maka dalam melakukan tugasnya Senat dibantu oleh 5 matjam badan, yaitu :

1. Panitia Pemeriksaan Surat² Kepertjaan,
2. Panitia Permusjawaratan,
3. Panitia Rumah Tangga.
4. Panitia Permohonan,
5. Madjelis² Persiapan.

Panitia² yang disebut pada nomor² 1 sampai dengan 4 masing² mempunyai kewajiban² yang sama dengan badan² yang senama dalam D.P.R. Adapun Madjelis² Persiapan djumlahnja 5 buah, dan masing² meliputi bidang² tertentu sebagai berikut :

1. Dalam Negeri,
2. Luar Negeri,
3. Keamanan,
4. Kemakmuran/Kuangan,
5. Sosial dan Kebudayaan.

Sebagian dari Madjelis² Persiapan itu dibagi dalam „seksi”, misalnja Madjelis Persiapan Kemakmuran/Kuangan dibagi dalam Seksi Kemakmuran, Seksi Kuangan dan Seksi Lalu-lintas/Pembangunan.

Tugas-kewadajiban Madjelis² Persiapan adalah mirip dengan tugas-kewadajiban Panitia² Persiapan Tetap D.P.R., jaitu mengadakan pemeriksaan-persiapan atas usul² atau soal², antara lain rantjangan undang² dan rantjangan undang² darurat, baik dari Pemerintah maupun dari D.P.R., jang diserahkan oleh Ketua Panitia Permusjawaratan/Senat kepada Madjelis² Persiapan itu menurut bidangnya masing². Mengenai pemeriksaan-persiapan itu oleh Madjelis Persiapan jang bersangkutan dibuat laporan, jang disampaikan kepada Pemerintah untuk dijawab setjara tertulis. Dalam hal usul jang bersangkutan mengenai soal Daerah²-bagian, maka laporan disampaikan pula kepada D.P.R. Setelah djawaban Pemerintah diterima, usul jang bersangkutan dibawa kedalam rapat pleno Senat untuk diputus tanpa mengadakan amandemen², karena Senat tidak mempunyai hak amandemen seperti D.P.R. Pada umumnja keputusan Senat, sesuai dengan ketentuan² jang terdapat dalam Konstitusi R.I.S. dan seperti djuga halnja dengan D.P.R., diambil dengan pemungutan suara berdasarkan djumlah suara terbanjak mutlak.

Peraturan Tata-tertib Senat mengatur tjara Senat melaksanakan hak²nja jang berdasarkan Konstitusi, jaitu hak² inisiatif, memberikan nasehat (oleh Senat digunakan kata² „adpis’”). minta keterangan (dalam Peraturan disebut „hak interpelasi dan hak menanjakan”). Selain itu ada pula peraturan tentang tjara mengadjukan mosi (pernjataan).

Senat melaksanakan hak²nja itu atas usul sedjumlah anggota² tertentu, jaitu untuk usul inisiatif se-kurang²nja 5 orang anggota dan untuk usul² lain se-kurang²nja 3 orang anggota. Setelah menjetudjui usul jang bersangkutan, Senat melaksanakan hak-nja itu.

Dalam hubungan dengan pelaksanaan hak² Senat perlu kiranya dikemukakan, bahwa Peraturan Tata-tertib Senat memuat pula ketentuan² tentang amandemen². Akan tetapi ketentuan² itu terbatas pada amandemen² atas usul² inisiatif Senat sendiri, tidak mengenai usul² dari Pemerintah atau D.P.R.

§. 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH

A. Likwidasi R.I.S. dan Pembentukan kembali Negara Kesatuan R.I.

Bentuk Negara federal hasil K.M.B. pada umumnya tidak memuaskan bangsa Indonesia, lebih² karena wilayahnya belum meliputi daerah Irian Barat, yang masih diduduki oleh Belanda. Maka tidaklah mengherankan, bahwa segera setelah R.I.S. berdiri, diberbagai Daerah timbul gerakan² rakjat, yang setjara demokratis menuntut pembubaran Daerah² hasil tjiptaan Van Mook dan penggabungannya dengan Republik Indonesia—Jogja. Pembubaran dan penggabungan itu memang dimungkinkan oleh Konstitusi R.I.S. Pasal 43 Konstitusi menentukan: „Dalam penyelesaian susunan federasi Republik Indonesia Serikat, maka ber'akulah azas pedoman, bahwa kehendak rakjatlah didaerah-daerah bersangkutan yang dinjatakan dengan merdeka menurut djalan demokrasi, memutuskan status yang kesudahannya akan diduduki oleh daerah-daerah tersebut dalam federasi”.

Maka mengalirlah dalam D.P.R. maupun Senat R.I.S. segera setelah dewan² itu terbentuk pada tanggal 16 Pebruari 1950 berbagai surat², mosi² dan resolusi² dari partai², organisasi² massa dan badan² perwakilan² (dewan²) Daerah, berisi tuntutan², agar daerahnya masing² dibubarkan dan digabungkan dengan Republik Indonesia—Jogja.

Sedjalan dengan tuntutan² rakjat dari daerah² itu, maka atas prakarsa anggota² D.P.R. yang berasal dari berbagai daerah² di Indonesia, dalam minggu kedua setelah D.P.R. terbentuk telah diadakan mosi² tentang pembubaran dan penggabungan Daerah². Usul² mosi yang ber-turut² diadakan dalam waktu singkat itu. akhirnya meliputi semua Daerah-daerah diluar Indonesia, ketju-ali Negara Sumatera Timur dan Negara Indonesia Timur. Dalam mosi² itu D.P.R.—R.I.S. mendesak, agar Pemerintah segera memenuhi keinginan rakyat di Daerah² itu.

Menurut pasal 44 Konstitusi R.I.S., maka perubahan daerah sesuatu daerah-bagian, masuk kedalam atau menggabungkan

diri kepada suatu daerah-bagian yang telah ada, hanya boleh dilakukan menurut aturan² yang ditetapkan dengan Undang² federal. Selandjutnja perlu didjundjung tinggi azas seperti dimaksudkan dalam pasal 43 tersebut diatas dan masuk atau menggabungkan diri harus pula mendapat persetujuan daerah-daerah-bagian yang bersangkutan.

Mengingat ketentuan² pasal 44 Konstitusi tersebut dan untuk memberikan dasar hukum bagi penjaluran keinginan² rakyat di-daerah² itu, Pemerintah mengajukan kepada DPR rancangan Undang² tentang perubahan susunan kenegaraan wilayah R.I.S. Akan tetapi agar dapat mengimbangi ketjepatan perkembangan politik di-daerah² maka pada 8 Maret 1950 Pemerintah, dengan persetujuan D.P.R. maupun Senat, mengeluarkan peraturan tentang tata-tjara perubahan susunan kenegaraan itu dalam bentuk undang² darurat, yaitu Undang² Darurat No. 11 tahun 1950. Dan pada hari berikutnya, tanggal 9 Maret 1950 Pemerintah dengan Keputusan Presiden No. 108 sampai dengan 113 tahun 1950 menetapkan pembubaran Daerah² yang berikut dan penggabungannya dengan Republik Indonesia: Djawa Tengah, Djawa Timur, Madura, Padang dan Sabang. Kemudian menjusul Keputusan Presiden tanggal 11 Maret No. 113 mengenai Pasundan, termasuk „Distrik Federal Djakarta”, Keputusan² Presiden tanggal 24 Maret No. 126 dan 127 mengenai Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur; akhirnya Keputusan Presiden tanggal 4 April 1950 mengenai Daerah² Bandjar, Dajak Besar, Kalimantan Tenggara, Kotawaringin, Bangka, Billiton dan Riau. Maka pada tanggal 5 April 1950 hanyalah tinggal 3 Daerah-bagian dari R.I.S., yaitu Republik Indonesia, Sumatera Timur dan Indonesia Timur.

Perlu kiranya dikemukakan, bahwa dalam usaha rakyat yang unitaris di-daerah² untuk menggabungkan diri dengan Republik Indonesia, dan mendapat perlakuan yang sama seperti di Republik Indonesia, banyak terdjadi demonstrasi² dan pemogokan². Maka oleh Penguasa² setempat, yang diberbagai daerah masih terdiri juga dari bangsa Belanda, diadakan penangkapan² dan penahanan², misalnya di Kalimantan Barat, Sumatera Timur dll.

Lain dari itu di-daerah² terdapat pula golongan² aliran federalis, yang ingin mempertahankan status daerah² dan negara federal. Dimana golongan² itu kuat kedudukannya dan mengadakan demonstrasi² serta kontra-aksi, keadaan di-daerah² yang bersang-

kutan mendjadi lebih runtjing-tegang dan gawat, misalnja di Sumatera Timur dan Indonesia Timur. Dalam hubungan ini perlu pula diutarakan, bahwa pada permulaan tahun 1950 ini baru saja dimulail usaha melikwidasi sendi² kekuasaan pendjadjahan Belanda. Usaha likwidasi ini, jang sebagian diatur dalam Perseutudjuan K.M.B., bukanlah pekerdjaan jang mudah dan dapat segera terlaksana. Dibidang ketentaraan misalnja harus diusahakan pengembalian tentara Belanda (Koninkelijke Leger) ke Negeri Belanda, pemasukan anggota² tentara K.N.I.L. (jang bersedia) kedalam Angkatan Perang R.I.S. atau pemberhentian dengan pensiun mereka jang tidak mau masuk Angkatan Perang R.I.S. Kelambatan dalam usaha likwidasi tentara kolonial itu antara lain mendjadi salahsatu sebab dari berbagai peristiwa berdarah jang terdjadi dalam periode R.I.S., seperti :

- a. peristiwa Apra (Angkatan Perang Ratu Adil) Westerling di Bandung pada tanggal 25 Djanuari 1950 (sebelum Parlemen R.I.S. terbentuk), dimana Sultan Hamid, sewaktu itu Menteri Negara dalam Kabinet R.I.S., tersangkut dan karenanja kemudian ditangkap pada tanggal 4 April 1950;
- b. pemberontakan Andi Azis di Makasar pada tanggal 5—12 April 1950 oleh ex anggota K.N.I.L. jang baru masuk A.P. R.I.S., dan atas hasutan Dr. Soumokil hendak membela status daerah dalam Negara Federal R.I.S., kemudian disusul dengan penurunan dan penghinaan Sang Merah Putih oleh anasir² jang melawan Negara Kesatuan ;
- c. pemberontakan R.M.S. Dr. Soumokil di pulau² Ceram/Buru, jang menggunakan 2000 orang K.N.I.L. dan memproklamirkan R.M.S. jang terlepas dari N.I.T. maupun R.I.S. ;

Pada tanggal 26 Djuli 1950 K.N.I.L. resmi dibubarkan. Akan tetapi pemulangan K.L. ke Negeri Belanda, pemulangan anggota² K.N.I.L. jang tidak mau masuk kedalam A.P.R.I. (dan untuk sementara waktu dimasukkan kedalam K.L.) kedaerah asalnja masing², belum selesai. Oleh karena itu masih terdapat anasir² pengganggu keamanan dalam masa R.I.S. ini.

Sementara itu usaha kearah pembentukan kembali Negara Kesatuan berdjalan terus. Setelah memberikan pertimbangan² njaja kepada Pemerintah jang bersangkutan dengan penggabungan daerah², maka dalam bulan Maret 1950 Senat membentuk se-

buah panitia penjunjungan rantjangan Undang² Dasar Negara Kesatuan. Rantjangan Undang² Dasar berdasarkan hasil karya panitia tersebut pada tanggal 22 Mei 1950 disampaikan oleh Senat kepada Pemerintah.

Dalam pada itu diluar Republik Indonesia hanjalah tinggal 2 daerah-bagian lain, jaitu Negara Sumatera Timur dan Negara Indonesia Timur. Maka Pemerintah Republik Indonesia meng-andjurkan kepada Pemerintah R.I.S., agar mengadakan perundingan dengan kedua daerah-bagian tersebut tentang pembentukan kembali Negara Kesatuan. Setelah mendapat kuasa penuh dari kedua daerah tersebut untuk berunding dengan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah R.I.S. melangsungkan perundingan tentang pembentukan Negara Kesatuan itu dalam bulan Mei 1950 dengan Pemerintah R.I.—Jogja. Pada tanggal 19 Mei 1950 tertjapailah persetudjuan antara kedua Pemerintah itu dan oleh kedua belah pihak ditanda-tangani „Piagam Persetudjuan”, jang isi pokoknja ialah : Kedua Pemerintah akan melaksanakan Negara Kesatuan dalam waktu se-singkatnja, sebagai pendjelmaan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, dengan Undang² Dasar jang diperoleh dengan mengubah Konstitusi R.I.S. sedemikian rupa, sehingga essentialia Undang² Dasar 1945 dan bagian² jang baik dari Konstitusi R.I.S. termasuk didalamnya.

Selandjutnja oleh Pemerintah R.I.S. dan Pemerintah R.I.—Jogja dibentuk Panitia Bersama, terdiri dari 14 anggota (dari pihak Pemerintah R.I.S. dan Pemerintah R.I. masing² 7 orang), jang diberi tugas menjelenggarakan Piagam Persetudjuan 19 Mei 1950 tersebut dan chususnja merantjang Undang² Dasar Negara Kesatuan. Panitia dari pihak R.I.S. diketuai oleh Menteri Kehakiman Prof. Mr. Dr. Supomo dan beranggotakan 6 orang, jaitu : Mr. Kosasih Purwanegara, Ir. Sakirman, Mr. A.M. Tambunan, B. Sahetapy Engel, I.R. Lobo dan Mr. Teuku Moh. Hasan, dengan Mr. A.W. Surjadinigrat sebagai Sekretaris.

Adapun panitia dari pihak R.I.—Jogja diketuai oleh Wakil Perdana Menteri Abdul Hakim dan beranggotakan 6 orang sebagai berikut :

1. Mr. A.A. Suhardi,
2. Hutomo Supardan,
3. Djohan Sjahrusah,

4. Harsoadi,
5. dr. Rustamadji dan
6. Rh. Kusnan.

Baik panitia dari pihak R.I.S. maupun dari pihak R.I.—Jogja terdiri dari dua unsur, yaitu dari kalangan Pemerintah dan dari kalangan Perwakilan Rakjat (D.P.R. - R.I.S., Senat R.I.S. dan Badan Pekeraja K.N.P.).

Kemudian anggota² Ir. Sakirman dan Hutomo Supardan mengundurkan diri, karena partainya (P.K.I.) tidak setuju dengan tjaranja Negara Kesatuan dibentuk, sedangkan anggota R.H. Kusnan diganti oleh Z. Baharuddin.

Setelah merundingkan hasil² karya panitia tersebut, kedua Pemerintah menyetujui dengan beberapa perubahan rantjangan Undang² Dasar Sementara Negara Kesatuan serta „Dasar² penyelesaian kesukaran² dilapangan politik, ekonomi, keuangan, keamanan dan sosial”, yang kemudian oleh Pemerintah R.I.S. disampaikan kepada D.P.R. serta Senat R.I.S. dan oleh Pemerintah R.I.—Jogja kepada Badan Pekeraja K.N.P.

Dalam menjampaikan rantjangan Undang² tentang Perubahan Konstitusi R.I.S. menjadi Undang² Dasar Sementara R.I., maka Pemerintah R.I.S. (demikian pula Pemerintah R.I.—Jogja kepada Badan Pekeraja K.N.P., seperti disebut dalam BAB I), mengajukan permintaan, supaya D.P.R. jangan menggunakan hak amandemennja. Maksudnja ialah, agar Negara Kesatuan dapat segera terbentuk dan Pemerintah dapat mengadakan usaha² untuk mengatasi berbagai kesulitan² dalam negeri yang dihadapi oleh Pemerintah ketika itu.

Sekalipun mula² banjak anggota² ingin merubah beberapa pasal dari rantjangan Undang² Sementara R.I. (tidak kurang dari 33 buah usul amandemen telah diajukan), namun akhirnya D.P.R.—R.I.S. menerima baik Undang² Dasar Sementara Negara Kesatuan R.I. pada tanggal 14 Agustus 1950 malam dengan suara 90 setuju lawan 18 tidak setuju.

Pada tanggal 14 Agustus 1950 malam itu Senat dalam rapatnja yang terakhir dengan aklamasi menyetujui pula rantjangan Undang² Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan seperti telah dikemukakan dalam Bab I, Badan Pekeraja K.N.P. di Jogjakarta telah lebih dahulu menyetujuinja pada tanggal 12 Agustus 1950.

Maka pada tanggal 15 Agustus 1950 Pemerintah mengesahkan dan mengumumkan dengan resmi dalam Lembaran Negara (L.N. 1950 — 56) Undang² R.I.S. No. 7 tahun 1950 tertang Perubahan Konstitusi Sementara R.I.S. menjadi Undang² Dasar Sementara R.I. Pada tanggal 15 Agustus 1950 itu pula berturut² diadakan tiga upatjara chidmad bersedjarah, jaitu satu upatjara di Djakarta dan dua upatjara di Jogjakarta. Upatjara di Djakarta terdjadi dalam rapat-gabungan terakhir D.P.R.—Senat R.I.S., jang berlangsung dari djam 08.40 sampai djam 09 00 pagi. Dalam rapat-gabungan itu sesudah Ketua D.P.R.—R.I.S. Mr. Sartono mengutjapkan kata² pengantar jang singkat, Presiden R.I.S. Ir. Soekarno membatjakan „Piagam Pernyataan Terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia”, jang berbunyi sebagai berikut :

„Dengan ini kami beritahukan kepada rapat-gabungan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat Republik Indonesia Serikat, bahwa rentjana Undang² untuk mengubah Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang² Dasar Sementara Republik Indonesia, jang disusun oleh Pemerintah dengan persetujuan para Pemerintah Daerah² Bahagian Republik Indonesia Serikat, telah diterima baik oleh Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat Republik Indonesia Serikat dalam rapat²nja pada tanggal 14 Agustus 1950.

Pada hari ini, tanggal 15 Agustus 1950, naskah Undang-undang tersebut telah kami tanda-tangani dan ditandatangani-serta oleh Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat serta diumumkan oleh Menteri Kehakiman.

Berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka kami atas nama Rakjat pada tingkat perdjuaan kemerdekaan sekarang ini menjatakan sebagai perubahan dalam negeri terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia jang meliputi seluruh Tanah Air dan segenap Bangsa Indonesia”,

Sehabis upatjara di Gedung Parlemen R.I.S. itu, Presiden Soekarno segera terbang ke Jogjakarta dan setibanja disana berlangsunglah upatjara singkat chidmad jang kedua di Gedung Negara, jaitu : Pemangku Sementara Djabatan Presiden Repu-

blik Indonesia — Jogja Mr. Assaat menjerahkan kembali pimpinan Negara Republik Indonesia kepada Presiden Soekarno.

Upatjara ketiga segera menjusul kemudian, bertempat di Gedung Badan Pekerdja K.N.P. di Malioboro 16. Pada upatjara ketiga itu dilangsungkan :

1. Penjerahan kembali pimpinan Badan Pekerdja K.N.P. dari Pd. Ketua Prawoto Mangkusasmito kepada Ketua Mr Assaat,
2. Pernyataan terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Presiden Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia — Jogja.

Pernyataan resmi jang diutjapkan oleh Presiden Soekarno adalah praktis sama dengan pernyataan dihadapan Parlemen R.I.S. di Djakarta; hanjalah beberapa kata² permulaan sedikit berbeda.

Pada tanggal 15 Agustus 1950 itu habislah riwayat DPR dan Senat R.I.S. maupun Badan Pekerdja K.N.P. Republik Indonesia. Hari berikutnja, tanggal 16 Agustus 1950, semua Ketua, Wakil Ketua dan Anggota² ke-tiga² perwakilan rakjat ber-sama² dengan Ketua, Wakil Ketua dan anggota² Dewan Pertimbangan Agung R.I. — Jogja mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Negara Kesatuan R.I. dan pada hari itu djuga dengan resmi dilantik oleh Presiden Soekarno.

Demikianlah beberapa kedjadian² bersedjarah jang berkisar pada usaha² melikwidasi R.I.S. dan membentuk kembali Negara Kesatuan R.I.

B. Kedjadian lain².

Pada tanggal 12 Maret 1950 oleh Pemerintah dikeluarkan Peraturan tentang inducement dan pada tanggal 19 Maret berikutnja Peraturan tentang penjehatan keuangan, kemudian terkenal dengan peraturan „gunting Sjafrudin” berhubung dengan penetapan bahwa uang kertas Rp. 5 keatas hanjalah berlaku separoh, disusul dengan pengeluaran uang kertas baru berdasarkan Undang² Darurat No. 12 tahun 1950, jang mulai berlaku tanggal 31 Mei 1950. Peraturan² itu kemudian mempunjai pengaruh jang besar atas pertumbuhan kearah tertjapainja ekonomi kesatuan.

Pada tanggal 16 Mei 1950 Menteri Luar Negeri Philipina Carlos Romulo selaku Ketua Sidang Umum ke-IV P.B.B. me-

ngundjungi Indonesia dan antara lain mengadakan pertemuan dengan Pimpinan DPR/Senat R.I.S. dan Panitia Tetap Urusan Luar Negeri dari kedua dewan tersebut.

Pada tanggal 7 Djuni berikutnya Perdana Menteri India Pandit Jawaharal Nehru mengadakan kunjungan kenegaraan di Indonesia, setelah Presiden Soekarno mengundjungi India dalam perlawatan keluar negeri jang pertama (ke India, Pakistan dan Birma) pada achir Djanuari 1950. Perdana Menteri Nehru diterima oleh Parlemen R.I.S., dalam suatu rapat-gabungan istimewa DPR/Senat R.I.S., jang dipimpin oleh Ketua D.P.R. Mr. Sartono.

Hubungan dengan negara² asing, selain dengan kunjungan-kunjungan tsb. diusahakan pula dengan ikut-sertanja R.I.S. dalam berbagai organisasi² internasional, sehingga mempunia¹ pengaruh pula atas pandangan luar negeri terhadap realitas adanja Negara R.I.S.

§. 6. HASIL-HASIL PEKERDJAAN

Selama tepat enam bulan mendjalankan tugasnja, jaitu dari 15 Pebruari sampai 15 Agustus 1950, Dewan Perwakilan Rakjat R.I.S. telah menjelesaikan 7 buah Undang². Dari 7 buah undang² itu sebuah adalah berdasarkan usul inisiatif dari D.P.R., jaitu Undang² No. 4/1950 tentang Penggantian kerugian Anggota Dewan Perwakilan Rakjat R.I.S., sedangkan 3 buah undang² merupakan penetapan undang-undang darurat mendjadi undang². Undang² darurat itu lebih dahulu telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan menggunakan haknja menurut pasal 139 Konstitusi R.I.S., ialah hak untuk mengatur hal² penjeleenggaraan pemerintahan federal dengan undang² darurat, jang mempunjai kekuatan dan kuasa undang², karena keadaan mendesak.

Selain mengenai penghasilan anggota² (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) D.P.R., 5 buah undang² jang telah diselesaikan ber-sama² oleh Pemerintah dan D.P.R.—R.I.S. itu, mengatur sarana² jang penting bagi Negara R.I.S. dibidang kehakiman, jaitu Undang² No. 1/1950 tentang Mahkamah Agung, Undang² No. 2/1950 tentang Lembaran Negara dan Undang² No 3/1950 tentang Permohonan grasi, Undang No. 5/1950 tentang pengadilan dan kediaksanaan dilingkungan peradilan ketentaraan dan No. 6/1950 tentang Hukum atjara pidana pada pengadilan ketentaraan.

Adapun Undang² No. 7/1950, jang telah disinggung diatas dalam paragraf 5, adalah Undang² perubahan Konstitusi R.I.S. mendjadi Undang² Dasar Sementara Republik Indonesia, jang membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perubahan dalam negeri.

Undang² pertama jang dihasilkan oleh D.P.R. (bersama dengan Pemerintah) baru diselesaikan dalam bulan Mei 1950, karena (seperti dikemukakan dalam paragraf 5) dalam minggu² pertama setelah terbentuk, D.P.R. sibuk membitjarakan dan menjelesaikan hal² jang menjangkut tuntutan² untuk membubarkan Daerah bagian dan menggabungkannja dengan Republik Indonesia—Jogja. Semula D.P.R. akan menjelesaikan sebagai undang² pertama rantjangan Undang² tentang Perubahan susunan kenegaraan wilayah R.I.S. jang telah diajukan oleh Pemerintah pada tanggal 20 Pebruari 1950. Akan tetapi kemudian Pemerintah menarik kembali rantjangan undang² itu dan materinja ditetapkan dalam bentuk Undang² Darurat, sepengetahuan D.P.R. dan dengan persetujuan Senat R.I.S. Sampai D.P.R.—R.I.S. bubar undang² darurat tersebut belum sampai ditetapkan mendjadi undang² oleh D.P.R.

Maka rantjangan undang² jang dibitjarakan dan diselesaikan pertama oleh D.P.R.—R.I.S. adalah rantjangan Undang² tentang Susunan, kekuasaan dan djalan-pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Peraturan mengenai Mahkamah Agung, jang baru pertama kali disusun dalam sedjarah Negara Republik Indonesia ini, meliputi ketentuan² mengenai :

1. Tempat kedudukan dan susunan Mahkamah Agung ;
2. Kekuasaan Mahkamah Agung, jaitu pengawasan tertinggi atas djalannja peradilan dan kekuasaan mengadili ;
3. Djalan-pengadilan dalam perkara perihal ketata-negaraan, ialah : a. tentang perselisihan antara Pemerintah Federal dan Pemerintah Daerah bagian atau antara Daerah-bagian dengan Swapradja mengenai peraturan Daerah dan b. tentang pernjjataan tak-menurut Konstitusi sesuatu peraturan ketata-negaraan/undang² Daerah-bagian ;
4. Djalan-pengadilan dalam tingkatan pertama perkara hukum perdata, jaitu mengenai pengusutan dan penuntutan perkara, penierahan kesidang Mahkamah Agung, pemeriksaan, pembuktian dan putusan dalam sidang serta mendjalankan putusan ;

5. Hal memutuskan perselisihan tentang kekuasaan mengadili, dalam perkara² perdata maupun pidana ;
6. Djalan-pengadilan pada peradilan tingkatan kedua bagi putusan² wasit ;
7. Djalan-pengadilan dalam pemeriksaan kasasi, baik dalam perkara perdata maupun pidana.

Rantjangan undang² itu mendapat perhatian khusus DPR dan D.P.R. membentuk suatu panitia khusus, diketuai oleh Mr. A.M. Tambunan, untuk mengadakan pemeriksaan-persiapan atas rantjangan itu. Selandjutnja dalam rapat pleno D.P.R. oleh sementara anggota diadjukan berbagai amandemen. Usul² amandemen jang disetudjui oleh D.P.R. dan menjejabkan perubahan atas rantjangan undang² itu adalah antara lain :

1. Mahkamah Agung me'aksanakan peradilan atas nama Keadilan (menurut rantjangan : „atas nama Negara Republik Indonesia Serikat", pasal 1) ;
2. Ketua, Wakil Ketua dan anggota² Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden atas andjuran Dewan Perwakilan Rakjat dari se-kurang²nja dua tjalon bagi tiap² pengangkatan (lowongan). Semula menurut rantjangan ditentukan, bahwa pengangkatan dilakukan „setelah mendengar Senat".

Selandjutnja mendapat perhatian khusus D.P.R.—R.I.S. pula rantjangan undang² terachir, jang menentukan berachirnja riwayat D.P.R.—R.I.S. sendiri maupun Negara R.I.S. pada umumnja, ialah Undang² Dasar tentang perubahan Konstitusi Sementara R.I.S. mendjadi Undang² Dasar Sementara Republik Indonesia. Pembittaraan mengenai rantjangan undang² itu di'akukan dalam Bagian² pada tanggal² 1, 2 dan 3 Agustus 1950 dan kemudian dalam rapat² pleno D.P.R.—R.I.S. pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Agustus 1950 malam. Dalam rapat pleno itu tidak kurang dari 45 anggota menjatakan pendapatnja dalam pemandangan umum babak pertama dan 21 anggota dalam babak kedua. Sebagian besar anggota mengemukakan hal² jang merianekut tjaranja pembentukan kembali Negara Kesatuan dan permintaan Pemerintah, agar D.P.R. hendaknja di'anggan menggunakan hak amandemen. Dalam hubungan itu oleh sebagian anggota² diadjukan dua buah usul mosi, jaitu :

1. Usul mosi Arudji Kartawinata dkk., jang maksudnja mendesak agar diadakan sidang bersama D.P.R. dan Senat R.I.S. dengan Komite Nasional Pusat Pleno untuk mengesahkan rancangan Undang² Dasar dan pelaksanaan Negara Kesatuan;
2. Usul mosi Maruto Nitimihardjo dkk., jang menghendaki D.P.R. Negara Kesatuan terdiri dari Badan Pekerdja KNP dan D.P.R.—R.I.S. ditambah dengan 100 anggota K.N.P. sampai berdjumlah 300 orang dan D.P.R. itulah jang menjusun Undang² Dasar dan sebagainya.

Selanjutnja oleh sebagian anggota² diadjukan 33 buah usul amandemen, sekalipun ada permintaan dari Pemerintah termaksud diatas. Akan tetapi kemudian diadakan pemungutan suara, apakah D.P.R. akan mengadakan pembijaraan mengenai usul² itu ataukah tidak. Dan karena jang setudju 22 anggota dan jang tidak setudju 22 anggota (sedangkan 16 anggota tidak memberikan suaranya), maka usul itu tidak diselesaikan.



Pemandangan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat RIS. Drs. Moh. Hatta sebagai P.M. sidang memberikan Keferangan Pemerintah 10 Agustus 1950. Semasa RIS disamping DPR jang mempunjai 146 anggota djuga ada Senat jang beranggotakan 29 orang dan mewakili 16 negara bagian.

(Photo Deppen)

Achirnja D.P.R. pada tanggal 14 Agustus 1950 malam, setelah Pemerintah memberikan djawaban dalam babak kedua, mengadakan pemungutan suara atas rantjangan Undang² Dasar Sementara Negara Kesatuan R.I., dengan hasil 90 setuju dan 18 tidak setuju.

Selain rantjangan undang² D.P.R.—R.I.S. membitjarakan djuga berbagai undang² darurat, jang disampaikan oleh Pemerintah untuk mendapat persetujuan D.P.R. berdasarkan pasal 140 Konstitusi Sementara R.I.S. Akan tetapi, sebagaimana disinggung diatas, kemudian D.P.R. hanjalah dapat menjelesaikan pemitjaraan mengenai 3 buah undang² darurat dan menetapkan mendjadi undang² federal, jaitu sebuah mengenai Lembaran Negara dan 2 jang lain mengenai peradilan ketentaraan dan hukum atjara pidana pengadilan ketentaraan. (Undang² No. 2, 5 dan 6 tahun 1960).

Selain dibidang per-undang²an, hasil pekerdjaan D.P.R.—R.I.S. meliputi pula 11 mosi², jaitu mosi jang berdasarkan usul² sebagai berikut :

1. Usul mosi gabungan dari 60 anggota tentang penggabungan berbagai daerah kepada Republik Indonesia,
2. Usul mosi M. Yunan Nasution dkk. tentang penggabungan daerah Asahan Selatan dan Labuhan Ratu,
3. Usul mosi dr. Sudarso tentang penggabungan Daerah Kalimantan Barat.
4. Usul mosi Mr Moh. Yamin dkk. tentang penggabungan Daerah Negara Sumatera Timur,
5. Idem tentang penggabungan Daerah Riau,
6. Idem tentang penggabungan Daerah Kotawaringin,
7. Usul mosi Arudji Kartawinata dkk. tentang Irian Barat,
8. Usul mosi K. Werdojo dkk. tentang hari Raja 1 Mei,
9. Usul mosi Natsir dkk. tentang Vietminh,
10. Usul mosi Siauw Giok Tjhan tentang Dewan Pengawas Keuangan,
11. Usul mosi Mr. Iwa Kusuma Sumantri tentang Anggaran belandja.

Mengenai beberapa mosi jang terpenting dapat dikemukakan hal² sebagai berikut.

Segera setelah DPR-RIS terbentuk oleh anggota² jang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dengan memperhatikan per-golakan jang terdjadi di-daerah masing², telah diadakan 12 buah usul² mosi, jang mendesak pembubaran daerah dan/atau peng-gabungannja dengan Republik Indonesia –Jogja. Usul² jang diadakan pada tanggal 28 Pebruari, 1 dan 2 Maret 1950 itu ialah :

1. Usul mosi -S. Harsono dkk tentang Negara Djawa Timur,
2. Usul mosi -K. Sosrodanukusumo dkk tentang Negara Madura,
3. Usul mosi - dr. Endon dkk tentang Daerah Djawa Tengah,
4. Usul mosi -G.A. Moeis tentang Daerah Bandjar,
5. Usul mosi -Moh. Hasan tentang Negara Sumatera Selatan,
6. Usul mosi -M. Yunan Nasution tentang Daerah Asahan Selatan dan Labuhan Batu,
7. Usul mosi -H. Siradjuddin Abbas dkk tentang Daerah Kota Padang,
8. Usul mosi -Mr. Moh. Yamin tentang Pasundan,
9. Usul mosi -Jusuf Rasidi tentang Daerah Bangka,
10. Usul mosi -Amelz dkk tentang Daerah Sabang,
11. Usul mosi -Kunum Kusumojudo dkk tentang Daerah Dajak Besar dan
12. Usul mosi -I.A. Moeis tentang Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tenggara.

Usul² mosi nomor 1 sampai 5 dan nomor 7 sampai dengan 12 kemudian digabungkan mendjadi satu mosi, sedang usul mosi nomor 6 tetap merupakan mosi tersendiri.

Gabungan mosi jang ditanda-tangani oleh 60 anggota² jang berasal dari berbagai daerah, tidak sadja meliputi daerah² jang tersebut dalam usul mosi semula, melainkan mengenai djuga daerah² Belitung.

Gabungan mosi jang disetujui oleh D.P.R. pada tanggal 2 Maret 1950 dengan suara 81 lawan 5 itu, mendesak kepada Pemerintah, agar Daerah² jang bersangkutan dengan segera digabungkan pada Negara Republik Indonesia dengan memper-gunakan undang² darurat berdasarkan pasal 139 Konstitusi

Sementara R.I.S. Dengan mosi itu djelas D.P.R. memberi kuasa kepada Pemerintah untuk menetapkan undang² darurat, agar segera ada dasar hukum untuk menampung pergolakan daerah².

Adapun mosi tersendiri mengenai Asahan Selatan dan Labuhan Batu, jang menurut pasal 2 Konstitusi R.I.S. status quonja berhubungan dengan Negara Sumatera Timur masih tetap berlaku, mendesak agar Pemerintah menggabungkan daerah² itu (dengan melepaskannja dari Negara Sumatera Timur) pada Negara Republik Indonesia, djuga dengan menggunakan undang² darurat. Mosi itu diterima baik dengan suara 74 lawan 8.

Usul mosi dr. Sudarso dkk. mula-mula hanjalah menginginkan penggantian anggota² Dewan Kalimantan Barat (Daerah istimewa jang dikepalai oleh Sultan Hamid II) dengan anggota² jang lebih representatif. Tetapi atas permintaan dari dewan tersebut dengan kawat kepada pengusul² mosi, setelah Sultan Hamid II ditangkap oleh Pemerintah dengan tuduhan terlibat dalam peristiwa Apra-Westerling, maka usul itu diubah mendjadi usul mosi penggabungan daerah Kalimantan Barat, jang kemudian disetujui oleh D.P.R.

Usul mosi Arudji Kartawinata diajukan berhubung dengan ketentuan K.M.B., bahwa „status quo karesidenan Irian (Nieuw-Guinea) tetap berlaku, seraja ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penjerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat masalah kedudukan kenegaraan Irian Barat akan diselesaikan dengan djalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland”.

Usul mosi tsb., jang diterima dengan suara bulat oleh D.P.R., menentukan :

1. Parlemen Republik Indonesia Serikat sebagai Wakil Rakjat Indonesia bersedia memberi backing jang se-besar²nja terhadap usaha dan kewadajiban Pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk menjelesaikan persengketaan Irian Barat dengan menempuh djalan perundingan (negotiation) dengan pemerintah Nederland.
2. Supaja Pemerintah mendjalankan kebidjaksanaan sampai penyelesaian persengketaan Irian Barat masuk agenda permusjawaratan pertama antara menteri kedua belah pihak peserta UNI dalam bulan Maret tahun 1951 dan supaja soal pertikaian Indonesia-Belanda djangan dihapuskan dari agenda UNO selama pertikaian belum selesai ;

3. Supaja Pemerintah mengirimkan suatu Misi Goodwill ke-pulau Irian untuk mengundjungi beberapa tempat disebelah Selatan dan Utara Irian, dengan memberikan laporan tertulis kepada Pemerintah dan Parlemen dan Senat tentang hasil peninjauan jang telah berlaku.

Usul mosi K. Werdojo dkk. tentang Hari Raya 1 Mei, jang djuga diterima oleh D.P.R. dengan aklamasi, menghendaki supaja Pemerintah mengesahkan hari 1 Mei sebagai hari raja resmi, dimana buruh dibebaskan dari kewadajiban bekerdja, sebagai penghargaan terhadap perdjuaan buruh.

Mengenai Vietminh (Vietnam Utara), jang sedang melakukan perdjuaan kemerdekaannya, sebenarnya diadakan 2 usul mosi, jaitu usul mosi Ir. Sakirman dkk., jang mendesak Pemerintah agar diambil tindakan seperlunya untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Vietminh, dan usul mosi M. Natsir tersebut diatas. Setelah diadakan perdebatan mengenai kedua usul mosi tersebut, diadakan pemungutan suara, dengan hasil : 37 suara setuju usul mosi Sakirman dkk. dan 49 suara setuju usul mosi M. Natsir dkk.

Dengan demikian D.P.R. pada tanggal 3 Djuni 1950 menolak usul mosi Ir. Sakirman dkk., dan menerima baik usul mosi M. Natsir dkk, jang mengandjurkan kepada Pemerintah, supaja:

1. Segera melakukan daja-upaja untuk mendapat bahan² keterangan jang lengkap serta menjelidiki apa jang sesungguhnya dapat dilakukan oleh R.I.S. dengan konkret, agar segera tertjapai suatu penyelesaian jang memuaskan bagi tjita² nasional rakjat Vietminh ;
2. Segera mengambil langkah² jang perlu, agar Inter-Asian-Conference jang ke-III dapat berkumpul dan atas usaha bersama dapat ditjapai penyelesaian soal ini dalam lapangan internasional, sebagai soal jang mendesak.

Dari rumusan usul mosi M. Natsir jang telah disetujui oleh D.P.R. tersebut njatalah, bahwa dalam menghadapi soal Vietminh, D.P.R. tjondong untuk bersikap ber-hati², sesuai dengan pendapat Pemerintah pada waktu itu.

Usul mosi Iwa Kusuma Sumantri mengundang dan mendesak Pemerintah untuk mengadakan Anggaran Belandja Negara kepada D.P.R. dalam tempo jang se-singkat²nja. Usul mosi

disetudjui oleh D.P.R. dengan suara 45 setuju dan 14 tidak setuju, pada tanggal 13 Djuni 1950 setelah oleh Menteri Keuangan diberikan keterangan, bahwa Pemerintah bersedia mengadakan rantjangan Anggaran Belandja Negara mengenai tahun² 1950 dan 1951 sebelum achir 1950, jaitu paling tjepat pada bulan Oktober 1950.

Usul mosi Siauw Giok Tjhan dkk. disetudjui dengan bulat oleh D.P.R. pada tanggal 23 Djuni 1950 dan disambut baik pula oleh Pemerintah. Menurut diktum mosi tersebut D.P.R. :

1. mengandjurkan kepada Pemerintah untuk mengambil tindakan² seperlunya dengan segera, supaya susunan dan kekuatan Dewan Pengawas Keuangan teratur sempurna, hingga dapat melakukan kewadajiban pengawasan untuk mentjegah pemborosan pemakaian uang negara dan memberantas perbuatan² tjurang jang merugikan keuangan negara,
2. meminta Pemerintah memberi laporan djelas pada Dewan Perwakilan Rakjat tentang djumlah² uang jang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan kepada kementerian², dengan disertai keterangan tentang tjara penggunaan djumlah² tersebut oleh kementerian² jang bersangkutan selama Dewan Pengawas Keuangan belum dapat melakukan kewadajiban.

Selain undang² dan mosi² dapatlah dikemukakan sebagai „hasil² pekerdjaan” jang terletak dibidang pengawasan atas Pemerintah : pertanjaan² para anggota dan laporan² peninjauan mengenai berbagai masalah atau peristiwa.

Dalam hubungan dengan keadaan gawat di Indonesia Timur, maka atas usul Andi Gappa dkk. pada tanggal 13 April 1950 D.P.R. mengadakan interpelasi, jang maksudnja : minta keterangan² dari Pemerintah tentang perkembangan politik di N.I.T. dan tindakan² apa jang sudah atau akan diambil oleh Pemerintah terhadap demonstrasi² dan mosi² pembubaran N.I.T. dan terhadap aliran² jang menentangnja.

Adapun pertanjaan² jang diadjukan oleh para anggota dengan menggunakan hak menanja-nja berdjumlah tidak kurang dari 285 buah dan pertanjaan² itu praktis semuanya mendapat jawaban dari Menteri² jang bersangkutan. Pertanjaan² jang diadjukan itu meliputi berbagai bidang pemerintahan, diantaranya ialah mengenai : larangan berapat, penangkapan² di N.I.T. dan

Negara Sumatera Timur, perdjandjian R.I. dengan pedagang Amerika Matthew Fox, keluarga korban perdjjuangan, pegawai² Belanda jang masih bekerdja pada Kementerian Penerangan, pengharapan terhadap peladjar pedjuang, nasib tahanan politik, dan sebagainya. Kebanjakan pertanjaan² itu didjawab setjara lisan oleh Menteri² jang bersangkutan dalam rapat pleno terbuka D.P.R., jaitu pada „hari² pertanjaan” jang djuga disebut „hari djawaban” dalam zaman R.I.S. ini, misalnja „hari² djawaban” pada tanggal² 23 dan 24 Maret 1950 dan pada tanggal 25 dan 26 Djuni 1950.

Laporan² penindjauan jang telah disusun oleh D.P.R. mengenai peristiwa² penting dan keadaan diberbagai daerah pada umumnja menggambarkan situasi Negara R.I.S. pada waktu itu. Laporan² penindjauan itu diantaranya ialah :

1. Laporan Komisi Parlemen ke Kalimantan Barat jang diketuai oleh Mr. Lukman Wiradinata (tanggal 22 Maret 1950) mengenai pemogokan umum diseluruh daerah tersebut. Pemogokan ini terdjadi setelah rapat raksasa jang menuntut pembubaran Dewan Kalimantan Barat buatan Belanda, dibubarkan oleh penguasa setempat dengan kekerasan dan pemimpin² rakjat ditangkapi.
2. Laporan Komisi Penindjauan dari Panitia Tetap Pertahanan tentang keadaan di N.I.T. dalam bulan² April/Mei 1950 : mengenai pemberontakan Andi Aziz, tentara K.N.I.L., Proklamasi R.M.S. oleh Mr. Dr. Soumokil, Gerakan² federalis „Twapro-Singa-Minahasa” (Twapro = Twaalfde Provincie jang berarti Propinsi kedua belas dari negeri Belanda) dan F.K.F.N. (Front Kaum Federal Indonesia) disamping F.K.N.I. (Front Kesatuan Nasional Indonesia) dan lain². Komisi tersebut terdiri dari 3 orang dan diketuai oleh Wakil Ketua Panitia Tetap Pertahanan O. Rondonuwu ;
3. Laporan Penindjauan Komisi Tetap IV (Sosial, Perburuhan dan Kesehatan) mengenai sebab² dan akibat² pemogokan jang telah diadakan oleh buruh dari perusahaan² perkebunan/pelabuhan asing di Sumatera Selatan dan Sumatera Timur (pada achir April 1950) ;
4. Laporan Penindjauan Panitia Tetap Dalam Negeri/Kehakiman mengenai djalannja pemerintahan/peradilan serta keadaan politik di Negara Sumatera Timur dan aliran² pro maupun kontra pembubaran Negara-bagian tersebut (antara

lain mengenai Kongres Rakjat Se-Sumatera Timur, jang pro pembubaran dan „Permusjawaratan Rakjat” jang mempertahankan Negara Sumatera Timur (penindjauan ini dilakukan djuga pada achir April 1950);

Achirnja perlu kiranja dikemukakan sebagai „hasil pekerdjaan” D.P.R.-R.I.S., bahwa pada tanggal 22 Djuni 1950 D.P.R. telah menjusun dan kemudian menjampaikan kepada Presiden berdasarkan pasal 6 ajat 1 Undang² No. 1/1950 tentang Mahkamah Agung : daftar 4 tjalon untuk mengisi 2 lowongan Hakim Agung. Daftar tersebut berdasarkan pertimbangan dari Panitia Khusus Rantjangan Undang² Mahkamah Agung dan Panitia Tetap Kehakiman.

Senat R.I.S.

Sebagaimana telah disebut diatas, maka selama ada RIS telah ditetapkan 7 buah undang². Dari 7 buah undang² itu hanjalah sebuah jang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetudjuan D.P.R. dan Senat, jaitu Undang² No. 7/1950 tentang Perubahan Konstitusi R.I.S. mendjadi Undang² Dasar Sementara R.I. Enam buah undang² lainnja ditetapkan oleh Pemerintah hanjalah dengan persetudjuan D.P.R. Namun demikian 3 buah diantaranya lebih dahulu telah melalui Senat djuga, jaitu 3 undang² jang menetapkan undang² darurat mendjadi Undang² Federal.

Undang² Darurat jang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam zaman R.I.S., jaitu selama 6 bulan, seluruhnja berdjumlah 30 buah, jaitu ber-turut² Undang² Darurat :

- No. 1/1950 tentang Penjelenggaraan tugas pemerintahan Daerah Djawa Timur oleh R.I.S.
- No. 2 tentang Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara R.I.S.,
- No. 3 tentang Pungutan tambahan padjak,
- No. 4 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang RIS,
- No. 5 tentang Peraturan Gadji Militer,
- No. 6 tentang Pembentukan djabatan Gubernur Militer Ibu Kota,
- No. 7 tentang Perguruan Tinggi,
- No. 8 tentang Penambahan Peraturan Keadaan Perang dan darurat perang,

- No. 9 tentang Perubahan Undang² Postspaarbank,
- No. 10 tentang Penjelenggaraan tugas pemerintahan daerah Negara Pasundan oleh R.I.S.,
- No. 11 tentang Tata-tjara perubahan susunan kenegaraan dari wilajah R.I.S.,
- No. 12 tentang Pajak Peredaran,
- No. 13 tentang Pindjaman darurat,
- No. 14 tentang Penjelenggaraan tugas pemerintah di Negara Sumatera Selatan oleh R.I.S.
- No. 15 tentang Penjelesaian urusan pemulihan hak,
- No. 16 tentang Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan kementerian,
- No. 17 tentang Hukum atjara pidana pada Pengadilan Tentara,
- No. 18 tentang Penghapusan Pengadilan² Landgerecht,
- No. 19 tentang Pensiun dan Onderstand anggota Angkatan Darat,
- No. 20 tentang Pemerintahan Djakarta Raya,
- No. 21 tentang Pengeluaran uang kertas atas tanggungan R.I.S.,
- No. 22 tentang Penurunan tjukai tembakau,
- No. 23 tentang Peraturan tambahan istirahat luar negeri,
- No. 24 tentang Peraturan tambahan perdjalanannya keluar negeri,
- No. 25 tentang Hak pengangkatan/pemberhentian pegawai R.I.S.,
- No. 26 tentang Pengesahan dan pengakuan hutang terhadap Keradjaan Belanda,
- No. 27 tentang Perubahan Peraturan Gadji Militer 1950,
- No. 28 tentang Perubahan Peraturan pensiun/onderstand anggota Tentara Angkatan Darat,
- No. 29 tentang Penetapan kedjahatan/pelanggaran² yang dilakukan dalam masa-pekerdjaan oleh para pedjabat yang menurut pasal 148 Konstitusi R.I.S. dalam tingkat pertama dan tertinggi diadili oleh Mahkamah Agung,
- No. 30 tentang Penggantian kerugian anggota² Senat R.I.S.

Menurut pasal 123 ayat 4 jo ayat 3 Konstitusi R.I.S. Senat harus didengar pertimbangannya mengenai semua rancangan undang² darurat, ketjuali kalau harus diambil tindakan jang segera, sedangkan Senat tidak bersidang.

Berhubung dengan ketentuan itu Senat memang telah diminta dan memberikan pertimbangannya kepada Pemerintah mengenai undang² darurat tersebut diatas sebelum Pemerintah menetapkan, tetapi tidak mengenai semuanya. Undang² Darurat No. 1 sampai dengan No. 10 dan No. 12 ditetapkan tanpa pertimbangan² dari Senat, karena pada waktu penetapannya, antara permulaan Djanuari sampai (jang terakhir, No. 12) 13 Pebruari 1950 belum ada Senat R.I.S. Dan Undang² Darurat No. 13, 22, 23, 24, 26, 28 dan 30 ditetapkan oleh Pemerintah sewaktu Senat sedang tidak bersidang. Djadi dari 30 undang² darurat ada 18 buah atau lebih dari separoh jang ditetapkan oleh Pemerintah tanpa mendengar pertimbangan Senat. Undang² Darurat selebihnya ditetapkan oleh Pemerintah setelah rancangannya dipertimbangkan oleh Senat (sebagian bersama dengan Menteri² jang bersangkutan) dan Senat memberikan pertimbangannya. Jang kadang² bersifat mengubah rancangan undang² darurat jang bersangkutan. Undang² Darurat jang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan pertimbangan² dari Senat, ditandai dengan kata² „Mendengar(kan) Senat” diantara konsiderans dan diktum, sedangkan undang² darurat jang sesudah Senat terbentuk ditetapkan oleh Pemerintah tanpa Senat, pada umumnya memuat kata² „Menimbang pula, bahwa Senat tidak bersidang” dalam konsideransnya.

Berdasarkan wewenangnja (menurut pasal 123 ayat 2 Konstitusi) „memberikan nasehat kepada Pemerintah tentang segala hal apabila dianggap perlu”, Senat telah memberikan pula pertimbangan² atau usul² mengenai hal² lain diluar undang² darurat, diantaranya :

1. mengenai Konstitusi Sementara Republik Indonesia, dengan menjamppaikan kepada Pemerintah sebuah rancangan Konstitusi jang telah disusun oleh „Panitia Undang² Dasar Senat” sewaktu oleh Pemerintah R.I.S. dan Pemerintah R.I.-Jogja (pada pertengahan Mei 1950) sedang mulai diadakan perundingan tentang pembentukan Negara Kesatuan ;

2. mengenai Nota Pemerintah Belanda kepada Tweede Kamer/ tentang perkembangan keadaan di Indonesia, (dalam hubungan ini Senat memberikan pertimbangan kepada Pemerintah R.I.S. pada tanggal 3 Djuni 1950, agar Pemerintah menolak tjampur-tangan Pemerintah/Parlemen Belanda dalam urusan dalam negeri R.I.S.).

Berkenaan dengan wewenangnja menurut pasal 124 Konstitusi RIS. untuk minta keterangan² dari Pemerintah, maka Senat atas usul anggota²nja telah beberapa kali mengajukan permintaan keterangan dan/atau pertanyaan² kepada Pemerintah mengenai berbagai hal, walaupun tidak sebanyak jang diadjudkan oleh anggota² D.P.R.. Pertanyaan² jang diadjudkan itu meliputi djuga berbagai bidang pemerintahan, misalnja : mengenai kelambatan keberangkatan djemaah hadji, djabatan rangkap Sultan Hamid sebagai Menteri Negara R.I.S. dan sebagai Major Djenderal Tentara Belanda, usaha² Pemerintah dibidang penerangan, monopoli K.P.M. (Koninkelijke Paketvaart Maatschappij) dan lain². Djawaban² Pemerintah (oleh Menteri² jang bersangkutan) diberikan dalam rapat pleno Senat setjara lisan, dimana para anggota mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan² tambahan ; misalnja dalam rapat² pleno Senat pada tanggal 21 April, 22 April dan 6 Djuni 1950.

Hasil pekerdjaan terachir Senat berupa keputusan untuk menjetudjui rantjangan Undang² Dasar Sementara Negara Kesatuan, jang telah diadjudkan oleh Pemerintah kepada DPR maupun Senat untuk mendapat persetudjuannja. Keputusan Senat tersebut diambil dengan suara bulat dalam rapat terachir Senat jang dihadiri oleh 21 anggota pada tanggal 14 Agustus 1950 malam, sesaat setelah Senat menerima pemberitahuan resmi dari Ketua D.P.R., bahwa D.P.R. baru sadja menjetudjui rantjangan tersebut dengan suara 90 lawan 18. Menurut pertimbangan anggota² Senat rantjangan dari Pemerintah itu tidak djauh berbeda dengan rantjangan Undang² Dasar jang disusun oleh Senat sendiri dan lebih dahulu telah diusulkan kepada Pemerintah.

§ 7. SEKRETARIAT

Sedjak melaksanakan tugasnja sebagai badan² perwakilan dari Negara R.I.S., D.P.R. maupun Senat telah dibantu oleh

tenaga² Sekretariat, jang kebanyakan terdiri dari bekas pegawai² dari djawatan² jang ada di Djakarta sewaktu itu, terutama pegawai² dari Algemene Secretarie (Sekretaris Umum Gubernur Djenderal) dan Sekertariat B.F.O. Semula hanjalah ada 2 pegawai jang berasal dari Republik Indonesia-Djokja, yakni Mr. Sumardi dan Djoko Sumarjono.

Sedjak 15 Pebruari 1950 Sekertariat D.P.R. dipimpin oleh Mr. Sumardi sebagai Acting Sekertaris. Kemudian menjusul beberapa pegawai lagi dari R.I.-Djokdja antara lain R. Akoep Gulangge. 11 Maret 1950 Mr. Sumardi ditetapkan resmi mendjadi Sekretaris D.P.R.-R.I.S. Adapun djumlah pegawai pada waktu itu 50 orang.

Sekertariat D.P.R. dan Sekertariat Senat keduanja bersamasama menempati bekas gedung Societeit „Concordia” di djalan Sipayer (Sipai) I (kemudian mendjadi Djalan Dr. Wahidin I), dimana baik D.P.R. maupun Senat mengadakan rapat²nja pula (Hanja beberapa kali D.P.R. dan Senat mengadakan rapat² di luar gedung itu, terutama pada waktu permulaan, jaitu diantaranja di Hotel Des Indes (kemudian Hotel Duta Indonesia) dan digedung Loge Ad Huc Stat di Burgemeester Bisschopplein (sekarang Gedung Bappenas di Taman Surapati).

Dua bagian dari Sekretariat, jaitu bagian jang langsung membantu para anggota dalam melakukan tugas legislatifnja dan bagian kerumahtanggaan, masing² dibagi dalam beberapa Sub-bagian. Bagian pertama terdiri dari : Sub-bagian Risalah dipimpin oleh E. Karundeng dari Parlemen N.I.T. Sub-bagian Redaksi dipimpin oleh Gunadi Soekarno. Bagian Kerumahtanggaan jang dipimpin oleh Z. Arbi meliputi antara lain : Sub-bagian Personalia dan Sosial jang dipimpin oleh S. Poerwadi, Sub-bagian Keuangan dipimpin oleh L. Mara dan Sub-bagian Arsip Ekpedisi.

Sewaktu Senat mulai melaksanakan tugasnja belum ada Sekretaris tetap. Baru pada tanggal 7 Maret 1950 Senat mengangkat Mr. Sajid Mangunjudo sebagai Acting Sekretaris (dan kemudian mendjadi Sekretaris), dengan Suwirjo sebagai wakilnja. Adapun pedjabat² pimpinan jang membantu kedua pedjabat² tersebut diantaranja ialah : R. Warnaen Puraatmadja (Risalah kemudian pindah ke Sekretariat D.P.R.), Nj. Haulussy (Personalia), R. Oerip Sutidjo (Keuangan) dan Said Sastradiredja (Risalah).

Sekretariat D.P.R. dan Sekretariat Senat R.I.S. dengan terbentuknja kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, bergabung dengan Sekretariat Badan Pekerdja K.N.P. dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Agung R.I.-Jogja, mendjadi Sekretariat D.P.R. Sementara Republik Indonesia.

B A B I I I

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SEMENTARA 16 AGUSTUS 1950—26 MARET 1956

§ 1. PEMBENTUKAN.

Pada tanggal 14 Agustus 1950 telah disetudjui oleh D.P.R. dan Senat R.I.S. Rantjangan Undang² Dasar Sementara Negara Kesatuan R.I. (Undang² No. 7/1950, Lembaran Negara No. 56/1950). Maka pada tanggal 15 Agustus 1950 diadakan Rapat Gabungan D.P.R. dan Senat R.I.S. Dalam rapat itu dilakukan suatu Upatjara pembatjaan Piagam Pernyataan terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Presiden Sukarno yang sekaligus mempunyai 2 maksud ialah pertama pembubaran dengan resmi Negara R.I.S. yang berbentuk Federasi, kedua pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi seluruh Daerah Indonesia dengan Undang² Dasar Sementara yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Hal ini djuga telah diuraikan setjara lengkap dalam Bab II.

Dengan demikian Negara R.I.S. dibubarkan setelah mentjapai usia 8 bulan sedangkan D.P.R. dan Senat R.I.S. hanya berusia genap 6 bulan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir kembali pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan mulai berlakunja U. U. D. Sementara. U.U.D. Sementara ini adalah Konstitusi R.I.S. yang diubah sedemikian rupa, sehingga bentuk federal dari Republik Indonesia berubah mendjadi bentuk unitaris. Lahirnja Negara Kesatuan itu adalah perubahan dalam negeri semata-mata, yang diperbolehkan oleh pasal 190 Konstitusi R.I.S.

Dalam Undang² Dasar Sementara Republik Indonesia itu ditetapkan bahwa Republik Indonesia yang Merdeka dan Berdaulat adalah suatu Negara Hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan, dan bahwa Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan Rakjat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat. Senat yang kita djumpai dalam Negara R.I.S. ditiadakan atau dengan perkataan lain, sistim perwakilan yang dipakai sekarang ini, adalah monokameral. Senat R.I.S. adalah institut Negara federasi yang pada waktu itu mewakili Negara²/daerah² bagian; karena Negara²/

daerah² bagian itu tidak akan ada lagi dalam negara kesatuan R.I., maka Senat ditiadakan.

Berdasarkan U.U.D. Sementara 1950 Dewan Perwakilan Rakyat jang baru dibentuk ini mewakili seluruh Rakyat Indonesia dan terdiri dari sedjumlah Anggota jang besarnja ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 300.000 djiwa penduduk warga-negara Indonesia mempunyai seorang wakil.

Anggota² Dewan Perwakilan Rakyat menurut U.U.D.S. dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga-negara Indonesia jang memenuhi sjarat² dan menurut aturan² jang ditetapkan dengan Undang-undang;

Golongan² ketjil Tionghoa, Eropa dan Arab mempunyai wakil² berturut-turut sekurang-kurangnja 9, 6 dan 3 orang.

Untuk pertama kali selama Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun dengan pemilihan menurut Undang², Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari Ketua, Wakil² Ketua dan Anggota² D.P.R. Republik Indonesia Serikat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota² Senat, Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat dan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota² Dewan Pertimbangan Agung (Pasal 77 U.U.D.S.).

Dewan Pertimbangan Agung R.I. dimasukkan kedalam D.P.R. Sementara, karena Dewan itu adalah sebuah Dewan Pusat jang telah biasa memberi nasehat kepada Pemerintah R.I. tentang haluan politik Pemerintah dan tentang tindakan legislatif.

Pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1950 Anggota² D.P.R.S. mengangkat sumpah menurut pasal 63 Undang² Dasar Sementara dihadapan Presiden Soekarno di Istana Negara. Pada waktu petang harinja dilakukanlah pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara oleh Presiden Sukarno bertempat digedung D.P.R. di Djalan Sipayer (sekarang djalan Dr. Wahidin I).

§ 2. KEANGGOTAAN.

Berdasarkan pasal 77 U.U.D.S. tersebut diatas, maka djumlah anggota D.P.R. Sementara adalah 236 orang, jaitu 148 anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat R.I.S., 29 anggota dari Senat R.I.S., 46 anggota dari Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat dan 13 anggota dari Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia—Jogja. Pasal ini tidak memberi kemungkinan bagi Presiden untuk menambah D.P.R.S. dengan anggota² lain, sebab

menurut pendapat Pemerintah adalah sukar sekali untuk menentukan kriteria bagi penundjukan anggota² tambahan oleh Presiden.

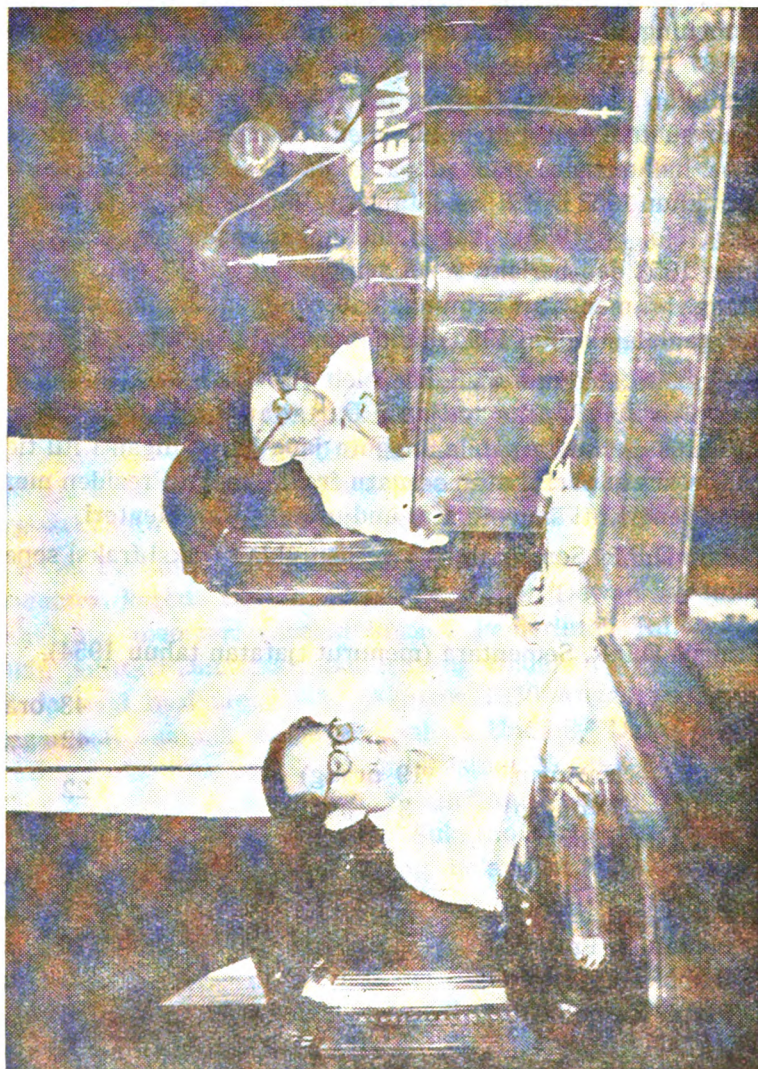
Dari djumlah 236 orang anggota tersebut diatas setelah beberapa tahun berlangsung tinggal hanja 213, karena ada anggota jang meninggal dunia atau mengundurkan diri. Memang menurut pasal 67 U.U.D. Sementara anggota² D.P.R. setiap waktu boleh meletakkan djabatannya. Dengan pertimbangan, bahwa perlu ditetapkan suatu Peraturan untuk mengganti Anggota D.P.R. jang karena hal tertentu tidak dapat melakukan djabatannya, maka dalam tahun 1953 D.P.R. menetapkan Undang² No. 37 (Lembaran Negara No. 88/1953), jang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1953 dan berlaku surut sampai tanggal 17 Agustus 1950. Undang² ini mengatur kemungkinan penggantian anggota D.P.R. sehingga dalam tahun 1954 djumlah anggota mendjadi 235 orang.

Pengganti anggota diangkat oleh Presiden, setelah dikemukakan oleh D.P.R. atas andjuran Partai atau fraksinja anggota jang harus diganti. Apabila anggota jang harus diganti itu tidak masuk sesuatu partai atau sesuatu fraksi, maka Presiden mengangkat pengganti anggota atas andjuran Dewan Menteri.

Dalam D.P.R. Sementara R.I. terbentuklah fraksi-fraksi seperti berikut :

Fraksi² D.P.R. Sementara (menurut tjatatan tahun 1954).

1. Masjumi		43 orang
2. P.N.I.		42 "
3. P.I.R. — Hazairin	19 orang)	
4. P.I.R. — Wongso	3 ")	22 "
5. P.K.I.		17 "
6. P.S.I.		15 "
7. P.R.N.		13 "
8. Persatuan Progresif		10 "
9. Demokrat		9 "
10. Partai Katholik		9 "
11. N.U.		8 "
12. Parindra		7 "
13. Partai Buruh		6 "
14. Parkindo		5 "
15. Partai Murba		4 "



Rapat pertama DPR Negara Kesatuan dipimpin oleh anggota tertua usianja, dr. RADJIMAN.
Duduk disebelahnja Mr. Sartono.
„Foto Deppen” 50009)

16. P.S.I.I.	4	„
17. S.K.L.	4	„
18. S o b s i	2	„
19. B.T.I.	2	„
20. G.T.I.	1	„
21. Perti	1	„
22. Tidak berfraksi	11	„

235 orang

Tjatatari :

1. Jang mengundurkan diri/tidak diganti :
Ir. R. H. Much. Enoch - Wakil Parki (tanggal 21-5-1951).
2. Fraksi Kedaulatan Rakjat :
Dalam periode D.P.R.S., pernah dibentuk Fraksi Kedaulatan Rakjat. Fraksi ini berdiri hanja beberapa bulan, kemudian bubar dan anggota²nja jang berdjumlah 4 orang memasuki fraksi² lainnja.
3. Front Buruh :
Front Buruh merupakan ikatan perwakilan buruh dalam Parlemen jang terdiri dari 7 orang anggota. Front Buruh ini bukan merupakan fraksi dan berdiri hanja dalam waktu singkat, kemudian para anggotanja memasuki berbagai fraksi.
4. Front Wanita :
Front Wanita djuga bukan merupakan fraksi, tetapi hanja gabungan anggota Parlemen Wanita jang terdiri dari 7 orang.

Mengenai Pimpinan D.P.R.S., U.U.D.S. pasal 62 menetapkan bahwa D.P.R. memilih dari anggota²nja seorang Ketua dan seorang atau beberapa orang Wakil Ketua. Djika belum diadakan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua maka rapat diketuai untuk sementara oleh anggota jang tertua umurnja. Berdasarkan ketentuan ini Dr. Radjiman Wedyodiningrat ditundjuk mendjadi Ketua Sementara D.P.R.

Rapat pertama D.P.R. Sementara dibawah pimpinan Ketua Sementara telah menietudui Rantjangan Peraturan² mengenai pemilihan Ketua dan Wakil² Ketua jang tetap.

Rantjangan ini disusun oleh Panitia penjurusan Peraturan Tata-tertib dengan anggota Mr. A. M. Tambunan, bekas Wakil Ketua I D.P.R.—R.I.S., sebagai Ketua.

Dalam rapat pada tanggal 19 Agustus 1950 dengan menggunakan peraturan² pemilihan tersebut diatas terpilih sebagai Ketua D.P.R. Sementara Mr. Sartono dan pada tanggal 21 Agustus berikutnya anggota² Mr. A.M. Tambunan, Arudji Kartawinata dan Mr. M. Tadjuddin Noor ber-turut² sebagai Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III.

Karena U.U.D.S. pasal 62 menentukan bahwa pemilihan Ketua dan Wakil Ketua D.P.R. membutuhkan pengesahan Presiden maka untuk itu ditetapkanlah keputusan² Presiden No. 1, No. 3 dan No. 4/1950; pada tanggal 21 Agustus 1950 rapat² D.P.R. Sementara mulai dipimpin oleh Ketua Mr. Sartono.

§ 3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG.

D.P.R. Sementara, sungguhpun diberi djulukan „sementara”, karena anggota²nja tidak dipilih, mempunyai kedudukan, tugas dan wewenang jang tidak ada bedanja dengan D.P.R. hasil pemilihan.

A. Kedudukan dan Tugas.

(1) Terutama D.P.R.S. adalah badan pembentuk Undang². Ditetapkan oleh U.U.D.S. dalam pasal 89, bahwa kekuasaan perundang²an dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan D.P.R. dan dalam pasal 90, bahwa usul Pemerintah tentang Undang² (se-hari² disebut Rantjangan Undang², disingkat R.-U.U.) disampaikan kepada D.P.R. dengan amanat Presiden, sedangkan D.P.R. pun berhak pula memadjukan usul Undang² kepada Pemerintah (D.P.R. mempunyai hak inisiatif). Pada umumnja R.U.U. dibuat oleh Pemerintah dan disampaikan kepada D.P.R., akan tetapi D.P.R. pun djika dianggapnja perlu dapat membuat usul R.U.U. jang disampaikan kepada Pemerintah.

(2) Dalam pasal 113 s/d 116 U.U.D.S. ditetapkan bahwa D.P.R. mempunyai hak menetapkan Anggaran Negara; ditentukan bahwa anggaran semua pengeluaran Republik Indonesia dan penundjukan pendapatan² untuk menutup pengeluaran itu ditetapkan dengan Undang² (oleh Pemerintah bersama-sama dengan D.P.R.).

Usul Undang² untuk menetapkan Anggaran umum itu dimajukan oleh Pemerintah kepada D.P.R. sebelum masa jang berkenaan dengan Anggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun. Usul Undang² untuk mengubah anggaran umum, tiap² kali djika perlu dimajukan Pemerintah kepada D.P.R. (pasal 114).

Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia dipertanggung-djawabkan kepada D.P.R., sambil memajukan perhitungan jang disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, menurut aturan² jang diberikan dengan Undang² (Pasal 116).

(3) Dalam pasal 83 ayat (2) dari Undang² Dasar Sementara ditetapkan bahwa Menteri² bertanggung-djawab atas seluruh kebidjaksanaan Pemerintah, baik ber-sama² untuk seluruhnja, maupun masing² untuk bagiannja sendiri². Ini berarti bahwa D.P.R. berhak dan berkewadajiban senantiasa mengawasi segala perbuatan Pemerintah. Pemerintah tidak dapat mengambil tindakan jang tidak mendapat persetujuan dari D.P.R. Dalam hal ini jaitu djika kebidjaksanaan seorang Menteri atau suatu Kabinet tidak disetujui oleh D.P.R., D.P.R. dapat memaksa Menteri atau Kabinet jang bersangkutan meletakkan djabatannja.

Pasal 83 ayat (2) ini sepenuhnya sama dengan pasal 118 Konstitusi R.I.S.

Perbedaan besar dengan peraturan Konstitusi R.I.S. ialah bahwa didalam U.U.D.S. tidak terdapat suatu pasal seperti pasal 122 Konstitusi R.I.S., jang menentukan bahwa D.P.R. tidak dapat memaksa Kabinet atau masing² Menteri meletakkan djabatannja.

B. Hak² dan Kewadajiban.

Hak² jang dipunyai oleh D.P.R. untuk mendjalankan tugasnja ialah seperti berikut :

1. Hak Amandemen, yakni dalam pasal 91 U.U.D.S. ditetapkan, bahwa D.P.R. berhak mengadakan perubahan² dalam usul Undang² jang dimajukan oleh Pemerintah kepadanya.
2. Hak Interpelasi dan hak menanja : ditetapkan dalam pasal 69 U.U.D.S., bahwa D.P.R. mempunyai hak interpelasi dan hak menanja - Anggota² mempunyai hak menanja. Menteri² memberikan kepada D.P.R. baik dengan lisan maupun de-

ngan tulisan segala penerangan yang dikehendaki menurut ketentuan diatas yang dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia.

3. Hak Angket; ditetapkan dalam pasal 70 U.U.D.S., bahwa D.P.R. mempunyai hak menjelidiki (enquete) menurut aturan² yang ditetapkan dengan Undang².

Dalam U.U.D. ditetapkan pula beberapa tugas/kewadajiban seperti berikut :

Presiden dan Wakil Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang, tetapi untuk pertama kali D.P.R. harus menjampaiakan andjuran tjalon Wakil Presiden untuk diangkat oleh Presiden (Pasal 45). Berdasarkan pasal 45 ini maka pada tanggal 14 Oktober 1950 D.P.R.S. melangsungkan pemilihan tjalon Wakil Presiden. Sebagai tjalon terpilih Drs. Moh. Hatta, yang kemudian diangkat oleh Presiden menjadi Wakil Presiden. Tjalon-tjalon lainnja, akan tetapi tidak terpilih, ialah :

Mr. Iwa Kusuma Sumantri,
K.H. Dewantoro,
M. Burhanudin,
St. Sjahrir,
Dr. Sukiman Wirjosandjojo,
Mr. Moh. Yamin dan
Nerus Ginting Suka.

D.P.R. bersama-sama dengan pemerintah (dengan Undang-undang) memberikan persetujuan terhadap perdjandjian (atau persetujuan lain) dengan Negara-negara lain sebelum disahkan oleh Presiden. Djuga memutuskan perdjandjian dilakukan oleh Presiden hanja dengan kuasa Undang-undang (Pasal 120).

Hingga Djanuari 1954 telah diadakan perdjandjian persahabatan antara Republik Indonesia dan :

- | | |
|-----------|--------------|
| 1. Mesir, | 4. Pakistan, |
| 2. Syria, | 5. Birma dan |
| 3. India, | 6. Filipina. |

Dengan beberapa Negara telah pula diadakan persetujuan dagang misalnja dengan Djepang, India, Djerman Barat, Hongaria dan lain² Negara.

Menurut pasal 128 U.U.D. Sementara D.P.R. harus memberi

idjin lebih dahulu, sebelum Presiden menjatakan perang kepada sesuatu Negara lain.

Adapun mengenai perdamaian tidak perlu diatur dalam U.U.D. Sementara.

C. Hubungan D.P.R.S. dengan Pemerintah.

Dalam sistim U.U.D.S. ini tidak mungkin dibentuk Kabinet Presidentil, dengan lain perkataan tidak mungkin dibentuk Kabinet yang tidak bertanggung-djawab kepada Parlemen dan hanya bersifat pembantu Presiden belaka.

Ber-ulang² Presiden Sukarno menjatakan pada Rapat² Rak-sasa, bahwa beliau bukan sadja Presiden Konstitusionil, melainkan beliau adalah djuga Pemimpin rakjat. Sebagai Bapak Negara dan Pemimpin rakjat, beliau merasa wadjib tiap² kali memberi amanat kepada chalajak ramai.

Terhadap pidato-pidato Presiden yang diutjapkan itu, dalam D.P.R. timbul persoalan mengenai siapakah yang bertanggung-djawab.

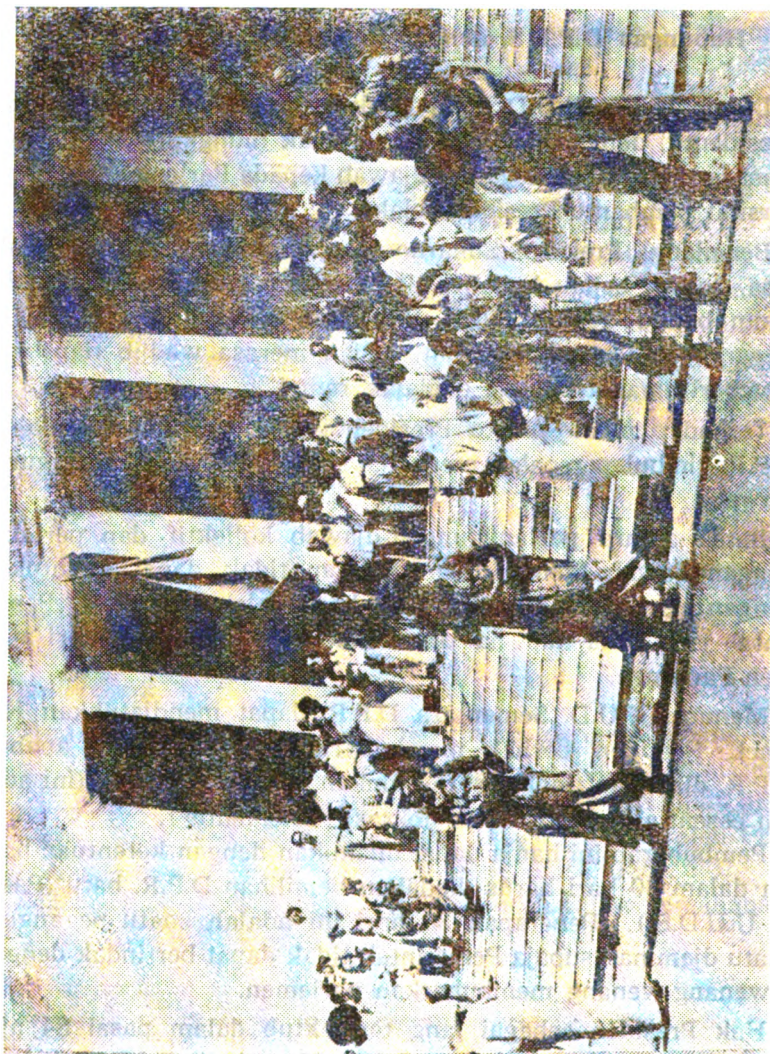
Batas antara pertanggungan-djawab kollektif dan pertanggungan-djawab Menteri perseorangan tidak dapat ditentukan dengan peraturan² hukum, melainkan adalah soal beleid Pemerintah yang pada tiap² hal ditentukan oleh Dewan Menteri atau oleh Parlemen.

Menurut U.U.D. Sementara D.P.R. dapat mendjatuhkan Kabinet, Presiden berhak membubarkan D.P.R. yakni apabila D.P.R. dianggap tidak mentjerminkan kemauan Rakjat, (ini adalah essentialia daripada demokrasi parlementer).

Pembubaran ini hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa dalam 30 hari harus diadakan pemilihan D.P.R. baru (Pasal 84 U.U.D.S.). Penetapan 30 hari ini adalah suatu pegangan. suatu djaminan supaja Pemerintah tidak dapat bertindak dengan sewenang-wenang membubarkan parlemen.

Hak Presiden sebagai yang termaktub dalam pasal 84 ayat (1) U.U.D.S. tidak terdapat dalam Konstitusi R.I.S. Sebabnya ialah karena didalam sistim Pemerintahan R.I.S. tak perlu Presiden diberi hak membubarkan D.P.R., oleh karena D.P.R. tidak dapat memaksa Kabinet untuk berhenti.

Hak² Parlementer seperti hak menanja hak interpelasi, hak



Para Demonstran diterima Presiden Soekarno, Presiden Soekarno waktu itu menolak tuntutan kaum demonstran untuk membubarkan Parlemen 17 Oktober 1952.

„Foto Ipphos”/003/HM.

angket, hak mengajukan usul mosi adalah alat² kekuasaan jang penting bagi D.P.R. untuk senantiasa mengawasi pekerdjaan Pemerintah dan menjatakan keinginannya kepada Pemerintah. Selain itu ada hak menanja bagi anggota² D.P.R. setjara perancangan.

Sudah mendjadi kelaziman sedjak B.P.K.N.I.P. dan DPR-RIS bahwa Kabinet jang baru dibentuk memberikan keterangan mengenai Program Kabinetnja.

Pembitjaraan setjara leluasa jang dioper dari Badan Pekerdja K.N.P. dan DPR—RIS dan ditjontoh dari tjara demokrasi parlementer barat itu, lebih² dilakukan oleh DPR Sementara dalam melaksanakan hak budget dan membitjarakan Keterangan Pemerintah. Pemandangan Umum mengenai kedua hal tersebut jang tidak diatur dalam Peraturan Tata-tertib D.P.R. 1950 itu, biasanya benar² berlangsung setjara leluasa dan selain itu memakan waktu ber-hari² dengan pembitjara jang beberapa puluh djumlahnja.

Dalam masa djabatannya selama 5½ tahun (dari 16 Agustus 1950 sampai 26 Maret 1956) D.P.R. Sementara telah berhadapan dengan 5 Kabinet, jaitu Kabinet² Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamidjojo ke-I dan Burhanudin Harahap. Maka lima kali pula, setiap kali pada waktu Kabinet baru hendak memulai tugasnja, D.P.R.S. mendengar dan memperdebatkan Keterangan Pemerintah mengenai Program Kabinet. Lain dari itu beberapa kali terdjadi perdebatan tentang Keterangan² Pemerintah mengenai kebidjaksanaan jang telah dilakukannya. Perdebatan itu semuanya dilakukan setjara leluasa sekali, dengan turut sertanja ber-puluh² anggota, dengan menggunakan waktu jang berminggu² lamanya antara pemberian Keterangan Pemerintah dan pengambilan Keputusan oleh D.P.R. Selama itu kegiatan² lainnya praktis terhenti. Dan karena pembentukan Kabinetnja-pun biasanya memakan waktu banjak, pernah sampai 1½ bulan, sewaktu mana Kabinet jang lama demisioner, sehingga tidak mungkin diselesaikan pekerdjaan² jang memerlukan hadirnja (tanggung-djawab) Menteri², maka beberapa kali terdjadi sampai 2 bulan lebih D.P.R.S. tidak dapat mendjalankan tugasnja sebagaimana mestinja.

Mengenai kedudukan Kabinet demisioner dalam hubunganja dengan Parlemen, didjelaskan, bahwa Kabinet demisioner

dilihat dari sudut juridis formil tetap berkedudukan sebagai Pemerintah jang bertanggung-djawab, oleh karena Kabinet itu formil belum meletakkan djabatannja. Akan tetapi sanksi politik jang paling besar jang dapat digunakan oleh Parlemen, jaitu menjatuhkan Pemerintah tersebut tak dapat dipakai lagi, oleh karena Kabinet demisioner itu dalam arti politik telah djatuh.

Mengenai achir perdebatan² terhadap Keterangan tentang Program Pemerintah dapat dikemukakan, bahwa rumusan keputusan D.P.R. tentang Keterangan Pemerintah, biasanja disesuaikan dengan permintaan dari Kabinet jang bersangkutan, terhadap Kabinet — Natsir diputuskan : „memberikan kepertajaan kepada Kabinet”.

Kabinet — Sukirman diberi „kesempatan untuk melaksanakan programnja”;

Kabinet — Wilopo diberi kesempatan untuk „melandjutkan pekerdjaannja” sedang sewaktu Kabinet — Ali Sastroamidjojo ke-I dan Kabinet — Burhanuddin Harahap D.P.R.S. memberi kesempatan kepada „Kabinet untuk bekerdja”.

Untuk memberikan gambaran mengenai hubungan D.P.R.S. dengan 5 Kabinet selama masa djabatannja (16 Agustus 1950 sampai 26 Maret 1956), dibawah ini dimuat suatu ichtisar tentang 5 Kabinet tersebut.

Dalam ichtisar ini sekaligus terdapat uraian tentang :

- a. Pembentukan Kabinet
- b. Program Kabinet
- c. Pembijtaraan program Kabinet dalam D.P.R.
- d. Lamanja masa pemerintahan, termasuk masa demisioner
- e. Perletakan djabatan
- f. Lamanja Kabinet demisioner.

Didalam program Kabinet termuat hal² didalam masjarakat jang baru sadja selesai menghadapi revolusi physik dan jang khusus mendapat perhatian Pemerintah dan D.P.R.S., misalnja antara lain : pemilihan umum, keamanan, soal pengembalian Irian Barat dll.

ICHTISAR TENTANG KABINET-KABINET

1. **KABINET NATSIR (Zaken Kabinet) 6 September 1950 — 27 April 1951.**
 - a. **Pembentukan :**
 - 1) Tanggal 22-8-1950 : Moh. Natsir ditundjuk sebagai formateur.
 - 2) Tanggal 6-9-1950 : Kabinet Natsir terbentuk.
 - 3) Lamanja pembentukan: 15 hari.
 - b. **Program :**
 - 1) Mempersiapkan dan menjelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante dalam waktu jang singkat.
 - 2) Mentjapai konsolidasi dan menjempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan Negara jang bulat (pasal 146 Undang-undang Dasar).
 - 3) Menggiatkan usaha mentjapai keamanan dan ketenteraman.
 - 4) Memperkembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi rakjat sebagai dasar bagi melaksanakan ekonomi nasional jang sehat.
Melaksanakan keragaman antara buruh dan madjikan.
 - 5) Menjempurnakan organisasi Angkatan Perang dan memulihkan bekas Anggota² Tentara dan Gerilja kedalam masyarakat.
 - 6) Memperdjoangkan penjelesaian soal Irian Barat dalam tahun ini.
 - 7) Mendjalankan politik luar Negeri jang bebas.
 - c. **Pembitjaraan program Kabinet dalam D.P.R. :**
 - 1) D.P.R. menjetudju memberikan kepertjajaan kepada Kabinet dengan 118 suara setudju dan 73 suara tidak setudju.
 - 2) Waktu untuk membitjarakan Keterangan Pemerintah seluruhnja sampai „Votum”: 1 bulan 4 hari, dengan mempergunakan 16 kali rapat.
 - d. **Lamanja masa pemerintahan, termasuk masa demisioner : 7 bulan, 21 hari.**
 - e. **Perletakan djabatan :**
 - 1) Tanggal 27-4-1954 : Kabinet Natsir meletakkan djabatan.

2) Sebab²nja Kabinet Natsir berhenti :

Berhubung D.P.R. menerima baik usul mosi Hadikusumo tentang pentjabutan P.P. No. 39 tahun 1950, maka Menteri Dalam Negeri (Mr. Assaat) minta meletakkan djabatannja oleh karena berpendapat, bahwa mosi mengenai pembekuan dan pembubaran D.P.R.D. tidak dapat didjalkan disebabkan alasan juridis formil dan politis. Sikap Menteri Dalam Negeri itu disokong oleh Kabinet seluruhnja.

Maka pada tanggal 21-3-1951 Kabinet menjerahkan kembali mandatnja.

f. Lamanja Kabinet demisioner :

Kabinet demisioner : tanggal 21-3-1951 sampai tanggal 27-4-1951 (1 bulan 6 hari).

2. KABINET SUKIMAN (Kabinet koalisi : Masjumi, P.N.I., Parkindo, P.I.R.). 27 April 1951 — 3 April 1952.

a. Pembentukan :

1) Tanggal 27-3-1951 : Mr. Sartono ditundjuk sebagai formateur. Karena usaha Mr. Sartono untuk membentuk kabinet tidak berhasil, maka Dr. Sukiman dan Sidik Djojokusarto ditundjuk sebagai formateur.

2) Tanggal 27-4-1951 : Kabinet Sukiman terbentuk.

3) Lamanja pembentukan : 1 bulan.

b. Program :

1) Keamanan.

Mendjalankan tindakan jang tegas sebagai Negara Hukum, untuk mendjamin keamanan dan ketenteraman. Menjemputnakan organisasi alat² kekuasaan Negara.

2) Kemakmuran :

Membuat dan melaksanakan rentjana kemakmuran nasional dalam djangka pendek. Mempertjepat usaha penempatan bekas pedjuang dalam lapangan pembangunan.

3) Organisasi Negara.

Menjelenggarakan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante dan menjelenggarakan pemilihan umum dalam waktu jang singkat.

4) Politik Luar Negeri.

Mendjalankan politik luar-negeri jang bebas dan aktif

dan jang menudju perdamaian.

Menjelenggarakan hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Unie-Statuut mendjadi hubungan jang berdasarkan perdjandjian internasional biasa. Mempertjepat penindjauan kembali lain² persetudjuan hasil K.M.B. dan meniadakan perdjandjian² jang njata merugikan rakjat dan negara.

5) Irian Barat.

Memasukkan Irian Barat kedalam Wilayah Republik Indonesia se-tjepat²nja.

c. Pembijtaraan program Kabinet dalam D.P.R.

- 1) Tanggal 15-6-1951 D.P.R. menjetudju untuk memberi kesempatan kepada Kabinet melaksanakan programnja, dengan 119 suara setuju dan 30 suara tidak setuju.
- 2) Waktu untuk membitjarakan Keterangan Pemerintah seluruhnja sampai „votum” adalah 18 hari, dengan mempergunakan 9 kali rapat.

d. Lamanja pemerintahan, termasuk masa demisioner : 11 bulan 7 hari.

e. Perletakan djabatan :

- 1) Tanggal 3-4-1952 : Kabinet Sukiman meletakkan djabatan.
- 2) Sebab-sebabnja Kabinet Sukiman berhenti :
Berhubung dengan adanja kesulitan² jang timbul disekitar penanda-tanganan agreement mengenai M.A.S (Mutual Security Act.) dan diadjukannja usul interpelasi oleh Mr. Djody Gondokusumo, mengenai soal tersebut maka pada tanggal 23-2-1952 Kabinet Sukiman menjerahkan kembali mandatnja.

f. Lamanja Kabinet demisioner :

Kabinet demisioner : Tanggal 23-2-1952 sampai tanggal 3-4-1952 (1 bulan 11 hari).

3. KABINET ,WILOPO (Kabinet Koalisi : P.N.I., Masjumi P.S.I., P.S.I.I., Parkindo). 3 April 1952—1 Agustus 1953.

a. Pembentukan :

- 1) Tanggal 19-3-1952 : Mr. Wilopo ditundjuk sebagai formateur.
- 2) Tanggal 3-4-1952 : Kabinet Wilopo terbentuk.
- 3) Lamanja pembentukan 16 hari.

b. Program :

1) Organisasi Negara.

Melaksanakan pemilihan umum untuk Konstituante dan Dewan² Daerah.

2) Kemakmuran.

a. Memadjukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional, terutama bahan makanan rakyat.

b. Melandjutkan usaha perubahan agraria.

3) Keamanan.

Mendjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebidjaksanaan sebagai negara hukum dan menjempurnakan organisasi alat² kekuasaan Negara serta memperkembangkan tenaga masyarakat untuk mendjamin keamanan dan ketenteraman.

4) Luar negeri.

a. Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitet yang sesuai dengan kewadjan kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menudju perdamaian dunia.

b. Menjelesaikan penjelenggaraan perhubungan Indonesia/Belanda atas dasar Unie-statuuat mendjadi hubungan berdasarkan perdjandjian internasional biasa yang menghilangkan hasil-hasil K.M.B. yang merugikan Rakyat dan Negara.

c. Meneruskan perdjungan memasukkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia setjepatnja.

c. Pembitjaraan program Kabinet dalam D.P.R. :

1) Dengan 125 suara setudju dan 5 suara tidak setudju, D.P.R. menjetudju memberi kesempatan kepada Kabinet untuk melandjutkan pekerdjaannja.

2) Waktu untuk membitjarakan keterangan Pemerintah seluruhnja sampai „votum” ada 1 bulan 10 hari, dengan mempergunakan 20 kali rapat.

d. Lamanja masa pemerintahan, termasuk masa demisioner : ± 1 tahun 4 bulan.

e. Perletakan djabatan :

1. Tanggal 1-8-1953: Kabinet Wilopo meletakkan djabatan.

2. Sebab-sebabnja Kabinet Wilopo berhenti :

Berhubung dengan masalah pembagian tanah di Sumatera Utara (Tandjung Morawa) dan keretakan dalam Kabinet sendiri, maka pada tanggal 3-6-1953 Kabinet menjerahkan kembali mandatnja.

f. Lamanja Kabinet demisioner :

Kabinet demisioner: tanggal 3-6-1953 sampai tanggal 1-8-1953 (1 bulan 29 hari).

4. KABINET ALI SASTROAMIDJOJO Ke-I (Kabinet Koalisi: P.N.I., P.I.R., N.U., P.R.N., P.S.I.I.) 1 Agustus 1953-12 Agustus 1955.

a. Pembentukan :

- 1) Tanggal 16-6-1953: S. Mangunsarkoro dan Mr. Moh. Roem ditundjuk sebagai formateur (tidak berhasil membentuk Kabinet).
- 2) Tanggal 23-6-1953 : Mukarto Notowidagdo ditundjuk sebagai formateur (tidak berhasil membentuk Kabinet).
- 3) Tanggal 8-7-1953 : Mr. Burhanudin Harahap ditundjuk sebagai formateur (tidak berhasil membentuk Kabinet).
- 4) Tanggal 20-7-1953 : Mr. Wongsonegoro ditundjuk sebagai formateur.
- 5) Tanggal 1-8-1953 : Terbentuk Kabinet Ali Sastroamidjojo.

Lamanja pembentukan : 1½ bulan.

b. Program :

Dalam Negeri.

1) Keamanan.

Memperbaharui politik mengembalikan keamanan sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat.

2) Pemilihan Umum.

Segera melaksanakan pemilihan umum untuk Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat.

3) Kemakmuran.

Memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota. Mempertajam usaha penempatan bekas pejuang dan kaum penganggur terlantar dalam lapangan pembangunan.

4) Organisasi Negara.

Menjusun aparatur pemerintah jang efisien serta pembagian tenaga jang rasionil dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai. Memberantas korupsi dan birokrasi.

Irian Barat.

Mengusahakan kembalinja Irian Barat kedalam wilajah Republik Indonesia setjepat-tjepatnja.

Politik Luar Negeri.

- 1) Mendjalankan politik luar negeri jang bebas dan jang menudju perdamaian dunia.
- 2) Merobah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Statut Uni mendjadi hubungan internasional biasa.
- 3) Mempertjepat penindjauan kembali lain-lain perdjandjian hasil K.M.B. dan menghapuskan perdjandjian-perdjandjian jang merugikan negara.

Kebidjaksanaan Pemerintah.

Mengusahakan penjelesaian segala perselisihan politik jang tidak dapat diselesaikan dalam Kabinet dengan menjerahkan keputusannja kepada Parlemen.

c. Pembijtaraan Keterangan Pemerintah :

Dengan 122 suara setudju dan 34 suara tidak setudju D.P.R. menjetudju memberi kesempatan bekerdja kepada Kabinet. Waktu untuk membijtarkan Keterangan Pemerintah seluruhnja sampai "votum" adalah 17 hari, dengan mempergunakan 13 kali rapat.

d. Lamanja masa pemerintahan : 2 tahun 11 hari.

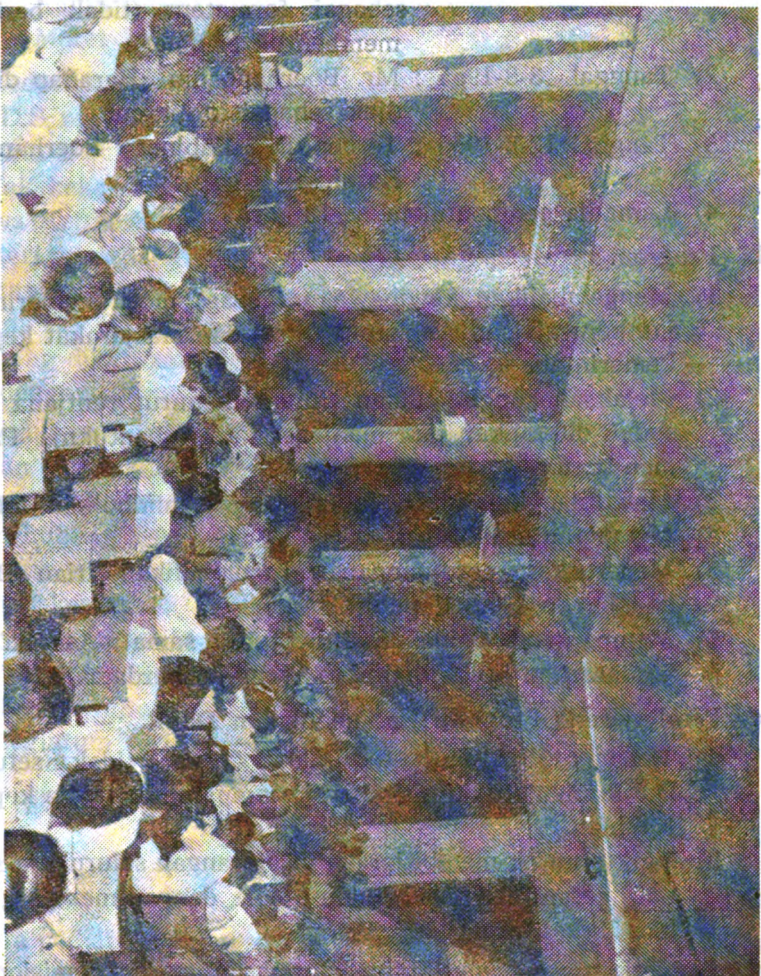
e. Perletakan djabatatan :

- 1) Tanggal 12-8-1955 : Kabinet Ali Sastroamidjojo meletakkan djabatatan.
- 2) Sebab-sebabnja Kabinet Ali Sastroamidjojo berhenti : Berhubung dengan masalah Angkatan Darat, jang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah.

f. Lamanja Kabinet demisioner :

Kabinet demisioner: Tanggal 24-7-1955 sampai tanggal 12-8-1955 (20 hari).

5. KABINET BOERHANOEDIN HARAHAP (Kabinet Koalisi : Masjumi, P.S.I.I., N.U. P.S.I., Katholik, Parkindo),



Suatu dalam sidang pleno D.P.R. dimana perdana Menteri Ali Sasranidjojo (Kabinet Ali ke-I) sedang memberikan keterangan pemerintahan untuk menyerahkan mandat kepada wakil Presiden Moh. Hatta (waktu itu Presiden Soekarno berada di luar Negeri) berkenaan dengan krisis angkatan darat. 23 Juli 1955.

12 Agustus 1955 — 24 Maret 1956.

a. Pembentukan :

- 1) Tanggal 29-7-1955 : Mr. Assaat, Dr. Sukiman Wirjosandjojo dan Mr. Wilopo ditundjuk sebagai formateur (tidak berhasil membentuk Kabinet).
- 2) Tanggal 3-8-1955 : Mr. Boerhanoedin Harahap ditundjuk sebagai formateur.
- 3) Tanggal 12-8-1955 : Terbenjuk Kabinet Boerhanudin Harahap.
- 4) Lamanja pembentukan : 13 hari.

b. Program :

- 1) Mengembalikan kewibawaan (gezag) moril Pemerintah, i.c. kepertjajaan Angkatan Darat dan Masyarakat kepada Pemerintah.
- 2) Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rentjana yang sudah ditetapkan dan menjegerakan terbentuknja Parlemen baru.
- 3) Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.
- 4) Memberantas korupsi.
- 5) Meneruskan perdjuaan mengembalikan Irian Barat kedalam wilajah Republik Indonesia.
- 6) Memperkembangkan politik kerdja-sama Asia-Afrika, berdasarkan bebas dan aktif menudju perdamaian.

c. Pembijtaraan Program Kabinet dalam D.P.R. :

- 1) Dengan 135 suara setudju dan 2 suara tidak setudju, D.P.R. menjetudju memberi kesempatan bekerdja kepada Kabinet.
- 2) Waktu untuk membitjarakan Keterangan seluruhnja sampai "votum" ada'ah 1 bulan 8 hari, dengan mempergunakan 19 kali rapat.

d. Lamanja masa pemerintahan, termasuk masa demisioner : 7 bulan 13 hari.

e. Perletakan djabatan :

- Tanggal 24-3-1956 : Kabinet Boerhanudin Harahap meletakkan djabatan.
- 2) Sebab-sebabnja Kabinet Boerhanuddin Harahap berhenti: Berhubung dengan diumumkannya hasil-hasil pemilihan

umum untuk anggota D.P.R., pada tanggal 1-3-1956 oleh Panitia Pemilihan Indonesia, maka pada tanggal 3-3-1956 Kabinet Boerhanudin Harahap menjerahkan kembali mandatnja.

f. Lamanja Kabinet demisioner :

Kabinet demisioner : Tanggal 3-3-1956 sampai tanggal 24 Maret 1956 (22 hari).

D. Kedudukan hukum Anggota D.P.R.S.

U.U.D.S. memuat beberapa peraturan tentang kedudukan hukum anggota D.P.R.S. seperti berikut :

1) Hak kekebalan (imunitet), yakni dalam pasal 71 ditetapkan bahwa Ketua dan Anggota-anggota D.P.R. dan juga Menteri-menteri tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena apa jang dikatanja dalam rapat atsu jang dikemukakannja dengan surat kepada D.P.R., ketjuali djika mereka dengan itu mengumumkan apa jang dikatakan atau jang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan sjarat supaja dirahasiakan.

2) Forum privilegiatum : Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kedjahatan dan pelanggaran lain jang ditentukan dengan undang-undang dan jang dilakukannja dalam masa pkerdjaannja, ketjuali djika ditetapkan lain dengan undang-undang. Peraturan ini berlaku djuga untuk Presiden, Wakil Presiden 106). Berdasarkan pasal 106 UUDS ini ditetapkan UU No. 22 tahun 1951 jang mengatur lebih landjut soal forum privilegiatum dengan pasal tunggal jang berbunji sebagai berikut :

Pasal tunggal.

Para pedjabat jang termaktub dalam pasal 106 ayat 1 Undang² Dasar Sementara Republik Indonesia, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berkenaan dengan kedjahatan² dan pelanggaran²-djabatan tersebut dalam Kitab Undang² Hukum Pidana Buku Kedua, Titel XXVIII dan Buku Ketiga Titel VIII serta kedjahatan² dan pelanggaran² jang lain jang dilakukannja dalam masa pker-

djaannja, jaitu sebagai disebutkan dibawah ini :

- a. kedjahatan² jang diantjam dengan hukuman mati ;
- b. kedjahatan² jang termaktub dalam Kitab Undang² Hukum Pidana, Buku Kedua, Titel² I, II dan III ;
- c. Kedjahatan² dan pelanggaran² jang dilakukannja dalam keadaan jang memberatkan kesalahannja sebagai termaktub dalam pasal 52 Kitab Undang² Hukum Pidana.

3) Hak mengeluarkan suara : Dalam pasal 71 ditetapkan bahwa anggota-anggota D.P.R. mengeluarkan suaranya sebagai orang jang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsjafan batinnja, tidak atas perintah atau dengan kewadjiban berembuk dahulu dengan mereka jang menunduknja sebagai anggota. Akan tetapi mereka tidak boleh mengeluarkan suara tentang hal jang mengenai dirinja sendiri.

4) Incompatibiliteit; Keanggotaan D.P.R. tidak dapat dirangkap dengan djabatan Wakil Presiden, Djaksa Agung, Ketua, Wakil Ketua atau anggota Mahkamah Agung, Ketua, Wakil Ketua atau anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank Sirkulasi dan djabatan² lain jang ditentukan dengan undang².

Seorang anggota D.P.R. jang merangkap mendjadi Menteri tidak boleh mempergunakan hak atau melakukan kewadjibannja sebagai anggota badan tersebut selama ia memangku djabatan Menteri.

Anggota D.P.R. itu tidak akan kehilangan kedudukannja sebagai anggota D.P.R. Ia hanja mendjadi non-aktif selama ia memangku djabatan Menteri.

Anggota Angkatan Perang dalam dinas aktif jang menerima keanggotaan D.P.R., dengan sendirinja mendjadi non-aktif selama keanggotaan itu. Setelah berhenti mendjadi anggota, ia kembali dalam dinas-aktif lagi.

5) Atjara Pidana Khusus : Berdasarkan pasal 102 UUDS dikeluarkan Undang² No. 75 tahun 1954 jang mengatur tentang atjara pidana khusus untuk anggota D.P.R. Pasal² dari U.U. No. 75/1954 berbunji sebagai berikut :

Pasal I.

(1) Ketjuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal 2, seorang

anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh ditangkap atau ditahan sewaktu :

- a. dalam perjalanan langsung menuju sidang Dewan Perwakilan Rakyat dari tempat tinggalnya atau sewaktu dalam perjalanan dari sidang itu langsung menuju ketempat tinggalnya ;
- b. dalam perjalanan langsung menuju kerapat Dewan Perwakilan Rakyat dari tempat kediamannya atau sewaktu dalam perjalanan dari rapat itu langsung menuju ketempat kediamannya ;
- c. sedang melakukan tugasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan rakyat ditempat tinggalnya atau tempat kediamannya.
- d. berada didalam gedung atau pekarangan gedung Dewan Perwakilan Rakyat berhubungan dengan rapat yang dikundujinginya ;
- e. menjalankan tugas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat atau Seksi Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan sewaktu dalam perjalanan berhubungan dengan tugas itu.

(2) Bila seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat berada dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat maka ia hanya dapat ditangkap atau ditahan setelah didapat persetujuan Djaksa Agung dan diberitahukan maksud tentang penangkapan dan penahanan itu kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, ketjuali djika ia tertangkap tangan melakukan tindak-pidana.

Pasal 2.

Hal-hal yang diketjualikan pasal 1 ayat 1 ialah :

- a. tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak-pidana ;
- b. dituduh telah melakukan kedjahatan yang diantjam dengan hukuman mati ;
- c. dituduh telah melakukan kedjahatan yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Buku Kedua, Titel I.

Pasal 3.

(1) Dengan tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal 77 H.I.R. maka surat perintah untuk penangkapan atau penahanan atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau penggeledahan

tempat kediaman atau tempat tinggal anggota Dewan Perwakilan Rakjat dikeluarkan oleh Djaksa Agung.

(2) Dalam keadaan mendesak, surat perintah termaksud dalam ayat 1 dapat diberikan oleh Djaksa setempat dengan kewadajiban memberitahukannya dalam waktu 2 X 24 djam kepada Djaksa Agung untuk disahkan atau tidak.

(3) Dalam tempoh 24 djam sesudah surat perintah penangkapan atau penahanan atau penggeledahan itu dikeluarkan atau sesudah menerima pemberitahuan tersebut dalam ayat 2, Djaksa Agung memberitahukan hal itu kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

(4) Disamping memberitahukan menurut peraturan² yang bersangkutan, maka setiap pegawai pengusut yang menangkap atau menahan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat dalam tempoh 24 djam langsung memberitahukan tindakan itu kepada Djaksa Agung.

(5) Djaksa Agung dalam tempoh 24 djam sesudah menerima pemberitahuan tersebut dalam ayat 4, memerintahkan pemeriksaan terhadap anggota itu.

(6) Djika Djaksa Agung berpendapat tidak ada tjukup alasan untuk menahan anggota itu seterusnya maka ia memerintahkan supaya anggota tersebut selekas-lekasnja dilepaskan dalam tempoh 24 djam sesudah surat perintah melepaskan itu diterima oleh pegawai yang berkewadajiban.

Pasal 4.

Ketjuali dalam keadaan tertangkap tangan atau keadaan mendesak, penangkapan atau penahanan yang diperkenankan dalam pasal 1 dan pasal 2 atau penggeledahan tempat kediaman atau tempat tinggal seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat hanya dapat dilakukan oleh seorang Polisi berpangkat serendah-rendahnja Inspektur atau yang sederadja dengan itu atau oleh seorang anggota Polisi Militer berpangkat serendah-rendahnja Letnan.

Pasal 5.

(1) Pegawai pengusut yang melalaikan kewadjabannya seperti tersebut dalam pasal 3 dihukum dengan hukuman kurungan

selama-lamanja tiga bulan atau denda setinggi-tingginja tiga ribu rupiah.

(2) Tindak-pidana tersebut dalam ajat 1 adalah pelanggaran.

Pasal 6.

Ketua Dewan Perwakilan Rakjat diperbolehkan, segera sesudah dilakukan penangkapan atau penahanan atas anggota Dewan Perwakilan Rakjat, mengundjungi anggota itu ditempat penahanannja, ketjuali djika Djaksa Agung menjatakan keberatannja.

E. Kedudukan Keuangan Anggota D.P.R.S.

Kedudukan keuangan Anggota D.P.R.-Sementara diatur dalam Undang² No. 6 tahun 1951 (L.N. tahun 1951 No. 40),jang mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1951. Undang² ini kemudian diganti dengan Undang² No. 10 tahun 1953 (L.N. tahun 1953 No. 37) dan terachir dengan Undang² No. 2 tahun 1954 (L.N. tahun 1954 No. 9). Kedudukan keuangan Anggota D.P.R.-Sementara hampir sama seperti kedudukan keuangan Anggota D.P.R.-R.I.S. Dalam Undang² No. 6 tahun 1951 diadakan perubahan mengenai djumlah² uang dan ditambahkan ketentuan² baru. Gadji dan tundjangan djabatan Ketua diubah mendjadi Rp. 1.750,— dan Rp. 500,— sebulan.

Kepada Wakil Ketua jang bertugas di Gedung D.P.R. diberikan tundjangan sebesar Rp. 750,— sebulan dan ketentuan tentang uang duduk Rp. 30,— sehari selama ia diluar rapat bertindak sebagai Ketua dan uang tundjangan djabatan Rp. 10,— sehari tidak berlaku lagi bagi Wakil Ketua. Tundjangan bulanan bagi Wakil Ketua dan anggota mendjadi Rp. 1.000,—

Dalam pada itu diadakan sistim denda, yakni : anggota jang tidak menghadiri semua hari² rapat dalam satu bulan tidak dapat uang tundjangan, jang menghadiri hari² rapat kurang dari separoh djumlah seluruh hari² rapat dalam satu bulan mendapat separoh uang tundjangan dan jang menghadiri rapat² jang djumlah harinja separoh atau lebih dari seluruh djumlah hari rapat dalam satu bulan, mendapat uang tundjangan penuh.

Uang duduk/sidang mendjadi Rp. 30,— untuk tiap rapat jang

dihadiri oleh anggota (termasuk Wakil Ketua), akan tetapi tidak boleh melebihi Rp. 60,— sehari.

Lain daripada itu ditambahkan ketentuan² baru jaitu :

- a. untuk mengadakan hubungan dengan daerah kepada anggota diberikan penggantian biaja pengangkutan ke daerah pulang pergi sekali setahun,
- b. kepada bekas anggota atau djika anggota meninggal dunia kepada ahli warisnja diberikan tundjangan jang bersifat pensiun, dan
- c. kepada anggota diberikan tundjangan ketjelakaan menurut Undang² ketjelakaan jang berlaku bagi pegawai negeri, djika oleh karena atau dalam mendjalankan kewadjabannja mendapat ketjelakaan.

Sedjak tanggal 16 Mei 1953 berlaku Undang² No. 9 tahun 1953 tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota D.P.R. jang mempunyai daja surut hingga tanggal 17 Agustus 1950.

Pensiun tersebut tiap bulan masa djabatan D.P.R., diberikan $\frac{1}{2}\%$ dengan ketentuan bahwa pensiun itu tidak boleh melebihi 50% dari tundjangan pokok jang diterimanja setiap bulan.

Dengan Undang² No. 10 tahun 1953 gadji Ketua diubah mendjadi Rp. 2.100,— sebulan, dan uang tundjangan anggota mendjadi Rp. 1.200,— sebulan.

Uang tundjangan Wakil Ketua berubah pula mendjadi Rp. 1.200,— sebulan, sedang uang tundjangan bagi Wakil Ketua jang bertugas digedung Dewan Perwakilan Rakjat mendjadi Rp. 900,—, uang penginapan mendjadi Rp. 30,—, uang kendaraan lokal Rp. 20,— sehari dan uang penggantian kehilangan penghasilan sebulan mendjadi Rp. 1.800,— sedang sistim denda tetap tidak diubah.

Selain daripada itu dalam Undang² tersebut ditambahkan peraturan tentang penggantian biaja pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran, djuga peraturan tentang penggantian biaja pengangkutan djenazah, tundjangan kematian, dan penggantian biaja perdjalananan pulang-pergi ketempat tinggal djika dalam waktu sidang salah seorang anggota keluarga meninggal dunia.

Kemudian dengan Undang² No. 2 tahun 1954 uang tundjangan anggota diganti dengan uang tundjangan tetap sebesar Rp. 1.500,—

sebulan ditambah dengan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga, sedang uang duduk jang diberikan untuk menghadiri rapat² pleno/Seksi/Bahagian ditiadakan.

Disamping itu kepada anggota jang menghadiri rapat-rapat Panitia Rumah Tangga, Panitia Permusjawaratan, Panitia ad hoc atau mendjadi Pelapor diberikan uang duduk Rp. 30,— sehari untuk tiap kali rapat, tetapi se-banjak²nja Rp. 150,— dalam satu bulan.

Wakil Ketua menerima uang tundjangan tetap dan tundjangan² lain seperti jang diberikan kepada anggota. Disamping itu para Wakil Ketua jang bertugas digedung D.P.R. mendapat tundjangan Rp. 1000,— sebulan.

Sistim denda diubah sebagai berikut : anggota jang tidak menghadiri sesuatu rapat D.P.R. seperti rapat pleno, rapat Bahagian dan Seksi, penghasilannja dipotong dengan 2½% untuk setiap rapat jang tidak dihadirinja, akan tetapi se-banjak²nja 60% sebulan dari tundjangan tetap sebulan ditambah dengan tundjangan² kemahalan dan keluarga. Anggota jang tidak menghadiri sama sekali rapat² jang diadakan dalam satu bulan tidak mendapat penghasilan.

§ 4. PERATURAN TATA-TERTIB DAN PELAKSANAANNJA.

A. Penetapan Peraturan Tata-tertib.

Dalam pasal 76 U.U.D.S. ditetapkan bahwa D.P.R. selekas mungkin harus menetapkan peraturan „ketertibannja”. Berdasarkan pasal tersebut dibentuklah sebuah panitia untuk menjusun Peraturan Tata-tertib dengan Anggota Mr. A.M. Tambunan, bekas Wakil Ketua I D.P.R.—R.I.S. sebagai Ketua.

Sebelum disusun seluruh Peraturan Tata-tertib ditetapkan terlebih dahulu beberapa ketentuan tentang tjara memilih Ketua dan Wakil² Ketua D.P.R.S., jang disetudjui oleh rapat pleno pada tanggal 18 Agustus 1950 dibawah pimpinan Ketua Sementara.

Dengan menggunakan ketentuan² baru itu maka pada tanggal 19 Agustus 1950 terpilihlah sebagai Ketua D.P.R.S. Mr. Sartono dan pada tanggal 21 Agustus Mr. A.M. Tambunan, Arudji Kartawinata dan Mr. M. Tadjudin Noor, ber-turut² sebagai Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III; pemilihan ini men-

dapat pengesahan Presiden dalam Keputusan No. 1, No. 3 dan No. 4/1950.

Dalam rapat pleno tanggal 27 September 1950 disetudjuilah seluruh rantjangan Peraturan Tata-tertib jang disusun oleh Panitia tersebut diatas mendjadi Peraturan Tata-tertib D.P.R., jang kemudian dimuat dalam T.L.N. No. 63 (Keputusan D.P.R. No. 30/K/1950 tanggal 27-9-1950). Dalam Peraturan Tata-tertib ini kemudian telah diadakan beberapa perubahan² untuk menyesuaikan dengan perkembangan D.P.R. jang antara lain dimuat dalam T.L.N. No. 288.

Peraturan Tata-tertib tahun 1950 ini terdiri dari 10 Bab, yakni :
Bab I. Tentang Pemeriksaan Surat Kepertjajaan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Bab II. Tentang Ketua, Wakil² Ketua, Sekretaris Djenderal dan Sekertaris² Kepala Bagian.

Bab III. Tentang Panitia Permusjawaratan, Panitia Rumah Tangga, Seksi², Bahagian² dan Panitia Khusus.

Bab IV. Tentang Pemeriksaan Persiapan.

Bab V. Tentang Rapat-rapat.

Bab VI. Tentang Pemungutan Suara.

Bab VII. Tentang Hak-hak Dewan Perwakilan Rakjat.

Bab VIII. Tentang Mosi, Resolusi dan Petisi.

Bab IX. Tentang Surat-surat masuk.

Bab X. Tentang Penindjau.

B. Tentang djenis, nama dan susunan Badan² Perlengkapan.

D.P.R., untuk dapat mendjalankan tugasnja dibantu oleh lima djenis badan-badan perlengkapan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Tata-tertib. Dalam menjusun Tata-tertib itu Panitia terutama menggunakan sebagai bahan Peraturan Tata tertib Badan Pekerdja K.N.P., Dewan Perwakilan Rakjat R.I.S. dan Senat R.I.S. Oleh karena itu badan² pembantu tersebut menundjukkan beberapa persamaan, misalnja mengenai nama dan tugas-kewadjabannja.

Badan² perlengkapan jang dimaksud diatas jang susunannja pada umumnja disesuaikan dengan keadaan aliran², golongan atau fraksi dalam D.P.R., adalah seperti berikut :

- (1) Panitia Permusjawaratan, terdiri dari Ketua D.P.R. sebagai anggota merangkap Ketua, para Wakil Ketua D.P.R. dan se-kurang²nja 7 orang anggota lainnja jang ditundjuk oleh

D.P.R. dan mewakili berbagai aliran.

- (2) Panitia Rumah Tangga yang terdiri dari Ketua dan para Wakil Ketua D.P.R. dan se-kurang²nja 8 orang anggota lainnja yang ditetapkan oleh D.P.R. dengan memperhatikan keinginan fraksi² dan golongan².
- (3) Seksi², yang djumlah dan namanja ber-ubah² achirnja mendjadi berdjumlah 10 buah, yang tugasnja masing² mengenai bidang² pemerintahan tertentu, jaitu Seksi² :

- A. Perekonomian,
- B. Keuangan,
- C. Pertanian dan Agraria,
- D. P.U. dan T. dan Perhubungan,
- E. P.P. dan K., Agama dan Kesehatan,
- F. Perburuhan, Urusan Pegawai dan Sosial,
- G. Dalam Negeri dan Penerangan,
- H. Kehakiman dan Keamanan Dalam Negeri,
- I. Pertahanan dan
- J. Luar Negeri.

Anggota² Seksi ditundjuk oleh D.P.R. setelah mendengar permintaan fraksi² dan anggota² perorangan. Masing² Seksi memilih dalam rapat²nja yang pertama dalam satu masa sidang seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua untuk satu masa sidang itu. Tidak ada keharusan untuk mendjadi anggota Seksi, sehingga selain Ketua D.P.R. ada beberapa anggota yang tidak masuk sesuatu Seksi. Djumlah anggota masing² Seksi tidak dibatasi.

Fraksi² yang bersangkutan boleh mengusulkan pemindahan atau penukaran anggota²nja yang duduk dalam Seksi.

- (4) Bahagian. Seluruh anggota D.P.R. dibagi dalam 6 Bahagian yang djumlah anggotanja masing² se-dapat²nja sama; pembagian itu ditentukan oleh Panitia Permusjawaratan sedemikian rupa, sehingga dalam tiap² Bahagian terdapat perwakilan berbagai-bagai aliran yang ada dalam D.P.R.
- (5) Panitia Khusus terdiri dari se-baniak²nia 7 orang anggota, termasuk seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Pelapor.

Panitia Khusus dibentuk oleh D.P.R. djika dianggap perlu, yakni untuk melakukan pemeriksaan-persiapan tentang suatu usul rantjangan undang² atau suatu usul lain.

C. Tentang tugas Badan² Perlengkapan.

Semua Badan² Perlengkapan, baik Panitia Permusjawaratan dan Panitia Rumah Tangga, maupun Seksi² dan Bahagian² hanja merupakan badan² pembantu untuk D.P.R. dalam mendjalankan tugasnja, baik dibidang per-undang²an dan pengawasan atas kebidjaksanaan Pemerintah maupun dibidang pelaksanaan hak budget.

Titik berat pekerdjaan D.P.R. terletak dalam rapat-rapat pleno. Hanja dalam rapat pleno itulah diadakan perdebatan-perdebatan untuk mengambil keputusan terachir dengan djalan pemungutan suara. Sebelum itu badan-badan pembantu membitjarakan sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pemerintah hal-hal jang nanti akan mendjadi pokok pemitjaraan didalam rapat pleno.

(1) Tugas Panitia Permusjawaratan.

Panitia Permusjawaratan mempunjai tugas antara lain membuat atjara rapat-rapat D.P.R., jang akan berlaku untuk suatu masa sidang atau sebagian dari masa sidang, misalnja untuk 2-3 minggu. Lamanja masa sidang tidak selalu sama. Tahun Sidang 1952 dibagi dalam tiga masa sidang; tahun Sidang 1953 dibagi dalam empat masa sidang. Antara 2 masa sidang diadakan reses.

Dalam atjara ini tidak boleh dimuat mengenai rapat-rapat pleno tertutup, karena rapat pleno sendiri jang boleh memutuskan untuk mengadakan rapat pleno tertutup (Pasal 66 U.U.D.S.). Tiap lima orang anggota berhak mengusulkan perubahan atjara dua hari sebelum diadakan rapat pleno jang akan membitjarakan atjara. Rapat pleno itu menentukan apakah usul-usul perobahan itu dapat diterima atau tidak dan selandjutnja menetapkan atjara rapat² jang akan berlaku untuk waktu tersebut diatas. Dalam atjara rapat² ini seringkali pula diadakan perubahan² karena hal² jang tidak diketahui sebelumnya.

Tugas lain dari Panitia Permusjawaratan ialah bermusjawarah dengan Pemerintah, apabila hal itu dianggapnja perlu atau djika dianggap perlu oleh D.P.R. atau djika diminta oleh Pemerintah. Selandjutnja Panitia Permusjawaratan djuga memberikan pertimbangan kepada Ketua D.P.R., djika hal itu dianggapnja perlu atau apabila Ketua D.P.R. meminta pertimbangan itu.

(2) Tugas Panitia Rumah Tangga.

Panitia Rumah Tangga membitjarakan hal² jang bersangkutan

dengan urusan kerumah-tanggaan D.P.R. dari menjusun Anggaran Belandja D.P.R., sampai kepada tempat penginapan, pengangkutan anggota d.l.l. Djuga soal² kepegawaian dari Sekretariat, seperti pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat/gadji termasuk dalam bidang tugas P.R.T., sungguhpun demikian putusan² jang diambilnja masih membutuhkan pengesahan rapat pleno.

Chusus untuk memperhatikan kepentingan para anggota D.P.R., Panitia Rumah Tangga menundjuk tiga orang dari anggotanja.

P.R.T. pada umumnja melakukan pengawasan tertinggi atas pengurusan jang dalam pasal 23 Tata-tertib diserahkan kepada Sekretaris Djenderal jakni :

- a. mengurus segala sesuatu jang termasuk urusan rumah-tangga D.P.R.,
- b. memimpin segenap pegawai jang bekerdja pada D.P.R. dan
- c. membantu Ketua dalam melakukan pekerdjaannja.

(3) Tugas Seksi².

Seksi² D.P.R. merupakan badan jang membantu D.P.R. dalam melakukan tugasnja mengawasi kebidjaksanaan Pemerintah. Rapat² jang diadakan oleh Seksi dapat diikuti oleh seorang Menteri dari Kementerian jang termasuk bidang Seksi jang bersangkutan, jakni atas undangan Ketua D.P.R., untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal. Rapat jang demikian jang disebut rapat kerdja adalah penting untuk memelihara dan mempererat hubungan antara D.P.R. dan Pemerintah. Disamping rapat kerdja ini seringkali pula Seksi mengadakan rapat sendiri² tanpa diperlukan hadirnja seorang Menteri. Bahan² untuk didjadikan pokok pembitjaraan diperoleh dari surat² masuk jang dikirim oleh organisasi² rakjat, kadang² djuga oleh perorangan jang meminta perhatian D.P.R. mengenai sesuatu hal, misalnja adanja kelaparan disuatu daerah, perlakuan jang tidak adil terhadap sekumpulan buruh dll.

Pokok pembitjaraan dapat pula diperoleh dari hasil peninjauan jang diadakan oleh beberapa anggota Seksi dengan persetudjuan pimpinan D.P.R. dalam waktu reses.

Hasil dari segala perundingan Seksi berupa laporan² atau usul jang diajukan kepada rapat pleno untuk mengambil kepu-

tusan, misalnja dalam bentuk suatu mosi atau resolusi.

Seksi melakukan pemeriksaan terhadap usul² rantjangan undang² atau usul² lain jang oleh Panitia Permusjawaratan diserahkan kepada Seksi untuk diperiksa. Termasuk dalam tugas ini adalah membahas rantjangan Anggaran Negara, yakni tiap tahun atau tiap kali Pemerintah mengajukan Anggaran Negara kepada D.P.R., maka Rantjangan Anggaran tersebut diteruskan kepada Seksi jang bersangkutan untuk diadakan pemeriksaan-persiapan tehnis mengenai Bagian Anggaran jang termasuk bidang Seksi itu. Mengenai hasil pemitjaraan Seksi, termasuk pula pembahasan rantjangan Undang², diputuskan oleh Panitia Permusjawaratan apakah usul² jang bersangkutan perlu dibi-tjarakan dalam rapat Bahagian atau dapat dikirimkan langsung kepada rapat pleno.

Seksi² boleh mengadakan rapat gabungan untuk membitja-rakan hal² jang bersangkutan satu sama lain.

(4) Tugas Bahagian².

Bahagian² jang djumlahnja 6 buah itu membitjarakan suatu rantjangan Undang² jang disampaikan kepada D.P.R., tanpa kehadiran Menteri jang bersangkutan ; memang tepat sekali pe-kerdjaan Bahagian ini disebut pemeriksaan-persiapan berhubung dengan sifatnja yakni mempersiapkan pemitjaraan rantjangan undang² tertentu untuk pemitjaraan dalam rapat pleno.

Untuk tiap rantjangan jang harus dirundingkan tiap Bahagian menundjuk seorang Pelapor dari anggota²nja, jang membuat laporan dari pemitjaraan Bahagian. Pelapor² dari 6 buah Baha-gian itu merupakan suatu Panitia Pelapor jang menjusun pula suatu laporan Gabungan, yakni kesimpulan dari pemitjaraan dalam keenam Bahagian itu. Laporan Gabungan diperbanjak dan dibagikan kepada para anggota D.P.R. dan djuga kepada Menteri jang bersan²gkutan untuk didjawab. Djawaban ini dise-but Memori Djawaban dan kadang² baru sesudah beberapa minggu disampaikan kepada D.P.R.

Memori Djawaban dibagikan kepada semua anggota D.P.R. dan dimulailah pemitjaraan rantjangan undang² itu dalam rapat pleno terbuka.

D. Tjara pemitjaraan dalam rapat² pleno.

Rantjangan Undang² dan Memori Pendjelasannja, Laporan

Gabungan D.P.R. dan Memori Djawaban merupakan bahan untuk pemitjaraan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri pula oleh Menteri yang bersangkutan. . .

Tiap pokok pemitjaraan, termasuk rantjangan undang², menurut prosedur pemitjaraan rapat pleno dibahas dalam dua babak, yang disebut pemandangan umum babak pertama dan kedua, malah kadang² diadakan tiga babak djika pemitjaraan rantjangan Undang² yang penting atau sulit memperoleh perseusuaian faham antara satu fraksi dengan yang lain atau dengan Pemerintah. Pemitjaraan kadang² tjukup diadakan dalam satu babak djika mengenai hal yang sederhana, tidak memuat pokok² yang prinsipil, sehingga mudah tertjapai persesuaian pendapat.

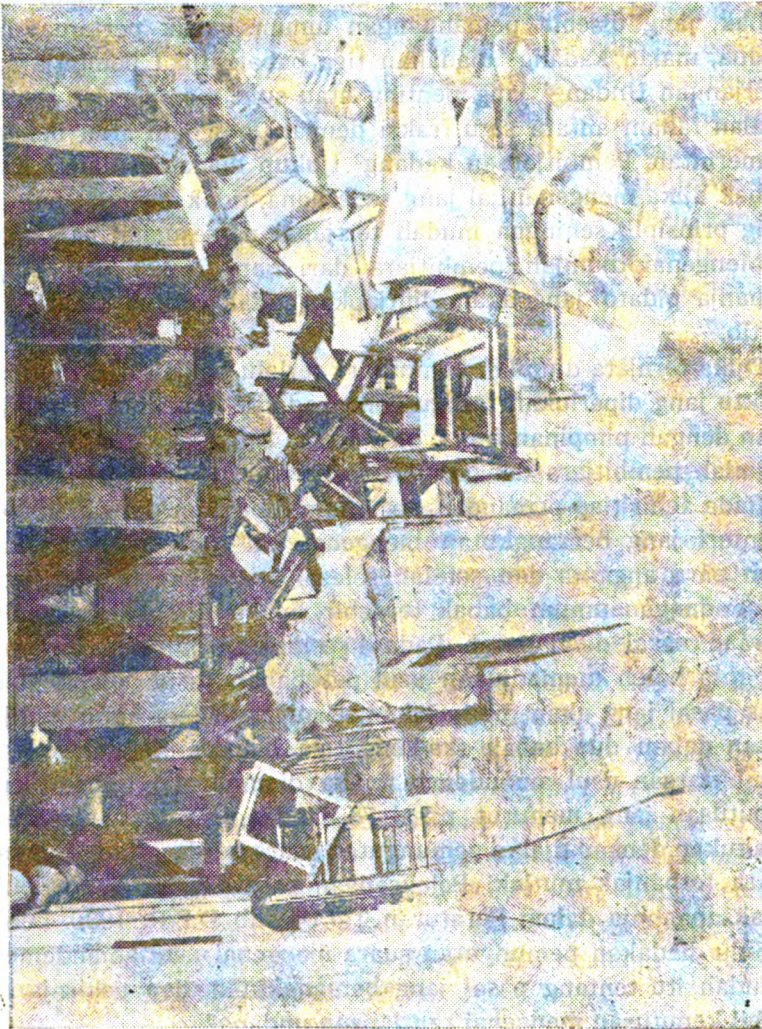
Mengenai djumlah pemitjara dari tiap² fraksi dan djuga lamanja pidato yang akan diutjapkan tidak diatur oleh Tata-tertib.

Djika ternyata djumlah pemitjara terlalu banjak dan djumlah waktu yang diperlukan terlalu lama kadang² diadakan pemitjaraan dengan pimpinan fraksi oleh Ketua sehingga dapat dibatasi djumlah pemitjara dan/atau lamanja waktu untuk bitjara.

Pada achir tiap pemandangan umum diberikan djawaban oleh Menteri yang bersangkutan mengenai hal² yang dikemukakan oleh para anggota dan setelah selesai Djawaban Menteri atas pemandangan umum babak terachir, maka dimulailah pemitjaraan pasal demi pasal. Pada kesempatan ini tiap 5 orang anggota boleh memadjukan usul perobahan (usul amandemen) atas pasal yang akan dibitjarakan. Usul amandemenpun dibitjarakan dalam dua babak (kadang² tiga babak). Setelah selesai pemitjaraan usul amandemen maka diambil oleh rapat pleno keputusan yang menurut pasal 75 Undang² Dasar Sementara dilakukan dengan djalan pemungutan suara berdasarkan djumlah suara terbanjak mutlak. Pelaksanaan pasal 75 ini diatur pula pelaksanaannja dalam Peraturan Tata-tertib D.P.R. 1950. Lebih dahulu diadakan pemungutan suara mengenai usul amandemen, sesudah itu tentang pasal yang bersangkutan, dan achirnja diambil keputusan mengenai rantjangan undang²

Sebelum pemungutan suara dimulai, anggota diberi kesempatan untuk memadjukan alasan terhadap suara yang akan dikeluarkannja.

Hak untuk mengadjukan usul undang² oleh D.P.R. atau usul inisiatif dimulai pelaksanaannja dengan mengadjukan usul ter-



Peristiwa 17 Oktober 1952 remandangan diruang sidang setelah demonstrasi jang menuntut pembubaran Parlemen mengobrak-abrik ruangan tersebut.

„Foto Ipphos”/002/HM.

sebut oleh se-kurang²nja 10 orang anggota, sedangkan usul untuk mengadakan interpelasi, angket dan mosi atau resolusi harus diajukan oleh se-kurang²nja 5 anggota. Oleh Panitia Permusjawaratan usul itu dapat diteruskan kepada Seksi jang bersangkutan atau Panitia Khusus untuk dimintakan pertimbanganja atau diadakan pemeriksaan-persiapan.

§ 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH.

Pada tanggal 17 Oktober 1952 terdjadi demonstrasi pada pagi buta jang menjerbu gedung D.P.R. di Djalan Dr. Wahidin I. Para demonstiran mengobrak-abrik ruangan Sidang dan sesudah itu mereka bergerak ke Istana. Dimuka gedung D.P.R. dilapangan Banteng dan dimuka Istana kelihatan beberapa buah meriam jang larasnja diarahkan kepada kedua gedung tersebut dan di-djalan² ber-gerak kendaraan² militer dan mobil² sipil dengan plakat : „Bubarkan Parlemen”

Demonstrasi dilakukan oleh sebagian anggota² tentara dan oknum tokoh² politik tertentu serta golongan² sipil lainnja dengan maksud politik supaja parlemen diganti dengan parlemen jang baru. Selain itu para demonstiran djuga menuntut supaja Presiden mengambil alih kekuasaan. Di Istana Presiden Sukarno mendjawab kepada para demonstiran, bahwa beliau bukanlah seorang diktator dan karena itu akan membitjarakan terlebih dahulu hal² jang bersangkutan dengan tuntutan itu dengan Kabinet jang bertanggung-djawab serta disamping itu mendengar pula suara rakjat dari luar Djakarta.

Apakah latar belakang dari demonstrasi dan gerakan untuk membubarkan D.P.R. itu ?

Djawaban atas pertanjaan ini antara lain dapat diketemukan didalam gedung D.P.R. sendiri dimana beberapa hari sebelum peristiwa 17 Oktober 1952 itu dalam rapat para anggota dalam suasana jang amat tegang sibuk membitjarakan usul² mosi jang berhubungan dengan Angkatan Perang chususnja Pimpinan Angkatan Perang (Darat) dan Kementerian Pertahanan.

Beberapa anggota D.P.R. berpendapat bahwa ada suatu Partai atau golongan sedang berusaha untuk menguasai Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan,

Karena Angkatan Perang adalah alat kekuasaan Negara, artinya alat kekuasaan Pemerintah yang sedang berkuasa, maka partai atau golongan itu dengan demikian ingin memegang kekuasaan yang terpenting dalam Pemerintahan Negara.

Jang menjadi pokok pembicaraan yang hangat dalam rapat² D.P.R. yang kemudian menimbulkan peristiwa 17 Oktober ialah 3 buah mosi seperti berikut :

(1) Usul mosi Z. Baharuddin dkk., diajukan dalam bulan September 1952 :

a. menyatakan tidak pertjaja terhadap kebidjaksanaan Menteri Pertahanan waktu itu Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam menyelesaikan pertikaian dalam Angkatan Perang.

b. se-lekas²nja membentuk Undang² Pertahanan Negara.

(2) Usul mosi anggota I.J. Kasimo dkk., :

a. mendesak mempertjepat berachirnja Misi Militer Belanda.

b. membentuk sebuah Panitia Negara untuk menampung persoalan² yang timbul dalam perdebatan dan dalam waktu 3 bulan mengadakan usul².

(3) Usul mosi anggota Manai Sophian dkk., :

(I) mendesak kepada Pemerintah supaya mempertjepat berachirnja pakerdjaan Misi Militer Belanda di Indonesia.

(II) Mendesak kepada Pemerintah supaya segera membentuk satu Panitia Negara yang anggota²nja terdiri dari :

a. anggota² D.P.R. yang diangkat oleh Presiden atas usul yang mengikat dari D.P.R. ;

b. anggota² yang diangkat oleh Presiden atas tundjukan oleh Pemerintah,

dengan ketentuan bahwa djumlah anggota Panitia yang diangkat atas usul D.P.R. harus lebih besar daripada djumlah anggota lainnja, sedang Ketuanja diangkat oleh Presiden diantara anggota² tersebut ;

(III) Menetapkan tugas Panitia sebagai berikut :

a. menampung semua persoalan yang telah timbul dalam perdebatan² D.P.R. baik dalam rapat² tertutup maupun dalam rapat² terbuka, serta segala bahan yang diterima oleh D.P.R. sekitar Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang misalnja antara lain pembelian² Kemen-

terian Pertahanan dan Angkatan Perang, dialokasi pasukan-pasukan dan personeelsbeleid dalam Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang, keterangan-keterangan tentang adanya kerenggangan antara rakjat dan tentara di beberapa daerah, korps pendidikan rohani, belum adanya undang² pokok Pertahanan Negara yang diperlukan untuk meletakkan dasar² dari Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang yang kuat, serta lain² soal yang telah timbul dalam perdebatan² dalam DPR ;

- b. mempeladjar soal² tersebut dalam huruf a dengan sek-sama dan objektif serta memajukan usul² yang kongkrit kepada Pemerintah tentang kemungkinan adanya perubahan dalam pimpinan dan organisasi Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan kearah perbaikan ;
- c. berusaha mempertjepat adanya per-undang²an mengenai Pertahanan Negara, susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang serta kedudukan hukum dari anggota² Angkatan Perang ;
- d. memberikan laporan² dan usul²nja mengenai hal² tersebut pada huruf a dan b diatas dalam tempo paling lama tiga bulan kepada Pemerintah ;
- e. dalam waktu se-lambat²nja dua bulan menjampaikan usul² kongkrit kepada Pemerintah mengenai tjara² bagaimana mempertjepat berachirnja pekerdjaan Misi Militer Belanda ;

(IV) Mengundang Pemerintah supaya kepada Panitia tersebut setjara kolektif atau perseorangan diberi keleluasaan untuk menjalankan tugasnja,

(V) Mengundang Pemerintah menjampaikan dengan segera hasil² pekerdjaannja sesuai dengan usul² dari Panitia tersebut kepada DPR.

Usul mosi Baharuddin dkk kemudian diroboh menjadi :

- a. menuntut diadakannja reformasi dalam Pimpinan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang.
- b. se-lekas²nja membentuk Undang² Pertahanan Nasional.
- c. membentuk sebuah Komisi Parleментар untuk mengumpulkan keterangan² mengenai ketjurangan² dalam Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang.

Anggota I.J. Kasimo dkk kemudian menarik kembali usulnja, sehingga dalam rapat terachir tanggal 16 Oktober 1952 D.P.R. hanja mengambil keputusan tentang 2 usul mosi yakni: usul mosi Z. Baharuddin ditolak dengan 80 suara tidak setuju dan 39 suara setuju.

Usul mosi Manai Sophian dkk diterima dengan 91 suara setuju dan 54 suara tidak setuju.

Keesokan harinja, tanggal 17 Oktober terdjadilah peristiwa jang bersedjarah itu.

B. Konperensi Asia — Afrika.

Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo dalam suatu rapat pleno D.P.R. pada tanggal 25 Agustus 1953 memberikan keterangan mengenai gagasan tentang mempererat kerdja-sama antara Negara² Asia-Afrika. Ia mengemukakan betapa pentingnja kerdja-sama dalam golongan Negara² Asia-Afrika, yakni memperbesar kemungkinan untuk terlaksanaja perdamaian dunia jang abadi, lagi pula kerdja-sama kedaerahan jang demikian memang dibenarkan oleh aturan² dalam P.B.B. Pendirian Negara² tersebut dalam beberapa soal dilapangan internasional menundjukkan banjak persamaan, sehingga akan besar faedahnja dan ada dasar jang kuat membentuk suatu golongan jang khusus. Karena itu harus diusahakan supaja kerdja-sama tersebut dapat dilandjutkan dan diperkekal.

Konperensi informil untuk pertama kali diadakan di Colombo pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954 antara Perdana Menteri dari lima Negara Asia dan untuk kedua kalinya di Bogor. Lima Negara jang dimaksud diatas ialah Birma, India, Indonesia, Pakistan dan Sialan. Oleh Wakil Negara² tersebut telah diambil keputusan untuk mengadakan Konperensi Asia-Afrika dikota Bandung dalam tahun 1955.

Maka pada tanggal 18 s/d 24 April 1955 diadakanlah Konperensi Asia-Afrika dikota Bandung, jang mendapat dukungan dari 29 Negara dibenua Asia dan Afrika jang mewakili kurang lebih tiga-perempat umat manusia seluruh dunia.

Mr. Ali Sastroamidjojo dipilih oleh sidang sebagai Ketua Konperensi. Pada umumnya Konperensi telah mendjadikan atjara sidang soal² jang mengenai kepentingan bersama Negara² Asia dan Afrika dan bagaimana rakjat Negara² ini dapat melaksa-

nakan kerdja sama jang lebih erat dilapangan ekonomi, kebudayaan dan politik.

Telah dihasilkan oleh Konperensi apa jang mendjadi terkenal „Bandung Declaration” dengan 10 azas² (Dasa Sila Bandung) jang merupakan dasar baru dalam hubungan antara Negara² di-tengah² pergolakan „power politics” dewasa itu. Dasa Sila Bandung itu ialah :

- 1). Menghormati hak-hak dasar manusia dan tudjuan-tudjuan serta azas-azas jang termuat dalam piagam P.B.B.
- 2). Menghormati kedaulatan dan integritet teritorial semua bangsa.
- 3). Mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa besar maupun ketjil.
- 4). Tidak melakukan intervensi atau tjampur tangan dalam soal-soal dalam negeri negara lain.
- 5). Menghormati hak tiap² bangsa untuk mempertahankan diri sendiri setjara sendirian atau setjara kolektif, jang sesuai dengan piagam P.B.B.
- 6). (a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu dari negara-negara besar.
(b) Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.
- 7). Tidak melakukan tindakan-tindakan atau antjaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritet teritorial atas kemerdekaan politik sesuatu negara.
- 8). Menjelesaikan segala perselisihan internasional dengan djalan damai, seperti perundingan, persetudjuan, arbitrase atau penjelesaian hakim ataupun tjara damai lain-lain lagi menurut pilihan pihak-pihak jang bersangkutan, jang sesuai dengan piagam P.B.B.
- 9). Memadjukan kepentingan bersama dan kerdja sama.
- 10). Menghormati hukum dan kewadajiban-kewadajiban internasional.

Konperensi Asia-Afrika pertjaja bahwa kerdja-sama berdasarkan prinsip-prinsip ini merupakan djalan jang sempurna untuk mentjapai perdamaian internasional dan bahwa kerdja-sama dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan akan mempertjepat terlaksananja kemakmuran bersama.

Pada tanggal 14 Djuni Pemerintah R.I. telah memberikan

keterangan pandjang lebar tentang djalannja dan hasil-hasil Konperensi Afro-Asia dalam rapat pleno D.P.R.

Sebagai landjutan dari semangat Konperensi Afro-Asia ini, maka beberapa waktu sesudah konperensi itu telah diadakan pula antara lain Konperensi Wartawan A.A., Konperensi Pengarang A.A., Konperensi Islam A.A. dan lain-lainnja.

§ 6. HASIL-HASIL PEKERDJAAN.

Hasil pekerdjaan D.P.R.S. dalam masa djabatannja, selama 5½ tahun ialah seperti berikut :

- a. pembitjaraan tentang Keterangan-keterangan Pemerintah : 11 kali, termasuk 5 kali tentang program Kabinet (5 kali penggantian Kabinet).
- b. usul mosi/resolusi : diadjukan 82 buah, diantaranya 21 disetujui, 17 ditolak dan 44 ditarik kembali atau tidak dibitjarakan lagi.
- c. usul interpelasi : diadjukan 24 buah, disetujui 16, ditolak 2 dan tidak dibitjarakan lebih landjut 6 buah.
- d. usul angket — satu kali dibitjarakan, disetujui dan dilaksanakan.
- e. hak budget : dilaksanakan dua kali, sekalipun terlambat waktunja.
- f. perundang-undangan : dari 237 buah rantjangan undang-undang diantaranya 9 buah usul inisiatif D.P.R., telah disetujui 167 buah (termasuk 5 usul inisiatif), sedangkan 64 ditarik kembali dan jang lain belum/tidak diselesaikan lebih landjut.

Mengenai hal² penting dari hasil pekerdjaan tersebut, dibawah ini diberikan uraian singkat dengan maksud supaja diperoleh pula sedikit gambaran dari kegiatan itu sendiri.

- A. Usul Undang-undang tentang Pemilihan Umum.
- B. Irian Barat (Usul mosi, Usul Interpelasi, Usul Undang-Undang).
- C. Rantjangan Anggaran Belandja.
- D. Usul Angket.
- E. Usul mosi mengenai Kebidjaksanaan Kabinet.

A. Usul Undang-undang tentang Pemilihan Umum.

Salah satu Undang-undang penting, jang dihasilkan oleh D.P.R.S. bersama-sama dengan Pemerintah (sewaktu Kabinet

Wilopo) adalah Undang-undang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota D.P.R., suatu Undang-undang yang sungguh sudah lama dinantikan oleh Bangsa Indonesia pada umumnya sejak pemulihan kedaulatan.

Sebelumnya oleh Kabinet Sukiman telah diadakan R.U.U. tentang pemilihan Anggota Konstituante dengan sistem pemilihan bertingkat dan R.U.U. tentang daftar pemilih. Tetapi karena kalangan D.P.R. menghendaki sistem pemilihan langsung maka kedua R.U.U. itu ditarik kembali oleh Kabinet Wilopo sambil diadakan R.U.U. Pemilihan Umum baru pada tanggal 24 Nopember 1952.

R.U.U. Pemilihan Umum sangat mendapat perhatian dari para anggota D.P.R. Sementara, baik dalam rapat-rapat Bagian-bahagian, pertemuan-pertemuan informil maupun dalam rapat pleno. Dalam rapat pleno tersebut diadakan beberapa puluh usul-usul amandemen, baik mengenai prinsip-prinsip (hak pilih, daftar pemilih, badan-badan penyelenggara pemilihan, tjara pentjalonan, daftar tjalon dan lain-lain) maupun mengenai rumusan pasal-pasalnja, yang berdjumlah 139.

R.U.U. ini baru dapat diselesaikan setelah diadakan 35 kali rapat pleno D.P.R., yang berlangsung antara tanggal 14 Januari dan 1 April 1953, dengan jumlah pembitjara dalam pemandangan umum babak I dan babak II sebanyak 45 orang, sedangkan dalam pembitjaraan pasal demi pasal diselesaikan 49 usul-usul amandemen.

Setelah diadakan perdebatan pandjang lebar akhirnya rancangan Undang-undang tersebut disetujui oleh D.P.R.S. pada tanggal 1 April 1953 dan kemudian diundangkan oleh Pemerintah menjadi Undang-undang No. 7/1953 pada tanggal 7 April 1953, Lembaran Negara No. 29/1953; yang diatur ialah pemilihan anggota Konstituante dan pemilihan anggota D.P.R.

Orang yang berhak memilih ialah warga-negara Indonesia yang dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun atau yang sudah kawin lebih dahulu.

Daerah Republik Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan. Irian Barat merupakan daerah pemilihan tersendiri.

Pemilihan berlaku setjara langsung (tidak bertingkat).

Terhadap daerah yang berhubungan dengan keadaan, tidak dapat melaksanakan pemilihan (yaitu Irian Barat), maka Pemerintah dapat mengangkat orang-orang yang dipandang menge-

tahui benar keadaan daerah itu dan jang berasal dari daerah itu, mendjadi anggota Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat.

Pengangkatan itu berlaku hingga anggota-anggota untuk daerah pemilihan itu ditundjuk dengan pemilihan susulan.

Terhadap golongan-golongan ketjil Tionghoa, Eropah dan Arab, Pemerintah melakukan pengangkatan dengan memenuhi keinginan golongan masing-masing (pasal 136).

Berhubung dengan pasal 61 U.U.D.S. diatur dalam pasal 110 dari U.U. ini djabatan² jang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan. Ditetapkan, bahwa selain djabatan-djabatan jang tersebut dalam pasal 61 U.U.D.S., keanggotaan D.P.R. tidak dapat dirangkap dengan djabatan Sekretaris Djenderal atau Direktur Djenderal suatu Kementerian, Ketua, Wakil Ketua atau anggota Mahkamah Tentara Agung dll. (jang disebut dalam pasal 110).

B. Irian Barat.

Sedjak terbentuknja, D.P.R.S. senantiasa menuntut pemasukan kembali Irian Barat kedalam daerah Republik Indonesia, sedangkan Pemerintah selalu memuat persoalan Irian Barat didalam tiap program Kabinetnja. Sebaliknya Pemerintah Belanda tetap menolak tuntutan dari fihak Indonesia dan mempertahankan kekuasaan de facto nja atas daerah tersebut.

Pada tanggal 4 Desember 1950 Pemerintah (Kabinet Natsir) memberikan Keterangan dalam rapat pleno D.P.R., setelah diadakan Konperensi Uni Indonesia Belanda. Menurut Keterangan Pemerintah maka perundingan dengan Belanda gagal, karena Belanda hanja bersedia menjerahkan kedaulatan atas Irian Barat kepada Uni, sedang Pemerintahan tetap ada ditangan Belanda.

Usul Belanda ini ditolak oleh Delegasi Indonesia dan selanjutnja Pemerintah berpendirian :

- a. tetap memperdjuangkan claim nasional terhadap Irian Barat dengan tjara-tjara jang patut;
- b. perundingan dilakukan atas dasar penjerahan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia;
- c. persetudjuan-persetudjuan Indonesia dengan Belanda memerlukan penindjauan dan untuk itu Pemerintah akan membentuk sebuah Panitia Negara.

Pada akhir perdebatan tentang Keterangan Pemerintah mengenai Konferensi Uni Tentang Irian Barat itu diadakan dua buah usul mosi, yaitu :

- 1). oleh anggota Kusnan dkk.
- 2). oleh anggota Djody Gondokusumo dkk.

Ketika dalam rapat pleno tanggal 10 Djanuari 1951 akan diadakan pemungutan suara terhadap kedua mosi tersebut maka para pengusul mosi Djody Gondokusumo dkk. menarik diri, sehingga tinggal usul mosi Kusnan dkk; tentang usul inilah yang harus diambil keputusan. Hasil pemungutan suara ialah 66 suara setuju terhadap usul mosi Kusnan dkk. dan 63 suara tidak setuju.

Dari hasil itu ternyata adanya dua pihak yang berbeda pendapatnya dengan kekuatan yang kira-kira sama.

Usul mosi anggota Kusnan dkk. isinya ialah :

- a. tetap menuntut masuknya Irian Barat dengan segera kedalam wilayah R.I. dengan Status yang sama dengan Daerah-daerah Indonesia lainnya.
- b. menghapuskan Uni Indonesia Belanda.
- c. meninjau kembali dalam waktu selama-lamanya 3 bulan hasil-hasil K.M.B. untuk menghapuskannya.

Dalam periode Kabinet Boerhanoedin Harahap, Menteri Luar Negeri R.I. Anak Agung Gde Agung dan Menteri Luar Negeri Belanda Luns mengadakan joint statement yang maksudnya mengeluarkan pembijtaraan sengketa Irian Barat dari Agenda P.B.B. Maka dalam rapat pleno terbuka dalam 24 Djanuari 1956 oleh Anggota I.A. Moeis dkk. diadakan usul interpelasi yang terdiri dari beberapa pertanyaan, antara lain :

1. atas dasar apakah Menteri Luar Negeri melakukan pembijtaraan-pembijtaraan dengan Menteri Belanda Luns di New York dan apakah isi pembijtaraan itu.
2. apakah alasan Pemerintah untuk menyetujui pentjabutan masalah Irian Barat dari atjara P.B.B.

Dalam rapat-rapat pleno terbuka tanggal 31 Djanuari 1956 Pemerintah memberikan jawaban atas interpelasi tersebut, disusun dengan pemandangan umum oleh para anggota D.P.R.



Menteri luar negeri Amerika Serikat John Foster Dulles dan rombongan, mengundungi gedung D.P.R. Tampak pada gambar wakil ketua D.P.R.S. Mr. A.M. Tambunan memberikan keterangan mengenai ruangan sidang 12 Maret 1956.

jang dijawab oleh Pemerintah dalam rapat pleno tanggal 7 Pebruari 1956. Selandjutnja pemitjaraan interpelasi I. A. Moeis dkk. diteruskan dalam rapat-rapat pleno tanggal 22 Pebruari 1956.

Bersangkutan dengan pemitjaraan interpelasi I. A. Moeis dkk. itu pemerintah mengajukan R.U.U. tentang pembatalan Status Uni, jang langsung dibitjarakan dalam rapat pleno tanggal 28 Pebruari 1956.

Sementara itu sebelum pemitjaraan R.U.U. dimulai, diadjukan 2 usul, ialah :

1. usul dari anggota Ahem Erningpradja dkk. untuk mendahuiukan pemitjaraan usul-usul mosi jang sudah tertjantum dalam atjara.
2. usul dari anggota Gondokusumo dkk. untuk memberikan prioritas kepada pemitjaraan R.U.U. tersebut diatas.

Setelah diadakan pemungutan suara ternjata 108 suara setuju dengan usul Gondokusumo dkk. dan 30 suara tidak setuju.

Oleh karena Ketua Mr. Sartono tidak menyetujui usul Gondokusumo jang diterima oleh rapat, maka Ketua menjatakan meletakkan djabatannja dan meninggalkan ruangan rapat. Kemudian berturut-turut menjusul Wakil Ketua II Arudji Kartawinata djuga meletakkan djabatannja, fraksi P.N.I. meninggalkan ruangan rapat, sedangkan fraksi-fraksi lainnja, jaitu N.U., P.K.I., dan P.R.I. tidak turut dalam pemitjaraan. Kemudian tindakan itu disusul dengan surat-surat pernjataan berhenti sebagai anggota D.F.R. mulai tanggal 1 Maret 1956 oleh Fraksi P.N.I., P.S.I.I., P.K.I., dan sebagaian anggota N.U. Pemitjaraan R.U.U. tersebut diteruskan dibawah pimpinan Wk. Ketua I A.M. Tambunan dan R.U.U. disetujui oleh rapat tanpa fraksi-fraksi tersebut diatas jang telah meninggalkan ruangan rapat atau tidak turut dalam pemitjaraan, sedangkan fraksi Partai Murba menolak.

Dapat dikemukakan pula bahwa pada tanggal 1 Maret 1956 diumumkan hasil pemilihan umum 1955.

C. Rantjangan Anggaran Belandja.

Dalam periode 1945 sampai 1949, jaitu periode perdjuaan bersendjata, Pemerintah boleh dikatakan bekerdja tanpa Anggaran Belandja sama sekali. Setelah periode revolusi physik di-

lampau, barulah dipikirkan tentang soal Anggaran Belandja tersebut.

Rantjangan Anggaran Negara mengenai tahun 1950 dan tahun 1951 adalah rantjangan jang pertama kali dalam sedjarah Republik Indonesia jang disusun oleh Pemerintah ialah oleh Kabinet Sukiman Rantjangan anggaran itu masing² terdiri dari 37 buah rantjangan Undang-undang, jaitu tiap-tiap Undang-undang memuat anggaran dari sebuah Bagian (19 R.U.U. Bagian) Kementerian, 18 R.U.U. Bagian I.B.W.). Rantjangan-rantjangan Undang-undang setjara berangsur-angsur disampaikan kepada D.P.R.S. antara 6 Pebruari sampai 8 Desember 1951. Dengan demikian maka D.P.R.S. untuk pertama kali akan melaksanakan hak budgetnja.

Hak budget jang ditetapkan dalam pasal 113 U.U.D.S. tidak diatur lebih landjut dalam Peraturan Tata-tertib D.P.R. 1950. Waktu menghadapi Rantjangan Anggaran Negara tahun-tahun dines 1950 dan 1951, maka Panitia Permusjawaratan bersama dengan Ketua-ketua/Wakil-wakil Ketua Bahagian dan pihak Pemerintah merundingkan bagaimana tjara pemeriksaan persiapan dan pemitjaraannja dalam rapat-rapat pleno akan diadakan. Telah diperoleh persetudjuan untuk menetapkan procedure pemitjaraan Anggaran Negara sebagai berikut :

1. Seksi-seksi D.P.R. menjusun pertanyaan² jang bersifat teknis-informatoris mengenai Bagian Anggaran (Kementerian) jang bersangkutan untuk didjawab oleh Menteri-menteri jang bersangkutan.
2. Pemeriksaan Nota Keuangan, laporan devisen dan Bagian I (Pemerintahan Agung) dilakukan oleh beberapa Seksi jang bersangkutan.
3. Sesudah diterima djawaban Pemerintah atas pertanyaan-pertanyaan Seksi-seksi, maka Bahagian-bahagian D.P.R. mengadakan pemeriksaan persiapan.
4. Setelah diterima Memori djawaban dari Pemerintah atas Laporan Bahagian-bahagian, barulah diadakan pemitjaraan dalam rapat pleno; mula-mula diadakan pemandangan umum, sesudah itu dimitjarakan Bagian demi Bagian.

Dalam rapat-rapat pleno dalam bulan Oktober 1951 sudah dimulai memitjarakan Anggaran Negara tahun-tahun 1950 dan 1951, akan tetapi pemitjaraannja karena djatuhnja Ka-

binet Sukiman pada tanggal 3 April 1952 tidak dapat dilandjutkan. Kabinet Wilopo dengan suratnja tanggal 6 Djuni 1952 mengusulkan, supaja rantjangan Anggaran Negara tahun-tahun 1950 dan 1951 disahkan begitu sadja, sehingga waktu-waktu jang tersedia dapat dipakai untuk menjelesaikan penju-sunan anggaran tahun 1952 dan tahun 1953. Lagi pula Kabinet Soekiman jang sudah djatuh itu tidak lagi diminta pertang-gungan djawabnja dan anggaran sudah digunakan. D.P.R. se-mantara memenuhi permintaan Pemerintah itu dalam rapat ple-no tanggal 23 Djuli 1952 dengan menjetudjui usul resolusi Mr. Iwa Kusuma Sumantri dkk. dengan suara 75 setudju dan 17 tidak setudju. Diktum resolusi tersebut berbunji seperti be-rikut :

1. D.P.R. tidak membitjarakan lebih landjut rantjangan Ang-garan Belandja Negara (R.A.B.N.) tahun 1950/1951 dengan pengertian, bahwa :
 - a. hal itu tidak mengurangi adanja pengawasan dan pemeriksaan tanggung-djawab tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan Negara tahun² 1950/1951, jang dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan dan di-beritahukannja hasil pengawasan dan pemeriksaan itu kepada D.P.R. ;
 - b. segala sesuatu jang diadjukan dalam rapat Bahagian² D.P.R. harus dipergunakan sebagai pedoman untuk me-njusun R.A.B.N. tahun² 1952/1953.
2. Mendesak kepada Pemerintah agar mengadjukan R.A.B.N. tahun² 1952/1953 selambat-lambatnja pada achir bulan Nopember 1952.

Usul Undang² Anggaran Negara tahun 1952/1953 (meliputi 2 tahun sekaligus) diadjukan oleh Kabinet Wilono setjara ber-angsur mulai tanggal 13 Desember 1952 sampai 17 September 1953. Sekali lagi D.P.R. menentukan procedure pemitjaraan. Panitia Permusjawaratan dan Ketua/Wakil² Ketua Bahagian menetapkan procedure jang hampir sama dengan procedure tahun sebelumnya.

Pada tanggal 30 Nopember 1953 rapat pleno memutuskan untuk memperpendek dan mempertjepat pemitjaraan dengan meniadakan pemitjaraan dalam Bahagian², sebab pada achir

Nopember 1953 ternyata kurang-lebih baru separoh dari pertanyaan Seksi² yang dapat dijawab oleh Pemerintah.

Dalam 9 rapat telah diadakan pemandangan umum babak pertama, dan Pemerintah menjawabnya dalam rapat pleno tanggal 15 Pebruari ; untuk penyelesaian pemitjaraan selanjutnya diminta pertimbangan Seksi Keuangan.

Seksi mengemukakan 3 pendapat, yakni :

1. pemitjaraan R.A.B.N. tahun 1952/1953 dilakukan menurut procedure biasa, kalau perlu dapat diajukan mosi tidak pertjaja.
2. R.A.B.N. tahun 1952 dan tahun 1953 disahkan seluruhnya, dan kepada D.P.R. diberi kesempatan untuk mengajukan saran², pendapat sebagai pedoman untuk anggaran j.a.d. dan supaya anggaran tambahan dan anggaran tahun 1954 diajukan sebelum akhir tahun kepada D.P.R.
3. Anggaran Negara tahun² 1952 dan 1953 disahkan „zonder meer”.

Laporan Seksi Keuangan tentang 3 pendapat mengenai procedure penyelesaian pemitjaraan R.A.B.N. tahun 1952/1953 dibicarakan dalam 9 kali rapat pleno, yakni pemandangan umum babak ke II.

Dalam rapat pleno terakhir pada tanggal 27 April 1954 D.P.R. menjetujui pendapat Seksi yang ke 3 dan „mengesahkan R.U.U. A.B.N. tahun 1952/1953 begitu saja”, Pemerintah menjanggupi dalam tahun 1954 itu juga akan menjampaikan rantjangan Anggaran Tambahan tahun 1950 dan 1951 dan R.A.B.N. tahun 1954.

Dengan demikian penggunaan keuangan Negara untuk pertamakali sudah disahkan oleh D.P.R. dengan Undang². Anggaran Negara tahun 1954 dan 1955 disahkan oleh D.P.R. pemilihan dalam tahun 1956, dengan kata² „disahkan zonder meer”.

D. Pelaksanaan Hak Angket.

Pasal 70 U.U.D.S. menetapkan, bahwa D.P.R. mempunyai hak menjelidiki (enquete), menurut aturan² yang ditetapkan dengan Undang². Sebagai pelaksanaan dari pasal 70 U.U.D.S. ini, telah ditetapkan Undang² No. 6 tahun 1954 tentang penetapan Hak Angket D.P.R. yang mulai berlaku pada hari diundangkan yaitu tanggal 9 Pebruari 1954.

Pasal² jang penting untuk melaksanakan hak Angket D.P.R. ini, ialah pasal 3 dan pasal 12, masing-masing berbunji sebagai berikut : Pasal 3: Semendjak saat pengumuman tersebut pada ajat 1 pasal 2, semua warna-negara Republik Indonesia dan semua penduduk serta orang-orang lain jang berada dalam wilajah Republik Indonesia diwadjabkan memenuhi panggilan² Panitia Angket, dan wadjib pula mendjawab semua pertanyaan²nja dan memberikan keterangan² selengkapnja (ajat (1)) Semua pegawai Negeri diharuskan sesuai dengan ketentuan² dalam Undang-undang ini, memenuhi permintaan² Panitia Angket dalam melaksanakan tugasnja (ajat (2)).

Pasal 12 : Kitab Undang² Hukum Pidana berlaku bagi setiap orang jang tidak memenuhi kewadjaban tersebut pada ajat (1) dan ajat (2) pasal 3 undang² ini, djuga apabila tindak-pidana itu dilakukan diluar negeri.

Pada achir tahun 1954 anggota Margono Djojohadikusumo dkk. mengajukan usul-resolusi jang maksudnja ialah supaya D.P.R. mengadakan angket atas usaha memperoleh dan tjara mempergunakan devisa. Setelah diadakan pemeriksaan-persiapan dalam Seksi A (Perekonomian), usul tersebut dibitjarkan dan mendapat persetujuan rapat pleno terbuka pada tanggal 16 Nopember 1954.

Sebagai landjutan D.P.R. membentuk sebuah Panitia Angket, terdiri dari 13 anggota dengan Margono Djojohadikusumo sebagai Ketua. Tugas panitia ialah menjelidiki untung-ruginja mempertahankan devisa-regime berdasarkan Undang² Pengawasan Devisa 1940 dan perubahan²nja.

Panitia, sesuai dengan peraturan² jang ditentukan dalam Undang² Angket, mengadakan pemeriksaan (terutama di Djakarta. beberapa kali djuga di daerah²) dengan memanggil pejabat² negeri maupun perusahaan² swasta, nasional dan asing, serta meminta keterangan² dibawah sumpah mengenai hal jang harus diselidiki.

Panitia tersebut mula² diberi waktu bekerdja 6 bulan, akan tetapi karena belum selesai, atas permintaan panitia waktu bekerdjanja diperpanjang sampai 2 kali, sehingga sampai mengalami penggantian Kabinet Ali ke I dengan Kabinet Boerhanuddin Harahap.

Pada bulan Maret 1956 Panitia Angket selesai menjusun laporan tentang pelaksanaan tugasnja, akan tetapi laporan ter-

sebut belum sampai digunakan berhubung dengan terbentuknja D.P.R. pemilihan dan penggantian Kabinet Boerhanuddin Harahap dengan Kabinet Ali Sastroamidjojo ke II.

E. Usul mosi (jang ditudjukan kepada kebidjaksanaan Kabinet). Usul mosi anggota S. Hadikusumo tentang Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Pemerintah R.I. Jogja dan memuat peraturan² mengenai D.P.R.² Daerah. Anggota S. Hadikusumo dkk. dalam sebuah usul mosi menuntut supaya Pemerintah :

1. Selekas mungkin mentjabut P.P. No. 39 tahun 1950.
2. Mengganti peraturan tersebut dengan undang² pemilihan jang demokratis.
3. Membubarkan D.P.R.-D.P.R.D. jang telah terbentuk menurut P.P. tersebut.

Dalam rapat pleno tanggal 22 Djanuari 1951 Pemerintah, diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat menjatakan setudju P.P. No. 39 ditjabut, setelah ada gantinya jang sempurna dan menunggu terbentuknja DPRD pemilihan umum ; hanja menjetudjuai pembubaran D.P.R.² Daerah setelah terbentuk D.P.R.D. baru atas dasar pemilihan umum.

Setelah diadakan pemungutan suara dalam rapat pleno D.P.R. ternyata jang setudju dengan usul mosi 76 suara dan jang tidak setudju 48 suara. Menteri Dalam Negeri berpendapat, bahwa setjara juridis formil dan politis Pemerintah tak dapat melaksanakan mosi Hadikusumo dkk. Oleh karena itu Menteri Dalam Negeri dan achirnja seluruh Kabinet meletakkan djabatannja.

§ 7. SEKRETARIAT.

A. Pembentukan.

Suatu D.P.R. dan Sekretariatnja merupakan suatu kesatuan jang tak dapat dipisah-pisah. Maka pada waktu D.P.R.S. dibentuk pada bulan Agustus 1950 dengan tjara menggabungkan para Ketua, Wakil Ketua dan Anggota² D.P.R. dan Senat R.I.S., Badan Pekerdja K.N.P. dan Dewan Pertimbangan Agung R.I. Jogja, digabung pulalah masing² Sekretariat dari Badan² tersebut menjadi Sekretariat D.P.R.S.

Sebagian besar dari pegawai Badan² tersebut telah mempunyai ketjakinan dan pengalaman tersendiri, sesuai dengan pekerdjaan dan tugas D.P.R. seperti misalnja para Sekretaris,

panitera, penulis tjepat dll.-nja. Sudah barang tentu djuga kepentingan pribadi para pegawai mendjadi bahan pertimbangan, sebab tidak adil kalau misalnja oleh karena penggabungan itu ada pegawai jang diberhentikan atau ditempatkan pada kantor² lain tanpa persetujuan dari pegawai jang bersangkutan.

Kenjataannja ialah bahwa penggabungan tersebut tidak banyak membawa kesulitan karena memang ada djuga sedjumlah pegawai jang lebih senang pindah ke djawatan lain ; misalnja sadja Sekretaris Senat Mr. Sajid Mangunjudo tidak menggabungkan diri dalam Sekretariat D.P.R.S.

Pada waktu terbentuknja Negara Kesatuan R.I., umumnja terdapat kesulitan-kesulitan, **pertentangan-pertentangan** an'ra pegawai jang non (non cooperator terhadap pemerintah Belanda jaitu pegawai R.I.) dan pegawai-pegawai jang co (cooperator dengan Belanda jaitu pegawai-pegawai jang bekerdja pada pemerintah Belanda) jang digabungkan dalam satu instansi. Akan tetapi berkat kebidjaksanaan Pimpinan DPR-S dan Pimpinan Sekretariat maka pertentangan dan kesulitan-kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Sekretariat jang dibentuk dengan penggabungan dari beberapa Sekretariat lainnja begitu sadja tanpa ada seleksi jang rasional sudah tentu masih memerlukan banyak pemikiran untuk dijadikan suatu organisasi jang dapat melajani kebutuhan² suatu Parlemen. Berhubung dengan hal itu dalam waktu singkat telah berulang kali diadakan perubahan² dalam susunan atau organisasi Sekretariat .

B. Perkembangan.

Perkembangan organisasi Sekretariat dan susunan pimpinannja sedjak mulai dibentuknja pada bulan Agustus 1950 adalah seperti berikut.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, jang pada waktu itu dipegang oleh almarhum Mr. Sumardi, bekas Sekretaris D.P.R. — R.I.S.;ia dibantu oleh bekas Sekretaris Badan Pekerja K.N.P., Mr. Roesli, K.R.T. Wahjono Hardjodiningrat dan 2 pegawai tinggi dari Sekretariat D.P.R.—R.I.S., R. Akoep Goelangge dan Z. Arbi.

Setelah disesuaikan dengan kedudukan pegawai pimpinan Kementerian², maka Sekretaris D.P.R.S. djuga diberi kedudukan

Sekretaris Djenderal ; atas usul dari D.P.R.S. jang lebih dahulu memilihnja dari beberapa tjalon, Mr. Sumardi diangkat oleh Presiden mendjadi Sekdjen D.P.R.S. jang pertama. Panitia Rumah Tangga selandjutnja menetapkan organisasi Sekretariat sebagai berikut.

Seluruh Sekretariat dibagi atas 3 Bagian, yakni Bagian I (Perundang²an), Bagian II (Seksi dan Bahagian), masing² dibawah pimpinan seorang Sekretaris/Kepala Bagian dan Bagian III (Tata-Usaha), jang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Bagian I pada umumnja melakukan pekerdjaan² jang berhubungan dengan rapat² pleno D.P.R., Bagian II spesial mengerdjakan hal² jang bersangkutan dengan rapat² Seksi² dan Bahagian² (serta panitia khusus) D.P.R., sedangkan Bagian III menjelaskan segala hal jang bersangkutan dengan tata-usaha atau kerumah-tangga D.P.R. dan Sekretariat.

Selandjutnja Mr. Roesli dengan K.R.T. Wahjono Hardjodiningrat sebagai wakilnja, ditunjuk sebagai Kepala Bagian I, sedangkan sebagai Kepala Bagian II ditetapkan R. Akoep Goelange dengan Mr. Sumarsono Pringgoredjo sebagai wakilnja — sebagai Kepala Bagian III ditunjuk Z.A. St. Arbi dengan R.S. Purwadi sebagai wakilnja.

Pada permulaan tahun 1952 oleh P.R.T. diadakan perubahan dalam organisasi Sekretariat, a.l. supaya lebih sesuai dengan banjaknja djumlah rapat² pleno. Kepada Sekdjen diperbantukan suatu Staf Sekdjen jang mempunyai tugas membantu Sekdjen sebagai „braintrust”, terutama mengenai penjelesaian perundang²an, misalnja memberikan pertimbangan² tehnis-juridis dan lain², lagi pula untuk mendjadi Sekretaris rapat² pleno. D.P.R. Jang ditunjuk untuk duduk dalam Staf Sekdjen ialah Mr. Roesli, R. Akoep Goelange dan Z.A. Arbi, ketiga-tiganja bekas Kepala² Bagian. Sekarang tidak lagi diadakan 3 Bagian, akan tetapi 2 yakni Bagian I (Perundang²an) dan Bagian II (Rumah tangga); sebagai Kepala Bagian I ditunjuk K.R.T. Wahjono Hardjodiningrat dengan Mr. Sumarsono Pringgoredjo sebagai wakilnja dan sebagai Kepala Bagian II ditunjuk R.S. Purwadi dengan M. de Queljoe sebagai wakilnja.

Setelah organisasi tersebut berdjalan kira² 3 tahun, maka Sekdjen mengajukan usul kepada Panitia Rumah Tangga yakni untuk menghapuskan sama sekali sistim Bagian dan dengan Keputusan P.R.T. No. 1/Staf/1955 tanggal 10 Maret 1955 di-



Mr. ROESLI Sekertaris Djenderal Dewan Perwakilan Rakjat
Maret 1955-1961

tetapkan organisasi baru Sekretariat D.P.R. Sekretariat sekarang hanya terdiri dari 8 Urusan, masing² dipimpin oleh Kepala Urusan, yang langsung bertanggung-djawab kepada Sekdjen, sedangkan Sekdjen dalam melakukan pimpinannya dibantu oleh staf yang terdiri dari para Sekretaris dan Sekretaris-pengganti D.P.R. 8 Urusan itu ialah : Urusan² 1. Redaksi, 2. Seksi-Bagian, 3. Risalah, 4. Perpustakaan, 5. Rumah Tangga, 6. Keuangan, 7. Pegawai dan 8. Arsip-Ekspedisi.

Lepas dari perubahan² yang telah diadakan didalam organisasi Sekretariat, terdjadi pulalah beberapa mutasi dikalangan pedjabat² Pimpinan. Pada tanggal 2 September 1954 telah berpulang ke Rachmatullah Mr. Soemardi, Sekdjen ; maka ditunduklah untuk beberapa waktu R. Akoep Goelangge sebagai Pd. Sekdjen.

Berhubung dengan adanya 2 tjalon (R. Akoep Goelangge, Mr. Roesli) untuk mengisi lowongan Sekdjen D.P.R., maka dalam suatu rapat pleno D.P.R. diadakan pemilihan seorang tjalon untuk diajukan kepada Presiden ; yang terpilih ialah Mr. Roesli yang kemudian diangkat oleh Presiden sebagai Sekretaris Djenderal D.P.R. Kemudian setelah terbentuk Konstituante tahun 1955, R. Akoep Goelangge mendapat tugas sementara untuk memimpin persiapan Sidang dan pembentukan Sekretariat Konstituante di Bandung.

Sesudah diadakan reorganisasi Sekretariat dan berhubung dengan meninggalnya pula Sdr. Wahjono Hardjodiningrat, Kepala Bagian I dan berhentinya dari djabatan-Negeri (dengan pensiun) M. de Queljoe, Wk. Kepala Bagian II dan Z.A. Arbi, Sekretaris, maka kemudian yang duduk dalam Staf Sekdjen sebagai Sekretaris² ialah R. Akoep Goelangge, Mr. Sumarsono Pringgodiredjo dan R.S. Purwadi. Sesudah beberapa waktu Staf Sekdjen ini ditambah lagi dengan 2 orang tenaga yaitu R. St. Palindih dan Mr. Djoko Soemarjono.

B A B IV

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT HASIL PEMILIHAN UMUM TANGGAL 26 MARET 1956 — 22 DJULI 1959

§ 1. PEMBENTUKAN.

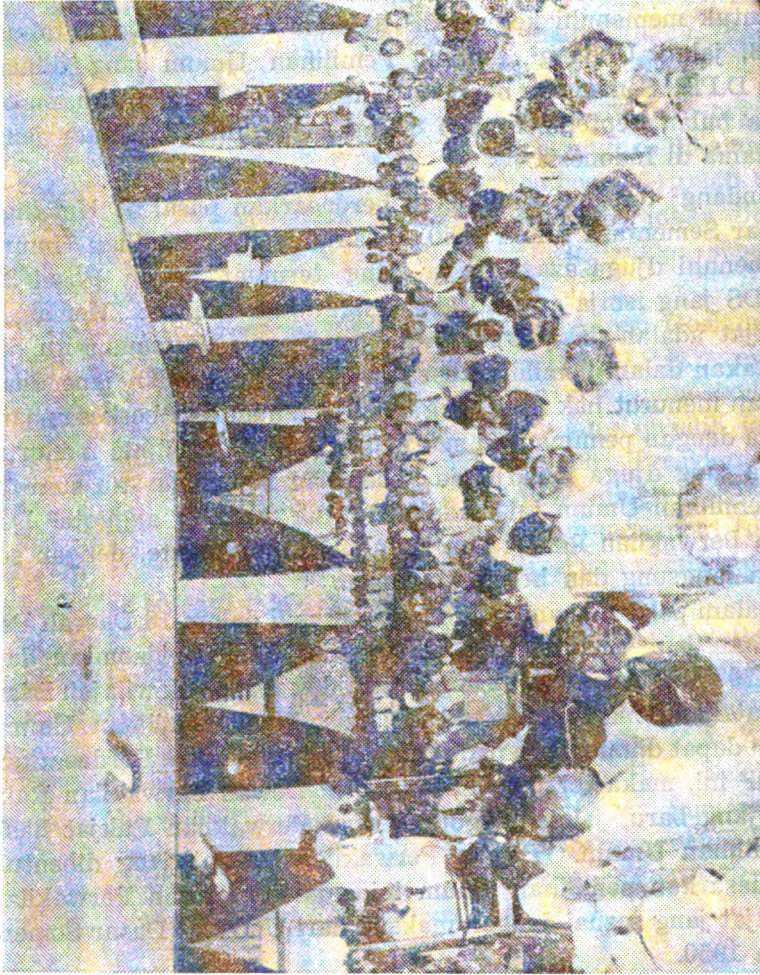
Untuk memenuhi ketentuan² didalam Undang² No. 7 tahun 1953, yakni Undang² tentang Pemilihan Umum yang dibuat oleh D.P.R. Sementara bersama-sama dengan Pemerintah, maka pada bulan September 1955 diadakan Pemilihan Umum yang pertama di Indonesia.

Undang² tersebut ditetapkan berdasarkan pasal 57 Undang² Dasar Sementara tahun 1950. Disamping itu Pemilihan Umum memenuhi juga azas² dasar yang termuat dalam Pasal 35 UUDS yang isinya antara lain mengatakan bahwa : „Kemauan Rakjat adalah dasar kekuasaan penguasa ; Kemauan itu di-jatakan dalam pemilihan berkala yang djudjur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut tjara yang juga mendjamin kebebasan mengeluarkan suara”

Pemilihan Umum ini diadakan untuk memilih anggota² Dewan Perwakilan Rakjat dan anggota² Konstituante, dengan sejara langsung dan bersifat rahasia.

Dalam pelaksanaannja Indonesia dibagi dalam 16 Daerah Pemilihan yang meliputi 208 Kabupaten, 3.139 Ketjamatan dan 43.429 desa. Dalam perhitungan ini tidak termasuk wilayah Irian Barat yang masih diduduki Belanda. Hasil pemilihan Umum baru dapat diumumkan pada tanggal 1 Maret 1956. Berdasarkan hasil² ini, maka tersusunlah anggota² Dewan Perwakilan Rakjat yang baru, yakni anggota Dewan Perwakilan Rakjat hasil Pemilihan Umum. Dewan Perwakilan Rakjat yang dibentuk berdasarkan pemilihan umum ini, adalah Dewan Perwakilan Rakjat yang sesuai dengan maksud dari Undang² Dasar Sementara 1950.

Setelah anggota Dewan Perwakilan Rakjat hasil Pemilihan Umum ini disusun, maka tanggal 20 Maret 1956 dilantiklah oleh Presiden. Rapat istimewa ini dipimpin oleh Mr. A.M. Tambunan yang dihadiri juga oleh bekas anggota DPR-S dan Menteri² dari Kabinet Buhanuddin Harahap yang baru sadja menjerahkan kekuasaannja kepada Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-II.



26 Maret 1956.

Presiden Soekarno sedang memberikan amanatnja dalam sidang istimewa pembukaan D.P.R. hasil Pemilu jang pertama.

„Foto Deppen” 560326/FG5-4.



Ketua sementara DPR hasil pemilihan Umum R. Sudjono Prawiro Sudaiso yang terpilih sebagai tjalon perorangan sedangkan memimpin pembukaan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat R.I. 26 Maret 1956. Menurut Tata-tertib waktu itu, jika Pimpinan DPR tidak/ belum ada, sidang dipimpin oleh anggota yang tertua usianya.

Dengan pelantikan ini, maka sekaligus Dewan Perwakilan Rakjat Sementara resmi dibubarkan oleh Presiden.

§ 2. KEANGGOTAAN.

Hasil dari Pemilihan Umum menunjukkan bahwa djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat itu adalah 272 orang, jaitu dengan perhitungan bahwa satu orang anggota D.P.R. mewakili 300.000 orang penduduk. Disamping itu telah terpilih pula 542 orang anggota Konstituante. Mereka ini terdiri dari wakil² partai politik, wakil² organisasi dan perorangan lainnja.

Dengan terbentuknja D.P.R. hasil Pemilihan Umum ini, bangsa Indonesia untuk pertama kali dalam sedjarahnja mendapatkan sebuah Parlemen jang dipilih. Setelah pelantikan Dewan Perwakilan Rakjat hasil Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Presiden, maka lembaga ini mulailah dengan kegiatan²nja. Sidang pertama dari Dewan Perwakilan Rakjat hasil Pemilihan Umum diadakan di Djakarta dan dipimpin oleh Ketua Sementara jang diambil dari anggota jang paling tua usinja jakni : R. Soedjono Prawirosoedardjo, atas dasar pasal 62 ajat (2) U.U.D.-S. tahun 1955 jo pasal 5 Peraturan Tata-tertib DPR.

Dalam rapat ini dipilihlah Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat jang baru berdasarkan ketentuan² dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Tata-Tertib 1950. Dalam memimpin rapat sepenting ini, tampaknya beberapa ke-djanggalan antara lain badan gemetar, tjara menggunakan pa-lu jang kurang tepat dan sukar untuk mengeluarkan kata-kata.

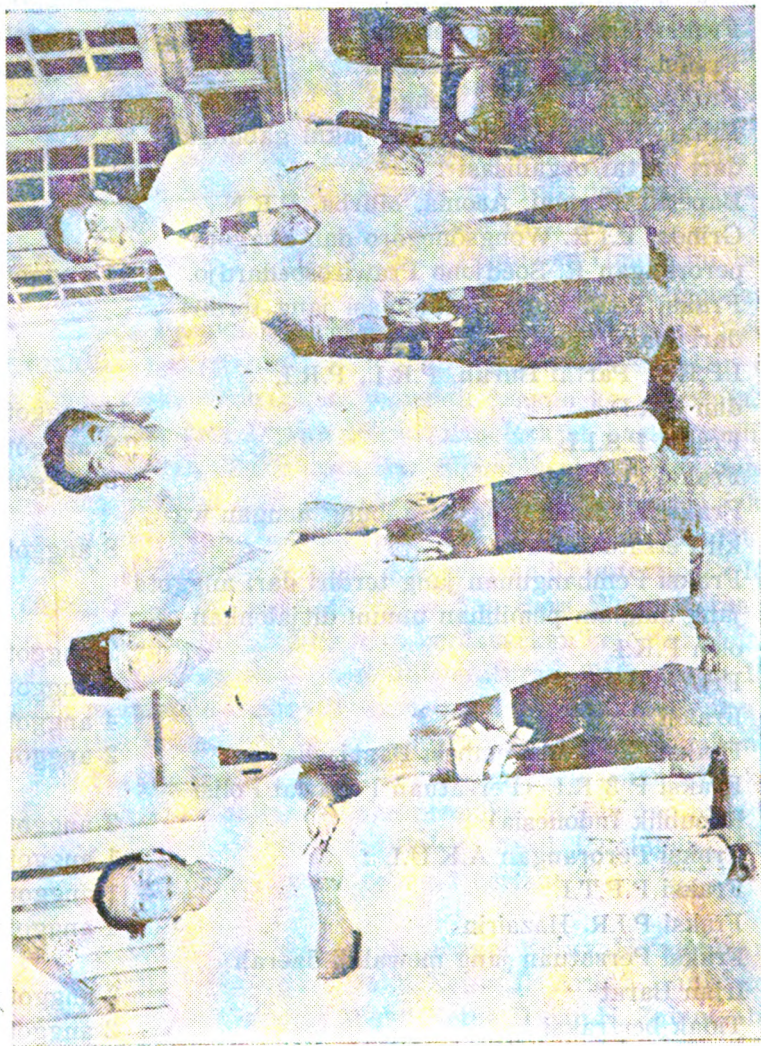
Dengan tjara demikian, maka pemilihan Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat hasil Pemilihan Umum ini menghasilkan komposisi sebagai berikut :

Mr. Sartono dari P.N.I. dipilih sebagai Ketua, H.Zainul Arifin dari N.U. dipilih sebagai Wakil Ketua I, Arudji Kartawinata dari P.S.I.I. dipilih sebagai Wakil Ketua II dan H. Zainul Abidin Achmad dari Masjumi dipilih sebagai Wakil Ketua III. Sesuai dengan ketentuan U.U.D. Sementara pasal 62 ajat 6, maka hasil pemilihan Ketua, Wakil Ketua disahkan dengan Keputusan Presiden. Dengan susunan pimpinan inilah Dewan Perwakilan Rakjat hasil pemilihan umum melaksanakan kewadjabannja.

Didalam melaksanakan tugasnja se-hari², Dewan Perwakilan Rakjat hasil pemilihan umum ini membentuk fraksi². Setelah mengalami perobahan² fraksi tersebut tersusun sebagai berikut :

1. Fraksi P.N.I.	dengan	58 anggota,
2. Fraksi Masjumi	dengan	60 anggota,
3. Fraksi N.U.	dengan	47 anggota,
4. Fraksi P.K.I.	dengan	32 anggota,
5. Fraksi Nasional Progressif, yakni gabungan dari partai/organisasi : Baperki, Permai, Acoma, Murba, P.R.N., Grinda, P.I.R. Wongsonegoro dan anggota perorangan R. Soedjono Prawirosoedardjo.		11 anggota,
6. Fraksi Pendukung Proklamasi jang terdiri dari wakil ² partai/organisasi : I.P.K.I., Partai Buruh, P.R.I., P.R.I., dan P.R.D.		11 anggota,
7. Fraksi P.S.I.I.		8 anggota,
8. Fraksi Parkindo		9 anggota,
9. Fraksi Katholik jang bergabung dengan wakil Persatuan Daya.		8 anggota,
10. Fraksi Pembangunan jang terdiri dari anggota ² jang didalam pemilihan umum ditjalonkan oleh P.K.I.		7 anggota,
11. Fraksi P.S.I.		5 anggota,
12. Fraksi Perti		4 anggota,
13. Fraksi Gerakan Pembela Pantjasila		2 anggota,
14. Fraksi P 3 R.I. (Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia)		2 anggota,
15. Fraksi Perorangan A.K.U.I. :		1 anggota,
16. Fraksi P.P.T.I.		1 anggota,
17. Fraksi P.I.R. Hazairin		1 anggota,
18. Fraksi Persatuan jang mewakili daerah Irian Barat		3 anggota,
19. Tidak berfraksi		2 anggota,
		272 anggota.

Fraksi I.P.K.I. jang mulanja bergabung dengan Fraksi Pendukung Proklamasi kemudian keluar dari fraksi tersebut dan berdiri sendiri.



Pimpinan DPR hasil Pemilu. Dari kiri ke kanan : Ketua Mr. Sartono wk. Ketua I H. Zainul Arifin, wk. Ketua II Arudji Kartawinata, wk. Ketua III Zainal Abidin Achmad.

„Foto Ippkas/023/H.M.

Susunan fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakjat hasil Pemilihan ini seperti yang diuraikan diatas, menggambarkan suasana politik pada saat itu. Disamping itu kelihatan pula ada fraksi-fraksi yang berhubungan dengan sesuatu partai politik dan ada pula fraksi yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan salah-satu partai politik yang ada.

§ 3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG.

Adapun kedudukan, tugas dan wewenang DPR hasil Pemilu sama dengan kedudukan, tugas, wewenang DPR-S oleh karena itu disini hanya akan diuraikan kedudukan keuangan dan hubungan dengan pemerintah.

A. Kedudukan Keuangan.

Mengenai kedudukan keuangan Ketua/Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat hasil Pemilihan Umum ini pada mulanya diatur dengan Undang-undang No. 2 tahun 1954 sebagai mana kedudukan keuangan Ketua/Wakil Ketua dan anggota D.P.R.-S.

Kemudian hal ini diatur kembali dengan Undang-undang No. 16 tahun 1958. Undang-undang No. 16 tahun 1958 ini menetapkan bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mendapat gaji sebesar Rp. 2.800,— sebulan dan tunjangan tetap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat adalah Rp. 2.000,— sebulan. Penggantian uang penginapan bagi Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat adalah Rp. 45,— sehari dan disamping itu mereka mendapat uang harian/uang makan sebanjak Rp. 45,— sehari. Uang kendaraan local Rp. 30 sehari. Disamping itu setiap anggota Dewan Perwakilan Rakjat yang bertempat tinggal diluar pulau Djawa diberi hak untuk pergi ke Sidang di Djakarta dan pulang ketempat tinggalnya atas biaya Negara. selama masa sidang yang berlangsung dua bulan atau lebih. Hal tersebut hanya berlaku dua kali dalam satu tahun.

Undang-undang No. 16 tahun 1958 yang mengatur tentang keuangan Ketua/Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat kemudian diganti lagi dengan Undang-undang No. 81 tahun 1958. Pada prinsipnya pengaturan keuangan Ketua, Wakil Ketua I anggota Dewan Perwakilan Rakjat dalam Undang² No. 81 tahun 1958 ini sama saja dengan Undang-undang yang sebelumnya. Perbedaannja hanya terletak pada jumlah uangnya.

Menurut Undang² No. 81 tahun 1958 tersebut Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mendapat gadji sebesar Rp. 3.250,— sebulan, ditambah dengan tundjangan keluarga serta tundjangan Kehormatan sebanjak Rp. 1.250,— sebulan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mendapat gadji sebesar Rp. 2.750,— sebulan ditambah dengan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga serta tundjangan Kehormatan sebanjak Rp. 750,— sebulan. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat mendapat uang Kehormatan sebanjak Rp. 2.250,— sebulan ditambah dengan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga. Para anggota dalam Panitia Rumah-Tangga, Panitia Permusjawaratan dan Panitia Khusus adhoc mendapat uang duduk sebanjak Rp. 30,— dan maximum Rp. 210,— sebulan untuk rapat² jang dihadapinja. Hal ini tidak berlaku bagi Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat. Uang penginapan ditetapkan Rp. 75,— sehari. djika tidur di losmen (Hotel²) dan uang makan sebanjak Rp. 45,— sehari. Para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat mendapat djuga tundjangan djabatan Rp. 250,— sebulan ketjuali Ketua I Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

Fasilitas-fasilitas lainnja adalah bagi Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat disediakan masing-masingnja sebuah rumah kediaman jang biaja sewaan dan pemeliharaannja ditanggung oleh Negara. Ketentuan-ketentuan mengenai keuangan sebagaimana jang tersebut diatas tetap berlaku dalam masa reses.

B. Hubungan D.P.R. Pemilihan Umum dengan Pemerintah.

Hubungan D.P.R. hasil Pemilihan Umum dan Pemerintah dapat diperhatikan dengan menghubungkan aktivitas-aktivitas jang diadakan oleh D.P.R. itu sendiri dengan Pemerintah. Untuk menggambarkan hal ini, maka perlu dikemukakan program-program kerdja dari dua Kabinet jang bertugas dalam masa kerdja DPR hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-II (Kabinet Koalisi)

masa djabatan 24 Maret 1956 — 9 April 1957.

Pembentukan dilaksanakan tanggal 24 Maret 1956. Program kerdja dari Kabinet ini adalah:

1. Menjelesaikan pembatalan seluruh perdjandjian K.M.B. setjara unilateral baik formil, maupun materiil dan meng-

- adakan tindakan-tindakan untuk menampung akibat-akibatnja.
2. Meneruskan perdjuaan Irian Barat bersandarkan kekuatan rakjat dan membentuk propinsi Irian Barat.
 3. Memulihkan keamanan dalam negeri, menjempurnakan koordinasi antara alat-alat negara terutama dalam tindakan pemulihan keamanan.
 4. Perekonomian — Keuangan.
 - a. Memulai pembangunan setjara teratur menurut rentjana 5 tahun ; berusaha untuk mewujudkan penggantian ekonomi kolonial dan mempergiat perkembangan koperasi.
 - b. Menjahatkan keuangan negara, penambahan sumber-sumber keuangan baru harus diutamakan, memperbaiki pengawasan atas pemakaian keuangan negara, dan mengawasi kemadjuan pelajaran nasional serta melindungi terhadap persaingan asing.
 - c. Memadjukan berdirinja industri nasional dan melindungi industri nasional terhadap persaingan asing.
 - d. Mempertinggi tingkat hidup petani dengan djalan memperbanjak produksi hasil bumi, terutama bahan makanan rakjat, memperkuat tumbuhnja koperasi-koperasi tani dan bank-bank tani, kesehatan dan pendidikan tani dan memadjukan transmigrasi.
 - e. Melipat gandakan peternakan dan perikanan.
 - f. Memperlengkapi alat-alat transport untuk daerah yang menghasilkan produksi banjak, memadjukan dan mengawasi kemadjuan pelajaran nasional serta melindungi terhadap persaingan asing.
 5. Melaksanakan pembentukan daerah-daerah otonom dalam tingkat sebanjak-banjaknja tiga, menetapkan dengan undang-undang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah ; mengesahkan diadakannja pemilihan DPRD ; menjusun aparatur Pemerintah yang efficient dan memberantas korupsi setjara objektif.
 6. Melantjarkan stabilisasi kekuasaan negara, mengadakan kewadajiban milisi semua warga negara, memperbaiki nilai-nilai teknis pendidikan rohani dan djasmani militer dari angkatan perang Republik Indonesia.

7. Memadjukan usaha Pemerintah kearah perbaikan nasib dan kedudukan hukum kaum buruh; melengkapkan perundang²an perburuhan dan pegawai; mengatur penyelesaian perselisihan perburuhan, memberi bagi pertumbuhan organisasi buruh dan pegawai jang sehat.
8. Memperluas mempertinggi mutu pendidikan djasmani dan rohani, menjiapkan berlakunja wadajib beladjar dalam tempo tertentu, menjelesaikan perundang-undangan pendidikan nasional, menjelenggarakan usaha dalam pertumbuhan kebudayaan Nasional.
9. Menjalurkan tenaga bekas pedjuang kearah usaha-usaha produktif.
10. Mendjalankan politik luar negeri jang bebas aktif berdasarkan kepentingan rakjat menudju perdamaian dunia. Melaksanakan Keputusan Konperensi Asia Afrika pertama di Bandung.
11. Menjelenggarakan terbentuknja undang-undang pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah agama.
12. Menjelenggarakan terbentuknja perundang-undangan perkawinan.

Program Kabinet Ali Sastroamidjojo ke II tersebut diatas telah dibitjarakan dalam rapat-rapat D.P.R. hasil Pemilihan Umum. Proses pembitjaraannya tersebut dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Keterangan Pemerintah di D.P.R. tanggal 9-4-1956.
- b. Pemandangan Umum babak ke I tanggal 10 April 1956 sampai dengan tanggal 14 April 1956.
- c. Djawaban pemerintah babak ke I tanggal 16 April 1956.
- d. Pemandangan umum babak ke II tanggal 17 April 1956 dan tanggal 18 April 1956.
- e. Djawaban pemerintah babak ke II tanggal 20 April 1956.
- f. Keputusan D.P.R. dengan suara bulat menjetudju memberi kesempatan bekerdja kepada Kabinet Ali Sastroamidjojo ke II.

Kabinet Ali Sastroamidjojo ke II ini mempunyai masa kerdja selama 1 tahun 16 hari. Pada tanggal 14 Maret 1957 Kabinet Ali Sastroamidjojo ke II ini meletakkan djabatannya, karena dipaksa oleh situasi politik pada waktu itu, ialah tidak adanya

kebulatan pendapat didalam Kabinet mengenai konsepsi Presiden, sebagai akan diuraikan didalam paragraf kedjadian bersejarah. Sebelum pembentukan Kabinet selanjutnya maka Kabinet Ali Sastroamidjojo ke II dalam keadaan demisioner.

2. Kabinet Djuanda (Kabinet Karya).

Pada tanggal 9 April 1957, terbentuklah Kabinet Karya Darurat Extra Parlementer dibawah pimpinan Perdana Menteri Ir. Djuanda. Adapun program dari Kabinet Djuanda ini adalah sebagai berikut :

1. Membentuk Dewan Perantjang Nasional.
2. Menormalisasi keadaan Republik Indonesia.
3. Melandjutkan pelaksanaan pembatalan perdjandjian K.M.B.
4. Perdjuangan Irian Barat.
5. Mempergiat pembangunan.

Proses pemitjaraan Program Kabinet ini dalam DPR dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Keterangan Pemerintah di D.P.R. tanggal 17 Mei 1957. Pemandangan Umum babak ke-I tanggal 21 Mei sampai dengan 23 Mei 1957.
- b. Djawaban Pemerintah Babak ke-I tanggal 28 Mei 1957.
- c. Pemandangan umum babak ke-II tanggal 31 Mei 1957 dan tanggal 3 Djuni 1957.
- d. Djawaban Pemerintah babak ke-II tanggal 7 Djuni 1957.

Setelah pemerintah memberikan djawaban pada tanggal 7 Djuni 1957 tersebut pemitjaraan program kerdja Kabinet Djuanda ini dianggap selesai karena tidak ada sesuatu usul resolusi maupun mosi jang masuk. Kabinet Djuanda mempunyai masa kerdja selama 2 tahun 3 bulan. Pada tanggal 6 Djuli 1957 Kabinet ini meletakkan djabatannya berhubung dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden kembali ke Undang-undang Dasar 1945, dan tidak berlakunya lagi UUDS.

§ 4. PERATURAN TATA-TERTIB DAN PELAKSANAANNYA.

Peraturan Tata-Tertib jang digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakjat hasil Pemilihan Umum adalah sama dengan Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Sementara. Peraturan Tata-Tertib ini dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakjat Sementara pada tanggal 27 September 1950 dan berdasarkan pa-

sal 76 Undang-undang Dasar Sementara dan telah mengalami beberapa perubahan.

Pada umumnja kebiasaan-kebiasaan jang ada pada Dewan Perwakilan Rakjat Sementara diikuti djuga oleh Dewan Perwakilan Rakjat hasil pemilihan umum.

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan jang ada dalam peraturan tata-tertib ini, maka Dewan Perwakilan Rakjat hasil pemilihan umum dalam melaksanakan tugasnja sebagai lembaga legislatif dan sebagai badan kontrol terhadap kebidjaksanaan Pemerintah, tetap mempunjai Badan-badan pembantu sebagaimana jang ada pada Dewan Perwakilan Rakjat Sementara.

Adapun nama-nama Badan Kelengkapan tersebut beserta tugasnja telah diterangkan sewaktu membitjarakan Badan-badan Pembantu D.P.R.S.

§ 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH.

Kedjadian bersedjarah jang ada hubungannja dengan Dewan Perwakilan Rakjat hasil pemilihan umum antara lain seperti jang akan diuraikan dibawah ini :

A. Pembatalan Perdjangjian K.M.B.

Salah satu kedjadian jang penting dalam periode ini jang kemudian ternjata banjak sekali mempengaruhi djalannja sedjarah Indonesia adalah pembatalan setjara sepihak perdjangjian Konperensi Medja Bundar (K.M.B.).

Pada tanggal 21 Pebruari 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap menjampaikan Rantjangan Undang² tentang Pembatalan Perdjangjian K.M.B. Rantjangan Undang² ini telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Sementara pada tanggal 28 Pebruari 1956. Namun demikian kelandjutan dari Rantjangan Undang² tersebut belum mendjadi undang² karena Kabinet Burhanuddin Harahap telah meletakkan djabatannja, karena telah diumumkannja hasil Pemilihan Umum. Dalam masa Dewan Perwakilan Rakjat hasil Pemilihan Umum, Kabinet Ali Sastroamidjojo sekali lagi memadjukan Rantjangan Undang² mengenai hal jang sama. Setelah mengalami pemitjaran jang pandjang lebar, maka achirnja pada tanggal 21 April 1956 Rantjangan Undang² tersebut dapat disetudjui oleh D.P.R. untuk mendjadi Undang-Undang.

Adapun isi Rantjangan Undang² mengenai pembatalan setjara sepihak perdjandjian K.M.B. itu ialah penghapusan dan pembatalan hubungan Republik Indonesia dengan Keradjaan Belanda atas dasar perdjandjian K.M.B.

Dengan sendirinja setelah pembatalan tersebut hubungan Republik Indonesia dengan Keradjaan Belanda adalah hubungan biasa sadja antara negara² jang berdaulat penuh, berdasarkan hukum internasional. Kepentingan bangsa Belanda di Indonesia diperlakukan sesuai dengan ketentuan² dan undang² jang berlaku di Indonesia.

B. Usaha² pengembalian Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.

Perjuangan Bangsa Indonesia untuk mengembalikan wilajah Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia pada hakekatnja tidaklah berdasarkan kepada keinginan untuk meluaskan daerah atau penguasaan sumber² alam jang baru. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah mengandung suatu pengertian bahwa wilajah Republik Indonesia itu adalah bekas wilajah kekuasaan Hindia Belanda yakni dari Sabang sampai ke Merauke.

Didalam piagam „penjerahan” (batja : pengakuan) Kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, kepada Pemerintah Indonesia sudah ditetapkan bahwa semua perselisihan jang mungkin timbul kemudian akan diselesaikan dengan djalan patut dan rukun. Dalam waktu satu tahun setelah pengakuan Kedaulatan tersebut, masaalah Irian Barat jang diduduki oleh Belanda diselesaikan dengan djalan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Meskipun batas waktu satu tahun sudah lewat Belanda tetap menduduki daerah tersebut. Oleh karena itulah timbul keinginan Pemerintah Indonesia untuk menghapuskan Perdjandjian K.M.B.

Sebagai follow-up dari pembatalan perdjandjian KMB sebagaimana jang diterangkan diatas, maka usaha pembebasan Irian Barat jang waktu itu masih diduduki oleh Pemerintahan Belanda adalah merupakan suatu tindakan jang segera harus ditingkatkan. Dalam rangka usaha ini, Republik Indonesia banjak sekali mendapatkan bantuan dari negara² Asia-Afrika jang telah menerima Dasa Sila Bandung sebagai pedoman kerdja sama diantara negara² jang baru sadja melepaskan dirinja dari pen-

djadjahan. Usaha ini terutama dilaksanakan melalui sidang² umum Perserikatan Bangsa² (P.B.B.). Namun demikian usaha² tersebut belum lagi mentjapai hasil jang memuaskan.

Dewan Perwakilan Rakjat hasil pemilihan umum djuga berusaha dengan sekuat tenaga² untuk mendukung pemerintah dalam usaha pembebasan Irian Barat. Usaha ini ditempuh dengan djalan menjetudjui Rantjangan Undang² tentang pembentukan Propinsi Irian Barat. Rantjangan Undang² ini kemudian disjahkan oleh Presiden dalam bentuk Undang² No. 15 tahun 1956.

Usaha lain jang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat dalam rangka pembebasan Irian Barat adalah mengadakan suatu resolusi pada tanggal 23 Oktober 1958 jang berisi :

- a. Menjokong usaha pemerintah memperdjuangkan pembebasan Irian Barat melalui P.B.B.
- b. Menjatakan penghargaan dan terima kasih atas usaha 15 negara jang mengusulkan masaalah Irian Barat mendjadi atjara sidang umum P.B.B.
- c. Kepada Dewan Perwakilan Rakjat semua negara dinjatakan harapan agar mendesak pemerintahannja masing² untuk menjokong tuntutan Indonesia atas Irian Barat.
- d. Kepada sidang umum P.B.B. disampaikan harapan ditjapainja suatu keputusan jang menudju kearah penjelesaian masaalah Irian Barat setjara damai.

C. Pergolakan didaerah-daerah.

Dalam masa pemerintahan Kabinet Djuanda terdjadilah pergolakan² daerah. Hal ini merupakan kedjadian jang sangat penting dalam masa Dewan Perwakilan Rakjat hasil pemilihan umum.

Motif dari pergolakan daerah ini adalah timbulnja perasaan tidak puas terhadap kedadjaksanaan Pemerintah Pusat pada waktu itu. Pembangunan didaerah-daerah dirasakan sangat se-ret djalannja. Disamping itu ada daerah-daerah jang beranggapan bahwa Pemerintah Pusat dipengaruhi oleh golongan komunis.

Sebagai manifestasi dari perasaan jang tidak puas ini, lahir lah gerakan-gerakan jang bersifat kedacrahan jang berbentuk

gerakan P.R.R.I. dipulau Sumatera dan gerakan Permesta di Sulawesi.

Adapun Peristiwa daerah jang menondjol pada waktu itu adalah sebagai berikut :

Peristiwa Sumatera Tengah dengan Dewan Bantengnja adalah berupa pengoperan pimpinan Pemerintah Pusat di Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Muljohardjo kepada Let. Kol. Achmad Husain sebagai Ketua Dewan Banteng. Hal ini terdjadi pada tanggal 21 Desember 1956. Selandjutnja adalah pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (P.R.R.I.) pada tanggal 15 Pebruari 1958 dengan Sjafrudin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri dan berkedudukan di Padang.

Di Sumatera Utara, Kol. M. Simbolon sebagai Panglima T.T.I. (Tentara Territorium I) menjatakan melepaskan hubungan untuk sementara dengan Pemerintah Pusat dan mengambil alih pemerintahan diwilajah tersebut. Hal ini dilaksanakannja pada tanggal 22 Desember 1956 dan setjara sekaligus menjatakan daerah Sumatera Utara berada dalam keadaan Darurat Perang.

Di Sumatera Selatan, pengoperan kekuasaan Pemerintahan Pusat dilakukan oleh Panglima T.T. II Let. Kol. Barlian. Semua peristiwa jang amat penting ini dilaporkan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat dalam bentuk Keterangan² Pemerintah, jang diberikan pada tanggal 12 Desember 1956 dan tanggal 21 Djanuari 1957. Dalam pada itu didaerah T.T. VII terdjadi pula pengambil alihan kekuasaan Pemerintah Pusat oleh Panglima T.T. VII dan sekaligus mengumumkan keadaan perang diwilajah ini dan piagam Perdjuangan Semesta, serta menjatukan diri dengan P.R.R.I., sehingga lahirlah P.R.R.I., Permesta.

Tindakan Pemerintah menghadapi semua gerakan² jang bersifat kedaerahan ini telah dikemukakan oleh Presiden dalam pidatonja pada tanggal 17 Agustus 1958 dan diperdjelas lagi dalam pidatonja pada tanggal 17 Agustus 1959. Kebidjaksanaan Pemerintah adalah menghantjurkan semua gerakan² kedaerahan ini, sehingga kesatuan wilajah Republik Indonesia dapat dipulihkan kembali sebagaimana sediakala.

Dalam Keterangan Pemerintah kepada D.P.R. mengenai situasi negara dan berbagai peristiwa penting, tampak dengan

djelas adanja usaha keras dari Pemerintah untuk menormalisir keadaan Negara dengan djalan musjawarah dengan berbagai tokoh dan golongan² terutama jang merasa tidak puas dengan keadaan, termasuk komandan² Angkatan di Daerah².

Salah satu usaha jang bersifat menjeluruh djuga dalam hal ini, adalah diselenggarakannja atas nasehat Dewan Nasional suatu Musjawarah Nasional digedung Proklamasi Pegangsaan Timur 56 Djakarta dari tanggal 9 s/d 14 September 1957.

Musjawarah Nasional jang dihadiri oleh tokoh² nasional dan tokoh² Angkatan, termasuk bekas Wakil Presiden Dr. Moh. Hatta itu, membitjarakan atjara jang luas, jang meliputi bidang pemerintahan, soal² daerah, ekonomi keuangan, angkatan perang, kepertaian dan djuga soal „Dwitunggal Sukarno-Hatta”, Munas ini merupakan masalah jang sangat penting karena menghasilkan „Keputusan² jang amat berharga, jakni suasana saling mengerti antara Pusat dan Daerah, dan Pernyataan bersama Sukarno-Hatta”, untuk mengadakan kerdja-sama

D. Usaha menjatukan Dwitunggal Sukarno-Hatta.

Diantara persoalan² dalam Musjawarah Nasional jang menjadi pembitjaraan D.P.R. terdapat antara lain masaalah „Dwi Tunggal Sukarno-Hatta”.

Pada tanggal 1 Desember 1956 Drs. Moh. Hatta mengundurkan diri dari kedudukannja sebagai Wakil Presiden, dan pengunduran diri tersebut disetujui oleh DPR dalam rapatnja tanggal 30 Nopember 1956. Kira² setahun kemudian ada suara² jang menghendaki dipulihkannja kembali kerdja sama Dwi Tunggal Sukarno-Hatta maka masaalah tersebut turut dibitjarkan dalam Musjawarah Nasional serta mendapat perhatian jang khusus oleh D.P.R. Hal tersebut tampak sewaktu membitjarkan keterangan Pemerintah mengenai normalisasi keadaan Negara ialah dengan diadjukannja kepada D.P.R. dua buah usul resolusi oleh Anggota Asrarudin dkk. tentang „realisasi pemulihan kerdjasama Dwitunggal Sukarno-Hatta” dan oleh Anggota Mr. Memet Tanumidjaja dkk. tentang „pembentukan Panitia Ad Hoc untuk mentjari bentuk kerdja-sama „Sukarno-Hatta”, jang pertama ditarik kembali oleh para pengusulnja, oleh karena maksudnja sudah tertampung dalam usul resolusi jang kedua, jang mempunjai tudjuan jang lebih luas. Usul resolusi jang kedua diterima dengan aklamasi oleh D.P.R. dalam

rapat Pleno tanggal 29 Nopember 1957 dan pada waktu itu djuga dibentuk suatu Panitia Ad Hoc untuk mentjari bentuk kerdja-sama „Sukarno-Hatta” jang diketuai oleh Anggota Ahem Erningpradja. Anggota²nja ada 8 orang ialah :

Anwar Tjokroaminoto, Achmad Sjaichu, Mr. Memet Tanumidja, Asrarudin, Katamsi Sutisna Sendjaja, M. Siregar, Anwar Harjono dan I.J. Kasimo.

Panitia Ad Hoc ini jang diberi nama djuga „Panitia Sembilan” memberikan laporannja jang pertama dalam rapat Pleno tanggal 16 Desember 1957. Oleh karena Panitia belum berhasil mendjalankan tugasnja, akan tetapi masih melihat titik terang untuk dapat menemukan hasil jang njata, maka pada tanggal 17 Desember 1957 rapat Pleno D.P.R. memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Panitia guna meneruskan tugasnja. Pada tanggal 14 Maret 1958 „Panitia Sembilan” memberikan laporannja jang kedua, akan tetapi djuga tidak mendapatkan hasil jang konkrit. Oleh karena itu setelah laporan diterima oleh D.P.R. diambil keputusan untuk membubarkan Panitia Ad Hoc tersebut.

E. Konsepsi Presiden.

Dalam suasana jang agak suram dalam tahun 1957 muntjul lah „Konsepsi Presiden”. Untuk mengetahui segala sesuatu mengenai Konsepsi Presiden ini, maka anggota D.P.R. Soetomo dan kawan²nja mengadakan interpelasi jang menghendaki supaja Pemerintah memberikan keterangan tentang Konsepsi Presiden itu dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat. Keterangan Pemerintah mengenai hal tersebut tidak pernah dilaksanakan dihadapan D.P.R. Presiden telah lebih dahulu mengumumkan Konsepsinja itu dihadapan Pemimpin² Partai dan tokoh² masyarakat di Istana Merdeka pada tanggal 21 Pebruari 1957.

Konsepsi ini banjak sekali mendapat perhatian dari partai² politik dan organisasi masa.

Pada prinsipnja Konsepsi Presiden ini, adalah usaha Presiden jang bertudjuan untuk menjelamatkan negara dari kesulitan² jang sedang dihadapinja. Adapun pokok² dari Konsepsi Presiden tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sistim Demokrasi Parlementer setjara Barat (demokrasi libe-

ral) tidaklah sesuai dengan kepribadian Indonesia. Oposisi di D.P.R. jang selalu berusaha menggulingkan Pemerintah adalah sesuatu jang tidak tjotjok dengan suasana kepribadian Indonesia tcrsbut. Oleh karena itu sistim Demokrasi Parleментар harus diganti dengan Sistim Demokrasi Terpimpin, demokrasi gotong rojong, yakni suasana demokrasi jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan.

2. Untuk melaksanakan sistim Demokrasi Terpimpin ini, maka perlulah dibentuk suatu Kabinet Gotong Rojong jang anggota²nja harus terdiri dari semua partai, dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan jang ada dalam masjarakat. Dengan melaksanakan Konsepsi gotong rojong, maka lenjaplah oposisi dalam D.P.R.

Perbedaan² pendapat jang ada dalam D.P.R. haruslah digunakan untuk mentjari perbaikan dan kemandjuan², bukan untuk semata-mata menjatuhkan pemerintah jang ada.

3. Pembentukan Dewan Nasional.

Anggota² Dewan Nasional terdiri dari golongan fungsionil dalam masjarakat. Tugas utamanja adalah memberi nasehat kepada Kabinet, baik diminta maupun tidak diminta. Golongan fungsionil itu adalah golongan buruh, golongan tani, golongan tjendikiawan, pengusaha nasional, pemuda, wanita, angkatan 45, alim ulama, Protestan-Katholik, orang jang dapat membawakan suara daerah, kepala staf angkatan, kepala kepolisian, Djaksa Agung dan beberapa Menteri.

4. Pembentukan Kabinet Kaki Empat.

Konsepsi Presiden itu menghendaki membentuk Kabinet kaki empat, dimana partai² besar turut serta didalamnya jaitu P.N.I., Masjumi, N.U. dan P.K.I., jang maksudnja untuk mentjiptakan kegotong-rojongan nasional.

Dewan Nasional merupakan pentjerminan dari masjarakat jang ada. Demikianlah isi pokok dari konsepsi Presiden jang telah diumumkannja pada tanggal 21 Pebruari 1957.

Untuk melaksanakan Konsepsi ini, maka kebulatan partai² politik merupakan suatu sjarat mutlak jang harus ada, terutama antara P.N.I., Masjumi, N.U. dan P.K.I. Tetapi hal ini tidak mungkin dapat ditjiptakan lagi, karena pengunduran² diri dari beberapa Menteri (Masjumi dan P.S.I. dari Kabinet

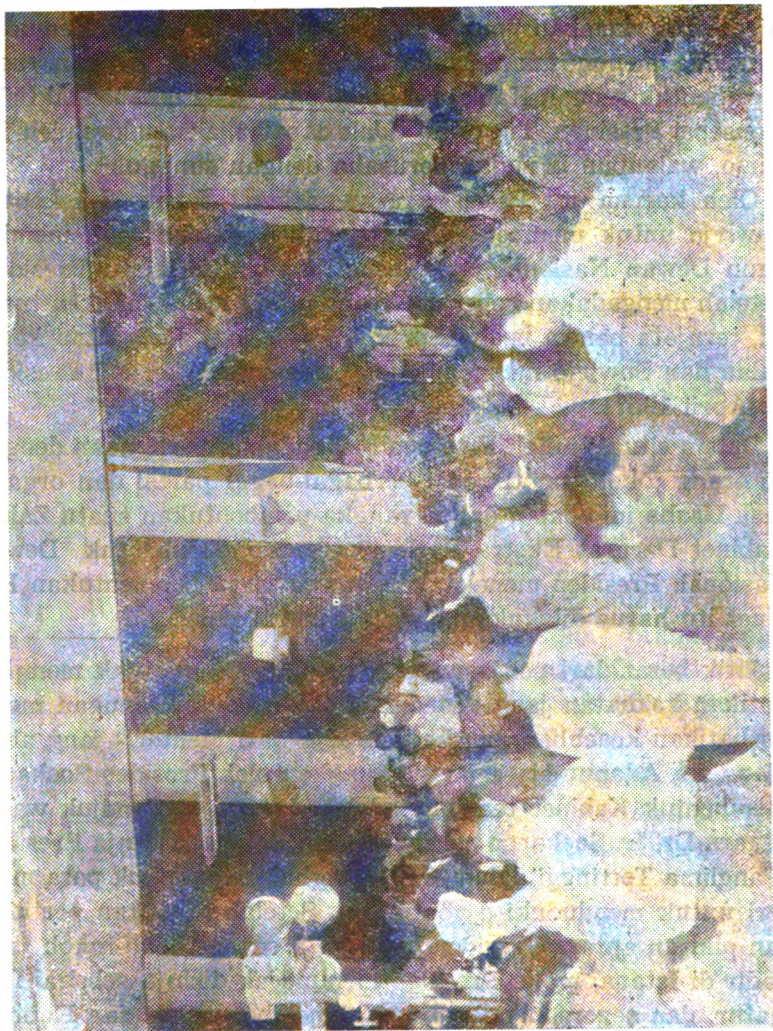
Ali Sastroamidjojo ke-II tidak dapat diatasi lagi. Usaha untuk mereshuffle Kabinet telah dilakukan, namun demikian krisis kabinet itu tidak dapat diatasi.

Oleh karena tidak adanya kebulatan pendapat antara partai dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-II ini, maka Kabinet menjerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Kemudian Presiden menunjuk Suwirjo sebagai formatur dengan tugas membentuk sebuah Kabinet sebagaimana yang dikehendaki oleh Konsepsi Presiden. Tugas ini tidak dapat dilaksanakan oleh Suwirjo, walaupun ia sudah berusaha dengan sungguh².

Oleh karena itu Presiden menugaskan sekali lagi kepada Suwirjo untuk membentuk suatu Zaken Kabinet dan membangun Dewan Nasional yang sesuai dengan Konsepsi Presiden. Setelah mengadakan beberapa usaha untuk melaksanakan tugas ini, ternyata bahwa usaha Suwirjo sekali lagi mengalami kegagalan dan Suwirjo mengembalikan mandatnya kepada Presiden (2 April 1957).

Dalam situasi inilah Presiden mengadakan pertemuan dengan 75 orang tokoh² politik dari berbagai-bagai partai dan organisasi. Usaha ini adalah dalam rangka pembentukan suatu Zaken Kabinet Darurat Ekstra Parlementer dan membentuk Dewan Nasional. Presiden menekankan bahwa tjara pembentukan Kabinet itu harus dilakukan setjara darurat pula.

Titik berat dari penjurusan Kabinet tersebut tidak memperhatikan kekuatan yang ada dalam D.P.R., tetapi dengan memperhatikan keachlian dan ketjakapan² dari Menteri² yang akan diangkat. Adapun tjara yang digunakan oleh Presiden Soekarno membentuk Kabinet tersebut adalah dengan menunjuk warga negara Dr. Ir. Soekarno sebagai formatur selanjutnya Presiden /Panglima Tertinggi dalam S.O.B. berhak menunjuk para menteri untuk menduduki djabatannya. Setelah diadakan pertukaran pikiran antara Presiden dengan 75 orang tokoh-tokoh yang hadir di Istana, maka Presiden menunjuk dirinja sebagai formatur, dan segera membentuk Kabinet baru. Susunan Kabinet Kerdja tersebut terdiri dari 24 orang Menteri dengan Ir. H. Djuanda sebagai Perdana Menteri, Hardi S.H. sebagai Wakil Perdana Menteri I. K.H. Idham Chalid sebagai Wakil Perdana Menteri II dan dr.J. Leimena sebagai Wakil Perdana Menteri III. Kabinet Kerdja ini dilantik pada tanggal 9 April 1957.



Resepsi peringatan Sewindu (8 tahun) D.P.R. Ketua D.P.R. Mr. Sarono menguraikan sejarah D.P.R. dan pekerjaan D.P.R. yang sudah diselesaikan. 24 Februari 1958.

Usaha² tersebut achirnja dapat menghasilkan terbentuknja Kabinet Karya dibawah pimpinan Perdana Menteri Djuanda.

Dalam sedjarah Parlemen ini kiranja perlu pula ditjatat suatu peristiwa dimana Ketua Parlemen telah mendjabat sebagai Pedjabat Presiden.

Sesuai dengan UU No. 29 tahun 1957 (pasal 2 ayat 2) tentang Pedjabat jang mendjalankan pekerdjaan djabatatan Presiden, djika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan, maka pada tanggal 20 Desember 1957, Ketua Parlemen Mr. Sartono telah dilantik sebagai Pedjabat Presiden.

Djabatatan sebagai Pedjabat Presiden tersebut telah diduduki-nja, ketika Presiden Soekarno mengadakan perdjalananan keluar negeri jaitu ; pada tanggal 6 Djanuari 1959 s/d 21 Pebruari 1959 ; kemudian pada tanggal 23 April 1959 s/d 2 Djuli 1959.

F. Pembahasan Penetapan U.U.D. 1945 Dalam Sidang Konstituante.

Pada tanggal 19 Pebruari 1959 Pemerintah (Kabinet Karya) telah mengeluarkan suatu keputusan tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang² Dasar 1945.

Keputusan Pemerintah itu disampaikan kepada Sidang D.P.R. pada tanggal 2 Maret 1959.

Baik keputusan Kabinet Kerdja tanggal 19 Pebruari 1959 maupun Keterangan Femerintah tanggal 2 Maret 1959 kepada D.P.R. tersebut keduanja telah disampaikan pula kepada Konstituante.

Kemudian Presiden pada tanggal 22 April 1959 menjampai-kan Amanat kepada Konstituante, jang memuat andjuran Kepala Negara dan Pemerintah untuk kembali kepada U.U. Dasar 1945.

Amanat Presiden tersebut diperdebatkan dalam suatu pemandangan umum dalam sidang Konstituante, pada tanggal 29 April sampai tanggal 13 Mei 1959 dimana telah berbitjara 57 orang anggota. Pemandangan Umum tersebut dijawab oleh Pemerintah pada tanggal 21 Mei 1959.

Pada pemandangan umum babak penegasan jang dilangsungkan pada tanggal 25 dan 26 Mei 1959 telah berbitjara 28 ang-

gota Konstituante jang kemudian dijawab oleh Pemerintah pada tanggal 27 Mei 1959.

Berdasarkan usul Panitia Musjawarah Konstituante pada tanggal 29 Mei 1959, rapat pleno Konstituante menjetudju untuk melangsungkan pemungutan suara atas usul K.H. Masjkur dkk. jang pada pokoknja mengusulkan agar Mukadimah Undang² Dasar 1945 jang diadjukan oleh Presiden itu dirubah dengan menjisipkan kalimat „..... dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk²nja”.

Selain dari pada itu diusulkan pula perobahan pasal 29 ajat (1) sehingga berbunji sebagai berikut :

„Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk²nja”.

Pemungutan suara tersebut berachir dengan 201 suara setuju dan 265 suara tidak setuju.

Selanjutnja pada tanggal 30 Mei 1959 rapat Konstituante mengadakan pemungutan suara untuk menetapkan U.U. Dasar 1945 menjadi U.U. Dasar R.I.

Dalam rapat sebelumnya telah ditetapkan, djika pada pemungutan tersebut tidak diperoleh suara sebanyak dua pertiga dari djumlah jang hadir, maka pemungutan suara kedua kalinya diadakan pada tanggal 1 Djuni 1959. Apabila pada pemungutan suara jang kedua masih belum pula diperoleh suara sebanyak dua pertiga dari djumlah anggota jang hadir, maka diadakan pemungutan suara untuk ketiga kalinya jaitu pada tanggal 2 Djuni 1959.

Pemungutan suara pada tanggal 30 Mei 1959 dilakukan setjara terbuka dengan dihadiri oleh 478 anggota. Hasil dari pemungutan suara tersebut adalah 269 suara setuju dan 199 suara tidak setuju.

Pada tanggal 1 Djuni 1959 untuk kedua kalinya sidang Konstituante mengadakan pemungutan suara dengan setjara rahasia. Dalam pemungutan suara itu diperoleh hasil 264 suara setuju dan 204 suara tidak setuju, sedangkan djumlah anggota jang hadir adalah 469 orang.

Pemungutan suara jang atas usul Ketua dan dengan persetujuan sidang pleno dilakukan setjara terbuka dilakukan untuk ketiga kali pada tanggal 2 Djuni 1959. Hasilnja adalah 263 suara setuju dan 203 suara tidak setuju, sedangkan anggota jang hadir tertjatat 468 anggota.

Dalam ketiga pengusutan tersebut ternyata tidak diperoleh suara sebanyak 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Mengingat situasi sidang Konstituante sudah tidak dapat menghasilkan keputusan diterimanya U.U. Dasar 1945 menjadi U.U. Dasar R.I., maka Ketua Rapat berpendapat, bahwa dalam keadaan yang demikian akan kurangnya manfaatnya untuk meneruskan pembicaraan mengenai masalah kembali kepada U.U. Dasar 1945 dalam bentuk sebagai yang diusulkan Pemerintah.

Dalam rangka usaha Pemerintah untuk mengendalikan keadaan, maka dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat tertanggal 3 Juni 1959 No. Prt/Peperpu/040/1959 tentang larangan adanya kegiatan² politik

Berhubung dengan itu maka atas usul Ketua berpendapat bahwa sebaiknya mulai saat itu dilangsungkan reses dengan ketentuan, bahwa masa reses itu akan dipergunakan untuk mengadakan tukar-pikiran antara Pimpinan Konstituante dan Pemerintah.

Sementara itu berbagai fraksi dalam Konstituante ber-turut² menyatakan tidak akan menghadiri sidang lagi.

Dalam rangka usaha Pemerintah untuk mengendalikan keadaan maka dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat tertanggal 3 Juni 1959 No. Prt/Peperpu/040/1959 tentang larangan adanya kegiatan politik.

Tukar pikiran antara Pimpinan Konstituante dengan Pemerintah berlangsung pada tanggal 27 Juni 1959. Pada kesempatan itu ditegaskan, bahwa andjuran untuk kembali kepada U.U. Dasar 1945 adalah gagasan Presiden, sehingga adalah sukar bagi Pemerintah untuk menentukan langkah² kelanjutan tanpa bermusjawarah dulu dengan Kepala Negara.

Perlu diketahui bahwa ketika itu Presiden Sukarno sedang berada di Djepang, maka diutuslah Menteri Penerangan Sudibjo untuk memberi laporan lisan kepada Presiden.

Kegagalan Konstituante untuk mengambil keputusan menyebabkan situasi politik mungkin hari mungkin tegang.

Maka pada tanggal 3 Juli 1959 setelah Presiden kembali ditanah air di depan Sidang Kabinet, Presiden menyatakan akan mendekritkan berlakunya lagi Konstitusi Proklamasi. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno Memproklamkan Dekrit Presiden untuk „Kembali kepada Undang² Dasar 1945”.

Bunyi selengkapnja Dekrit Presiden jang dikenal dengan Dekrit 5 Djuli 1959 adalah sebagai berikut :

**DEKRIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
TENTANG
KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.
DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA.
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,**

Dengan ini menjatakan dengan chidmat :

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, jang disampaikan kepada segenap Rakjat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tgl. 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang² Dasar Sementara ;

Bahwa berhubung dengan pernjjataan sebagian terbesar Anggota-anggota Sidang Pembuat Undang² Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang. Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh Rakjat kepadanya ;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan jang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur ;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi ;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-undang Dasar 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi tersebut ;

Maka atas dasar-dasar tersebut diatas,

**KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG,**

Menetapkan pembubaran Konstituante ;

Menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunja lagi Undang-undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : 5 Djuli 1959.

Atas nama Rakjat Indonesia :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Tertanda :

S U K A R N O

Pada hari berikutnya, jaitu tanggal 6 Djuni 1959 Perdana Menteri Djuanda menjatakan dihadapan D.P.R., bahwa berhubungan dengan berlakunja lagi Undang² Dasar 1945, maka Kabinetnja jang dibentuk berdasarkan U.U.D.-Sementara telah memutuskan untuk mengembalikan mandatnja kepada Presiden.

§ 6. HASIL-HASIL PEKERDJAAN.

Dewan Perwakilan Rakjat hasil pemilihan umum ini telah menghasilkan beberapa undang² jang penting dan beberapa usul resolusi.

Djumlah Rentjana Undang² jang dibitjarakan oleh Dewan Perwakilan Rakjat ini semuanya ada sebanjak 145 buah dan 113 buah diantaranya disetudjui mendjadi undang², 16 buah ditarik kembali dan 16 lagi belum selesai dibitjarakan. Usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakjat ada 8 buah dan disetudjui mendjadi undang² sebanjak 3 buah, 4 buah ditarik kembali dan 1 buah masih belum selesai dibitjarakan oleh Dewan Perwakilan Rakjat pada waktu itu.

Usul mosi ada 8 buah. Dua diantaranya disetudjui sebagai mosi Dewan Perwakilan Rakjat, satu ditolak, dan 5 buah ditarik kembali oleh pengusulnja.

Usul resolusi diajukan sebanyak 37 buah, 23 buah disetujui, 2 buah ditolak dan 12 buah ditarik kembali. Usul interpelasi ada 8 buah, 3 diantaranya disetujui, dan 3 buah ditarik kembali. Usul angket sebuah, yang pada waktu Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, belum lagi selesai melaksanakan tugasnya.

Diantara sekian banyak undang² yang telah dihasilkan beberapa diantaranya yang penting, ialah :

1. Undang² No. 15 tahun 1956 (L.N. No. 33) yakni Undang² tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Irian Barat.
2. Undang² No. 26 tahun 1956 (L.N. No. 67) tentang keanggotaan Republik Indonesia pada Badan Keuangan Internasional.
3. Undang² No. 32 tahun 1956 (L.N. No. 77) tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
4. Undang² No. 2 tahun 1958 (L.N. No. 5) tentang persetujuan perdjandjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tjina mengenai soal dwi Kewarganegaraan.
5. Undang² No. 13 tahun 1958 (L.N. No. 31) tentang persetujuan pampasan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Djepang.
6. Undang² No. 45 tahun 1958 (L.N. No. 161) tentang Rentjana Pembangunan Lima Tahun tahun 1956 s/d tahun 1960 yang tidak pernah dilaksanakan.

Adapun usul² resolusi yang diambil dalam masa Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum ini yang penting umpamanya :

1. Resolusi yang isinya menentang pertjobaan bom atom dan penggunaan tenaga atom tidak untuk maksud damai.
2. Resolusi tentang pernjataan simpati terhadap perdjoangan Kemerdekaan Rakyat Aldjazair.
3. Resolusi tentang pernjataan adhesi terhadap tindakan Pemerintah Mesir dalam menasionalisasikan Terusan Suez.
4. Resolusi yang memberikan dukungan sepenuhnya atas komunikasi bersama negara² Asia Afrika di P.B.B. yang memin-

ta djasa² baik Sekretaris Djenderal P.B.B. untuk pembebasan pedjuang² Aldjazair jang ditangkap Perantjis sewaktu menudju Konperensi Maroko.

5. Resolusi jang berisi tjelaan atas agresi Israel, Inggeris dan Perantjis terhadap Mesir jang telah menasionalisasikan Terusan Suez.
6. Resolusi tentang masaalah perdjoangan rakjat Hongaria dalam mentjapai aspirasi nasionalnja dan intervensi tentara Sovjet Rusia di Hongaria.
7. Resolusi tentang penarikan mundur tentara asing dari wilayah negara lain dan melarang penjediaan fonds rahasia untuk keperluan aktivitas jang bersifat tjampur tangan dalam urusan negara lain.

Disamping itu ada pula beberapa pernjjataan pendapat antara lain :

1. Pernjjataan pendapat mengenai seruan kepada Republik Rakjat Tjina dan kepada India supaya menjelesaikan masaalah perbatasannja jang sedang dipersengketakan dengan djalan damai.
2. Pernjjataan pendapat mengenai kutukan terhadap pertjobaan Bom Atom Perantjis digurun Sahara.
3. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara.

Kedjadian-kedjadian penting lainnja dalam masa Dewan Perwakilan Rakjat hasil Pemilihan Umum ini ialah disetudjuinja Rentjana Undang² tentang Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara pada tgl. 5 Maret 1957. Didalam Rentjana Undang² ini diterangkan bahwa tiap² tahun, rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara harus disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakjat sebelum tanggal 17 Agustus dari tahun sebelum tahun anggaran itu sendiri. Hal ini penting artinya untuk mendjaga djangan sampai terdjadi sesuatu Rantjangan Anggaran Belandja dan Pendapatan Negara belum lagi disahkan dengan undang², tetapi uangnja sudah habis dibelanjakan.

Dalam masa Kabinet Karya jang bekerdja dari tanggal 9 April 1957 sedjarah djuga mentjatat prestasi D.P.R. dan Pemerintah mengenai pengesahan Anggaran Belandja Negara ta-

hun 1959 jang merupakan Anggaran Negara pertama jang dapat dibitjarakan setjara normal dan disetudjui oleh D.P.R. sebelum tahun anggaran dimulai (disetudjui dengan perobahan² dalam rapat pleno D.P.R. tanggal 9 Desember 1958.

Baru mengenai Anggaran Belandja tahun 1959 Pemerintah berhasil mengadakan tepat pada waktunja ialah pada tanggal 15 Agustus 1958. Pada tanggal 19 Desember 1958 Anggaran termaksud disetudjui oleh D.P.R.

Pembitjaraan² Anggaran Belandja tahun 1959 itu dilakukan didalam dua babak dan diadjukan 5 usul amandemen, 2 usul mosi dan 10 usul resolusi. Usul amandemen jang diadjukan itu mengenai angka² anggaran, sebuah mengenai Kementerian Dalam Negeri, 3 mengenai Kementerian Pendidikan dan Pengadjaran dan 1 lagi mengenai Kementerian Veteran, sedangkan 1 usul amandemen mengenai Kementerian Pendidikan dan Pengadjaran ditarik kembali. Usul mosi jang diadjukan ialah, pertama mengenai perbaikan nasib pegawai Negeri dan kedua mengenai penghapusan pajak upah. Sepuluh usul resolusi jang diadjukan adalah :

1. mengenai kenaikan gadji pokok pegawai setjara integral,
2. mengenai penurunan harga obat²an hingga sampai pada kemampuan daja-beli rakjat,
3. mengenai usaha memperkuat industri rakjat dengan memenuhi kebutuhan pokok akan bahan industri dan perlindungan serta bimbingan jang njata dari fihak Pemerintah,
4. mengenai pemberian perlindungan kepada petani kelapa guna menaikkan taraf hidupnja dengan mengesjahkan berdirinja koperasi² kopra didesa, koperasi² pusat kopra di Kabupaten dan induk-koperasi kopra jang meliputi daerah kopra seluruh Indonesia,
5. mengenai djaminan tidak akan memperpanjang hak² pertambangan N.V. NIAM sesudah 31 Desember 1959 dan menjadikan pertambangan itu milik negara sepenuhnya dan diusahakan oleh Negara,
6. mengenai produksi minjak mentah dari N.V. CALTEX, a.l. agar Pemerintah dapat menguasai alat² dan tempat guna mendjamin kelantjaran exploitasi, pengolahan dan distribusi minjak hasil perusahaan,
7. mengenai usaha² mengatasi bahaya kelaparan,



Upatjara pelantikan Pedjabat Presiden Mr. Sartono digedung DPR tanggal 20 Desember 1957. Menurut Undang' yang berlaku waktu itu (UU No. 29 tahun 1957) Ketua D.P.R. memangku jabatan Presiden bila Presiden berhalangan.

"FOTO DEPPEN" 571220/FG 1.

8. mengundang Pemerintah supaya mendengar D.P.R. terlebih dulu untuk mengambil sikap terhadap desakan kongsi² minjak untuk menjelaskan harga² bensin dan minjak tanah dengan meningkatnja upah buruh dan kenaikan harga barang² lain,
9. mengenai desakan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali penetapan harga pembelian padi rakjat untuk tahun 1959, dengan mengikutsertakan D.P.R. untuk dimin-takan pertimbangannja,
10. mengenai desakan kepada Pemerintah untuk menghapuskan Djawatan Pengerahan Tenaga Rakjat.

Para pengusul amandemen, mosi dan resolusi diberi kesempatan untuk memberi pendjelasan dan kepada Pemerintah dibe-ri pula kesempatan untuk mengemukakan pendapatnja. Setelah diadakan musjawarah maka usul mosi tentang perbaikan nasib pegawai Negeri disetudjui dengan aklamasi dan mosi lainnja ditarik kembali. Kesepuluh resolusi disetudjui semuanya. 9 di-antarannja dengan aklamasi dan satu dengan pemungutan suara. Dari lima buah usul amandemen satu dioper oleh Pemerintah, 2 ditarik kembali dan mengenai 2 usul lainnja diadakan pemu-ngutan suara, dengan hasil 1 ditolak dan 1 lagi disetudjui. Ini adalah untuk pertama kali D.P.R. mengadakan amandemen ter-hadap rantjangan undang² Anggaran Negara.

§ 7. SEKRETARIAT.

Setelah D.P.R. hasil Pemilihan Umum terbentuk, organisasi Sekertariat tidak mengalami perubahan dan masih berdasarkan Surat Keputusan Panitia Rumah Tangga tanggal 10 Maret 1955 No. 1/Staf/1955. Sekertariat D.P.R. tetap dipimpin oleh Seker-taris Djenderal jang dipilih (Mr. Roesli) dan dibantu oleh bebe-rapa orang Staf Sekertaris Djenderal jaitu R. Akoep Goelange; Mr. Sumarsono Pringgodiredjo; R.S. Purwadi. Kemudian tenaga Staf Sekertaris Djenderal ditambah dengan Mr. Djoko Sumar-jono sebagai Sekretaris.

B A B V.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT PEMILIHAN UMUM BERLANDASKAN U.U.D. 1945.

22 Djuli 1959 — 29 Djuni 1960

§ 1. PEMBENTUKAN.

Dua belas hari setelah dikeluarkan Dekrit Presiden tgl 5 Djuli 1959 tepatnja pada tanggal 17 Djuli 1959, Ketua DPR menerima surat dari Presiden bertanggal 13 Djuli 1959 jang berisi pengharapan agar DPR bekerdja terus dalam rangka Undang² Dasar 1945. Surat Presiden tsb. kemudian dibitjarakan dalam suatu rapat pleno khusus jang dihadiri oleh 216 anggota pada tgl. 22 Djuli 1959. Dalam rapat pleno tsb. telah berbitjara 18 orang anggota jaitu :

A. Nunung Kusnadi (PSII),
Asraroeidin (Pendukung Proklamasi-P. Buruh),
R. Ido Garnida (Pendukung Proklamasi-PRIM),
Mr. Memet Tanumidjaja (P3RI),
R.H. Soetarto Hadisoedibjo (Katholik),
Dr. Sjech H. Djalaludin (PPTI),
F. Siradjudin Abbas (Perti),
Achmad Sjaichu (NU),
Mr. Soeprapto (Pembangunan),
Mr. Dr. A.M. Tambunan (Parkindo),
Soebadio Sastrosatomo (PSI).
Moh. Sardjan (Masjumi),
Hadji P.J. Princen (IP-KI),
Silas Papare (Persatuan),
Dr. M. Isa (PNI),
Siauw Giok Tjhan (Nasional Progresif),
M.H. Lukman (PKI) dan
Soetomo alias Bung Tomo (Pendukung Proklamasi-PR).
Semua pembitjara tsb. menjetudjui DPR bekerdja terus dalam rangka Undang² Dasar 1945.

Pada hari itu djuga Ketua DPR menjampaiakan surat kepada Presiden jang menjatakan bahwa DPR dalam rapat pleno pada hari itu telah mengambil keputusan dengan suara bulat, bahwa DPR bersedia bekerdja terus dalam rangka Undang² Dasar 1945.

Maka dikeluarkanlah Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 tgl. 22 Djuli 1959 yang menetapkan, bahwa sementara DPR belum tersusun menurut Undang² Dasar 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), maka DPR yang dibentuk berdasarkan Undang² No. 7 tahun 1953 menjalankan tugas DPR menurut Undang² Dasar 1945.

Perlu kiranya dikemukakan bahwa bentuk juridis yang dipergunakan untuk menjusun Dewan Perwakilan Rakyat 1959 ini ialah Penetapan Presiden, suatu bentuk peraturan negara yang baru. Menurut penjelasan Pen. Pres. No. 1 tahun 1959 :

„Penetapan Presiden ialah Peraturan Presiden sebelum adanya DPR dan MPR dan in concreto dalam rangka pelaksanaan Dekrit Presiden R I./Panglima Tertinggi Angkatan Perang tgl. 5 Djuli 1959. Tindakan yang dilakukan dengan Penetapan Presiden itu akan dipertanggung-jawabkan hanya kepada MPR yang melakukakan kedaulatan rakyat sepenuhnya”.

Dalam surat Presiden yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 20 Agustus 1959 No.2262/HK/59 diniatkan, bahwa semendjak berlakunya kembali Undang² Dasar 1945 dikenal bentuk Peraturan² Negara yang baru. Disamping 3 bentuk Peraturan² Negara menurut Undang² Dasar 1945 mulai sekarang timbul 5 Peraturan² Negara baru, jaitu :

1. Penetapan Presiden untuk melaksanakan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Djuli 1959;
2. Peraturan Presiden ;
3. Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Presiden ;
4. Keputusan Presiden ;
5. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri.

Untuk dapat membenarkan tindakan pengeluaran Penetapan Presiden tersebut dikemukakan alasan² seperti dapat dilihat dalam surat Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 26 Nopember 1959 No. 3639/HK/59 yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

„Dekrit Presiden (Keputusan Presiden No. 150/1959) dengan aklamasi diterima D.P.R. dan Pemerintah yang pada waktu itu ber-sama² melakukan kedaulatan yang ada ditangan rakyat. Pengakuan adanya kekuasaan Presiden yang luar biasa ini, diakui pula adanya kekuasaan Presiden untuk mengatur segala sesuatu



Djakarta, 23 Juli 1959.
 Pelantikan anggota² „DPR Pemilu” menjadi anggota DPR berlandaskan U.U.D. 1945
 oleh Presiden Sukarno di Istana. DPR 1945 ini umumnya tidak pandang. Pada tgl. 5
 Maret 1960 segera tugas dan kegiatannya dihentikan, untuk kemudian diganti dengan
 D.P.R.-G.R.:

„Foto Deppen 590723/FG 4-5.

jang sangat erat hubungannya dan sesungguhnya inhaerent dengan tindakan jang diambil dengan wewenang jang luar biasa itu. Tindakan Presiden ini didjelmakan dengan bentuk Penetapan Presiden, dsb."

Penetapan² Presiden ini kemudian mempunyai peranan penting dalam menentukan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia dan khususnya Dewan Perwakilan Rakyat pada masa² mendatang.

§ 2. KEANGGOTAAN.

Dari 272 Anggota DPR Pemilihan jang mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji pada hari pengambilan sumpah pada tgl. 23 Djuli 1959 tertjatat berdjumlah 259 orang.

Dengan keputusan Presiden No. 157 tahun 1959, Pimpinan DPR lama Mr. Sartono, H. Zainul Arifin, Arudji Kartawinata dan H. Zainul Abidin Ahmad ditetapkan ber-turut² sebagai Ketua, Wk. Ketua I, Wk. Ketua II dan Wk. Ketua III.

Anggota² jang pada waktu pelantikan tgl. 23 Djuli 1959 belum mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji, mengangkat sumpah atau djandji dihadapan Ketua atau Wakil Ketua DPR jang dikuasakan untuk keperluan itu oleh Presiden.

Hal ini diatur dalam Keputusan Presiden No. 160 dan 166 tahun 1959. Selandjutnja 3 anggota mengangkat sumpah dihadapan Ketua DPR, sehingga djumlah anggota DPR seluruhnja menjadi 262.

Dalam periode DPR 1959 ini Fraksi² jang merupakan penggabungan anggota² jang separtai/segolongan atau bersamaan azas tudjuan politiknya seluruhnja berdjumlah 18 buah; 4 anggota menjatakan tidak berfraksi.

Perimbangan susunan fraksi² adalah sbb. :

- | | |
|---|------------|
| 1. P.N.I. | 58 anggota |
| 2. Masjumi | 53 anggota |
| 3. N.U. | 45 anggota |
| 4. P.K.I. | 33 anggota |
| 5. Fraksi Nasional Progresif jang terdiri dari : | |
| partai ² /organisasi : | |
| Baperki, Permai, Acoma, Murba, P.R.N., Grinda, P.I.R. | |
| Wongso dan perorangan Prawirosoedarso 12 anggota. | |

6. Fraksi Pendukung Proklamasi terdiri dari :	
Partai Buruh, P.R.I.M., P.R.I. dan P.R.D.	5 anggota
7. I.P.K.I.	5 anggota
8. P.S.I.I.	8 anggota
9. Parkindo	8 anggota
10. Katholik	8 anggota
11. Fraksi Pembangunan	6 anggota
12. P.S.I.	5 anggota
13. Perti	4 anggota
14. Fraksi Gerakan Pembela Pantjasila	1 anggota
15. Fraksi P3R.I. (Persatuan Pegawai Polisi R.I.)	2 anggota
16. Fraksi Persatuan	3 anggota
17. Fraksi Perorangan PPTI	1 anggota
18. Fraksi P.I.R. Hazairin	1 anggota
19. Tidak berfraksi	4 anggota
Djumlah	262 anggota

§ 3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG D.P.R./ ANGGOTA.

Sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf 1, maka selama DPR belum tersusun menurut UUD '45' DPR Pemilu menjalankan tugas menurut UUD '45.

Undang-undang Dasar 1945 memuat ketentuan tentang kedudukan dan Tugas DPR sbb :

a. Majelis Permusjawaratan Rakjat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. (Pasal 2 ayat 1).

b. Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.

Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. (Pasal 5 ayat 1 dan 2).

c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian dengan Negara lain. (Pasal 11).

d. Susunan Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan Undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnja sekali dalam setahun. (Pasal 19 ayat 1 dan 2).

e. Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Djika sesuatu rancangan tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu (Pasal 20 ayat 1 dan 2).

f. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan Undang-undang.

Djika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu (Pasal 21 ayat 1 dan 2).

g. Dalam hal-hwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.

Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

Djika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus ditjabut. (Pasal 22 ayat 1, 2 dan 3).

h. Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang ; Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang ;

Matjam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang ;

Hal keuangan negara selanjutnja diatur dengan Undang-undang ;

Untuk memeriksa tanggung-djawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannja ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil Pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 23 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5).

Pada tgl. 24 Djuli 1959 Presiden/Perdana Menteri memberikan keterangan mengenai program kabinet didepan rapat plene DPR. Antara lain dikatakan bahwa „Revolusi Indonesia berada

dalam periode investment dan bahwa untuk pembangunan semesta yang meliputi segala bidang diperlukan iklim politik yang baik, harus ditinggalkan paham liberalisme dan dimasuki alam demokrasi terpimpin. Khusus mengenai DPR diharapkan adanya bantu-membantu antara DPR dan Pemerintah. Selanjutnya untuk melengkapi ketentuan dalam Undang-undang Dasar tsb. diatas maka menurut pasal 70 ayat 1 Peraturan Tata-tertib dinjatakan bahwa ;

Untuk dapat melaksanakan tugasnya dan melantjarkan kerja-sama dengan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. mengajukan pertanyaan ;
- b. meminta keterangan ;
- c. mengadakan penjelidikan ;
- d. mengajukan amandemen ;
- e. mengajukan usul pernyataan pendapat atau usul-usul lain.

Dewan Perwakilan Rakyat dapat juga mengajukan anjuran tjalon untuk mengisi sesuatu djabatan, djika hal demikian ditentukan oleh Undang-undang.

Hubungan dengan Pemerintah.

Kabinet baru yang diberi nama Kabinet Kerdja dibentuk oleh Presiden pada tanggal 9 Djuli dan dilantik pada tanggal 10 Djuli 1959. Dalam Kabinet Kerdja ini Presiden Soekarno juga mendjabat Perdana Menteri dan Menteri-menteri adalah Pembantu Presiden.

Sebagai Menteri Pertama diangkat oleh Presiden bekas Perdana Menteri Ir. H. Djuanda. Suatu djabatan baru dalam Kabinet ini ialah Menteri Penghubung DPR/MPR yang bertugas memperlantjar hubungan antara D.P.R. dan Pemerintah. Pada masa sebelumnya tiap-tiap Departemen mempunyai pegawai yang mendjabat sebagai penghubung antara Departemennja dengan Sekretariat D.P.R. dan pegawai-pegawai tersebut tetap melaksanakan tugasnja.

Pada tanggal 24 Djuli 1959 Presiden/Perdana Menteri memberikan keterangan atau amanatnja mengenai Program Kabinet Kerdja dalam Sidang Pleno.

Adapun Program Pemerintah terdiri atas 3 pasal yang dirumuskan sebagai berikut :

- Pertama : memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnja ;
- Kedua : menjelenggarakan keamanan rakyat dan Negara .
- Ketiga : melanjutkan perdjuaan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik (Irian Barat) pembebasan Irian Barat dari djadjahan Belanda.

Program tersebut biasa djuga disebut Tri Program jaitu sandang pangan, keamanan dan perdjuaan menentang imperi-
alisme.

Berbeda dengan D.P.R.² sebelumnya mengenai keterangan Pemerintah tentang program Kabinet tersebut tidak diambil suatu keputusan.

Kedudukan Keuangan Anggota.

Mengenai kedudukan keuangan para anggota masih tetap berlaku Undang-undang No. 81 tahun 1958 seperti telah diuraikan pada paragraf 3 Bab IV.

§ 4. PERATURAN TATA - TERTIB DAN PELAKSANA- ANNJA.

A. Penjusunan Peraturan Tata-tertib.

DPR Pemilu jang bekerdja dalam rangka UUD 1945, mulai tanggal 28 Djuli 1959 telah menjusun Peraturan Tata-tertibnja sendiri, berdasarkan Pen. Pres. No. 1/21 tahun 1959. Rantjangan Peraturan Tata-tertib tersebut disusun oleh Panitia Permusjawaratan dalam 26 kali rapat. Setelah rantjangan itu dimusjawarahkan dalam fraksi-fraksi, maka pada tgl. 9 Oktober 1959 rantjangan Peraturan Tata-tertib itu dibitjarakan dalam rapat Pleno dan disetudjui dengan suara bulat.

Peraturan Tata-tertib baru ini terdiri dari 10 Bab jakni :

BAB I.

Tentang surat-surat kepertjajaan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB II.

Tentang Badan-badan perlengkapan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB III.

Tentang pembentukan Undang-undang.

BAB IV.

Tentang mengajukan rantjangan Undang-undang.

BAB V.

Tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara.

BAB VI.

Tentang usaha-usaha Dewan Perwakilan Rakjat untuk melaksanakan tugas-tugasnja.

BAB VII.

Tentang persidangan dan rapat-rapat Pleno.

BAB VIII.

Tentang surat-surat masuk.

BAB IX.

Tentang fraksi-fraksi.

BAB X.

Ketentuan-ketentuan penutup.

Menurut Peraturan Tata-tertib baru itu diadakan penjederhanaan organisasi DPR. Bahagian-bahagian dan Seksi dihapuskan dan sebagai gantinya dibentuk Komisi-komisi. Tugas Komisi-komisi pada pokoknja adalah sama dengan tugas Seksi-seksi dahulu, ditambah dengan tugas melakukan pemeriksaan-persiapan atas rantjangan Undang-Undang menurut bidangnja masing-masing, jang dahulu dilakukan serentak oleh semua Bahagian-bahagian. Bidang pekerdjaan Komisi, seperti halnya Seksi-seksi dahulu, meliputi bidang pekerdjaan satu atau beberapa Departemen (dulu Kementerian). Semua anggota, ketjuali Ketua dan para Wakil Ketua mendjadi anggota salah satu Komisi. (Dalam D.P.R.² sebelumnja djuga mendjadi anggota Bagian/Seksi). Djumlah anggota Komisi-Komisi sedapat-dapatnja sama. Mereka ditundjuk oleh D.P.R. dengan memperhatikan keinginan masing-masing anggota atau Fraksinja.

Peraturan Tata-tertib baru ini, berbeda dengan peraturan sebelumnja, tidak lagi menggunakan istilah „hak” D.P.R. misalnya hak inisiatif, hak Amandemen, hak interpelasi, hak bertanja, hak angket dsb., tetapi menggunakan istilah „usaha”. Namun usaha D.P.R menurut Peraturan Tata-tertib baru pada pokoknja adalah sama dengan hak D.P.R. sebelumnja, hanya ada perbedaan-perbedaan istilah, umpamanja apa jang dulu disebut „angket” sekarang „penjelidikan”, dulu „mosi” atau „resolusi” sekarang „pernyataan pendapat”, dulu „interpelasi” sekarang „meminta keterangan”.

Peraturan Tata-tertib baru djuga tidak menjebut „Pemerintah”, melainkan „Presiden”, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi meskipun didalam praktek hubungan sehari-hari Pemerintah dengan D.P.R. Presiden mengusahakan segala sesuatu kepada Menteri jang bersangkutan.

Dengan berlandaskan pokok-pokok pikiran tersebut diatas maka dalam Peraturan Tata-tertib baru itu diusahakan penampungan sebaik-baiknya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip Demokrasi Terpimpin sebagai diartikan pada waktu itu.

B. Pembentukan Komisi-komisi dan Panitia-panitia :

Setelah Peraturan Tata-tertib disahkan maka dimulai dengan penunjukan badan-badan perlengkapan D.P.R. Diputuskan bahwa Panitia Permusjawaratan terdiri dari 23 anggota termasuk Ketua dan 3 Wakil Ketua D.P.R. Panitia Rumah Tangga terdiri dari 16 Anggota termasuk Ketua D.P.R. dan 3 Wakil Ketua.

Panitia Anggaran terdiri dari 13 anggota.

Komisi-Komisi berdjumlah 9 buah yakni :

- Komisi A (Keuangan dan Pemerintahan Agung).
- Komisi B (P.P. dan K.,) Penerangan, Penghubung DPR/MPR dan Penghubung Alim Ulama).
- Komisi C (Pertahanan, Kehakiman, Kepolisian dan Veteran).
- Komisi D (Perindustrian Dasar dan Pertambangan, Perindustrian Rakjat dan Perdagangan).
- Komisi E (Pertanian, Agraria, Transmigrasi/Koperasi/ Pembangunan Masyarakat Desa dan Pekerdjiaan Umum dan Tenaga).
- Komisi F (Perhubungan Darat dan P.T.T., Perhubungan Laut dan Perhubungan Udara).
- Komisi G (Sosial, Kesehatan, Agama dan Perburuhan/Urusan Pegawai).
- Komisi F (Dalam negeri Otonomi Daerah).
- Komisi I (Luar Negeri).

C. Penetapan Anggaran Belandja.

D.P.R. sekarang memandang perlu untuk mengadakan sebuah panitia tetap baru yang dinamakan Panitia Anggaran dan dibentuk untuk selama masa jabatan D.P.R. Panitia Anggaran ini berkewajiban : 1) mengikuti penjurusan rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara (oleh Pemerintah) dari mula dengan jalan mengadakan hubungan dengan Departemen-Departemen yang bersangkutan; 2) memberikan pendapatnja kepada D.P.R. mengenai rantjangan Anggaran yang oleh Presiden diajukan kepada D.P.R. untuk mendapat persetujuan; 3) mengikuti pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan; 4) mengajukan pendapatnja kepada D.P.R. tentang Perubahan Anggaran Belandja (anggaran tambahan); 5) meneliti pertanggungan-djawab Anggaran dan memberi laporan kepada D.P.R.; dan 6) memberikan pendapatnja kepada D.P.R. mengenai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Peraturan Tata-tertib baru prosedur pembitjaraan Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja diatur setjara tertentu, jaitu Panitia Anggaran-Komisi-komisi-Pleno, sedangkan dahulu prosedur ditetapkan setiap kali D.P.R. menghadapi suatu Rantjangan Anggaran (induk ataupun tambahan).

D. Pembentukan Undang-undang.

Sesuatu R.U.U. yang diajukan oleh Pemerintah kepada D.P.R. diserahkan kepada Panitia Permusjawaratan yang selandjutnja akan menetapkan perlu tidaknja dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap R.U.U. itu.

Djika dianggap pemeriksaan-persiapan tidak perlu mengadakan, R.U.U. itu dapat langsung dibitjarakan dalam rapat pleno.

Pemeriksaan persiapan tidak lagi dilakukan serentak didalam Bahagian² dikalangannja sendiri melainkan dilakukan dalam Komisi yang ber atau Panitia Khusus bersama-sama dengan Pemerintah dengan jalan bertukar-pikiran. Selandjutnja Komisi menundjuk seorang atau lebih diantara anggota-anggotanja sebagai pelapor. Laporan Komisi itu memuat pokok-pokok dan kesimpulan-kesimpulan pembitjaraan dalam Komisi. Setelah Laporan Komisi disampaikan kerada para anggota D.P.R. dan Pemerintah, pemeriksaan persiapan dianggap selesai.

Berdasarkan pembedjaraan didalam Komisi bila dianggap perlu Pemerintah dapat mengadakan perubahan pada naskah R.U.U. Setelah pemeriksaan-persiapan terhadap R.U.U. itu selesai dilakukan pembedjaraan didalam rapat pleno.

Dalam rapat pleno itu D.P.R. mengadakan pemandangan umum terhadap R.U.U. tersebut. Pembedjaraan-pembedjaraan dalam rapat pleno ini kemudian diakhiri dengan mengambil keputusan, apakah R.U.U. itu dapat diterima atau ditolak oleh D.P.R.

Prosedur pembedjaraan R.U.U. usul inisiatif dari D.P.R. adalah sama seperti pembahasan-pembahasan R.U.U. yang diajukan oleh Pemerintah.

R.U.U. usul inisiatif D.P.R. harus diajukan sekurang-kurangnya oleh lima orang anggota. Apabila D.P.R. menyetujui sesuatu rancangan usul inisiatif, maka Rancangan itu menjadi Usul Inisiatif D.P.R. Usul inisiatif tersebut kemudian dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan. Selama sesuatu R.U.U. usul inisiatif DPR belum disahkan oleh Presiden, D.P.R. berhak menariknya kembali.

E. Wewenang D.P.R.

Selanjutnya dalam rangka mengawasi kebidjaksanaan Pemerintah, D.P.R. mempunyai wewenang-wewenang sbb. ;

Wewenang tersebut ialah :

a. mengajukan pertanyaan.

Setiap anggota mengajukan pertanyaan-pertanyaan se-tjara tertulis kepada Pemerintah melalui Ketua.

b. Meminta keterangan (Interpelasi).

Sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota dapat mengajukan usul meminta keterangan kepada Pemerintah melalui Ketua. Setelah para pengusul (interplant) memberikan pendjelasan-pendjelasannya mengenai soal yang ditanyakan dalam rapat pleno, kemudian Pemerintah dipersilahkan untuk memberikan keterangan. Atas keterangan Pemerintah tersebut para pengusul (interplant) dapat meminta kepada DPR untuk menjatakan pendapatnya.

c. Mengadakan penjelidikan (angket).

Sekurang-kurangnya 20 orang anggota dapat mengusulkan untuk mengadakan penjelidikan (angket) oleh DPR mengenai hal-hal tertentu.

d. Mengajukan amandemen.

Sekurang-kurangnya 5 orang anggota dapat mengajukan usul amandemen (perubahan) terhadap sesuatu Rancangan Undang-undang.

e. Mengajukan Seseorang.

DPR juga mempunyai suatu wewenang untuk mengajukan tjalon untuk mengisi sesuatu jabatan yang lowong, apabila hal tersebut ditentukan oleh Undang-undang.

f. Mengajukan Usul-usul Pernyataan Pendapat.

Sekurang-kurangnya 10 orang anggota dapat mengajukan sesuatu usul pernyataan-pendapat atas usul-usul lain, baik yang berhubungan dengan soal yang sedang dibicarakan mengenai sesuatu persoalan yang mempunyai maksud tersendiri. Semua wewenang DPR yang merupakan kontrol terhadap kebidjaksanaan Pemerintah ini diatur dalam Peraturan Tata-tertib pada Bab VI, tentang Usaha-usaha D.P.R. untuk melaksanakan tugasnya.

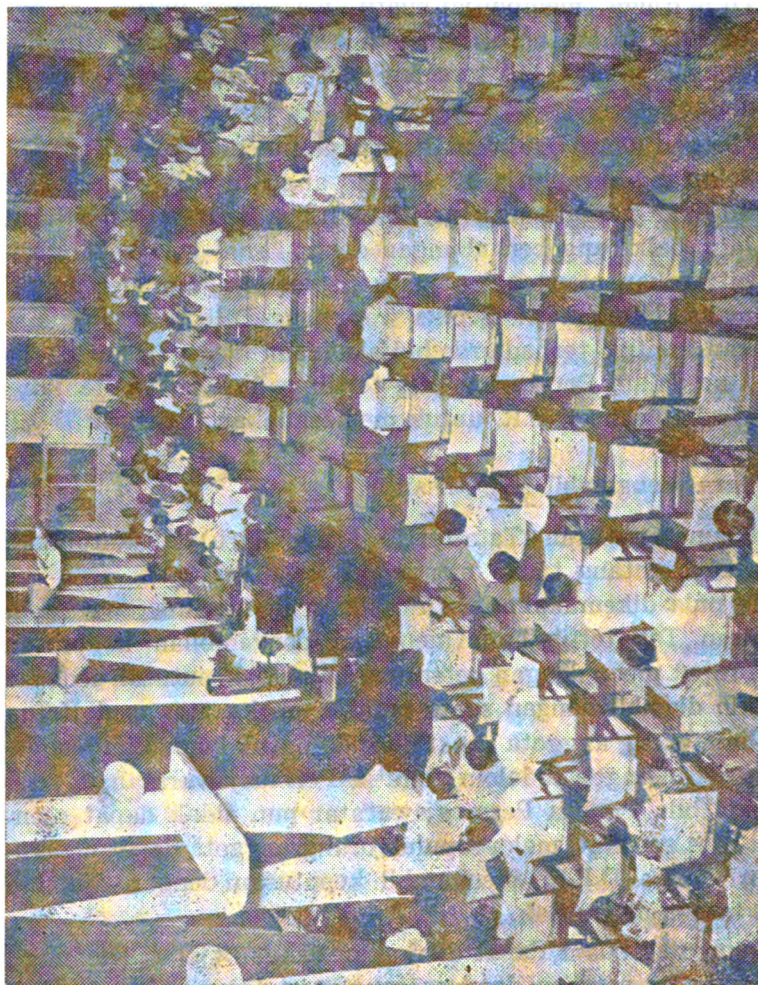
F. Tjara mengambil Keputusan.

Didalam peraturan Tata-tertib (yang baru) ditjantumkan ketentuan² tentang tjara² mengambil keputusan.

Baik pula dikemukakan, bahwa berbeda dengan yang lama, Peraturan Tata-tertib baru mengenai pengambilan keputusan dalam rapat pleno dengan ketentuan bahwa „keputusan sedapat mungkin diambil dengan suara bulat”, maka atas usul Ketua atau lima orang anggota rapat ditunda untuk kemudian mengadakan perundingan didalam Panitia Permusjawaratan.

Tetapi bila Panitia Permusjawaratan-pun tidak dapat men-tjapai kata sepakat, maka sepuluh orang anggota dapat mengusulkan supaya D.P.R. mengambil keputusan dengan djumlah suara terbanjak mutlak.

Pemungutan suara dapat dilakukan dengan tjara memanggil nama anggota seorang demi seorang atau dengan tjara berdiri. Djika suara yang dikeluarkan separoh dari djumlah anggota sidang atau kurang, maka keputusan adalah sah. Tetapi apabila pada waktu mengambil keputusan, djumlah suara sama banjak-nja, sedang rapat itu lengkap anggotanya, maka usul itu dianggap ditolak.



SIDANG ISTIMEWA MEMPERINGATI 10 TAHUN BERDIRINYA PARLEMEN
di GEDUNG DPR Lapangan Banteng pada tgl. 15 Februari 1960.—

G. Ketentuan Tentang Tahun Sidang.

Tahun Sidang dahulu tidak mempunyai arti khusus dan djatuh atau didjatuhkan bersamaan dengan tahun kalender (Djanuari-Desember). Menurut Peraturan Tata-tertib baru, Tahun-sidang D.P.R. adalah dari tanggal 15 Agustus sampai 14 Agustus tahun berikutnya. Pada tanggal 15 Agustus dimulailah persidangan D.P.R. dengan suatu rapat pembukaan tahun sidang.

Tahun Sidang itu sendiri dibagi dalam 4 masa persidangan, diselingi dengan reses-reses, jang tanggal mulai dan achirnja dapat disesuaikan dengan keadaan. Masa sidang pertama dan mungkin djuga kedua (Agustus-Desember) disediakan terutama untuk membahas Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara (Anggaran induk) sedangkan masa-sidang ketiga dan mungkin ke-empat (Djanuari-Djuli/Agustus) disediakan terutama untuk membahas Rantjangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara (Anggaran tambahan).

Pokok-pokok lain, berupa Rantjangan Undang-Undang biasa, pernyataan pendapat dan sebagainya, dibitjarkan diantara pembitjaraan Anggaran-anggaran Negara, atau sebagai bagian atau dalam rangka pembitjaraan Anggaran Negara.

Tata-usaha perundang-undangan dalam D.P.R. pun dimulai pada tanggal 15 Agustus, artinja pendaftaran pokok-pokok pembitjaraan ditutup pada tanggal 14 Agustus dan dibuka pada tanggal 15 Agustus.

§ 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH.

A. Lahirnja Manipol.

Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno mengutipkan pidato dalam rangka merayakan hari Kemerdekaan R.I. jang ke-empat belas.

Pidato tersebut jang berdjulud „Penemuan kembali Revolusi kita” kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik jang disingkat mendjadi Manipol.

Dengan berpegang pada pasal IV Aturan Peralihan U.U.D. 1945, Dewan Pertimbangan Agung pada sidangnya tanggal 23 s/d 25 September 1959 mengusulkan agar Manipol didjadikan garis-garis besar haluan Negara.

Selanjutnya dengan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960, Manipol ditetapkan menjadi Garis-garis besar daripada haluan Negara.

Kemudian pada tanggal 19 Nopember 1960 di Bandung, M.P.R.S. dalam rapat pleno ke-4 Sidang Pertama, menetapkan Manipol sebagai Garis-garis Besar daripada haluan Negara dengan Ketetapan No. I/MPRS/1960.

B. Pemerintah Menetapkan Pen. Pres. No. 7 Tahun 1959.

Pada tgl. 31 Desember 1959, Pemerintah telah mengeluarkan Pen. Pres. No. 7 tahun 1959 tentang sjarat-sjarat dan penjederaan kepartaian.

Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 ini dimaksudkan untuk mengatur perkembangan kepartaian sebagai alat demokrasi dalam suasana demokrasi terpimpin.

Pertimbangan Pemerintah mengeluarkan Pen. Pres. tsb. ialah karena keadaan politik tidak mentjapai kestabilan terutama setelah Konstituante membitjarakan Amanat Presiden yang mengandjurkan untuk kembali kepada UUD 1945. Maka Pemerintah memandang perlu mentjabut Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 mengenai andjuran Pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik.

Selanjutnya dalam dictum kedua dari Pen. Pres. No. 7 tahun 1959 itu a.l. ditetapkan bahwa partai harus menerima dan mempertahankan azas Negara Kesatuan R.I. menurut UUD-1945. Dan untuk dapat diakui sebagai partai, maka dalam anggaran organisasi harus ditjantumkan dengan tegas, bahwa organisasi itu menerima dan mempertahankan UUD-1945 serta mendasarkan program kerdjanja masing-masing atas Manifesto Politik Presiden tertanggal 17 Agustus 1959. Selain itu dimuat pula ketentuan, bahwa Presiden sesudah mendengar Mahkamah Agung danat melarang dan/atau membubarkan partai yang bertentangan dengan azas dan tudjuan Negara.

Pen. Pres. ini mengakibatkan dapat dibubarkannya partai-partai politik, yang akan mempengaruhi pula komposisi partai-partai politik dalam D.P.R.

C. Pertentangan antara D.P.R. dan Pemerintah.

Masa djabatan D.P.R. 1959 yang dimulai pada tanggal 22 Djuli 1959 berachir pada tanggal 24 Djuni 1960.

Berachirnja D.P.R. 1959 ini disebabkan oleh perselisihan pendapat antara Pemerintah dengan D.P.R. mengenai penetapan Anggaran Belandja Negara tahun 1960.

Pemerintah berpendirian bahwa pengeluaran-pengeluaran jang telah disusun dalam anggaran itu akan disesuaikan dengan penerimaan-penerimaan, dimana untuk mengatasi kekurangan penerimaan itu akan diambil langkah-langkah menaikkan pajak-pajak.

Pemerintah berpendirian bahwa penerimaan direntjanakan sama besarnya dengan pengeluaran jang telah disusun dalam anggaran itu sebesar 44 miljard rupiah dan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan penerimaan akan diambil langkah menaikkan pajak.

Sebaliknya pihak fraksi-fraksi dalam Parlemen berpendapat bahwa pengeluaran-pengeluaran negara harus disesuaikan dengan membatas sekitar 36 sampai 38 miljard rupiah dengan tidak mengadakan pajak-pajak jang terlalu berat.

Perselisihan faham mengenai soal anggaran belandja ini antara Parlemen dengan Pemerintah diachiri dengan tindakan penghentian kegiatan-kegiatan Parlemen jang ditetapkan dengan Penetapan Presiden R.I., No. 3 tahun 1960.

Pada tanggal 5 Maret 1960, Ketua Parlemen telah menerima Surat dari Presiden tentang dikeluarkannja Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960.

Bunji Penetapan Presiden tersebut adalah sebagai berikut :

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 3 TAHUN 1960
TENTANG
PEMBAHARUAN SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :

1. bahwa dalam mendjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakjat berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959, Dewan Perwakilan Rakjat sekarang ternjata tidak memenuhi harapan kami supaja bekerdja atas dasar saling membantu antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat sesuai dengan djiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945,

Demokrasi Terpimpin dan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959.

2. bahwa kerdja-sama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat jang tidak memenuhi harapan kami itu terutama disebabkan oleh susunan Dewan Perwakilan Rakjat sekarang, jang didasarkan atas Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
3. bahwa hal jang demikian itu menimbulkan keadaan ketatanegaraan jang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta menghambat lantjarnya pembangunan untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur.

Mendengar :

Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 5 Maret 1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penghentian pelaksanaan tugas dan pekerjaan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat sekarang.
- KEDUA** : Pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakjat berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dalam waktu jang singkat.
- KETIGA** : Penetapan Presiden ini berlaku mulai tanggal 5 Maret 1960.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 5 Maret 1960

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUKARNO.**

Penetapan Presiden itu disertai dengan pendjelasan sebagai berikut :

P E N D J E L A S A N

ATAS

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

**PEMBAHARUAN SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT**

Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 menetapkan bahwa sementara Dewan Perwakilan Rakjat belum tersusun menurut

Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar, maka Dewan Perwakilan Rakyat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1953 menjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam menunaikan tugasnya sedjak tanggal 22 Djuli 1959 ternjata bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat memenuhi harapan sebagaimana dinjatakan dalam Amanat Presiden pada tanggal 25 Djuli 1959, jaitu supaya Dewan Perwakilan Rakyat bekerdja atas dasar saling membantu antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan djiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945, Demokrasi Terpimpin dan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959.

Keadaan yang demikian itu pada dewasa ini sudah meningkat sehingga menimbulkan suasana ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta menghambat lantjarnya pembangunan untuk mentjapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berhubung dengan itu dipandang perlu mengeluarkan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960, yang menghentikan pelaksanaan tugas dan pekerdjaan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekarang dan mengusahakan pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam waktu yang singkat.

Dengan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960, Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana termaksud pada pasal 17 dan lain-lain Undang-Undang Dasar 1945 sebagai lembaga tidak dihapuskan.

Demikianlah bunji Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960.

Dikeluarkannya Pen. Pres. tersebut sangat tidak diduga-duga oleh Parlemen sehingga hal ini menimbulkan tanda-tanja dikalangan para anggota Parlemen.

Pada tanggal 7 Maret 1960, Parlemen mengadakan suatu rapat pleno tertutup untuk mendengarkan keterangan Ketua Parlemen Mr. Sartono tentang dikeluarkannya Pen. Pres. No. 3 tahun 1960.

Dalam keterangannya itu Ketua Parlemen telah memberikan beberapa tafsiran setjara terperintji mengenai diktum Pen. Pres. tersebut.

Antara lain dikemukakan bahwa jang dimaksud dalam dik-tum „Penghentian pelaksanaan tugas dan pekerdjaan anggota-anggota D.P.R.” bukan „D.P.R. dibubarkan” melainkan hanja „pelaksanaan tugas dan pekerdjaan” jang dihentikan.

Didalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 pasal 1 dite-tapkan bahwa „Sementara D.P.R. belum tersusun menurut Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar, maka D.P.R. jang dibentuk berdasar-kan UU No. 7 tahun 1953, mendjalankan tugas D.P.R. menurut Undang-Undang Dasar 1945”. Mengingat Penetapan Presiden ini, maka Pemerintah tidak mungkin dapat membubarkan D.P.R., sebelum ada perubahan dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 ini.

Disamping itu dikemukakan pula oleh Ketua Parlemen, bahwa ketentuan dalam pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 „segala Badan Negara dan Peraturan jang ada ma-sih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menu-rut Undang-Undang Dasar itu”.

Djadi sebenarnya tanpa Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 pun D.P.R. jang sedjak tanggal 22 Djuli 1959 sudah mendja-lankan tugas D.P.R. menurut Undang-Undang Dasar 1945 tidak mungkin dapat dibubarkan oleh Pemerintah.

Selandjutnja Ketua jang berbitjara atas nama Pimpinan Parlemen setelah mempeladjari Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 itu, terutama seperti tertjantum pada bagian konsideran-konsideran- jang berbunji „menimbulkan keadaan ketata-nega-raan jang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa serta menghambat lantjarnja pembangunan untuk mentjapai masjarakat adil dan makmur”, menjatakan bahwa apa jang dituduhkan atau sangkaan kepada Dewan Per-wakilan Rakjat itu adalah tidak adil. Karena semendjak bulan Djuli 1959 fihak Parlemen telah tjukup menundjukkan good will-nja, dimana selalu diusahakan adanja musjawarah untuk mentjapai suatu kompromi jang sebaik-baiknja dengan berpe-doman pada dasar fikiran „dapat menerima dan memberi”.

Tetapi kenjataannja fihak Pemerintah dalam pemitjaraan-pemitjaraan Anggaran Belandja Negara 1960, tidak ingin menundjukkan good will-nja. Dan tetap berpegang teguh pada pendiriannja bahwa Anggaran Belandja Negara 1960 itu tidak dapat dikurangi atau dirubah.

Djadi sebenarnja pangkal persengketaan antara Parlemen dan Pemerintah itu hanja berkisar pada perselisihan paham mengenai penilaian penerimaan dan pengeluaran Negara, dan sama sekali tidak bersangkut-paut dengan penilaian terhadap Manifesto Politik, Demokrasi Terpimpin atau djiwa semangat Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu adalah tidak adil kalau semua anggota D.P.R. dikwalifikasi „membahayakan persatuan dan keselamatan Negara” seperti dinjatakan dalam konsiderans Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960.

Demikianlah garis-garis besar daripada pernjjataan Pimpinan Parlemen didalam rapat pleno tertutup jang merupakan rapat terachir bagi D.P.R. jang telah bersidang sedjak 22 Djuli 1959 s/d 5 Maret 1960. Rapat itu atas usul anggota M.H. Lukman achirnja ditutup dengan menjanjikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan menjerukan „Hidup Republik Indonesia! Hidup Presiden Republik Indonesia! Hidup Persatuan Nasional Indonesia!”.

Selesai rapat pleno tertutup Pimpinan Parlemen kemudian mengadakan suatu konperensi pers jang dihadiri oleh pers dalam dan luar negeri.

Pernjjataan-pernjjataan jang diutjapkan oleh Ketua Parlemen Mr. Sartono didepan Konperensi pers pada pokoknja adalah sama seperti jang telah diutjapkan dalam rapat pleno tertutup.

Tetapi hasil dari konperensi pers itu tidak dapat dis'arkan dalam surat-surat kabar, berhubung ada tarangan dari pihak jang berwadjib dalam hal ini Kodam Djaya untuk menjiarkan suatu komentar mengenai Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960.

Setjara resmi DPR 1959 berachir pada tanggal 24 Djuni 1960

§ 6. HASIL-HASIL PEKERDJAAN.

Dalam waktu delapan bulan tidak banjak jang dapat dikerdjakan oleh D.P.R. Dalam bidang perundang-undangan hanja ada 5 buah jang dapat diselesaikan, jaitu :

- a. R.U.U. Tentang Persetudjuan perdjandjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu jang disetudjui oleh D.P.R. dalam rapat pleno tanggal 16 Oktober 1959 (U.U. No. 4 tahun 1960).
- b. Rantjangan Undang-Undang tentang Perdjandjian bagi hasil, disetudjui oleh D.P.R. pada tanggal 20-11-1959 (U.U.

No. 2 tahun 1960) jaitu Undang-Undang jang mengatur per-djandjian bagi hasil pemilik tanah dan penggarap.

- c. Rantjangan Undang-Undang tentang Pengesahan U.U. Da-rurat No. 3 tahun 1955 tentang penundjukan Pelabuhan Pa-lembang mendjadi perusahaan Negara dalam arti I.B.W. mendjadi Undang-Undang, disetudjui pada tanggal 30-11-1959 (U.U.-No. 3 tahun 1960) oleh D.P.R.
- d. Pada tanggal 4-12-1959 D.P.R. menjetudjui Rantjangan Un-dang-undang tentang perubahan Kitab Undang-undang Hu-kum Pidana (U.U. No. 1 tahun 1960).
- e. Anggaran tambahan tahun 1958 jang disetudjui oleh D.P.R. pada tanggal 3 Maret 1960, jang hanja berarti memenuhi formalitet perundang-undangan, karena uangnja sudah lama habis dibelandjakan.

Tiga buah usul inisiatif jang diadjukan belum sampai dapat di-bitjarakan. Usul pernjjataan Pendapat jang disetudjui ada 2 buah, jaitu :

- Pernjjataan Pendapat mengenai Seruan kepada Republik Rakjat Tiongkok dan India supaja menjelesaikan masalah perbatasan jang sedang dipersengketakan dengan djalan damai.
- Pernjjataan Pendapat mengenai kutukan terhadap pertjoba-an Bom Atom Perantjis di Sahara (disetudjui pada tanggal 3-3-1960).

Selama masa D.P.R. '59 Pemerintah telah 2 kali menjampai-kan Keterangannja, jaitu :

Pertama : Keterangan Pemerintah mengenai Program Kabi-net Kerdja pada tanggal 24-7-1959.

Kedua : Keterangan Pemerintah mengenai Keadaan Kea-manan pada tanggal 16-12-1959.

Perlu diterangkan bahwa masih ada sedjumlah pokok pem-bitjaraan jang belum terselesaikan, diantaranya jang dianggap penting pada waktu itu ialah R.U.U. Pokok Agraria.

§ 7. S E K R E T A R I A T.

Sekretariat dalam masa D.P.R. 1959 tidak mengalami peru-bahan. Susunan organisasinja masih sama seperti dalam masa DPR Pemilu jang ditetapkan dengan Keputusan P.R.T. No. 1/ Staf/1955 tanggal 10 Maret 1955.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG DJAMAN ORDE LAMA

(24 Djuni 1960 — 15 Nopember 1965)

§ 1. P E M B E N T U K A N.

Kegagalan sidang Konstituante seperti kita ketahui membawa akibat diproklamasikan oleh Presiden Sukarno suatu Dekrit Presiden „Kembali kepada Undang-undang Dasar 1945” pada tanggal 5 Djuli 1959. Hal ini ternyata membawa akibat jang langsung mengenai Dewan Perwakilan Rakjat baik terhadap susunannja maupun mengenai tjara bekerdjanja.

Demikianlah pada tanggal 24 Djuni 1960 keluarlah Penetapan Presiden No. 4/1960 jang mengatur Susunan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong. Penetapan Presiden ini merupakan kelanjutan daripada Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960, jang menghentikan pelaksanaan tugas dan pekerdjaan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat tahun 1959.

Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 itu maka pada tanggal 25 Djuni '60 berturut-turut dengan Keputusan Presiden No. 155 dan No. 156 oleh Presiden ditetapkan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakjat tahun 1959 serta pengangkatan anggota-anggota baru dari Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong.

Sesuai dengan keinginan Presiden dan sebagaimana diwujudkan dalam Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tersebut diatas maka Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong bukan hanya namanja jang baru tetapi susunannja baru dan berbeda pula dengan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat sebelumnya.

Istilah „Gotong-Rojong” ditambahkan dibelakang nama Dewan Perwakilan Rakjat untuk menekankan kehendak Presiden bahwa Dewan Perwakilan Rakjat jang sekarang ini harus menempuh tjara-kerdja jang lain daripada Dewan Perwakilan Rakjat dalam masa demokrasi-liberal. Presiden dalam Amanatnja pada Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 25 Djuli 1959 mengharapkan adanya kerdja-sama atas dasar bantu membantu antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat. Akan tetapi tjara-kerdja gotong-rojong jang demikian itu belum dapat diwujudkan dalam D.P.R. 1959. Maka oleh karena itu dibentuk

D.P.R.-G.R. jang memberikan suatu tjorak chas kepada Dewan Perwakilan Rakjat dalam periode ini, sedjalan dengan pemikiran Presiden untuk meninggalkan faham liberalisme dan memasuki alam „demokrasi-terpimpin”.

Adapun susunan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong tidak lagi didasarkan atas perimbangan kekuatan partai²²/organisasi² jang dihasilkan oleh pemilihan umum seperti dalam demokrasi liberal, melainkan diatur sedemikian rupa untuk mendjamin adanja kerdja-sama setjara gotong-rojong antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat. DPR-GR hanja dibenarkan terdiri atas wakil² dari Golongan² Politik, Golongan² Karya dan seorang wakil dari Irian Barat. Anggota², demikian pula Ketua dan Wakil² Ketuanja diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Selain daripada itu, sjarat² untuk dapat diangkat sebagai anggota ialah harus menjetudjui „USDEK”, jaitu Undang² Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Disamping itu harus bersedia turut serta melaksanakan Manifesto Politik (MANIPOL) 17 Agustus 1959.

Setelah nama para tjalon anggota diumumkan dan mereka dipanggil untuk berkumpul di Djakarta maka Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dilantik oleh Presiden di istana Negara pada tanggal 25 Djuni 1960. Hal ini dilakukan setelah anggota² masing² mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji jang ditetapkan dalam pasal 4 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960. Dalam Amanat Pelantikan tersebut Presiden sekaligus menunjuk sebagai Pd. Ketua dan Pd. Wakil Ketua ber-turut² anggota H. Zainul Arifin dan Arudji Kartawinata, masing² bekas Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II dari Dewan Perwakilan Rakjat dalam periode sebelum DPR-GR.

Selanjutnja dalam Amanat Presiden pada waktu pelantikan tersebut dinjatakan sebagai berikut :

„D.P.R.-G.R. mempunjai tugas, satu : membantu Pemerintah, artinja pula membantu kepada segenap rakjat Indonesia untuk merealisasikan USDEK, untuk merealisasikan Sosialisme-Indonesia, sebab untuk itulah rakjat berdiuang”.

Utjapan Presiden ini memberi gambaran tentang kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat pada waktu itu jang sekedar hanja mendjadi pembantu Pemerintah belaka. Ini adalah konsekwensi

daripada pelaksanaan Demokrasi Terpimpin atau Sosialisme Indonesia yang sudah njata sangat berbeda dengan pelaksanaan demokrasi parlementer.

„..... demokrasi terpimpin adalah satu demokrasi yang dengan tegas dan djelas dan tentu menudju kepada satu djurusan jaitu didalam hal kita : menudju kepada djurusan ter-selenggaranja amanat penderitaan rakjat atau sosialisme a'la Indonesia, atau sosialisme Indonesia”, demikian dinjatakan dalam Amanat Presiden tanggal 25 Djuni 1960 tersebut.

Dalam mewujudkan pola pemikiran Demokrasi Terpimpin itulah dianggap suatu keharusan oleh Presiden untuk setjara drastis merombak susunan dan tjara kerdja Dewan Perwakilan Rakjat.

§ 2. K E A N G G O T A A N.

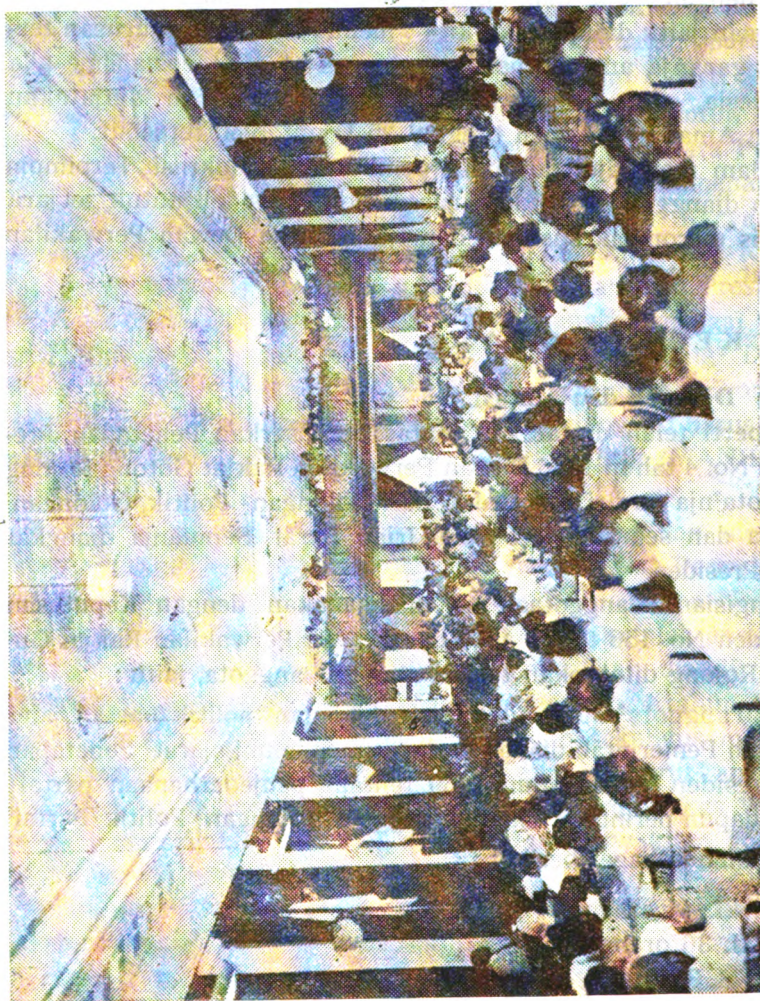
A. Djumlah dan Mutasi.

Seperti telah diutarakan diatas berdasarkan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong anggota²nja terdiri atas wakil² dari Golongan² Politik, Golongan² Karya dan seorang dari wakil Irian Barat. Semuanja diangkat oleh Presiden.

Pengisian keanggotaan ini dilaksanakan dengan Keputusan Presiden No. 156 tahun 1960 dan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ditetapkan terdiri atas 283 anggota, jaitu :

- a. 120 anggota² mewakili 9 buah Golongan² politik/partai², jang oleh Pemerintah dianggap dapat memenuhi sjarat² Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 tentang penjederhanaan partai². Adapun perintjian djumlah anggota Golongan² Politik/Partai² adalah sebagai berikut :

P.N.I. 44 orang,
N.U. 36 orang,
P.K.I. 30 orang,
Parkindo 6 orang,
Partai Katholik 5 orang,
P.S.I.I. 5 orang,
Perti 2 orang,
Partai Murba 1 orang dan
Partindo 1 orang.



Djakarta, 30 Djuni 1960 Sidang Pertama DPR Gotong Rojong dengan acting Ketua
Zainul Arifin.

„Foto Deppen 600630 FG I

Dalam perwakilan Golongan-golongan politik/partai-partai ini tidak terdapat wakil-wakil dari Partai Masjumi, P.S.I., Partai Buruh, P.R.I., dan partai² lainnja jang oleh Pemerintah dianggap tidak dapat memenuhi sjarat-sjarat Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959, jo. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-partai. Selandjutnja pembubaran atau penolakan pengakuan partai-partai tersebut dilakukan dengan bentuk Keputusan Presiden, jaitu:

- Keputusan Presiden No. 200 Tahun 1960 tanggal 17 Agustus 1960 jang dalam diktumnja berbunji: „Membubarkan Partai Politik Masjumi, termasuk bagian-bagian/tjabang-tjabang/rantingnja diseluruh wilajah Negara Republik Indonesia”.
- Keputusan Presiden No. 201 Tahun 1960 tanggal 17 Agustus 1960 jang dalam diktumnja menjebutkan: „Membubarkan Partai Sosialis Indonesia termasuk bagian-bagian/tjabang-tjabang/ranting-ranting diseluruh wilajah Negara Republik Indonesia.”
- Keputusan Presiden No. 129 Tahun 1961 tanggal 14 April jang dalam diktumnja berbunji: „Menolak mengakui sebagai Partai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960:
 1. Partai Sjarekat Islam Indonesia — Abikusno Tjokrosujoso
 2. Partai Rakjat Nasional — Bebasa Daeng Lalo
 3. Partai Rakjat Indonesia
 4. Partai Rakjat Nasional — Djodi Gondokoesoemo”.

Ketentuan-ketentuan selandjutnja mengenai Parai-partai jang telah dibubarkan diatur dalam pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960, sebagai berikut :

- (1) Keputusan Presiden jang menjatakan pembubaran suatu partai diberitahukan selekas mungkin kepada pimpinan partai itu.
- (2) Dalam waktu tiga puluh hari, terhitung mulai tanggal berlakunja Keputusan Presiden jang menjatakan pembubaran tersebut pada ayat (1) pasal ini, pimpinan partai harus menjatakan partainja bubar dengan memberitahukannja kepada Presiden seketika itu djuga.
- (3) Apabila tenggang waktu tersebut dalam ayat (2) pasal ini lam-

pau tanpa pernjataan partai termaksud, maka partai jang bersangkutan ialah perkumpulan terlarang.

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka Partai Sosialis dan Partai Masjumi menjatakan membubarkan diri termasuk bagian-bagian/tjabang-tjabang/ranting-rantingnja diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

- b. 152 anggota-anggota mewakili 13 Golongan-golongan Karya jaitu Angkatan Bersendjata (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian dan O.K.D./O.P.R.) 35 orang,

Tani 25 orang,

Buruh 26 orang,

Alim Ulama 31 orang (Islam 24, Protestan 3, Katholik 2, Hindu Bali 2),

Aangkatan '45 2 orang,

Wanita 8 orang,

Tjendekiawan/Pendidik 5 orang,

Koperasi 3 orang,

Pengusaha Nasional 2 orang,

Angkatan '45 2 orang,

Veteran 2 orang,

Seniman 2 orang dan

Wartawan 2 orang,

- c. Wakil Irian Barat seorang.

Dalam susunan anggota-anggota D.P.R.-G.R. Orde Lama jang telah dilantik oleh Presiden di Istana Negara pada tanggal 25 Djuni 1960 kemudian terdjadi perubahan-perubahan disebabkan adanja anggota-anggota jang meninggal dunia atau mengundurkan diri karena diangkat mendjadi Menteri, Duta Besar, atau karena sebab-sebab lain. Selandjutnja oleh Presiden diadakan pula penambahan anggota-anggota baru dengan mengangkat 5 orang wakil-wakil tambahan untuk daerah Irian Barat, setelah daerah tersebut kita kuasai kembali. Adapula penambahan anggota-anggota baru disebabkan adanja pengangkatan wakil-wakil dari Golongan-golongan jang belum atau belum tjukup wakil-wakil dalam Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, diantaranya wakil-wakil dari Partai IP-KI.

Dengan adanya mutasi dan tambahan tersebut, jumlah anggota² Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menjadi 299 orang, yaitu :

Golongan Nasionalis 49 anggota,

Golongan Islam 45 anggota,

Golongan Komunis 30 anggota,

Golongan Kristen-Katolik 13 anggota,

Golongan Karya 163 anggota (terdiri dari Sub-Golongan Karya A.B.R.I. 39, Sub Golongan Kerochani 31, Sub Golongan Pembangunan Spirituil 32, Sub Golongan Materiil 61 anggota) dan 1 anggota dari Partindo tidak masuk Golongan.

B. Golongan, dan Sub Golongan.

Dalam Keputusan Presiden No. 156 tahun 1960 ditetapkan adanya 9 buah Golongan² Politik/Partai², 13 Golongan Karya dan 1 wakil Irian Barat sehingga menjadi 23 Golongan². Akan tetapi beberapa minggu kemudian Presiden dalam suratnya tertanggal 12 Djuli 1960 No. 2292/HK/60 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong antara lain menjumpaikan Permintaan agar supaya diusahakan penjedherhanaan Golongan² sedjauh mungkin guna memperlantjar pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Dalam surat tersebut selanjutnya ditekankan supaya diichtiarkan hal² sebagai berikut :

- a. Golongan² politik disederhanakan menjadi Golongan Nasionalis, Golongan Islam, Golongan Kristen-Katolik dan Golongan Komunis ;
- b. Golongan² Karya merupakan satu Golongan Karya dalam D.P.R.-G.R. yang bilamana perlu dapat dibagi dalam Subgolongan-subgolongan Angkatan Bersendjata, Kerochani, Pembangunan Spirituil dan Pembangunan Materiil.

Surat itu akhirnya mengharapakan supaya Pimpinan D.P.R.-G.R. senantiasa memberi keterangan kepada Presiden mengenai perkembangan dalam ichtiar tersebut menuju kepada kesempurnaan pelaksanaan prinsip Demokrasi Terpimpin.

Harapan Presiden itu ternyata terlaksana dan jumlah 23 Golongan kemudian dapat disederhanakan menjadi 5 Golongan. Hal ini diputuskan dalam rapat Pleno D.P.R.-G.R. pada tanggal 14 Djuni 1960. 5 Golongan yang dimaksudkan itu adalah sebagai berikut :

1. Golongan Nasionalis jang terdiri dari wakil² dari P.N.I., Partindo dan Partai Murba;
2. Golongan Islam, jang terdiri dari wakil² N.U., P.S.I.I. dan Perti;
3. Golongan Kristen dan Katholik;
4. Golongan Komunis; dan
5. Golongan Karya, jang menghimpun semua Golongan² Karya dan mempunjai 4 Sub-Golongan, jaitu :
 - a. Sub-golongan Angkatan Bersendjata, dalam mana duduk 35 wakil² dari Golongan Angkatan Bersendjata seluruhnja dan wakil Golongan Veteran;
 - b. Sub-golongan kerochanian, jang menghimpun wakil² Alim Ulama (Islam, Kristen, Katholik maupun Hindu-Bali);
 - c. Sub-golongan Pembangunan Materiil, dalam mana duduk wakil² dari Golongan² Buruh, Tani, Koperasi dan Pengusaha Nasional; dan
 - d. Sub-golongan Pembangunan Spirituil, terdiri dari wakil² Golongan² Pemuda, Wanita, Tjendekiawan/Pendidik, Angkatan '45, Seniman dan Wartawan

Dengan tersusunnja keanggotaan dan golongan² Sub golongan dan dengan penundjukkan pimpinan sebagaimana termaksud diatas, D.P.R.-G.R. sudah dapat melaksanakan tugasnja seperti ditentukan dalam pasal 1 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 jang berbunji :

„Sementara Dewan Perwakilan Rakjat belum tersusun menurut Undang² sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Undang² Dasar, maka susunan Dewan Perwakilan Rakjat jang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 diperbaharui dengan menjusun Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong, jang mendjalankan tugas dan pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat menurut Undang³ Dasar”.

Karena anggota² dan pimpinan DPR-GR seluruhnja ditetapkan merangkap mendjadi anggota² Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara sesuai dengan pasal 2 Undang² Dasar 1945, maka mereka telah melakukan tugas sebagai anggota MPR-S sedjumlah tiga kali, jaitu :

- a. Sidang pertama M.P.R.S. dari tanggal 10 Nopember sampai 7 Desember 1960,

- b. Sidang kedua M.P.R.S. dari tanggal 15 Mei sampai 22 Mei 1963.
- c. Sidang ketiga M.P.R.S. dari tanggal 11 April sampai 18 April 1965.

C. P i m p i n a n.

Dibawah pimpinan Pd. Ketua dan Pd. Wakil Ketua maka pada tanggal 30 Djuni 1960 Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong untuk pertama kali mengadakan rapat pleno.

Mengenai Pimpinan ini terdjadi kemudian perkembangan jaitu dengan Keputusan Presiden No. 241 tahun 1960 tanggal 20 September 1960 Pd. Ketua H. Zainul Arifin dan Pd. Wakil Ketua Arudji Kartawinata masing² diangkat mendjadi Ketua dan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong. Untuk menjesuaikan dengan susunan Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, maka dengan Keputusan Presiden No. 339 tahun 1960 tanggal 26 Desember 1960 susunan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dilengkapi, sehingga terdiri dari 5 orang jaitu :

Ketua H. Zainul Arifin dan

para Wakil Ketua I.G.G. Subamia (Golongan Nasionalis),

Arudji Kartawinata (Golongan Agama),

M.H. Lukman (Golongan Komunis),

dan Let. Kol. (P) Mursalin Daeng Mamang-gung (Golongan Karya Angkatan Bersen-djata).

Dalam hubungan ini perlu diketahui bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong oleh Presiden diangkat dengan ketentuan harus ber-sama² merupakan kesatuan pimpinan dan oleh karenanja sedjak itu tidak disebut lagi urutannja.

Perubahan dalam kedudukan Pimpinan kemudian terdjadi dengan adanya regrouping Kabinet Kerdja, jaitu mula² Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong mendapat kedudukan sebagai Wakil Menteri Pertama (sewaktu regrouping pertama) dan selandjutnja sebagai Menteri Koordinator (sedjak regrouping kedua), sedangkan para Wakil Ketua berkedudukan sebagai Menteri².

Dengan meninggalnja Menko/Ketua H. Zainul Arifin pada tanggal 2 Maret 1963, terdjadi perubahan lagi sehingga sekarang

Pimpinan terdiri dari Menko/Ketua Arudji Kartawinata dan para Mentri²/Wakil² Ketua:

I.G.G. Subamia (Nasionalis),

H.A. Sjaichu (Agama),

M.H. Lukman (Komunis) dan

Laksamana Muda Laut Mursalin Daeng Mamanggung
(Karya ABRI).

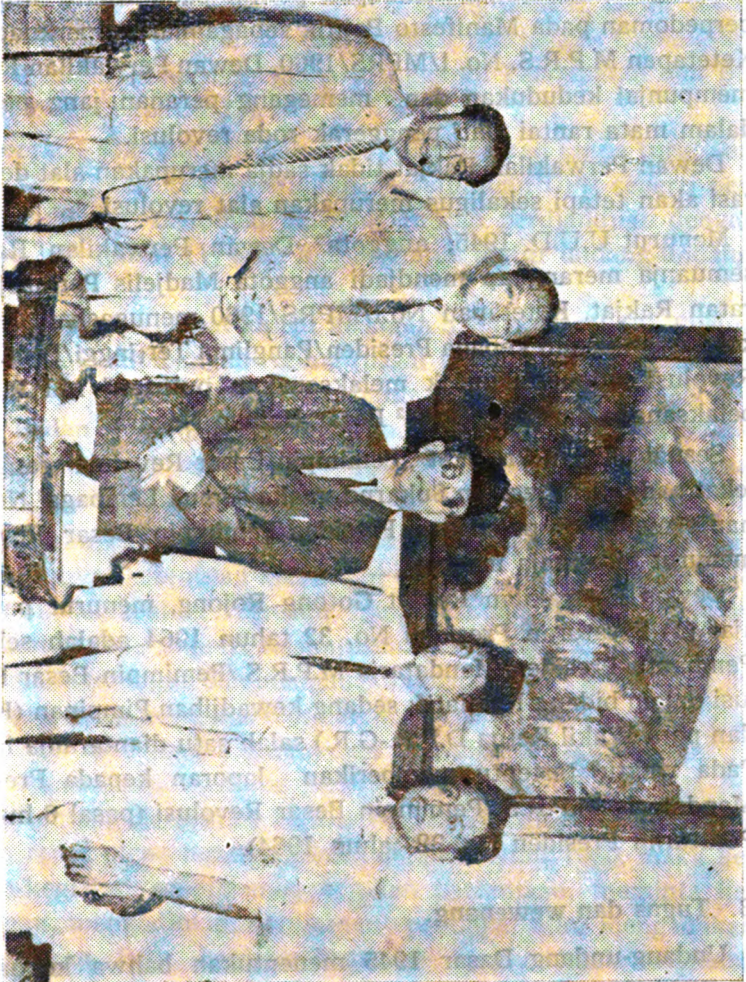
Sedjak dikeluarkannja Keputusan Presiden No. 339 tahun 1960 tanggal 26 Desember 1960 telah, anggota Pimpinan D.P.R.-G.R. diambil dari anggota² berbagai golongan. Hal tersebut merupakan salah satu realisasi idee Presiden Sukarno bahwa Revolusi Indonesia belum selesai, bahwa Revolusi Indonesia hanya dapat diselesaikan djika ada persatuan Nasional jang terwujud dalam aliran² Nas-A-Kom (Nasionalis, Agama, Komunis). Dan menurut kesimpulan analisa Presiden Soekarno, Nasakom adalah merupakan unsur² mutlak dalam persatuan Nasional. Dengan timbulnja peristiwa G.30 S/PKI., maka konsepsi Nasakom tidak berdjalan lagi.

§ 3. **KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG.**

A. Kedudukan.

Dalam penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 antara lain dinjatkan bahwa pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakjat berdasarkan Undang² Dasar 1945 harus dilakukan dalam waktu jang singkat. Berhubung dengan itu pada tanggal 24 Djuni 1960 dikeluarkan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang susunan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang menetapkan bahwa sementara Dewan Perwakilan Rakjat belum tersusun menurut Undang² sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Undang² Dasar, maka susunan Dewan Perwakilan Rakjat jang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 diperbaharui dengan menjusun Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, jang mendjalankan tugas dan pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat menurut Undang² Dasar 1945.

Selanjutnja disebutkan dalam diktum kedua Penetapan ini bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong harus terdiri dari golongan² politik, golongan² karya dan seorang wakil Irian



Pimpinan DPRGR th. 1964 dari kiri kenakan Menteri WK. Ketua Manluk-man, Menteri WK. Ketua IGG Subania, Menko Ketua Arudji Kartawinata, Menteri WK. Ketua H.A. Siahu, Menteri WK. Ketua Laksmu (L.) Mursalin. „Foto Deppen” 64-2538

Barat, jang semuanja harus menjetudjui Undang² Dasar 1945, Sosialisme a'la Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian sendiri serta bersedia turut serta melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959.

Sebagai kelanjutan kehidupan politik pada waktu itu jang berpedoman pada Manifesto Politik sebagaimana diperkuat oleh Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960, Dewan Perwakilan Rakjat mempunyai kedudukan dan memegang peranan jang penting dalam mata rantai alat² penggerak roda revolusi.

Dewan Perwakilan Rakjat tidak sadja merupakan alat demokrasi akan tetapi sekaligus merupakan alat revolusi.

Menurut U.U.D. 1945, anggota² Dewan Perwakilan Rakjat semuanja merangkap mendjadi anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Ketetapan No.I/MPRS/1960 menugaskan dengan kekuasaan penuh kepada Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Revolusi Indonesia untuk melaksanakan putusan² M.P.R.S. jo pelaksanaan daripada Garis² Besar Haluan Negara.

Sesuai dengan Predikat „Pemimpin Besar Revolusi” jang melekat pada diri Presiden Sukarno, maka semua Lembaga² Negara hanja mendjadi pembantu Presiden/Pemimpin Besar Revolusi menurut bidangnya masing².

Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 adalah sebagai Pembantu Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi dalam bidang legislatif; sedang kewadajiban Pimpinan (Ketua dan para Wakil Ketua D.P.R.-G.R.) salah satu diantaranya ialah : Pada waktu² tertentu memberikan laporan kepada Presiden Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi (pasal 6 huruf f Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964).

B. Tugas dan wewenang.

Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa kekuasaan negara jang tertinggi, kedaulatan rakjat, dilakukan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. M.P.R. ini terdiri dari anggota-anggota D.P.R. ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan wakil-wakil dari golongan-golongan.

Adapun D.P.R. merupakan badan legislatif jang membuat Un-

dang-undang bersama-sama dengan Pemerintah (pasal 5 jo pasal 20). Termasuk wewenang itu ialah mengesahkan/menolak Peraturan-peraturan Pemerintah pengganti undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pasal 22 Undang-undang Dasar disebabkan hal ihwal kepentingan yang memaksa.

Dalam pada itu D.P.R. menurut Undang-undang Dasar mempunyai wewenang membuat usul inisiatif rancangan Undang-undang (pasal 21) dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (pasal 23).

Beberapa soal pokok tidak dapat diselesaikan tanpa turut serta D.P.R. karena memerlukan persetujuan DPR seperti perjanjian perang, membuat perdamaian dan perdamaian dengan negara lain (pasal 11) atau karena harus diatur undang-undang, misalnja :

syarat-syarat dan akibat-akibat keadaan bahaya (pasal 12), Susunan Dewan Pertimbangan Agung (pasal 16), pemerintahan daerah (pasal 19), pajak, matjam dan harga mata uang dan keuangan serta Badan Pemeriksa Keuangan (pasal 23), susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman (pasal 24), kewarga-negaraan (pasal 26), syarat-syarat pembelaan negara (pasal 30).

Peraturan Tata-tertib D.P.R.,-G.R. sesuai dengan idee Manipol tidak memuat ketentuan-ketentuan tentang „usaha-usaha D.P.R. untuk melaksanakan tugasnja” yang termuat dalam peraturan Tata-tertib 1959 seperti usaha-usaha mengajukan pertanyaan, meminta keterangan dan mengadakan penyelidikan apalagi ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak parlementer (hak bertanya, hak interpelasi dsb) yang diatur dalam Peraturan Tata-tertib D.P.R. 1950. Akan tetapi menurut pendjelasan ketika itu daripada Pd. Ketua tentang Peraturan Tata-tertib D.P.R.-G.R. yang diberikan dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 13 Djuli 1960, maka kegiatan-kegiatan seperti mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, mengajukan pertanyaan pendapat atau mengadakan penyelidikan, jaitu kegiatan-kegiatan yang terletak dibidang pengawasan atas kbidjaksanaan Pemerintah, tidak dihapuskan begitu sadja, karena Komisi-komisi D.P.R.-G.R. dapat menampung kegiatan-kegiatan itu.

C. Hubungan antara D.P.R.-G.R. dengan Lembaga-lembaga Negara lainnja.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebagai Pembantu Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi dalam bidang legislatif dan yang anggotanya juga menjadi anggota M.P.R.S. adalah Dewan yang membantu pemerintah berdasarkan musjawarah atas azas kegotongroyongan dalam rangka Demokrasi Terpimpin menuju tji-tji-ta sosialisme Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya hubungan yang terjalin antara D.P.R.-G.R. sebagai Pembantu dalam bidang legislatif dengan Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi adalah tunduk sepenuhnya kepada Manipol dan Pedoman-pedoman pelaksanaannya. Sedangkan adanya predikat "Pemimpin Besar Revolusi" adalah juga sepenuhnya untuk memenuhi pedoman pelaksanaan Manipol bahwa "Suatu Revolusi hanya dapat berlangsung dan berakhir setjara baik, jika ada:

- Satu Pimpinan Revolusi yang revolusioner.
- Satu ideologi dan konsepsi Nasional yang revolusioner jelas, tegas, dan diperintji". (Lihat angka Romawi II, angka biasa 3 dalam Keputusan D.P.A. No. 1/Kpts/SD/1/61).

Pimpinan Lembaga Tertinggi, baik M.P.R.S., D.P.R.-G.R. D.P.A., B.P.K., bahkan juga Ketua Depernas (Dewan Perantjang Nasional) dan Sekdjen, Front Nasional, semuanya berstatus Menteri dan merupakan pembantu Presiden. Dengan demikian maka musjawarah diantara mereka tidaklah merupakan musjawarah antara pimpinan negara melainkan merupakan musjawarah antara Pimpinan Besar Revolusi dengan para pembantu-pembantunya menurut bidangnya masing-masing.

Bahkan juga dalam proses lahirnya suatu undang-undang, integrasi itu kita kenal dalam bentuk "Badan Perantjang Departemen" (Baperdep) yang bertugas membantu menjusun perentjanaan bagi masing-masing Departemen termasuk menyiapkan naskah suatu Rantjangan Undang-undang dalam bidang Departemen yang bersangkutan. Keanggotaan Baperdep adalah terdiri dari para ahli menurut bidangnya dan ditundjuk oleh Menteri. Baperdep dipimpin langsung oleh Menteri yang bersangkutan. Susunan keanggotaan Baperdep terdiri dari beberapa Kepala Biro dari Departemen, ahli-ahli dari luar (termasuk juga beberapa dari anggota-anggota D.P.R.-G.R.). Adapun duduknya bebe-

rapa anggota D.P.R.-G.R. dalam Baperdep dimaksudkan oleh Pemerintah bahwa dengan telah diikut sertakannya beberapa anggota D.P.R.-G.R. dari sedjak menjiapkan naskah suatu Rantjangan Undang-undang kiranya akan dapat lebih memperlantar lagi proses pembijtaraannya apa bila pada waktunya nanti Pemerintah menjampaiakan rantjangan atau R.U.U. kepada D.P.R.-G.R.

Sistim integrasi itu terbukti mendjurus kearah jang mengurangi ruang gerak, kedudukan, tugas dan wewenang D.P.R.-G.R. Hal ini disebabkan karena integrasi politik jang merupakan suatu keharusan dalam suasana gotong-rojong dalam praktek mendjadi integrasi-administratif dimana Pimpinan D.P.R.-G.R. jang mendapat sebutan Wampa/Menko/Menteri ternjata hanja merupakan pembantu Presidium dan tidak merupakan bantu membantu antara D.P.R.-G.R. dan Presiden, lebih-lebih dengan tidak adanya apa jang disebut Musjawarah Pemimpin Negara.

Djika ruang gerak, kedudukan, tugas dan wewenang D.P.R.-G.R. seperti diterangkan diatas sudah berkurang, ditambah pula dengan berkurangnya pandangan masjarakat terhadap D.P.R.-G.R., maka timbullah adanya anggapan bahwa D.P.R.-G.R. hanja merupakan Yes-Men sadja, sedangkan demokrasi dipimpin dalam pelaksanaannya lebih tjondong pada terpimpinnya dan sering terdjadi adanya pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

D. Kedudukan Keuangan.

U.U. No. 81 tahun 1958 jang mengatur kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota D.P.R. masih tetap berlaku.

Akan tetapi kemudian berkali-kali diadakan perubahan-perubahan dalam bidang kedudukan keuangan Ketua, Wakil-ketua dan Anggota D.P.R. tersebut. Perubahan jang pertama terdjadi pada tahun 1961 dengan Peraturan Pemerintah No. 209 th. 1961.

Sebagai alasan untuk mengadakan perubahan itu : pertama dari segi hukum karena Undang-undang No. 81 tahun 1958 masih didasarkan pada undang-undang Dasar Sementara 1950 jang sudah tidak berlaku lagi; kedua dari segi sosial-ekonomi karena kedudukan keuangan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan pada waktu itu dimana para pegawai sipil dan pedjabat² Kepolisian telah mendapat perbaikan dalam hal kedudukan keuangan, sehingga imbangannya antara kedudukan keuangan Ketua,

Wakil-ketua dan Anggota dengan pegawai negeri dan pedjabat² negeri tidak sesuai lagi.

Selain daripada itu dinjatakan oleh Pemerintah bahwa dibawah kekuasaan Undang² Dasar 1945, maka kedudukan keuangan termaksud tidak diharuskan ditetapkan dengan Undang² seperti semula, akan tetapi tjukup dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini sesuai pula dengan apa jang telah ditjantumkan dalam Pene-tapan Presiden No. 2 tahun 1959.

Dengan demikian maka kita akan melihat bahwa untuk selanjutnya dalam periode D.P.R.—G.R. zaman Orde Lama ini semua perubahan mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil-ketua dan Anggota D.P.R.—G.R. diatur setjara formil dalam bentuk Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden.

Materi daripada Undang² No. 81 tahun 1958 sama sekali tidak mendapat perubahan² setjara prinsipiil. Perubahan² jang dilakukan hanja mengenai djumlah uang jang diberikan dan berapa tambahan tundjangan. Hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Gadji dan tundjangan representasi Ketua D.P.R.—G.R. ditetapkan dengan mengingat imbalan dengan gadji dan tundjangan representasi Ketua M.P.R.S. jang kedudukan keuangannya lebih tinggi daripada Ketua D.P.R.—G.R. Karena gadji Ketua M.P.R.S. ditetapkan sama dengan gadji Menteri Pertama, maka gadji Ketua D.P.R. — G.R. disamakan dengan gadji Wakil Menteri Pertama ;
2. Gadji dan tundjangan representasi Wakil Ketua ditetapkan ketjuali dengan mengambil dasar imbalan dengan gadji dan tundjangan representasi Ketua, djuga mengingat pula imbalan luasnya pekerdjaan dan besarnya tanggung-djawab antara Wakil-ketua dan D.P.R.—G.R. dengan Menteri;
3. Bagi anggota uang kehormatan jang diperlukan sebagai gadji, dalam Peraturan Pemerintah itu disebut gadji-kehormatan, jang besarnya ditetapkan dengan memperhatikan imbalan dengan gadji Wakil-ketua. Karena Ketua dan Wakil-ketua D.P.R.—G.R. disamping gadji menerima pula tundjangan representasi, maka Ketua dan Wakil Ketua Komisi mengingat tugasnya dan kedudukannya menerima pula tundjangan representasi.

Demikian perubahan jang pertama diadakan sesudah mengindjak periode D.P.R.—G.R. Perubahan kedua dilakukan dengan Peraturan Presiden No. 26 tahun 1963 karena hanja menjangkut perubahan angka² jang mengenai :

1. uang harian penindjauan;
2. uang harian tambahan dilosmen tanpa makan;
3. uang harian tambahan djika menginap tidak dihotel/losmen;
4. biaja kendaraan lokal.

Perubahan ketiga dilakukan dengan Peraturan Presiden No. 16 tahun 1964. Perubahan inipun hanja meningkatkan beberapa ketentuan pembiajaan jaitu :

1. tundjangan keluarga dan kemahalan bagi Ketua D.P.R.—G.R.;
2. tundjangan representasi bagi Ketua/Wakil-ketua daripada Komisi/Golongan/Panitia Tetap;
3. uang harian penindjauan bagi Anggota;
4. biaja kendaraan lokal.

Perubahan keempat dengan Peraturan Presiden No. 43 tahun 1964 mengenai perbaikan angka presentasi tundjangan kemahalan umum bagi Ketua, wakil-ketua dan Anggota D.P.R.—G.R.

Perubahan kelima jang dilakukan dengan Peraturan Presiden No. 9 tahun 1965 menambah lagi djumlah tundjangan kemahalan umum untuk mengimbangi tingkatan inflasi pada waktu itu.

Demikian pula perubahan terachir dalam periode D.P.R.-G.R. djaman Orde Lama dengan Peraturan Presiden No. 19 tahun 1965 memberikan tambahan atas:

1. biaja kendaraan lokal ;
2. biaja penginapan di Djakarta.

Semua perubahan mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil-ketua dan Anggota tersebut diatas jang sedjak terbentuknja D.P.R.-G.R. dari tahun 1960 sampai pada tahun 1965 terdjadi enam kali karena penjesuaian dengan ladjunja inflasi pada masa itu.

§ 4. PERATURAN TATA-TERTIB DAN PELAKSANAANNJA.

A. Pembuatan dan perubahan^{nja}.

Dalam melakukan tugasnja D.P.R.-G.R. mula² menggunakan sebagai landasan kerdjanja Peraturan Tata-tertib jang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960 atas dasar pasal 6 Pen Pres No. 4 tahun 1960 Peraturan Tata-tertib tersebut tidak dibuat oleh D.P.R. sendiri seperti D.P.R.² sebelumnja.

Kemudian peraturan tata-tertib tersebut mengalami dua kali perubahan. Pertama kali segera sesudah Sidang Pertama MPRS selesai maka Pimpinan D.P.R.-G.R. mengajukan usul² penjemputnaan. Hal ini didorong oleh pesan Presiden dalam Amanat Penutupan Sidang Pertama M.P.R.S. jaitu „agar tjara M.P.R.S. bersidang mendjadi tjontoh bagi lembaga² demokrasi seterusnya”. Usul² tersebut disetujui oleh Pemerintah dan lahirlah pada tanggal 29 Desember 1960 Peraturan Presiden No. 28 tahun 1960. Peraturan ini memuat Peraturan tata-tertib D.P.R.-G.R. baru dan menggantikan Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960.

Penjemputnaan kedua diusulkan oleh Pimpinan D.P.R.-G.R. dengan pertimbangan, bahwa Peraturan Tata-tertib perlu menjerminkan lebih baik kedudukan D.P.R.-G.R. dan perkembangan demokrasi dipimpin. Dengan memperhatikan usul² itu Pemerintah pada tanggal 15 September 1964 menetapkan Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 ialah Peraturan tata-tertib ketiga jang digunakan sebagai pedoman kerdja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong.

B. Djenis, Djumlah Badan² Perlengkapan.

Untuk melakukan tugasnja D.P.R.-G.R. mempunjai Badan² perlengkapan jang hampir sama dengan Badan² perlengkapan dari D.P.R. tahun 1959, jaitu :

1. Panitia Musjawarah (bukan „Panitia Permusjaweratan” seperti dalam Dewan² Perwakilan Rakyat sebelumnja);
2. Panitia Rumah Tangga;
3. Komisi-komisi;
4. Panitia Anggaran;
5. Panitia Khusus;
6. Sekretariat, dan kemudian ditambah dengan
7. Golongan-golongan.

Adapun tugas-kewajiban daripada Badan² perlengkapan itu tidak sepenuhnya sama dengan Badan-badan yang namanya sama atau mirip dengan D.P.R. sebelumnya, lebih² setelah Peraturan tertib D.P.R.-G.R. mengalami dua kali perubahan.

Sesuai dengan perkembangan D.P.R.-G.R. sendiri pada umumnya juga susunan badan² perlengkapan D.P.R.-G.R. itu mengalami perkembangan/perubahan :

Panitia Musjawarah mula² terdiri dari Pimpinan D.P.R.-G.R. dan wakil² Golongan² dalam D.P.R.-G.R., tetapi kemudian selain Pimpinan D.P.R.-G.R. dalam panitia itu duduk juga Pimpinan Golongan² dan para Ketua Komisi². Jumlah dan lapangan kerja Komisi² selalu pula disesuaikan dengan susunan Kabinet. seperti misalnja :

Komisi A (Pemerintahan Agung), B (Keuangan) dan sebagainya (sesuai dengan susunan Pemerintah ketika itu), maka kemudian terjdadi perubahan² jaitu :

Komisi A (Kompartimen Luar Negeri),
B (Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri),
C (Kompartimen Pertahanan/Keamanan),
D (Kompartimen Pembangunan),
E (Kompartimen Industri),
F (Kompartimen Keuangan),
G (Kompartimen Kesedjahteraan),
H (Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat),
I (Kompartimen Agraria dan Pertanian) dan
J (Kompartimen P.D.K.).

Kemudian terjdadi lagi perubahan², jaitu :

Komisi A, Komisi Umum, yang meliputi : Sekretariat Negara, Kantor Urusan Pegawai, Lembaga Administrasi Negara, Dewan Bahan Makanan, M.P.R.S., D.P.A., Front Nasional, Upenas, Lembaga Tenaga Atom, Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa, Lembaga Pembina Jiwa Revolusi dan Penerangan;

Komisi B, Hukum dan Ketatanegaraan meliputi Bidang² Hukum, Imigrasi, Mahkamah Agung, Kedjaksaan dan Dalam Negeri;

Komisi C, Pertahanan Keamanan dan Luar Negeri, meliputi Bidang² Lembaga Pertahanan Nasional, Luar Negeri, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian, Veteran dan Demobilisan;

Komisi D, Ekonomi dan Keuangan, meliputi bidang² Perdagangan, Pertanian, Perhubungan, Keuangan, Badan Pengawas Keuangan, Lembaga Kepariwisataaan;

Komisi E, Pembangunan, meliputi bidang² Tenaga kerdja, Peker-djaan Umum dan Tenaga, Perindustrian Dasar dan Ringan, Perin-dustriian Tekstil dan Keradjinan Rakjat, Pembangunan Projek² Mandataris, Pertambangan dan Migas; dan

Komisi F, Kesedjahteraan, meliputi, bidang² Pendidikan dan Kebudayaan, Agama, Sosial dan Kesehatan.

Tentang susunan Pimpinan Komisi dapat dikemukakan, pada permulaannja tiap² Komisi dapat memilih sendiri untuk waktu satu tahun sidang, Ketua dan seorang atau lebih wakil ketuanja. Kemudian Pimpinan tiap² Komisi terdiri dari seorang Ketua dan 4 Wakil Ketua, jang ditetapkan oleh Pimpinan D.P.R.-G.R. setelah mendengar pertimbangan Panitia Musjawarah dan memper-hatikan tjalon² dari Golongan.

Dalam praktek diusahakan agar Pimpinan tiap² Komisi terdiri dari wakil² 5 Golongan jang ada dalam D.P.R.-G.R. Demikianpun mengenai susunan panitia Rumah Tangga, Panitia Anggaran atau Panitia² Khusus senantiasa diusahakan adanja kego-tong-rojongan dari 5 Golongan² dalam D.P.R.-G.R.

C. Tiara pemitjaraan dalam Badan-badan Perlengkapan.

Pada permulaannja kewadjiban Panitia Musjawarah ialah :

1. menetapkan atjara rapat²,
2. bermusjawarah dengan Pemerintah mengenai penetapan atjara² itu dan
3. memberikan pertimbangan kepada Ketua D.P.R.-G.R. tentang penetapan atjara rapat².

Kemudian tugas Panitia Musjawarah itu disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan tugas D.P.R.-G.R. maupun Pimpinan D.P.R.-G.R. sehingga mendjadi :

1. memberikan pertimbangan² kepada Pimpinan D.P.R.-G.R. untuk melantjarkan segala perundingan² atas dasar musja-warah untuk mentjapai mufakat,
2. bermusjawarah dengan Pimpinan D.P.R.-G.R. tentang atjara rapat² (jang ditetapkan oleh Pimpinan) dan pelak-sanaannja maupun tentang hal² lain.

Menurut rumusan tugas yang terakhir itu se-akan² tidak perlu diadakan musjawarah dengan Pemerintah, akan tetapi dalam praktek dan ini sesuai dengan kebiasaan sedjak D.P.R. tahun 1959, Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh Menteri Penghubung) senantiasa turut serta dalam penetapan atjara rapat² oleh Pimpinan D.P.R.-G.R. Djuga dalam rapat² Panitia Musjawarah sewaktu panitia itu memberikan pertimbangan²nja kepada pimpinan mengenai atjara rapat² atau pelaksanaannja, maka Pemerintah selalu ikut serta.

Panitia Rumah Tangga mula² berkewajiban :

1. memeriksa dan menetapkan Rantjangan Anggaran Belandja,
2. mengawasi dan minta pertanggungan-djawab dari Sekretaris Djenderal D.P.R.-G.R. tentang pimpinannja atas Sekretariat,
3. memberikan pertimbangan mengenai pengangkatan/pemberhentian pegawai² Sekretariat.

Dengan adanya peralihan beberapa wewenang² kepada Pimpinan D.P.R.-G.R., kemudian Panitia itu tidak lagi ikut mengawasi Sekretariat, tetapi bertugas sebagai badan pembantu dan badan pertimbangan bagi Pimpinan D.P.R.-G.R. mengenai segala urusan kerumah-tangga Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Tugas-kewajiban Panitia Anggaran ialah :

1. Mengikuti penjurusan Rantjangan Anggaran Negara dari semula,
2. Memberikan pendapatnja kepada D.P.R.-G.R. tentang Rantjangan Anggaran (setelah rantjangan itu dengan resmi disampaikan kepada D.P.R.-G.R.), baik Anggaran Induk maupun Anggaran Tambahan, dan tentang hasil² Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam mengikuti penjurusan Rantjangan Anggaran, mula² panitia itu hanya boleh mengadakan hubungan dengan Departemen Keuangan.

Tetapi kemudian Panitia diberi wewenang untuk menghubungi pula, selain Departemen Urusan Anggaran (Departemen baru yang dibentuk sesudah regrouping Kabinet) djuga Departemen² lainnja.

Panitia khusus, yang dibentuk setjara insidentil, tugasnja khusus, jaitu membitjarakan rantjangan undang² atau melakukan

tugas khusus lain yang diserahkan kepadanya oleh Pimpinan D.P.R.-G.R.

Tugas Komisi² D.P.R.-G.R. lebih kurang sama dengan tugas Komisi² D.P.R. tahun 1959, yaitu pada pokoknya :

1. mengadakan pemeriksaan² atas Rantjangan Undang² yang termasuk urusannya,
2. melakukan usaha² (dengan mengadakan rapat² dikalangan-annja sendiri, rapat² kerdja dengan Menteri² yang bersangkutan maupun dengan penindjaan² dan lain²) yang sedikit banyak mengandung pengawasan atas kebidjaksanaan Menteri² yang bersangkutan, mengajukan pertanyaan² tertulis, usul² pernyataan pendapat dan lain²,
3. melakukan tugas² atas keputusan D.P.R.-G.R.

Dari rumusan tugas Komisi² itu ternyata, bahwa sedikit banyak komisi² memang dapat menampung kegiatan² anggota² yang dahulu merupakan „hak² parlementer”.

Tugas-kewajiban Komisi² kurang lebih sama dengan tugas Badan² yang senama dari D.P.R. tahun 1959, tetapi tjara melakukan tugas itu, khususnya yang mengenai pemeriksaan-persiapan atas sesuatu Rantjangan Undang² djauh berbeda, seperti nanti akan diuraikan lebih lanjut dalam rangka pembentukan Undang-undang.

Golongan² D.P.R.-G.R. semula hanyalah bertugas memberikan pertimbangan² kepada Ketua D.P.R.-G.R. mengenai hal² yang dianggapnya perlu ataupun dianggap perlu oleh Ketua D.P.R.-G.R. Akan tetapi lambat laun Golongan² memegang peranan penting dalam proses pembentukan Undang², sehingga Golongan² sedjak berlakunya Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964, resmi menjadi pula Badan Perlengkapan D.P.R.-G.R. disamping Komisi², Panitia² Tetap maupun Panitia² khusus dan Sekretariat.

D. Tjara pemitjaraan dalam rapat² pleno.

Mengenai tjara-bekerdja D.P.R.-G.R. sendiri dapat dikemukakan, bahwa sedjak terbentuknja selalu diadakan usaha² oleh Pimpinan D.P.R.-G.R. bersama dengan Menteri Penghubung untuk dapat melaksanakan petundjuk-petundjuk Presiden yang diberikan dalam Amanat-pelantikan D.P.R.-G.R. Djadi sekalipun peraturan Tata-tertib D.P.R.-G.R. ke-I (Peraturan Presiden No. 14

tahun 1960), bahkan juga jang ke-II (Peraturan Presiden No. 28 tahun 1960) masih memberikan kemungkinan bagi D.P.R.-G.R. untuk mengadakan pemitjaraan dalam rapat² Pleno setjara leluasa (tanpa batasan djumlah pemitjara dengan kesempatan pula untuk mengajukan Usul² amandemen) tetapi dalam praktek hal itu tidak terdjadi. Pada waktu itu atas kebidjaksanaan Pd. Ketua H. Zainul Arifin dan Menteri Penghubung D.P.R.-M.P.R. Ds. W.J. Rumambi, jang kemudian disetudjui pula oleh Pimpinan Golongan dan Panitia Musjawarah D.P.R.-G.R. maupun Pemeintah, maka mengenai Rantjangan Undang² atau Pokok² pemitjaraan lain jang dihadapi oleh D.P.R.-G.R. ditempuh prosedur sabagai berikut :

Pertama-tama diadakan apa jang disebut „Pemeriksaan pendahuluan” oleh 5 Golongan² dikalanggannja sendiri masing², kemudian dilangsungkan „pemeriksaan-persiapan” oleh rapat Komisi jang bersangkutan atau Gabungan segenap Komisi² bersama² dengan Menteri jang bersangkutan setjara musjawarah untuk mendapatkan sedjauh mungkin kata mufakat. Dengan tertjapainja kata mufakat dalam rapat Komisi/Komisi² atau Gabungan segenap Komisi, maka dalam rapat Pleno D.P.R.-G.R. tidak perlu lagi diadakan pemitjaraan pandjang lebar dan kepada wakil² 5 Golongan², jaitu setiap Golongan seorang, diberi kesempatan untuk „mengutjapkan kata² terachir” sebagai kata persetudjuan.

Prosedure pemitjaraan seperti diuraikan diatas ini, jang berlaku bagi pemitjaraan Rantjangan Undang² atau pokok² pemitjaraan lain, misalnja Usul Pernyataan Pendapat, mulai dilaksanakan oleh D.P.R.-G.R. dalam bulan Agustus 1960, sebulan sesudah terbentuknja D.P.R.-G.R., dan dilaksanakan terus sedjak itu dengan sedikit perubahan chususnja dalam hal pemitjaraan Rantjangan Undang², jaitu :

- a. sebelum diadakan pemeriksaan-pendahuluan oleh 5 Golongan dikalanggannja sendiri, lebih dahulu Menteri jang bersangkutan (dalam hal pemitjaraan Rantjangan Undang² dari Pemerintah) memberikan pendjelasan tambahan dalam rapat Gabungan Segenap Komisi, jaitu sematjam rapat pleno tertutup D.P.R.-G.R., jang kemudian didjadikan Rapat Gabungan Golongan².

- b. mengenai pemeriksaan-persiapan itu mula² dibuat laporan (jaitu Laporan Gabungan Segenap Komisi² atau Laporan Komisi), tetapi sedjak berlakunya Peraturan Presiden No. 28 tahun 1960 Laporan itu diganti dengan apa jang disebut „Rumusan Pimpinan D.P.R.-G.R.‟, jaitu suatu uraian tentang djalannja dan hasil² musjawarah dalam pemeriksaan persiapan jang disusun oleh Pimpinan D.P.R.-G.R. berdasarkan Laporan Komisi².

Dengan adanja perubahan² itu, maka prosedur pembentukan Undang² jang pada umumnja (dengan penjesuaian sekedarnja) djuga berlaku untuk penjelesaian pokok² pemitjaraan lainnja, mendjadi sebagai berikut :

1. Pendjelasan² tambahan oleh Pemerintah/Pengusul mengenai Rantjangan Undang² atau usul jang sedang mendjadi pokok-pemitjaraan dalam rapat Gabungan Golongan² (rapat pleno tertutup);
2. Pemeriksaan-pendahuluan oleh 5 Golongan² dikalanganja sendiri masing²;
3. Pemeriksaan persiapan dalam Komisi/Komisi² jang bersangkutan atau (umumnja mengenai pokok pemitjaraan jang dianggap penting sekali atau meliputi bidang Komisi/Komisi²) dalam rapat Gabungan Komisi².

Pemeriksaan persiapan itu dilakukan setjara musjawarah dengan Menteri jang bersangkutan, sehingga tertjapai kata mufakat. Mengenai pemeriksaan-persiapan itu dibuat Rumusan Pimpinan dengan menggunakan Laporan Komisi atau Laporan Gabungan Segenap Komisi² sebagai bahan.

4. Rapat pleno D.P.R.-G.R., dimana diambil keputusan tanpa pemungutan suara, setelah ber-turut² dibatjakan Rumusan Pimpinan oleh Ketua Komisi (pernah pula oleh salah seorang dari Pimpinan D.P.R.-G.R.), para djuru bitjara Golongan² menjampaikan kata-terachirnja dan Menteri jang bersangkutan memberikan sambutan sekedarnja.

Prosedure pemitjaraan dalam 4 tingkat itu menundjukkan bahwa titik berat pekerdjaan D.P.R.-G.R. tidak dilakukan dalam rapat pleno, seperti Dewan² Perwakilan Rakjat jang ada sebelumnja, melainkan dalam Komisi/Komisi² jang bersangkutan, Gabungan Segenap Komisi² ataupun dalam suatu Panitia Khusus jang sengadja dibentuk untuk mengadakan pemeriksaan-

persiapan terhadap Rantjangan Undang²/Soal² tertentu. Dalam musjawarah pada tingkat pemeriksaan-persiapan itu diusahakan benar² oleh para anggota dan Menteri jang bersangkutan untuk menjempurnakan Rantjangan Undang²/Usul jang dihadapi, sehingga tertjapai kata mufakat, baik mengenai prinsip² jang terkandung didalamnya maupun mengenai pasal² atau rumusannya.

Andaikata belum ataupun tidak dapat ditjapai kata mufakat, hal ini hanjalah terdjadi satu dua kali, maka Pimpinan D.P.R. G.R. turut tjampur dan mengusahakan tertjapainya kata mufakat, biasanya dengan bantuan Panitia Musjawarah, Pimpinan Golongan² dan/atau dengan mengadakan pertemuan² informil antara pihak² jang bersangkutan.

Setelah dilaksanakan beberapa tahun, maka untuk menyesuaikan dengan perkembangan² jang terdjadi selama itu, prosedur pembijtaraan 4 tingkat itu disempurnakan lagi, jaitu dengan Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 (Peraturan Tata-tertib D.P.R.-G.R. ke-III) sehingga mendjadi 5 tingkat sebagai berikut :

1. Pertama-tama diadakan pemeriksaan-persiapan oleh 5 Golongan² dilingkungannya sendiri² (Istilah „Pemeriksaan-Persiapan” jang dahulu digunakan untuk menjebut pembahasan dalam Komisi² sekarang digunakan untuk pembahasan dalam Golongan²).
2. Selesai pemeriksaan-persiapan oleh Golongan², diadakan pembijtaraan tingkat II dalam rapat pleno terbuka (bukan rapat Gabungan Golongan² jang tertutup, dimana Pemerintah memberikan pendjelasan tambahan dan para anggota mengajukan pertanyaan² untuk didjawab oleh Pemerintah).
3. Pada pembijtaraan tingkat III Golongan² mengadakan rapat² lagi (suatu tingkat baru) untuk menjimpulkan pembijtaraan tingkat II guna didjadikan bahan dalam pemusjawaratan selandjutnja oleh para anggotanja.
4. Pembijtaraan tingkat IV dilakukan dalam Komisi/Komisi² jang bersangkutan, Gabungan segenap Komisi ataupun Panitia Khusus, ber-sama² dengan Pemerintah, dengan ketentuan, bahwa Pimpinan Komisi/Panitia Khusus harus berusaha agar tertjapainya kata mufakat: baik para anggota D.P.R.-G.R. (djuga anggota² jang duduk dikomisi lain) maupun Peme-

rintah dapat mengadakan perubahan pada Rantjangan Undang²/Usul jang dihadapi bersama. Djika tidak tertjapai kata mufakat, maka Pimpinan D.P.R.-G.R. membawa persoalannja dalam Panitia Musjawarah atau menjalankan kebijaksanaan lain untuk mentjapai kata mufakat.

5. **Pembitjaraan tingkat V dalam rapat pleno terbuka dilakukan sebagai berikut :**

Atas nama Pimpinan D.P.R.-G.R., salah seorang wakil Ketua D.P.R.-G.R. atau Ketua (Wakil Ketua) Komisi/Panitia Khusus jang bersangkutan membatjakan Rumusan Pimpinan mengenai pembitjaraan tingkat IV; para djuru bitjara Golongan² mengutjapkan kata² terachir; Pemerintah menjam-paikan sambutannja dan achirnja D.P.R.-G.R. mengambil keputusan.

Dalam pada iu perlu dikemukakan, bahwa tidak senantiasa pembitjaraan suatu Rantjangan Undang² atau Usul lain melalui 5 tingkatan pembitjaraan, karena Pimpinan D.P.R.-G.R. setelah mendengar Panitia Musjawarah, dapat menetapkan lain, jaitu meniadakan tingkatan² pembitjaraan jang dianggap tidak perlu atau dapat dilewati.

Usul Pernyataan pendapat jang sewaktu disusun dalam suatu komisi atau suatu Panitia Khusus telah mendapat dukungan dari semua Golongan² dalam DPR-GR dan disetudjui pula oleh Menteri jang bersangkutan biasanja langsung dibawa kedalam rapat pleno DPR-GR untuk disahkan.

Penjempurnaan terachir itu tidak membawa perubahan dalam hakekat dari prosedur : musjawarah dan kata mufakat tetap diusahakan dalam Komisi/Panitia Khusus setjara intern sehingga dalam rapat pleno terbuka jang terachir pada pokoknja hanja bersifat pengesahan dari hasil² musjawarah itu tanpa mengadakan perdebatan lagi.

E. Tjara menggunakan hak Budget dan hak² lain.

Tjara D.P.R.-G.R. melaksanakan wewenangnja menetapkan Anggaran Negara dan menjelesaikan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan, jang dapat dikatakan terletak dibidang kontrole atas kebidjaksanaan Pemerintah, pada pokoknja sama dengan tjara membentuk Undang² termaksud diatas. Hanja mengenai kedua hal itu turut serta pula Panitia Anggaran, jang lebih dahulu

harus memberikan mandatnja untuk disampaikan kepada (Komisi²) D.P.R.-G.R. Titik berat pekerdjaan dilakukan pula setjara musjawarah dalam Komisi² (jaitu mengenai anggaran dari Kompartemen/Kementerian jang berhubungan dengan Komisinja) atau Panitia Khusus pada pembijtaraan tingkat IV.

Usaha² lain dibidagn pengawasan, seperti hak mengadakan penjelidikan atas peristiwa/hal² penting dilakukan pula oleh Komisi², jaitu dengan mengadakan penindjauan ke-daerah, mengadjukan pertanjaan² kepada atau minta keterangan² dari Pemerintah berdasarkan surat² masuk jang diterima oleh D.P.R.-G.R. dan lain².

Mengadjukan pertanjaan² dan minta keterangan² dapat pula berlangsung dalam rapat pleno (jaitu pembijtaraan tingkat III). Akan tetapi berbeda daripada sewaktu Dewan² Perwakilan Rakyat jang mendahuluija, D.P.R.-G.R. sama sekali tidak mengadakan perdebatan² setjara liberal dalam rapat plenonja; djuga pada waktu pembijtaraan Rantjangan Anggaran Negara atau (kadang²) Keterangan Pemerintah mengenai program kerdja atau kebidjaksanaan jang telah didjalankannja, hanjalah 5 ataupun paling banjak 8 djurubitjara Golongan²/Sub² Golongan mengemukakan pendirian Golongannja masing².

Selain dalam Badan² Perlengkapan D.P.R.-G.R. atau pertemuan² informil jang disebut diatas, diadakan pula kerdja sama antara D.P.R.-G.R. dan Pemerintah dengan tjara membentuk Panitia-Bersama, dengan memasukkan anggota² D.P.R.-G.R. sebagai anggota suatu Panitia Negara, Badan Perantjang Departemen, Delegasi Pemerintah dan lain².

Kiranjja perlu dikemukakan, bahwa mula² D.P.R.-G.R. berdasarkan Peraturan Tata-tertib ke-I (Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960) masih melandjutkan kebiasaan dari D.P.R. tahun 1959 jaitu dengan mendengar Amanat Presiden pada permulaan tahun sidang (tanggal 15 Agustus) sebagai Kata-pengantar Nota Keuangan dan Rantjangan Anggaran Negara, akan tetapi kemudian kebiasaan itu tidak dilakukan lagi.

§ 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH

5. Sengketa Irian Barat.

Sesuai dengan usul dari D.P.A. maka Presiden Soekarno meng-

umumkan dalam pidato 17 Agustus 1960 mengenai pemutusan hubungan diplomatik antara R.I. dengan negeri Belanda. Dalam bulan Agustus ini atas andjuran Pimpinan D.P.R.-G.R., Komisi Luar Negeri mengadakan musjawarah dikalanganja sendiri maupun dalam rapat² kerdja dengan Menteri Luar Negeri. Inti pembitjaraan dalam musjawarah dan rapat² ini ialah dalam hubungannja dengan pemutusan hubungan diplomatik antara R.I. dengan negeri Belanda; diperluakannja usaha² untuk lebih meningkatkan lagi solidaritet rakjat² Asia-Afrika chususnja dalam membantu perdjjuangan Bangsa Indonesia mengenai penyelesaian masalah Irian Parat lewat forum P.B.B.; dan tentang tindakan gegabah pihak Belanda jang telah mengirimkan kapal induk „Karel Doorman” ke Irian Barat jang terlebih dahulu singgah dipelabuhan Yokohama Djepang.

Dalam waktu singkat berhasillah Komisi Luar Negeri D.P.R.-G.R., pada tanggal 29 Agustus 1960 menjusun dua buah Usul Pernjataan Pendapat jang didukung oleh Wakil² semua golongan² dalam Komisi; dan oleh Pimpinan D.P.R.-G.R. langsung dibawa kedalam rapat pleno terbuka pada tanggal 31 Agustus 1960 jang merupakan rapat pleno pertama D.P.R.-GR.

Dalam rapat pleno tersebut, dengan suara bulat D.P.R.-G.R. menjetudjui dua buah Usul Pernjataan Pendapat dari Komisi Luar Negeri mendjadi Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R.. setelah mendengar pendapat Pemerintah dan kata² terachir dari 5 djuru bitjara Golongan² dalam DPR-GR.

Menurut Pernjataan Pendapat jang pertama, D.P.R.-G.R. pada pokoknja mendukung sepenuhnya pemutusan hubungan diplomatik dengan negeri Belanda; disamping mendesak Pemerintah, agar mensita segala modal Belanda; mengandjurkan negara² serta rakjat dari negara² jang sedang berkembang, negara² Asia-Afrika chususnja, untuk memberikan solidaritasnja atas perdjjuangan Indonesia dalam mengembalikan wilajah Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan R.I.

Dalam Pernjataan Pendapat jang kedua, DPR-GR memprotes Pemerintah Djepang atas diizinkanja kapal induk Belanda „Karel Doorman” berkundjung ke Djepang, disertai andjuran kepada Pemerintah, agar mengadakan langkah² persiapan untuk pada waktunja mengambil tindakan² tegas terhadap Djepang dibidang diplomatik maupun ekonomi. Selandjutnja diserukan

kepada Parlemen Djepang untuk mendesak Pemerintahnja membatalkan izin kundjungan kapal induk Belanda tersebut, dan kepada rakyat Djepang, agar menundjukkan sikap solidaritetnja.

Dalam pidato 17 Agustus 1961 (Resopim) oleh Presiden diumumkan peningkatan politik konfrontasi terhadap Belanda, baik dibidang politik ekonomi, maupun (kalau perlu) militer.

Dalam hubungan ini oleh Presiden dinjatakan kesediaan Indonesia untuk mengadakan perundingan dengan Belanda atas dasar penjerahan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia. Akan tetapi sebaliknya pihak Belanda malahan sebulan kemudian mengadakan resolusi tentang Irian Barat sebagai masalah dekolonisasi dan hak menentukan nasib sendiri dalam sidang General Assembly P.B.B. 1961, yang bertujuan memisahkan Irian Barat setjara permanent dari Republik Indonesia, dengan mendirikan apa yang dinamakan „Negara Papua” atas azas „selfdetermination”.

Dalam resolusi yang diusulkan Belanda itu sama sekali R.I. tidak dibawa dalam pembicaraan bahkan tidak disebut², seolah² tak ada sengketa antara Indonesia Belanda mengenai Irian Barat; padahal djauh sebelumnya sudah diakui adanya sengketa antara dua negara yang merdeka dan berdaulat. Belanda memang bermaksud membawa Indonesia keforum Internasional sebagai terdakwa, maka konsentrasi delegasi Indonesia dalam sidang P.B.B. pada tahun itu hanya mengemban satu tugas, jaitu „menggagalkan usaha Belanda untuk mendirikan Negara Papua melalui P.B.B.”

Dalam menghadapi sikap Belanda yang demikian itu, D.P.R. memperkuat delegasi Indonesia ke Sidang umum PBB yang dimulai akhir September 1961, jaitu dengan mengirimkan anggota² H.A. Sjaichu (Ketua rombongan) Manai Sofian, Brig. Djen. Latief Hendraningrat dan Karel Supit sebagai penasehat² delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Soebandrio dalam usahanya menggagalkan politik dekolonisasi atau internasionalisasi yang dilakukan oleh Belanda di P.B.B.

Ketika delegasi Indonesia di P.B.B. sedang menghadapi Belanda itu, D.P.R.-G.R. atas usul Komisi Luar Negeri segera menjatakan pendiriannja dengan menetapkan Pernyataan Pendapat pada tanggal 13 Oktober 1961, yang pada pokoknja berisi :

1. Menjokong sikap tegas delegasi Republik Indonesia di P.B.B.;

2. Menolak keras pidato-singgasana Ratu Belanda dan Menteri Luar Negeri Belanda (J. Luns) yang menjalah-gunakan pengertian „selfdetermination”;
3. Menolak keras setiap bentuk internasionalisasi Irian Barat, karena melanggar keutuhan wilayah Republik Indonesia dan tidak akan membawa penyelesaian ,bahkan akan menjadi sumber ketidak-amanan yang lebih besar lagi bagi manusia ;
4. Menjokong politik konfrontasi Pemerintah dan mengandjurkan agar dalam waktu se-tjepatnja Irian Barat telah kembali kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia dengan djalan apapun djuga, sesuai dengan Perintah Hari-hari Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada hari Angkatan Perang tanggal 5 Oktober 1961 ;
5. Menjerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, agar setiap saat sedia menerima komando untuk membebaskan Irian Barat dari tjengkeraman Belanda.

Usaha Belanda di P.B.B. dapat digagalkan setelah delegasi Indonesia berdjuaug dengan sengit dalam forum internasional tersebut. Kemudian, pada bulan² berikutnya Belanda membentuk „Negara Papua” dengan Dewan Papua”, Lagu kebangsaan” dan „bendera Papua” di Irian Barat.

Atas dasar diperhebatnja konfrontasi itu maka lahirilah TRI-KORA, Tri Komando Rakyat. Amanat Trikora diberikan oleh Presiden pada tanggal 19 Desember 1961 di Jogjakarta pada hari peringatan penjerbuan Jogjakarta oleh Belanda tiga belas tahun sebelumnya.

Tri Komando Rakyat itu berbunji :

1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonialis;
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia;
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan Tanah Air dan Bangsa.

Malam harinja D.P.R.-G.R. mengadakan rapat istimewa untuk mendengarkan Keterangan Pemerintah mengenai persoalan Irian Barat dalam rangka landjutan Trikora itu. Pada malam itu djuga D.P.R.-G.R. menetapkan pernjjataan pendapatnja yang isi pokoknja :

1. Mendukung sepenuhnya Trikora dan siap-sedia melaksanakannya dengan segala konsekwensinya ; dengan seruan kepada seluruh rakyat, agar dengan jiwa dan semangat patriotik 17 Agustus 1945 bersiap sedia pula menghadapi segala kemungkinan serta bersatu-padu melaksanakan Trikora itu; ;
2. Menyetujui sepenuhnya pembentukan Dewan Pertahanan Nasional dan mendukung penuh pengangkatan P.J.M. Presiden Soekarno menjadi Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat ;
3. Menjatakan penghargaan atas perjuangan Delegasi R.I. di P.B.B. dan atas dukungan dari Pemerintah dan rakyat negara² sahabat terhadap perjuangan adil bangsa Indonesia mengenai Irian Barat;
4. Mengandjurkan kepada Parlemen dan rakyat Belanda agar memahami perjuangan Bangsa Indonesia itu.

Sambutan masyarakat atas Trikora, seperti antara lain diandjurkan oleh D.P.R.-G.R. dalam pernyataan pendapat itu, datang dari segala pendjuru tanah air. Ber-bagai² lapisan masyarakat, partai² dan organisasi² massa lainnya mengalir pernyataan² dukungan terhadap Trikora, disusul dengan pendaftaran sebagai sukarelawan untuk pembebasan Irian Barat. Sedang Angkatan Perang R.I., baik kesatuan²nja maupun pangkalan²nja telah pula mulai diperkuat.

Dalam pada itu Dewan Pertahanan Nasional dengan dihadiri oleh Staf Operasi Pembebasan Irian Barat pada tanggal 31 Desember 1961 memutuskan pembentukan Propinsi Irian Barat Gaja Baru, terdiri dari wilayah Irian Barat yang masih diduduki oleh Belanda.

Untuk melaksanakan konfrontasi dibidang militer merebut Irian Barat, pada tanggal 2 Djanuari 1962 Presiden mengeluarkan keputusan No. 1 tahun 1962 untuk membentuk suatu Komando Mandala.

Tanggal 1 Djanuari 1962 diangkatlah Pimpinan Tertinggi Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dan sebagai Panglima Trikora ditetapkan : Major Djenderal Soeharto (yang kemudian menjadi Presiden R.I.).

Perkembangan perjuangan pembebasan Irian Barat sesudah Trikora itu diikuti dengan seksama oleh D.P.R.-G.R., antara lain

dengan mendengarkan Keterangan² Pemerintah dalam rapat² tertutup, pada tanggal 2 - 3 Pebruari 1962 dan 17 April 1962. Dari Keterangan² Pemerintah itu D.P.R.-G.R. memperoleh pendjelasan² jang mendalam diantaranya tentang; a) pertempuran diperairan Pulau Aru pada tanggal 15 Djanuari 1962 dengan gugurnja Komodor Jos Soedarso, Kapten Wiratno dan lain-lain b) Pd. Sekdjen. P.B.B: U Thant minta kesabaran dari pihak Indonesia untuk menjelesaikan sengketa Irian Barat setjara damai; c) tentang usaha² memperkuat Angkatan Perang; d) pemitjaraan² dengan Robert Kennedy, (utusan Presiden Amerika Serikat John Kennedy); e) tentang perundingan² informil dengan Belanda disaksikan oleh Edsworth Bunker dari Amerika Serikat jang belum menundjukkan kesediaan Belanda untuk menjerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia.

Perundingan² resmi antara Delegasi Republik Indonesia dibawah pimpinan Menteri Luar Negeri dr. Soebandrio dan Wakil² Negeri Belanda Dr. H. Van Royen dan Dr. Schuurman, jang diadakan pertengahan Agustus 1962 di New York, dengan bantuan Edsworth Bunker sebagai wakil pribadi Pd. Sekdien U Thant, dengan sendirinja menarik perhatian D.P.R.-G.R.

Rentjana Bunker itu lahir dalam suasana memuntjaknja politik Konfrontasi, dalam bulan Maret 1962 beberapa bulan sebelum dilangsungkannja perundingan resmi.

Pihak Indonesia segera memberikan reaksi terhadap prinsip² Rentjana Bunker itu, jaitu :

- penjerahan pemerintahan di Irian Barat kepada Republik, dan
- hak selfdetermination kepada Rakjat Irian Barat sesudah sekian tahun didalam Republik.

Pengertian jang sama mengenai prinsip Rentjana Bunker, jaitu lebih dahulu menjerahkan Pemerintahan di Irian Barat kepada Indonesia, dan baru kemudian daripada itu apa jang dinamakan selfdetermination kepada Rakjat Irian Barat, didjadian dasar pengertian dalam pendjadjagan² selandjutnja. Pendjadjagan selandjutnja itu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dr. Soebandrio dengan didampingi oleh Djenderal Hidajat, jang menghasilkan „pengertian bersama sementara” („preliminary understanding”), dan satu „aide memore” jang ditulis dan ditanda-tangani oleh Pd. Sekdjen. P.B.B. U Thant, tertanggal

31 Djuli 1962 mengandung 7 pokok sebagai berikut :

- 1 . Sesudah ratifikasi oleh Indonesia, Belanda, dan P.B.B., maka se-lambat²nja 1 Oktober 1962 penguasa P.B.B. akan tiba di Irian Barat untuk mengoper Pemerintahan dari tangan Belanda. Pada waktu itu djuga, kekuasaan Belanda di Irian Barat berachir, bendera Belanda turun, bendera P.B.B. meng-gantinja.
2. Mulai sa'at itu Penguasa P.B.B. akan memakai tenaga² Republik Indonesia (baik sipil maupun alat²-keamanan), ber-sama dengan alat² jang sudah ada di Irian Barat jang terdiri dari putera² Irian Barat, dan sisa² pegawai Belanda.
3. Paratroop² Indonesia tetap tinggal di Irian Barat, dibawah kekuasaan administrasi P.B.B. („at the disposal of the United Nations Administration”).
4. Angkatan Perang Belanda mulai sa'at itu djuga berangsur dipulangkan kenegeri Belanda. Jang belum pulang, akan di-taroh dalam pengawasan P.B.B., dan tidak boleh dipakai untuk operasi² militer.
5. Antara Irian Barat dan Daerah Republik Indonesia lainnja, adalah lalu-lintas bebas.
6. Tanggal 1 Djanuari 1963, atau 31 Desember 1962, bendera Sang Merah Putih setjara resmi akan dikibarkan disamping bendera P.B.B.
7. Pemulangan Angkatan Perang Belanda dan pegawai Belanda harus selesai pada tanggal 1 Mei 1963, dan sebentar sesudah itu Pemerintah Republik Indonesia setjara resmi mengoper Pemerintahan di Irian Barat, dari tangan P.B.B. ketangan Indonesia.

Selanjutnja berdasarkan „preliminary understanding” dan „aide memore” tersebut maka perundingan resmi antara Dele-gasi Republik Indonesia dan Wakil² Negeri Belanda dengan ban-tuan wakil pribadi Pd. Sekdjen. P.B.B. menghasilkan „PERSETU-DJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERADJA-AN NEDERLAND MENGENAI IRIAN BARAT” jang penanda-tanganannja telah dilakukan pada tanggal 15 Agustus 1962, jang kemudian dikenal dengan „New Dork Agreement”.

Pada tanggal 1 September 1962, D.P.R.-G.R. mengeluarkan Pernyataan Pendapat D.P.R.-G.R. berhubung dengan penanda-

tangganan persetudjuan tersebut, jang pokok isinja sebagai berikut :

1. membenarkan dan menjetudjui kebidjaksanaan P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi dalam menerima persetudjuan Indonesia-Nederland jang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962 mengenai penjerahan Irian Barat kepada Republik Indonesia dan tetap memberi kepertjajaan sepenuhnja kepada PJM Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi, untuk melakukan langkah² selandjutnja.
2. mengadjak dan menjerukan kepada seluruh rakjat Indonesia untuk lebih memperkuat persatuan dan mempertinggi kewaspadaan Nasional.

Pasal 16 dan 17 (Advis, assistensi dan partisipasi PBB) dalam New York Agreement selengkapnja sbb :

Pasal XVI.

Pada saat penjerahan tanggung-djawab pemerintahan sepenuhnja kepada Indonesia sedjumlah pegawai ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa, jang dianggap mentjukupi oleh Sekretaris Djenderal sesudah berkonsultasi dengan Indonesia, akan ditundjuk untuk tetap tinggal dimana sadja kewadjiban mereka memerlukanja. Sebelum kedatangan Wakil² Perserikatan Bangsa-Bangsa jang akan ikut serta pada saat jang wadjar dalam mengadakan usaha² penentuan nasib sendiri, kewadjiban mereka akan terbatas pada memberi nasehat dan membantu persiapan² untuk melaksanakan ketentuan² bagi penentuan nasib sendiri ketjuali bilamana Indonesia dan Sekretaris Djenderal dapat ber-setudju bahwa mereka akan mendjalankan pekerdjaan ahli jang lainnja. Mereka akan bertanggung-djawab pada Sekretaris Djenderal mengenai pelaksanaan kewadjiban² mereka.

Pasal XVII.

Indonesia akan mempersilahkan Sekretaris Djenderal mengangkat seorang Wakil, jang bersama dengan staf jang antara lain terdiri dari pegawai² tertera dalam pasal XVI, akan melaksanakan dan ikut serta dalam usaha² untuk mewujudkan kebebasan memilih jang merupakan tanggung-djawab Indonesia.

Sekretaris Djenderal pada waktu jang wadjar akan mengangkat seorang Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa agar ia dengan

stafnja dapat mendjalankan kewadajiban² mereka satu tahun sebelum tanggal penentuan nasib sendiri.

Penambahan staf jang sekiranya dipandang perlu oleh Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa akan ditentukan oleh Sekretaris Denderal setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Indonesia.

Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa dan stafnja akan mempunyai kebebasan bergerak jang sama seperti jang diberikan kepada pegawai² jang disebut dalam pasal XVI.

Ketika dilakukan upatjara penjerahan kekuasaan atas Irian Barat dari Untea (United Nations Temporary Executive Authority) kepada Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, dari pihak D.P.R.-G.R., selain Menko/Ketua, Arudji Kartawinata, telah turut serta dalam rombongan Presiden, 5 orang anggota D.P.R.-G.R., yakni anggota² H.A. Sjaichu, I.S. Handokowidjojo, Drs. D.S. Matakupan, Sudjito dan Kom. Pol. Tingkat I Sario, untuk menjaksikan upatjara penjerahan kekuasaan tersebut.

Oleh D.P.R.-G.R. diadakan rapat paripurna Istimewa pada tanggal 1 Mei 1963, khusus untuk menjambut peristiwa Nasional itu.

Selanjutnja Komisi "B" D.P.R.-G.R. dengan mengadakan penindjauan kedaerah Irian Barat, sewaktu mana seorang anggota, jaitu K.H. Musta'in, meninggal dunia di Kota Baru, karena sakit.

Akan tetapi disamping segi-segi positif jang telah tertjapai dalam melaksanakan pembangunan mental/spirituil di Irian Barat, telah ternjata pula kemudian bahwa sengadja atau tidak sengadja, tenaga, biaja dan alat² jang sudah ada didaerah itu bekerdja kurang efisien. Daerah Irian Barat di „anak maskan” oleh Pemerintah R.I. dengan satu tudjuan bahwa dalam tempo jang singkat daerah tersebut dibangun setaraf dengan daerah² di Indonesia lainnja. Suatu kenjataan daripada kurangnya efisiensi kerdja dan penggunaan biaja, tenaga dan alat² didaerah itu, misalnja anggaran belandja tahun 1963 kurang lebih uang sisa IB. Rp. 17 djuta jang tidak terpakai, tahun 1964 kurang lebih 12 djuta IB. Rp. Untuk tahun kerdja 1965 kurang lebih 20 djuta IB. Rp. jang tidak terpakai.

Kemudian semua uang itu disetor kembali atau diperhitungkan dalam anggaran belandja tahun berikutnja, padahal djum-

lah kurang lebih 50 djuta IB. Rp. sudah dapat misalnja untuk membangun 2000 buah perumahan untuk pegawai ataupun djalan sepanjang 500 km. antara Sukarnapura (Djayapura) ke lembah Balim (Wamena).

Semua itu mengakibatkan efek politis jang negatif terhadap rakjat didaerah Irian Barat, disamping rakjat Irian Barat sehari² melihat nafsu memborong barang² oleh para petugas-petugas jang didatangkan ke Irian Barat dari Djakarta. Keketjawaan itu lebih memuntjak lagi setelah pada achir tahun 1965 toko² di Irian Barat kosong dari persediaan barang².

Terhadap segala jang telah terdjadi atas pelaksanaan pembangunan di Irian Barat pada djaman Orde Lama, jang sengadja atau tidak sengadja telah mengakibatkan timbulnja rasa ketjewa pada sebagian putra² Irian Barat, semua itu tidak luput dari perhatian D.P.R.-G.R. terutama dalam hubungannja dengan akan dilaksanakannja selfdetermination atas Irian Timur oleh Pemerintah Australia.

Dalam hubungan ini akan dikemukakan nanti pada periode D.P.R.-G.R. Zaman Orde Baru tentang kegiatan-kegiatan D.P.R.-G.R. jang telah mengirimkan team/rombongannja sebanyak tiga kali.

B. Konfrontasi R.I. -Malaysia.

Antara Philipina, Malaysia dan Indonesia meskipun sama² hidup satu rumpun bangsa, namun satu dengan lainnja lebih mempunjai banyak perbedaan-perbedaan daripada persamaan-persamaan jang ada pada „sedjarah perdjuaan kemerdekaan,,.

Perbedaan-perbedaan itu antara lain ialah adanja pengaruh Amerika di Philipina, pengaruh Inggeris di Malaysia dan sisa² pengaruh pendjadjahan Belanda di Indonesia. Akan tetapi meskipun berbeda-beda „sedjarah perdjuaan kemerdekaan” namun karena ketiga negara sama² merupakan satu rumpun bangsa, hidup dalam satu masa kebangkitan untuk meninggalkan masa-lampau masing-masing jang penuh keterbelakangan serta penderitaan-penderitaan sebagai akibat pendjadjahan puluhan bahkan ratusan tahun, maka atas dasar kepentingan bersama sudah pernah didapatkan „pertemuan pengertian” antara ketiga

negara dalam wujud perundingan-perundingan antara Republik Indonesia - Philipina - Persekutuan Tanah Melayu.

Perundingan-perundingan mengenai masalah „Malaysia" pertama-tama telah dilakukan melalui tiga Menu : Indonesia, Philipina dan Malaya, yang terkenal dengan sebutan „Musjawarah Maphilindo". Sesudah itu perundingan dilanjutkan dengan Konprensi Tingkat Tinggi, dari ketiga Negara tersebut, yang dilakukan pada tanggal 9 sampai 17 April 1963 di Manila.

Djalannja perundingan² tersebut tidak luput dari perhatian D.P.R.-G.R., jaitu pada waktu Presiden akan menghadiri K.T.T. di Manila, D.P.R.-G.R. pada tanggal 27 Djuli 1963 mengeluarkan suatu Pernyataan Pendapat, yang pada pokoknja mendukung sepenuhnya keputusan Presiden untuk menghadiri K. T. T. di Manila.

K.T.T. di Manila yang kedua, dari tanggal 30 Djuli hingga 5 Agustus 1963 telah menghasilkan keputusan bulat dari ketiga Kepala Negara yang bersangkutan, yang terkenal dengan "Deklarasi Manila".

Sebelum K. T. T. Manila dilangsungkan, Tengku Abdul Rachman telah menanda-tangani dokumen pada tanggal 9 Djuli 1963 di London. Dekumen itu adalah suatu persetudjuan antara Inggeris dan Tanah Melayu untuk membentuk "Federasi Malaysia", yang akan melaksanakan pembentukannja itu pada tanggal 31 Agustus 1963.

Achirnja Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963.

Tantangan terhadap diproklamirkannja Malaysia itu, mula² ditjetuskan oleh rakjat Kalimantan Utara, dengan diproklamasi-kannja Negara Kalimantan Utara pada tanggal 8 Desember 1962, yang dilantjarkan oleh Tentara Nasional Kalimantan Utara (T.N.K.U.). Pada tanggal 3 Djanuari 1963 Perdana Menteri Kalimantan Utara Azhari mengangkat Ahmad Fadillah, Ketua Panitia Pembela Revolusi Kaltara di Djakarta, sebagai wakil tetap Pemerintah Negara Kesatuan Kaltara.

Presiden Soekarno tidak menjetudjui adanja negara Malaysia yang dianggapnja sebagai tjiptaan "Nekolim", maka dilantjar-kanlah politik konfrontasi terhadap Malaysia.

Dalam pelaksanaan politik konfrontasi dibidang politik diplo-masi, Presiden Soekarno telah menjetudjui pula untuk mencri-ma Djaksa Agung Amerika Serikat, Robert Kennedy, sebagai utus-

an Pribadi Presiden Johson, jang menjarankan agar persoalan „Malaysia” diselesaikan lagi melalui medja perundingan. Pertemuan pertama dengan Robert Kennedy dilakukan di Tokyo, jang kemudian dilandjutkan di Djakarta.

Dari pembijtaraan itu tertjapai beberapa prosedur dalam mentjari penyelesaian masalah „Malaysia” setjara damai, jaitu dengan didahului suatu cease-firestandfast jang akan segera disusul dengan musjawarah tingkat Menteri antara ketiga pihak, jaitu Indonesia, Philipina dan Kuala Lumpur.

Dalam hubungan ini maka Presiden Soekarno memerintahkan penghentian tembak menembak pada tanggal 23 Djanuari 1964, jang berlaku mulai tanggal 25 Djanuari 1964.

Selanjutnja perundingan terdjadi di Bangkok, jang terbagi dalam dua taraf, jaitu masing-masing tanggal 5 sampai 10 Februari 1964 dan 3 sampai 6 Maret 1964. Ternjata Perundingan-perundingan tersebut mengalami kegagalan, karena pihak Kuala Lumpur mengajukan tuntutan supaya Indonesia menarik pasukan-pasukannya jang membantu rakjat Kalimantan Utara dan agar Indonesia mengakui „Malaysia” sebagai kenjataan.

Karena kompromi jang diadjukan oleh Indonesia untuk mengachiri konfrontasi setjara ber-angsur² sesuai dengan kemadjuan jang ditjapai dalam penyelesaian persoalan „Malaysia” ditolak dan tidak akan diadakan pembijtaraan² lagi, maka Presiden Soekarno mengandjurkan kepada rakjat untuk menggalang kekuatan dan potensi didalam negeri, untuk mendjamin kelangsungan revolusi Indonesia dan untuk menghadapi bahaya jang mengantjam.

Andjuran Presiden Soekarno itu diutjapkan dalam pidato penutupan konprensi Presidium Kabinet Kerdja dengan Tjatur Tunggal seluruh Indonesia di Istana Negara Djakarta, 16 Maret 1964. Dalam Pidato itu Presiden Soekarno mengomandokan „gerakan Sukrelawan Indonesia” untuk mengimbangi adanya mobilisasi umum di Malaysia.

Satu hari kemudian D.P.R.-G.R. mengeluarkan suatu Pernyataan Pendapat, jang pada pokoknja menjatakan dukungan sepenuhnya komando tersebut, Disamping itu segenap Pimpinan D.P.R.-G.R. dan seluruh Anggota D.P.R.-G.R. menjatakan mendjadi Anggota Gerakan Sukarelawan.

Sebagai tindakan jang njata dalam bidang legislatif terhadap Komando Gerakan Sukarelawan, D.P.R.-G.R. mengambil pra-

karsa untuk mengadakan suatu Rantjangan Undang-undang tentang Gerakan Sukarelawan. Pimpinan D.P.R.-G.R. pada tanggal 24 Maret 1964 membentuk suatu Panitia Khusus jang diberi tugas untuk menjusun Rantjangan Undang-undang tersebut. R.U.U. tentang Gerakan Sukarelawan ini jang kemudi-an disetudjui oleh D.P.R.-G.R. maupun Pemerintah dalam rapat Paripurna tanggal 30 Djuni 1964, mengatur soal pengorganisa-sian, kepemimpinan, perlindungan hukum serta djaminan sosial bagi para sukarelawan. Dengan adanja Undang-undang tersebut (Undang-undang No. 9 tahun 1964, Lembaran Negara No. 72, tentang Gerakan Sukarelawan Indonesia), maka terdapat lan-dasan hukum untuk menggerakkan para sukarelawan dan meng-atur penampungannya.

Selandjutnja pada tanggal 27 April 1964 Pemerintah menjam-paikan keterangan mengenai kebidjaksanaan dalam 5 bulan sebelumnya, dimana diutarakan pula mengenai kebidjaksanaan Pemerintah dalam persoalan Malaysia.

Berkenaan dengan keterangan Pemerintah ini D.P.R.-G.R. mengeluarkan suatu pernjataan pendapat, jang pada pokoknja sebagai berikut :

1. D.P.R.-G.R. mendukung sepenuhnya pendirian Pemerintah untuk dibawah pimpinan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi lebih meningkatkan lagi perdjungan menentang imperi-lisme dan kolonialisme, chususnjja pelaksanaan konfronta-si total terhadap Malaysia ;
2. Segenap Sukarelawan Anggota D.P.R.-G.R. menjatakan kesiap-siagaannja disertai adjakan kepada seluruh rakjat Indonesia untuk lebih meningkatkan lagi perdjungan meng-ganjang Malaysia.

C. Sekitar Konprensi Asia Afrika ke-II.

Hasil² konprensi Asia-Afrika jang pertama telah membawa negara² peserta kepada suatu solidaritas jang menguntungkan bagi perdjungan masing² negara. Solidaritas tersebut merupa-kan bantuan besar untuk mentjapai atau menjempurnakan kemerdekaan nasional jang telah diperolehnja bagi negara² jang belum atau baru setengah merdeka. Merupakan bantuan besar untuk mempertahankan eksistensi kemerdekaan jang di-

perolehnja bagi negara² jang telah merdeka, termasuk Indone-
sia, untuk menudju masa depan jang lebih berhasil dalam mewu-
djukkan tjita² perdjuangan bangsa.

Arti khusus pula bagi Negara Indonesia pada tahun² berikut-
nja sesudah konfrensi Asia Afrika pertama di Bandung pada
bulan April 1955 ialah beberapa kali negara Indonesia berada
pada perhatian Luar Negeri, focusnja perhatian Internasional.

Dalam Musjawarah Menteri Asia-Afrika (MMAA) ke-II tahun
1964 disamping telah selesai menetapkan landasan konferensi²,
agenda rapat jang berisikan antara lain tentang terbentuknja
sekretariat, tentang penyelesaian perselisihan², tentang kerdja-
sama ekonomi dan sebagainya. Djuga MMAA telah membitjara-
kan daftar peserta, jaitu 29 negara² jang ikut dalam konferensi
AA-I ditambah Vietnam Selatan dan Utara, negara² Asia-Muda,
negara² merdeka baru (Mongolia, Kalimantan Utara, Chili, Cy-
prus, Kuwait, Serawak, Angola). Dalam hubungan dengan daft-
tar peserta ini, mengenai Malaysia, MMAA mengambil kesim-
pulan dalam notulennja sbb :

„Sejogjanja turut, tapi ada halangan² jang menjebabkan
tidak dapat ikut serta, dan mudah²an halangan-halangan ter-
sebut dapat dihilangkan”. Mengenai maksud Indonesia untuk
memasukkan Kalimantan Utara dalam negara² merdeka baru
mendapat sanggahan tidak langsung dari pihak India. Sedang-
kan mengenai ikut sertanja USSR (djuga persoalan dapat tidak-
nja Malaysia ikut serta) jang akan memutuskannja ialah K.T.T.

Mengenai persoalan tempat dan waktu diserahkan kepada
negara² Afrika. Pandangan semula tertudju ke Cairo jang me-
miliki fasilitas² tehnik, akan tetapi achirnja ditetapkan di Aldja-
zair. Rentjana waktu semula ialah pada Dasa Warsa ke-I dari
A-A-I (April 1965), akan tetapi achirnja penjelenggaraan KAA
ke-II diundurkan sampai tanggal 24 Djuni 1965.

D.P.R.-G.R. pada rapat plenonja tanggal 22 Djuni 1965, telah
mengesahkan sebuah Pernyataan Pendapat tentang Dukungan
Terhadap Delegasi R.I. ke Konferensi Asia Afrika ke-II di Al-
djazair. Diktum selengkapnja berbunji sbb :

Memutuskan :

1. Mendukung dan memberi kepertjajaan penuh kepada dele-
gasi R.I. ke Konperasi AA ke-II jang dipimpin oleh P.J.M.
Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno ;

2. Menjokong sepenuhnya Statement Pemerintah tanggal 20 Djuni 1965 ;
3. Mengandjurkan agar delegasi Indonesia dengan teguh dan bidjaksana terus membina persatuan revolusioner negara² AA dalam melawan imperialisme, kolonialisme dan neokolonialisme, dan dalam mempererat hubungan² persahabatan dan kerdja sama jang saling menguntungkan dibidang politik, ekonomi dan kebudajaan ;
4. Agar Konperensi AA ke-II mengambil keputusan² jang bersifat mendorong dan meningkatkan perdjuaan Rakjat AA melawan nekolim jang dipelopori oleh imperialis Amerika Serikat, jang terus menerus melantjarkan agresi, intervensi dan subversi terhadap negara² dan Rakjat-rakjat AA ;
5. Agar Konperensi AA ke-II dengan tegas menolak turutsertanja antek² Nekolim seperti „Malaysia”, Korea Selatan, Vietnam Selatan, Israel dan Konggo- Tshombe ;
6. Agar Konpereusi AA ke-II tetap berpegang teguh kepada kebidjaksanaan musjawarah untuk mufakat ;
7. Agar prinsip² jang patriotik sebagaimana telah diputuskan dalam M.M.A.A. ke-II, jaitu :
bedaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudajaan diterima oleh Konperensi AA II sebagai sendjata dalam melawan neo-kolonialisme ;
8. Mengandjurkan kepada segenap rakjat Afrika-Asia agar berusaha se-keras²nja mensukseskan Konperensi AA II untuk meratakan djalan bagi terlaksananja Conefo ;
9. Mengandjurkan kepada segesap Rakjat Indonesia agar tetap memelihara persatuan nasional progresip-revolusioner berporoskan Nasakom dan mempertinggi kewaspadaan nasional serta memperkuat ketahanan nasional disegala bidang dalam menghadapi segala kemungkinan agresi, intervensi dan subversi kaum Nekolim dan antek²-nja.
10. Menjerukan kepada seluruh rakjat Indonesia untuk berdo'a agar dengan Rachmat Jang Maha Esa, Presiden Sukarno dan segenap rombongan delegasi Indonesia dikurnia segala kekuatan lahir maupun bathin untuk mensukseskan Konperensi AA-II sesuai dengan harapan rakjat Indonesia dan agar senantiasa berada dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kudeta di Aldjazair jang terdjadi 19 Djuni 1965 telah mengakibatkan 13 negara Asia-Afrika Commonwealth (termasuk

Pakistan) mengusulkan agar K.A.A. II ditunda. Missi Indonesia jang pada waktu itu sudah berada di Paris menjesuaikan diri dengan Statement Pemerintah R.I. di Bogor jang selain mengakui Pemerintah baru Aldjazair dibawah pimpinan Kolonel Boumidiene (menggantikan Ben Bella) djuga menginstruksikan kepada delegasi R.I. untuk tetap mengusahakan diteruskannja K.A.A.-II di Aldjazair.

Pada waktu itu, berita-berita resmi dari Aldjazair sangat sedikit jang sampai di Paris dan dikalangan missi sudah timbul kebimbangan tentang keamanan fisik pribadi Presiden Sukarno. Dr. Soebandrio selaku pimpinan missi di Paris belum berani memberikan ketegasan, hanja mengawatkan kepada Presiden Soekarno jang sudah berada di Cairo, boleh datang dan boleh tidak.

Ketika missi Indonesia sudah sampai di Aldjazair (mendahului Presiden Sukarno jang masih mengikuti KTT-Ketjil, Indonesia, RPA, Pakistan, RRT di Cairo), di Aldjazair keadaan sangat tegang. Diantara negara² peserta sudah hadir 32 Negara dan jang belum datang 24 negara. Delegasi India mengusulkan supaja KAA-II ditunda dan menteri² jang sudah ada supaja mengadakan musjawarah Menteri.

Persoalan jang dihadapi Indonesia pada waktu itu ialah, konferensi harus terus, akan tetapi missi mengchawatirkan keamanan pribadi Presiden Sukarno. Kalaupun ditunda, Indonesia tidak menjetudjui diadakannja Minister Meeting. Pada waktu itu sudah timbul dua blok, jaitu :

- a. RRT, Pakistan, RPA, Syria, Mali, Aldjazair.
- b. Philipina, Djepang, Cylon, Thailand, Mongolia jang dipelopor oleh India jang didjiwai oleh pangaruh USSR.

Pada tanggal 25 Djuni (sore hari) meledaklah bom waktu digedung konfrensi. 10 orang dari para teknisi jang sedang memasang alat-alat telekomunikasi mendjadi korban dan 2 orang dari anggota delegasi jang berada pada djarak 200 meter dari ledakan menderita luka berat.

Oleh karena itu, delegasi-delegasi R.R.T., Pakistan, R.P.A., Syria dan Mali mengusulkan kepada Pemerintah Aldjazair agar sebagai tuan rumah mengundurkan waktu penjelenggaraan K.A.A. II tersebut. Usul ini dapat diterima oleh Pemerintah Aldjazair, sehingga K.A.A. II tidak berlangsung.

D. Gerakan 30 September.

Tema Gerakan 30 September 1965 di Djakarta sama dengan tema dari pada peristiwa 18 September 1948 di Madiun. Istilah **Front Demokrasi Rakjat** jang digunakan oleh P.K.I. di Madiun diganti dengan istilah **Front Persatuan Nasional** berporoskan Nasakom dengan P.K.I. mendjadi unsur pimpinannja. Dalam prolog G. 30. S. tuntutan P.K.I. terkenal sebagai tuntutan terbentuknja Kabinet Nasakom, tuntutan mana mulai dilantjarakan pada tahun 1963. Dalam tahun 1963 di Ibu Kota Djakarta mulai terlihat tjoretan-tjoretan dinding jang pada pokoknja menuntut terbentuknja Kabinet Nasakom (Nas-Nasionallis, A-Agama, dan Kom-Komunis).

Setelah beberapa orang Komunis berhasil masuk dalam kabinet Dwikora, maka pada tanggal 22 September 1965, delapan hari sebelum terdjadinja peristiwa D.N. Aidit dalam tjeramah jang diselenggarakan oleh Departemen Perkebunan di Bogor, mengatakan bahwa: „Tentang ikutnja saja dan beberapa orang Komunis lainnja dalam Kabinet menundjukkan bahwa Kabinet sekarang ini baru „mambu-mambu‘ atau‘ berbau Nasakom‘“. Selain itu djuga ia mengatakan bahwa Pantjasila hanja sebagai mempersatu sadja dan setelah persatuan dapat ditjapai maka Pantjasila sudah tidak diperlukan lagi. Maka mulai sa‘at itu, kemunafikan P.K.I. terhadap Pantjasila mendjadi djelas.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi R.R.I. Djakarta menjiarkan pengumuman Let. Kol. Untung, Komandan Bataljon Tjak-rabirawa, jang menamakan dirinja Ketua „Gerakan 30 September“. Menurut siaran Radio itu, sedjumlah Djenderal T.N.I.-A.D. telah berkomplot dalam organisasi subversif jang dinamakan „Dewan Djenderal“ untuk mengadakan perebutan kekuasaan Negara atas biaja C.I.A., tetapi komplotan itu dapat digagalkan oleh Gerakan jang dipimpin oleh Let. Kol. Untung tersebut. Selandjutnja siaran R.R.I. itu mengumumkan pula:

- (1) Tentang sudah ditangkapnja sedjumlah Djenderal
- (2). Tentang sudah dikuasainja alat komunikasi jang penting-penting serta objek-objek vital lainnja dan
- (3). Tentang Presiden Soekarno jang berada dalam keadaan selamat atas perlindungan dari „Gerakan 30 September“. Berdasarkan fakta-fakta jang kemudian diketahui, maksud

dari pada 3 kejadian yang diumumkan itu adalah sebagai berikut :

- (1). Tentang sedjumlah Djenderal yang telah ditangkap itu ialah : Letnan Djenderal Achmad Yani ; Major Djenderal Soeprapto; Major Djenderal Harjono M.T.; Major Djenderal S. Parman; Brigadir Djenderal Sutojo Siswomihardjo dan Brigadir Djenderal D.I. Pandjaitan.
- (2) Tentang sudah dikuasainja alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnja, yang dimaksud ialah pendjagaan-pendjagaan yang dilakukan oleh G.30.S./P.K.I. di Istana, R.R.I. Djakarta, Pos Dan Telekom dan sedjumlah panser yang mengepung gedung D.P.R.-G.R. di Senajan.
- (3). Tentang Presiden Soekarno yang berada dalam keadaan selamat atas perlindungan dari Gerakan 30 September, yang dimaksud ialah beradanjja Presiden Soekarno beberapa sa'at di Lapangan Udara Halim, ditengah-tengah pasukan yang memberontak tersebut.

Dalam Dekrit No. 1 yang diumumkan siang hari tanggal 1 Oktober 1965 lewat R.R.I. Djakarta yang masih dikuasai oleh pemberontak, antara lain disebutkan bahwa: „Dengan djatuhnja segenap kekuasaan Negara ketangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Dwikora dengan sendirinja berstatus Demisioner. Sampai pembentukan Dewan Menteri baru oleh Dewan Revolusi Indonesia, para bekas Menteri diwadajibkan melakukan pekerdjaan-pekerdjaan routine, mendjaga ketertiban dalam Departemen masing-masing, dilarang melakukan pengangkatan pegawai baru dan dilarang mengambil tindakan-tindakan yang bisa berakibat luas”. Selandjutnja dalam dekrit itu diumumkan pula Susunan Dewan Revolusi Indonesia terdiri dari 45 (empat puluh lima) anggota dan Let. Kol. Untung sebagai ketua, bahwa pangkat ketentaraan yang ada ialah paling tinggi pangkat Letnan Kolonel dan oleh karena itu Tentara yang mempunyai pangkat diatas Letnan Kolonel diwadajibkan melapor kepada Letnan Kolonel Untung untuk kemudian diturunkan pangkatnja menjadi Letnan Kolonel.

Kedjadian-kedjadian pada hari itu tidak hanya terbatas pada pengumuman-pengumuman dan dekrit-dekrit, tetapi djuga telah terdjadi pembunuhan setjara biadab dan kedjam. Sedjumlah Djenderal yang diumumkan telah ditangkap, empat hari ke-

mudian jaitu pada tanggal 4 Oktober 1965 ditemukan bahwa kesemuanya telah dibunuh setjara kedjam di Lubang Buaja serta dimasukkan dalam satu sumur tua. Setelah diadakan penggalan terhadap sumur tersebut terdapat pula seorang perwira pertama jaitu Letnan P. Tendean, adjutan Djenderal Nasution jang mendjadi korban ketika mengadakan perlawanan terhadap pasukan „G. 30. S/P.K.I.” jang akan mentjulik Djenderal Nasution. Djenderal Nasution sendiri menderita luka-luka ringan, sedang anaknja jang masih duduk di Taman Kanak-kanak Ade Irma Suryani menderita luka berat dan achirnja meninggal. Pembunuh²an kedjam itu terdjadi pula didaerah-daerah ialah antara lain terhadap kolonel Katamso, DAN REM 72: Let Kol. Sugijono, KAS REM 72 (di Jogjakarta), dan sebagainya.

Setelah keadaan di Djakarta dikuasai kembali oleh KOSTRAD (Komando Strategi Angkatan Darat) dibawah pimpinan Maj. Djen. (waktu itu) Soeharto, maka berangsur-angsur keamanan setjara fisik dapat dipulihkan kembali. KOSTRAD dapat merebut kembali Studio R.R.I. Djakarta, Pos dan Telekom dan Istana. Pendjagaan-pendjagaan ketat jang para pendjaganya sendiri ternjata sebagian besar tidak tahu bertugas untuk apa, misalnja di M.B.A.D. dan D.P.R.-G.R., dengan mudah dikuasai oleh KOSTRAD. Dalam pada itu Lapangan Udara Halim dapat direbut kembali dengan bantuan R.P.K.A.D. jang dipimpin oleh Kolonel (waktu itu) Sarwo Edi Wibowo. Dari Halim inilah kemudian ditemukan tempat dimana dilangsungkan penjiksaan dan pembunuhan terhadap sedjumlah Djenderal dan seorang perwira pertama tersebut diatas.

Upatjara pemakaman djenazah dilakukan pada tanggal 5 Oktober 1965 dan hari 5 Oktober 1965 dinjatakan sebagai hari bergabung serta untuk kali itu tidak diadakan peringatan Hari Angkatan Bersendjata. Pangkat para almarhum dinaikkan satu tingkat setjara anumerta dan ditetapkan sebagai „Pahlawan-pahlawan Revolusi”.

Terhadap semua kejadian itu, C.C. P.K.I. jang diwakili oleh Njoto dan M.H. Lukman telah mengeluarkan pernjjataan, bahwa P.K.I. tidak tahu menahu, karena G.30.S adalah persoalan intern Angkatan Darat semata-mata. Tetapi pernjjataan C.C. P.K.I. itu bertentangan dengan pengakuan bekas Let. Kol. Untung ketika mendjawab pertanyaan interogator. Pernjjataan itu berbunji : „..... Tentunja ada jang dibelakang saudara. Siapa

jang mendalangi atau dibelakang gerakan ini?'. Djawab bekas Let. Kol. Untung ialah : „..... jang dibelakang saja adalah P.K.I.". Berdasarkan pengakuan Let. Kol. Untung ini dan kesaksian-kesaksian dalam proses-proses pengadilan terhadap tokoh-tokoh G.30.S. di Pusat maupun didaerah-daerah, semunja telah membuktikan bahwa Gerakan 30 September adalah didalangi oleh Partai Komunis Indonesia.

Disamping itu perlu pula diketahui ketika diadakan penggeledahan dalam kamar kerdja Wakil Ketua DPR-GR M. H. Lukman pada achir bulan Oktober di Gedung DPR-GR Senajan, terdapat 1 stel pakaian hidjau, tanda pengenal dari pita dan lap-lap sendjata.

Dalam bulan Oktober 1965 itu djuga mulai dilantjarkan aksi-aksi pengganjangan terhadap „G.30.S/P.K.I.". Pada tanggal 5 Oktober 1965 Pengurus Besar Nahdahtul Ulama beserta delapan Ormas-ormasnja mengeluarkan sebuah pernyataan jang antara lain :

memohon kepada Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi agar dalam tempo jang sesingkat-singkatnja membubarkan Partai Komunis Indonesia, Pemuda Rakjat, Gerwani, Serikat Buruh Pekerdja Umum/Sobsi, serta semua Ormas-ormas lainnja jang ikut serta mendalangi dan/atau bekerja-sama dengan apa jang menamakan dirinja „Gerakan 30 September". Tidak lama kemudian pada tanggal 14 Oktober 1965 Panitia Aksi Mengganjang „G-30-S" memobilisasi ratusan ribu massa rakjat Ibu Kota untuk mengadakan demonstrasi. Menurut Harian „Berita Yudha", enam wakil-wakil pimpinan parpol². yakni NU, PSII, Partai Katholik, PARKINDO, IP-KI, dan PERTI jang bitjara pada rapat tersebut pada pokoknja telah mengeluarkan kutukan atas kebiadaban kaum kontra revolusi „Gerakan 30 September" dan mendesak kepada Presiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno untuk membubarkan dengan segera d a l a n g gerakan kontra revolusi tersebut.

Tetapi dalam bentuk-bentuk Pernyataan-bersama tuntutan mereka itu baru dirumuskan kemudian, jang ditambah dengan P.N.I. Hardi-Osa-Usep, Golkar dan Muhammadiyah. Bahkan achirnja, Sidang Badan Pekerdja Kongres P.N.I. Ali-Surachman di JOGJAKARTA telah mengambil keputusan untuk meminta kepada Presiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi agar



Pimpinan beserta anggota² DPR GR berziarah ke makam Pahlawan Revolusi di Taman Pahlawan Kalibata.
Jakarta, 15 Nopember 1965. "Foto Deppen" 65-14539.

segera membubarkan PKI dan Ormas²nja, sebagai gandjaran jang setimpal baginja akibat tindakan petualangan kontra revolusi dengan G-30-S-nja.

Pada waktu terdjadinja peristiwa G-30-S, D.P.R.-G.R, sedang reses untuk masa persidangan ke-I Tahun Sidang 1965-1966. Dengan demikian maka sebagian besar anggota² D.P.R.-G.R. sedang pulang kedaerahnja masing². Sementara itu rumah tokoh² P.K.I. anggota D.P.R.-G.R. di Djakarta mulai mendjadi sasaran pengrusakan oleh para demonstran. Oleh karena itu beberapa tokoh wanita P.K.I. Anggota² D.P.R.-G.R. pada tanggal 15 Oktober 1965 memasuki Mess D.P.R.-G.R. di Djalan Renang No. 252 tanpa izin Pemimpin D.P.R.-G.R. Anggota² tersebut ialah Nj. Ch. Salawati, Nj. Mudigdio (mertua D.N. Aidit), Nj. Kartinah Kurdi dan Nj. Umi Sardjono. Malam hari tgl. 15 Oktober itu djuga, ± djam 24.00, tokoh² wanita P.K.I. Anggota D.P.R.-G.R. tersebut telah diambil oleh para petugas KOSTRAD untuk diamankan.

Pada tgl. 22 Oktober 1965, dengan pertimbangan guna meningkatkan kewaspadaan dan keamanan, Pimpinan DPR-GR menganggap perlu untuk mengambil tindakan pembekuan sementara segala kegiatan Anggota² D.P.R.-G.R. jang mewakili Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan Ormas²nja jang terlibat dalam petualangan G-30-S. Dengan Keputusan No. 10/ Pimp./I/65-66 tgl. 22 Oktober 1965, Pimpinan D.P.R.-G.R. telah membekukan sementara sedjumlah 55 Anggota D.P.R.-G.R. termasuk diantaranya Menteri/Wakil Ketua M.H. Lukman.

Tuntutan pembubaran PKI itu semakin santer. Lebih kurang 25 Ormas dan Orpol dari peladjar dan mahasiswa dan wanita jang tergabung dalam masa aksi pengganjangan Gestapu dengan semangat jang berapi-api pada tanggal 8 Nopember telah mengadakan demonstrasi menuntut pembubaran PKI dan Ormas-ormasnja serta seluruh antek²nja. Beberapa hari sebelumnya, puluhan ribu mahasiswa jang tergabung dalam KAMI (Komando Aksi Mahasiswa Indonesia) telah melantjarkan suatu demonstrasi besar²an jang untuk kesekian kalinya menuntut setjara tegas, agar PKI jang djelas mendjadi dalang² gerakan kontra revolusioner Gestapu segera dibubarkan.

Pada tgl. 12 Nopember 1965, setelah Pimpinan D.P.R.-G.R. mengadakan penelitian kembali nama² anggota D.P.R.-G.R. masih perlu untuk lebih membersihkan lagi D.P.R.-G.R. dari

oknum², jang terlibat atau diduga terlibat dalam Gerakan Kontra Revolusioner GESTAPU (Gerakan Tiga Puluh September). Dengan demikian maka djumlah anggota D.P.R.-G.R. jang dengan Keputusan Pimpinan D.P.R.-G.R. No. 10/Pimp./I/65-66 telah dibekukan sementara kegiatannja, perlu ditambah dengan beberapa anggota D.P.R.-G.R. lainnja lagi. Maka dengan Keputusan No. 13/Pimp./I/1965-1966 tanggal 12 Nopember 1965, Pimpinan DPR-GR telah membekukan lagi sedjumlah 8 (delapan) anggota D.P.R.G.R.

Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong setjara aklamasi telah pula menuntut pembubaran P.K.I. dan Ormas²nja, jaitu dalam sidang plenonja pada tanggal 15 Nopember 1965 (pleno pembukaan masa persidangan ke-II, tahun sidang 1965-1966), dengan sebuah pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat itu selengkapnja berbunji sebagai berikut :

PERNJATAAN PENDAPAT

tentang petualangan „Gerakan 30 September”

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG

dalam sidang paripurna pada tanggal 15 Nopember 1965,

Memperhatikan : perkembangan situasi politik sebagai akibat daripada peristiwa „Gerakan 30 September”;

Menimbang : 1. bahwa gerakan apa jang disebut „Gerakan 30 September” jang berdasarkan fakta-fakta jang hingga kini diperoleh, njata² didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan Ormas-ormasnja;
2. bahwa petualangan apa jang disebut „Gerakan 30 September” atau „Gestapu” itu adalah gerakan kontra revolusioner karena mengchianati Revolusi Indonesia dan Pantjasila serta melakukan tindakan-tindakan biadab diluar perikemanusiaan sehingga menimbulkan banjak korban, baik dikalangan Pimpinan Angkatan Bersendja-

ta maupun dikalangan rakjat;

3. bahwa rakjat pada umumnja termasuk buruh, tani, pegawai baik jang terga-bung dalam partai-partai politik serta ormas-ormas jang progresif revolusi-oner maupun Angkatan Bersendjata mengutuk sekeras-kerasnja tindakan kontra revolusioner dari apa jang dise-but „Gerakan 30 September” dan me-nuntut pembubaran dari Partai dan Or-mas-ormas jang mendjadi dalang dan pelaku dari pada Gestapu tersebut di-atas;

Menimbang pula : bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong sebagai pembantu Presiden, per-lu mendapat keterangan resmi dari Pe-merintah tentang setiap peristiwa pen-ting jang terdjadi baik jang terdjadi didalam Negeri maupun di Luar Negeri.

Mengingat : 1. Amanat Presiden/Penglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indo-nesia/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dalam sidang Kabinet Paripurna tanggal 6 Oktober 1965 di Istana Bogor;

2. Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indo-nesia/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dimuka sidang Pantja Tunggal seluruh Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1965;

3. Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik In-donesia/Panglima Besar Revlousi Bung Karno dimuka 7 Partai Politik pada tanggal 27 Oktober 1965 dan pernja-taan 7 Partai Politik sebagai tanggap-an atas Amanat tersebut;

4. Amanat Presiden/Panglima Tertinggi

Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dalam sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 6 Nopember 1965;

5. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong No. 10 dan 13/Pimp/I/'65-'66 tentang pembekuan sementara segala kegiatan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang mewakili Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) termasuk Ormas² lainnja jang terlibat atau diduga terlibat dalam Gerakan 30 September ;

Setelah mendengar pendapat/saran Golongan² dalam Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong ;

MEMUTUSKAN :

1. Mendukung sepenuhnya kebidjaksanaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang telah membekukan sementara segala kegiatan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong jang mewakili Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan Ormas-ormasnja serta Ormas² lain jang ter-sangka terlibat ataupun melibatkan diri didalam gerakan kontra revolusioner apa jang disebut „Gerakan 30 September”;

2. Mendesak kepada P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno untuk setcepat-tcepatnja mengambil keputusan terachir didalam bidang politik sesuai dengan pertanggung-djawab beliau kepada Bangsa dan Negara, terutama sekali pertanggung-djawab beliau kepada Tuhan Jang Maha Esa, sekarang dan dihari kemudian, dan sesuai pula dengan tuntutan Rakjat Indonesia melalui Partai² Politik dan Ormas-ormasnja jang progresif revolusioner, jaitu supaja membubarkan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan Ormas-ormasnja ;

3. Mendesak agar Pemerintah dalam waktu jang singkat memberikan keterangan resmi dimuka sidang Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong mengenai djalannja peristiwa petualangan kontra revolusioner apa jang disebut „Gerakan 30 September”.

Djakarta, 15 Nopember 1965

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
GOTONG ROJONG
Menko/Ketua,
Arudji Kartawinata.

Demikianlah Pernyataan Pendapat D.P.R.-G.R. tentang petualangan „Gerakan 30 September”. Adapun jang dimaksud dalam konsideran „Mengingat” angka 5 dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong No. 10 dan 13/Pimp/I/65-66, keputusan jang pertama dilampiri daftar nama² anggota-anggota DPR-GR jang dibekukan sementara sebanjak 55 orang, jaitu :

1. Drs. J. Piry,
2. Nungtjik A. R.,
3. R. P. R. Situmeang,
4. Nj. Sundari Abdulrachman,
5. Sudojo,
6. M.H. Lukman,
7. Hanafi,
8. Sudjito,
9. Soeratno,
10. Suhaemi Rachman,
11. Ir. Taher Thajeb,
12. Oey Hay Djoen,
13. Nj. Ch. Salawati,
14. Nj. Suharti Suwarto,
15. Djokosoedjono,
16. Abdullah Baraba,
17. Kasim,
18. Sukatno,

19. Zaikadir,
20. Anwar Kadir,
21. Njoto,
22. Soedisman,
23. Djadi Wirosuebrotto,
24. Siswojo,
25. Jusuf Adjitorop S.H,
26. Tjugito,
27. E.A. Martalogawa,
28. Nj. Mudikdio,
29. Peris Pardede,
30. Wikana,
31. Djamhari,
32. Hartojo Prawirosoedarmo
33. Abdullah,
34. S. Sardjono,
35. Trimo,
36. Pulung Djunaedi,
37. Harsono Ali, Markaban,
38. Asmu,
39. Nj. Kartinah Koerdi
40. Sidik Kertapati,
41. Achmad Dasuki Siradj,
42. Hardojo,
43. Nj. Umi Sardjono,
44. Njono,
45. S. Hariowisastro,
46. F. Runturumbi,
47. Usman muftiwiidjaja,
48. Toek Soebijanto,
49. Ir. Sakirman,
50. Nj. Tuti Nurbandijah,
51. Nn. Ting Suwarni,
52. Karel Supit,
53. Joehar Ajoeb,
54. Dr. Soeprapto S.H. dan
55. Nj. Fransisca Fanggalday.

Sedang dalam keputusan No. 13/Pimp/I/1965-1966 tertanggal 12 Nopember 1965 ditjantumkan daftar nama² anggota jang dibekukan sementara sebanyak 8 orang, jaitu :

1. Susilo Prawiro Atmodjo,
2. Jagus,
3. Ranu Sunardi Let. Kol (L),
4. Siauw Giok Tjhan,
5. Njak Diwan,
6. K. Werdojo,
7. Gde Poeger dan
8. Supardi.

Dari delapan orang tersebut satu diantaranya jaitu Njak Diwan jang pembekuan keanggotaannja ditjairkan kembali Djadi djumlah anggota D.P.R.-G.R. minus P.K.I. ialah $299 - (55 + 7) = 237$ Anggota.

§. 6. HASIL-HASIL PEKERDJAAN.

Jang dimaksud dengan hasil-hasil pekerdjaan D.P.G.-G.R. pada djaman Orde-lama ialah apa jang telah dihasilkan sedjak tanggal pelantikannja 25 Djuni 1960 sampai dengan pembukaan masa persidangan ke-II tahun sidang 1965-1966 pada tanggal 15 Nopember 1965. Dalam pembukaan masa persidangan ke-II tahun sidang 1965 - 1966 itu telah disetudjui oleh Pleno mengenai keputusan Pimpinan D.F.R.-G.R. untuk membekukan sementara kegiatan² -Anggota-anggota -D.P.R.-G.R. jang mewakili Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan Ormas-ormasnja dan pembekuan sementara bagi 8 anggota lainnja karena ada tanda-tanda terlibat G-30-S/P.K.I.

Sesudah tanggal pelantikannja di Istana Negara pada tanggal 25 Djuni 1960, D.P.R.G.R. melangsungkan sidang-sidang-nja. Sidang pertama berlangsung hanja dua minggu (mulai 30 Djuni sampai 15 Djuli 1960) jang merupakan sidang persiapan bagi D.P.R.-G.R. jang harus bekerdja dalam suasana baru jang berlainan sama sekali dari masa-masa sebelumnja. Dalam sidang itu diberikan pendjelasan-pendjelasan mengenai Peraturan Tata-tertib jang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 14/1960 dan ditetapkan susunan Badan-badan perlengkapan D.P.R.-G.R.: Komisi-komisi, Panitia Musjawarah, Panitia Anggaran dan Panitia Rumah Tangga.

Menurut Peraturan Tata-tertib D.P.R.-G.R., maka tahun sidang D.P.R.-G.R. dimulai tanggal 15 Agustus dan berachir tanggal 14 Agustus tahun berikutnja. Tahun sidang pertama

D.P.R.-G.R. ialah tahun sidang 1960-1961. (Adapun Undang-undang No. 1 s/d No. 4 merupakan hasil pekerdjaan D.P.R. sebelumnya). Akan tetapi dalam mengemukakan hasil-hasil pekerdjaan Panitia tidak mengikuti tahun sidang, melainkan mengikuti tahun pengundangan, artinja dalam setiap tahunnja telah menghasilkan berapa undang-undang.

Tahun 1960.

Dalam tahun 1960, jang merupakan hasil bersama antara D.P.R.-G.R. dengan Pemerintah ialah lima buah Undang-undang, jaitu UU No. 5 sampai dengan No. 9 tahun 1960 jang berturut-turut masing² dimuat dalam Lembaran Negara No. 104, 105, 109, 123 dan 131 (adapun Undang² No. 1 s/d No. 4 merupakan hasil pekerdjaan DPR sebelumnya).

Dua Rantjangan Undang-undang jang segera minta perhatian D.P.R.-G.R. ialah R.U.U. tentang Sensus dan R.U.U. tentang Statistik. Kedua rantjangan Undang-undang ini sangat diperlukan dalam menjusun rentjana² pembangunan nasional disegala lapangan. Rantjangan ini memerlukan bahan-bahan jang lengkap sempurna mengenai berbagai-bagai hal dan salah satu djalan untuk mengumpulkan bahan² itu adalah sensus.

Untuk pelaksanaan pembangunan itu maupun untuk keperluan kebidjaksanaan Pemerintah maupun masyarakat pada umumnja perlu tersedia statistik-statistik jang memberikan gambaran berupa angka-angka jang wadjar dari segenap tji², keadaan dan kegiatan masyarakat.

Berhubung dengan itu oleh Pemerintah diajukan sekaligus dua rantjangan undang-undang tersebut jang kemudian merupakan kegiatan pertama D.P.R.-G.R. dibidang legislatif. Kedua Undang-undang ini disetudjui oleh D.P.R.-G.R. pada tanggal 5 September 1960 dan diundangkan oleh Pemerintah dengan Undang-undang No. 6 tahun 1960 tentang Sensus (LN. No. 105) dan No. 7 tahun 1960 tentang Statistik (LN. No. 109). Berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 1960 tsb. diselenggarakan sensus penduduk jang pertama pada bulan Oktober 1961.

Dalam rapat pleno terbuka ke-8 pada hari Rabu tanggal 14 September 1960 D.P.R.-G.R. menjetudjui R.U.U. tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria jang kemudian diundangkan dengan undang-undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104). Dengan

diundangkannya Undang-undang ini maka tidak berlaku lagi hukum Agraria kolonial berdasarkan "Agrarische Wet", „Domeinverklaring" dan sebagainya. Undang-undang No. 5 tahun 1960 memuat sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan pokok baru tentang hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah dan lain-lain serta menjadi landasan untuk melaksanakan landreform.

Dalam hubungannya dengan landreform perlu kiranya dikemukakan, bahwa sebelumnya sudah ada Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perdjudjian bagi hasil. Juga oleh Pemerintah telah ditetapkan beberapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang seperti : Perpu No. 38 tahun 1960 tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman tertentu, No. 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, No. 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, disamping peraturan-peraturan pelaksanaan dengan Peraturan-peraturan Pemerintah. Adapun Perpu² lainnya yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 ditetapkan menjadi Undang-undang, yaitu dalam Undang-undang No. 1 tahun 1961 yang dalam hasil-hasil pekerjaan tahun 1961 nanti akan diuraikan.

Adapun disamping 5 Undang-undang, dalam tahun 1960 DPR-GR. telah mengeluarkan 4 buah Pernyataan Pendapat yaitu : Pernyataan Pendapat tentang Pemutusan Hubungan Diplomatik antara Indonesia dengan Belanda ; Pernyataan Pendapat tentang kunjungan kapal induk "Karel Doorman" ke Jepang ; Pernyataan Pendapat tentang pemberian restu berhubungan dengan keberangkatan Presiden ke P.B.B. dan Pernyataan Pendapat tentang bantuan terhadap perjuangan rakyat Aljazair menentang imperialisme dan kolonialisme.

Tahun 1961.

Dalam tahun 1961, hasil bersama antara D.P.R.-G.R. dengan Pemerintah ialah 22 Undang-undang, yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1961 sampai dengan Undang² No. 22 tahun 1961 yang berturut-turut masing-masing dimuat dalam Lembaran Negara No. 3, 9, 14, 15, 20, 21, 22, 207, 214, 215, 216, 238, 245; 246; 254, 255, 259, 263, 276, 288, 290 dan 302 tahun 1961.

Sebagian besar Undang-undang yang lahir dalam tahun 1961 ini dipengaruhi oleh hasil-hasil Sidang ke-I M.P.R.S. yang berlangsung dari tanggal 10 Nopember sampai 7 Desember 1960

di Bandung. Hasil-hasil Sidang ke-I M.P.R.S. ialah Ketetapan No. 1/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik sebagai garis-garis besar daripada haluan negara dan Ketetapan M.P.R.S. No.II/MPRS/1960 tentang Garis² besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana tahapan pertama 1961-1969.

Salah satu Rantjangan Undang-undang jang minta perhatian D.P.R.-G.R. sesudah selesai Sidang I M.P.R.S. dan dipengaruhi oleh Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. ialah Rantjangan Undang² tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang jang sudah ada sebelum tanggal 1 Djanuari 1961 mendjadi Undang-undang. Materi dari pada R.U.U. ini meliputi sedjumlah 41 Undang² Darurat, 29 Perpu tahun 1959 dan 56 Perpu tahun 1960. Djadi meliputi 126 materi perundang-undangan. Memusjawarahkan lebih dari seratus buah peraturan jang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam keadaan darurat dan masih perlu ditetapkan sebagai Undang-undang akan memakan waktu banjak. Pertimbangan lain untuk menjelarakkan dengan semangat Pembangunan Nasional Semesta Berentjana dan semangat menjelesaikan revolusi jang diandjur-andjurkan pada waktu itu, adalah dipandang lebih biddaksana apabila peraturan-peraturan itu semuanya ditetapkan sebagai Undang-undang sehingga perhatian serta tenaga D.P.R.-G.R. bersama-sama Pemerintah selandjutnja ditudjukan kepada pengaturan hal-hal jang baru.

Terhadap Rantjangan Undang-undang itu, jang memuat sebagai satu-satunja ketentuan berlakunja semua Undang-undang Darurat dan Perpu-perpu jang ditetapkan sebelum tanggal 1 Djanuari 1961 sebagai Undang-undang itu, mula-mula diadjukan berbagai-bagai keberatan oleh para anggota D.P.R.-G.R., jang pada umumnja tidak dapat menjetudjui begitu sadja peraturan² termaksud.

Tetapi setelah diadakan musjawarah jang mendalam didalam rappat-rapat Golongan-golongan maupun Gabungan Segenap Komisi, maka achirnja antara Pemerintah dan D.P.R.G.R. tertjapai kata mufakat untuk menambahkan 2 buah pasal baru jang berbunji sebagai berikut :

1. Peraturan-peraturan Negara termaksud dalam pasal 1 jang masih berlaku pada saat mulai berlakunja Undang² ini, akan segera disesuaikan dengan Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960 ;

2. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan perubahan²/tambahan² termaksud diatas D.P.R.-G.R. menjetudjui R.U.U. tersebut, jang disjahkan oleh Presiden mendjadi Undang-undang No. 1 tahun 1961 (L.N. No 3) tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang jang sudah ada sebelum 1 Djanuari 1961, mendjadi Undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1961 jang melaksanakan Undang-undang tersebut, kemudian dibentuk Panitia-panitia Kerdja-sama Mentri-mentri - D.P.R.-G.R. dengan Pimpinan D.P.R.-G.R. dan Pimpinan Kabinet sebagai badan-pimpinan. Panitia bersama tersebut bertugas dalam waktu 3 bulan untuk mengajukan usul-usul penjesuaian Undang-undang Darurat dan Perpu-perpu dengan Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960.

Setelah Panitia-panitia tersebut melaksanakan tugasnja 3 bulan, maka masa kerdjanja diperpanjang lagi sampai 6 bulan. Sehabis masa perpendjangan itu kegiatan Panitia² tersebut berhubungan dengan beberapa hal terhenti, sehingga tugasnja belum dapat diselesaikan.

Sedjak berlakunja Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1961 digunakan singkatan² „Drt” dan „Prp” untuk menjebut Undang-undang Darurat dan Perpu-perpu jang dengan Undang-undang No. 1 tahun 1961 sekaligus telah ditetapkan mendjadi Undang-undang; misalnja Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1959 dan Perpu No. 4 tahun 1960 disebut berturut-turut „Undang-undang No. 7 Drt/1959,, dan Undang-undang No. 4/Prp/1960”.

Ketetapan² M.P.R.S. No. I maupun No. II/MPRS/1960 sangat berpengaruh terhadap segala Undang-undang jang dilahirkan dalam tahun 1961 dan tahun-tahun selandjutnja, lebih-lebih dengan adanja ketentuan² seperti termasuk dalam pasal 8 ayat (2) Ketetappan No. II/MPRS/1960, bahwa „untuk mendjamin berlangsungnja Pembangunan Semesta Berentjana Delapan Tahun 1961 - 1969, pelaksanaan pembangunan ditetapkan dengan ketentuan per-undang²an atau pasal 7 (2) jang menentukan bahwa „apabila guna pembiajaan pembangunan perlu diadakan kerdja-sama ekonomi dan tehnik dengan luar

negeri, hal demikian disusun dalam per-undang²an bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat”.

Rantjangan-rantjangan Undang-undang jang dalam tahun 1961 diselesaikan oleh D.P.R.-G.R. ber-sama²dengan Pemerintah, dengan memperhatikan Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. di-antaranya ialah :

1. R.U.U. tentang Wadjib kerdja Sardjana, jang mengatur penetapan dan penggunaan tenaga² Sardjana dalam rangka pembangunan semesta ;
2. R.U.U. tentang pengumpulan uang dan barang, untuk menertibkan pengumpulan uang dan barang, sehingga dapat berguna bagi masyarakat jang sedang membangun ;
3. R.U.U. tentang Perguruan Tinggi Rantjangan Undang-undang ini jang mengatur soal-soal pokok dalam bidang perguruan tinggi Pemerintah maupun swasta (mengenai fungsi, status, wewenangnja dan lain-lain) dimaksudkan untuk mendidik kader-kader ahli pembangunan ;
4. Beberapa R.U.U.-R.U.U. pokok, ialah R.U.U. Pokok Kedjaksaan dan R.U.U. Kepolisian Negara sebagai alat penegak hukum/alat revolusi jang terutama bertugas berturut-turut sebagai penuntut umum dan untuk keamanan didalam negeri dapat menunaikan tugasnja dengan sebaik-baiknya ; selanjutnja R.U.U. Pokok Kepegawaian untuk mendjamin kedudukan hukum pegawai negeri, sehingga dapat didjadikan dasar jang kuat untuk penjurusan aparatur negara jang berdaja-guna sebagai alat revolusi, sesuai dengan haluan negara dan haluan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan-ketetapan No. I dan II/MPRS/1960.

Adapun disamping 22 Undang-undang, dalam tahun 1961 D.P.R.-G.R. telah mengeluarkan 4 buah Pernyataan Pendapat, jaitu : Pernyataan Pendapat D.P.R.-G.R. tentang bantuan setia kawan terhadap perjuangn rakjat Angola (pleno DPR-GR 31 Djuli 1961); Pernyataan Pendapat D.P.R.-G.R. tentang Pembebasan Irian Barat (pleno D.P.R.-G.R. 13 Oktober 1961);

Pernyataan Pendapat D.P.R.-G.R. tentang Perlutjutan Sendjata dan Persendjataan nuclear (pleno DPR-GR 14 Oktober 1961) dan Pernyataan Pendapat D.P.R.-G.R., tentang Keterangan Pemerintah mengenai persoalan Irian Barat dalam rangka kelanjutan komando Presiden/Panglima Besar Trikora (pleno DPR-GR 19-12-61 malam).

Tahun 1962.

Dalam tahun 1962, hasil bersama antara D.P.R.-G.R. dengan Pemerintah ialah 19 Undang-undang, jaitu Undang-undang No. 1 sampai dengan No. 19 tahun 1962 jang berturut-turut masing-masing dimuat dalam Lembaran Negara No. 2, 3, 4, 5, 10, 12, 25, 26, 27, 28, 48, 58, 59, 64, 80, 81, 88, 98, dan 99 tahun 1962.

Dalam bidang pembangunan antara lain diselesaikan : R.U.U. tentang Perusahaan Daerah, jang mengatur tjara mengurus dan bentuk hukum perusahaan daerah swatantera dalam rangka struktur ekonomi terpinpin dan pelaksanaan pemberian otonomi jang riil/luas kepada Daerah-daerah; R.U.U. tentang ketentuan² pokok Bank Pembangunan Daerah, untuk mempertinggi daja-usaha didaerah untuk membangun, jaitu dengan mendirikan Bank-bank di-daerah² jang bertugas mengikutsertakan pihak-pihak swasta nasional dalam pembiayaan projek² pembangunan di-daerah²; R.U.U. Bank Pembangunan Swasta, jaitu tentang pendirian Bank dalam rangka pola pembangunan Nasional Semesta Berentjana, untuk mengerahkan modal dan potensi pihak swasta nasional pada umumnya sebagai sumber pembiayaan, chususnja dibidang produksi.

Sesuai dengan ketentuan² dalam Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, maka dibidang kesehatan telah ditetapkan beberapa rantjangan undang-undang sebagai pelaksanaan lebih landjut Undang² Pokok Kesehatan, ialah : Undang-undang tentang Karantina Laut dan Karantina Udara, jang bermaksud menolak dan mentjegah masuk dan keluarnya penjakit karantina dergan kapal laut/pesawat udara ;

Undang-undang tentang wabah, jang maksud-tudjuannya mentjegah, mengawasi dan mengatasi meluasnja wabah serta memberantas wabah ;

Undang-undang tentang Hygeni untuk usaha-usaha bagi umum, jang mengatur perlindungan/pemeliharaan dan usaha² mempertinggi kesehatan masjarakat.

Dalam bidang hubungan internasional telah dihasilkan tiga buah Undang-undang, jaitu : tentang Pembuatan Perdjangjian Persahabatan dan kerdja-sama antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Tjekoslowakia ; tentang Pembuatan Perdjangjian Persahabatan dan Kerdja-sama antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Hongaria ; dan tentang Pembuatan

Perdjandjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan antara Republik Indonesia dan Djepang.

Adapun disamping 19 Undang-undang, dalam tahun 1962 D.P.R.-G.R. telah mengeluarkan sebuah pernyataan pendapat tentang Keterangan Pemerintah mengenai Perdjandjian R.I. dengan Keradjaan Nederland mengenai Irian Barat.

TAHUN 1963.

Dalam tahun 1963, jang merupakan hasil bersama antara D.P.R.-G.R. dengan Pemerintah ialah 14 buah Undang-undang, jaitu Undang-undang No. 1 sampai dengan No. 14 tahun 1963 jang berturut-turut dimuat dalam Lembaran Negara No. 68, 69, 70, 71, 78, 79, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 109 dan 110 tahun 1963.

Dalam bidang Kesehatan, D.P.R.-G.R. bersama-sama dengan Pemerintah pada tahun 1963 telah menghasilkan Undang² tentang tenaga kesehatan, jang mengatur sjarat-sjarat dan izin untuk melakukan pekerdjaan bagi tenaga-tenaga dibidang farmasi, kebidanan, perawatan, dan kesehatan masjarakat ; dan menghasilkan pula Undang-undang tentang Farmasi, jang memuat ketentuan² pokok tentang usaha², perbekalan dibidang farmasi jang berbahaya dan obat-obat.

Dalam hubungannja dengan penjelesaian projek "B" Pola Pembangunan Semesta Berentjana (Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960) jang hasil-hasilnja harus digunakan untuk Projek "A", maka peraturan-peraturan mengenai soal pertambangan, chususnja pertambangan minjak, merupakan satu hal jang mendapat perhatian dari D.P.R.-G.R., baik dalam rapat-rapat Komisi D (Produksi) dan F (Keuangan), dalam rapat-rapat Gabungan kedua Komisi tersebut, dalam rapat-rapat Gabungan Golongan maupun dalam rapat pleno D.P.R.-G.R. Perhatian tersebut lebih-lebih setelah oleh Pemerintah disampaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1962 dan rantjangan undang-undang tentang pengesahan beberapa perdjandjian-perdjandjian karya dengan perusahaan² minjak asing untuk mendapatkan persetudjuan D.P.R.-G.R.

Mengenai soal pertambangan dapat dikemukakan, bahwa berdasarkan perundang-undangan kolonial, — „Minordonnantie ' dan peraturan-peraturan lain jang bersangkutan —, jang dibawah nauangan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 masih berlaku terus, maka perusahaan minjak di Indonesia

jang bekerdja atas konsesi, jang memberikan kepada mereka kekuasaan jang luar biasa, mirip dengan kekuasaan pemerintahan. Sesudah Undang-undang Dasar 1945 berlaku kembali, maka oleh Pemerintah, sebagai pelaksanaan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 37 tentang Pertambangan dan No. 14/1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, jang kemudian dengan persetujuan D.P.R.-G.R. menjadi Undang-undang No. 37 Prp/1960 dan Undang-undang No. 44 Prp/1960. Menurut Undang-undang itu, maka kuasa-kuasa pertambangan tidak dapat kepada perusahaan-perusahaan asing dan pada dasarnya hanyalah perusahaan-perusahaan negara jang dapat mengusahakan pertambangan dan pengolahan minyak. Perusahaan² asing lama jang ada di Indonesia masih diizinkan meneruskan usahanya, tetapi diharuskan menyesuaikan diri dengan politik perminjangan baru dari Pemerintah R.I., dalam jangka waktu tertentu. Adapun selama perusahaan-perusahaan negara belum dapat melakukan pekerjaannya sendiri sepenuhnya, dapatlah oleh perusahaan-perusahaan negara digunakan tenaga-tenaga asing atau diadakan kontrak pertambangan dengan perusahaan-perusahaan asing menurut syarat-syarat tertentu jang ditetapkan oleh Pemerintah, misalnya bagian keuntungan bersih 60% untuk Pemerintah dan 40% untuk perusahaan asing.

Berhubung dengan itu oleh Pemerintah telah diadakan perundingan dengan pihak Pan American Indonesian Oil Corporation, suatu perusahaan minyak asing baru, dan pada tanggal 15 Juni 1962 telah ditanda-tangani Perdjandjian Karya antara perusahaan negara Pertamina dengan perusahaan asing tersebut, jang disahkan dengan Perpu No. 4/1962 termasuk diatas.

Perundingan-perundingan selanjutnya dengan perusahaan-perusahaan asing lama di Indonesia, ialah Stanvac, Caltex dan Shell dan 2 perusahaan-perusahaan minyak lainnya jang dilakukan dengan bantuan suatu team, dalam mana duduk pula 2 anggota dari Komisi D dari D.P.R.-G.R., ternyata menemui kesulitan², karena perusahaan-perusahaan itu tidak bersedia memenuhi syarat-syarat dari pihak Indonesia. Dalam keadaan demikian pada tanggal 26 April 1963 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18/1963, jang antara lain menetapkan, bahwa tentang waktu peralihan bagi perusahaan-perusahaan minyak

asing untuk menjesuaikan usaha pertambangannya akan berakhir pada tanggal 15 Djuni 1963. Peraturan Pemerintah itu ternjata menggontjangkan perusahaan-perusahaan asing tsb. maupun Pemerintah Amerika Serikat, jang sampai memerlukan mengirim utusan istimewa untuk menemui Presiden Soekarno, jang ketika itu ada di Tokyo. Maka berdasarkan perdjandjian Tokyo tanggal 1 Djuni 1963 dapatlah pada tanggal 25 September 1963 ditandatangani perdjandjian-perdjandjian karya antara Pertamina dengan CALTEX, CALASIATIC dan TOPEO, antara PERMINA dengan STANVAC dan antara PERMINA dengan SHELL, jang mengachiri konsesi-perusahaan CALTEX, STANVAC dan SHELL (jang berasal dari zaman kolonial) dan mendjadikan perusahaan-perusahaan itu sebagai kontraktor dari perusahaan-perusahaan negara tersebut.

Dikalangan D.P.R.-G.R. ada anggota-anggota jang tidak sepenuhnya dapat menjetudjui perdjandjian-perdjandjian itu dan mempersoalkan mengapa dipakai sistim kontraktor dan bukan sistim production-sharing atau mempunyai pendapat lain tentang tjara pembagian keuntungan dan mengharapakan pendjelasan tentang pemilik alat-alat produksi.

Lebih-lebih pada tingkat pemeriksaan-persiapan dalam rapat-gabungan Komisi-komisi D dan F, oleh pihak D.P.R.-G.R. telah diadakan pertukaran fikiran jang mendalam dengan Pemerintah.

Karena sifatnya perdjandjian² karya itu sebagai hasil dari perundingan (dengan pihak asing), maka D.P.R.-G.R. achirnja pada tanggal 8 Nopember 1963 mengesjahkan semua perdjandjian itu tanpa mengadakan perubahan² dalam teksnja. Hanja dalam teks Undang² pengesjahan oleh Pemerintah telah diadjukan perubahan mengenai pasal 2 jang disetudjui oleh D.P.R.-G.R., sehingga dalam pasal itu dengan tegas dinjatakan, bahwa daerah² bekas konsesi jang diusahakan oleh Caltex, Stanvac dan Shell dinjatakan telah dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia sedjak berlakunya Undang² pengesjahan perdjandjian-karya, jaitu diundangkan sebagai Undang² No. 13 tahun 1963 (L.N. No. 109) tentang penetapan Perpu No. 4 tahun 1962 (L.N. No. 24 tahun 1962) tentang pengesjahan „Perdjandjian Karya” antara Perusahaan Negara Pertamina dan Pan American Indonesian Oil Co. untuk diri sendiri dan atas nama Pan American International Oil Corporation, mendjadi Undang².

Adapun disamping 14 buah Undang², dalam tahun 1963 D.P.R.-G.R. telah mengeluarkan sebuah Pernyataan Pendapat tentang Deklarasi Ekonomi. yang pada pokoknya berisi dukungan dari pihak D.P.R.-G.R. terhadap Dekon itu, disertai kesiap-sediaan ikut melaksanakan Dekon dan seruan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melaksanakan Dekon. Pernyataan pendapat ini disetujui dalam rapat pleno D.P.R.-G.R. pada tanggal 29 Maret 1963, satu hari sesudah Dekon diumumkan oleh Presiden Soekarno.

Deklarasi Ekonomi tersebut dilaksanakan dengan maksud semua potensi nasional diabdikan untuk kepentingan revolusi.

Adapun pokok² isi dari Dekon tersebut ialah sebagai berikut ;

P e r t a m a :

Akan diusahakan perbaikan/penjempurnaan organisasi dan management Perusahaan Negara, dan diadakan penegasan tentang tugas² Dewan Perusahaan sebagai alat sosial support dan social control.

Untuk dapat mentjapai maksud pengerahan funds and forces, maka berbagai matjam organisasi pengusaha swasta akan diterbitkan oleh Pemerintah.

Badan Musjawarah Nasional Swasta yang representatif perlu segera dibentuk, diharapkan supaya badan ini a.l. dapat menggerakkan modal dalam masyarakat dan „domestic capital”, kepunjaan bangsa asing untuk pembangunan (yang terakhir ini tidak diberikan fasilitas memindahkan keuntungan keluar negeri).

K e d u a :

Perlu meninjau kembali dan dimana perlu mengubah berbagai peraturan, proses serta prosedur administratif yang kompleks untuk dapat mentjapai efisiensi, menghindarkan pemborosan dan doubleuses.

K e t i g a :

Perlu terus-menerus berichthar untuk mentjapai perbaikan dan penjempurnaan pada Lembaga² Keuangan, seperti aparatur fiskal ,perbankan, chususnja Bank² Pembangunan daerah dan Swasta.

K e e m p a t :

Usaha penjempurnaan labour forces harus terus-menerus

dilakukan dengan penjempurnaan statistics, technical dan managerial skill, serta berbagai matjam job-training.

K e l i m a :

Perlu diperhatikan, bahwa didalam bidang² operasionil diperlukan koordinasi jang baik untuk mengkonsentrir segala usaha dan fikiran dalam menaikkan kegiatan ekonomi dan keuangan.

Dalam hubungan ini Komando Operasi Ekonomi harus tetap ada.

Karena prosedur, proses dan administrasi jang bertalian de-ekspor dan impor ternjata sangat kompleks, maka kepada Komando Operasi Ekonomi akan diberikan tugas untuk segera mengadakan penelitian dan tindakan² guna mentjapai perbaikan/penjederhanaan prosedur² jang bersangkutan.

TAHUN 1964.

Dalam tahun 1964, hasil antara D.P.R.-G.R. dengan Pemerintah ialah 36 Undang², jaitu Undang² No. 1 sampai dengan No. 36 tahun 1964 jang ber-turut² dimuat dalam Lembaran Negara No. 3, 51, 54, 56, 59, 61. 66, 69, 72, 78, 84, 93 s/d 97, 101, 106 s/d109, 113 s/d 121, 124, 131, 137, 138, 140 dan 141.

Dalam tahun 1964 tidak sedikit djumlah Rantjangan Undang² jang berdasarkan atau berpedoman pada Ketetapan² M.P.R.S. No. I dan II/MPRS/1960 dan No. IV/MPRS/1963 tentang pelaksanaan Garis² Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan sebagai salah satu hasil sidang ke-II M.P.R.S. jang berlangsung dari tanggal 15 s/d 22 Mei 1963 di Bandung.

Jang telah diselesaikan oleh D.P.R.-G.R. ber-sama² dengan Pemerintah dalam tahun 1964 antara lain ialah :

- a. dibidang kehakiman : R.U.U. tentang Ketentuan² Pokok Kekuasaan Kehakiman, tentang Pengadilan Landreform, ialah ber-turut² sebagai U.U. No. 19 tahun 1964 (L.N. No. 106) dan U.U. No. 21 tahun 1964 (L.N. No. 109).
- b. dibidang keuangan/pembiajaan : R.U.U. tentang pemberian perangsang penanaman modal, tentang pindjaman Obligasi Pembangunan, tentang Pungutan Istimewa untuk Pembiajaan Pembangunan Djalan Raya Sumatera, tentang Lalu-lintas Devisa; (UU No. 26, 29, dan 36 tahun 1964);
- c. dibidang kesedjahteraan : R.U.U. tentang Dana Pertanggung Wadajib Ketjelakaan Penumpang, tentang Dana

Ketjelakaan Lalu-lintas Djalan, masing² dalam UU No. 33 dan UU No. 34 tahun 1964.

Adapun disamping 36 Undang², dalam tahun 1964 D.P.R.-G.R. telah mengeluarkan lima buah Pernyataan Pendapat, jaitu : Pernyataan Pendapat tentang mendukung sepenuhnya Komando Presiden/Pemimpin Besar Revolusi tentang Gerakan Sukarelawan untuk menggantang Neo-kolonialisme „Malaysia”; Pernyataan Pendapat tentang mendukung sepenuhnya kebidjaksanaan Presiden/P.B.R. Dr. Ir. Soekarno dalam menentang Projek Malaysia, Pernyataan Pendapat tentang Keterangan Pemerintah mengenai Situasi Achir² ini (1964); Pernyataan Pendapat tentang Sikap Indonesia terhadap Olympic Games; Pernyataan Pendapat tentang Intervensi Amerika Serikat dan Belgia di Kongo.

TAHUN 1965.

Dalam tahun 1965, chususnya sampai tanggal 11 Nopember 1965, jang merupakan hasil bersama antara D.P.R.-G.R. dengan Pemerintah ialah 21 Undang², jaitu Undang² No. 1 s/d No. 21 tahun 1965 jang ber-turut² masing² dimuat dalam Lembaran Negara No. 2, 19, 25, 32, 48, s/d 55, 70, 75 s/ 79, 83, 84, 86 dan 101 tahun 1965.

Sebagian besar dari undang² jang dihasilkan dalam tahun 1965 adalah lebih bersifat tehnik meskipun djuga memperhatikan pertimbangan² dari segi² politis. Dalam 3 buah Undang² tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, jaitu Pembentukan Pengadilan Tinggi di Den Pasar dalam UU No. 1/1965, di Bandjarmasin dalam UU No. 20/1965, dan Bukit Tinggi dalam UU No. 21/1965, ber-turut² adalah merupakan perubahan daerah hukum pengadilan tinggi di Makasar, Surabaja dan Medan. Demikian pula dalam tudjuh buah Undang² tentang pembentukan² daerah² tingkat II di Palangka Raya, Indragiri, Sarolangun-Bangka, Tanah Lauat-Tapin dan Tabalong, Batang dan Sabang, adalah semuanya itu merupakan perubahan³ terhadap daerah² tingkat II di Kalimantan, Kabupaten dalam lingkungan Sumatera Tengah, Kabupaten³ dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah dan kabupaten² dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara. Baik Undang² tentang pembentukan² Pengadilan Tinggi maupun tentang pembentukan² daerah tingkat II, semuanya adalah terutama dengan pertimbangan² efficienci kerdja dan

kelantjaran administratif disamping pertimbangan² politis setempat, dan bagi pemekaran² daerah tersebut adalah untuk memanfaatkan kemampuan yang ada pada daerah agar dapat lebih ditingkatkan lagi aktifitas daerah² yang bersangkutan. Dua Undang² lagi yang bersifat teknis yaitu UU No. 3 tahun 1965 (LN. No. 54) tentang Penetapan Perpu No. 5 tahun 1962 tentang perubahan UU No. 2 Prp. tahun 1960 tentang Pergudangan.

Disamping sejumlah Undang² yang lebih bersifat teknis tersebut, ada dua undang² lainnya karena pertimbangan² pada waktu itu akan ternyata sudah sangat jauh berbeda dengan hal² yang meminta perhatian pada tahun² berikutnya, yaitu Undang² No. 14 tahun 1965 (L.N. No. 75) tentang Perkoperasian dan Undang² No. 15 tahun 1965 (L.N. No. 76) tentang Veteran R.I., keduanya ditinjau kembali pada tahun berikutnya (1966-1967) dan melahirkan undang² baru sebagai penggantinya. Demikian pula Undang² No. 13 tahun 1965 (L.N. No. 70) tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung dan Undang² No. 18 tahun 1965 (LN No. 83) tentang Pokok² Pemerintahan Daerah, keduanya juga ditinjau kembali pada tahun² (1968-1970) berikutnya. Jadi disamping beberapa undang² yang lebih bersifat teknis, sebagian produk legislatif tahun 1965 juga segera mendapat tinjauan kembali. Hal ini dapat dimengerti karena adanya perbedaan² yang fundamental antara pokok² pemikiran pada Zaman Orde Lama dengan pokok² pemikiran pada Zaman Orde Baru.

Produk selanjutnya dalam tahun 1965, sampai tanggal 15 Nopember 1965, disamping 21 Undang², ialah 11 Pernyataan Pendapat, yaitu :

- Pernyataan Pendapat tentang mendukung sepenuhnya Keputusan Presiden Soekarno/P.B.R. tentang keluarnya Indonesia dari P.B.B. (pleno D.P.R.-G.R. 11 Djanuari 1965);
- Pernyataan Pendapat tentang Indo Tjina;
- Pernyataan Pendapat tentang Palestina;
- Pernyataan Pendapat tentang Penjatuan Kembali Korea;
- Pernyataan Pendapat tentang Agresi/Intervensi Angkatan Bersendjata Amerika Serikat terhadap Dominika;
- Pernyataan Pendapat tentang dukungan terhadap Delegasi R.I. ke Konperensi Asia-Afrika II di Aldjazair;
- Pernyataan Pendapat tentang Takari;

- Pernyataan Pendapat tentang Masalah Palestina dan Kashmir;
- Pernyataan Pendapat tentang Rhodesia Selatan dan terakhir nasional anti Pangkalan Militer Asing).
- Pernyataan Pendapat tentang Rhodesia Selatan dan terakhir ialah Pernyataan Pendapat tentang Petualangan „Gerakan 30 September” yang disetujui setjara aklamasi tanpa perdebatan pada tanggal 15 Nopember 1965.

**Ichisar hasil pekerjaan D.P.R.-G.R. dari tanggal 25 Juni 1960
sampai dengan 15 Nopember 1965**

Tahun	Undang-undang yang dihasilkan DPR-GR bersama Pemerintah	Pernyataan Pendapat D.P.R.-G.R.
1960	5 Undang-undang	4 Pernyataan Pendapat
1961	22 Undang-undang	4 Pernyataan Pendapat
1962	19 Undang-undang	1 Pernyataan Pendapat
1963	14 Undang-undang	1 Pernyataan Pendapat
1964	36 Undang-undang	5 Pernyataan Pendapat
1965	21 Undang-undang	11 Pernyataan Pendapat
Djumlah : 117 Undang-undang		26 Pernyataan Pendapat

§. 7. SEKRETARIAT

Dengan terbentuknja Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong pada tanggal 25 Djuni 1960, susunan dan tjara bekerdja Sekretariat berbeda dari Dewan-dewan Perwakilan Rakjat jang ada sebelumnja, antara lain khususnja dengan adanja perpindahan titik berat pekerdjaan dari rapat-rapat pleno kerapat-rapat Komisi-komisi.

Maka setelah mendengar pendapat-pendapat Pimpinan Sekretariat dan Panitia Rumah Tangga, Pimpinan D.P.R.-G.R. dengan Keputusan No. 21/Pimp/1961 tanggal 20 September 1961 menjabut Keputusan P.R.T. No. 1/Staf/1955 dan menetapkan Peraturan baru tentang Susunan dan Pembagian Pekerdjaan Sekretariat D.P.R.-G.R.

Menurut Keputusan Pimpinan D.P.R.-G.R. itu Sekretariat D.P.R.-G.R., jang dipimpin oleh Sekdjen, dengan Pimpinan D.P.R.-G.R. sebagai badan pengawas tertinggi, terdiri dari 4 Biro, jaitu:

- Biro Sekdjen,
- Biro Perundang-undangan,
- Biro Tata-usaha dan Biro Khusus, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro.

Biro Sekdjen dibagi dalam 3 Urusan, ialah: Urusan-urusan 1. Urusan Protokol dan Urusan Hubungan Masyarakat, 2. Urusan Arsip-Ekpedisi, 3 Urusan Dinas Dalam. Biro Per-undang²an terdiri dari 5 Urusan-urusan: 1. Urusan Penelitian, 2. Urusan Permusjawaratan, 3. Urusan Tata-usaha Perundang-undangan, 4. Urusan Dokumentasi dan 5. Urusan Perpustakaan. Biro Tata usaha meliputi 3 Urusan-urusan: 1. Urusan Kepegawaian, 2. Urusan Keuangan dan 3. Urusan Perlengkapan; Biro Khusus, terdiri dari Urusan-urusan: 1. Urusan Angkutan dan Perdjalan, 2. Urusan Kesedjahteraan dan 3. Urusan Pertjetakan dan Penerbitan.

Disamping Kepala² Biro ada para Sekertaris DPR-GR jang berkewadajiban membantu Pimpinan D.P.R.-G.R. dalam memimpin dan melaksanakan keputusan² dari rapat² Pimpinan, Panitia Musjawarah, Panitia Rumah Tangga, Panitia Anggaran dan rapat² Pleno, serta menjekertarisi dan ikut menjelesaikan pekerdjaan Komisi².

Dalam melakukan tugas memimpin Sekertaris, Sekdjen dibantu oleh Staf Sekdjen yang terdiri dari para Sekertaris dan Kepala² Biro tersebut.

Sebagai akibat reorganisasi itu dan (kebetulan bersamaan waktunya) kepergian Sekdjen Rusli S.H. keluar negeri dengan tugas belajar selama setahun di Amerika, maka terjadilah mutasi dikalangan pegawai² Sekertariat, Saudara Soemarsono Pringgodirdjo S.H. ditundjuk sebagai Pd. Sekdjen, Saudara Islan dan Sunito ditundjuk sebagai Sekertaris, disamping Saudara Djoko Soemarjono SH. dan S. Poerwadi yang lebih dahulu telah mendjabat kedudukan Sekertaris. Selandjutnja ditetapkan sebagai Kepala² Biro Sekdjen dan Biro Per-undang²an ber-turut² Saudara Soehadi Tjondrokoesoemo dan Djoko Soemarjono SH. (merangkap Sekertaris), sedangkan kedudukan Kepala Biro Tata-Usaha dan Kepala Biro Khusus sementara dirangkap oleh para Sekertaris, S. Poerwadi dan Islan. Beberapa bulan kemudian perangkapan itu diakhiri dengan penundjukan M. Widarma dan Moh. Oesin sebagai Kepala Biro Tata-Usaha dan Kepala Biro Khusus.

Organisasi baru itu dalam pelaksanaannya dianggap oleh Pimpinan DPR-GR belum dapat membawa hasil² yang diharapkan. Maka setahun kemudian, dengan memperhatikan pula Peraturan Presiden No. 4 tahun 1964 tentang Pokok² Organisasi Aparatur Pemerintahan Negara pada Tingkat Tertinggi, Peraturan Presiden No. 5 tahun 1962 tentang Pedoman-kerdja Administratif (Peraturan tata-tertib) Aparatur Pemerintahan Negara pada Tingkat Tertinggi, serta surat² Menteri Pertama tanggal 20 Agustus 1962 No. 15163/62 dan tanggal 7 September 1962 No. 16221/62, yang antara lain mengemukakan keinginan Presiden, agar nama jabatan „Sekertaris Djenderal” tidak digunakan lagi, Pimpinan D.P.R.-G.R. meninjau kembali susunan organisasi itu dan kemudian dengan Keputusan No. 51/Pimp/1962 tanggal 26 Oktober 1962 menetapkan „Pokok² Organisasi Sekertariat D.P.R.-G.R.

Keputusan tersebut menegaskan, bahwa Sekertariat DPR-GR, dengan Pimpinan D.P.R.-G.R. sebagai badan pengawas tertinggi, merupakan badan-pelaksana kebidjaksanaan Pimpinan D.P.R.-G.R. serta badan penjelenggara urusan kepaniteraan, urusan kerumah-tangga D.P.R.-G.R.

Sekretariat D.P.R.-G.R. terdiri dari 3 Biro, yaitu Biro I (Umum), Biro II (Per-undang²an) dan Biro III (Tata-Usaha), masing² dipimpin oleh seorang Kepala Biro (Biro II oleh Sekretaris-kepala Biro), sedangkan pimpinan atas seluruh Sekretariat terdiri dari 2 pejabat, ialah Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum (kemudian disingkat dengan : Sekum dan Wasekum).

Susunan Biro² lebih kurang sama dengan susunan Biro² dari tahun 1961, hanyalah bagian² dari Biro² tidak disebut „Urusan” melainkan „Bagian”, Biro I (Umum) terdiri dari 3 Bagian² yang sama dengan 3 Urusan dari Biro Sekdjen dahulu, Biro II (Per-undang²an) hampir sama dengan Biro Per-undang²an dahulu, hanyalah tanpa Bagian „Penelitian”, sedangkan Biro III (Tata-Usaha) meliputi Urusan² dari Biro² Tata-Usaha dan Khusus dahulu tanpa Bagian „Pertjetakan dan Penerbitan”.

Dalam mengkoordinir pekerjaan dan perentjanaan Pimpinan Sekretariat dibantu oleh Staf Sekretaris Umum, yang berbeda dengan Staf Sekdjen dahulu. Staf Sekretaris Umum ini terdiri dari pejabat² yang tidak merangkap jabatan² lain.

Selanjutnya kedudukan „Sekretaris² D.P.R.”, yang ada dalam susunan² Sekretariat dalam waktu yang lampau, ditiadakan dan diganti dengan jabatan „Sekretaris Perundang-undang” atau „Sekretaris² Bidang”, yang membantu Sekretaris/Kepala Biro Per-undang²an dalam mengurus pekerjaan² kepaniteraan dari Panitia², Komisi², rapat² pleno, masing² menurut bidangnya sendiri² yaitu : Bidang Pimpinan, Bidang Anggaran Negara, Bidang Luar Negeri/Dalam Negeri, Bidang Pertahanan dan Produksi dan sebagainya.

Dengan berlakunya organisasi baru itu terjdadi mutasi lagi dikalangan pegawai² Sekretariat. Dalam mutasi itu termasuk pula pembebasan dengan hormat terhadap Mr. Rusli dan Mr. Sumarsono Pringgoredjo dengan Keputusan Presiden No. 475/M/Tahun 1962 tgl. 26 Djuni 1963 untuk kemudian diperbantukan kepada Pimpinan D.P.R.-G.R. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden No. 102/M/Tahun 1963 tgl. 26 Djuni 1963 atas pertimbangan bahwa berhubungan dengan pembebasan Rusli SH dan Sumarsono Pringgoredjo SH, masing² dari jabatan Sekretaris Jenderal dan Sekretaris I.D.P.R. dengan Keputusan Presiden No. 475/M/Tahun 1962 tsb. maka perlu mengangkat penggantinya, yaitu Djoko Soeharjono SH ditetapkan untuk menjadi Se-

kertaris Umum (Sekertaris Djenderal) dan Islan mendjadi Wakil Sekertaris Umum (Wakil Sekertaris Djenderal).

Adapun pengisian Kepala² Biro ialah sebagaimana dimuat dalam surat edaran Pimpinan D.P.R.-G.R. No. 25/AE/DPRGR/'62 tgl. 2-11-1962, jaitu : R. Suhadi Tjondrokusumo (Kepala Biro I/Umum), Soenito (Kepala Biro II/Per-undang²an), R.S. Poewadi (Wakil Kepala Biro II/Per-Undang²an) dan Mh. Oesin (Kepala Biro III/Tata-usaha). Kemudian setelah Soenito atas permintaan sendiri berhenti dari djabatan negeri, maka dengan Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 29/Pimp/II/'63-'64 tgl. 30 Mei 1964 RS. Poewadi diangkat mendjadi Kepala Biro II dan dengan Keputusan Pimpinan D.P.R.-G.R. No. 64/Pimp/IV/64-65 tgl. 19 Djuli 1965 Drs. Saroso diangkat mendjadi Wakil Kepala Biro II.

PIMPINAN D. P. R. - G. R.
SEDJAK 17 MEI 1966



**WAKIL KETUA D.P.R.-
G.R. DR. SJARIF
THAJEB.**



**WAKIL KETUA D.P.R.-
G.R. Mh. ISNAENI.**



**KETUA D.P.R.-G.R.
H. A. SJAICHU.**



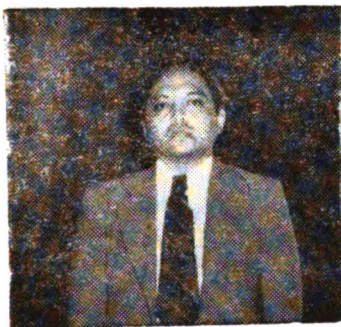
**WAKIL KETUA D.P.R.-
G.R. DRS. BEN MANG
RENG SAY.**



**WAKIL KETUA DPR-GR
SULISTIO S.H.**

Digitized by Google

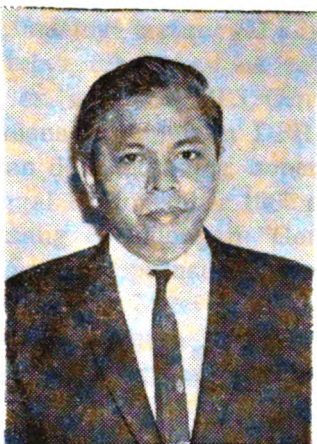
Digitized by Google



**SEKDJEN D.P.R.S.,
MR. SUMARDI**
Tahun 1950 — Th. 1954,



**SEKDJEN D.P.R.S.,
MR. ROESLI**
Tahun 1954 — Th. 1961,



**SEKDJEN D.P.R.-G.R.,
SRI HARDIMAN S. H.**
Tahun 1969,



**Pd. SEKDJEN D.P.R.-
G.R. MR. SUMARSONO**
PRINGGODIRENJO
Tahun 1960 — Th. 1962.



**SEKDJEN D.P.R.-G.R.
MR. DJOKO SUMAR-
JONO**
Tahun 1962 — Th. 1969.

Digitized by Google

B A B I I I

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG MINUS P.K.I.

(15 Nopember 1965 - 19 Nopember 1966)

§. 1. P E M B E N T U K A N .

Dengan Surat Keputusan Pimpinan D.P.R.-G.R. No. 10 dan No. 13/Pimp/I/65-66, masing² tertanggal 22 Oktober 1965 dan 12 Nopember 1965 telah dibekukan sementara sedjumlah 62 anggota² D.P.R.-G.R. ex. anggota² PKI/Ormas-ormasnja/Simpatisan²nja. Kebidjaksanaan Pimpinan DPR-GR dalam kedua putusan itu dibenarkan dan didukung sepenuhnya oleh rapat pleno D.P.R.-G.R. tanggal 15 Nopember 1965 dalam bentuk Pernyataan Pendapat tentang Petualangan "Gerakan 30 September". Selandjutnja dengan Keputusan Pimpinan D.P.R.-G.R. No. 31/Pimp/III/65-66 tanggal 7 Mei 1966, 62 anggota tersebut dianggap berhenti sebagai anggota D.P.R.-G.R. dan sekaligus dihentikan pula pemberian uang gadji, uang kehormatan dan lain²nja.

Dari 62 anggota D.P.R.-G.R. jang dianggap berhenti tersebut diatas tidak diganti. "Pemberhentian" jang "tidak diikuti penggantian/pengisian" itu menandai adanja "D.P.R.-G.R. minus P.K.I.", meskipun sebenarnja dasar hukumnja masih tetap sama jaitu Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960.

Dengan diperhentikannja 62 anggota DPRGR tersebut diatas maka DPRGR sebagai Lembaga Legislatif setjara formil telah membersihkan dirinja dari anggota² jang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan G 30 S/PKI.

§. 2. K E A N G G O T A A N .

A. Djumlah dan Mutasi.

Dalam masa kerdja "D.P.R.-G.R. minus P.K.I." dari tanggal 15 Nopember 1965 s/d 19 Nopember 1966 telah terdjadi mutasi/penggantian dikalangan anggota² D.P.R.-G.R. Mutasi/penggantian tersebut antara lain disebabkan karena di reca¹, penggantian karena anggota jang bersangkutan meninggal dunia dan ada pula karena anggota jang bersangkutan diangkat mendja-

di Menteri. Penggantian ini seluruhnja berdjumlah 43 anggota, jaitu 1 anggota pada bulan Februari 1966, 7 anggota pada bulan Mei 1966, 32 anggota pada bulan Djuni 1966 dan 3 anggota pada bulan Agustus 1966, sehingga susunan keanggotaannja mendjadi sebagai berikut :

GOLONGAN NASIONALIS :

P.N.I.	44 anggota ;
IP-KI	2 anggota ;

GOLONGAN ISLAM :

N.U.	36 anggota ;
P.S.I.I.	5 anggota ;
PERTI	2 anggota ;

GOLONGAN KRISTEN KATHOLIK :

Parkindo	6 anggota ;
Katholik	5 anggota ;

GOLONGAN KARYA :

1). Sub Golongan Karya Angkatan Bersendjata :

Angkatan Daarat	15 anggota ;	
Angkatan Laut	7 anggota ;	
Angkatan Udara	7 anggota ;	
Angkatan Kepolisian	7 anggota ;	
OPR/OKD	1 anggota ;	
Veteran	1 anggota ;	
		38 anggota ;

2). Sub Golongan Kerochanian :

Ulama Islam/N.U	9 anggota ;	
Ulama Islam/PSII	6 anggota ;	
Ulama Islam/Perti	3 anggota ;	
Ulama Islam/PPTI	1 anggota ;	
Ulama Islam/Alwaslijah	1 anggota ;	
Ulama Islam/Muhamma- dijah	3 anggota ;	
Ulama Islam/PNI	1 anggota ;	
Ulama Protestan	3 anggota ;	
Ulama Katholik	2 anggota ;	
Ulama Hindu Bali	2 anggota ;	
		31 anggota ;

3). Sub Golongan Pembangunan Materiil :

- dari golongan buruh,

Buruh P.N.I.	9 anggota ;
Buruh N.U.	3 anggota ;
Buruh PSII.	2 anggota ;
Buruh KBKI	1 anggota ;
Buruh Gasbiindo	2 anggota ;

17 anggota ;

- dari golongan tani,

Tani P.N.I.	12 anggota ;
Tani N.U.	2 anggota ;
Tani PSII	1 anggota ;

15 anggota ;

- dari Golongan Koperasi,

Koperasi P.N.I.	1 anggota ;
Koperasi N.U.	1 anggota ;
Koperasi A.D.	1 anggota ;

3 anggota ;

- dari Pengusaha Nasional,

Pengusaha nasional/

P. N. I.	1 anggota ;
---------------	-------------

1 anggota ;

4). Sub Golongan Pembangunan Spirituil :

- dari Golongan Pemuda,

Pemuda P.N.I.	3 anggota ;
Pemuda N.U.	3 anggota ;
Pemuda	2 anggota ;

- dari Golongan Wanita,

Wanita P.N.I.	3 anggota ;
Wanita IP-KI.	1 anggota ;
Wanita N.U.	1 anggota ;
Wanita Kowani	1 anggota ;
Wanita K.B.K.I.	1 anggota ;

- dari Golongan Tjendikiawan/Pendidik,

Tjendikiwan P.N.I.	3 anggota ;
-------------------------	-------------

Tjjendikiawan N.U.	1 anggota ;
Tjendikiawan A.D.	1 anggota ;
Tjendikiawan/pen-	
- dari Angkatan '45	3 anggota ;
didik	3 anggota ;
- dari Gol. Wartawan.	3 anggota ;
	28 anggota

WAKIL DARI IRIAN BARAT	7 anggota ;
Partindo (sementara tidak melakukan kegiatan)	2 anggota

Djumlah seluruhnja 242 anggota ;

B. Pimpinan. ,

Dalam masa kerdjanja selama lebih kurang 1 tahun, "D.P.R.-G.R. minus P.K.I." mengalami empat kali Perubahan Pimpinan D.P.R.-G.R., jaitu :

1). Tanggal 15 Nopember 1965 s/d 26 Februari 1966.

Pimpinan D.P.R.-G.R. dalam struktur Kabinet Dwikora dikurangi M.H. Lukman karena dibekukan sementara kegiatannja oleh D.P.R.-G.R., sehingga Pimpinan "D.P.R.-G.R. minus P.K.I." tinggal terdiri dari :

Menko/Ketua D.P.R.-G.R. : Arudji Kartawinata ;
Menteri/Wakil Ketua D.P.R.-G.R. : I.G.G. Subamia ;
Menteri/Wakil Ketua D.P.R.-G.R. : H.A. Sjaichu ;
Menteri/Wakil Ketua D.P.R.-G.R. : Laksda. Mursalin D.M.

2). Tanggal 26 Februari 1966 s/d 2 Mei 1966.

Pimpinan D.P.R.-G.R. dalam struktur Kabinet Dwikora Jang disempurnakan, dikenal djuga dengan sebutan "Kabinet 100 Menteri", terdiri dari :

Menko/Ketua D.P.R.-G.R. : I.G.G. Subamia ;
Menteri/Wk. Ketua DPR-GR : H.A. Sjaichu ;
Menteri/Wk. Ketua DPR-GR : Asmara Hadi ;
Menteri/Wk. Ketua DPR-GR : Laksda. (L)
Mursalin D.M. ;

Menteri/Wk. Ketua DPR-GR : Brig. Djen. Prof. Dr.
Sjarif Thajeb ;

Kabinet 100 Menteri ini diumumkan pada tanggal 21 Febru-

ari 1966 dan dilantik pada tanggal 24 Februari 1966. Timbang terima Pimpinan D.P.R.-G.R. dilakukan pada tanggal 26 Februari 1966 djam 10. 00 siang dengan disaksikan oleh Panitia Musjawarah, Panitia Anggaran dan Panitia Rumah Tangga dan Pimpinan Golongan-golongan.

3). Tanggal 2 Mei s/d 16 Mei 1966.

Atas usul anggota Dachlan Ranuwihardjo SH. maka untuk melaksanakan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen :

- a. Pimpinan D.P.R.-G.R. harus dipilih sendiri oleh D.P.R.-G.R., dan
- b. Pimpinan D.P.R.-G.R: tidak usah menggunakan sebutan djabatan Menko/Menteri.

Setelah sidnag dischors untuk memberi kesempatan kepada Golongan-golongan bermusjawarah dan kemudian sidang dilandjutkan lagi guna mendengarkan pendapat jang disampaikan oleh para djuru bitjara dari masing² golongan seorang, maka sidang pleno D.P.R.-G.R. pada tanggal 2 Mei 1966 memutuskan :

- a. Pimpinan D.P.R.-G.R. demesioner ; dan
- b. Mengangkat Care Taker Pimpinan D.P.R.-G.R. jang terdiri dari 3 orang jaitu :

H.A. Sjaichu,

Laksda (L) Mursalin D.M., dan

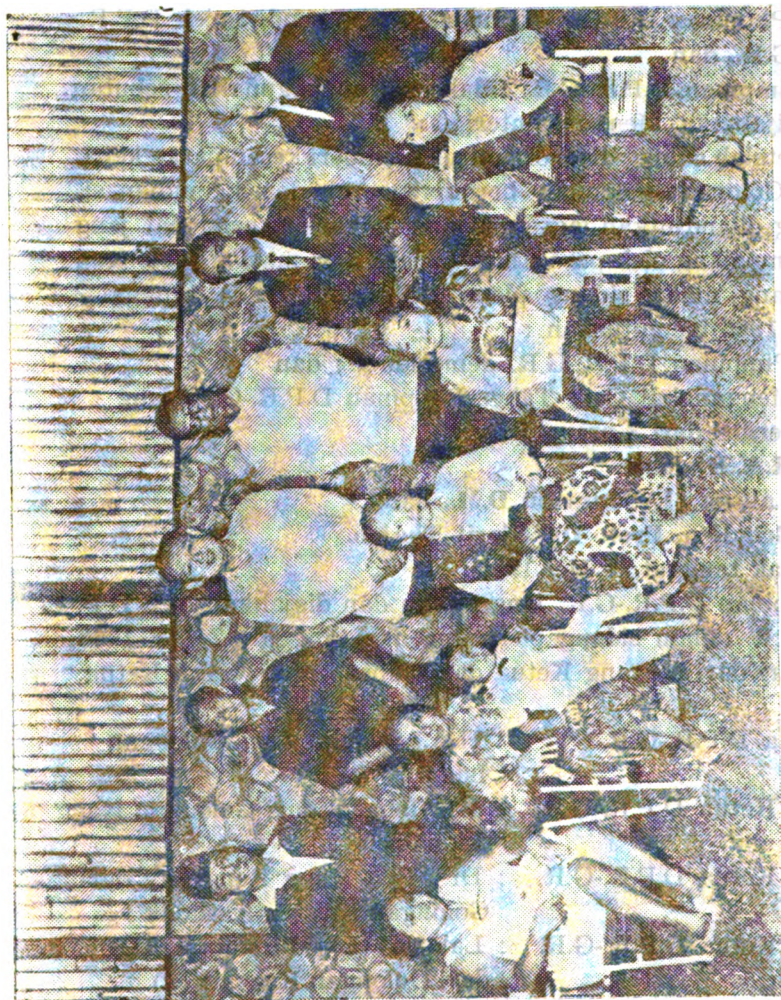
Brigdjen. Prof. Dr. Sjarif Thajeb.

4). Sedjak tanggal 17 Mei 1966.

Pimpinan D.P.R.-G.R. jang dipilih dan disjahkan oleh D.P.R.-G.R. dalam sidang pleno terbuka tanggal 17 Mei 1966 terdiri dari seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua, jaitu :

- Ketua D.P.R.-G.R. : H.A. Sjaichu dari Golongan Islam ;
- Wk. Ketua D.P.R.-G.R. : Mh. Isnaeni dari Golongan Nasionalis ;
- Wk. Ketua D.P.R.-G.R. : Drs. Ben Mang Reng Say dari Golongan Kristen-Katholik ;
- Wk. Ketua D.P.R.-G.R. : Laksda (L) Mursalin D.M. dari Golongan Karya ; (x).

Wk. Ketua D.P.R.-G.R. : Brigdjen. Prof Dr. Sjarif Thajeb dari Golongan Karya ;



Djakarta, 1966.

Perpisahan Pimpinan lama DPR-GR dengan pimpinan jang baru dirumah ketua DPR-GR H.A. Sjaichu diidjalan Slipt. Ketua DPR-GR lama IGG Subamia (ketiga dari kiri diganti oleh H.A. Sjaichu kedua dari kiri)

„Foto Deppen” 66-6173.

Dapat ditambahkan bahwa tjara pemilihan ketua dan wakil ketua adalah didasarkan pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong No. 30/DPR-GR/IV/65-66 tanggal 17 Mei 1966 tentang Peraturan Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat. Pendjelasan atas keputusan ini berbunji sebagai berikut :

- 1) Tjalon-tjalon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong terdiri dari seorang dari Golongan Nasionalis, seorang dari Golongan Islam, seorang dari Golongan Kristen dan Katholik dan 2 orang dari Golongan Karya.
- 2) Prosedure pemilihan tjalon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dalam Golongan-golongan diserahkan sepenuhnya kepada kebidjaksanaan Golongan-golongan masing-masing.
- 3) Prosedure pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong diserahkan sepenuhnya kepada kebidjaksanaan Golongan-golongan ber-sama².
- 4) Tjalon Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, hasil musjawarah dan mufakat antara Golongan-golongan, bersama-sama dengan tjalon-tjalon Wakil-wakil Ketua disjahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

Golongan Karya pada waktu itu tidak berhasil mentjapai kata mufakat dalam musjawarahnja untuk mengajukan 2 tjalon, maka terpaksa dilakukan dengan menempuh tjara voting. Adapun pelaksanaan voting ini ialah sekaligus memilih 2 tjalon.

Tjalon jang diadjukan berdjumlah 8 orang terdiri dari 4 tjalon dari Karya Non ABRI dan 4 tjalon dari Karya ABRI (AD, AU, AL, dan AK).

Tjalon² tersebut diadjukan setjara bersama dalam rapat pleno Karya Besar (ABRI dan Non ABRI) jang khusus diadakan untuk pemungutan suara. Djumlah jang hadir ialah 75 dari 134 anggota sidang Golongan Karya Besar. Kemudian dua tjalon diantarannya terpilih, sebagai tjalon² Ketua dari Golongan Karya.

Hasil pemilihan itu ialah sebagai berikut :

- 14 suara untuk Dachlan Ranuwihardjo SH ;
- 8 suara untuk Tb. A. Suchary Chatib ;

- 7 suara untuk Sjech Marchaban ;
- 6 suara untuk Brigdjen. (Pol) Abdulrachman Setjowibowo ;
- 4 suara untuk Kapten (U) Moch. Busroch ;
- 3 suara untuk Ratu Aminah Hidajat.
- Laksda (L) Mursalin D.M., dengan 54 suara.
- Brigdjen. Prof Dr. Sjarif Thajeb dengan 52 suara.

§. S. KEDUDUKAN, TUGAS, HAK DAN WEWENANG ; HUBUNGAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN.

A. Kedudukan, Tugas, Hak dan Wewenang.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab VI, paragraf 3, huruf besar A, alenia terchir bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 adalah sebagai Pembantu Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi dalam bidang legislatif ; sedang kewadajiban Pimpinan (Ketua dan para Wakil Ketua D.P.R.-G.R.) salah satu diantaranya ialah : Pada waktu² tertentu memberikan laporan kepada Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi (pasal 6 huruf f Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964).

Kedudukan D.P.R.-G.R., sebagai Pembantu Presiden dalam bidang legislatif sebenarnya masih tetap berlaku selama Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 belum ditjabut. Akan tetapi dalam perakteknja sebelum setjara formil Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 tersebut ditjabut, "D.P.R.-G R. minus P.K.I." sudah tdak lagi berkedudukan sebagai pembantu Presiden. Hal ini dibuktikan dengan tidak terlebih dahulu melaporkan kepada Presiden, Pimpinan D.P.R.-G.R. atas inisiatif sendiri dalam masa reses telah mengambil kebidjaksanaan untuk membekukan sementara 62 anggota D.P.R.-G.R. dari anggota² ex P.K.I./Ormas²nja/simpatisannja. Kebidjaksanaan Pimpinan D.P.R.-G.R. ini selanjutnja didukung oleh rapat pleno D.P.R.-G.R. tanggal 15 Nopember 1965 dan kurang lebih lima setengah bulan kemudian Pimpinan D.P.R.-G.R. mengambil kebidjaksanaan lagi untuk menganggap berhenti 62 anggota tersebut. Padahal pasal 3 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 mengatur hak mengangakat dan memberhentikan anggota DPRGR oleh Presiden.

Tindakan² lain jang dapat membuktikan pula bahwa DPR-GR tidak lagi berkedudukan sebagai Pembantu Presiden, ialah

pendemisioneran Pimpinan D.P.R.-G.R. dan pengangkatan Care Taker Pimpinan D.P.R.-G.R. oleh sidang pleno D.P.R.-G.R, tanggal 2 Mei 1966 serta memilih dan mengesahkan sendiri Pimpinan D.P.R.-G.R. oleh sidang pleno D.P.R.-G.R, tanggal 17 Mei 1966.

Kedudukan sebagai pembantu Presiden, setjara juridis formil baru dihapuskan dengan ditjabutnja Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 oleh Peraturan Presiden No. 7 tahun 1966 jang dalam pasal 2 berbunji : „Menierahkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong untuk mengatur dan menetapkan Peraturan Tata-tertib sendiri sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945.”.

Peraturan Tata-tertib jang ditetapkan sendiri oleh D.P.R.-G.R. dengan Keputusan DPR-GR No. 31/DPR-GR/IV/65-66 tanggal 4 Djuni 1966, menjatakan dalam BAB I TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, HAK DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG :

Pasal 1 ayat (1) :

Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong adalah Lembaga Negara jang ber-sama² dengan Presiden membentuk Undang-undang seperti termaksud dalam pasal 5 ayat (1) jo, pasal-pasal 20, 21, 22 dan 23 Undang-undang Dasar 1945 beserta Pendjelasan.

Pasal 1 ayat (2) :

Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan Pemerintah dengan usaha-usaha seperti berikut ;

- a. mengadjukan pertanjaan ;
 - b. meminta keterangan ;
 - c. mengadakan penjelidikan ;
 - d. mengadjukan amandemen ;
 - d. mengadjukan usul pernjjataan pendapat atau usul-usul lain ;
 - f. mengandjurkan/seseorang, djika diatur oleh Undang² ;
- B. Hubungan D.P.R.-G.R. dengan Lembaga-Lembaga Negara lainnja ;

Meskipun "D.P.R.-G.R. minus P.K.I." sudah tidak lagi berkedudukan sebagai pembantu Presiden, namun kerdja-sama

jang diharapkan antara D.P.R.-G.R. dengan Presiden/Kepala Eksekutif masih sering mengalami kesulitan².

Mengingat situasi politik jang masih sangat labil pada waktu itu maka diperlukan adanya usaha² untuk menempatkan setiap persoalan pada proporsinja agar dapat diselesaikan oleh instansi² jang bersangkutan. Untuk memperoleh gambaran jang agak djelas bagaimana mengatasi suatu persoalan jang timbul sebagai akibat adanya kondisi² jang kurang menguntungkan, maka perlu diketahui hasil pertemuan antara Panitia Musjawarah (jang dipimpin langsung oleh Pimpinan D.P.R.-G.R.) dengan Ketua Presidium/Pengembangan Ketetapan M.P.R.S. No. IX/MPRS/1966, jang intinja adalah sebagai berikut :

1. Menjadari akan adanya tanggung-djawab jang sama antara B.P.-M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R. sesuai dengan jang dimaksud dalam UUD 1945, antara lain : wewenang, batas² hak pengawasan dalam hubungannja dengan Keputusan²/Ketetapan² M.P.R.S. jang menurut Tata-tertib M.P.R.S., Badan Pekerja M.P.R.S. perlu mengawasinja, sedang dipihak lain D.P.R.-G.R. mempunyai pula fungsi kontrol terhadap pekerjaan² Pemerintah ; maka perlu adanya pertemuan² jang bersifat konsultatif antara kedua Pimpinan Lembaga (Pimpinan M.P.R.S. dan Pimpinan D.P.R.-G.R.). Konsultatif ini dimaksudkan untuk mengadakan pembagian tugas dalam mengawasi ketetapan² M.P.R.S.
2. Ketua Presidium Kabinet sebagai Pembantu Presiden/Kepala Eksekutif akan menampung dan menanggapi segala persoalan kenegaraan, dan akan selalu berkonsultasi dengan Pimpinan-pimpinan M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R. Hasil dari pertemuan segitiga ini kemudian akan dibawanja kepada Kepala Eksekutif/Presiden untuk dibitjarakan dan dimusjawarahkan.
3. Djika usaha seperti tersebut diatas (angka 2) gagal, baru Ketua Presidium Kabinet akan mempersilahkan kepada Pimpinan M.P.R.S. dan Pimpinan D.P.R.-G.R. bermusjawarah langsung dengan Kepala Eksekutif/Presiden, sedangkan dalam pertemuan sematjam ini Ketua Presidium Kabinet akan menempatkan diri sebagai Pembantu Presiden.
4. Djika dengan djalan tersebut diatas (angka 3) masih gagal, baru dalam keadaan demikian sebagai sendjata terakhir untuk mengatasi kesulitan² kenegaraan kepada M.P.R.S. diper-

silakan mengadakan sidang atas panggilan sidang (Sidang Istimewa) oleh .D.P.R.-G.R., maupun atas keputusan B.P.-M.P.R.S. untuk mengadakan Sidang Umum.

5. M.P.R.S. sebagai instansi terakhir dalam hal turun tangan mengatasi kesulitan² kenegaraan hanya akan mengadakan sidangnya setelah instansi² yang lebih rendah sudah tidak dapat mengatasinya. Dichawatirkan jika M.P.R.S. terlalu mudah mengadakan sidang, maka Ketetapan/Keputusan² yang diambil oleh M.P.R.S. akan menjadi kurang berharga lagi karenanya.
6. Segala sesuatunya didasarkan pada kebijaksanaannya, ialah mana² persoalan yang masih dapat ditacle hendaknya ditacle sendiri oleh masing² Lembaga dibawah M.P.R.S. dengan pentaclean yang se-baik²nja, sedang persoalan² apa yang kiranya masih dapat diisoler hendaknjapun diisoler lebih dahulu, sebab yang penting ialah asal tudjuan dapat ditjapai dengan tidak usah menimbulkan/diganggu oleh hal²/schock² yang tidak perlu, antara lain harus dihindari kemungkinan² yang tidak perlu, antara lain harus dihindari kemungkinan² yang dapat menjebabkan adanya dualisme dan timbulnja ketegangan² baru, yang selanjutnja diterima menjadi konsensus nasional.

C. Kedudukan Keuangan.

Sebagaimana sudah dikemukakan dalam Bab VI paragraf 3 kedudukan keuangan Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota² D.P.R.-G.R. sedjak terbentuknja DPRGR tahun 1960 sampai tahun 1965 telah mengalami beberapa kali perubahan yang antara lain disebabkan karena ladjunya inflasi pada waktu itu.

Untuk menghindari berlarut-larutnja keadaan sehingga akan menambah lagi perubahan-perubahan tentang Peraturan Kedudukan Keuangan tersebut, maka Presidium Kabinet Dwikora mengintrodusir suatu tjara baru.

Tjara baru ini disampaikan oleh Kabinet kepada Pimpinan D.P.R.-G.R. dengan surat No. C/III/3522/C-5/1965 tanggal 29 Nopember 1965 yang disebut **"Paket Harian"**

"Paket Harian" ini pada hakekatnja ialah sedjumlah uang yang diberikan setiap hari kepada para Anggota D.P.R.-G.R. dan kepada Ketua dan Wakil² Ketua D.P.R.-G.R. yang maksudnja ialah sebagai pengganti uang akomodasi dan uang kenda-

raan lokal selama menghadiri sidang D.P.R.-G.R. "Paket Harian" tersebut diberikan disamping uang gadji/honorarium yang diterima setiap bulannya.

Dasarnya :

1. Surat Menko/Ketua D.P.R.-G.R. tanggal 6 September 1965 No. D 2. 08/K/2420/1965.
2. Surat Menteri Urusan Anggaran Negara tanggal 20 Oktober 1965 No .S.O. III/7-39.
3. Surat Presidium Kabinet Dwikora tanggal 29 Nopember 1965 No. C/III/3522/C.5/1965.

Besarnya Uang Paket :

1. Dimulai 1 Oktober 1965
Luar Djakarta — Rp. 150.000 — Uang lama/bulan.
Djakarta — Rp. 100.000,— Uang lama/bulan.
2. Dimulai 2 Mei 1966
Luar Djakarta — Rp. 180.000,— Uang lama/bulan.
Djakarta — Rp. 100.000,— Uang lama/bulan.
3. Dimulai 1 Oktober 1966.
Luar Djakarta — Rp. 300,— Uang Baru/hari.
Djakarta — Rp. 150,— Uang Baru/hari.

§ 4. PERATURAN TATA-TERTIB & PELAKSANAANNJA.

A. Proses Penjusunan Peraturan Tata-tertib D.P.R.-G.R.

Dengan suratnja No. C2.01/K/944 tanggal 10 Mei 1966, Care Taker Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong minta kepada Presiden agar ketentuan² bahwa pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan penjusunan Tata-tertib ditetapkan dengan Peraturan Presiden dirobah.

Berhubung dengan surat tersebut dan berdasarkan atas pertimbangan adanja perkembangan pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, maka dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1966 tertanggal 16 Mei 1966 tentang Peraturan Tata-tertib D.P.R.-G.R. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden ini berbunji : "Mentjabut Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 dan segala Peraturan jang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini". Pasal 2 berbunji : „Menjerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong untuk mengatur dan menetapkan Peraturan Tata-tertibnja sendiri sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Undang³ Dasar 1945".

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 7 tahun 1966 ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong No. 30/ DPR-GR/IV/65-66 tanggal 17 Mei 1966 tentang Peraturan Tata-tertib Pemilihan Pimpinan D.P.R.-G.R..

Pada tanggal 17 Mei 1966 itu djuga rapat pleno DPR-GR memutuskan untuk membentuk Panitia Tata-tertib D.P.R.-G.R. jang susunan keanggotaannja terdiri dari perwakilan Golongan-golongan, jaitu Golongan Islam, Nasionalis dan Kristen-Katholik masing² diwakili oleh 2 orang dan Golongan Karya Besar (Karya ABRI dan Non ABRI) diwakili 5 orang. Panitia ini diketuai oleh R.H. Kusnan. Dengan melalui rapat² team kerdja, panitia Tata-tertib dan panitia Musjawarah, Panitia Tata-tertib ini melaporkan hasil kerdjanja kepada rapat pleno D.P.R.-G.R. jang kemudian menjetudjui/mengesahkan Peraturan Tata-tertib D.P.R.-G.R. pada tanggal 4 Djuni 1966. Dalam laporannja Ketua Panitia/R.H. Kusnan a.l. menjatakan :

Atas garis Tata-Kerdja jang diatur dalam Peraturan Tata-tertib ini, maka diharapkan agar apa jang dahulu disebut „Yes-men",bisa mendjadi "active, working, speaking, thinking and re thinking body". Djuga dengan Peraturan Tata-tertib ini, diharapkan agar supaja D.P.R.-G.R. bisa mendjadi "leding reality",

bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Negara yang benar² mewakili Rakjat dan benar² membawa suara murni Rakjat."

B. Djumlah dan Susunan Komisi-Komisi D.P.R.-G.R.

Berdasarkan Peraturan Tata-tertib D.P.R.-G.R. yang baru ini djumlah dan susunan Komisi-komisi D.P.R.-G.R. diatur sebagai berikut :

1. Komisi "A". Komisi Umum, meliputi Sekretariat Negara, Kantor Urusan Pegawai, Lembaga Administrasi Negara, Dewan Bahan Makanan, M.P.R.S., D.P.A., Front Nasional, Upenas, Lembaga Tenaga Atom, Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa, Lembaga Pembina Djiwa Revolusi dan Penerangan.
2. Komisi "B" (Komisi Hukum dan ketata-negaraan) meliputi bidang Hukum, Imigrasi, Mahkamah Agung. Kedjaksanaan dan dalam Negeri.
3. Komisi "C" (Komisi Pertahanan Keamanan dan Luar Negeri) meliputi bidang² :
 - a. Lembaga Pertahanan Nasional,
 - b. Luar Negeri,
 - c. Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian,
 - d. Veteran dan demobilisan, dan
 - e. B.P.I. (Badan Pusat Inteligent) djika diaktivir kembali.
4. Komisi "D" (Komisi Ekonomi dan Keuangan, meliputi bidang² perdagangan, pertanian, perhubungan, keuangan, Badan Pengawas Keuangan, Lembaga Kepariwisata).
5. Komisi "E" (Komisi Pembangunan) meliputi : Tenaga Kerdja, Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Perindustrian Dasar dan Ringan, Peridustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat, Pembangunan Projek² Mandataris, Pertambangan dan Migas (Minjak dan Gas Bumi)
6. Komisi „F" (Kesedjahteraan) meliputi bidang² Sosial, Kesehatan, P & K dan Agama.

Selain tentang kedudukan, tugas, hak dan wewenang seperti telah dikemukakan dalam paragraf 3 banjak pula hal-hal baru yang belum pernah diatur dalam Peraturan Tata-tertib D.P.R.-G.R. sebelumnya.

Hal-hal baru tersebut setjara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tentang pelaksanaan hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan. Antara lain ditentukan bahwa musjawarah untuk mufakat tidak mengutamakan quorum, tetapi mengutamakan ikut sertanja unsur² utama dalam musjawarah, serta pangkal tolaknja adalah a priori persatuan dan bukan pertentangan antara peserta. Dalam musjawarah para anggota mendapat kesempatan jang wadjar mengemukakan pendapat dan pikirannja dengan mengindahkan keselamatan Negara dan Revolusi, kepentingan Rakjat, kepribadian Bangsa, kesusilaan dan pertanggungan-djawab kepada Tuhan Jang Maha Esa. Setelah dipandang tjukup diberikan kesempatan kepada para anggota untuk mengemukakan pendapat dan saran serta setelah dipandang tjukup diterima sumbangan pendapat dan fikiran bagi penjelesaian masalah jang sedang dimusjawarahkan, maka pimpinan mengusahakan agar musjawarah segera dapat mentjapai mufakat jang bidjaksana. Apabila didalam suatu permusjawaratan tidak tertjapai kata mufakat, maka musjawarah mengambil kebidjaksanaan dengan menempuh djalan :
 - a. persoalan itu ditangguhkan pemitjaraannja.
 - b. persoalan itu diserahkan pada pimpinan untuk mengambil kebidjaksanaan dengan memperhatikan pendapat-pendapat jang bertentangan.
 - c. persoalan itu ditiadakan.
2. Panitia Musjawarah jang semula terdiri dari Ketua dan Wakil-wakil Ketua D.P.R.-G.R., Ketua-ketua Golongan dan Ketua-ketua Komisi, diubah susunannja dan terdiri dari Ketua dan Wakil-wakil Ketua D.P.R.-G.R., dan wakil dari masing² Kelompok jang diatur menurut djumlah anggota Kelompok jang bersangkutan. Selain itu tugas Panitia Musjawarah disamping tugas² sebelumnya djuga mengadakan persiapan-persiapan, pertimbangan-pertimbangan, pemitjaraan-pemitjaraan guna melaksanakan musjawarah untuk mentjapai mufakat seperti jg dikehendaki dalam ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/ perwakilan.

• Panitia Musjawarah merupakan suatu alat kelengkapan bersifat politis, Komisi mempunjai fungsi tehnis, jaitu untuk bersama-sama dengan Pemerintah menjelesaikan pemben-

tukan Undang-undang dan sekali-gus Komisi berfungsi pula selaku badan yang mendj'ankan controinja terhadap tindakan-tindakan Pemerintah.

3. Tingkatan pemitjaraan R.U.U. yang semula lima tingkat dirubah mendjadi enam tingkat. Pemeriksaan persiapan yang semula dilakukan oleh Golongan-golongan kemudian dilakukan oleh Kelompok-kelompok, ini merupakan pemitjaraan tingkat I.

Hasil pemitjaraan Golongan-golongan yang semula digunakan oleh Wakil-wakil Golongan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Pemerintah dalam pemitjaraan tingkat II (lama), maka tingkat II (baru) tidak dilakukan dalam pleno melainkan dalam Komisi-komisi dimana Pemerintah memberikan djawaban-djawabannja atas pertanyaan anggota-anggota Komisi dan memberikan tambahan pendjelasan. Tingkat II (baru) ini dilandjutkan dengan tingkat III (baru) dalam pleno dimana-mana Wakil-wakil Kelompok atau Golongan diberikan kesempatan mengadakan pemandangan umum.

Selandjutnja, tingkat IV baru adalah sama dengan tingkat III lama dimana Golongan mempeladjari hasil pemitjaraan dalam pleno.

Tingkat V baru sama dengan tingkat IV lama jaitu pemitjaraan dalam rapat-rapat Komisi atau gabungan Komisi yang bersangkutan sebelum kemudian diadakan pemitjaraan tingkat terachir dalam pleno jaitu tingkat VI baru yang sama dengan tingkat V lama.

Dalam Peraturan Tata-tertib ini diadakan Bab baru, jaitu Bab VIII tentang Hak-hak dan Wewenang-wewenang D.P.R.-G.R.. Bab ini memuat ketentuan-ketentuan tentang usaha-usaha D.P.R.-G.R. melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan Pemerintah, jaitu :

- a. mengajukan pertanyaan ;
- b. meminta keterangan ;
- c. mengadakan penjelidikan ;
- d. mengajukan amandemen ;
- e. mengajukan usul pernjjataan pendapat atau usul² lain ;
- f. mengandjurkan seseorang, djika ditentukan oleh Undang-undang.

Hak-hak dan Wewenang-wewenang jang demikian tidak diatur dalam peraturan Tata-tertib sebelumnya.

4. Selandjutnja terdapat pula Ketentuan baru mengenai penetapan Anggaran, ialah pertama Panitia Anggaran menjampaikan laporannja kepada Panitia Musjawarah mengenai penelitiannja terhadap penjurusan pertanggung-jawab Anggaran dan terhadap laporan Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian Ketua D.P.R.-G.R. mengundang Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberikan penjelasan tambahan tentang laporan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rapat pleno, dimana para anggota Wakil Kelompok diberi kesempatan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, jang dijawab oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

§ 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH

A. Situasi gawat ditanah air.

Pada tanggal 12 Djanuari 1966, ribuan mahasiswa, pemuda dan pelajar jang tergabung dalam KAMI dan KAPPI telah pula memenuhi halaman D.P.R.-G.R. dan diterima langsung oleh Menko/Ketua D.P.R.-G.R. Arudji Kartawinata. Demonstran pada pokoknja menjampaikan Tri tuntutan Hati Nurani Rakyat jang ber-isi tuntutan agar :

- a. Kabinet dan aparatur Pemerintah dibersihkan dari oknum G-30-S/PKI.
- b. agar P.K.I. berserta Ormas-ormasnja segera dibubarkan,
- c. agar harga-harga barang-barang diturunkan.

Arudji Kartawinata mendjandjikan kepada demonstran bahwa akan segera menjampaikan Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat itu kepada Presiden Soekarno. Diika dalam waktu 3×24 djam tuntutan itu belum disampaikan para demonstran boleh membakar gedung D.P.R.-G.R. Sebelum demonstran meninggalkan D.P.R.-G.R. terlebih dahulu mereka mentjoret tembok gedung D.P.R.-G.R. Tjoretan² tersebut antara lain berbunyi : "3 $\times$ 24 djam dibakar". Atau hanjalah : "3 $\times$ 24 djam.

Malam hari Rabu tanggal 12 Djanuari 1965 itu djuga, dengan didampingi oleh Wakil Ketua D.P.R.-G.R. Mursalin dan IG. G. Subamia, Ketua D.P.R.-G.R. Arudji Kartawinata bertemu dengan Presiden Soekarno diistana dan menjampaikan pernjjataan para mahasiswa tersebut.

Pada tanggal 21 Pebruari 1966 diumumkan susunan „Kabinet Dwikora jang disempurnakan” dan nama Arudji Kartawinata tidak ditjantumkan lagi sebagai Menteri. Sebaliknya masih terdapat 14 Menteri jang dianggap oleh demonstran mempunyai indikasi terlibat langsung atau tidak langsung dengan penghianatan terkutuk G-30-S/PKI atau duduknja Menteri-menteri jang diragukan i'tikat baiknja. Pada hari tersebut terdjadi pula demonstrasi ke Istana jang menentang kebidjaksanaan Presiden. Sediak dilantiknja Kabinet 100 Menteri pada tgl. 24 Februari 1966 sampai diumumkannja Surat Perintah Presiden tanggal 11 Maret 1966, suasana ibu-kota penuh dengan ketegangan-ketegangan.

Hal ini telah mengakibatkan meningkatnja kegiatan² demonstrasi jang dilantjarkan oleh Kesatuan² Aksi jang kemudian dikenal dengan nama "Angkatan 66". Pada tanggal 12 Maret 1966, Letnan Djendral Soeharto atas nama Presiden membubarkan P.K.I. dan Ormas-ormasnja dan menjatakan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilajah Republik Indonesia. "Show of force" R.P.K.A.D., Kudjang, Artileri, Kavaleri, Penerbangan Angkatan Darat jang diikuti pula oleh ribuan mahasiswa, peladjar dan disaksikan oleh puluhan ribu rakjat Djakarta disepandjang djalan jang dilaluinja.

Namun pada waktu itu Angkatan '66 masih merasa sangat ketjewa berhubung masih sangat menondjol sekali dalam pandangan mata rakjat dimana kekuatan sosial masih tertagi mendjadi dua fihak, yakni pihak Orde Baru dan pihak Orde lama. Dengan demikian maka tuntutan untuk membersihkan tubuh kabinet dari Menteri-menteri jang terlibat G-30-S/PKI atau Menteri-menteri jang diragukan i'tikad baiknja, belum terpenuhi. Hal ini terbukti dengan masih duduknja sedjumlah 14 Menteri jg mempunyai indikasi terlibat langsung atau tidak langsung dengan penghianatan G-30-S/PKI tsb. Djuga tuntutan mengenai penurunan harga² masih diauh terpenuhi. Oleh sebab itu maka mereka melantjarkan aksi² "pengamanan" terhadap beberapa Menteri dengan djalan menggrebek kekantor atau kerumahnja. Dilantjarkan pula aksi-aksi penjegelan dan penutupan beberapa kantor dan penjerahan kuntji-kuntji pintu-pintu kantor kepada Pepelrada Djaya.

Dengan masih adanja keketjewaan-keketjewaan itu maka achirnja Angkatan '66 menudjukan harapannja kepada Lem-

baga-lembaga resmi jang masih ada dan juridis masih dibenarkan adanja. Angkatan '66 mulai mentjoret-tjoret sepanjang tembok ibu-kota : „M.P.R.S. harus bersidang hari ini djuga!”

Dengan menjadari bahwa situasi tanah air sangat gawat maka Pimpinan D.P.R.-G.R. telah menetapkan supaya Panitia Musjawarah dan Pimpinan Golongan-golongan tetap stand by di Djakarta. Penetapan stand by tersebut dimaksudkan supaya dapat menampung sebaik-baiknya suara-suara serta keinginan² jang tumbuh dalam masjarakat dan persoalan-persoalan lain dalam hubungan kerdja-sama dengan pihak Pemerintah.

Untuk keperluan menanggapi situasi tanah air jang sangat gawat pada bulan-bulan pertama tahun 1966 itu maka pada tanggal 13 April 1966 telah diadakan rapat Gabungan dari para anggota-anggota D.P.R.-G.R. jang stand by. Dalam rapat ini telah dibitjarakan dari hati kehati dalam suasana penuh keprihatinan mengenai beberapa masaalah kenegaraan. Dalam rapat para anggota menanggapi pula tentang adanja aksi-aksi jang dilantarkan oleh Angkatan '66 jang tergabung dalam KAMI, KAPPI atau Kesatuan Aksi lainnja. DPGRGR menghawatirkan akan adanja „Parliament in the street” (Parlemen Djalanan) disamping Parlemen jang resmi, djika D.P.R.-G.R. sendiri tidak segera menentukan sikap dan langkahnja sesuai dengan amanat penderitaan Rakjat. Selandjutnja Dibitjarakan pula masalah-masalah intern D.P.R.-G.R., chususnya perlu tidaknja mengisi kekosongan anggota-anggota D.P.R.-G.R. sebagai akibat telah dibekukannya keanggotaan sedjumlah 62 anggota-anggota P.K.I./Ormas-ormasnja.

Dalam suasana keprihatinan itu maka D.P.R.-G.R. berpendapat untuk tidak usah membitjarakan masaalah kekosongan keanggotaan D.P.R.-G.R. Diputuskan pula bahwa D.P.R.-G.R. berdjalan terus dengan anggota-anggota jang ada. Keputusan demikian didasarkan atas pertimbangan agar dapat dihindarkan terdjadinja akibat-akibat jang kurang baik dalam hal nantinja diperlukan menundjuk/menentukan siapa² orangnja untuk mengisi kekosongan anggota D.P.R.-G.R., Sebab kesulitan-kesulitan sematjam itu sudah biasa timbul dalam hal akan mendudukan orang². Dalam rapat tanggal 13 April 1966 tersebut diatas, Ketua rapat mengkonstatir situasi gawat ditanah air dan tjara² mengatasinja sebagai berikut :

- I. Adalah mendjadi hasrat rakyat bersama untuk melaksanakan Undang-undang Dasar 1945, djuga dalam hal untuk mengatasi kesulitan-kesulitan sekarang ini (pada waktu itu), terbukti dengan harapan rakyat yang ditujukan kepada Lembaga-lembaga Legislatif yang sudah ada. Dan dalam hubungannya M.P.R.S. akan melangsungkan sidang umumnya, jaitu sidang umum ke-IV, maka sebagai anggota D.P.R.-G.R. perlulah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Anggota-anggota D.P.R.-G.R. adalah djuga anggota-anggota M.P.R.S. ;
 2. Keanggotaannya dalam M.P.R.S. tersebut adalah bukan Lembaga D.P.R.-G.R. yang mendjadi anggota M.P.R.S., tapi yang mendjadi anggota M.P.R.S. adalah masing-masing anggota D.P.R.-G.R. ;
 3. Yang mempunyai kedudukan dan hak bitjara adalah masing-masing anggota ;
 4. Sudah sepantasnya apabila D.P.R.-G.R. menjumbangkan pikiran-pikiran konstruktif hingga nantinya dapat dibicarakan dalam M.P.R.S. ;
 5. Untuk keperluan itu sudah sepatutnya pula kalau D.P.R.-G.R. membentuk Panitia-panitia yang hasil buah pikirannya nanti disampaikan kepada M.P.R.S. ;
 6. Meskipun buah pikiran itu tidak bersifat mengikat, tapi paling tidak dengan sudah adanya kesamaan pendapat dari masing-masing anggota D.P.R.-G.R. yang dijumlahnya meliputi setengah dari jumlah anggota M.P.R.S. sudah tentu akan dapat mempelantjar djalannya sidang-sidang M.P.R.S. sesuai dengan Amanat Penderitaan Rakyat ;
 7. Dengan demikian maka dapat diharapkan akan adanya kesamaan konsepsi ;
- II. Dalam hal menanggulangi kemerosotan ekonomi dan pembangunan, yang hal ini antara lain djuga akan bergantung kepada ketetapan-ketetapan dari hasil Sidang M.P.R.S., disebabkan karena M.R.P.S.-lah yang menentukan Haluan Negara, maka perlu djuga Panitia yang akan dibentuk itu menanggapi pula persoalan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Dalam hubungan ini sangat diharapkan agar pihak Pemerintah yang telah mengeluarkan Statement da-

lam bidang Sospol dan Ekubang pada tanggal 4 dan 12 April (1966) didepan Pers, hendaknja sesuai dengan kelaziman negara-negara demokrasi supaja Pemerintah memberikan Pendjelasannja dalam bentuk "keterangan pemerintah" didepan sidang pleno Lembaga Legislatif forum D.P.R.). Djanganlah kiranja suatu statement Pemerintah disampaikan didepan rapat umum dan sebagainja seperti jang berlaku dalam djaman Orde Lama.

- III. Bahan-bahan jang perlu dibahas oleh Panitia Politik ialah untuk mendapatkan suatu rumusan jang dapat didjadikan landasan konsepsionail daripada masalah-masalah politik dan ketata-negaraan, chususnja untuk mendudukan kembali Tata-hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Rumusan-rumusan itu antara lain harus menampung hal-hal sebagai berikut :
1. Persoalan Surat Perintah Presiden tanggal 11 Maret 1966 dan tindakan-tindakan selandjutnja ;
 2. Kedudukan dan wewenang Lembaga-lembaga Negara Tertinggi, jaitu :
 - a. M.P.R. — sesuai dengan UUD 1945 pasal 1 ayat (2) pasal 2 dan pasal 3 beserta pendjelasannja ;
 - b. D.P.R. — sesuai dengan pasal 19 20, 21, 23 UUD 1945 dan pendjelasannja ;
 - c. B.P.K. — sesuai dengan pasal 23 ayat (5) UUD 1945 ;
 - d. Kekuasaan Kehakiman atau Mahkamah Agung — sesuai dengan pasal 24 dan 25 UUD 1945 ;
 - e. Kekuasaan Pemerintah Negara — sesuai dengan pasal 4, 5, 6, 7, 8 UUD 1945 dan pendjelasannja ;
 - f. D.P.A. — sesuai dengan pasal 16 Bab IV UUD 1945 ;
 3. Tentang : Penetapan-penetapan M.P.R.S. jang lain, dan dimana perlu ditindjau sesuai atau tidaknja dengan UUD 1945 ;
 4. Tentang Pemilihan Umum, dimana dahulu telah diusahakan bagaimana supaja M.P.R.S. membuat suatu ketentuan tentang harus adanja pemilihan umum dalam batas-batas waktu tertentu.

Hal tersebut adalah 4 (empat) pokok persoalan mengenai ketata-negaraan jang ada hubungannja dengan tugas dari-

pada Panitia Politik. Dan masih ada satu soal lagi mengenai intern D.P.R.-G.R., yaitu :

5. Perlu segera disusun Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong yang baru dalam rangka melaksanakan jiwa dan semangat UUD 1945, tapi hal ini perlu ditangguhkan sampai dengan adanya Ketetapan M.P.R.S. tentang sumber hukum dari pada Negara kita.

Demikianlah kesimpulan rapat Gabungan antara panitia² yang stand by pada tanggal 13 April 1966 dalam rangka menanggapi situasi gawat di tanah air.

Rapat dilanjutkan pada tanggal 14 April 1966 dan memutuskan untuk membentuk dua buah Panitia, yaitu :

1. PANITIA POLITIK yang anggota²nya terdiri dari anggota² Panitia Musjawarah diperkuat dengan Pimpinan Golongan dan Anggota² yang ditunjuk oleh Golongannya, dengan tugas meliputi soal-soal dalam bidang politik sebagai pelaksanaan Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat dan tuntutan kembali melaksanakan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen.
2. PANITIA EKONOMI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, yang anggota²nya terdiri dari anggota² dan Pimpinan Harian Panitia Anggaran. Untuk mendapatkan bahan² mengenai ekonomi dan pembangunan maka a.l. diperlukan mengundang Pemerintah, khususnya dalam hubungannya dengan statement Ekubang pada tanggal 4 dan 12 April 1966 di depan Pers, meskipun sebenarnya isi dari pada statement itu sudah mengandung banyak persamaan dengan pokok-pokok pemikiran yang dikemukakan oleh D.P.R.-G.R. dalam memorandumnya mengenai ekonomi keuangan dan pembangunan.

Panitia Ekubang ini bertugas membuat konsepsi tentang pokok-pokok pemikiran kearah pemertjahan kesulitan² dalam bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan yang bahan²nya diambil dari Memorandum D.P.R.-G.R. dan Keterangan Pemerintah.

Menurut rentjana semula final draft daripada kedua Panitia tersebut harus sudah selesai tanggal 5 Mei 1966 agar finaltek dari pleno D.P.R.-G.R. sudah dapat disampaikan kepada Pimpinan M.P.R.S. sebagai bahan Sidang Umum ke-IV M.P.R.S. yang pembukaannya direntjanakan tanggal 12 Mei 1966.

B. Nota politik KAMI dan Panitia Politik D.P.R.-G.R.

Bersama dengan kegiatan² D.P.R.-G.R. dalam menjong-song Sidang Umum M.P.R.S. sesuai dengan tuntutan rakyat supaya M.P.R.S. bersidang, maka diluar gedung D.P.R.-G.R., dalam Ibu Kota R.I., masih terus dilantjarkan aksi-aksi oleh Angkatan '66. Aksi² tersebut selain berupa demonstrasi² dan penjegelan gedung²/kantor² djuga berupa pengamanan terhadap sejumlah Menteri². Aksi² pengamanan terhadap Menteri² ditujukan pula terhadap Menko/Ketua dan Menteri/wakil Ketua D.P.R.-G.R. Menko/Ketua I.G.G. Subamia dibawa dari rumahnya kemarkas besar KAMI di Salemba. Setelah ditahan beberapa djam kemudian dilepaskan kembali.

Melihat situasi politik pada waktu itu, maka para Wakil Ketua mengandjurkan adalah lebih baik djika ia untuk sementara tidak menghadiri sidang² D.P.R.-G.R. Sebelum andjuran ini I.G.G. Subamia masih ikut pula hadir dalam sidang sidang Panitia Politik D.P.R.-G.R. tetapi setelah menerima andjuran tersebut ia tidak pernah datang lagi ke D.P.R.-G.R.

Asmara Hadi pada waktu itu tidak diketahui oleh Mahasiswa dimana tempatnja yang pasti. Kamar Kerdjanja di D.P.R.-G.R. telah disegel oleh Mahasiswa pada hari Djum'at tanggal 29 April 1966, setelah terlebih dahulu mereka merampas "aktentas" dan katjamatanja yang kemudian diakui sebagai milik sekertaris pribadinja.

Tanggal 2 Mei 1966 yang merupakan hari pembukaan masa persidangan ke-IV tahun sidang 1965-1966, semula dimaksudkan untuk mendengarkan keterangan Pemerintah yang akan disampaikan oleh Waperdam Bidang Lembaga-lembaga Politik Dr. Ruslan Abdul Gani tidak djadi berlangsung karena Waperdam Ruslan Abdul Gani berhalangan datang. Atas usul anggota Dachlan Ranuwihardjo S.H. supaya D.P.R.-G.R. menundjukkan kepada rakyat bahwa D.P.R.-G.R. benar-benar membawakan suara mereka, chususnja dalam hubungannya dengan sudah adanya maksud bersama untuk melaksanakan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen.

Dikemukakan selandjutnja bahwa menurut djiwa UUD 1945 DPR tidak berdiri dibawah melainkan berdampingan dengan Presiden, maka konsekwenensi logisnja ialah Pimpinan D.P.G.-G.R. itu hendaknja dipilih oleh anggota² D.P.R. sendiri. Kon-

sekwensi selanjutnya ialah Pimpinan D.P.R.-G.R. tidak menjadi anggota Kabinet sehingga tidaklah perlu diberikan pangkat Menteri, tidak perlu lagi menggunakan panggilan "Jang Mulia Ketua" akan tetapi cukup menggunakan panggilan "Saudara, Ketua".

Setjara konkrit diusulkan supaya atjara pertama rapat pleno hari itu adalah membitjarkan masalah Pimpinan D.P.R.-G.R. tersebut dan menentukan bahwa Pimpinan D.P.R.-G.R. supaya dipilih sendiri oleh sidang pleno D.P.R.

Berhubungan dengan usul Anggota Dachlan Ranuwihard S.H. tersebut, Ketua rapat/H. Achmad Sjaichu minta kepada masing-masing Golongan supaya memberikan reaksinya. Untuk itu kepada Golongan-golongan diberikan waktu kurang lebih setengah djam dan rapat pleno D.P.R.-G.R. dischors.



Cosmas Batubara/Ketua Presidium KAMI (tgl. 2 Mei 1966 di ruang pleno D.P.R.-G.R.).

Perlu kiranya dikemukakan bahwa dalam rapat pleno hari itu terdjadi suatu hal jang belum pernah terdjadi sebelumnya. Jaitu ratusan mahasiswa duduk duduk dikursi anggota D.P.R.-G.R. Bahkan pada waktu rapat dischors, Ketua Presidium KAMI Cosmas Batubara berbitjara didepan 160 dari 230 anggota D.P.R.-G.R. serta menjampaikan Nota Politik KAMI.

Selain itu ratusan mahasiswa lainnya berada diluar gedung dan djuga melihat² ruangan² D.P.R.- G.R. Nota politik itu pada pokoknya bertanja, berdasarkan apa Presiden mengangkat begitu sadja anggota D.P.R.-G.R.

serta menentukan djumlah? Serta atas dasar apa Presiden menundjuk Ketua D.P.R., kalau Lembaga itu dipilih oleh Rakjat. Serta atas dasar apa Presiden menghentikan dengan hormat para anggota D.P.R. seperti jang tertjantum dalam pasal 8 Penetapan Presiden No. 4/1960, djustru D.P.R. tersebut dipilih dengan sjah dalam pemilihan umum tahun 1965.

Demikian pula dengan susunan D.P.R. jang menurut UUD 1945 harus ditetapkan dengan Undang-undang. Akan tetapi

anggota-anggotanya diangkat sendiri oleh Presiden, dan susunan itu ditolak oleh Angkatan 66.

Nota Politik KAMI menjatakan tidak membenarkan pendapat yang menjatakan bahwa semua Lembaga-lembaga Negara seperti D.P.R.-G.R., M.P.R.S. dan D.P.A. itu tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum diustu karena ketentuan-ketentuan UUD 1945 tidak dipenuhi.

Dasar penolakan itu ialah bahwa hukum dibuat untuk mengatur dan tidak untuk mengatjaukan. Kalau pandangan itu diterima, maka akan timbul kekosongan di bidang ketata-negaraan yang tidak dapat dipertanggung-djawaban. Alasan selanjutnya ialah alasan praktis. Kalau M.P.R.S., dan D.P.R.-G.R. tidak dianggap sah dalam situasi waktu itu, maka juridis segala kekuasaan akan djatuh ketangan Presiden djustru hal itu bertentangan dengan UUD 1945.

D.P.R.-G.R. pada waktu itu sudah bertekad bulat agar Panitia Politik dan Panitia EKUBANG dapat menjelesaikan tugasnya paling lambat tanggal 5 Mei 1966, satu dan lain hal agar hasil-hasil dari kedua Panitia tersebut sudah dapat disampaikan kepada Pimpinan M.P.R.S. sebagai bahan penjusunan atjara Sidang Umum ke-IV M.P.R.S.

Panitia Politik D.P.R.-G.R. lebih banjak bertitik tolak daripada sumber hukum, rasa hukum dan tertib hukum. Hal ini diterangkan oleh H.A. Sjaichu (waktu itu Wk. Ketua D.P.R.-G.R./Ketua Panitia Politik) dalam memberikan pokok-pokok persoalan yang harus dibahas oleh Panitia Politik. Antara lain dikemukakan, bahwa telah timbul bermacam-macam pikiran, bukan meterinya, tetapi pada pokoknya ialah apakah dinegara kita ini berlaku dua sumber hukum, yaitu :

- Dekrit Presiden 1950 ditarik kebawah dengan Penetapan Presiden untuk melaksanakan Dekrit Presiden dan peraturan Presiden untuk melaksanakan penetapan Presiden ?
- Undang-undang Dasar 1945 ditarik kebawah dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ?

Panitia Politik D.P.R.-G.R. akhirnya menghasilkan sebuah Resolusi D.P.R.-G.R. R.I. yang berisi "Sumbangan Pikiran Untuk Didjadikan Atjara Pokok Dalam Sidang Umum ke-IV Majelis Permusyawaratan Rakjat Sementara" dan resolusi ini sahkan oleh D.P.R.-G.R. pada tanggal 9 Djuni 1966.

Dalam pendahuluan resolusi tersebut dikemukakan tentang kedudukan Surat Perintah 11 Maret sebagai kuntji pembuka babak baru dalam sedjarah Revolusi Indonesia, merupakan suatu momentum bersedjarah jang menentukan djalan sedjarah selandjutnja bagi Revolusi Pantjasila di-Indonesia. Dikemukakan pula dalam pendahuluan ini bahwa Djenderal Soeharto tidak menjia-njiakan waktu untuk melaksanakan tugas berat sesuai dengan tuntutan hati nurani rakjat, antara lain jaitu pada tanggal 12 Maret 1966 mengambil keputusan atas nama Presiden untuk membubarkan P.K.I. berserta Ormas-ormasnja dan menjatakannja sebagai organisasi terlarang diseluruh wilajah kekuasaan R.I. dan pada tanggal 18 Maret 1966 mengambil tindakan pengamanan terhadap 15 orang Menteri jang terdapat indikasi-indikasi tersangkut dalam Gestapu/P.K.I. dan /atau jang terdapat indikasi-indikasi ketjurangan dalam melakukan kekuasaan dibidang ekonomi dan sosial. Achirnja dalam pendahuluan itu ditekankan bahwa babak baru dalam sedjarah Revolusi Indonesia tidak lain ialah babak pelaksanaan U.U.D. 1945 setjara murni dan konsekwen untuk mendapatkan landasan kuat baik idiil maupun struktuil.

Adapun sumbangan pikiran jang dimaksud dalam resolusi tersebut ialah meliputi tiga pokok persoalan, jaitu :

- Sumber tertib-hukum Republik Indonesia ;
- Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia ; dan
- Usul-usul dan saran-saran.

Dalam Sumber tertib-hukum dikemukakan tentang Pantjasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan selandjutnja diuraikan pula tentang :

- 1). Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi dari sedjarah perdjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia untuk merealisasikan tudjuan perdjuangan, dengan djalan :
 - Membentuk Negara Nasional jang bebas merdeka dan berdaulat sempurna ;
 - Mewujudkan masjarakat Indonesia jang adil makmur berlandaskan Pantjasila ; dan
 - Ikut serta membentuk Dunia Baru jang damai dan abadi.
- 2). Dekrit 5 Djuli 1959 jang mendjadi landasan berlakunja kembali bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia Undang-undang Dasar 1945.

3). Undang-undang Dasar 1945 sebagai perwujudan dari tujuan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

4). Surat Perintah 11 Maret 1966 sebagai dasar dan sumber hukum bagi Letnan Djenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan guna mengamankan pelaksanaan UUD '45 setjara murni dan konsekwen untuk menegakkan Negara Republik Indonesia yang berdasar atas hukum dan penjelenggaraan pemerintahannya berdasar atas sistim konstitusi tidak atas dasar kekuasaan belaka. selanjutnya dalam Tata-urutan Peraturan perundangan Republik Indonesia menurut U.U.D. 1945 dijelaskan mengenai kedudukan hukum daripada :

- Undang-undang Dasar 1945 ;
- Ketetapan M.P.R.S. ;
- Undang-undang ;
- Peraturan Pemerintah ;
- Keputusan Presiden; dan
- Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.

Saran-saran dan Usul-usul dalam resolusi tersebut pada pokoknya ialah :

- Supaja M.P.R.S. mengesahkan Surat Perintah 11 Maret 1966;
- Keputusan-keputusan M.P.R.S. yang lalu supaya ditinjau/ disempurnakan dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan U.U.D. 1945 ;
- Tentang Lembaga-lembaga Negara Tertinggi Menurut Undang-undang Dasar ;
- Pemilihan Umum ;
- Kabinet; dan
- Wakil Presiden.

Hasil karya Panitia Politik tersebut setelah disahkan oleh D.P.R.-G.R. kemudian diterima sebagai atjara pokok dalam Sidang Umum ke-IV M.P.R.S. 1966.

C. Pernyataan A.B.R.I. tgl 5 Mei 1966 dan Surat Presiden tgl. 4 Mei 1966.

Atas andjuran dari sementara pemimpin maka Presiden Soekarno bermaksud membubarkan M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R. sebagai realisasi pelaksanaan U.U.D. 1945 setjara murni dan

konsekwen, jaitu dengan dalih bahwa pelaksanaan U.U.D. 1945 harus dimulai dengan pembentukan Komite Nasional. Hal ini akan berarti bahwa: "Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannja dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional Pusat" (Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945).

Berbeda dengan pendirian Presiden Soekarno jang dapat menerima andjuran untuk membubarkan M.P.R.S.; D.P.R.-G.R. dan D.P.A. untuk kembali kepada pembentukan Komite Nasional, tidak demikian halnja dengan pendirian Letnan Djenderal Soeharto (pemegang SUPER SEMAR) setelah menerima pertimbangan-pertimbangan hukum jang diadjudkan oleh G-V-KOTI. Sebab kalau M.P.R.-S. dan D.P.R.-G.R. dibubarkan, djusteru dalam situasi pada waktu itu, maka juridis segala kekuasaan akan djatuh kembali ketangan Presiden berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan U.U.D. 1945. Hal ini dianggap pula akan terkumpulnja lagi kekuasaan pada tangan satu orang.

Pendirian Letnan Djenderal Soeharto tersebut kemudian mendjadi pula pendirian Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Pernjataan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia tgl. 5 Mei 1966 jang bunji selengkapnja sebagai berikut :

PERNJATAAN ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA

Pimpinan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, setelah memfahami dengan seksama perkembangan keadaan, jang mengedjwantakan suara hati nurani rakjat, dengan chidmat menanggapi dengan pernjataan, sebagai berikut :

1. Angkatan Bersendjata adalah pengaman, pengawal Revolusi Indonesia, dengan tiga kerangka tudjuannja jang hendak ditjapai, berdasarkan Pantjasila ;
2. Angkatan Bersendjata adalah pengaman Pimpinan Revolusi Indonesia dan pengaman kewibawaan Presiden, Bung Karno, beserta adjaran-adjarannja, jang dengan iktikat baik, sebagai anak kandung revolusi, berani dan djudjur dalam

memberikan laporan dan pertimbangan kepada Pimpinan Revolusi Indonesia, untuk mentjegah, baik sckarang maupun nanti, dalam mengambil keputusan dan kebidjaksanaan jang kurang tepat, karena tidak mengedjawantahkan suara hati nurani rakjat.

3. Dalam hubungan itu Angkatan Bersendjata, seperti jang mendjadi **niat-iktikad Presiden, Bung Karno** sendiri, djuga seperti jang mendjadi **hasrat suara hati nurani rakjat**, hendak menempatkan hakekat kedudukan Presiden jang sebenarnya, menurut kemurnian azas dan sendi pelaksanaan dari pada Undang-undang Dasar 1945 ;
4. Untuk pemurnian pelaksanaan jang berazaz dan bersendikan kepada Undang-undang Dasar 1945, sebagai pengedjawantahan suara hati nurani rakjat, Angkatan Bersendjata Republik Indonesia mendukung kebidjaksanaan Presiden, Bung Karno, mengenai :
 - a. rentjana ditetapkan Undang-undang Pemilihan Umum, berdasarkan kekuasaan bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat (pasal-pasal 2 ajat (1) dan ajat 19 ajat (1), berhubungan dengan pasal-pasal 5 ajat (1) dan 20 ajat (1) UUD 1945);
 - b. rentjana ditetapkannja Undang² susunan Dewan Pertimbangan Agung, berdasarkan kekuasaan bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat (pasal 16 ajat (1) berhubungan dengan pasal²5 ajat (1) dan 20 ajat (1) UUD 1945);
 - c. rentjana ditetapkannja susunan sementara Dewan Perwakilan Rakjat, Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung untuk pengisian kehampean akibat petualangan kontra-revolusi Gerakan 30 September/PKI, berdasarkan musjawarah untuk mufakat dan sepakat bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;
 - d. penetapan menurut kemurniannja pelaksanaan jang berazazkan dan bersendikan kepada Undang² Dasar 1945, daripada fungsi :

1. Madjelis Permusjawaratan Rakjat (Sementara);
2. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat (Gotong Rojong);
3. Dewan Pertimbangan Agung;
4. Mahkamah Agung;
5. Badan Pemeriksa Keuangan;
6. dan lain-lain Lembaga.

Demikianlah, pernyataan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Djakarta, 5 Mei 1966

Wakil Panglima Besar Komando Ganjang Malaysia, ttd Dr A. H. Nasution Djenderal T.N.I.	Wakil Perdana Menteri Bidang Per- tahanan Keamanan a.i/Menteri Panglima Angkatan Darat, ttd Sceharto Letnan Djenderal T.N.I.
---	--

Menteri/Panglima Angkatan Laut ttd Moeljadi Laksamana Muda (L)	Menteri/Panglima Angkatan Udara ttd Rusmin Nurjadin Komondor Udara	Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian ttd Sutjipto Judodihardjo Komisaris Djenderal Polisi
--	--	---

Dengan dikeluarkannya Pernyataan A.B.R.I. tersebut maka Presiden Soekarno tidak djadi membubarkan M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R. Kemudian Presiden Soekarno bermaksud menjempurnakan susunan keanggotaan M.P.R.S., D.P.R.-G.R. dan D.P.A., chususnja untuk mengisi kekosongan M.P.R.S., D.P.R.-G.R. dan D.P.A. dari anggota-anggota jang terlibat dalam petualangan kontra revolusi/G-30-S-P.K.I. Bagaimana tjara melakukan pengisian/penjempurnaan tersebut, Presiden ingin mendapatkan saran-saran dari D.P.R.-G.R. Keinginan Presiden tersebut dikemukakan dalam suratnja kepada Pimpinan D.P.R.-G.R. No. 603/HK/66 tanggal 4 Mei 1966 perihal : "Penjusunan M.P.R. D.P.R. dan D.P.R.D. ; Pemilihan Umum dan Penjempurnaan M.P.R.S.". Bunji selengkapnja surat Presiden tersebut ialah sebagai berikut :

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 4 Mei 1966

No. : 603/HK/66.	K e p a d a
Lampiran : 2 (dua) x 300	J.M. Pimpinan DP..R.-G.R.
Perihal : Penjusunan M.P.R.,	di
D.P.R., D.P.R.D.,	DJAKARTA.
Pemilihan Umum dan	
Penjempurnaan M.P.R.S.	

Bersama ini kami, setelah bermusjawarah dengan Presidium dalam menanggapi situasi politik dewasa ini, memberitahukan dengan hormat kepada D.P.R.-G.R. hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam waktu jang singkat kami akan menjampaikan kepada D.P.R.-G.R.
 - a. R.U.U. Penjusunan M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D.
 - b. R.U.U .Pemilihan Umum.
2. Selandjutnja disampaikan pula Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959 jo Penetapan Presiden No. 3 tahun 1966 dengan permintaan untuk segera dibitjarkan oleh D.P.R.-G.R. dan diubah mendjadi Undang-undang agar supaja D.P.A. dapat ditetapkan menurut pasal 16 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
3.
 - a. Achirnja kami memberi-tahukan bahwa kami akan menjempurnakan pimpinan dan keanggotaan M.P.R.S. sekarang ini.
 - b. Agar supaja penjempurnaan itu dapat kami kerdjakan sebaik-baiknya, maka bersama ini kami ingin mendapat saran-saran daripada D.P.R.-G.R.
 - c. Berhubung dengan itu, kami telah menugaskan kepada Presidium untuk memberikan pendjelasan kepada Pimpinan D.P.R.-G.R. mengenai penjempurnaan tersebut apabila dianggap perlu.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO

Tembusan kepada :

1. Pimpinan M.P.RS..
2. Presidium Kabinet Dwikora.

Dengan adanya surat Presiden tersebut, maka Pimpinan D.P.R.-G.R. segera setelah mengadakan konsultasi dengan semua Golongan dan Kelompok-kelompok dalam D.P.R.-G.R. mengirim surat kepada Presiden yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
GOTONG ROJONG**

No. C2.06/K/1026/DPRGR/1966 Djakarta, 23 Mei 1966

Lampiran :

Perihal : Saran² dan penda- K e p a d a
dapat² D.P.R.-G.R. Presiden Republik Indonesia
di
DJAKARTA.

AMAT SEGERA,—

Sebagai penegasan atas laporan Pimpinan D.P.R.-G.R. yang disampaikan dengan lisan kepada Paduka Jang Mulia pada hari Minggu tanggal 22 Mei 1966 yang lalu, dengan ini diberitahukan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

Memenuhi permintaan Paduka Jang Mulia sebagaimana tertjantum dalam surat Paduka Jang Mulia tanggal 4 Mei 1966, ialah mengenai saran² untuk menjempurnakan M.P.R.S., D.P.R.-G.R. berpendapat bahwa untuk mempertinggi mutu dan nilai M.P.R.S. hendaknja Partai-partai Politik dan Organisasi² Massa menggunakan hak recallnja terhadap anggota²nja. Dalam hubungan ini bila dianggap perlu bisa djuga dimasukkan kedalam djatah Partai² Politik dan Organisasi² Massa tersebut Wakil² Angkatan Muda.

Mengenai lowongan kursi² jang ditinggalkan oleh P.K.I. dan Organisasi² Massanja, D.P.R.-G.R. berpendapat bahwa lowongan tersebut tidak perlu diisi, mengingat tidak adanya ketentuan jang pasti baik dalam Undang² maupun menurut Penetapan Presiden mengenai djumlah Anggota M.P.R.S.

Selain itu djuga adanja kemungkinan bahwa pengisian lowongan² tersebut akan dapat menimbulkan perpetjahan diantara kita dengan kita Golongan² jang progresip revolusioner.

Selandjutnja berkenaan dengan sidang M.P.R.S. jang akan datang, D.P.R.-G.R. berpendapat, bahwa sebaiknja sidang M.P.R.S. tersebut diadakan pada permulaan bulan Djuni 1966.

Achirnja dengan tidak mengurangi harapan perlu segera diadakannja sidang M.P.R.S., maka dalam rangka penjempurnaan dan penegasan kedudukan hukum dan fungsi M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R., D.P.R.-G.R. akan mengajukan R.U.U. Usul Inisiatif tentang Penjempurnaan M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN GOTONG ROJONG

K e t u a,

ttd.

H. Achmad Sjaichu

Terhadap surat tersebut dijelaskan oleh Ketua D.P.R.-G.R./ H.A. Sjaichu dalam rapat pleno D.P.R.-G.R. hari Selasa tanggal 24 Mei 1966, sebagai berikut :

„Saudara-saudara, perlu surat ini saja djelaskan lagi dengan harapan semoga tidak timbul salah fahan, bahwa D.P.R.-G.R. belum memenuhi maksud surat Presiden, sehingga mungkin bisa menimbulkan kelambatan Sidang M.P.R.S. Selandjutnja dalam hubungan ini saja mengandjurkan kepada Parpol-parpol dan Ormas-ormas untuk dimana dipandang perlu menurut keja-kinan dan pandangannja masing-masing dalam rangka untuk mempertinggi nilai daripada M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R. untuk segera menggunakan hak recallnja sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang telah ada.”

Penggantian anggota atas dasar hak recall itu dilakukan terhadap 5 orang pada tanggal 25 Mei 1966 dan sebanjak 34

orang pada tanggal 16 Djuni 1966. Pengambilan sumpah terhadap anggota-anggota baru sebagian dilakukan sebelum sidang umum M.P.R.S. dan sebagian besar lainnya dilakukan sesudah sidang umum M.P.R.S. yang berarti sudah terlebih dahulu diambil sumpahnya selaku anggota M.P.R.S.

D. Sidang Umum ke IV M.P.R.S.

Sidang Umum ke-IV M.P.R.S. berlangsung dari tanggal 20 Djuni s/d 5 Djuli 1966. Hasil- karya Panitia Politik dan Panitia Ekubang mendapatkan penampungannya dalam Ketetapan-ketetapan M.P.R.S., bahkan hasil karya Panitia Politik dalam bentuk Memorandum D.P.R.-G.R. tentang „Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia” telah diangkat sepenuhnya menjadi Ketetapan M.P.R.S. No. XX/MPRS/1966. Pendapat dan saran-saran lainnya dari Panitia Politik dapat ditampung pula dalam Ketetapan² M.P.R.S. No. XI, XIV dan XXXI. Adapun hasil dari Panitia Ekubang adalah menjadi bahan pembahasan utama pula yang kemudian menghasilkan Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966 tentang „Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan”.

Hasil-hasil Sidang Umum ke-IV M.P.R.S. adalah sebagai berikut :

1. KETETAPAN² M.P.R.S.

1. Ketetapan M.P.R.S. No. IX/MPRS/1966 tentang : Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia.
2. Ketetapan M.P.R.S. No. X/MPRS/1966 tentang : Kedudukan Semua Lembaga-lembaga Negara Tingkat Pusat Dan Daerah. Pada Posisi Dan Fungsi Yang Diatur Dalam Undang-undang Dasar 1945.
3. Ketetapan M.P.R.S. No. XI/MPRS/1966 tentang : Pemilihan Umum.
4. Ketetapan M.P.R.S. No. XII/MPRS/1966 tentang : Pene-

- gasan Kembali Landasan Kebidjaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia.
5. Ketetapan M.P.R.S. No: XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera.
 6. Ketetapan M.P.R.S. No XIV/MPRS/1966 tentang : Pembentukan Panitia² Ad Hoc MPRS Jang Bertugas Melakukan Penelitian Lembaga² Negara Menurut Sistim Undang² Dasar 1945, Penjusunan Rentjana Pendjelasan Pelengkap Undang-undang Dasar 1945 Dan Penjusunan Perintjian Hak-hak Azazi Manusia.
 7. Ketetapan M.P.R.S. No. XV/MPRS/1966 tentang : Pemilihan Penundjukan Wakil Presiden Dan Tata-tjara Pengangkatan Pedjabat Presiden.
 8. Ketetapan M.P.R.S. No. XVI/MPRS/1966 tentang : Penger-tian Mandataris MPRS.
 9. Ketetapan M.P.R.S. No XVII/MPRS/1966 tentang : Pemimpin Besar Revolusi. †
 10. Ketetapan M.P.R.S. No. XVIII/MPRS/1966 tentang : Penin-djauan Kembali Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963
 11. Ketetapan M.P.R.S. No. XIX/MPRS/1966 tentang : Penin-djauan Kembali Produk-produk Legislatip Negara Diluar Produk MPRS Jang Tidak Sesuai Dengan Undang-undang Dasar 1945.
 12. Ketetapan M.P.R.S. No. XX/MPRS/1966 tentang : Memo-randum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Repu-blik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
 13. Ketetapan M.P.R.S. No. XXI/MPRS/1966 tentang : Pembe-rian Otonomi Seluas-luasanja Kepada Daerah.
 14. Ketetapan M.P.R.S. No. XXII/MPRS/1966 tentang : Kepar-taian, Keormasan Dan Kekaryaan.
 15. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966 tentang : Pem-baharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan.
 16. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIV/MPRS/1966 tetang : Kebi-djaksanaan Dalam Bidang Pertahanan/Keamanan.
 17. Ketetapan M.P.R.S. No. XXV/MPRS/1966 tentang : Pem-bubaran Partai Komunis Indonesia, Pernjataan Sebagai

Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menjebarkan Atau Mengembangkan Fahan Atau Adjaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

18. Ketetapan M.P.R.S. No. XXVI/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Adjaran-adjaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.
19. Ketetapan M.P.R.S. No. XXVII/MPRS/1966 tentang : Agama, Pendidikan Dan Kebudayaan.
20. Ketetapan M.P.R.S. No. XXVIII/MPRS/1966 tentang : Kebidjaksanaan Peningkatan Kesedjahteraan Rakjat.
21. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIX/MPRS/1966 tentang : Pengangkatan Pahlawan Ampera.
22. Ketetapan M.P.R.S. No. XXX/MPRS/1966 tentang : Pentjabutan Bintang „Maha Putra” Kelas III Dari D.N. Aidit.
23. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXI/MPRS/1966 tentang : Penggantian Sebutan „Paduka Jang Mulia” (P.J.M.), „Jang Mulia” (J.M.), „Paduka Tuan” (P.T.) Dengan Sebutan Bapak/Ibu” Atau „Saudara/Saudari”.
24. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXII/MPRS/1966 tentang : Pembinaan Pers.

II. RESOLUSI M.P.R.S.

Resolusi M.P.R.S. No. III/Res/MPRS/1966 tentang : Pembinaan Kesatuan Bangsa.

III. KEPUTUSAN M.P.R.S. No. 1 s/d 4.

Keputusan M.P.R.S. No. 5/MPRS/1966 tentang : Tanggapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia Terhadap Pidato Presiden/Mandataris MPRS Didepan Sidang Umum ke-IV MPRS Pada Tanggal 22 Djuni 1966 Jang Berljudul : Nawaksara.

IV. TAMBAHAN.

- 1 Resume Risalah Pembitjaraan Dalam Rapat-rapat MPRS tentang : Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan Dan Pembangunan.
2. Nota I/MPRS 1966 perihal : Politik Luar Negeri Berdasarkan Pantjasila.

Tentang adanya keputusan No. 5/MPRS/1966 dapat didjelaskan

bahwa pada mulanja Presiden Soekarno berpendirian tidak akan memberikan pertanggung-djawab kepada M.P.R.S. melainkan hanya merasa berkewadajiban untuk bertanggung-djawab kepada M.P.R. hasil pemilihan umum. Pendirian ini dianggap tidak benar oleh M.P.R.S. pada waktu itu, karena berdasarkan Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960, Presiden Soekarno adalah Mandataris M.P.R.S. dan oleh karenanja berkewadajiban pula memberikan pertanggung-djawab kepada M.P.R.S.

Pada achirnja Presiden Soekarno merubah pendiriannja dan bersedia memberikan pertanggung-djawab tersebut kepada M.P.R.S. dalam Sidang Umum ke-IV, dengan pidato Presiden jang berdjulud NAWAKSARA. Nawa berarti sembilan, aksara diartikan oleh Presiden Soekarno ialah pasal atau point. Djadi Nawaksara ialah berarti 9 pasal atau 9 point jaitu 9 pasal pokok² pemikiran jang disampaikan oleh Presiden Soekarno kepada M.P.R.S.

9 Pokok Pemikiran tersebut ialah :

1. Mengenai retrospeksi jang berisi antara lain tentang pengertian P.B.R., pengertian Mandataris M.P.R.S. dan pengertian Presiden Seumur Hidup.
2. Landasan kerdja dalam melandjutkan pembangunan termasuk didalamnya Trisakti, Rentjana Ekonomi Perjuangan dan pengertian tentang Berdikari.
3. Hubungan Politik dan Ekonomi.
4. Detail daripada tugas² jang ditetapkan oleh Pemerintah bersama² dengan D.P.R.-G.R.
5. Tetap berpegang pada demokrasi terpimpin.
6. Merintis djalan kearah pelaksanaan UUD 1945.
7. Kedudukan D.P.R.-G.R. dan M.P.R.S.
8. Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden.
9. Penutup dimana antara lain ditekankan agar dibedakan antara M.P.R.S. dan M.P.R. hasil pemilihan umum agar kemurnian UUD dapat dilaksanakan.

M.P.R.S. berpendapat bahwa pidato NAWAKSARA tersebut kurang memenuhi harapan rakjat, chususnya anggota-anggota M.P.R.S., karena pidato NAWAKSARA tidak memuat setjara djelas tentang kebidjaksanaan Presiden/Mandataris M.P.R.S.

mengenai peristiwa kontra-revolusi G-30-S/PKI beserta epiloojnja.

Dalam melakukan penilaian terhadap pidato NAWAKSARA tersebut, M.P.R.S. tidak dapat melepaskan diri dari keadaan kehidupan sosial politik sebelum dan sesudahnja 1 Oktober 1966 jang mendjadi tanggung-djawab seluruh rakjat Indonesia.

Demikianlah maka lahir Keputusan M.P.R.S. No. 5/MPRS/1966 jang pokok-pokok diktumnja berbunji sbagai berikut:

Pasal 1.

Setelah mendengar, mempeladjadi dan memahami Pidato Presiden/Mandataris M.P.R.S. jang berdjulud Nawaksara, minta kepada Presiden, supaja melengkapkan laporan pertanggungangan-djawabnja kepada M.P.R.S., chususnja mengenai sebab-terdjadinja peristiwa G. 30 S/PKI beserta epiloojnja dan kemunduran ekonomi serta achlak.

Pasal 2.

Menugaskan kepada Pimpinan serta Badan pekerdja M.P.R.S. untuk menanggapi hal tersebut diatas.

Pasal 3.

Mengharapkan agar untuk masa selandjutnja Presiden memberi pertanggungangan-djawab jang selengkap-lengkapnja sesuai dengan makna Undang-undang Dasar 1945.

Sesuai dengan penugasan pasal 2 Keputusan M.P.R.S. No. 5/MPRS/1966 kepada Pimpinan serta Badan Pekerdja M.P.R.S., maka seperti akan diuraikan dibawah nanti bahwa D.P.R.-G.R. dalam memorandumnja telah meminta kepada Pimpinan M.P.R.S. supaja ditanjakan lebih landjut tentang kelengkapan Laporan Pertanggungangan-djawab Presiden kepada M.P.R.S. chususnja mengenai sebab-sebab terdjadinja peristiwa G-30-S/PKI beserta epiloojnja dan kemunduran ekonomi serta achlak. Hal ini akan diuraikan lebih landjut dalam Bab VIII buku ini dalam menguraikan „Pelengkap NAWAKSARA”.

E. Pernyataan Pendapat DPR-GR tentang Keterangan Pemerintah dan Pidato-pidato Presiden

Salah satu Ketetapan Sidang Umum ke-IV M.P.R.S. ialah Ketetapan No. XIV/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera. Berdasarkan ketetapan ini selambat-lambatnja tgl. 17-8-1966 harus sudah dibentuk Kabinet AMPERA. Dalam Ketetapan ini ditjan-tumkan mengenai tugas pokok serta program Kabinet Ampera, sjarat-sjarat untuk dapat diangkat mendjadi Menteri dan pro-cedure pembentukannja.

Susunan Kabinet AMPERA diumumkan oleh Presiden pada tgl. 25 Djuli 1966 dan dilantik pada tgl. 28 Djuli 1966. Susunan selengkapnja dari Kabinet AMPERA dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966. Selandjutnja pada tanggal 16 Agustus 1966, Djenderal Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet AMPERA menjampaikan keterangan Pemerintah di-depan rapat Pleno D.P.R.-G.R. Pokok² isi daripada keterangan Pemerintah tersebut ialah sebagai berikut :

Pertama mengenai Pembentukan Kabinet AMPERA dikemu-kakan tentang :

- Siapa jang ditugaskan membentuk Kabinet;
- Bagaimana procedure pembentukannja ;
- Apa tugas dan program jang ditetapkanja;
- Bagaimana sifat strukturnja;
- Apa sjarat-sjarat Menterinja; dan
- Djangka waktu pembentukan.

Kedua, mengenai Program Kerdja Kabinet AMPERA dikemu-kakan tentang:

- Strategi Dasar Rehabilitasi, Konsolidasi dan Stabilisasi men-tal/psychologis, politik, ekonomi, sossial/budaja dan militer dalam djangka waktu sampai MPR dan Kabinet jang akan datang dapat bekerdja ;
- Strategi Dasar setjara umum;
- Pembabakan Strategi Dasar jang terdiri dari dua fase, jaitu fase rehabilitasi dan fase stabilisasi jang masing-masing fase dibagi lagi dalam dua masa;
- Azas-azas, jaitu tak boleh menghambat satu sama lain, simu-lan-frontal, koordinasi, synchronisasi, integrasi, pemelihara-an tudjuan, pembuatan program-program berdasarkan tugas dan pengamanan segala bidang;



SESAAT SEBELUM KETUA PRESIDSIUM KABINET AMPFRADJENDRAL SOEHARTO
 MENJAMPAIKAN KETERANGAN PEMERINTAH, KETIKA TIBA DIGEDUNG D.P.R.
 G.R. NAMPAK DISAMBUUT OLEH WK. KETUA D.P.R.-G.R. MAJ. DIEN. DR. SIARIF
 THAJEB. MAJOR DIENDRAL BASUKI RACHMAT NAMPAK DIBELAKANG DIEN-
 DERAL SOEHARTO DAN BERPAKAJIAN PUTIH² ADALAH MENTERI KEHAKIM-
 AN UMAR SENO ADJI S.H.

"FOTO DEPPEN" 66-10524.

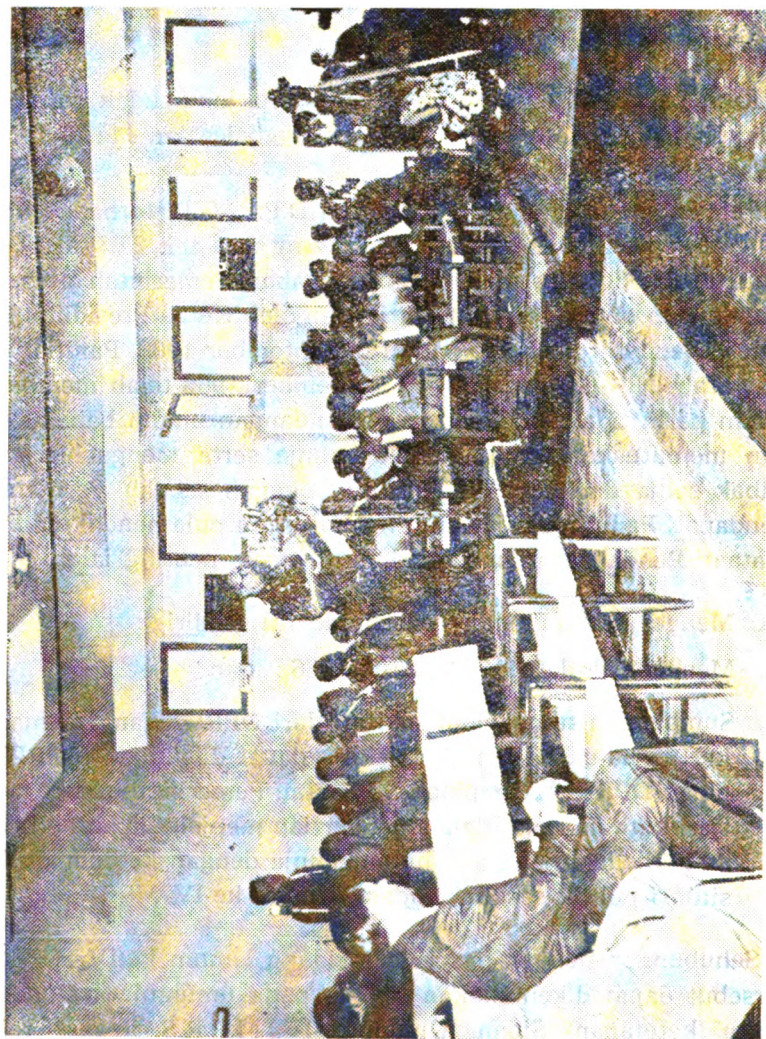
- Struktur jaitu penentuan garis awal, pemilihan momentum, inventarisasi dan penjesuaian program dengan evaluasi jang realistis.
- Pelaksanaan menurut bidang-bidang jaitu : Politik, KESRA, Ekonomi Keuangan, Industri dan Pembangunan, dan HAN-KAM.

Ketiga dikemukakan pula tentang usaha jang sudah dan akan dilakukan oleh Pemerintah mengenai Penjelesaian Masalah Malaysia.

Pemandangan umum para anggota D.P.R.-G.R. terhadap keterangan Pemerintah tersebut berlangsung dari tgl. 25 s/d tgl. 29 Agustus 1966 siang malam dan djawaban Pemerintah atas pemandangan umum tersebut diutjapkan oleh Ketua Presidium Kabinet/Djenderal Soeharto pada tgl. September 1966. Panitia Musjawarah DPR-GR pada tgl. 12 September 1966 telah membitjarkan perlu tidaknja diadakan pemandangan umum babak ke-II dan memutuskan untuk meniadakannja serta mengachiri satu babak sadja dan kemudian ditutup dengan sebuah Pernyataan Pendapat. Panitia Musjawarah memutuskan pula hendaknja Pernyataan Pendapat itu mengandung 3 unsur penting ialah:

- 1). Mengenai keterangan pemerintah itu sendiri ;
- 2). Mengenai Pidato 17 Agustus 1966 ; dan
- 3). Sumbangan-sumbangan pikiran dari DPRGR jang menjangkut usaha-usaha jang hendaknja dapat dilakukan oleh Pimpinan DPR-GR, Pimpinan MPR atau Pemerintah untuk menjtjari kata mufakat dalam pengertian menjelesaikan perbedaan-perbedaan jang ada hubungannja dengan kehidupan dan situasi politik sesudah Sidang Umum ke-IV/MPRS.

Sehubungan dengan hasil-hasil Sidang Umum ke-IV M.P.R.S. tersebut dapat dikemukakan bahwa pada umumnja semua putusan²/ketetapan² Sidang Umum ke-IV M.P.R.S. tegas² telah menentukan arah kemana Negara, Revolusi dan Pemerintah harus berdjalan, meskipun tidak dapat disangkal pula masih adanja satu dua lubang jang memungkinkan adanja konflik dan dualisme. Namun seharusnja lobang² tersebut tidaklah usah menjebabkan terus berlangsungnja konflik dan dualisme jang ada pada



16 Agustus 1966.
Ketua Presidium Kabine: Ampera Djenderal Suharto sedang memberikan keterangan peme-
rintah tentang situasi Negara yang dihadapi dewasa itu.

„Foto Deppen” 66-8725.

waktu itu, asalkan semua Lembaga Negara, jaitu M.P.R.S., D.P.R.G.R., Presiden dan lain-lainnja benar² melaksanakan hasil² sidang umum ke-IV M.P.R.S. menurut djiwa dan bunjinja.

Akan tetapi apa jang kemudian terdjadi dengan pidato² Presiden Soekarno mendjelang 17 Agustus 1966, pada tanggal 17 Agustus 1966 dan sesudahnja djusteru telah memperbesar lagi adanja konflik tersebut, disebabkan karena dalam pidato² tersebut mengandung hal-hal jang bukan sadja bertentangan dengan U.U.D. 1945 bahkan djuga bertentangan dengan Dasar Negara Pantjasila.

Didalam pidato „Djangan sekali-kali meninggalkan sedjarah” Presiden Soekarno berkata bahwa didalam Tri Tunggal Ampera seolah-olah tidak ada keambeg-parama-artaan Utjapan Presiden ini bertentangan dengan bunji Ketetapan M.P.R.S. No. XIII/MPRS/1966 dalam konsiderans huruf d : „Bahwa dalam rangka untuk memenuhi pelaksanaan Tri Tuntutan Rakjat, bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan perlu diambeg-parama-artakan”.

Didalam pidato „Djangan Sekali-kali meninggalkan sedjarah” Presiden Soekarno tetap berpegang kepada gagasan Nasakom, antara lain beliau berkata : „Saja tetap berkata, bahwa Nasakom NASASOS atau nasa-apapun adalah unsur-mutlak daripada Pembangunan Bangsa Indonesia !” Hal ini adalah bertentangan dengan Ketetapan M.P.R.S. No. XXV/MPRS/1966. Setjara idee Nasakom adalah bertentangan dengan Pantjasila dan sebagai penetrapan dari adjaran „penggalangan semua kekuatan² revolusi” telah ternjata mendatangkan mala petaka bagi bangsa dan negara.

Didepan Dewan Harian Nasional Angkatan '45 Presiden Soekarno menjebut diri beliau sebagai seorang Marxis. Marxisme pada dasarnya adalah atheistic. Dan ini adalah bertentangan dengan sila-pertama Pantja Sila Ketuhanan Jang Maha Esa. Seyogjanja seorang Presiden dari Negara jang berdasarkan Pantjasila hendaknja lebih mengetengahkan kejakinan beliau sebagai seorang Pantjasilais dan tidak menondjolkani diri beliau sebagai seorang Marxis, meskipun jang dimaksudkan oleh Presiden Soekarno adalah Marxist dalam arti jang lain. Lebih lagi dalam kondisi pada waktu itu.

Menurut Ketetapan M.P.R.S. No. XVII/MPRS/1966, predikat

Pemimpin Besar Revolusi adalah tidak membawa wewenang hukum, karenanja tidaklah pada tempatnja bahwa Presiden Soekarno masih seperti dalam masa Orde Lama selalu menjebutkan pridikat P.B.R. dalam satu rentetan sebutan kedudukan² beliau sebagai Presiden/Pangti ABRI/PBR/ Mandataris MPRS. Diri beliau sebagai Presiden tidaklah dapat dipisahkan dengan diri beliau sebagai pribadi ataupun sebagai Pemimpin Besar Revolusi Baik sebagai pribadi, sebagai Presiden maupun sebagai Pemimpin Besar Revolusi haruslah tunduk dan karenanja menjesuaikan pidato²/keterangan-keterangannja dengan UUD-1945 dan Putusan² M.P.R.S. Tidak dapat dibenarkan akan adanja ketjenderungan seakan-akan Presiden Soekarno dapat berdiri diluar UUD-1945 dan Putusan² M.P.R.S. dengan berlindung dibelakang dalih sebagai Pemimpin Besar Revolusi.

Masih banjak lagi hal-hal jang bertentangan dengan djiwa dan bunji Ketetapan²/Keputusan² Sidang Umum ke-IV M.P.R.S. diutjapkan dalam pidato² Presiden Soekarno, misalnja mengenai penjelenggaraan Conefo, ikut aktifnja lagi R.I. dalam kegiatan² P.B.B., Normalisasi Hubungan Diplomatik R.I. dengan Malaysia dan sebagainya.

Untuk menjetop situasi konflik sebagai akibat pidato² Presiden Soekarno dan sekaligus untuk menanggapi Keterangan Pemerintah maka atas usul angota Dachlan Ranuwihardjo S.H. dkk., achirnja D.P.R.-G.R. dalam rapat pleno tgl. 20 September 1966 telah mengesahkan sebuah Pernyataan Pendapat D.P.R.-G.R. tentang Keterangan Pemerintah dan Pidato-pidato Presiden. Isi selengkapnja diktum daripada Pernyataan Pendapat tersebut ialah sebagai berikut :

M E M U T U S K A N :

- I. a. Dapat memahami Keterangan Pemerintah jang disampaikan oleh Ketua Presidium Kabinet AMPERA Djenderal Soeharto dalam rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong pada tanggal 16 Agustus 1966 dan tanggal 6 September 1966 serta mempertjajai iktikad baik jang terkandung didalamnya ;
- b. Pada dasarnja dapat menerima Keterangan² Pemerintah

tersebut dan dapat memberikan kesempatan bekerdja kepada Kabinet AMPERA untuk melaksanakan dengan sungguh² Dwi Dharma dan Tjatur Karya-nja ;

- c. Untuk kesempurnaan Djawaban Pemerintah pada tgl. 6 September 1966 mengharap kepada para Menteri dalam bidangnja masing² agar memberikan keterangan/djawaban atas pertanyaan², usul² dan saran-saran para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang telah diutjapkan dalam Pemandangan umum pada tanggal 14 s./d 29 Agustus 1966 ;

II. a. Sangat menjesalkan pidato Presiden/Pemimpin Besar Revolusi „Djangan Sekali-kali meninggalkan Sedjarah dan pidato²nja kemudian, karena pidato³ tersebut mengandung hal-hal jang dianggap tidak sesuai dengan Pantjasila, UUD-1945 serta dengan semangat, djiwa, dan bunji Putusan² Sidang Umum ke-IV/MPRS/1966 ;

- b. Oleh karena itu Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dalam pidato²/tindakan²nja supaya selalu mengadakan konsultasi dengan Presidium Kabinet AMPERA.

III. a. Untuk menenangkan keadaan dan demi pengamanan pelaksanaan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet AMPERA, perlu segera diadakan Clearing approach jang aktif antara Pimpinan MPRS, Pimpinan DPRGR, Presiden dan Presidium Kabinet AMPERA dan apabila dianggap perlu dapat diperluas dengan Pimpinan Parpol², Ormas², Golkar termasuk Angkatan 66 guna terdjaminnja Dasar Negara Pantjasila dan kemurnian pelaksanaan UUD-1945 serta Putusan Sidang Umum ke-IV/MPRS/1966;

- b. Clearing approach seperti tersebut diatas jang menudju kearah Kerukunan Nasional hendaknja selalu dipupuk dan dikembangkan;
- c. Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong diharapkan selalu memberikan laporan hasil Clearing approach kepada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;

- IV. Meminta kepada Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 untuk dimana perlu mengambil langkah² yang kongkrit untuk menjengkirkan hal² yang sifatnja tidak membantu kearah suksesnja pelaksanaan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet AMPERA dan agar Fasilitas² Pemerintah chususnja Mass Media-nja hanja dimanfaatkan bagi terlaksananja tugas Kabinet AMPERA tersebut.

Selandjutnja, Pernyataan Pendapat tsb. dilampiri dengan sebuah Memorandum D.P.R.-G.R. yang bunji selengkapnja ialah sebagai berikut :

MEMORANDUM

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG

1. Demi tertjapainja Dwi Dharma Kabinet AMPERA jaitu Stabilisasi Politik dan Stabilisasi Ekonomi maka penjelenggaraan CONEFO di-Indonesia hendaknja ditangguhkan dan disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan² dalam penjenggaraannja sesuai dengan Putusan Sidang Umum ke-IV/MPRS/1966;
2. Supaja pangkat Menteri hanja diberikan kepada mereka yang berfungsi dalam bidang Eksekutif sebagai anggota Kabinet;
3. Supaja ditanjakan lebih landjut tentang kelengkapan laporan pertanggungan-djawab Presiden kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara chususnja mengenai sebab² terdjadinja Peristiwa G.30.S/P.K.I. beserta epiloognja dan kemunduran ekonomi serta achlak, sebagaimana yang dikehendaki oleh Keputusan No. 5/MPRS/1966;
4. Dalam rangka melaksanakan penjederhanaan/effisiency dalam lingkungan Pemerintahan Pusat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketetapan² No. XIII/MPRS/1966 dan No. XIV MPRS 1966, supaja Badan²/Lembaga-Lembaga yang dibentuk diluar yang ditentukan oleh UUD-1945 serta yang tidak terang kemanfaatannja bahkan hanja menambah d o u b l u r e s, pemborosan dan kesimpang-siuran seperti misalnja : Koti, Kolognas/Kologda, Dewan Kehormatan Menteri dan lain-lain dihapuskan ;

5. Supaja Presiden :

- a. Mengutuk P.K.I. sebagai perentjana, dalang, dan pelaku aktif dari G.30.S.;
- b. Menggunakan sebutan „G.30.S.” dan bukannya „Gestok”;
- c. Membuang gagasan Nasakom dan Pantja Azimat;
- d. Tidak lagi menjebutnja dirinja sebagai seorang Marxist demi untuk nama baik Bung Karno sendiri dimata rakyat Indonesia jang ber-Tuhan, meskipun jang dimaksudkan oleh Bung Karno adalah Marxist dalam arti lain.

§ 6. HASIL-HASIL PEKERDJAAN.

Hasil-hasil pekerdjaan „D.P.R.-G.R. minus P.K.I.” terhitung dari tanggal 15 Nopember 1965 s/d diundangkannja Undang² No. 10 tahun 1966 tanggal 19 Nopember 1966, adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 19 Nopember 1965 telah disetudjui R.U.U. tentang Kesehatan Djiwa untuk didjadikan Undang-undang, jaitu sebagaimana kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal 11 Djuni 1966 mendjadi Undang-undang No. 3 tahun 1966 (Lembaran Negara No. 23 dan TLN. No. 2805 tahun 1966).
2. Tanggal 26 Nopember 1965 telah disetudjui Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R. tentang Rodhesia Selatan.
3. Tanggal 22 Desember 1965 telah disetudjui R.U.U. tentang Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966 untuk didjadikan Undang-undang, jaitu sebagaimana kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1965 mendjadi Undang-undang No. 22 tahun 1965 (Lembaran Negara No. 117, TLN. No. 2789 tahun 1965).
4. Tanggal 11 Februari 1966 telah disetudjui Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R. :
 - a. tentang Konprensi Pertama Rakjat-rakjat Asia-Afrika-Amerika Latin di Havana, jang isinja a.l. :
 - memprotes Panitia Persiapan Internasional jang di-kepalai oleh Panitia Nasional Kuba jang telah menolak delegasi OISRAA (Organisasi Internasional

- Soladiratitas Rakjat Asia Afrika) dari Indonesia jang sah;
- menuntut supaya OISRAA Indonesia jang sah dikembalikan hak dan kedudukannja, mengeluarkan dengan tidak hormat delegasi palsu jang dikepalai oleh Ibrahim Isa;
 - mendesak Pemerintah Indonesia untuk mentjabut semua paspor petualang-petualang G-30 S/PKI jang berkeliaran diluar negeri ;
 - sangat menjesalkan utjapan² P.M. Kuba atas penilaiannja jang salah tentang persoalan dalam negeri Indonesia;
 - menjatakan penghargaan kepada delegasi² Nepal, Mongolia, Sovjet Uni dll. jang dengan sukses menggagalkan usaha² kaum petualang kontra revolusi G-30-S/PKI di Havana.
- b. tentang Deklarasi Taskent jang isinja al. :
- bersjukur kehadiran Tuhan Jang J.M.E. atas ditjapainja permufakatan antara Pemerintah India dan Pakistan sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Taskent ; dan atas dasar ini hendaknja didjadikan titik tolak menudju penjelesaian sengketa Kashmir;
- c. tentang siaran radio Peking dan pemberitaan wartawan Shin Hwa jang isinja a.l. :
- peringatan keras kepada wartawan² kantor berita Shin Hwa dan Radio Peking supaya memberhentikan siaran² jang tidak bersahabat dan melanggar kehormatan serta kedaulatan rakjat dan Negara Republik Indonesia;
5. Tanggal 18 Februari 1966 telah disetudju Pernjataan Pen-dapat D.P.R.-G.R.
- a. tentang Amanat Presiden tgl. 15 Djanuari 1966, jang isinja al. :
- menjetudju sepenuhnja keseluruhan isi Amanat Presiden pada sidang paripurna Kabinet Dwikora tgl. 15 Djanuari 1966; menjatakan kesetiaan tanpa

reserve kepada Kepala Negara; dan menjatakan bahwa seluruh anggota DPRGR bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang diwakilinya adalah „barisan Soekarno”.

b. tentang Rentjana Pemerintah Philipina untuk mengadakan normalisasi hubungan politik/diplomatik dengan Malaysia, yang isinja a.l. :

- mendukung sepenuhnya pernyataan Presiden R.I. tgl. 7 Pebruari 1966 didepan karyawan Kopronef dan tgl. 13 Pebruari 1966 didepan rapat raksasa Fron Nasional di Istora terhadap rentjana Presiden Philipina Marcos untuk mengakui Malaysia;
- menjerukan kepada Presiden Ferdinand Marcos untuk ber-sama² dengan Indonesia melaksanakan persetudjuan Manila, sehingga tidak menambah ketegangan di Asia tenggara.

c. tentang Agresi Imperialis A.S. di Vietnam, yang isinja antara lain :

- mengutuk keras ditingkatkannya terus menerus agresi AS di Vietnam;
- menuntut supaya AS membiarkan rakyat Vietnam melaksanakan haknya menentukan nasib sendiri sesuai dengan persetudjuan Djenewa 1945 ;
- menjerukan kepada rakyat, parlemen dan pemerintah seluruh dunia untuk mengutuk keras agresi AS di Vietnam; supaya tidak memberikan fasilitas² dan tidak menjediakan wilajahnya digunakan sebagai pangkalan agresi AS.

Tanggal 16 Maret 1966 telah disetudjui Pernyataan Pendapat D.P.G.R. :

- a. Tentang Dukungan terhadap kebidjaksanaan Presiden yang diambil tanggal 11 Maret 1966; dan
- b. Tentang Pendidikan sebagai akibat petualangan G.-30. S./PKI.

7. Tanggal 24 Maret 1966 telah disetudjui Pernyataan Pendapat D.P.R.G.R. tentang Kebidjaksanaan Presiden yang dituangkan dalam Pengumuman No. 5 tanggal 18 Maret 1966.

8. Tanggal 2 Mei 1966 telah diputuskan tentang Pendemi-sioneran Pimpinan D.P.R.-G.R. dan Penundjukan Care Taker Pimpinan D.P.R.-G.R.
9. Tanggal 17 Mei 1966 telah ditetapkan Peraturan Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong.
10. Tanggal 4 Djuni 1966 telah ditetapkan Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.
11. Tanggal 17 Djuni 1966 telah disetudjui Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R. tentang Penghasilan Pegawai Negeri, Pensiunan dan Petugas-petugas lainnja.
12. Tanggal 9 Djuni 1966 telah ditetapkan Djumlah Dan Susunan Komisi-komisi D.P.R.-G.R.
13. Tanggal 13 Agustus 1966 telah disetudjui Resolusi D.P.R.-G.R. tentang Ikut Aktif Kembalinja Indonesia Dalam Kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-bangsa.
14. Tanggal 20 September 1966 telah disetudjui Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R. tentang Keterangan Pemerintah Dan Pidato-pidato Presiden.
15. Tanggal 29 September 1966 telah diputuskan :
 - a. Menjetudjui R.U.U. tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Ambon Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Makasar untuk didjadikan Undang-undang, jaitu sebagaimana kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Oktober 1966 (Lembaran Negara No. 31 -TLN. No. 2810);
 - b. Menjetudjui R.U.U. tentang Persetudjuan Untuk Menormalisasi Hubungan Antara R.I. Dengan Malaysia untuk didjadikan Undang-undang, sebagaimana jang kemudian disjahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Oktober 1966 mendjadi Undang-undang No. 5 tahun 1966 (Lembaran Negara No. 32-TLN. No. 2811).
 - c. Menjetudjul R.U.U. tentang Pemberian Pensiun, Tundjangan Bersifat Pensiun Dan Tundjangan Kepada Militer Sukarela untuk didjadikan Undang-undang, sebagaimana kemudian disjahkan dan diundangkan tanggal 1 Nopember 1966 mendjadi Undang-undang No. 6 tahun 1966 (Lembaran Negara No. 33-TLN. No. 2812). .

- d. Menjetudjui R.U.U. tentang Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Dan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong Mendjelang Pemilihan Umum untuk didjadikan Undang-undang, sebagaimana kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal 19 Nopember 1966 menjadi Undang-undang No. 10 tahun 1966 (Lembaran Negara No. 38-TLN. No. 2813).
16. Tanggal 31 Oktober 1966 telah diputuskan menjetudjui :
 - a. R.U.U. tentang Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang soal-soal Keuangan;
 - b. R.U.U. tentang Keanggotaan Republik Indonesia Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank); dan
 - c. R.U.U. tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (Internasional Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Internasional Bank for Reconstruction and Development) ;

Ketiga-tiga R.U.U. tsb. diatas kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal 8 Nopember 1966, ber-turut² menjadi Undang-undang No. 7, 8, dan 9 tahun 1966 (Lembaran Negara No. 34, 35 dan 36)

17. Tanggal 11 Nopember 1966 telah diputuskan menjetudjui R.U.U. tentang Ketentuan² Pokok Pers untuk didjadikan Undang-undang, sebagaimana kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal 12 Desember 1966 menjadi Undang-undang No. 11 tahun 1966 (Lembaran Negara No. 40-TLN. No. 2815).
18. Tanggal 15 Nopember 1966 telah diputuskan menjetudjui R.U.U. tentang Penetapan Anggaran Induk berserta Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1965, sabagaimana kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1966 menjadi Undang-undang No. 12 tahun 1966 (Lembaran Negara No. 42).

Djadi sampai dengan 19 Nopember 1966, „D.P.R.-G.R. minus P.K.I.” telah menjetudjui 10 (sepuluh) Rantjangan Undang-undang untuk didjadikan Undang-undang. Diantara Undang-undang tersebut dua buah disjahkan dan diundangkan dalam masa D.P. R.-G.R. Orde Baru, jaitu pengesahannya dan pengundangannya dilakukan pada : a. Tgl. 12 Desember 1966. UU No. 11/tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. b. Tanggal 31 Desember 1966, UU No. 12 tahun 1966 tentang Penetapan Anggaran Induk beserta Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan belandja Negara tahun 1965. Akan tetapi karena keduanya sudah disetudjui oleh D.P.R.-G.R. pada tanggal 11 dan 15 Nopember 1966 djadi sebelum diundangkannya UU No. 10 tahun 1966 jang diundangkan tanggal 19 Nopember 1966 maka UU No. 11 dan 12 tersebut masih termasuk pula dalam produk „D.P. R.-G.R. minus P.K.I.”.

Produk-produk legislatif „D.P.R.-G.R. minus P.K.I.” jang penting, antara lain ialah :

A. UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1966 (LEMBARAN NEGARA No. 32-TLN No. 2811) TENTANG PERSETUDJUAN UNTUK NORMALISASI HUBUNGAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA.

Undang-undang No. 5 tahun 1966 (Lembaran Negara No. 33 — TLN No. 2811) hanja berisi 3 pasal Pasal 1 berbunji : „Persetudjuan untuk Menormalisasi Hubungan antara Republik Indonesia dan Malaysia tertanggal sebelas (11) bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam (1966) jang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini disetudjui”.

Pasal 2 UU No. 5/tahun 1966 hanja menjebutkan bahwa : „Persetudjuan tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal penandatangananannya”. Sedang pasal 3 UU No. 5/1966 hanja berisi tentang perintah pengundangan dan penempatannya dalam Lembaran Negara. Djadi berdasarkan bunji pasal 1 UU No. 5/1966, materi daripada Undang-undang ini adalah pada naskah persetudjuannya itu sendiri.

Adapun Pasal 2 dari Persetudjuan termaksud berbunji: „Pemerintah Republik Indonesia, demi keinginannya jang sungguh-sungguh untuk mengadakan kerdja-sama dan persahabatan jang erat antara Indonesia dan Malaysia menjetudjui, dan Pemerintah

Malaysia menerima baik bahwa hubungan diplomatik antara kedua negara akan segera diadakan dan bahwa mereka akan mengadakan pertukaran perwakilan diplomatik setcepat mungkin."

Selanjutnya dalam pasal 3 persetujuan termaksud menegaskan bahwa: „Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia menyetujui, bahwa berhubungan dengan jang tertera diatas, tindakan-tindakan bermusuhan antara kedua negara segera dihentikan”.

Dengan lahirnya persetujuan tersebut maka berachirlah konfrontasi antara Republik Indonesia dan Malaysia, sedang kepada rakyat Sabah dan Serawak, jang langsung berkepentingan, diberikan kesempatan; „untuk menegaskan lagi, setcepat mungkin, setjara bebas dan demokratis melalui pemilihan umum, keputusan jang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Malaysia”, sebagaimana hal ini disebut dalam pasal 1 persetujuan :

B. UNDANG-UNDANG No. 10 TAHUN 1966 (LEMBARAN NEGARA No. 38 TLN. No. 2813) TENTANG KEDUDUKAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG MENDEJELANG PEMILIHAN UMUM.

Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XIX/MPRS/1966 menetapkan perlunya peninjauan kembali produk² legislatif negara diluar produk Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Diantara produk-produk legislatif jang perlu ditinjau tersebut, termasuk didalamnya Penetapan-penetapan dan Peraturan-peraturan Presiden jang menjangkut persoalan adanya M.P.R.S. dan D.P.R.G.R.

Kedudukan dan fungsi M.P.R. menurut UUD 1945 sebagai Lembaga Negara Tertinggi tidaklah dapat disamakan dengan kedudukan dan fungsi D.P.R. Akan tetapi karena banyaknya ditemukan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan-penetapan dan Peraturan-peraturan Presiden jang mengatur M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R. dapat diperlakukan untuk kedua badan itu tanpa menjamakan kedudukan dan fungsinya, maka ditilik dari sudut praktis penguangan kedudukan M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R. itu

dapat dilakukan dalam satu undang⁹. Hanya dimana ada ketentuan yang khusus berlaku bagi salah satu badan, maka dalam pasalnya dinjatakan untuk badan mana pasal itu berlaku. Dengan demikian tidaklah dimaksudkan untuk menjamakan kedudukan dan fungsi kedua Lembaga Negara tersebut yang berarti bertentangan dengan UUD 1945, melainkan penguangannya dalam satu Undang-undang adalah semata-mata ditilik dari sudut praktisnya saja menjelang terbentuknya M.P.R. dan D.P.R. hasil pemilihan umum.

Dalam konsideran R.U.U. termaksud diatas disebutkan : „bahwa Undang-undang tersebut perlu segera disusun berhubung dengan adanya Ketetapan M.P.R.S. No. XI/MPRS/1966”.

Dapat dijelaskan bahwa Ketetapan M.P.R.S. No. XI/MPRS/1966 adalah berisi ketentuan-ketentuan yang menjangkut persoalan pemilihan umum, tentang pembuatan undang-undangnja, tentang waktu penyelenggaraannya dsb. Dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 tersebut penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemungutan Suara dilakukan selambat-lambatnja pada tanggal 5 Djuli 1968. (Tjataan : Tentang penentuan waktu ini dikemudian hari akan ada perubahan dengan Ketetapan M.P.R.S. No. XLII/MPRS/1968).

Berhubung dengan itu adalah wajar apabila sebelum ada Undang-undang mengenai MPR/DPR yang hendak disusun berdasarkan Pemilihan Umum, diadakan ketentuan mengenai landasan hukum M.P.R.S./D.P.R.-G.R. dalam bentuk suatu Undang² jaitu Undang-undang tentang Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong menjelang Pemilihan Umum.

Dengan adanya Undang-undang tentang kedudukan M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R. menjelang pemilihan umum tersebut dimaksudkan agar M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R. akan lebih tegas dapat menjalankan fungsinya sebagai Lembaga-lembaga demokrasi yang tertinggi.

R.U.U. tersebut disahkan dan di-undang-kan pada tanggal 19 Nopember 1966 menjadi Undang-undang No. 10 tahun 1966 tentang Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong menjelang Pemilihan Umum”.

C. PERNJATAAN PENDAPAT MENGENAI AMANAT PRESIDEN TANGGAL 15 DJANUARI 1966.

Beberapa hari sebelum sidang paripurna Kabinet Dwikora bahkan pada sa'at-sa'at Kabinet Dwikora sedang bersidang, terdjadi aksi massa jang dipelopori oleh Mahasiswa-mahasiswa jang tergabung dalam „KAMI” (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Aksi-aksi massa tersebut menjampaiakan tiga tuntutan pokok, jaitu :

- a. pembubaran P.K.I. dan Ormasnja,
- b. penurunan-harga bahan-bahan pokok kebutuhan rakjat, dan
- c. „perbaikan” Kabinet Dwikora.

Pada saat sidang paripurna Kabinet Dwikora di Istana Bogor pada tanggal 15 Djanuari 1966 Presiden Sukarno mengutjapkan pidato a.l. berisi beberapa pokok sbb. :

- a) Djawaban terhadap tiga tuntutan aksi-aksi massa jang berisi tri tuntutan hati nurani rakjat. Dalam hal ini Presiden dapat memahami dan mengerti bahwa tuntutan² itu adalah sebagai hal jang wadjar dan lajak, hanja menjesalkan tjara penjam-pain tuntutan tersebut.
- b) Adanja usaha-usaha, baik gelap maupun terang-terangan jang akan mendongkel kepemimpinan Bung Karno.
- c) Tentang pembentukan Barisan Sukarno.

Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong pada rapat pleno hari Djum'at tanggal 18 Pebruari 1966 taleh mengesjahkan „PERNJATAAN PENDAPAT D.P.R.-G.R. TENTANG AMANAT P.J.M. PRESIDEN TANGGAL 15 DJANUARI 1966”, jang bunji diktumnja sebagai berikut :

- I. 1. Menjatakan dukungan dan persetudjuan D.P.R.-G.R. sepenuhnja terhadap keseluruhan isi Amanat P. J. M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Pangti ABRI pada Sidang paripurna Kabinet Dwikora tgl. 15 Djanuari 166;
2. Menjatakan kesetiaan Anggota DPR-GR tanpa reserve kepada Bung Karno, baik dalam kedudukannja sebagai Presiden Kepala Negara/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi, maupun sebagai Pemimpin Rakjat dan Bangsa Indonesia;

3. Menjatakan bahwa seluruh D.P.R.-G.R. bersama seluruh rakjat Indonesia jang diwakilinja adalah barisan Soekarno dan setiap waktu siap menerima komando Bung Karno P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Pangti ABRI Bung Karno;
- II. 1. Menjerukan kepada segenap rakjat Indonesia jang progressif revolusioner untuk lebih mempererat persatuan dan kesatuan serta berdiri tegak bersatu sebagai satu barisan dibawah kepemimpinan dan Komando Bung Karno;
2. Mengadjak segenap rakjat pemimpin Negara dan pemimpin masjarakat untuk lebih waspada terhadap oknum² kontra revolusi dari manapun datangnja jang menjelundup dalam barisan dibawah kepemimpinan dan komando Bung Karno.
 3. Memandjatkan do'a semoga Tuhan Jang Maha Esa melimpahkan Taufik dan Hidajahnja serta memberikan kekuatan djasmaniah dan rochaniah serta pandjang umur kepada Paduka Jang Mulia Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Pangti ABRI/Mandataris M.P.R.S.
- d. **PERNJATAAN PENDAPAT D.P.R.-G.R. MENGENAI SURAT PERINTAH 11 MARET 1966.**

Surat Perintah 11 Maret jang dikenal djuga dengan „SUPER-SEMAR”,menugaskan kepada Djenderal Soeharto untuk mendjamin keamanan, keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden. Dengan Surat Perintah tersebut Djenderal Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1/3-1966 tanggal 12 Maret 1966 jang isinja membubarkan P.K.I. beserta Ormas²nja dan menjatakan sebagai Organisasi terlarang diseluruh daerah Republik Indonesia dan ditanda-tangani oleh Djenderal Soeharto atas nama Presiden.

Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong tanggal 16 Maret 1966 telah mengesahkan sebuah Pernjataan Pendapat tentang Kebidjaksanaan Presiden jang dituangkan dalam Surat Perintah 11 Maret 1966. Dalam Pernjataan Pendapat ini, selain menjatakan rasa sjukur kepada Tuhan Jang Maha Esa atas terpenuhi-

nja kehendak rakyat sebagaimana dinjatakan dalam Pernyataan Pendapat D.P.R.-G.R. tentang „Gerakan 30 September” dan menjatakan persetujuan dan dukungan sepenuhnya terhadap kebijaksanaan yang dituangkan dalam Surat Perintah tersebut, juga berisikan :

- kesediaan D.P.R.-G.R. untuk membantu Letnan Jenderal Soeharto dalam melaksanakan Surat Perintah tersebut, dan
- persetujuan dan dukungan D.P.R.-G.R. terhadap Keputusan Presiden No. 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 tentang :
 - a. Membubarkan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) termasuk bagian² organisasinya dari tingkat pusat sampai daerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung dibawahnya.
 - b. Menjatakan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) sebagai Organisasi terlarang diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Sebagai follow-up daripada Pernyataan Pendapat D.P.R.-G.R. tersebut maka Panitia Politik D.P.R.-G.R. memasukkan dalam saran² dan usul-usulnya : „Supaja MPRS mengesahkan SP-11 Maret”. Dalam Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia, dikemukakan pula oleh Panitia Politik bahwa Surat Perintah 11 Maret 1966 adalah sebagai dasar dan sumber hukum bagi Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan guna mengamankan pelaksanaan UUD 1945 negara murni dan konsekwen, untuk menegakkan Negara Republik Indonesia yang berdasar atas hukum dan penjenjagaraan pemerintahannya berdasar atas sistem konstitusi tidak atas dasar kekuasaan belaka.

Sehubungan dengan hal tersebut maka lahirilah Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang : Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia ; dan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia

E. PERNJATAAN PENDAPAT D.P.R.-G.R. TENTANG PENGUMUMAN PRESIDEN No. 5 TANGGAL 18 MARET 1966.

Perkembangan selanjutnya dalam pertengahan bulan Maret 1966 ialah, Djenderal Soeharto memutuskan untuk menahan lima belas Menteri. „Keputusan ini diumumkan oleh Djenderal Soeharto pada tanggal 18 Maret, sekali lagi atas nama Presiden. Kelima belas Menteri tersebut ialah :

1. Dr. Soebandrio, Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Luar Negeri,
2. Dr. Chairul Saleh, Wakil Perdana Menteri III,
3. Ir. Setiadi Raksoprodjo, Menteri Tenaga Listrik,
4. Sumardjo, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan,
5. Oey Tjoe Tat SH, Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet,
6. Ir. Surachman, Menteri Irigasi dan Pembangunan Masyarakat Desa,
7. Jusuf Muda Dalam, Menteri Bank Sentral dan Gubernur Bank Negara,
8. Armuranto, Menteri Pertambangan,
9. Sutomo Martopradopo, Menteri Perburuan,
10. Astrawinata SH, Menteri Kehakiman,
11. Major Djenderal Achmadi, Menteri Penerangan,
12. Let. Kol. Imam Sjafei, Menteri diperbantukan kepada Presiden Urusan Keamanan,
13. J. Tumakaka, Menteri/Sekertaris Djenderal Front Nasional,
14. Drs. M Achadi, Menteri Transmigrasi dan Koperasi, dan
15. Major Djenderal Dr. Sumarno Sastroatmodjo, Menteri Dalam Negeri/Gubernur Djakarta Raya.

Berhubungan dengan penahanan 15 orang Menteri yang tersebut diatas, maka Djenderal Suharto atas dasar Sp. 11 Maret mengisi kekosongan kursi dalam Kabinet.

Sehubungan dengan penahanan terhadap lima belas Menteri tersebut, D.P.R.-G.R. pada tanggal 24 Maret 1966 mengeluarkan Pernyataan Pendapat tentang Kebidjaksanaan P.J.M. Presiden Mandataris M.P.R.S./Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi yang dituangkan dalam Pengumuman No. 5 tanggal 18 Maret 1966 mengenai pengamanan 15 Menteri. Diktum Pernyataan ini berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

1. Mendukung sepenuhnya kebijaksanaan P.J.M. Presiden / Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. yang dituangkan dalam Pengumuman No. 5 tanggal 18 Maret 1966.
2. Memohon kepada P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/ Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. agar memperhatikan/memetjat tidak dengan hormat semua anggota² Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) termasuk bagian dan organisasinya dan oknum-oknum beserta organisasi³ yang ternjata terlibat/tersangkut dalam peristiwa kontra revolusi apa yang menamakan dirinya „Gerakan 30 September” dari semua Lembaga-lembaga Pemerintahan, baik ditingkat Pusat, Daerah maupun Perwakilan² Republik Indonesia diluar negeri.
3. Memohon kepada P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/ Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. untuk segera menjusun satu Kabinet Baru, bersih dari oknum-oknum apa yang menamakan dirinya „Gerakan 30 Setember” dan simpatisan²nja sesuai dengan kehendak Rakjat dan selaras dengan tingkatan Revolusi sekarang ini.

Perlu ditambahkan bahwa 15 Menteri tersebut bukan seluruhnya ditahan karena alasan² terlibat „G-30S”/P.K.I. melainkan ada diantaranya yang untuk kepentingan keamanan pribadi Menteri yang bersangkutan berhubung tuduhan yang dilantarkan oleh aksi² massa dirinya. Akan tetapi kemudian ternjata bahwa diantara Menteri² tersebut ada yang dibebaskan, a.l. Major Djenderal Dr. Sumarno Sastroatmodjo.

F. PERNJATAAN PENDAPAT D.P.R.-G.R. MENGENAI INDONESIA AKTIF KEMBALI DALAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA.

Pada tanggal 13 Agustus 1966 Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong mengeluarkan sebuah Resolusi tentang „Ikut Aktif kembalinja Indonesia dalam kegiatan² Perserikatan Bangsa-bangsa”.

Resolusi tersebut didasarkan kepada Nota I/MPRS/1966 jang pada angka 14 (a) menjebut sebagai berikut :

„Bertolak dari kepentingan Nasional Indonesia, selajaknja segera ikut aktif mengambil bagian dalam kegiatan² badan Internasional, harus meningkatkan perjuangan untuk mengadakan perombakan dalam tubuh P.B.B. baik struktural ataupun komposisi² untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman.” Selandjutnja angka 14 (b) menjebutkan : „Dengan ikut-aktif kembalinja Indonesia didalam badan Internasional itu, perjuangan perombakan tersebut akan lebih efektif”.

Usul Resolusi ini sebenarnya telah ditjetuskan oleh M. Tho²ha Ma'rif dan kawan-kawanja sebelum dimulainja Sidang Umum ke-IV/MPRS/1966 dengan harapan akan dapat mempengaruhi Keputusan-keputusan/Ketetapan² jang akan diambil oleh Sidang M.P.R.S. mengenai badan-badan Internasional, akan tetapi pembitjaraan mengenai Usul Resolusi ini belum dapat diselesaikan mendjelang Sidang Umum ke-IV/MPRS/1966.

Setelah dalam Usul Resolusi itu diadakan sedikit perobahan/penambahan untuk menjesuaikannja dengan hasil-hasil Sidang Umum ke-IV/MPRS/1966, maka Usul Resolusi tersebut dibawa kedalam rapat Pleno DPR-GR pada tanggal 13 Agustus 1966.

Pada waktu itu telah berbitjara atas nama wakil-wakil dari masing² golongan, jaitu Zain Al Habsji (dari golongan Islam), Sutarto Hadisudibjo (dari golongan Kristen Katholik), Major Udara Suhartono (dari golongan Karya), Steven Lattuihamallo (dari golongan Nasional). Arudji Kartawinata (dari golongan Islam), Prof. Seno Adji SH (dari Pemerintah), dan M. Tho²ha Ma'rif (wakil para pengusul), maka lahirlah Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong No. 36/DPR-GR/IV/65-66, jang diktumnja berbunji sbb. :

Mendesak kepada Pemerintah agar :

1. Republik Indonesia aktif kembali dalam kegiatan di P.B.B. sebelum Sidang ke-XXI Madjelis Umum P.B.B. tahun ini.
 2. Republik Indonesia dengan giat melakukan usaha-usaha perbaikan P.B.B. dari dalam terutama mengenai piagamnja.
- Dalam Pidato Kenegaraan tanggal 17 Agustus 1966 jang berjudul. Djangan sekali-kali meninggalkan Sedjarah,” (Djas

Merah) Presiden Sukarno lebih menekankan diselenggarakannya Conefo lebih dahulu, baru mempersoalkan aktifnya kembali Indonesia di P.B.B.

Meskipun soal kembalinja R.I. kedalam P.B.B. sudah lepas dari D.P.R.-G.R. dengan telah dikeluarkannya Resolusi D.P.R.-G.R. (Keputusan No. 36/DPR-GR/IV/1965-1966), akan tetapi Ketua Presidium Kabinet Ampera untuk bahan bermusjawarah dengan Kepala Executif/Presiden, telah minta kepada D.P.R.-G.R. agar dipersendjatai. Sendjata yang dimaksud, ialah agar D.P.R.-G.R. mengirimkan lagi Resolusi tersebut beserta surat pengantar dan pendjelasan² setjukupnja kepada Presiden. Dalam hal ini diterangkan oleh Ketua Presidium, bahwa djalan yang ditempuhnja setjara demikian pernah mendapat sukses jaitu mengenai masaalah persetudjuan Bangkok, dalam rangka memulihkan kembali hubungan baik antara Indonesia Malaysia.

Djalan yang ditempuh oleh DPR-GR sesuai dengan pendapat Ketua Presidium, ialah : Resolusi D.P.R.-G.R. tsb. diatas ditambah dengan pendjelasan setjukupnja, dijadikan bahan oleh Ketua Presidium untuk berkonsultasi dengan Kepala Executif/Presiden. Akhirnya didapatlah penjelesaian yang baik, jaitu dalam wujud Nota Presiden kepada L.N. Palar, Duber R.I. di U.S.A. dan perintah kepada Presidium Kabinet tentang pengiriman Delegasi R.I. ke Sidang Umum P.B.B.

7. S E K E R T A R I A T.

Sekretariat D.P.R.-G.R. masih tetap seperti organisasi sekretariat yang lama. Hanya seorang diantara pedjabat teras, pegawai tinggi yang diperbantukan kepada Pimpinan DPR-GR, jaitu RUSLI SH Pegawai Utama Madya, yang dulu pernah mendjabat Sekretaris Djenderal sedjak tahun 1955 (D.P.R. hasil pemilu) s/d tahun 1961 (D.P.R.-G.R.), atas permintaan sendiri dengan Keputusan Presiden No. 26/PENS. Tahun 1966, diperhentikan dengan hormat dari djabatan Negeri dengan hak mendapat pensiun mulai achir bulan Djuli 1966.

Selandjutnja perlu dikemukakan bahwa diantara pegawai² Sekretariat D.P.R.-G.R. ada yang dinonaktifkan karena terdapat indikasi terlibat langsung maupun tidak langsung dengan Ge-

rakan 30 September. Kemudian dalam rangka membersihkan tubuh Sekretariat D.P.R.-G.R. maka dengan Keputusan Pimpinan D.P.R.-G.R. No. 12/Pimp/I/65-66 tanggal 6 Nopember 1965 dibentuk „Team Penelitian Pegawai”. Berdasarkan hasil penelitian dan penertiban personil ini dari djumlah 418 Pegawai Sekretariat D.P.R.-G.R. telah diberhentikan tidak dengan hormat dari djabatannja sebanyak 24 pegawai dan 2 pegawai dipensiun. Satu diantara pegawai jang diberhentikan tidak dengan hormat ialah Islan jang diberhentikan dari djabatan Wakil Sekertaris Umum dan dari djabatan pegawai negerinja sekaligus. Dari sedjak ini, 22 Oktober 1966, djabatan Wakil Sekertaris Umum mendjadi kosong sampai terbentuknja Organisasi Sekretariat berdasarkan Keputusan Pimpinan D.P.R.-G.R. No. 22/Pimp/IV/68-60 dan No. 23/Pimp/IV/68-69, keduanja tertanggal 19 Mei 1969. Hal ini akan diuraikan lebih landjut dalam periode „D.P.R.-G.R. zaman Orde Baru”.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DALAM ZAMAN „ORDE BARU”

§ 1. PEMBENTUKAN.

Dengan silamnja zaman Orde Lama maka dimulailah zaman Orde Baru. Orde Baru tersebut dilihat dari pertumbuhannja adalah merupakan proses sosial jang menjangkut seluruh perikehidupan Rakjat, Bangsa dan Negara, jang mana tertjermin pula pada adanja kehendak untuk diadakannja perubahan² serta penjegaran terhadap tubuh serta tjara bekerdja D.P.R.

D.P.R. Orde Baru ini tetap disebut DPR-GR. Hal ini disebabkan karena tjara kerdja DPR-GR tetap dilandaskan kepada musjawarah dan mufakat, baik kedalam maupun keluar dengan fihak Pemerintah, sesuai dengan kepribadian rakjat Indonesia.

DPR-GR ini baik susunan maupun kedudukannja telah ditetapkan dengan UU No. 10/1966.

DPR-GR tersebut jang pada hakekatnja masih merupakan kelanjutan daripada DPR-GR Orde Lama, oleh karena didalamnja masih terdapat anggota² dari zaman Orde Lama, pada mulanja disusun berdasarkan Penpres No. 4/1960, jang susunnja terdiri dari wakil² golongan politik dan golongan karya, ditambah dengan seorang wakil dari Irian Barat.

Jang disebut golongan karya sebagian besar berafiliasi pada partai politik, sehingga praktis hampir semua anggota terdiri dari golongan politik.

Pd. Presiden Suharto jang pada tanggal 13 Pebruari 1968 telah melantik Dewan Perwakilan tersebut dalam pidato sambutannya a.l. mengemukakan, bahwa dengan terus berkembangnja masjarakat Indonesia maka muntjullah kekuatan² serta pola² fikiran baru terutama sedjak permulaan tahun 1966. Kekuatan² dan pola² fikiran baru ini ternyata mendapatkan hubungan dalam masjarakat dan telah mempunjai peranan jang besar dalam merintis, meletakan dasar² dan menegakkan perjuangan Orde Baru. Oleh karena itu - seperti jang ditegaskan dalam UU No. 10/1966, maka untuk mendapatkan DPR-GR sebagai "Lambang" Perwakilan Rakjat, djelas ada kebutuhan jang mendesak untuk menjegarkan DPR-GR dengan penambahan dan penggantian² anggota antar waktu.

Demikianlah a.l. latar-belakang terpokok, dasar² fikiran dan tudjuan penjegaran DPR-GR.

§ 2. KEANGGOTAAN.

Sebagai pangkal tolak pemikiran mengenai susunan dan jumlah keanggotaan MPRS dan DPR-GR, diambil sebagai prinsip "status quo" susunan dan jumlah keanggotaan MPRS-DPR-GR pada tanggal 20 Juni 1966. Pengisian lowongan anggota yang dinjatakan berhenti karena terlibat dalam petualangan kontra revolusi "G.30.S./P.K.I." tidak diadakan.

Sesuai dengan kehendak serta hasrat yang bersumber pada kekuatan serta pola pemikiran baru maka kemudian terhadap keanggotaan DPR-GR telah diadakan penjegaran setjara besar-an.

Untuk itu oleh Kepala Negara terlebih dulu diadakan konsultasi dan musjawarah baik dengan Pimpinan DPR-GR maupun Pimpinan Parpol², organisasi massa, organisasi Karya dan kesatuan aksi.

Pelaksanaan penjegaran termaksud dilakukan menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang² No. 10/1966, yaitu Pasal-pasal 3, 4 ayat (4), 12, 13, 15, dan 16.

Pasal 3 menjatakan :

„Anggota² MPRS dan DPR-GR yang pada waktu mulai berlakunya Undang² ini masih menjadi anggota, tetap menjadi anggota MPRS dan DPR-GR menurut Undang² ini sampai Madjelis Permusjawaratan Rakjat hasil pemilihan umum mulai menjalankan tugas serta wewenangnja dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 4, pasal 15 dan pasal 16”.

Pasal 4 ayat (4) menentukan :

”Susunan keanggotaan DPR-GR sebagai mana ditentukan dalam pasal 3 Undang² ini dapat ditambahkan sesuai dengan perkembangan yang terjadi didalam masyarakat”.

Mengenai ini Pendjelasan pasal 4 ayat (4) ini dilaksanakan atas dasar musjawarah antara Pimpinan DPR-GR dengan Pengemban Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. IX/MPRS/1966 dengan tidak mengurangi keseimbangan dalam DPR-GR sebagai pentjerminan dari kekuatan-kekuatan dalam masyarakat”.

Pasal 12 menjatakan :

”(1) Untuk dapat menjadi anggota MPRS/DPR-GR harus dipenuhi syarat² sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun

- serta bertaqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa.
- b. Tjakap menulis dan membatja huruf latin.
 - c. Setia kepada Pantjasila sebagai dasar ideologi Negara. kepada Undang² Dasar 1945 dan kepada perdjjuangan Revolusi Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakjat.
 - d. Tidak terlibat baik langsung maupun tak langsung, dalam gerakan² kontra Revolusi, G.30.S./PKI dan atau organisasi² terlarang/terbubar lainnja.
 - e. Tidak sedang ditjabut hak pilihnja berdasarkan keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi.
 - f. Tidak sedang mendjalani hukuman pendjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi tindak pidana jang dikenakan hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun.
 - g. Tidak terganggu djiwa-ingatannja.

(2) Semua anggota MPRS dan DPR-GR harus njata² bertempat tinggal didalam wilajah Republik Indonesia.

Pasal 13 menentukan prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota² MPRS/DPR-GR dengan melalui tingkatan² sebagai berikut :

1. Partai/organisasi/instansi jang menetapkan.
2. Pimpinan MPRS/DPR-GR atas dasar pentjalonan tersebut memintakan pengesahan dari Presiden.
3. Pengesahan oleh Presiden.

Adapun mengenai pelaksanaannja berdasarkan hak jang diberikan kepadanya, parpol, masa organisasi atau instansi jang bersangkutan dapat menetapkan, siapa jang akan diganti atau harus menggantikan seseorang (djika misalnja meninggal dunia).

Kemudian daftar tjalon tersebut disampaikan kepada Presiden, jang berdasarkan hak prerogatif jang ada padanja, mengesahkan pentjalonan termaksud.

Setelah disahkan oleh Presiden, sesuai dengan bunji pasal 10 ayat (2) sebelum memangku djabatannja anggota DPR-GR diambil sumpah/djandjinja menurut agama masing² oleh Ketua DPR GR atau anggota Pimpinan lainnja.

Pasal 15 menjatakan :

"Anggota" MPRS/DPR-GR dapat diganti menurut ketentuan² sebagai berikut :

- a. Anggota dari Golongan Politik dapat diganti atas permintaan partai yang bersangkutan.
- b. Anggota dari Golongan Karya yang organisasinya berafiliasi dengan satu partai politik dapat digantikan oleh organisasi karya yang bersangkutan dengan persetujuan induk partainya.
- c. Anggota Golongan Karya yang organisasinya tidak berafiliasi dengan sesuatu partai politik dapat diganti atas permintaan organisasinya atau instansi yang bersangkutan.
- d. Utusan daerah dalam MPRS oleh DPRD dapat diganti atas organisasinya atau instansinya yang bersangkutan.

Pasal 16 berbunyi :

- " Seorang anggota berhenti antara waktu sebagai anggota MPRS/DPR-GR karena :
- a. Meninggal dunia :
 - b. Atas permintaan sendiri setjara tertulis kepada pimpinan MPRS/DPR-GR.
 - c. Diganti menurut pasal 15.
 - d. Dinjatakan melanggar sumpah/djandji sebagai anggota MPRS/DPR-GR dengan keputusan MPRS/DPR-GR.
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat² menurut ketentuan dalam pasal 12 berdasarkan keterangan yang berwajib.
 - f. Terkena larangan perangkapan jabatan menurut pasal 19."

Seperti diuraikan dalam Bab VII terdahulu maka jumlah anggota DPR-GR pada tanggal 19 Nopember 1966 adalah 242 orang.

Berdasarkan ketentuan² Undang² No. 10/1966 kemudian diadakan perubahan² sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Pada waktu Undang² No.10/1966 mulai berlaku diadakan penjejaran yang pertama terhadap tubuh DPR-GR.

Berdasarkan Kep. Pres. No. 7,1967 tanggal 21 - 1 - 1967 diadakan tambahan sebanyak 108 orang anggota, terdiri dari golongan Politik 45 dan Golongan Karya 63 orang, hingga jumlah seluruhnya menjadi $242 + 45 + 63 = 350$ orang. Dalam jumlah ini termasuk pula anggota Djawoto, yang kemudian dianggap berhenti tidak dengan hormat.

Selanjutnya dengan Kep. Pres. No. 57 dan 58/1968 diadakan penjegaran jang kedua. Dalam penjegaran kedua ini diadakan penggantian serta tambahan hingga djumlah seluruh anggota mendjadi 414 orang.

Sebagai tjatatan dijelaskan disini bahwa penggantian keanggotaan antar waktu atau pengisian lowongan berdasarkan pasal 16 Undang² No. 10/1966 tetap dimungkinkan, tetapi dengan tidak merobah djumlah keanggotaan termaksud diatas.

Perlu dikemukakan bahwa setelah dilaksanakan penjegaran jang kedua djumlah anggota pada waktu itu setjara riil bukan 414 melainkan 404 orang. Hal ini disebabkan karena :

- a. 9 anggota wakil dari Partai Politik PERTI sementara dibekukan kegiatan² nya dalam DPR-GR.
- b. 1 orang menolak. (Dra. Nj. Yetty Noor).

Mengenai beberapa masalah jang menjangkut kedudukan keanggotaan serta keadaan beberapa Partai Politik jang mempunyai wakil dalam DPR-GR dapat dikemukakan hal² sbb. :

1. Mengenai Partai Islam PERTI.

Berdasarkan Kep. Pres. No. 156/1960 PERTI mempunyai 2 orang anggota dalam DPR-GR.

Pada penjegaran pertama berdasarkan Kep. Pres. No. 7/1967 keanggotaan PERTI ditambah 4 orang hingga mendjadi 6 orang.

Ketika diadakan penjegaran kedua PERTI mendapat tambahan sebanjak 3 orang, hingga djumlah anggota seluruhnya mendjadi 9 orang.

Kemudian timbul masalah tentang recalling anggota² PERTI dalam DPR-GR. •

Recalling tersebut tidak dapat dilaksanakan berhubung terpetjahnja organisasi PERTI mendjadi tiga. Dengan demikian penggantian keanggotaan Partai tersebut mengalami kesulitan.

Berhubung dengan itu agar tidak mengganggu pelaksanaan penjegaran keanggotaan DPR-GR jang waktu itu tengah dilaksanakan maka disarankan oleh Pedjabat Presiden agar Pimpinan DPR-GR membekukan untuk sementara keanggotaan DPR-GR Partai Islam PERTI sampai masalah recalling para anggota-nya dalam DPR-GR itu dapat diselesaikan sebaik-baiknya.

Dalam Pimpinan DPR-GR dengan keputusannya No. 31/Pimp/III/67 telah menetapkan untuk membekukan sementara waktu keanggotaan dari wakil² PERTI dalam DPR-GR.

Setelah pembekuan berdjalan beberapa waktu kemudian pimpinan PERTI dengan suratnja tertanggal 19 - 12 - 1968 jang di-tudjukan kepada Presiden melaporkan, bahwa pimpinan PERTI telah utuh kembali.

Dengan utuhnja kembali pimpinan PERTI dengan keputusan Presiden No. 60/M/69 kemudian ditetapkan terhadap ke-9 anggota Partai dari 36 tjalon.

Dalam hubungan ini Pimpinan DPR-GR berdasarkan keputusannja No. 25/Pimp/IV/68-69 mentjabut kembali pembekuan terhadap PERTI, hingga dengan demikian Partai tersebut dianggap aktif kembali dalam DPR-GR.

2. Mengenai Partai Indonesia (PARTINDO).

Pada mulanja berdasarkan Kep. Pres. No. 156/1960 PARTINDO mempunjai seorang wakil dalam DPR-GR. Kemudian dengan Kep. Pres. No. 37 A dan No. 38/1966 anggotanja di-tambah dengan satu orang hingga djumlahnja mendjadi orang. Seorang diantaranja jaitu Asmara Hadi telah diangkat mendjadi Wakil Ketua DPR-GR

Tetapi berhubung dengan keadaan serta perkembangan politik pada waktu itu Panglima Daerah Militer V/Djaya selaku Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah Djakarta Raya, dengan Keputusannja No. 142/6/67 telah melarang anggota PARTINDO serta organisasi massa jang berlingdung dan bernaung dibawahnja untuk mengikuti aktivitas persidangan² baik DPR-GR maupun MPRS. Mereka dilarang pula untuk memasuki ruangan/tempat/gedung jang dipergunakan oleh MPRS dalam melaksanakan sidangnja baik operatif maupun administratif.

Achirnja berdasarkan Kep. Pres. No. 57/1968, dalam rangka penjegaran kedua DPR-GR, kedua anggota PARTINDO tersebut diatas diberhentikan dengan hormat,

Kedua wakil Partindo tidak diganti maka hingga sekarang Partai tersebut tidak mempunjai wakil dalam DPR-GR.

3. Mengenai PARTAI MUSLIMIN NIDONESIA.

Partai Muslimin Indonesia, adalah suatu Partai baru jang merupakan penggabungan dari pada 9 organisasi² masjara-kat Islam jang belum tergabung dalam suatu Partai Politik ialah :

- a. Muhammadiyah.
- b. Al Djamiatul Waslijah.
- c. Gasbiindo.
- d. Persatuan Islam.
- e. Nahdlatul Wathan.
- f. Mathalaul Anwar.
- g. S.N.I.I.
- h. K.B.I.M. (Kesatuan Buruh Indonesia Muslimin).
- i. P.U.I. (Persatuan Ummat Islam).

Berhubung dengan berdirinja Partai Muslimin Indonesia Pedjabat Presiden dalam pidato sambutanja pada upatjara pelantikan anggota baru DPR-GR tanggal 13 Pebruari 1968 a.l. menjatakan, bahwa Pemerintah dapat menjambut dengan baik keinginan organisasi² Islam untuk menggabungkan diri dalam dan membentuk satu organisasi Partai ialah Partai Muslimin Indonesia.

Sambutan baik dari pada Pemerintah tersebut kemudiar diperkuat dengan dikeluarkannja Kep. Pres. No. 70/1968 tanggal 20 Pebruari 1968 tentang pengakuan berdirinja Partai Muslimin Indonesia.

Pada penjegaran tahap kedua jang dilaksanakan dengan Kep. Pres. No. 57/1968 dan No. 58/1968 kepada Partai Muslimin diberikan 18 kursi dalam DPR-GR.

4. Mengenai Partai Politik MURBA.

Pada mulanja Partai MURBA mempunyai 2 orang wakil dalam DPR-GR.

Tetapi dalam rangka diadakannja konfrontasi terhadap Malaysia, dengan mengingat situasi serta keadaan politik ditanah air pada waktu itu oleh Pemerintah dikeluarkan Kep. Pres./Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata R.I./Komando Operasi Tertinggi No. 1/KOTI/1965 tentang larangan bagi Partai Politik MURBA untuk melakukan kegiatan apapun dibidang politik.

Kep. Pres. No. 1 tersebut diatas kemudian disusul dengan Kep. Pres No. 21/1965 tentang pembekuan untuk sementara waktu keanggotaan Partai MURBA dalam DPR-GR dan Kep. Pres./Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Komando Operasi Tertinggi No. 291/1965 tentang dibubarkannja Partai MURBA diseluruh Indonesia

Tetapi sesuai dengan perkembangan serta perubahannya iklim politik di Indonesia pada waktu² berikutnya, maka berdasarkan pertimbangan bahwa akan lebih bermanpa'at bagi Negara bila Partai MURBA diberi kesempatan kembali untuk turut serta menjumbangkan kerdjasamanja kepada Pemerintah R.I., dengan Kep. Pres. No. 223/1966 Partai MURBA direhabilitir kembali. Sesuai dengan itu kepada Partai MURBA diberikan hak untuk melakukan kegiatannya. Kemudian dengan Kep. Pres. No. 7/1967 Partai MURBA mendapatkan 4 kursi dalam DPR-GR.

Dalam perintjian mengenai susunan keanggotaan menurut pengelompokan dalam Fraksi setelah diadakan penjegaran adalah sebagai berikut :

1. P.N.I.	=	78 orang.	
2. N.U.	=	75 orang.	
3. Parkindo	=	17 orang.	
4. Partai Katholik	=	15 orang.	
5. P.S.I.I.	=	20 orang.	
6. I.P.-K.I.	=	11 orang.	
7. Perti	=	9 orang.	
8. Murba	=	4 orang.	
9. Partai Muslimin	=	18 orang.	
10. A.B.R.I.	=	75 orang.	
			(AD 29 orang)
			(AL 14 orang)
			(AU 14 orang)
			(AK 14 orang)
11. Fraksi Karya Pem- angunan A	=	32 orang.	
12. Fraksi Karya Pem- angunan B	=	32 orang.	
13. Fraksi Karya Pem- angunan C	=	28 orang.	
			(Hansip Hanra = 2 orang)
			(Veteran = 2 orang)

Djadi seluruhnja berdjumlah = 414 orang.

3. Pimpinan.

Pimpinan DPR-GR diatur dalam pasal 8 ayat (2) dan pasal 9 ayat (1) dan pasal 11.

Pasal 7 menjatakan :

- (1) Pimpinan MPRS dan DPR-GR masing² terdiri atas seorang Ketua dan 4 orang Wakil Ketua, jang merupakan kesatuan Pimpinan.
- (2) Ketua dan para Wakil Ketua M.P.R.S. demikian djuga Ketua dan para Wakil Ketua DPR-GR dipilih oleh dan dari anggota badan² jang bersangkutan dalam rapat paripurna dari masing² badan jang bersangkutan itu.

Pasal 8 (2) :

Pimpinan DPR-GR terdiri atas 3 orang dari Golongan Politik dan 2 orang dari Golongan Karya.

Bersandar pada ketentuan ini maka Pimpinan DPR-GR pada periode ini terdiri dari 5 orang jang masing² mewakili golongan, jaitu :

a. Golongan Politik :

- H.A. Sjaichu, Ketua (Golongan Islam),
- Mh. Isnaeni, Wakil Ketua (Golongan Nasionalis),

b. Golongan Karya :

- Dr. Sjarif Thajeb, Wakil Ketua (Golongan Karya ABRI),
- Drs. B. Mang Reng Say, Wakil Ketua (Golongan Kristen-Katholik),
- Sulistio S.H., Wakil Ketua (Golongan Karya Pembangunan).

Ketentuan lain mengenai Pimpinan DPR-GR adalah sebagaimana termuat dalam pasal 9 ayat (1), jang berbunyi :

"Sebelum memangku djabatannja, anggota² Pimpinan MPRS/DPR-GR diambil sumpah/djandjinja menurut agama masing² oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat Paripurna terbuka MPRS/DPR-GR".

Selain dari itu pasal 11 menentukan :

"Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota MPRS/DPR-GR jang pada waktu mulai berlakunja Undang² ini telah diambil sumpah/djandjinja menurut ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 dan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 dianggap telah mengangkat sumpah/djandji menurut ketentuan Undang² ini".

Tugas dan kewadajiban daripada Pimpinan DPR-GR adalah

sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Tata-Tertib DPR-GR (Keputusan DPR-GR No. 10/DPR-GR III 67-68).

Dalam rangka penjejaran DPR-GR timbul masalah berhubungan :

- a. Adanja surat dari Laksda Mursalin D.M. mengenai pengunduran dirinya sebagai Wk. Ketua DPR-GR.
- b. Beberapa fraksi dalam DPR-GR berpendapat, bahwa struktur Pimpinan DPR-GR masih berdasarkan Peraturan Tata-Tertib lama yang sudah dinjatakan tidak berlaku lagi dan karena itu komposisinya perlu disesuaikan dengan Peraturan Tata-Tertib yang baru.
- a. Terhadap surat pengunduran diri Laksda Mursalin D.M., Pimpinan DPR-GR tidak dapat mengambil keputusan. Akan tetapi dengan ditunduknja Laksda Mursalin D.M. menjadi Menteri Tanaga Kerdja dalm Kabinet Pembangunan (Kep. Pres. No. 183 (1968) maka djatah Wakil Ketua D.P.R. G.R. menjadi lowong.
- b. Hasrat tersebut kemudian atas prakarsa Nj. Dra. Zubaedah Muchtar dkk. ditjetuskan dalam suatu bentuk Usul Resolusi tentang penjejaran DPR-GR.

Pada pokoknja Usul Resolusi tersebut mendesak kepada Pimpinan dan Panitia Musjawarah DPR-GR agar dalam waktu se singkat²nja menjelenggarakan "penjejaran" Pimpinan dengan djalan mengadakan pemilihan Pimpinan jg. baru, sebagai langkah penjejaran badan legislatif (DPR-GR) setjara keseluruhan.

Usul Resolusi tersebut ditanda-tangani oleh 22 orang anggota dari pelbagai Fraksi.

Untuk membuat landasan formil tentang penggantian Pimpinan dibentuklah sebuah Panitia yang disebut Panitia Khusus Penjempurnaan Bab III Peraturan Tata-tertib, dan anggota²nja terdiri dari Wakil-wakil semua Fraksi dalam DPR-GR. Panitia termaksud diberi tugas untuk meninjau kembali Bab III tersebut hingga dimungkinkan mutasi Pimpinan DPR-GR.

Tetapi Panitia Khusus itu mengalami kematjetan, hingga belum dapat menghasilkan apa yang diharapkan.

Dalam pada itu Sulistio S.H. diusulkan oleh Golongan Karya untuk mengisi lowongan; pengusulan ini mendapat sokongan dari beberapa golongan politik dalam DPR-GR.

Tetapi disamping itu beberapa golongan politik dalam DPR-

GR lainnja (IP-KI, P.S.I.I. dan Partai Muslimin) berpendapat bahwa merekapun mempunyai hak untuk mendudukan wakilnja pada kursi Pimpinan.

Persoalannja kemudian dibahas dalam beberapa kali rapat pleno. kemudian diputuskan membawanja kedalam forum jang lebih ketjil guna memudahkan mentjari pemetjahannja, jakni persoalannja akan dibawa kedalam Panitia Musjawarah DPR-GR.

Dalam rapat Panitia Musjawarah jang bersangkutan disamping mengenai masaalah penjegaran Pimpinan pula antara lain telah dibahas usul Pimpinan mengenai persoalan lowongan tersebut jang semuanja terdiri dari 4 pokok, jaitu :

1. Lowongan diisi dulu oleh tjalon Karya Pembangunan.
2. Dibentuk Panitia Khusus jang membitjarakan Bab III Tata-tertib DPR-GR.
3. Surat Saudara Laksamana Muda Mursalin diumumkan kembali, dengan tjatatan Fraksi P.S.I.I. dan I.P.K.I. mengusulkan agar isinja dibtjarakan dalam rapat pleno.
4. Apabila tanggal 20 Agustus 1968 tidak terdapat konsensus, maka pelaksanaan pengisiannja otomatis diisi oleh Fraksi Golongan Karya Pembangunan sesuai dengan tjalon jang telah diadjukan.

Usul pimpinan tersebut disetudjui oleh Fraksi N.U., P.N.I., Parkindo, Katholik, I.P.K.I., ABRI, Karya Pembangunan A, Karya Pembangunan B dan Karya Pembangunan C.

Usul tersebut telah dapat disetudjui oleh pleno, ketjuali P.S.I.I. dan Partai Muslimin.

Dengan demikian maka Sulistio S.H. terpilih mendjadi Wakil Ketua menggantikan Laksamana Muda Laut Mursalin D.M.

§. 3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG.

A. Kedudukan, tugas dan wewenang.

Undang² No. 1 tahun 1966 antara lain telah menetapkan bahwa sesuai dengan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XIX/MPRS/1966 dan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. X/MPRS/1966, dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang² Dasar 1945, kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang diatur dengan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 perlu ditinjau kembali dan diatur dengan Undang².

Tentang kedudukan DPR-GR adalah sebagai mana diatur dalam Pasal 1 (2) (Ketentuan Umum) Undang² No. 10/1966 yang menentukan :

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang diatur berdasarkan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 dalam Undang² ini tetap diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong selanjutnya disingkat DPR-GR, menjalankan tugas dan wewenangnja sesuai dengan Undang² Dasar 1945 sampai Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum yang akan datang.

Kedudukan, tugas dan wewenang DPR-GR lebih lanjut diatur dan ditetapkan dalam Pasal 1 Peraturan Tata-tertib (Keputusan DPR-GR No. 10/DPR-GR/III/67-68) yang menentukan :

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong adalah Lembaga Negara yang bertanggung-djawab dan berwenang untuk menjalankan tugas² utama sebagai berikut :
 - a. ber-sama² dengan Pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang² Dasar 1945 beserta penjelasannya.
 - b. ber-sama² dengan Pemerintah membentuk Undang² sesuai dengan pasal 5 ayat (1), Pasal-pasal 20, 21 ayat (1), 22 Undang² Dasar 1945 beserta penjelasannya.
 - c. melakukan pengawasan atas tindakan² Pemerintah sesuai dengan Undang² Dasar 1945 dan penjelasannya, khususnya penjelasan Bab VII.
- (2) Pelaksanaan tersebut dalam pasal 1 ayat (1) diatas diatur dalam Bab VI, VIII dan IX Peraturan Tata-Tertib ini. Ini adalah tugas² pokok daripada DPR-GR.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Undang² Dasar 1945 DPR-GR mempunyai hak² tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang² No. 10/1966, dan pada hakekatnja sama dengan apa yang diuraikan dalam bagian terdahulu mengenai fungsi daripada DPR-GR.

Dalam pada itu anggota DPR-GR masih tetap mempunyai hak kekebalan (imunitet), yang diatur dalam pasal 20 Undang² No. 10/1966.

Selain dari itu terhadap anggota DPR-GR masih berlaku pula forum privilegium, artinya terhadap mereka dikenakan pera-

turan khusus mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penjitaan dan penuntutan (Pasal 21).

Anggota DPR-GR tidak diperkenankan merangkap djabatan² sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Undang² No.10/1966.

Selanjutnja kepada Pimpinan dan para anggota DPR-GR diberi pula kedudukan protokoler dan keuangan jang pengaturannja dilaksanakan bersama antara Femerintah dan DPR-GR (Pasal 22). Dalam pada itu untuk memungkinkan para anggota DPR-GR melaksanakan tugas dan wewenangnja setjara leluasa kepada mereka diberikan fasilitas² tertentu, misalnja sadja dalam rangka pelaksanaan tugasnja mereka dapat mempergunakan sebagai alat pengangkutan kereta api, kapal terbang, kapal laut atas biaja negara.

Mengenai hal ini setjara lebih djelas dapat dilihat pada bagian Kedudukan Keuangan Anggota DPR-GR seperti tertera dibawah ini.

B. Kedudukan Keuangan.

Mengenai Kedudukan Keuangan DPR-GR sebagian telah dijelaskan dibagian terdahulu daripada buku ini.

Selanjutnja ketentuan² tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR-GR sesuai dengan P.P. No.209/1961, setelah ber-kali² diubah/ditambah terachir dengan P.P. 23/1969 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 411/4/6/1969 tanggal 16-6-1969 adalah diatur sebagai berikut :

1. Gadji/Gadji Kehormatan.

Ketua : Rp. 17.500,—

Wakil Ketua : Rp. 15.000,—

Anggota : Rp. 10 000,—

Diatas gadji kehormatan tersebut diberikan :

tundjangan menurut PGPS bagi pegawai² Golongan II keatas.

Dalam P.P. No. 209/1961 pasal 3 terdapat ketentuan :

Dalam waktu sidang :

Dalam waktu sidang :

- a. Anggota jang dalam satu bulan menghadiri setengah atau lebih dari djumlah rapat² DPR jang seharusnya dihadirinja, mendapat penghasilan penuh.

- b. Anggota yang satu bulan menghadiri kurang dari setengah dari jumlah semua rapat² DPR yang seharusnya dihadapinya.
- c. Anggota yang dalam satu bulan tidak menghadiri sama sekali rapat² DPR yang seharusnya dihadapinya tidak dapat penghasilan tersebut.

Dalam waktu reses.

Selama reses dibajarkan penghasilan penuh, ketjuali kepada anggota yang dalam waktu 30 hari sebelum reses, tidak menghadiri sama sekali rapat² yang seharusnya dihadapinya (lihat sub c diatas).

Ketentuan² tersebut diatas tidak berlaku, apabila tidak hadirnya itu disebabkan karena :

- a. Sakit yang harus dibuktikan dengan surat Keterangan Dokter kalau lebih dari 2 hari.
- b. Melakukan tugas Negara.
- c. Melakukan tugas DPR-GR.
- d. Hal² lain yang disetujui oleh Panitia Rumah Tangga (kemudian oleh Pimpinan DPR-GR).

2. Tundjangan kehormatan.

Disamping Gadjih Kehormatan diatas diberikan juga Tundjangan Kehormatan sebagai berikut :

Ketua Bagian/Komisi/Panitia Tetap/Panitia Khusus Rp. 2.000,— sebulan

Wakil Ketua Bagian/Komisi/Panitia Tetap/Panitia Khusus Rp. 1.500,— sebulan.

Anggota Bagian/Komisi/Panitia Tetap/Panitia Khusus Rp. 1.000,— sebulan.

(lihat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 411/MK/4/6/1969).

Perangkapan djabatatan tidak membawa akibat perangkapan tundjungan kehormatan.

3 Paket Harian.

Tentang Paket Harian dalam bagian terdahulu daripada buku ini dijelaskan bahwa mulai 1 April 1969 uang Paket Harian Anggota ditetapkan sebagai berikut :

Luar Djakarta - Rp. 1.200,— sehari.

Djakarta - Rp. 700,— sehari.

Selanjutnya sebagai tambahan mengenai Paket Harian berlaku ketentuan² seperti tertera dibawah ini :

- a. Apabila seorang anggota selama sidang/tidak hadir pada lebih dari 2 hari rapat ber-turut², maka untuk hari² jang lebih dari 2 hari rapat kepadanya tidak diberikan uang Paket Harian.
- b. Apabila ia selama sidang tidak sekalipun datang hadir pada hari rapat, ia tidak mendapat paket harian.

Ketentuan² tersebut diatas tidak berlaku, apabila tidak hadirnya itu disebabkan karena :

1. Sakit jang harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter kalau lebih dari 2 hari :
2. Melakukan tugas Negara.
3. Melakukan tugas DPR-GR.
4. Hal² lain jang disetujui oleh Pimpinan DPR-GR.
Kepada para anggota DPR-GR jang bertempat tinggal diluar Djakarta jang sudah tiba di Djakarta sebelum sidang dimulai, atau belum meninggalkan Djakarta setelah sidang berakhir, diberikan uang Paket Harian 2 hari sebelum sidang dimulai dan 2 hari sesudah sidang ditutup, ketjuali djika disebabkan karena tidak ada perhubungan ia terpaksa lebih lama tinggal di Djakarta, maka selama itu uang Paket Harian tetap diberikan.
5. Pada waktu reses semua anggota menerima uang Paket Harian sebanyak Rp. 600,— sehari.

4. Biaya perdjalananan.

Untuk perdjalananan dinas anggota DPR-GR mendapat penggantian biaya sesuai dengan ketentuan² jang berlaku menurut "Peraturan Perdjalananan Dinas" dengan memperhatikan uang harian tersebut dalam pasal 3 ayat (3) P.P. No. 209/1961 jang oleh Pimpinan DPR-GR ditetapkan sebesar uang Paket Harian jang diterima anggota DPR-GR jang bertempat tinggal di Djakarta (dahulu Rp. 400,— sekarang Rp. 700,—)

5. Tundjangan lain.

Tundjangan ketjelaakaan, kematian dan penggantian biaya pengobatan berlaku ketentuan² untuk pegawai negeri pada

umumnja, ditambah dengan fasilitas biaya pengangkutan djenazah djika meninggal bukan ditempat tinggalnja.

6. Fasilitas lain.

- a. Anggota DPR-GR jang untuk mengadakan hubungan dengan suatu tempat dalam wilayah R.I. mendapat penggantian biaya pengangkutan pulang pergi sekali setahun.
- b. Anggota DPR-GR jang bertempat tinggal diluar Djawa dalam waktu sidang dapat diberikan kesempatan pulang kedaerahnja dengan mendapat penggantian biaya pengangkutan pulang pergi, djika sidang telah ditetapkan akan berlangsung dua bulan atau lebih.
- c. Anggota DPR-GR jang sedang menghadiri sidang, djika isteri/suami, anak orang tua meninggal, dapat pulang kedaerahnja atas tanggungan Pemerintah (pulang-pergi) dan selama ia dalam perdjalan. dianggap memenuhi tugas kewadajiban anggota.
- d. Anggota DPR-GR pegawai negeri/daerah otonom dan ABRI jang menerima penghasilan kurang dari penghasilan anggota DPR-GR menerima tiap bulan selisih antara penghasilannja dan penghasilan anggota DPR-GR dengan potongan² untuk rapat² jang tidak dihadirinja .

§. 1. PERATURAN TATA-TERTIB DAN PELAKSANAAN- NJA.

A. Penjusunan.

Presiden Suharto didalam Amanatnja pada upatjara pelantikan para anggota baru DPR-GR pada tanggal 13 Pebruari 1968 antara lain pernah menjinggung bahwa untuk lebih mengefisiensikan dan meng-affektifkan pelaksanaan tugas serta hak² DPRR-GR, maka Peraturan Tata-tertib DPR-GR perlu dirobah. Perobahan peraturan Tata-tertib tersebut adalah sepenuhnya mendjadi wewenang DPR-GR sendiri.

Ini berarti bahwa Peraturan Tata-tertib (lama) jang disjahkan oleh DPR-GR pada tanggal 4 Djuni 1966 sebagai Keputusan DPR-GR No. 31/DPR-GR/IV/65-66, perlu disempurnakan sesuai dengan dasar pikiran ini dibentuklah sebuah Panitia Khusus Penjempurnaan Peraturan Tata-tertib DPR-GR jang diberi tugas untuk melaksanakan hal termaksud diatas.

Hasil karya daripada Panitia Khusus tersebut dalam rapat pleno DPR-GR tanggal 17 Pebruari 1968, setelah mendengar serta memperhatikan pendapat² dan pertimbangan yang diemukakan oleh para anggota DPR-GR, dapat diterima dan disahkan sebagai peraturan Tata-tertib baru.

Peraturan Tata-tertib ini terdiri dari 12 Bab.

1. BAB I Tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong.
2. BAB II : Tentang Pelaksanaan Hikmat Kebidjaksanaan Dalam Permusjawaratan/Perwakilan.
3. BAB III : Tentang Ketua dan Wakil-wakil Ketua.
4. BAB IV : Tentang Fraksi-fraksi.
5. BAB V : Tentang Badan-badan Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong.
6. BAB VI : Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara.
7. BAB VII : Tentang Hubungan Kerdja Dengan Badan Pemeriksa Keuangan.
8. BAB VIII : Tentang Pembentukan Undang-undang.
9. BAB IX : Tentang Hak dan Wewenang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong.
10. BAB X : Tentang Sidang dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong.
11. BAB XI : Tentang Surat-surat Masuk/Keluar.
12. BAB XII : Tentang Ketentuan-ketentuan Penutup.

Mengenai djumlah wakil Fraksi² yang duduk dalam Panitia Musjawarah DPR-GR diatur dalam pasal 20 ayat (3) sebagai berikut :

- a. Fraksi² yang beranggota s/d 10 orang mempunyai seorang wakil.
- b. Fraksi² yang beranggota 11 s/d 20 orang mempunyai 2 orang wakil.
- c. Fraksi² yang beranggota 21 s/d 30 orang mempunyai 3 orang wakil.
- d. Fraksi² yang beranggota 31 s/d 40 orang mempunyai 4 orang wakil.
- e. Fraksi² yang beranggota 41 s/d 50 orang mempunyai 5 orang wakil.

- f. Fraksi² jang beranggota 51 s/d 60 orang mempunjai 6 orang wakil.

Sedjak diadakannja penjegaran dalam DPR-GR terdapat 13 Fraksi, jakni :

1. Fraksi P.N.I.
2. Fraksi N.U.
3. Fraksi P.S.I.I.
4. Fraksi PARKINDO.
5. Fraksi KATOLIK.
6. Fraksi Partai Muslimin.
7. Fraksi I.P.K.I.
8. Fraksi PERTI.
9. Fraksi MURBA.
10. Fraksi ABRI.
11. Fraksi Karya Pembangunan (A).
12. Fraksi Karya Pembangunan (B).
13. Fraksi Karya Pembangunan (C).

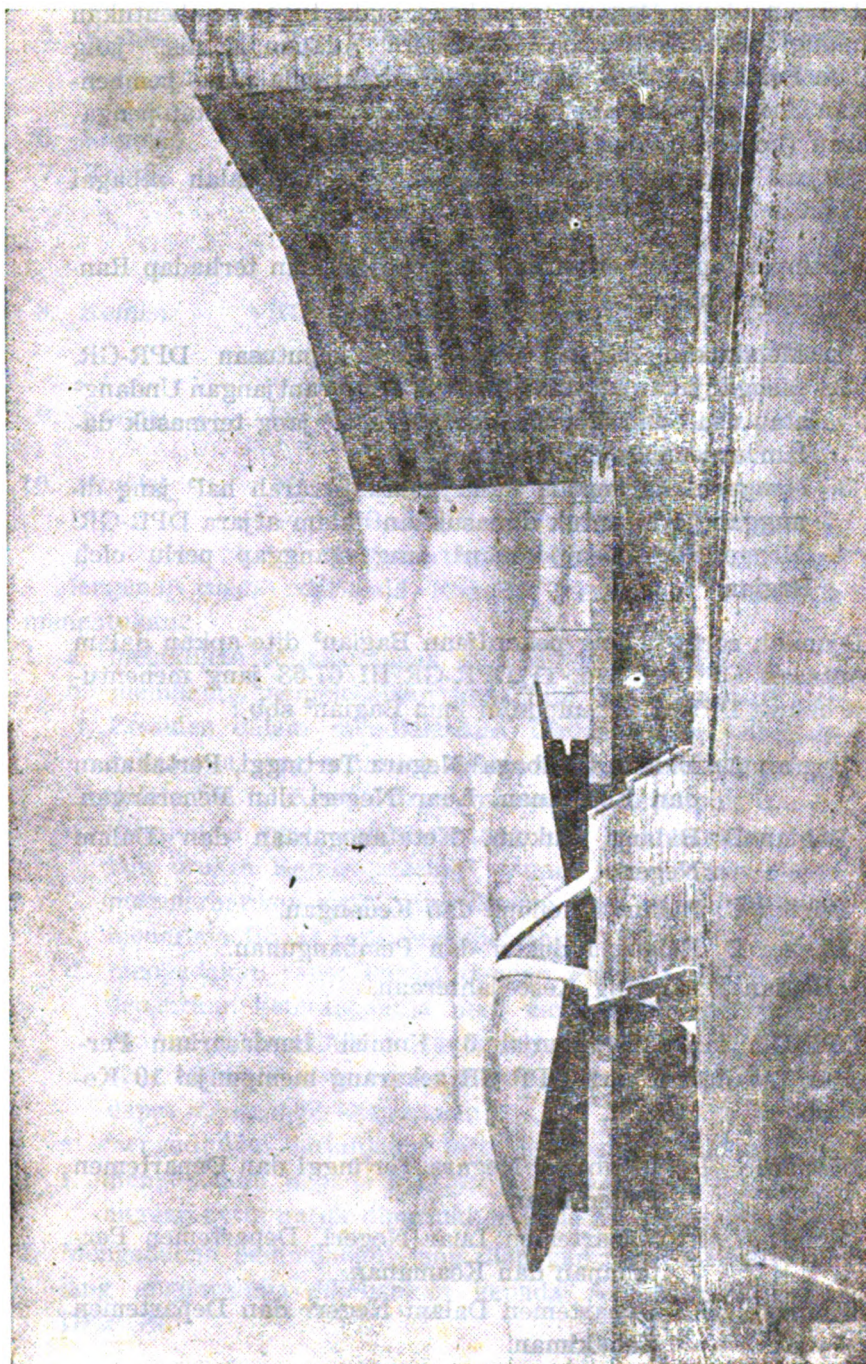
B. Djenis, djumlah Badan Kelengkapan.

Untuk melakukan tugasnja DPR-GR mempunjai Badan-badan Kelengkapan. Peraturan Tata-tertib baru tidak lagi menggunakan istilah disebut Badan Perlengkapan melainkan Badan-badan Kelengkapan. Djenis badan Kelengkapan² DPR-GR sekarang adalah sbb. : terdahulu

1. Panitia Musjawarah
2. Panitia Anggaran
3. Bagian
4. Komisi
5. Panitia Khusus
6. Panitia Rumah Tangga, dan
7. Sekretariat.

Mengenai tugas² daripada Panitia Musjawarah, Panitia Anggaran, Panitia Khusus dan Panitia Rumah Tangga pada hakekatnja tidak banjak berbeda dengan tugas² Badan Kelengkapan sebagaimana diuraikan dalam Bab III.

Dalam Peraturan Tata-tertib baru, ketentuan² tentang Komisi dimuat djuga ketentuan² tentang Badan Kelengkapan jang disebut Bagian²



Gedung MPR/DPR Republik Indonesia. Djalan Djendral Gatot Subroto — (mulai dipakai tgl. 1 Januari 1967)

Dengan adanya Bagian² termaksud, maka tugas pembentukan Undang² diserahkan kepada Bagian². Adapun Komisi² jang dalam Peraturan Tata-tertib lama disertai pula tugas pembentukan Undang², sekarang hanjalah bertugas mengadakan pengawasan (kontrol) atas tindakan² Pemerintah.

Setjara terperintji tugas daripada Bagian² adalah sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan perumusan dan penyelesaian terhadap Rantjangan Undang².
- b.
 1. Melakukan sesuatu tugas atas keputusan DPR-GR.
 2. Mengajukan kepada DPR-GR Usul² rantjangan Undang² atau usul² dan laporan² tentang soal² jang termasuk dalam urusan Bagian masing².
 3. Mengusulkan kepada Panitia Musjawarah hal² jang dianggap perlu untuk dimasukkan dalam atjara DPR-GR.
 4. Mengadakan penindjauan² jang dianggap perlu oleh Bagian.

Djumlah serta bidang pekerdjaan Bagian² dite'apkan dalam keputusan DPR-GR No. 11/DPR-GR/III/67-68 jang menentukan bahwa DPR-GR mempunyai lima Bagian² sbb :

1. Bagian A: Bidang Lembaga² Negara Tertinggi, Pertahanan dan Keamanan, Luar Negeri dan Penerangan.
2. Bagian B: Bidang Hukum, Keta'anegaraan dan Dalam Negeri.
3. Bagian C: Bidang Ekonomi dan Keuangan.
4. Bagian D: Bidang Industri dan Pembangunan.
5. Bagian E: Bidang Kesedjahteraan.

DPR-GR lama mempunyai 6 Komisi. Berdasarkan Peraturan Tata-tertib baru DPR-GR sekarang mempunyai 10 Komisi sbb :

1. Komisi I : Lembaga² Negara Tertinggi dan Departemen Penerangan.
2. Komisi II : Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan.
3. Komisi III : Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman.

- | | | |
|------------|--------|---|
| 4. Komisi | IV : | Departemen Perdagangan. |
| 5. Komisi | V : | Departemen Perkebunan, Departemen Pertanian dan Departemen Pertambangan. |
| 6. Komisi | VI : | Departemen Keuangan. |
| 7. Komisi | VII : | Departemen Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakjat, Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga. |
| 8. Komisi | VIII : | Departemen Maritim, Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum. |
| 9. Komisi | IX : | Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama. |
| 10. Komisi | X : | Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerdja, Departemen Urusan Transmigrasi, |

Mengenai tugas² daripada Komisi², Peraturan Tata-tertib menentukan :

1. a. melakukan sesuatu tugas atas keputusan DPR-GR.
- b. membantu menjelesaikan kesulitan² jang dihadapi oleh Presiden dalam mendjalankan Undang² dan kebidjaksanaannja, jang termasuk dalam urusan Komisi masing², dalam hal ini Komisi dapat mengambil kesimpulan.
- c. mendengar suara rakjat tentang hal² jang termasuk dalam urusan Komisi masing², antara lain dengan djalan memperhatikan surat² jang disampaikan kepada DPR-GR menerima fihak² jang berkepentingan.
- d. mengadakan rapat kerdja dengan Presiden untuk mendengarkan keterangannja atau mengadakan pertukaran fikiran tentang tindakan² jang sudah atau akan dilakukan oleh Menteri² jang bersangkutan, dalam hal ini Komisi dapat mengambil kesimpulan.
- e. mengajukan pertanyaan² tertulis kepada Presiden.
- f. mengusulkan kepada Panitia Musjawarah hal² jang dianggap perlu untuk dimasukkan kedalam atjara DPR-GR.
2. Mengadakan penindjauan² jang dianggap perlu oleh Komisi jang anggarannja dibebankan kepada Anggaran Belandja DPR-GR.

C. Tjara melaksanakan Musjawarah untuk Mufakat.

Tentang pelaksanaan hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/Perwakilan Bab II Pasal² 2, 3 dan 4 menjatakan hal² sebagai berikut :

Pasal 2

- (1). Hakekat daripada musjawarah untuk mufakat dalam kemurniannja adalah suatu tata-tjara chas jang bersumber pada inti faham Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakjat dengan djalan mengemukakan hikmat kebidjaksanaan jang tiada lain daripada pikiran (ratio) jang sehat jang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan Bangsa, kepentingan Rakjat sebagaimana jang menjadi tudjuan pembentukan Pemerintah negara termaksud dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1955, pengaruh² waktu, oleh semua Wakil/utusan jang mentjerminkan pendjelmaan seluruh rakjat, untuk mentjapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat jang ditikadkan untuk dilaksanakan setjara djudjur dan bertanggung djawab.
- (2). Musjawarah menudju kearah persatuan dengan mengutamakan ikut sertanja semua perwakilan/Fraksi di Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong serta berpangkal tolak pada harga menghargai pendirian masing² antara peserta.
- (3). Dida!am musjawarah para anggota mendapat kesempatan jang wadjar mengemukakan pendapat dan pikirannja dengan mengindahkan keselamatan negara dan Proklamasi 17 Agustus 1945, kepentingan rakjat, kepribadian bangsa kesusilaan dan pertanggungan djawab kepada Tuhan Jang Maha Esa serta menginsjafi akan kedudukannja sebagai pengemban dan pelaksana amanat penderitaan rakjat.

Pasal 3

- (1). Setelah dipandang tjukup diberikan kesempatan para anggota untuk mengemukakan pendapat dan saran serta setelah dipandang tjukup diterima sumbangan pendapat dan

pikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang di musjawarahkan, maka pimpinan mengusahakan agar musjawarah segera dapat mentjapai mufakat yang bidjaksana.

- (2). Untuk mentjapai apa yang dimaksud oleh ayat (1) pasal ini maka pimpinan ataupun panitia yang diberi tugas untuk itu, wadajib menjiapkan rantjangan keputusan yang men-tjerminkan pendapat² yang hidup dalam musjawarah.

Pasal 4

- (1). Apabila didalam sesuatu permusjawaratan diluar rapat Panitia Musjawarah dan Pleno Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong tidak mentjapai mufakat, maka musjawarah menjerahkan persoalan tersebut kepada Panitia Musjawarah untuk mengambil kebidjaksanaan menyelesaikan persoalan dengan baik.
- (2). Apabila dalam Panitia Musjawarah persoalan itu dapat dipetjahkan setjara mufakat, maka pemetjahan tersebut diberitahukan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong untuk dimaklumi.
- (3). Dalam hal Panitia Musjawarah tidak berhasil memperoleh pemetjahan setjara bulat dan mufakat maka persoalannya dibawa kerapat Pleno Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong untuk mendapat keputusan apakah persoalan itu:
 - a. ditiadakan atau
 - b. ditangguhkan pemitjaraannya atau
 - c. ditiadakan pemungutan suara.
- (4). a. Untuk mengadakan pemungutan suara diperlukan hadirnya unsur dari semua Fraksi. Apabila tidak semua Fraksi terwakili, maka diperlukan hadirnya dua pertiga dari djumlah anggota sidang Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.
 - b. Keputusan diambil dengan suara terbanyak jaitu lebih dari separoh dari quorum tersebut diatas.
 - c. Keputusan mengenai perorangan atau mengenai peng-andjuran seseorang, diadakan dengan pemungutan suara setjara rahasia dan tertulis.
- (5). Apabila pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan karena tidak dapat memenuhi syarat tersebut dalam ayat (4) huruf

a, maka persoalan tersebut dikembalikan kepada Panitia Musjawarah.

Dalam hal Panitia Musjawarah tidak berhasil memperoleh pemetjahan setjara bulat dan mufakat maka persoalannya dibawa kerapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong untuk mendapat keputusan apakah persoalan itu :

- a. ditiadakan atau
- b. ditangguhkan pemitjaraannya atau
- c. diadakan pemungutan suara.

Untuk mengambil keputusan berdasarkan pemungutan suara diperlukan hadirnya unsur dari semua Fraksi. Apabila tidak semua Fraksi terwakili, maka diperlukan $\frac{2}{3}$ dari djumlah anggota sidang DPR-GR. Keputusan diambil dengan suara terbanjak, jaitu lebih dari separoh dari quorum tersebut diatas.

Apabila pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan karena tidak terwakilinja $\frac{2}{3}$ daripada djumlah anggota sidang DPR-GR maka persoalannya dikembalikan kepada Panitia Musjawarah.

Dalam pemitjaraan Tingkat IV, Bagian/Gabungan Bagian-bagian mengadakan Musjawarah. Musjawarah tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilakukan :

- a. oleh Bagian sendiri atau Gabungan Bagian-bagian sendiri;
- b. bersama-sama lengan Pemerintah. apabila Rantjangan Undang-undang dan usul lain itu datang dari Pemerintah.
- c. bersama-sama dengan para pengusul dan Pemerintah, apabila Rantjangan Undang-undang dan usul-usul lain itu datang dari Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

Dalam musjawarah ini para anggota Bagian jang bersangkutan dan Pemerintah/Para Pengusul dapat mengadakan perubahan². Anggota² dari Bagian² lain dapat mengajukan usul-usul perubahan setjara tertulis melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

Usul-usul itu harus ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 5 Anggota. Setelah diberi nomor pokok dan nomor surat dan diperbanjak, usul-usul perobahan itu disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong kepada Anggota²

Bagian² jang bersangkutan dan Pemerintah/para pengusul untuk dimusyawarahkan.

Dalam rapat Gabungan Bagian-bagian, Pimpinan Bagian jang banjak hubungannja dengan persoalan jang dibitjarakan, harus setjara aktif memimpin musjawarah sampai tertjapai kata mufakat.

Apabila dalam musjawarah tersebut tidak tertjapai kata mufakat, pimpinan rapat menjampaiakan halnja kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang akan membawanja kedalam Panitia Musjawarah untuk mentjari kebidjaksanaan lain menudju kata mufakat. Sesuai dengan tata-tjara seperti tertjantum dalam Bab II.

Selesai pemitjaraan Tingkat IV, apabila Fraksi-fraksi menganggap perlu dapat meminta waktu kepada Panitia Musjawarah untuk merumuskan pemikiran² guna menghadapi pemitjaraan tingkat terachir.

Apabila pemitjaraan Tingkat IV dapat diselesaikan dengan mendapat kata mufakat, maka pemitjaraan Tingkat V dilakukan dalam rapat Pleno terbuka untuk mengambil keputusan, Setelah djuru bitjara Fraksi/Gabungan Fraksi-fraksi mengemukakan pendapat terachir.

Djika pemitjaraan atas sesuatu Rantjangan Undang-undang menurut pendapat Panitia Musjawarah perlu diserahkan kepada suatu Panitia Khusus, maka Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong membentuk suatu Panitia Khusus.

Ketentuan dalam pasal 59 berlaku djuga untuk pemitjaraan oleh Panitia Khusus ketjuali apabila Panitia Musjawarah menentukan lain.

Pembahasan usul Pernyataan Pendapat dan usul-usul lain.

Sekurang-kurangnya duapuluh orang Anggota dapat mengajukan sesuatu usul pernyataan pendapat atau usul-usul lain baik jang berhubungan dengan soal jang sedang dibitjarakan maupun jang mempunjai maksud tersendiri.

Usul pernyataan pendapat atau usul lain, sebagaimana dimaksud dalam ajat (1) harus disampaikan kepada Ketua Dewan

Perwakilan Rakjat Gotong Rojong disertai pendjelasan tertulis.

Dalam rapat jang berikut Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong/Ketua rapat memberitâhukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong tentang masuknja usul tersebut.

Setelah oleh Sekretariat diberi nomor pokok dan nomor surat, usul termaksud dalam pasal 99 diperbanjak serta dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dan dikirimkan kepada Presiden.

Panitia Musjawarah menetapkan hari dan waktu pemitjaraan dalam rapat Pleno mengenai usul pernjjataan pendapat atau usul lain itu.

Dalam rapat Pleno jang telah ditetapkan diatas, para pengusul diberi kesempatan memberikan pendjelasan dengan lisan atas usul pernjjataan pendapat atau usul lain itu.

Pemitjaraan mengenai sesuatu usul pernjjataan pendapat atau usul dilakukan dalam dua babak pemitjaraan, dengan memberikan kesempatan kepada :

- a. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong lainnja untuk memberikan pemandangannja;
- b. Presiden untuk menjatakan pendapatnja.

Baik dalam rangka babak pemitjaraan jang pertama maupun dalam babak jang terachir, para pengusul memberikan djawaban atas pemandangan para anggota dan Presiden.

Menjinggung masalah resolusi atas pernjjataan pendapat atau usul-usul lain dari DPR-GR, perlu kiranja dikemukakan bahwa pada hakekatnja usul-usul atau pernjjataan itu adalah sudah sependapat dengan penilaian/eistimate oleh pihak Pemerintah sendiri terhadap suatu masalah, sehingga setjara moriel sudah ada ikatan kepada Pemerintah untuk memenuhi usul-usul DPR-GR tersebut. Mengapa dapat dikatakan demikian, hal ini adalah berdasarkan pengalaman DPR-GR selama ini dalam menjelesaikan suatu usul resolusi, usul pernjjataan pendapat atau usul-usul lain Penjelesaian menurut pasal 103 Tata-tertib ialah : „Pemitjaraan ditutup dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang menerima baik atau menolak pernjjataan pendapat atau usul-usul lain tersebut”. Akan tetapi jang dilakukan selama ini ialah proses pemitjaraannja tentu melalui penjempurnaan redaksionill maupun isi dan hanja satu dua usul

sadja jang berhasil diterima baik dengan tidak melalui Panitia Perumus. Dalam Panitia Perumus ini, selain duduk wakil-wakil dari semua Fraksi, djuga unsur Pemerintah ada didalamnya, sehingga sedjauh mungkin dilakukan pendekatan-pendekatan penilaiannya terhadap materi dan kemungkinan² pelaksanaannya. Sebab tidak akan ada gunanya suatu usul resolusi, pernyataan pendapat atau usul-usul lain diputuskan oleh DPR-GR, sekiranya Pemerintah tidak atau belum mampu untuk melaksanakannya.

§. 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH.

A. Pelengkap Nawaksara.

Dari berbagai pihak, demikian pula dari Lembaga-lembaga Demokrasi baik D.P.R.-G.R. dan M.P.R.S. maupun dari luar D.P.R.-G.R. dan M.P.R.S. telah timbul pelbagai reaksi, dan dikonstatir, bahwa dengan adanya Pelengkap Nawaksara tersebut situasi politik dalam negeri ini menjadi sangat gawat.

Achirnya D.P.R.-G.R. mengajukan suatu Resolusi jang maksudnya untuk memanggil Sidang M.P.R.S. disertai dengan suatu Memorandum jang berisi tuntutan jang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberhentikan Presiden Soekarno dari djabatan Presiden/Mandataris MPRS jang menurut pendirian DPR-GR terbukti dengan nyata kesalahannya (sesudah pendirian ini dibenarkan oleh MPRS), dan memilih/mengangkat Pe-djabat Presiden sesuai dengan pasal 3 Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/66 ;
- b. Memerintahkan Badan Kehakiman jang berwenang untuk mengadakan pengusutan, pemeriksaan dan penuntutan setjara hukum.

Didalam Memorandum D.P.R.-G.R. tersebut tersimpul pula pendapat D.P.R.-G.R., jaitu :

1. Bahwa kepemimpinan Presiden Soekarno setjara konstitusional politis ideologis, membahayakan keselamatan dan keutuhan Bangsa, Negara dan Pantjasila;
2. Bahwa pertanggung-jawab Presiden sebagai Mandataris M.P.R.S. seperti dikemukakan dalam Pidato Nawaksara beserta pelengkapnja tidak memenuhi jiwa dan ketentuan

UUD 1945 dan oleh karenanja menolak pertanggung-jawab tersebut;

3. Terdapat adanja petundjuk² (aanwyzingen), bahwa Presiden Soekarno terlibat G.30S/PKI jang fakta-faktanja perlu dilengkapi oleh Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dalam Sidang Istimewa MPRS.

Resolusi D.P.R.-G.R. itu ditampung oleh Badan Pekerdja M.P.R.S. jang sesudah membahas surat Pelengkap Nawaksara tersebut, menolak Pelengkap Nawaksara, seperti jang telah tertuang dalam Keputusan Pimpinan M.P.R.S. No. 13/B/1967 tertanggal 16 Pebruari 1967.

Perkembangan ini djelas berarti memuntjaknja konflik Politik, jaitu bahwa Pimpinan M.P.R.S. dan B.P. M.P.R.S. sebagai badan jang diberi wewenang oleh Sidang Umum ke-IV untuk menanggapi Pelengkap Nawaksara, telah menolak pertanggung-jawab Mandataris mengenai hal ini, Sidang P.B.—M.P.R.S. ke-III itu selandjutnja setjara aklamasi, menetapkan bahwa Resolusi dan Memorandum D.P.R.-G.R. tanggal 9 Pebruari 1967 didjadi-kan salah satu atjara pokok Sidang Istimewa M.P.R.S. dan M.P.R.S. akan mengambil putusan jang menjangkut kedudukan kepresidenan.

- B. Penjerahan Kekuasaan Pemerintah dari Presiden Soekarno Setjara Sepihak Kepada Pengemban TAP IX/MPRS/1966.

Pelengkap Nawaksara tertanggal 10 Djanuari 1967 jang dibekirkan setjara tertulis dianggap tidak memuaskan oleh para pendukung Orde Baru. Presiden Soekarno dalam pelengkap Nawaksara menyatakan, bahwa peristiwa 30 September baginja merupakan peristiwa jang tak terduga-duga dan bahwa peristiwa G.30S. itu :

- djalan salah jang telah ditempuh oleh para pemimpin P.K.I. ;
- kelitjikan subversi nekolim; dan
- kenjataan adanja beberapa orang jang „tolol”.

Dan pada waktu jang bersamaan, Presiden Soekarno menolak untuk bertanggung-djawab seorang diri, menjerang Djenderal Nasution setjara pribadi dan bertanja : Siapa jang bertanggung-djawab?

Dalam situasi kritis sebagai akibat dualisme itu Aksj² Massa tidak sabar lagi dan mulai turun kedjalan meskipun ketentuan² oleh Kodam V Djaya, sebagian diizinkan dan sebagian dilarang, misalnja tidak boleh menurunkan gambar² Presiden Soekarno. Dan pada tanggal 30 Djanuari 1967, ribuan mahasiswa memenuhi lagi halaman D.P.R.-G.R. Para Mahasiswa menjampaiakan sebuah resolusi jang menuntut agar D.P.R.-G.R. mengeluarkan sebuah pernyataan resmi bahwa tindakan² Presiden Soekarno bertentangan dengan semangat Pantjasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan² M.P.R.S. Dan selandjutnja mahasiswa menuntut agar pengabdi hukum memeriksa dan menghukum warganegara Soekarno.

Banjak andjuran² kepada Presiden Soekarno untuk mengundurkan diri setjara sukarela daripada waktu jang dekat akan diberhentikan oleh lembaga tertinggi jaitu oleh M.P.R.S. Demikianlah maka pada tanggal 20 Pebruari 1967 Presiden Soekarno mengumumkan kesediaannja menjerahkan kekuasaan eksekutif kepada Djenderal Soeharto selaku pengemban TAP IX/MPRS/1966.

Bunji selengkapnja dari pengumuman penjerahan kekuasaan pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut :

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/MANDATARIS MPRS
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA
REPUBLK INDONESIA**

P E N G U M U M A N

**Kami, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/MANDATARIS
MPRS/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA
REPUBLIK INDONESIA**

Setelah menjadari bahwa konflik politik jang terdjadi dewasa ini perlu segera diachiri demi keselamatan Rakjat, Bangsa dan Negara, maka dengan ini mengumumkan :

**PERTAMA : Kami, Presiden Republik Indonesia/Mandataris
MPRS/Panglima Tertinggi Angkatan Bersen-
djata Republik Indonesia, terhitung mulai hari**

ini menjerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, Djenderal TNI Soeharto, sesuai dengan djiwa Ketetapan M.P.R.S. No. IX/MPRS/1966, dengan tidak mengurangi maksud dan djiwa Undang-undang Dasar 1945.

- KEDUA : Pengemban Ketetapan M.P.R.S. No. IX/MPRS/1966 melaporkan pelaksanaan penjerahan tersebut kepada Presiden setiap waktu dirasa perlu.
- KETIGA : Menjerukan kepada seluruh Rakjat Indonesia, para Pemimpin Masjarakat, segenap Aparatur Pemerintahan dan seluruh Angkatan Bersendjata untuk terus meningkatkan persatuan, mendjaga dan menegakkan revolusi dan membantu sepe-nuhnja pelaksanaan tugas Pengemban Ketetapan M.P.R.S. No. IX/MPRS/1966 seperti tersebut diatas.
- KEEMPAT : Menjampaikan dengan penuh rasa tanggung-djawab pengumuman ini kepada Rakjat dan M.P.R.S.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa melindungi Rakjat Indonesia dalam melaksanakan tjita-tjitanja mewujudkan Masjarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pantjasila.

Djakarta, 20 Pebruari 1967.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/MANDATARIS
MPRS/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E K A R N O

Ini adalah pernjjataan sepihak dari Presiden jang segera ditolak oleh Djenderal Soeharto dan oleh semua golongan jang menginginkan diachirinja situasi konflik setjara konstjtusionil. Disamping penolakan setjara prinsip ada pula ketjurgiaan dalam pasal kedua dari Pengumuman Presiden tersebut, jang me-

njatakan dengan kata² meragukan bahwa Djenderal Soeharto „melaporkan kepada Presiden tentang pelaksanaan pemindahan kekuasaan ini apabila dipandang perlu”.

C. Disekitar Sidang Umum Istimewa M.P.R.S.

Puntjak peristiwa penting sebelum berlangsungnya Sidang Istimewa M.P.R.S. adalah lahirnya usul resolusi Nurhalim Lubis tentang persidangan Istimewa MPRS dan Resolusi D.P.R.-G.R. pada tanggal 23 Pebruari 1967 tentang pemilihan pedjabat Presiden R.I., jang diadjudkan oleh H. Djamaludin Malik, dkk.

Keadaan jang semakin menggawat tersebut tertjermin dengan diadjudkannya kepada DPR-GR sebuah Usul Resolusi oleh H. Nuddin Lubis dkk untuk mengundang dan menjelenggarakan Persidangan Istimewa MPRS. Dalam Sidang Istimewa MPRS tsb akan diminta pula agar Pemerintah c.q. Presidium Kabinet Ampera selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/ Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 untuk memberikan keterangan²/bahan² guna menjelaskan/ mendjernihkan peranan Presiden Sukarno dalam hubungannya dengan peristiwa kontra revolusi G-30-S/PKI untuk dapat didjadian pegangan dan pedoman bagi para Wakil Rakjat dalam Persidangan Istimewa MPRS.

Usul resolusi tsb setelah dibahas dan didengar pendapat² dari semua golongan dalam DPR-GR diterima oleh DPR-GR dalam- rapat-pleno terbuka pada tgl. 9 Pebruari 1967.

Bersamaan dengan diterimanja Usul Resolusi H. Nuddin dkk menjadi Resolusi DPR-GR maka DPR-GR telah mengeluarkan pula suatu Memorandum mengenai pertanggungan djawab dan Kepemimpinan Presiden Sukarno selama mendjabat Presiden R.I.

Mengingat pentingnja isi Memorandum termaksud bagi se-djarah kenegaraan R.I. dan pula bagi mereka jang ingin mengetahuinja maka isi selengkapnja disadjikan seperti dibawah inj.

M E M O R A N D U M
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG
MENGENAI PERTANGGUNGAN DJAWAB DAN
KEPEMIMPINAN PRESIDEN SUKARNO DAN
PERSIDANGAN ISTIMEWA MPRS

Pendahuluan.

1. Bahwa keseluruhan Pidato Presiden/Mandataris MPRS yang disampaikan kepada MPRS tanggal 22 Djuni 1966 yang berdjulud NAWAKSARA, yang meliputi batang-tubuh laporan dan lampiran-lampirannya, kurang memenuhi harapan rakjat, chususnya anggota-anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia, karena tidak memuat setjara djelas pertanggungan-djawab tentang kebidjaksanaan Presiden/Mandataris MPRS mengenai peristiwa kontra revolusi G-30-S/PKI beserta epiloognja.

2. Oleh karena itu Keputusan MPRS No. 5/MPRS/1966 tanggal 5 Djuli 1966 minta kepada Presiden, supaja melengkapkan laporan pertanggungan-djawabnja kepada MPRS chususnya mengenai sebab-sebab terdjadinja peristiwa G-30-S/PKI beserta epiloognja dan kemunduran ekonomi serta achlak. Dalam Keputusan itu ditegaskan pula agar untuk masa selandjutnja Presiden memberi pertanggungan-djawab yang selengkap-lengkapnja sesuai dengan makna Undang-undang Dasar 1945.

3. Dalam Surat Presiden R.I. No. 01/Pres/67 tentang Pelengkapan Pidato Nawaksara yang disampaikan Presiden Sukarno pada tanggal 10 Djanuari 1967 kepada Pimpinan MPRS dinjatakan bahwa, „atas kehendak saja sendiri saja mengutjapkan „Nawaksara” itu”. Ini membuktikan bahwa Presiden Sukarno menolak adanya pertanggungan-djawab Presiden, sekurang-kurangnya menolak pertanggungan-djawab seorang diri terhadap peristiwa² yang tersebut dalam Keputusan MPRS No. 5 itu. Tulisan dalam Pelengkap Nawaksara itu adalah bertentangan dengan Pengumuman Presiden No. 1/Pres/1966 tertanggal 16 Maret 1966 yang dibatjakan oleh bekas Wakil Perdana Menteri III Chairul Saleh, dimana terdapat bagian yang menjatakan bahwa Presiden bertanggung-djawab kepada MPR(S).

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka bersama ini

DPR-GR menjampaikan Memorandum mengenai pokok-pokok persoalan yang langsung menjangkut hidup ketatanegaraan R.I. dengan tujuan utama, menegakkan dasar negara Pantjasila dan Negara Hukum setjara konsekwen diatas landasan Undang-undang Dasar 1945.

I. Dasar Konstitusionil dari pertanggungan-djawab Presiden kepada MPR(S).

Menurut pasal 1 ayat 2 UUD 1945 kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan Rakyat. Pengertian kedaulatan pada umumnya diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara.

Dengan perkataan lain wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara.

Pendjelasan resmi UUD 1945 juga menganut arti kedaulatan seperti ini, sebagai dapat kita batja dari pendjelasan mengenai Sistim Pemerintahan Negara, III: „Kekuasaan Negara yang tertinggi berada ditangan Madjelis Permusjawaratan Rakyat”, „Kedaulatan Rakyat dipegang oleh Madjelis Permusjawaratan Rakyat”, „Madjelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi”.

Supremasi atau kekuasaan tertinggi MPR berarti bahwa MPR mempunyai legal power, kekuasaan hukum untuk menetapkan segala sesuatu yang telah ditegaskan oleh konstitusi seperti tersebut dalam pasal 3, 6 dan 37 UUD 1945 dan disamping itu tidak satu otorita tandingan baik perseorangan atau badan yang mempunyai wewenang untuk melanggar atau menjampingkan sesuatu yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu.

Setiap orang tanpa ketjuali-termasuk juga Presiden, mempunyai tanggung djawab yang terletak dalam bidang kriminil terhadap setiap tindak pidana yang telah dilakukannya, tegasnya setjara hukum tanggung djawab politik dan tanggung djawab pidana dapat berdampingan.

Dalam Pelengkapan pidato Nawaksara, Presiden telah mengemukakan antara lain :

I) „..... bahwa penjelidikan yang saksama menundjukan bahwa peristiwa G-30-S itu ditimbulkan oleh pertemuan tiga sebab, jaitu :

- a) keblingeran pimpinan P.K.I.
- b) kelihayan subversi Nekolim.
- c) memang adanya oknum-oknum yang tidak benar.

II) „..... kenapa saja s saja yang diminta pertanggung jawaban atas terdjadinja G-30-S atau yang saja namakan Gestok itu? Tidaklah misalnja Menko Hankam (waktu itu) djuga bertanggung djawab?

Dari pernyataan Presiden tersebut diatas, dengan tegas dinjatakan disini bahwa sebagaimana halnja dengan tanggung djawab politik tersebut diatas, djuga dalam hal tanggung djawab kriminiil Presiden mempersalahkannja kepada orang lain, adalah mendjadi kewadjiban DPR-GR dalam rangka tugas mengatasi tindakan² Pemerintah, untuk menjelidiki, menundjukkan dan membuktikan apakah benar Presiden tidak bertanggung djawab terhadap terdjadinja G-30-S.

Mengenai masaaalah G-30-S/PKI dikemukakan terlebih dahulu hal-hal yang pokok dan yang menondjol yang harus dipertanggung-djawabkan oleh Presiden setjara factueel dan bukan berupa konklusi seperti yang dikemukakannja dalam Pelnawaksara sub d tersebut diatas.

Fakta² jan gmenondjol seperti yang dikemukakan, antara lain :

A) Dalam masa mendjelang meletusnja Peristiwa G-30-S/PKI/proloog :

- A. 1. Persolan Angkatan ke-V.
- A. 2. Dewan Djenderal dan document „Gillchrist”.
- A. 3. Misi rahasia Omar Dhani ke R.R.T.
- A. 4. Laporan Omar Dhani kepada Presiden pada tanggal 29 September 1965 di Istana Merdeka.

B) Dalam masa setelah terdjadinja peristiwa G-30-S/PKI.

- B. 1. Hadirnja Presiden di P.U. Halim pada tanggal 1 Oktober 1965 dan laporan ex. Brig. Djenderal Supardjo pada hari itu djuga kepada Presiden.
- B. 2. Instruksi Presiden kepada Supardjo pada hari yang berikutnja, tanggal 2 Oktober 1965.
- B. 3. Kata-kata Presiden bahwa G-30-S/PKI adalah suatu „absolute overrompeling”
- B. 4. Sikap Presiden terhadap dukungan Omar Dhani kepada

G-30-S/PKI, kemudian perlindungan terhadap Omar Dhani di Istana Bogor dan pengiriman Omar Dhani dengan tugas sebagai Panglima Kopelapip keluar negeri oleh Presiden.

- B. 5. Masalah „care-taker-schap” Men/Pangad.
- B. 6. Masalah tidak disinggung-singgungnja nama Presiden dalam peristiwa di P.U. Halim.
- B. 7. Masalah mengenai Dewan Revolusi siapa pembuatnja dan perestuanja.

Ad. A.A. 1. Hal ini untuk pertama kali dikemukakan oleh Presiden dalam pidatonja bulan Mei 1965 dimuka Lembanas dalam mana disetudjui adanja latihan physik dan mental bagi rakjat agar mendjadi militant untuk kemudian dipersendjatai dan didjadikan Angkatan Ke-V.

Gagasan Presiden ini adalah berdasarkan pada pembitjaraannya dengan Chou En Lai pada Dasawarsa Konperensi A.A. ke-I di R.R.T. sendiri dikenal dengan nama milisia. (vide berkas perkara Subandrio).

Pembahasannja diserahkan kepada para Panglima Angkatan jang dtolak oleh A.D., A.K., A.L., akan tetapi disetudjui oleh A.U., sekalipun suara terbanjak menentang gagasan tersebut, oleh karena merupakan bahaja, bila buruh dan tani dipersendjatai kemudian dipergunakan untuk mentjapai suatu tudjuan politik. Kemudian ternjata, melalui terhukum Omar Dhani gagasan tersebut dilaksanakan dengan menjelenggarakan latihan² militer oleh AURI i.c. terhukum ex Major Sujono dan ex Major Gatot Soekrisno di Lubang Buaja. Adapun jang dilatih di Lubang Buaja tersebut ialah setjara menondjol sekali ormas-ormas dari P.K.I. antara lain, B.T.I., Gerwani, P.R. dengan dalih peningkatkan kesiapsiagaan dalam rangka konfrontasi terhadap Malaysia dan pengganiangan Nekolim. Kemudian ternjata para „sukaralawan” tersebut ikut serta dalam pembunuhan kedjam terhadap para Djenderal hal mana merupakan sasaran utama P.K.I. dalam rangka melaksanakan Gerakan 30 September itu (vide berkas perkara Omar Dhani dan ex. Major Soejono).

Ad, A.2. Dewan Djenderal dan Dokumen „Gillchrist”.

Pada awal bulan Mei 1965, Brigadir Djenderal Polisi Soetarto Kepala Staf B.P.I. memberitahukan kepada Soebandrio tentang

adanya „Dewan Djenderal” yang akan melakukan coup karena tidak menyetujui kebijaksanaan Presiden. Yang menjadi sumber dari berita itu adalah Harijowisastro, anggota DPR-GR dari golongan P.K.I., Wiratmono dari C.G.M.I. dan Sjarifoedin Tandjung, anggota Kader inti Front Marhaenis, berita mana tidak pernah dicek akan kebenarannya. baik oleh Soetarto maupun oleh Soebandrio. Dalih mana kemudian senantiasa dipergunakan oleh P.K.I. untuk membenarkan Gerakan-30-S-nja.

Dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 Presiden bukanlah penguasa yang tertinggi, oleh karena kedudukannya seperti yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 dalam Bab III mengenai kekuasaan pemerintahan negara ialah, hanya memegang kekuasaan pemerintahan, yang berarti kekuasaan eksekutif dan dalam pasal 5 jo pasal 20 memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, yang berarti turut serta dalam kekuasaan legislatif. Sedang dalam melaksanakan tugas² eksekutif dan mede-wetgeving itu Presiden menurut Pasal 6, dipilih oleh MPR badan yang membawahi Presiden. Penjelasan UUD 1945 menyebutkan, bahwa dibawah „Madjelis Permusjawaratan Rakyat, Presiden ialah penjenjengara Pemerintah negara yang tertinggi”. (Penjelasan Sistem Pemerintahan Negara, IV). Dengan demikian Presiden tidak „neben” akan tetapi „untergeordnet” kepada Madjelis (Penjelasan Sistem Pemerintahan Negara, III).

Berhubung dengan kekuasaan negara yang tertinggi ada pada MPR dan semua kekuasaan negara berasal dari padanya „sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia” dan Presiden adalah ondergeschikt, dus juga bertanggung jawab mengingat adagium „geen macht zonder verantwoordelijkheid”, maka dari ketentuan UUD 1945 pasal 1 ayat 2 saja sudah terkandung prinsip pertanggung-jawab Presiden kepada badan yang mengangkatnya atau badan yang mengatasinya.

Apabila penjelasan UUD mengenai Sistem Pemerintahan IV, menegaskan : „Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan Presiden”. Dan kepada siapa Presiden harus mempertanggung-jawabkan kebijaksanaannya, ditetapkan oleh penjelasan UUD mengenai Sistem Pemerintahan Negara, III. „Presiden yang diangkat oleh Madjelis tunduk dan bertanggung-jawab kepada Madjelis” dan

„wadjib mendjalankan putusan-putusan Madjelis”.

Dengan adanya Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966, yang mengakui MPRS berkedudukan dan berfungsi seperti MPR yang dimaksud dalam UUD 1945”, maka pertanggung-jawab Presiden menurut hukum harus diberikan kepada MPRS.

II. Akibat dari pertanggung-jawab politis Presiden kepada MPRS.

Dalam teori hukum dikenal 2 matjam pengertian tanggung-jawab. Yang pertama ialah tanggung jawab dalam arti sempit, jaitu tanggung-jawab tanpa sanksi dan yang kedua ialah tanggung-jawab dalam arti luas, jaitu tanggung-jawab dengan sanksi.

Dalam sedjarah ketatanegaraan R.I. tanggung-jawab dalam arti sempit dapat kita lihat tjontohnja pada pertanggung-jawab Menteri-menteri yang tanpa sanksi dibawah UUD 1949. Pasal 118 UUD 1949 menentukan bahwa „Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebidjaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnja, maupun masing-masing untuk sendiri-sendiri”.

Oleh karena Menteri-menterinja dapat diminta pertanggung-jawabnja mengenai hal-hal yang dilaksanakan dalam rangka kementeriannja, maka konsekwensinja seharusnja Parlemen mempunyai hak untuk memaksa berhenti setiap Menteri yang kebidjaksanaannja tidak dapat diterima oleh Parlemen. Akan tetapi dalam UUD 1949 pasal 122 ditetapkan pula, bahwa DPR pada waktu itu „tidak dapat memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan djabatannja”. Dalam hal ini arti pertanggung-jawab Menteri itu adalah dalam arti sempit.

Tanggung-jawab dalam arti luas dapat kita lihat tjontohnja pada pertanggung-jawab Menteri dengan sanksi dibawah UUDS 1950. Pasal 83 UUDS 1950 menentukan bahwa Menteri-menteri bertanggung-jawab atas seluruh kebidjaksanaan Pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnja, maupun masing-masing bagiannja sendiri”. Pertanggung-jawab mereka diberi sanksi dalam segala hal oleh kemungkinan diberhentikannja mereka dari kedudukan Menteri. Walaupun UUD 1950 tidak dengan tegas memerintahkan Presiden untuk membebaskan Kabinet atau Menteri oleh karena penolakan DPR untuk menerima

suatu undang-undang yang dimajukan oleh Kabinet atau seorang Menteri yang dinjatakan vital bagi Pemerintah, tetapi UUDS 1950 menempatkan DPR dalam suatu kedudukan yang memungkinkan ia menimbulkan akibat ini. Kekuasaan badan ini mengenai anggaran-belandjanja memungkinkan ia menghalang²i seluruh aktivitas/pemerintah, dalam keadaan yang terakhir ini berani bertindak diluar persetujuan majoritas dalam Parlemen. Dalam hal ini arti pertanggungan-djawab itu adalah dalam arti luas.

Pertanggungan-djawab Presiden yang terdapat dalam UUD 1945 adalah dalam arti luas, oleh karena kedudukan Presiden menurut pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-undang Dasar.

Dengan demikian tanggung-djawab Presiden MPRS adalah tanggung-djawab yang memakai sanksi. Pertanggungan-djawab politis yang diberi sanksi ini memungkinkan MPRS setiap waktu melepas Presiden dari jabatannya atau Presiden dapat diturunkan hukum pemetjatan dari jabatannya meskipun masa jabatannya belum habis.

Pendirian ini adalah diperkuat oleh Pendjelasan UUD yang menjatakan : „..... Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau Madjelis Permusjawaratan Rakyat. maka Madjelis itu dapat diundang untuk mengadakan persidangan istimewa agar supaya bisa diminta pertanggungan-djawab kepada Presiden”.

Andaikata pertanggungan djawab yang diberikan Presiden tidak ada sanksinja, maka apa gunanja DPR oleh pendjelasan resmi UUD 1945 dimungkinkan mengusulkan MPR untuk mengadakan sidang istimewa.

III. Pertanggungan djawab-pidana.

Dalam bagian pertama diatas tadi telah dibahas mengenai tanggung djawab politik dari Presiden selaku pemegang kekuasaan=Pemerintah menurut UUD 1945 patsal 4).

„Lebih baik mendahului dari pada didahului”, demikian D.N. Aidit, (vide berkas perkara Njono).

Pada pertengahan bulan Mei tahun 1965, Soebandrio melalui

pos (Djakarta) telah menerima sehelai surat tanpa ada tanda tangan dan tanpa alamat pengirim, dengan lampiran sebuah dokumen konsep surat „Gillchrist” jang djuga tidak ditanda tangani, dalam dokumen mana terdapat kata² „Our local Army friends”.

Pada tanggal 26 Mei 1965, kira-kira djam 1 pagi, Soebandrio tanpa menjelidiki dan meneliti dokumen tersebut telah melaporkan kepada Presiden jang segera mengambil tindakan dengan memerintahkan, agar ke-empat Panglima Angkatan Bersendjata menghadapnja di Istana Merdeka untuk mengadakan rapat, dimana Presiden setjara langsung kepada Djenderal Yani menanyakan tentang Dewan Djenderal jang bertugas menilai kebijaksanaan Presiden. Hal mana didjawab Djenderal Yani, bahwa Dewan Djenderal itu tidaklah ada, jang ada adalah suatu Dewan jang terdiri dari para Djenderal dari Angkatan Darat dengan tugas meneliti kenaikan pangkat dan djabatan Perwira Tinggi Angkatan Darat.

Mengenai apa jang disebut dokumen „Gillchrist” tersebut diatas waktu itu Soebandrio mengandjurkan kepada Presiden supaya djangan dipubliseer dulu sampai saat Konperensi A.A. ke II.

Kemudian dalam kesempatan resepsi Hari Ulang Tahun jang ke-45 dari P.K.I. di Aula Bank Indonesia, Soebandrio mengatakan bahwa bukti-bukti imperialisme akan menghantjurkan R.I. dan mengkandaskan Revolusi Indonesia sudah ada ditangan Presiden selain daripada itu Presidenpun dalam pidatonja dalam rapat Panglima seluruh Indonesia pada tanggal 28 Mei 1965, menyatakan bahwa, dokumen rahasia kaum imperialis sudah ada ditangannja, jang bertudjuan menjerang Indonesia dan membunuh Sukarno, Subandrio dan Djenderal A. Yani.

A.d. A.4. Laporan Omar Dhani kepada Presiden.

Pada tanggal 29 September 1965, Omar Dhani menghadap Presiden di Istana Merdeka dan melaporkan mengenai perasaan tidak puas dari anak buah ex. Brig. Djen. Supardjo terhadap pimpinan Angkatan Darat, keadaan sudah tidak dapat dikedalikan lagi dan dalam rangka perajaan Hari Ulang Tahun ABRI, pada tanggal 5 Oktober 1965, telah terdapat suatu konsentrasi pasukan di Djakarta sebesar kira² 20. 000 orang. Oleh Omar Dhani dichawatirkan, akan timbulnja suatu perselisihan,

hal mana sebenarnja, adalah hanja untuk membenarkan tindakan G-30-S/PKI.

Pada waktu Omar Dhani, melaporkan hal tersebut diatas, ia mempunyai kesan bahwa Presiden, telah mengetahui hal tersebut semuanya.

Kemudian Presiden menginstruksikan kepada Omar Dhani agar ia bersama ex. Brig. Djen. Supardjo, menghadap, di Istana Bogor padatanggal 3 Oktober 1965, kira² djam 10 pagi (vide berkas perkara Omar Dhani).

B. Dalam masa setelah terdjadinja G-30S.

Ad. B.I. Hadirnja Presiden di P.U. Halim.

Pada tanggal 1 Oktober 1965, Presiden menerima laporan dari Kopol Mangil tentang pentjulikan para Djenderal.

Presiden kemudian pergi ke Istana, tetapi ketika sampai di Djalan Budi Kemuljaan oleh Kolonel Saelan, diberitahukan untuk kembali menudju ke Grogol. Di Grogol Presiden mendapat laporan, baik setjara langsung maupun setjara tidak langsung dari Major Tituler Soeparto, Kolonel Saelan, Brig. Djen. Soenarjo, Let. Kol. Ali Ebram, tentang pentjulikan para Djenderal dan tentang lolosnja Djenderal A.H. Nasution.

Setelah mendapat laporan Presiden menjatakan, bahwa keadaan pada waktu itu adalah merupakan suatu „absolute overrompeling”, serta menanjakan „wat willen juulie met mij doen”

Oleh karena keadaan keamanan maka Presiden dan para perwira jang mengikuti Presiden, memutuskan untuk berpindah tempat ke P.U. Halim, suatu daerah jang pada waktu itu, oleh ex. Brig. Djen. Supardjo, djustru mendjadi pusat Komando G-30-S/PKI. Setelah rombongan Presiden jang terdiri antara lain dari Brig. Djen. Sunarjo, Kol. Saelan, Suparto (Major Tituler) dengan beberapa perwira lainnja, sampai di P.U. Halim (KD/OPS) Presiden pada waktu itu mendapat laporan setjara garis besarnia dari Omar Dhani, sedangkan detailnja dilaporkan oleh ex. Brig. Djen. Supardjo.

Atas pertanjaan Presiden, ex. Brig. Djen. Supardjo menjanggupi untuk memberikan bukti-bukti mengenai rentjana Dewan Djenderal. ,

Pada kira² djam 10 pagi Brig. Djen. Sabur, melaporkan tentang adanya titik² darah dirumah A. Yani dan tentang gugurnja Djenderal Pandjaitan.

Pada waktu masih berada di KO/OPS, Presiden membiarkan Omar Dhani untuk mengeluarkan Perintah Harian yang ditunjukkan kepada seluruh warga AURI dan yang mengandung G-30-S/PKI, sedangkan Presiden sendiri pada menunggu terlebih dahulu kedatangan para Panglima Angkatan untuk mengeluarkan statement.

Setelah mendengar siaran Radio G-30-S/PKI tentang Dewan Revolusi serta susunan personalianja di rumah Komodor Udara Soesanto, Presiden sama sekali tidak mengambil langkah² apapun juga.

Atas andjuran pedjabat yang berada di P.U. Halim juga, untuk meninggalkan tempat tersebut, Presiden menolak untuk kemudian setelah ada laporan dari Kol. Laut Bambang Widjanarko, bahwa pasukan Djenderal Soeharto akan menjerang P.U. Halim, maka atas desakan Dr. Leimena, Presiden berangkat ke Bogor, sementara itu, Presiden tidak pernah mendesak kepada ex. Brig. Djen Supardjo, untuk melaksanakan kesanggupannja mengenai penjerahan bukti² tentang adanya Dewan Djenderal bahkan sebelum berangkat ke Bogor, telah mengadakan pembijtaraan dengan ex. Brig. Djen. Supardjo setjara tersendiri disalah satu ruangan di rumah Komodor Udara Soesanto.

Semendjak diketahuinja peristiwa pentjulikan beberapa Djenderal antara lain Djen. A. Yani yang mendjabat Kepala Staf KOTI, Presiden selaku Panglima Tertinggi, tidaklah pernah menginstruksikan untuk mentjari serta mengusutnja, sekalipun diketahuinja pentjulikan dan pembunuhan tersebut yang dilakukan oleh golongan ex. Brig. Djen. Supardjo dan Untung.

Djuga Presiden sama sekali tidaklah mengambil tindakan apapun juga terhadap kedua orang tersebut.

Setelah mendengar pidato radio Djenderal Soeharto, bahwa G-30-S/PKI yang dipimpin oleh ex. Brig. Djen. Supardjo dan Untung adalah merupakan suatu gerakan kontrev dengan maksud untuk menggulingkan Pemerintahan yang sah, Presiden sama sekali tidak pernah pula mengambil tindakan berupa apapun juga. (vide berkas perkara Omar Dhani).

Ad. B.2. Instruksi Presiden kepada ex. Brig. Djen. Supardjo pada tanggal 2 Oktober 1965.

Meskipun telah mengetahui mengenai G-30-S/PKI, yang telah melakukan pentjulikan dan pembunuhan terhadap beberapa

orang Djenderal serta pengumuman Dewan Revolusi dan Pende-misioneran Kabinet Dwikora dan keputusan Pimpinan Semen-tara Angkatan Darat Djenderal Soeharto, tentang pemetjatan Supardjo cs. jang semuanja terdjadi pada tanggal 1 Oktober 1965.

Presiden pada keesokan harinja memberi perintah kepada ex. Brig. Djen. Supardjo, untuk meng-consigneer Bataljon 530 dan 454, dan menganggap Supardjo perwira jang berwenang untuk mengambil tindakan consignatie, sedangkan diketahuinja, Supardjo bukanlah mendjabat Komando taktis pasukan ter-sebut. (vide berkas perkara Omar Dhani).

Ad. B.3 Kata-kata Presiden, bahwa G-30-S/PKI adalah suatu „absolute overrompeling”.

Seandainja benar G-30-S/PKI suatu „absolute overrompeling”, hal ini tidaklah membebaskan Presiden dari kewadajibannja un-tuk memerintahkan menangkap Supardjo dan Untung setelah diketahuinja bahwa gerombolan G-30-S/PKI jang telah melaku-kan pembunuhan dan berusaha menggulingkan Pemerintah dipimpin oleh kedua orang tersebut, dan setelah Presiden bebas dari situasi dan kondisi overrompeling itu.

Ad. B. 4. Sikap Presiden terhadap Perintah Harlan Omar Dhani, kemudian perlindungan atas Omar Dhani di Istana Bogor dan tugas Omar Dhani sebagai Panglima Kopelapip.

Seperti jang telah diuraikan terlebih dahulu, Omar Dhani telah mengeluarkan suatu Perintah Harian jang mendukung G-30-S/PKI. Dalam keterangan tertulis dibawah sumpah dalam perkara Omar Dhani, Presiden menjatakan bahwa, pada hari setelah dikeluarkannja Perintah Harian tersebut diatas, telah memanggil dan memarahi Omar Dhani. Akan tetapi hal ini ti-daklah masuk akal, apabila dilihat pada kenyataan, bahwa Omar Dhani kemudian bahkan mendapat perlindungan dari Presiden di Istana Bogor. Dengan tjara mengizinkan Omar Dhani. jang merasa terantjam sebagai akibat dari dukungannja terhadap G - 30 S/PKI untuk tinggal di Istana Bogor. Bahkan memberi perlindungan di Istana Bogor itu, jaitu bahwa pada tanggal 19 Oktober 1965, Presiden memerintahkan Omar Dhani selaku Kopelapip pergi berangkat keluar Negeri untuk tugas Negara, sekalipun diketahuinja, bahwa Omar Dhani terliba dalam G-30-S/PKI sewaktu di P.U. Halim.

Ad. B. 5. Masalah Care-taker-schap Men/Pangad.

Penetapan Care-taker-schap ini, pada hakekatnja adalah menjalahi procedure jang lazim, jaitu standing orde jang mengatur bahwa setiap Men/Pangad berhalangan diwakili oleh Maj. Djenderal Soeharto sebagai perwira tersenior, bahkan telah menimbulkan hal-hal jang sangat meragukan, jaitu antara lain :

- a) — tanpa didahului dengan usaha untuk mentjari, memanggil Men. Pangad Yani, tegasnja, tanpa adanja kepastian tentang nasib Men. Pangad A. Yani, Presiden telah membitjarakan dan menetapkan Care-taker Men/Pangad.
- b) — Penentuan care-taker tersebut, dilakukan tanpa hadirnja Menko/Hankam Kasab A.H. Nasution para Deputy dan perwira senior Angkatan Darat jang sepatutnjalah diikut sertakan.
- c) — seperti jang ternjata, dalam perkara Heru Atmodjo, pada tanggal 1 Oktober 1965, sebuah delegasi jang dipimpin oleh Soepardjo, telah menghadap Presiden di Halim untuk melaporkan tentang G-30-S/PKI, dan rentjana Coup Dewan Djenderal.

Disamping itu, delegasi tersebut bermaksud untuk mohon restu G-30-S/PKI kepada Presiden. Atas laporan dan permohonan restu tersebut diatas, Presiden mendjelaskan akan mengangkat Men/Pangad jang baru jaitu Djenderal Pranoto.

Supardjo minta kesempatan berpikir kepada Presiden tentang hal ini karena perlu untuk membitjarakannja dengan para pimpinan G-30-S/PKI lainnja. Setelah anggota pimpinan menjetudjui pengangkatan Djenderal Pranoto tersebut, maka Supardjo dan Heru kembali meghadap Presiden dan menjatakan perseitudiuannja. (vide berkas perkara Heru Atmodjo).

Ad. B. 6. :Masalah tidak disinggung-singgungnja Presiden dalam raneka peristiwa di P.U. Halim.

Dalam minggu ketiga bulan Oktober 1965, Omar Dhani mengadakan rapat dengan para perwira AURI, dalam mana diinstruksikan agar djangan me-njinggung² dan me-njebut² nama Presiden dalam peristiwa di P.U. Halim pada tanggal 1 Oktober 1965 itu (vide berkas perkara Omar Dhani).

Ad. B. 7. : Masalah mengenai Dewan Revolusi tentang siapa membuatnja dan perestuannja.

Salah seorang saksi dalam perkara ex. Lettu Ngadimo, jaitu saksi Sabdo mengatakan bahwa konsep Dewan Revolusi telah

dibuat oleh D.N. Aidit, kemudian direstui oleh Presiden, pada waktu mana juga dihadiri oleh Subandrio. Pendjelasan Sabdo ini, diberikan dalam pertemuan jang diselenggarakan dirumah Serka Tadjam, jang dihadiri oleh ex. Lettu Ngadimo, Serka Tadjam, Soegirman dan Soedarmo, pertemuan mana diadakan untuk membitjarakan mengenai masalah sakitnja Presiden, Dewan Djenderal jang mengadakan coup dan Dewan Revolusi jang merupakan tandingan daripada Dewan Djenderal. (vide berkas perkara Ngadimo).

Demikianlah kumpulan fakta-fakta jang sangat menondjo! jang membuktikan adanya djalinan hubungan Presiden dengan G-30-S/PKI tersebut diatas atau dengan kata² lain tentang adanya hubungan causa antara Presiden dan G-30-S/PKI tersebut, baik dalam soal waktu, tempat dan dengan para pelaku-pelaku/tokoh-tokoh G-30-S/PKI itu.

Dalam hukum atjara pidana, chususnja dalam bidang hukum pembuktian, dikenal istilah petundjuk (aanwijzingen) sebagai salah satu alat bukti. Jang dimaksudkan dengan petundjuk² tersebut diatas, ialah setiap perbuatan, kedjadian atau keadaan jang karena sifatnja dan persesuaiannja suatu k-djahatan jang setjara njata² menundjukkan, terdjadinja suatu kedjahatan dan siapa jang melaksanakannja. Dinilai kepada ketentuan tersebut, kesimpulannja ialah, bahwa Presiden :

- a): — setelah mengetahui peristiwa G-30-S/PKI dan para pelakunja dengan sengadja telah memberikan kesempatan untuk menjelesaikan rentjana kedjahatan G-30-S/PKI.
- b): — ikut serta dalam mempersiapkan dan mempermudah melantjarkan G-30-S/PKI.
- c): — bahkan lebih pula dari pada itu, jaitu mengatur, memimpin mendalangi pelaksanaan G-30-S/PKI.

IV. KEMEROSOTAN EKONOMI.

Selama tampuk pimpinan pemerintahan langsung dipegang oleh Presiden Sukarno, jaitu sedjak tahun 1959, maka perekonomian kita setjara terus-menerus mengalami kemunduran jang sangat membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara.

Hal itu disebabkan karena pemerintahan Presiden Sukarno lebih mengutamakan masalah² politik jang tidak riil dengan

mengorbankan azas kehidupan ekonomi yang teratur. Semua itu tertjermin dalam kemerosotan penghasilan² negara, berupa ekspor, pajak dan lain-lainnya, turunnja setjara meluntjur nilai mata uang rupiah, sedang pengeluaran² non-ekonomis tidak terkendalikan lagi.

Dalam pada itu terdjadilah petualangan² ekonomi, yang pada pokoknja berkisar pada DPC (deferred payment khusus), anggaran belandja/kredit khusus dan pengumpulan dana-dana atas nama revolusi : antara lain sebagai berikut :

1. Atas Instruksi Presiden No. 18 tahun 1964 telah dilakukan kebidjaksanaan oleh Presiden Sukarno berupa pengeluaran² izin DPC (deferred payment khusus), yang sebenarnya adalah lisensi istimewa yang diberikan kepada badan-badan resmi, perusahaan² swasta atau perorangan untuk atas beban negara membuat hutang kepada luar negeri.
2. Pemberian lisensi istimewa dilakukan tanpa mengikuti prosedur tertentu yang bisa mentjegah penyalahgunaan wewenang, sehingga dalam prakteknja lisensi itu diberikan kepada mereka yang kebetulan mempunyai hubungan dekat dan bersifat pribadi dengan pejabat² tertinggi negara, dalam banyak hal dengan Presiden Sukarno sendiri.
3. Tjara yang demikian itu telah memberikan posisi yang istimewa bagi mereka yang berketjimpung dalam petualangan ekonomi itu, sehingga timbullah golongan ketjil yang mendadak dan tak wadjar berhasil mendjadikan dirinja radja² uang atas beban rakyat.
4. Pengeluaran lisensi izin DPC dilakukan setjara serampangan, tanpa rentjana tertentu yang dihubungkan dengan kemampuan pembayaran kembali, sehingga pada achirnja terdjadi insolvensi Indonesia terhadap luar negeri.
5. Bahwa akibat semua itu adalah kekatjauan dan kemerosotan perekonomian nasional yang sangat menekan kehidupan dan memelaratkan rakyat.
6. Pengeluaran izin DPC yang dialihkan oleh tjita² untuk memupuk Dana Revolusi tidak mentjapai sasarannja disebabkan oleh kekatjauan prosedur dan administrasinja, sehingga tidak ada kontrol mengenai penerimaan² dan pengeluaran² dana tersebut, baik yang berupa rupiah maupun devisa, antara lain :

1. penetapan besarnya penjetoran bagi dana sebagai imbalan pemberian izin DPC tidak menentu, dan sama sekali tergantung pada Presiden Sukarno atau ex-Menteri Bank Sentral Jusuf Muda Dalam.
- 2). ada yang dikenakan wajib setor dan ada yang dibebaskan dari wajib setor tanpa ada ukuran objektif. atas alasan² pemberian dispensasi itu.
- 3). penjetoran dana ada kalanya dilakukan di bank-bank, ada yang langsung diterima oleh Presiden Sukarno pribadi.
- 4). pengeluaran² dari dana juga setjara sembarangan menurut kehendak Presiden sendiri.
7. Segala apa yang diuraikan diatas itu adalah merupakan salah-urus (mismanagement) total yang memberi peluang dan perangsang untuk berbuat manipulasi.
8. Dalam pada itu dikeluarkan pula kredit² khusus dalam jumlah ber-miljard² rupiah (lama) tanpa prosedur, bahkan dengan menjampingkan prosedur hukum yang berlaku, sedang wewenang pengeluaran kredit khusus sepenuhnya ditangan Presiden Sukarno sendiri.
9. Sasaran pengeluaran kredit ini tidak ekonomis, antara lain untuk membiayai kegiatan BPI-Subandrio dalam epiloognja Gestapu/PKI.
10. Akibat pengeluaran kredit² khusus tersebut adalah makin tidak terkendalikannya inflasi, yang hanya menambah penderitaan rakyat.
11. Fakta menunjukkan bahwa segala apa yang tersebut diatas telah mengakibatkan didjatuhinja hukuman mati Jusuf Muda Dalam, ex Menteri Bank Sentral, pembantu Presiden Sukarno. Dari pembelaan Jusuf Muda Dalam dan bukti² yang diajukan dalam proses perkaranya segala tindakan Jusuf Muda Dalam dilakukannya atas instruksi Presiden Sukarno, sehingga akhirnya Presiden Sukarno sendiri harus bertanggung-djawab atas perbuatannya, jaitu tindakan² yang oleh KORASI dikwalifikasikan sebagai tindak pidana sub-versi ekonomi.

V. Kemorosotan achlak.

Dalam suratnja pada Pimpinan MPRS tertanggal 10 Djanuari

1967, No. 01/Pres/'67 Hal : Pelengkap Pidato Nawaksara, Presiden menjatakan : „Mengenai soal achlak, perlu dimaklumi bahwa keadaan achlak suatu waktu adalah hasil perkembangan daripada proses kesadaran dan laku-tindak masjarakat dalam keseluruhannja, jang tidak mungkin disebabkan oleh satu orang sadja”.

Hal ini sangat disesalkan karena :

- a. dapat menimbulkan penafsiran seolah-olah kemerosotan achlak pada se-waktu² itu hanja disebabkan karena pengaruh lingkungan atau milleu sadja ;
- b. dengan keterangan itu Presiden Sukarno berusaha membebaskan diri dari pertanggungan-djawabnja kemerosotan achlak dan dengan demikian menundjukkan krisis kepemimpinannja.

VI. Politik.

1. Presiden Sukarno dengan pernyataannja seperti jang tertulis dalam suratnja kepada Pimpinan MPRS No. 01/Pres/'67 tentang Pelengkap Nawaksara, bahwa Presiden baik berdasarkan UUD '45 maupun Ketetapan² MPRS sebelum Sidang Umum ke-IV tidak diwadjibkan memberi pertanggungan-djawab mengenai hal-hal jang „tjabang” kepada MPRS, merupakan pertanyaan resmi bahwa Presdien tidak mengakui MPRS jang sekarang.

Ketiga soal jang ditetapkan dalam keputusan MPRS No. 5/MPRS/1966, jaitu sebab² terdjadinja G-30-S/PKI, kemunduran ekonomi dan kemunduran achlak, adalah hal-hal jang pokok dan fundamentil jang termasuk Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan pernyataannja bahwa MPRS jang sekarang telah „diti-kung” — „dikebiri”, Presiden Sukarno lebih menandakan lagi pendiriannja tidak mengakui MPRS.

mandat melaksanakan Pemerintahan Negara — hal ini oleh Presiden Sukarno masih dinjatakan pada waktu menerima

Sedang, Presiden Sukarno jang setjara konstitusionil diberi Ketetapan MPRS hasil Sidang ke-IV, dengan pernyataan : „Insja-Allah saja akan laksanakan Ketetapan ini”, tetapi pada saat diminta pertanggungan-djawab setjara konstitusionil pula, dengan berbagai dalih mengelakkannja dan bahkan setjara politis tidak mengakui lembaga peminta pertanggungan-djawab, tidak

dapat dipertanggung-djawabkan lagi untuk tetap memangku djabatan Presiden.

2. Presiden Sukarno dalam masa epiloog G-30-S/PKI dalam sikap dan utjapannja membela PKI dan bersifat memberi peluang bagi rehabilitasi PKI. Dalam pelengkap Nawaksara, hal ini ditjerminkan dengan lebih tegas lagi dengan dalih, „otorisasi-nja” terhadap Pidato Ketua Presidium Djenderal Suharto jang menjimpulkan, „bahwa Bapak Presiden djuga mengutuk Gerakan 30 September/PKI, walaupun Bapak Presiden menggunakan istilah Gestok”.

Presiden Sukarno djika memang benar² berpendirian mengutuk G-30-S/PKI, apa beratnja menjatakan hal itu olehnja sendiri setjara tegas tanpa menggunakan dalih otorisasi jang ternjata djuga tidak benar seperti jang terbukti dibantah oleh Djenderal Soeharto jang diumumkan oleh Maj. Djen. Alamsjah pada tanggal 11 Djanuari 1967.

3. Dengan pernjjataan Presiden Sukarno baik pada masa proloog maupun epiloog G-30-S/PKI, bahwa Presiden adalah seorang Marxis, maka sikap dan pendirian diatas adalah suatu kebulatan lagi, bahwa bagi Presiden Sukarno Komunisme dan PKI adalah hal-hal jang prinsipil dipertahankan. Hal ini berten-tangan berhadap-hadapan dengan suara hati nurani rakjat jang telah pula dituangkan setjara demokratis dalam Ketetapan MPRS No. XXV.

Presiden Sukarno dalam Pelengkap Nawaksara-nja menggugat mengapa Presiden disuruh bertanggung-djawab sendiri dan serentak menggugat siapa jang harus bertanggung-djawab atas G-30-S/PKI dan 7 peristiwa pertjobaan pembunuhan terhadap dirinja.

Kenjjataan bahwa Presiden Sukarno tidak berani dan tidak mau bertanggung-djawab, sedang pertanggungan-djawab tersebut tegas² berdasarkan UUD '45 mendjadi kewadjabannja dan pelemparan tanggung-djawab kepada orang lain seperti Menko Hankam (waktu itu) - jang djelas² bahwa Menko Hankam oleh G-30-S/PKI mengalami tindakan pembunuhan, jang untung tidak berhasil-, dan 7 peristiwa itu satu persatu setjara militer operasionil dan justisionil telah diselesaikan, membuktikan bahwa Presiden Sukarno tidak memiliki kepemimpinan lagi, dan oleh karena itu djika terus memangku djabatan Presiden mem-

bahayakan keselamatan serta keutuhan Negara dan Bangsa Indonesia.

4. Surat Presiden No. 01/Pres/'67 yang oleh Presiden Sukarno dimaksudkan sebagai Pelengkapan Nawaksara menurut pokok materinya seperti yang diuraikan diatas, sangat mengetjewakan rakyat dan tidak memenuhi syarat suatu pertanggungan dijawab yang harus diberikan oleh Presiden kepada lembaga kedaulatan Rakyat MPRS.

Berhubung dengan itu Pelengkap Nawaksara tersebut demi tegaknya kehidupan politik ketatanegaraan yang berdasarkan konstitusi, tidak bisa lain ketjuali ditolak.

VII. Kesimpulan :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka DPR-GR berpendapat :

1. Bahwa kepemimpinan Presiden Sukarno setjara konstitusional, politis ideologis, membahayakan keselamatan dan keutuhan Bangsa, Negara dan Pantjasila.
2. Bahwa pertanggungan-djawab Presiden sebagai Mandataris MPRS seperti dikemukakan dalam Pidato „Nawaksara” beserta pelengkapnja, tidak memenuhi jiwa dan ketentuan UUD '45, dan oleh karenanya menolak tanggungan-djawab tersebut.
3. Terdapat adanya petundjuk-petundjuk (aanwijzingen) bahwa Presiden Soekarno terlibat dalam G-30-S/PKI yang fakta-faktanya perlu dilengkapi oleh Panglima Pemulihan Keamanan, dan Ketertiban dalam Sidang Istimewa MPRS.

Karena berdasarkan bahan-bahan/fakta-fakta tersebut diatas, DPR-GR menganggap bahwa Presiden se-tidak²nja sungguh melanggar Haluan Negara yang ditetapkan UUD 1945/Ketetapan Sidang Umum ke-IV MPRS, mengusulkan kepada Pimpinan MPRS memanggil Persidangan Istimewa MPRS untuk :

1. Memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan Presiden/Mandataris MPRS yang menurut pendirian DPR-GR terbukti dengan nyata kesalahannya (sesudah pendirian ini dibenarkan MPRS), dan memilih/mengangkat Pejabat sesuai dengan pasal 3 Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966. :

2. Memerintahkan kepada Badan Kehakiman yang berwenang untuk mengadakan pengusutan, pemeriksaan dan penuntutan setjara hukum.

Djakarta, 9 Pebruari 1967.

P I M P I N A N

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG

Ketua,
H.A. SJAICHU.

Wakil Ketua,
Dr. SJARIF THAJEB.

Maj. Djen. TNI

Wakil Ketua,
MURSALIN

Laksda (L).

Wakil Ketua,
Mh. ISNAENI.

Wakil Ketua,
Drs. B. MANG RENG SAY.

Sebagai reaksi atas adanya Resolusi dan Memorandum DPR-GR tsb. diatas yang setjara resmi disampaikan kepada MPRS pada tanggal 11 Pebruari 1967, Pimpinan MPRS dalam rapatnja pada tanggal 16 Pebruari 1967 memutuskan untuk menjelenggarakan Persidangan Istimewa MPRS akan berlangsung dari tanggal 7 sampai dengan 11 Maret di Djakarta, dengan atjara pokoknja a.l mengenai Resolusi beserta Memorandum DPR-GR, serta menentukan tindakan² konstitusionil selandjutnja.

Resolusi D.P.R.-G.R. tentang pemilihan pedjabat Presiden R.I. tersebut pada pokoknja berisikan permintaan kepada Persidangan Istimewa M.P.R.S. untuk menetapkan Pengemban Ketetapan M.P.R.S. No. IX/MPRS/1966 Djenderal Soeharto, sebagai Pedjabat Presiden R.I. sesuai dengan djiwa Ketetapan M.P.R.S. No. XV/MPRS/1966.

Atjara pokok daripada Sidang Umum Istimewa M.P.R.S. ini sebagaimana telah ditentukan oleh Badan Pekerdja M.P.R.S. ke-III tanggal 14-16 Pebruari 1967, adalah :

- a. Resolusi beserta Memorandum D.P.R.-G.R. tertanggal 9 Pebruari 1967, serta menentukan tindakan² konstitusionil

selanjutnya, ditambah dengan Resolusi D.P.R.-G.R. tanggal 23 Februari 1967.

- b. Pengesjahan keputusan Pimpinan M.P.R.S. tentang hasil² karya Panitia Ad Hoc M.P.R.S., II, III dan IV dan penilaian kembali ketetapan-ketetapan M.P.R.S.

Sidang M.P.R.S. yang berlangsung selama enam hari enam malam di Gedung Istora Senayan, telah dibuka oleh Ketua M.P.R.S. Djenderal A.H. Nasution pada tanggal 7 Maret 1967 dan merupakan detik-detik berhasilnya perjuangan Orde Baru dan kemenangan Pantjasila/UUD '45.

Sidang MPRS ini cukup punya arti sedjarah selama 22 tahun Indonesia merdeka. Sidang Istimewa MPRS tersebut telah menjabut kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, yang telah menduduki jabatan kepresidenan sejak 18 Agustus 1945.

Dengan demikian berachirlah dualisme pemerintahan dan konflik situasi. Ini merupakan suatu kejadian penting dalam sedjarah ketata-negaraan Indonesia.

Perlu pula ditjatat disini, bahwa hasil daripada Sidang Istimewa MPRS selengkapnja adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan MPRS-RI No. XXXIV/MPRS/1967 tentang Penjabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Presiden Soekarno.
2. Ketetapan MPRS-RI No. XXXIV/MPRS/1967 tentang Penindjauan kembali Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 Tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis² Besar Haluan Negara.
3. Ketetapan MPRS-RI No. XXXV/MPRS/1967 tentang Penjabutan Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966.
4. Ketetapan MPRS-RI No. XXXVI/MPRS/1967 tentang Penjabutan Ketetapan MPRS No. XVI/MPRS/1966.
5. Keputusan MPRS-RI No. 7/MPRS/1967 tentang Pengukuhan Keputusan Pimpinan MPRS tanggal 6 Maret 1967 No. 24/B/1967 Diktum Ketiga, Tentang Perpanjangn Waktu Kerdja Panitia Ad Hoc B.

D. Pemulihan Hubungan Diplomatik R.I. — Malaysia.

Dalam pidato kenegaraan Pd. Presiden Soeharto didepan Sidang DPR-GR pada tanggal 16 Agustus 1967 mengenai Malaysia, dinjatakan, bahwa konfrontasi terhadap Malaysia yang djelas

tidak membawa keuntungan bagi rakyat dalam hubungan Internasional, telah dapat dihentikan. Dewasa ini hubungan R.I. dengan negara Malaysia praktis pulih kembali, sekalipun hubungan diplomatik formil masih memerlukan dipenuhinja beberapa syarat teknis yang sedang dipersiapkan yang seksama oleh kedua belah pihak.

Dalam hubungan ini, pada tanggal 24 Agustus 1967 Sidang Pleno DPR-GR dengan aklamasi menerima dan menyetujui Usul Resolusi Anggota DPR-GR Drs. Chalik Ali, dkk. tentang pemulihan hubungan diplomatik R.I. — Malaysia dan pertukaran perwakilan R.I. — Singapura menjadi Resolusi DPR-GR. Dasar pertimbangan daripada Resolusi tersebut antara lain adalah bahwa makin terasa mendesaknja untuk dibuka kembali hubungan diplomatik antara R.I. — Malaysia dan R.I. — Singapura berhubung makin meningkatnja beberapa persoalan yang harus digarap dan meliputi masalah² hubungan ekonomi, termasuk pemberantasan penjelundupan dan masalah² keamanan perbatasan.

Perlu dikemukakan disini, sebagai rangkaian usaha pemulihan kembali hubungan R.I. — Malaysia yang mendahului Resolusi DPR-GR tersebut diatas, ialah bahwa pada tanggal 29 September 1966 DPR-GR telah mengesahkan Undang² tentang persetujuan perdjandjian untuk menormalisasi hubungan antara R.I. dengan Malaysia sesuai dengan Dwi Dharma Tjatur Karya Kabinet Ampera. Sebagaimana sudah diuraikan dalam BAB VII buku ini.

Pemilihan hubungan diplomatik R.I.—Malaysia djustru sangat penting untuk lebih meningkatkan kepentingan R.I. dalam penyelesaian persoalan Serawak setjara wajar, mengingat diwilayah Serawak djustru terdapat unsur gerakan bersendjata Komunis yang dapat dijadikan tempat untuk merongrong keamanan Indonesia di beberapa daerah yang berbatasan dengan daerah itu.

Pemulihan hubungan diplomatik setjara de jure Indonesia — Malaysia makin diperlukan dewasa ini, djuga disebabkan karena adanya perbaikan² dalam hubungan ekonomi dan kebudayaan.

Dalam rangka memperkuat kedudukan Djenderal Soeharto untuk mensukseskan misi ke luar negeri, oleh DPR-GR dipandang perlu agar dalam kepergiannja keluar negeri tersebut,

Djenderal Soeharto tidak hanya berkedudukan sebagai Pd. Presiden, melainkan sudah penuh sebagai Presiden R.I. yang ditetapkan oleh Sidang Umum M.P.R.S. Sebab jika masih tetap dalam kedudukan sebagai Pedjabat Presiden maka dunia internasional/akan menganggap tidak mantap untuk melakukan perundingan² antar Negara.

Dalam hubungan dengan persoalan Pedjabat Presiden tsb. dan persoalan² Negara lain²nja maka pada tanggal 28 Pebruari 1968 D.P.R.-G.R. telah menjetudjui Usul Pernyataan Pendapat Achmad Sukarwidjaja dkk. tentang „Penjegaran Lembaga² Negara dan Sidang Umum ke-V MPRS”. menjadi Pernyataan Pendapat D.P.R.-G.R. setelah diadakan beberapa perubahan dan penjempurnaan redaksionil oleh Panitia Musjawarah.

Isi selengkapnya diktum Pernyataan Pendapat D.P.R.-G.R. No. 12/D.P.R.-G.R./III/1967-1966 tertanggal 28 Pebruari 1968 adalah sebagai berikut :

- Pertama : Mendesak kepada Pengemban Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. IX/MPRS/1966 untuk segera mengadakan penjegaran pula terhadap keanggotaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan Lembaga² Negara lainnja ;
- Kedua : Mendesak kepada Pimpinan dan Badan Pekerdja Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara untuk segera menjelenggarakan Sidang Umum ke-V Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara selambat-lambatnja pada tanggal 20 Maret 1968, dengan urutan atjara sebagai berikut :
- a. Menetapkan Pola Dasar Pembangunan Nasional 5 (lima) tahun berdasarkan pembahasan atas Rantjangan yang diajukan oleh Pemerintah ;
 - b. Mengangkat Djenderal Soeharto/Pengemban ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. IX/MPRS/1966 menjadi Presiden Republik Indonesia.
 - c. Menetapkan penjelenggaraan pemilihan Umum dalam batas-batas waktu yang tertjantum dalam pidato Pedjabat Presiden dalam rapat Pleno De-

wan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong pada tanggal 13 Pebruari 1968.

Selanjutnja dapat dikemukakan bahwa Pernyataan Pendapat tersebut selain mempunyai arti sedjarah penting bagi Bangsa dan Negara, djuga bagi D.P.R.-G.R. sendiri merupakan satu kedjadian istimewa dalam sedjarahnja, karena belum pernah terdjadi sebelumnja penjebaran teks lengkap Pernyataan Pendapat D.P.R.-G.R. kepada masjarakat di Djakarta. Teks lengkap Pernyataan Pendapat No. 12/DPR-GR/III/1967-1698 jang dapat dibatja bukan sadja pada papan-papan pengumuman resmi melainkan djuga dapat dibatja diberbagai tempat.

Pernyataan Pendapat tersebut disetudjui dalam rapat pleno D.P.R.-G.R. tanggal 21 Pebruari 1968 malam hari, ditanda-tangani oleh H.A. Sjaichu/Ketua D.P.R.-G.R. pada djam 24.00 malam setelah Panitia Musjawarah menjelesaikan penjemputan/perubahan dsb. Djam 1 dini hari waktu itu djuga Pernyataan Pendapat D.P.R.-G.R. tersebut disampaikan kepada Pd. Presiden dan kepada Pimpinan M.P.R.S., untuk menjongsong rapat Badan Pekerdja M.P.R.S. tanggal 29 Pebruari 1968 pagi harinja.

Badan Pekerdja MPRS menerima Pernyataan Pendapat DPR-GR jang selanjutnja dijadikan atjara untuk dibitjarakan dalam sidang ke V MPRS.

Hasil² selengkapnja dari Sidang Umum ke-V MPRS adalah sebagai berikut :

- a. Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 tanggal 21 Maret 1968, tentang "Pentjabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965" dan tentang "Pedoman Pelaksanaan Kerakjatan Jang Dipimpin Oleh Hikmat Kebidjaksanaan Dalam Permusjawaratan/Perwakilan".
- b. Ketetapan MPRS No. XXXVIII/MPRS/1968, tanggal 27 Maret 1968, tentang "Pentjabutan Ketetapan² MPRS :
 - No. II/MPRS/1960 ;
 - No. IV/MPRS/1963 ;
 - No. V/MPRS/1965 ;
 - No. VI/MPRS/1965 ;
 - No. VII/MPRS/1965 ;

- c. Ketetapan MPRS No. XXXIX/1968, tanggal 27 Maret 1968, tentang "Pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966".
- d. Ketetapan MPRS No. XL/MPRS/1968, tanggal 27 Maret 1968, tentang "Pembentukan Panitia Ad Hoc MPRS Jang Bertugas Melakukan Penelitian Ketetapan² Sidang Umum MPRS ke-IV Tahun 1966 dan Sidang Istimewa MPRS Tahun 1967".
- e. Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968, tanggal 27 Maret 1968, tentang „Tugas Pokok Kabinet Pembangunan”.
- f. Ketetapan MPRS No. XLII/MPRS/1968, tanggal 27 Maret 1968, tentang „Perubahan Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum”.
- g. Ketetapan MPRS No. XLIII/MPRS/1968, tanggal 27 Maret 1968, tentang „Pendjelasan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966”.
- h. Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968, tanggal 27 Maret 1968, tentang „Pangkatatan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, Sebagai Presiden Republik Indonesia”.
- i. Nota Pimpinan MPRS Kepada Presiden/Mandataris MPRS dan Pimpinan DPR-GR No. NOTA 3/PIMP/1968, perihal „Pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966”.
- j. Nota Pimpinan MPRS Kepada Presiden/Mandataris MPRS dan Pimpinan DPR-GR No. NOTA 4/PIMP/1968, perihal „Penjempurnaan Nota MPRS No. Nota I/MPRS/1966 tentang Politik Luar Negeri Berdasarkan Pantjasila”.
- k. Keputusan Pimpinan Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No. 46/B/1968, tentang „Penentuan Sidang Umum ke-V MPRS tanpa ada Keputusan Mengenai Materi Komisi II dan Komisi III”.

F. Rentjana Pembangunan Lima Tahun dan Perubahan tahun Anggaran.

Penjusunan dan Pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang ditugaskan oleh Tap. XLI/MPRS/1966 kepada Pemerintah.

Oleh karena itu semula Pemerintah berpendapat tidak perlu menjampaiakan Repelita kepada DPR-GR. Sebaliknya Pimpinan DPR-GR berpendapat sekalipun budget pelaksanaan Repelita

itu akan dituangkan dalam RAPBN yang berarti melalui persetujuan D.P.R.-G.R., maka tentang bagaimana Repelita itu sendiri akan dilaksanakan sudah sewajarnya pula apabila terlebih dahulu diperoleh juga persetujuan dari D.P.R.-G.R.

Selanjutnya sesuai dengan persetujuan Pemerintah dan DPR-GR pada kesempatan menjampaikan keterangan Pemerintah pada pembahasan tingkat I RUU APBN 1969-1970 pada tanggal 14 Djanuari 1969, Presiden Soeharto sekaligus menjampaikan pendjelasan tentang Rentjana Pembangunan Lima Tahun, jaitu dari tahun anggaran 1969/1970 sampai tahun anggaran 1973/1974.

Dalam pendjelasannya Presiden Soeharto mengatakan a.l., Pelaksanaan Rentjana Pembangunan ini terletak pada Rentjana Tahunan, yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rong selalu ikut serta menentukan pelaksanaan Rentjana Pembangunan ini.

„Mengenai materi REPELITA itu, Pemerintah yakin bahwa masih ada hal-hal yang kurang sempurna; oleh karena itu Pemerintah dengan senang hati akan menerima saran², pertimbangan dari DPR-GR, yang akan dijadikan bahan pemikiran dalam rangka penjusunan APBN setiap tahunnya.

Sehubungan dengan harapan Presiden kepada D.P.R.-G.R. tersebut, maka Pimpinan D.P.R.-G.R. dengan suratnya No. 06/K/1031/DPR-GR/69 tertanggal 28 Maret 1969 telah menjampaikan kepada Presiden tentang Tanggapan dan Saran-saran D.P.R.-G.R. atas Repelita dengan lampiran²nja yang berisi :

1. Sikap dasar D.P.R.-G.R. tentang Repelita.
2. Tanggapan dan saran-saran D.P.R.-G.R. atas isi Repelita :
 - A. Umum
 - B. Rentjana Bidang-bidang.
3. Tanggapan dan saran-saran masing² Fraksi dalam D.P.R.-G.R.

Dalam sikap dasar tersebut, D.P.R.-G.R. menegaskan keaja-kinannya bahwa partisipasi dari seluruh masyarakat adalah mutlak bagi suksesnja Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Partisipasi Masyarakat berdasarkan tanggung jawab bersama adalah dilaksanakan dengan :

- membantu dalam pengerahan, penjurusan dan pengarahannya kekuatan-kekuatan masyarakat; dan
- menjelenggarakan social-control.
- memberikan sumbangan-sumbangan pikiran; jang kesemuanya diarahkan kepada hasilnya pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Dalam tanggapan dan saran²nja DPR-GR telah pula memberikan setjara diperintji tentang bagaimana Repelita sebaiknya dilaksanakan. Dan dalam follow up selanjutnja daripada tanggapan dan saran² DPR-GR tersebut, maka DPR-GR telah pula melakukan peninjauan² on the spot ke-daerah² dalam rangka mengawasi serta mengikuti pelaksanaan APBN jang sekaligus merupakan penuangan daripada kebidjaksanaan rentjana tahunan Pembangunan Lima Tahun.

Adapun materi dari Repelita itu sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 25 Ketetapan MPRS No. XXIII/tahun 1966, segala prioritas sasaran pembangunan adalah bidang² pertanian, prasarana, industri, pertambangan dan minjak. Dalam REPELITA ini bidang pertanian tidak sadja harus diprioritaskan, tetapi bahkan dipilih sebagai titik sentral pembangunan.

Bidang pertanian dipilih sebagai titik sentral pembangunan, oleh karena struktur perekonomian Indonesia dewasa ini bersifat agraris. Sebagian besar tenaga kerdja bekerdja disektor itu, sehingga sektor ini merupakan sebagian terbesar sumber pendapatan Nasional. Sebagian besar dari hasil devisa diperoleh dari sektor perkebunan. Keadaan iklim, tjukupnja areal tanah dan banjaknja tenaga kerdja, lebih² disertai dengan pemanfaatan teknologi dan tjara² bekerdja baru, memberikan kemungkinan jang paling besar bagi pembangunan dibidang ini.

Pembangunan disektor pertanian berarti memperluas lapangan pekerdjaan dan meningkatkan pendapatan sebagian besar rakyat. Hasil pangan jang tjukup, chususnja beras, mempunyai arti jang besar dalam memantapkan harga² pada umumnja, oleh karena beras merupakan pembimbing harga jang utama, sehingga terdapatlah stabilitas ekonomi; jang merupakan syarat utama bagi kelanjutan pembangunan. Disamping itu kenaikan produksi beras berarti penghematan devisa untuk mengimpor beras. Naiknja pendapatan masyarakat berarti terbukanya pasaran bagi produksi industri jang diperlukan oleh konsumen. Bertam-

bah besarnja permintaan ini dan kemantapan harga-harga pada umumnja, jang menimbulkan kemantapan upah, akan merupakan perangsang bagi timbulnja industri² baru.

Selain daripada itu sebagaimana telah diuraikan dalam bagian terdahulu, Presiden Soeharto pada tanggal 5 Djanuari 1970 dihadapan rapat p'leno terbuka DPR-GR telah menjampaikan pokok² RAPBN tahun 1970/1971.

Pendjelasan itu diberikan dalam rangka pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun, jang pada waktu itu memasuki tahun kedua. Agak berbeda dengan Rentjana Pembangunan sebelumnya, maka Rentjana Pembangunan Lima Tahun tahap kedua itu telah disusun setjara lebih realistis dan lebih konsisten.

Didjelaskan pula oleh Presiden tentang adanja perubahan mengenai tahun Anggaran, jaitu jang akan berlaku mulai dari satu April sampai dengan tiga puluh satu Maret tahun berikutnya.

Adapun alasan Pemerintah untuk merobah berlakunja tahun Anggaran itu tersebut adalah berdasarkan pertimbangan rasionil dan efisiensi, guna menundjang berhasilnja atau kelantaran pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun, bersamaan dengan mulai dilaksanakannja tahun Anggaran baru.

Untuk maksud tersebut diatas pada tanggal 25 Oktober 1968 Pemerintah telah menetapkan berlakunja Undang-undang No. 9 tahun 1968 tentang perubahan Pasal 7 „Indische Compabiliteitswet” (Sbl. 1925 No. 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Drt. tahun 1954 (L. N. tahun 1954 No. 6), hingga untuk selandjutnja tahun² Dinas Anggaran mulai sa'at itu berlaku dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

C. Persoalan Irian Barat.

Dalam rangka Penentuan Pendapat Rakjat Irian Barat, oleh Pemerintah maupun oleh DPR-GR dilakukan kegiatan² guna dapat menilai dan mengimbangi dengan seksama prosedur, tiara² persiapan dan pelaksanaan daripada Penentuan Pendapat di Irian Barat.

Kebulatan tekad DPR-GR tsb. antara lain telah ditjetuskan dengan dikeluarkannja suatu Pernjataan tgl. 30 Mei 1969, jang memuat ketentuan² penting sbb. :

1. Mendukung sepenuhnya segala usaha Pemerintah untuk melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Barat dalam rangka perjuangan kemerdekaan Rakyat Indonesia, sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Menyetujui sepenuhnya prosedur dan tjara persiapan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat Irian Barat yang ditempuh oleh Pemerintah.
3. Berkejakinan penuh, bahwa hasil Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat dalam lingkungan kekuasaan R.I. sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sebagai follow up daripada adanya Pernyataan Pendapat termaksud diatas, DPR-GR telah memutuskan pula untuk mengirimkan sebuah team untuk ber-sama dengan Pemerintah mengamankan suksesnya PEPERA di Irian Barat.

Selain dari itu team tsb. ditugaskan pula untuk memperoleh bahan² guna menghadapi follow up selanjutnya setelah selesainya PEPERA termaksud nanti.

Guna memudahkan pelaksanaan tugasnya maka team dibagi dalam dua bagian, yaitu Team A dan Team B.

Team A terdiri dari 7 orang anggota DPR-GR dan dipimpin oleh Subagio Reksodipuro S.H.

Team B terdiri dari 6 orang anggota dan dipimpin oleh G.H. Mantik

Sebagai hasil djerih pajah Pemerintah yang setjara kompak mendapat dukungan sepenuhnya dari pada DPR-GR dan seluruh rakyat Indonesia untuk mensukseskan PEPERA, maka rakyat di Irian Barat, melalui Dewan Musjawarah Depera disemua Kabupaten yang ada disana, telah memutuskan, untuk tetap bergabung dengan Republik Indonesia !

Keputusan tersebut kemudian diperkuat oleh keputusan rapat DPRD Propinsi Irian Barat tgl. 5 Agustus 1969, yang setjara aklamasi dapat menerima baik hasil² pelaksanaan PEPERA di Irian Barat, beserta follow up-nya dibidang otonomi pemerinthan serta pembangunan di Irian Barat.

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan PEPERA pun DPR-GR telah menjatakan dukungannya dengan diadakannya suatu usul Pernyataan Pendapat dari Subagio Reksodipuro S.H. dkk yang disetujui dalam rapat pleno pada tanggal 18 September

1969. Diktum Pernyataan Pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut :

1. Memandjatkan sjukur kepada Tuhan Jang Maha Esa jang sudah melimpahkan Rahmat-Nja kepada Pemerintah dan Rakjat Indonesia sehingga dapat melaksanakan Penentuan Pendapat Rakjat di Irian Barat se-baik²nja.
2. Dengan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakjat di Irian Barat dari tanggal 14 Djuli sampai dengan tanggal 2 Agustus 1969 jang berachir dengan Keputusan Dewan² Musjawarah Penentuan Pendapat Rakjat menjatakan bahwa daerah Irian Barat tetap berada dalam wilajah R.I. jang berdjalan dengan demokratis, bebas terbuka, lantjar dan terang; R.I. telah memenuhi Persetudjuan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland mengenai Irian Barat dan dengan demikian menghormati hukum internasional.
3. Hasil Penentuan Pendapat Rakjat di Irian Barat tersebut diatas wadajib diakui dan ditaati oleh fihak² jang bersangkutan.
4. Hasil Penentuan Pendapat Rakjat di Irian Barat sesuai dengan Persetudjuan antara R.I. dengan keradjaan Nederland mengenai Irian Barat merupakan sumbangan penting bagi terpeliharanja perdamaian di Asia Tenggara chususnja dan perdamaian dunia umumnja.
5. Menghargai Pemerintah Indonesia jang telah melaksanakan Penentuan Pendapat Rakjat dengan berhasil sehingga Irian Barat tetap merupakan bagian R.I. sesuai dengan Undang² Dasar 1945.
6. Jakin bahwa dengan langkah² jang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam mewujudkan otonomi bagi Irian Barat akan segera tertjipta kemadjuan² dalam bidang pembangunan.
7. Mengutjapkan terima kasih dan penghargaan se-tinggi²nja kepada seluruh Rakjat Indonesia di Irian Barat jang telah memenuhi Persetudjuan antara R.I. dan Keradjaan Nederland mengenai Irian Barat dengan semangat Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
8. Menjampaikan penghargaan atas pendirian Perserikatan Bangsa² untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat dengan tjara damai serta atas pengertian baik dan kerdja sama

Sekretaris Djenderal Perserikatan Bangsa² dan Wakilnja baik dalam persiapan² jang dilakukan maupun dalam pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakjat dalam rangka Persetujuan antara R.I. dan Keradjaan Nederland mengenai Irian Barat.

Peristiwa besar ini diterima dengan rasa lega dan bangga oleh seluruh Bangsa Indonesia, jang tetap ingin mempertahankan adanya suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia jang berwilajah dari Sabang sampai ke Merauke.

§ 6. HASIL-HASIL PEKERDJAAN DPR-G.R.

Untuk mendapatkan gambaran tentang hasil² pekerdjaan DPR-GR maka dibawah ini akan diuraikan menurut Masa Persidangannya sbb.

- a. Mengenai Masa Persidangan ke-I Tahun Sidang 1966-1967, jang berlaku mulai tgl. 16-8-1966 s/d 30-9-1966.

Pada Masa persidangan tsb DPR-GR telah mengesahkan sebanyak 4 buah RUU, yakni :

1. RUU tentang pembentukan Pengadilan Tinggi di Ambon dan perubahan daerah hukum Pengadilan Tinggi Makassar (UU. No. 4/1966).
 2. RUU tentang peraturan pemberian tundjangan bersifat pensiun dan tundjangan kepada Anggota Militer Sukarela (UU No. 6/1966).
 3. RUU Usul Inisiatif tentang kedudukan MPRS/DPRGR mendjelang pemilihan umum (UU No. 10/1966).
 4. RUU tentang Normalisasi hubungan antara Republik Indonesia dan Malavsia (U.U. No. 5/1966).
- b. Dalam Masa Persidangan ke-II, berlaku mulai tgl. 24-10-1966 s/d 24-12-1967 telah disahkan 9 RUU, yakni :
- a. RUU tentang APBN 1967 (U.U. No. 14/1967).
 - b. RUU tentang Perubahan dan tambahan APBN tahun 1965 ((U.U. No. 12/1966).
 - c. RUU tentang perubahan dan tambahan atas anggaran Moneter tahun 1966, sebagaimana ditetapkan dengan U.U. No. 22/1965 (No. 13/1966).
 - d. RUU tentang persetujuan Pemerintah R.I. dengan Kera-djaan Belanda tentang soal² keuangan (UU No. 7/1966).

- e. RUU tentang keanggotaan R.I. dalam Bank Pembangunan Asia (U.U. No. 8/1966).
- f. RUU tentang kembalinja R.I. dalam Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan (U.U. No. 9/1966).
- g. RUU Usul. Inisiatif tentang pokok² Pers.
- h. RUU tentang penanaman modal Asing.
- i. RUU tentang perubahan Undang² No. 9/1966 tentang keanggotaan kembali R.I. dalam Internasional Monetary Fund and Internasional Bank for Reson Reconstruction and Developement (U.U. No. 2/1967).
- c. Dalam Masa Persidangan ke-III, berlaku mulai tanggal 23-1-1967 s/d 22-4-1967 telah disahkan 3 RUU, yakni :
 - a. RUU tentang Dewan Pertimbangan Agung (UU No.3/1967).
 - b. RUU tentang Ketentuan² Pokok Kehutanan (UU No. 4/1967).
 - c. RUU penjempurnaan terhadap Undang² tentang Keten-
tuan² Pokok Pers. (U.U. No. 11/1966).
- d. Dalam Masa Persidangan ke-IV, berlaku mulai tgl 22-5-1967 s/d 29-7-1967 telah disahkan 4 RUU, yakni :
 - a. RUU tentang Ketentuan² Pokok Peternakan dan Kese-
hatan Chewan (U.U. No. 6/1967).
 - b. RUU tentang Veteran R.I. (U.U. No. 7/1967).
 - c. RUU tentang perubahan dan penjempurnaan Tata-tjara
pemungutan Pajak Pendapatan 1954, Pajak Kekajaan
1932 dan Pajak Perseroan 1925 (U.U. No. 8/1967).
 - d. RUU tentang Mengubah U.U. No. 25/1959 jo. U.U. No
14/1964 dan pembentukan Propinsi Bengkulu (U.U.
No.9/1967).

Selain dari itu DPR-GR telah menjetudjui 3 buah Usul Reso-
lusi, jaitu :

1. Usul Resolusi Imron Rosjadi dkk. tentang dukungan
Rakjat Indonesia terhadap perdjuaan Negara² Arab
melawan serangan agresif Israel.
2. Usul Resolusi M.J. Effendi Nasution dkk. tentang pemu-
tusan hubungan diplomatik dengan R.R.T.
3. Usul Resolusi Mustafa Supangat dkk. tentang follow up
pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XXXIII.

Masa Persidangan ke-I Tahun Sidang 1967-1968 dimulai pada tgl. 16-8-1967 dan berakhir pada tgl. 23-9-1967.

Mengenai masa Persidangan ke-I dapat ditatat beberapa hal yang penting, yaitu :

1. Pejabat Presiden menjampai Pidato Kenegaraan di depan DPR-GR,
2. Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I. yang diselenggarakan digedung DPR-GR dan
3. Dimulainya persidangan baru DPR-GR Tahun Sidang 1967-1968.

Selanjutnya dalam Masa Persidangan ke-I tsb DPR-GR telah dapat mengesahkan satu RUU, yakni RUU tentang Perubahan dan Tambahan atas Anggaran Moneter tahun anggaran 1966, sebagaimana dengan U.U. No. 22/1965 dan telah diubah dan ditambah dengan U.U. No. 13/1966 (U.U. No. 10/1967).

Selain dari itu oleh DPR-GR telah diterima pula beberapa Usul Resolusi, yaitu :

1. Usul Resolusi Drs. Chalik Ali dkk. tentang pemulihan hubungan diplomatik R.I. dengan Malaysia dan pertukaran Perwakilan R.I. — Singapura.
2. Usul Resolusi Sugeng Surjadi terhadap Pidato Kenegaraan Pd. Presiden di depan DPR-GR tentang dukungan DPR-GR tgl 16-8-1967.

Masa Persidangan ke-II dimulai tgl. 16-10-1967 berakhir pada tgl. 23-12-1967 Kegiatan² daripada DPR-GR dalam Masa Persidangan ini selainnya ditunjukkan untuk mengesahkan beberapa RUU menjadi Undang² pula ditekankan kepada pembijaksanaan dan pengesahan RUU tentang APBN 1968.

Dengan demikian DPR-GR dapat mengesahkan 4 buah RUU menjadi Undang², yakni :

1. RUU tentang Ketentuan² Pokok Pertambangan (U.U. No. 11/1967).
2. RUU tentang Pokok² Perkoperasian (U.U. No. 12/1967).
3. RUU tentang Pokok² Perbankan (U.U. No. 14/1967).
4. RUU tentang APBN tahun 1968 (U.U. No. 13/1967).

Dalam masa persidangan DPR-GR ke-III tahun sidang 1967-1968 sebagai hasil bersama antara DPR-GR dengan Pemerintah telah disahkan dua buah RUU, yaitu :

1. RUU tentang Perubahan Pasal 3 ayat (2) Undang² Pajak Pendjualan 1951.
2. RUU tentang Perubahan Pasal 3 ayat (2) Undang² No. 13 tahun 1967 tentang APBN tahun 1968.

Disamping itu telah pula diselesaikan Pernyataan Pendapat DPR-GR tentang Penjajaran Lembaga² Negara dan Sidang Umum ke-V MPRS yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Peraturan Tata-tertib baru DPR-GR, yang memuat ketentuan² tentang tugas² utama DPR-GR dalam bidang budget, legislatif dan kontrol. Ketentuan tersebut merupakan peningkatan wewenang daripada Panitia Anggaran yang tidak hanya memberikan „pendapat”, tetapi pula membuka kemungkinan mengadakan penelitian mengenai pertanggung-jawab APBN dan memeriksa laporan Badan Pemeriksa Keuangan tentang tanggung jawab keuangan Negara seperti dimaksud dalam pasal 23 ayat (5) Undang² Dasar 1945. Dengan demikian maka kepada Panitia Anggaran dalam hal penyelesaian Nota Keuangan dan Penyelesaian RAPBN diberi wewenang yang sama seperti wewenang Bagian² DPR-GR..

Dalam masa Persidangan ke-IV kegiatan² DPR-GR yang menonjol ialah tentang disahkannya hasil² daripada Panitia Anggaran DPR-GR.

Maksud untuk mengadakan Panitia Angket DPR-GR adalah guna mengadakan penelitian atas perusahaan² Negara.

Gagasan untuk mengadakan Panitia tersebut ditjetuskan pada tanggal 5 Pebruari 1967 oleh anggota Murtadji Bisri bersama² 32 anggota lainnya dalam suatu rapat Gabungan Komisi² dalam rangka pemitjaraan masalah Penjesuaian Harga dan Tarif yang diadakan dengan Pemerintah. Gagasan tersebut mendapat sambutan yang hangat dikalangan para Anggota, yang kemudian dituangkan dalam sebuah Usul Pembentukan Panitia Angket yang ditanda-tangani oleh 32 orang Anggota yang mewakili segenap Golongan.

Usul tentang pembentukan Panitia Angket tersebut pada tanggal 14-4-1967 disetujui oleh rapat pleno DPR-GR hingga terbentuklah Panitia Angket Aparatur Perekonomian Negara berdasarkan Undang² No. 6/1954 tentang Hak Angket DPR. Panitia ini diberi batas waktu bekerdja selama 3 bulan, terhitung mulai tanggal 14 April 1967.

Atas dasar keputusan itu maka disusunlah keanggotaan Panitia Angket yang terdiri dari 25 orang Anggota yang mewakili segenap Golongan.

Panitia Angket dibantu oleh sebuah Team Ahli yang semula berdjumlah 8 orang dan kemudian ditambah menjadi 19 orang. Disamping Team Ahli Panitia Angket dibantu oleh sebuah Team Khusus dari Biro Pusat Statistik yang berdjumlah 11 orang dan berkewajiban mengolah data² yang diperoleh dari jawaban atas Questionnaires Umum maupun Khusus.

Panitia Angket Aparatur Perekonomian Negara dibagi dalam 5 bidang yang meliputi :

Bidang I , Perdagangan, Perbankan dan Asuransi.

Bidang II , Pertanian dan Perkebunan.

Bidang III, Industri.

Bidang IV, Perhubungan dan Maritim dan

Bidang V , Perusahaan Daerah dan lain²

Adapun jumlah questionnaires Umum yang disampaikan oleh Panitia Angket adalah sebanyak 621 buah dan yang dikembalikan dengan jawaban ada 455 buah, yang berarti $\pm 72\%$. Questionnaires Khusus yang dikirimkan ada sebanyak 606 buah dan yang dikembalikan dengan jawaban ada 337 buah atau $55\frac{1}{2} \%$.

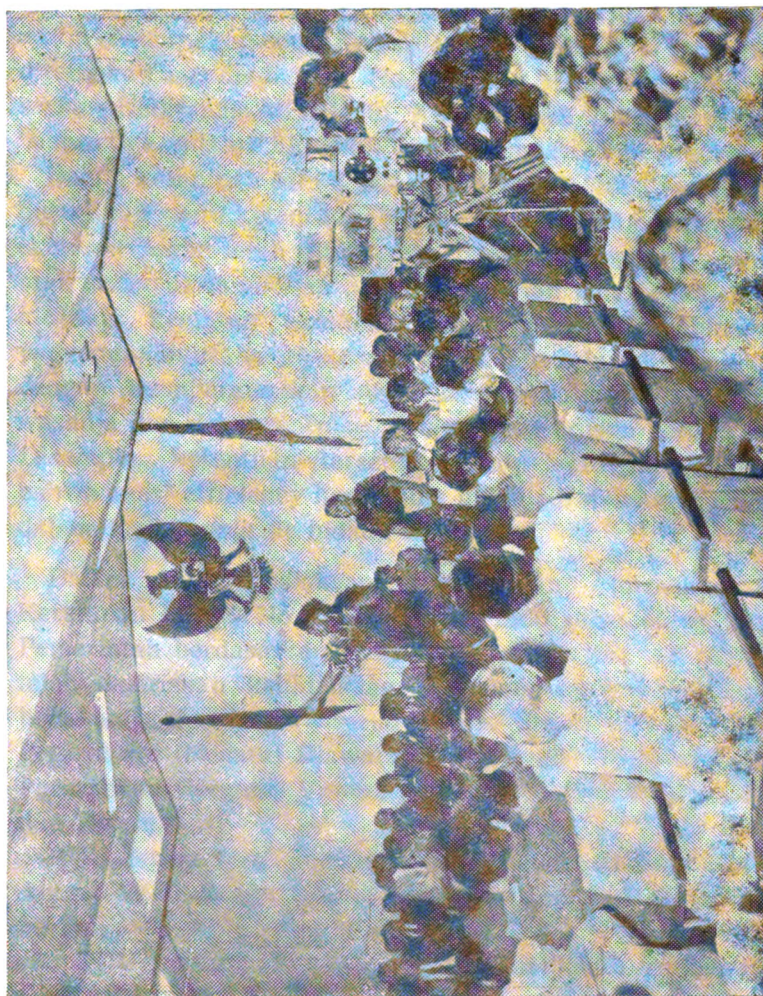
Pada akhirnya Panitia Angket menjimpulkan untuk menjajarkan kepada DPR-GR hal² sebagai berikut :

1. Bahan² yang tersebut dalam final report sebaiknya menjadi bahan pembahasan dalam DPR-GR untuk diadakan follow-up selanjutnya, termasuk diantaranya penggantian Undang² No. 19/1960 Prp. tentang Perusahaan Negara.
2. Meminta perhatian khusus tentang saran² yang terdapat dalam final report.
3. Mengenai beberapa masalah tentang perusahaan Negara disarankan untuk dibicarakan dalam suatu rapat tertutup, karena hal itu mempunyai arti penting dalam rentjana pembangunan dan penjusunan RAPBN 1969.
3. Dalam hubungannya dengan hasil² Panitia Angket oleh Pimpinan DPR-GR dibentuk Team Follow-up Hasil Karya Panitia Angket yang anggotanya terdiri dari ex-Pimpinan Panitia Angket Aparatur Perekonomian Negara, dengan Surat Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 45/Pimp/IV/67-68 tanggal

10 Djuli 1968, dengan tugas membantu Pimpinan DPR-GR dalam rangka menjiapkan Follow-up hasil karya Panitia Angket.

4. Team Follow-up Hasil karya Panitia Angket telah 5 kali mengadakan rapat, baik rapat sendiri maupun dengan Pimpinan DPR-GR dan pertemuan segi tiga dengan Djaksa Agung dan Pemerintah.
 - a. Dalam pertemuan dengan Djaksa Agung pada tanggal 24 September 1968 telah disanggupkan oleh Djaksa Agung untuk memberikan bantuannja dalam masalah questionnaires jang belum dikembalikan oleh berbagai PN. Tjampur tangan Djaksa Agung ini memberikan hasil pula dengan masuknja lagi sedjumlah djawaban atas questionnaires jang telah dikirim, wa'aupun djawaban² tersebut tidak bisa diolah lagi oleh Panitia Angket jang telah dibubarkan.
 - b. Pertemuan Segi Tiga antara Pimpinan DPR-GR, Team Follow-up Hasil Karya Panitia Angket dan Pemerintah c.q. Menteri Tenaga Kerdja dan Menteri Negara Penjem-purnaan Aparatur Negara telah diadakan pada tanggal 6 Februari 1969.

Dalam pertemuan tersebut oleh fihak Pemerintah diterangkan bahwa RUU tentang Pokok² Perusahaan Negara sebagai pengganti Undang² No. 19/1960 Prp kini sudah ditangan Presiden dan diharapkan agar hasil karya Panitia Angket Aparatur Perekonomian Negara selekasnja dapat menjadi produk formil DPR-GR dan disampaikan kepada Pemerintah.
5. Pada tanggal 6 Maret 1969 diadakan rapat pleno tertutup untuk mengadakan pemandangan umum para anggota mengenai hasil karya Panitia Angket tetapi atas permintaan Menteri Tenaga Kerdja kemudian ditunda sampai datangnya Menteri Penjemputan Aparatur Negara jang pada waktu itu masih berada diluar negeri.
6. Achirnja diputuskan untuk menjadikan hasil karya Panitia Angket tersebut sebagai atjara rapat pleno DPR-GR. Dalam rapat pleno (tertutup) jang diadakan pada tanggal 29-3-1970 diputuskan menerima hasil karya Panitia Angket dan menjerahkannya kepada Pemerintah.



Djakarta, 16 Agustus 1966.

Pidato terakhir Presiden Soekarno dimuka sidang DPR-GR Sonajan.

„Foto Deppen” 65-14539.

Sehubungan dengan hasil Panitia Angket Khususnja mengenai Perusahaan² Negara maka oleh Pemerintah a.l. telah diadjukan sebuah RUU tentang bentuk² Perusahaan Negara kepada DPR-GR jang disebut RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² No. 1 tahun 1969. Tudjuan daripada RUU termaksud adalah untuk menjeragamkan baik tjara mengurus dan menguasai maupun bentuk-hukum dari usaha² Negara tersebut. Kemudian disetudjui oleh DPR-GR dan ditetapkan mendjadi U.U. No. 9 tahun 1969. Perpu itu berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Dalam ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tersebut telah digariskan suatu ketentuan, bahwa peranan Pemerintah dibidang ekonomi harus lebih ditekankan pada pengawasan arah kegiatan ekonomi dan bukan pada penguasaan jang sebanjak mungkin dari kegiatan² ekonomi. Dalam rangka pembinaan dan pengendalian usaha² Negara, ketentuan tersebut diselenggarakan dengan mempergunakan azas² de-birokratisasi dalam pengawasanja dan dekonsentrasi dalam pengurusan/pengelolaannja. Disamping ketentuan tersebut diatas, telah pula digariskan bahwa azas² efficiency harus pula mendjadi patokan Pemerintah dalam kegiatannja di bidang ekonomi.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan² termaksud dalam Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tersebut diatas, oleh Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden No. 17 tahun 1967 telah digariskan kebidjaksanaan untuk menggolongkan/membedakan usaha² Negara setjara tegas² dalam tiga bentuk, yakni Perusahaan (Negara) Djawatan, Perusahaan (Negara) Perseroan Perusahaan (Negara) Umum, disingkat dengan Perdjan, Persero dan Perum.

RUU-2 jang telah mendapat pengesahan dalam masa Persidangan ke-IV tahun Sidang 1967-1968 tersebut adalah sebagai berikut :

1. RUU tentang Perubahan dan Tambahan Anggaran Mometer 1966.
2. RUU tentang Pokok² Pertambangan.
3. RUU tentang Pokok² Perkoperasian.
4. RUU tentang Pokok² Perbankan.

5. RUU tentang APBN 1968.
6. RUU Usul Inisiatif tentang Pembentukan Dati II Purwakarta dan Subang.
7. RUU tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
8. RUU tentang Penindjauan Kembali Pasal 3 Undang² No 6 tahun 1962 tentang Wabah.
9. RUU tentang tambahan dan perubahan APBN tahun 1967.
10. RUU tentang Keanggotaan R.I. pada Internasional Development Association.
11. RUU tentang Persetudjuan atas Konvensi tentang Penjelsaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal.

Disamping ini DPR-GR telah pula menerima 6 buah Resolusi ialah :

1. Resolusi tentang Pedjabat Presiden.
2. Resolusi tentang hubungan R.I. — R.R.T.
3. Resolusi tentang Dukungan Rakjat Indonesia terhadap Negara² Arab melawan serangan agresri Israel.
4. Resolusi tentang normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia.
5. Resolusi tentang dukungan DPR-GR terhadap Pidato Kene-garaan Pd. Presiden didepan DPR-GR tanggal 16-8-1967.
6. Resolusi tentang pentjairan Lembaga² Negara dan Sidang Umum ke-V MPRS.

Mengenai aktivitas DPR-GR dalam masa Persidangan ke-I tahun Sidang 1968-1969 dapat dikemukakan hal² sbb :

Berdasarkan Pasal 104 ayat (3) Tata-tertib DPR-GR jang berbunji : „Pada hari permulaan tahun sidang, Presiden/Kepala Negara memberikan Amanatnja dihadapan DPR-GR sebagai pengantar Nota Keuangan dan Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara mengenai tahun dinas jang akan datang”.

Akan tetapi berhubung dengan adanja rentjana Pemerintah untuk merubah Tahun Anggaran jang pada prinsipnja DPR-GR djuga tidak berkeberatan, maka amanat Presiden tersebut tidak lagi berisikan Nota keuangan dan RAPBN tahun dinas j.a.d., melainkan berisi keterangan Pemerinthh tentang RAPBN Per-alihan jang akan berlaku dari bulan Djanuari 1969 s/d bulan Maret 1969 serta pertanggungan djawab mengenai realisasi

APBN tahun 1967 dan juga pendjelasan Program Kabinet dalam hubungannya dengan Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Disamping itu DPR-GR berusaha untuk menyelesaikan beberapa RUU-2 diantaranya RUU tentang Susunan MPR, DPR, dan DPRD dan RUU tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan yang akan disahkan ber-sama² dengan RUU tentang Pemilihan Umum yang telah selesai pembahasannya. Dalam bidang kesejahteraan yang meliputi masalah sosial, kebudayaan maupun pendidikan akan ditjoba untuk menyelesaikan RUU tentang Pokok² Pendidikan dan RUU tentang Pernikahan Umat Islam. Dalam tata-pemerintahan diusahakan untuk diselesaikan pembitjaaran RUU tentang Kedudukan dan Hubungan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, RUU tentang Daerah Swatantra. RUU tentang Perimbangan antara Pemerintah dan Daerah Swatantra.

DPR-GR selama reses masa persidangan ke-I tersebut telah pula mengadakan penindjauan² ke-daerah² yang dilaksanakan oleh Badan² Kelengkapannya, jaitu oleh Komisi² dan Bagian².

Aktivitas tersebut diatas belum menghasilkan U.U., Resolusi dllnya.

Selama masa sidang ke-II aktivitas² DPR-GR meliputi penyelesaian hal² sebagai berikut :

1. RUU tentang pembentukan Pengadilan Tinggi di Menado dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Makasar.
2. RUU tentang pengesahan atas Perpu No. 1/1966 tentang Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksa.
3. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Atjeh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Medan.
4. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Djakarta.
5. RUU tentang Bintang Jalasena.
6. RUU tentang Bintang Swa Bhuwana Paksa.
7. RUU tentang APBN Peralihan tahun 1968 untuk masa 1/1-1969 s/d 31/3-1969.
8. Usul Pernjataan Pendapat tentang Pelaksanaan Hukuman Mati terhadap 2 Sukarelawan/Anggota ABRI oleh Pemerintah Singapura.

Dalam masa Persidangan tahun Sidang ke-III DPR-GR menundukkan kegiatan² sebagai berikut :

- menjelesaikan tanggapan mengenai Repelita yang telah diuraikan pada paragraf 4 Bab ini,
- menjelesaikan APBN 1969-1970 yang merupakan tahun I pelaksanaan Repelita.

Dalam masa persidangan tersebut DPR-GR telah dapat menjelesaikan pula :

1. RUU tentang Pernyataan tidak berlakunya Undang² No. 2/1958 tentang Persetujuan Perdjudjian antara R.I. dan R.R.T. mengenai Dwikewarganegaraan.
2. RUU tentang Persetujuan atas Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 120 mengenai Hygiene dalam perniagaan dan kantor².

Mengenai persoalan Hadji sebelum Pemerintah mengeluarkan peraturan² untuk masalah diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun oleh pihak² swasta yang pula diberi kesempatan ikut serta melaksanakannya.

Dalam hubungan ini dimana² dibentuk jajaan² hadji, a.l. Jajaan Hadji Indonesia, Mukersa Hadji, Husami, Ja Mualim, Al Amin dll.

Jajaan² Hadji tsb dalam melaksanakan tugasnya saling bersaing untuk mendapatkan djumlah djemaah se-besar²nja. Dengan demikian timbullah hal² yang tidak diinginkan, a.l. mengedjar keuntungan se-banyak²nja.

Berhubung hal tersebut diatas setelah masalahnya dibawa kedalam DPR-GR dan mendapat tanggapan maka untuk dapat mengatasinya Pemerintah kemudian mengeluarkan Kep. Pres. No. 22/1969. Kep. Pres tsb. a.l. menetapkan bahwa seluruh penjelenggaraan Urusan Hadji dilaksanakan oleh Pemerintah.

Kep. Pres. No. 22/1969 ini disusul dengan In. Pres. No.6/1969 yang memuat petunjuk mengenai pelaksanaan penjelenggaraan Urusan Hadji.

In. Pres. tsb menetapkan bahwa :

- a. Penentuan kotum Hadji.
- b. Pembagian kotum Hadji.
- c. Penentuan ongkos naik Hadji.
- d. Penerimaan dan pendaftaran tjalon Djemaah Hadji.

- e. Penjetoran ongkos Hadji.
- f. Pengeluaran pas perdjalan Djemaah Hadji.
- g. Pengangkutan Djemaah Hadji.
- h. Pemeliharaan kesehatan.
- i. Pemeliharaan ketertiban.
- j. Lain² kegiatan jang ada hubungannja dengan Djemaah Hadji, dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pengaturan masalah Hadji oleh Pemerintah tsb banjak mendapat protes dan tantangan² dari Jajasan² Hadji jang ada. Protes ini telah pula disampaikan kepada Komisi IX DPR-GR. Dalam protes tsb a.l. diminta perhatian Pemerintah untuk menindjau kembali peraturan² jang telah dikeluarkan mengenai masalah Hadji. Diminta pula agar kepada badan swasta jang bonafide diberi kesempatan untuk ikut serta melaksanakan angkutan Hadji.

Tetapi Pemerintah tetap pada pendiriannja dan tidak mengizinkan badan² swasta menjelenggarakan urusan Hadji.

Meskipun demikian salah satu badan swasta urusan Hadji, yakni Husami tetap melaksanakan pemberangkatan Djemaah jaitu melalui pelabuhan Singapura ketanah Sutji. Tindakan tsb selainnja bertentangan dengan kebidjaksanaan Pemerintah pula telah melanggar peraturan² jang telah ada, chususnja mengenai lalu-lintas orang keluar negeri. Sebab paspor jang digunakan oleh para djemaah tsb tidak berlaku untuk Tanah Sutji, tetapi meskipun demikian digunakan untuk pergi kesana.

Untuk mengatasi masalah itu achirnja Presiden Suharto sendiri harus ikut tiampur tangan menjeleakkannja.

Kegiatan² DPR-GR dalam masa Persidangan ke-IV meliputi hal² sebagai berikut :

RUU-2 jang telah diselesaikan dan mendapat pengesahan adalah :

1. RUU tentang Pentjabutan Peraturan Presiden No. 2/1959 Tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pedjabat Negeri Warga² Indonesia. (U.U. No. 2/1970).
2. RUU tentang Pemberian Pensiun Pegawai dan Djanda Pegawai/Duda Pegawai. (U.U. No. 11 tahun 1969).
3. RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN (U.U. No. 8 tahun 1969).

4. RUU tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang². (U.U. No. 5 tahun 1969).
5. RUU tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang² dan Perpu. (U.U. No. 6 tahun 1969).
6. RUU tentang Penetapan berbagai Perpu menjadi Undang² (U.U. No. 7 tahun 1969).
7. RUU tentang Konvensi Internasional Telecommunication Union. (U.U. No. 10 tahun 1969).
8. RUU tentang Penetapan Perpu No. 1/1969 tentang Bentuk² Usaha Negara, dan
9. Disamping itu telah diselesaikan pula usul Pernyataan Pendapat tentang Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat. Selandjutnja kegiatan² DPR-GR yang meliputi masa sidang Ke-I tahun Sidang 1969-1970 meliputi antara lain hal² sebagai berikut :

DPR-GR telah menyelesaikan :

1. RUU tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten² Otonom Irian Barat. (U.U. No. 12 tahun 1969). dan Kabupaten-kabupaten Otonom Irian Barat. (U.U. No. 12 tahun 1969).
2. RUU tentang Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia tahun 1964. (U.U. No. 13 tahun 1969).

Selain dari itu telah diselesaikan pula 2 Pernyataan Pendapat.

1. Pernyataan Pendapat Subagia Reksodipuro SH dkk tentang pelaksanaan Pepera.
2. Pernyataan Pendapat Mansjur Sangkala dkk tentang Perhubungan Laut.

Disamping itu telah diselesaikan pula kurang lebih 12 RUU lainnja dalam pemitjaraan Tingkat IV, sedangkan persoalan² yang dibahas dalam Panitia Anggaran tersebut adalah mengenai :

1. Penjempurnaan prosedur RAPBN sesuai dengan Planning Programming Budgeting (P.P.B.).
2. Penjempurnaan pemitjaraan RAPBN dalam DPR-GR.
3. Penjempurnaan prosedur dan methode pengawasan pelaksanaan APBN.
4. Usul Inisiatif Undang² Pokok APBN.
5. Membitjarkan perhitungan anggaran tahun 1967.
6. Membitjarkan pelaksanaan APBN 1969/1970.

7. Mempersiapkan penjusunan RAPBN 1970/1971.
8. Membahas hasil² study-tour Pimpinan Harian Panitia Anggaran keluar negeri.
9. Membitjarakan laporan Pemerintah tentang pelaksanaan APBN 1969/1970 Triwulan I.

Kegiatan DPR-GR dalam masa Persidangan ke-II tahun sidang 1969-1970 ditandai oleh hal² sebagai berikut :

DPR-GR berusaha keras untuk menjelesaikan ketiga RUU tentang Pemilihan Umum anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat, R.U.U. tentang Susunan Anggota MPR/DPR/DPRD, R.U.U. tentang Kepartaian, Keormasan, Kekaryaan jang merupakan satu paket. Dalam hubungan ini maka dalam masa persidangan ke II ini diadakan persiapan-persiapan pekerdjaan kearah penjelesaian ketiga R.U.U. itu, antara lain Panitia Khusus 3 RUU harus standby di Djakarta dengan maksud agar dapat melantjarkan pembitjaraan RUU-2 Pemilu dalam persidangan ke-II ini.

Dalam rangka ini oleh Kepala Negara Presiden Soeharto telah diadakan pertemuan puntjak Partai² Politik dan Ormas², dimana antara lain telah dibitjarakan pula soal² sekitar Pemilihan Umum.

Penindjauan² jang biasanja dilakukan dalam masa-masa reses, tetapi dalam masa reses ini tidak diadakan penindjauan, baik oleh Komisi² maupun Bagian² Kelengkapan lainnja. sebab reses tersebut hanja berlangsung sangat pendek.

Pengetjuaian dari ketentuan tersebut, diadakan bagi Komisi² jang akan melakukan penindjauan atas undangan Pemerintah.

Masa persidangan DPR-GR ke-II adalah agak pendek, jaitu berlangsung selama lebih kurang satu bulan, berhubung adanja bulan Ramadhan/Puasa dan djuga supaja masa persidangan ke-III DPR-GR akan memperoleh tjukup waktu membitjarakan R.A.P.B.N. 1970/1971, sehingga R.A.P.B.N. tersebut sudah dapat disjahkan sebelum 1 April 1970.

Dalam masa persidangan tersebut RUU jang telah disjahkan ada 4 buah, jaitu :

1. RUU tentang ketentuan Pokok² Tenaga Kerdja. (U.U. No. 14 tahun 1969).
2. RUU tentang Keselamatan Kerdja. (U.U. No. 1 tahun 1970).

3. RUU tentang Pemilihan Umum Anggota² Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakyat. (U.U. No. 15 tahun 1969).
4. RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD. (U.U. No. 16 tahun 1969).

Dalam pembahasan RUU tentang Pemilu, menonjol olehnya didalam DPR-GR memakan waktu banjak sekali. Hal ini memang tidak mengherankan berhubung Parpol²/Golkar² yang mempunyai wakil dalam DPR-GR menganggap RUU Pemilihan sebagai suatu landasan untuk memperjuangkan atau mempertahankan aspirasi politiknya masing² dimasa depan.

Maka untuk memberikan sekedar gambaran tentang pembicaraan² dalam DPR-GR sampai disahkannya RUU tentang Pemilihan Umum tersebut, dibawah ini diuraikan setjara singkat sedjarah dari mulai masuknya kedalam DPR-GR sbb. :

1. Dengan surat Amanat Presiden tertanggal 24 Nopember 1966, No. 1629/HK/66, telah disampaikan kepada DPR-GR 3 RUU yang merupakan satu paket terdiri dari :
 - RUU tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan.
 - RUU tentang Pemilihan Umum Anggota² Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakyat.
 - RUU tentang Susunan Majelis Permusjawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Dalam rapat Panitia Musjawarah DPR GR yang diadakan pada tanggal 25 Djanuari 1967 telah diputuskan bahwa guna membahas 3 RUU tersebut diatas perlu dibentuk suatu Panitia Khusus.
3. Panitia Khusus 3 RUU tersebut, disahkan oleh rapat pleno DPR-GR pada tanggal 30 Djanuari 1967, dengan surat keputusan No. 10/DPRGR/III/66-67.
4. Panitia Khusus 3 RUU mulai mengadakan sidangnja yang pertama pada tanggal 1 Pebruari 1967.
5. Pembahasan 3 R.U.U. ini dimulai menurut peraturan Tata-tertib DPR-GR tahun 1966, yang mengatur pembicaraan sesuatu R.U.U. dalam 6 (enam) tingkat. Setelah Peraturan Tata-tertib tahun 1968 berlaku pembicaraan belum selesai. Oleh karena pembicaraan tingkat IV dan V dilakukan menurut Peraturan Tata-tertib 1968 yang hanya mengenal tinggal pembicaraan sampai dengan tingkat V.

Pembitjaraan tingkat I sampai dengan IV tidak memakan waktu lama, hanya k.l. 2 bulan sadja.

6. Pembitjaraan Tingkat V menurut Peraturan Tata-tertib DPR-GR tahun 1966, jang kemudian mendjadi pembitjaraan Tingkat IV menurut ketentuan Peraturan Tata-tertib DPR-GR tahun 1968, adalah pembitjaraan antara Panitia Khusus 3 RUU bersama Pemerintah, jang disebut Rapat Kerdja. Dalam prakteknja pembitjaraan Tingkat IV ini tidak selalu dilakukan ber-sama² dengan Pemerintah, melainkan kadang² dilakukan antara Panitia sendiri, untuk mempersiapkan hal sesuatunja jang nantinja akan disampaikan kepada Pemerintah.
7. Semula jang digarap terlebih dulu dalam rapat² bersama Pemerintah adalah RUU tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan. Ternjata pembitjaraannya mengalami kesulitan jang disebabkan o'eh adanya perbedaan² pendapat jang sukar dipertemukan. Dan sesudah lebih dari satu bulan belum diuga nampak tanda bahwa pembitjaraan akan berdjalan bertambah lantjar, maka pembitjaraan dialihkan pada 2 (dua) RUU jang lain, jaitu RUU tentang Pemilihan Umum dan RUU tentang susunan MPR, DPR dan DPRD.
8. Penggarapan RUU tentang Pemilihan Umum dan RUU tentang Susunan MPR, DPR dan DPRD pun ternjata tidak lantjar. Untuk memperlantjar tertjapainja konsersus² jang diperlukan kadang² ditempuh tjara² jang sifatnja informil, misalnja dengan mengadakan „perundingan segi-tiga”, yakni perundingan antara Pimpinan DPR-GR. Pimpinan Panitia Khusus 3 RUU ditambah Pimpinan Fraksi² dan Pemerintah.
9. RUU tentang Pemilihan Umum telah dapat diselesaikan penggarapannya oleh Panitia Khusus 3 RUU bersama Pemerintah pada tanggal 27-11-1967. Menurut rentjana pada waktu itu RUU tersebut akan disahkan dalam rapat pleno DPR-GR hari itu djuga. Tetapi berhubung pada waktu itu ternjata terdapat dua pendirian jang saling berbeda untuk pengesahan RUU tentang Pemilu tersebut ditunda. Dalam rapat Panitia Musjawarah tanggal 8-12-1967 oleh Kelompok² telah ditjapai suatu konsensus jang kemudian

ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPR-GR tanggal 16-12-'67 No. 20/Pimp/II/67-68, yang antara lain menentukan :

- a). RUU tentang Pemilu akan disahkan ber-sama² dengan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.**
- b). Materi RUU Pemilu yang sudah selesai tidak akan dipersoalkan lagi.**
- c). 12 pokok konsensus yang telah ditjapai antara Panitia Khusus 3 RUU dan Pemerintah tetap dipegang teguh dan tidak akan diadakan perubahan².**

Isi dari 12 konsensus tersebut adalah sbb. :

- 1). djumlah anggota DPR tidak boleh ngambro-ambro;**
- 2). ada balance/perimbangan yang baik antara djumlah perwakilan Pulau Djawa dan Luar Djawa;**
- 3). faktor djumlah penduduk diperhatikan;**
- 4). adanja anggota yang diangkat disamping anggota yang dipilih;**
- 5). tiap Kabupaten didjamin minimal mendapat 1 (satu) wakil;**
- 6). persjaratan mengenai domisilie dihapuskan ;**
- 7). yang diangkat adalah perwakilan ABRI dan Non-ABRI telah disepakati untuk Non-ABRI harus non-massal;**
- 8). djumlah yang diangkat untuk MPR adalah $\frac{1}{3}$ dari seluruh anggota;**
- 9). djumlah anggota DPR ditetapkan 460 orang, terdiri dari 360 orang dipilih melalui pemilihan umum dan 100 orang diangkat;**
- 10). sistim pemilihan; proportional representation yang sederhana;**
- 11). stelsel pemilihan : lijsenstelsel ·**
- 12). daerah pemilihan : Daerah Tingkat I;**

Kepada Panitia Khusus 3 RUU ditugaskan untuk bekerdja terus melandjutkan penyelesaian RUU yang lain dalam waktu sesingkat mungkin.

- 10. Dalam triwulan pertama tahun 1968, Panitia tidak dapat bekerdja setjara penuh, dan hanja dapat bekerdja dari**



**DEMONSTRASI PELADJAR/MAHASISWA MENGGULINGKAN ORDE LAMA
TAHUN 1966.**

"FOTO HUMAS DPRGR".

tanggal 16 Djanuari sampai 5 Pebruari 1968. Sesudah itu kegiatannya terhenti lagi, berhubungan dengan terdjadinja refreshing anggota dan perubahan struktur DPR-GR, jaitu digantinja Peraturan Tata-tertib jang lama (1966) dengan jang baru (1968). Pula berhubungan diselenggarakan Sidang Umum V MPRS pada bulan Maret 1968. dimana segenap Anggota DPR-GR mendjadi pesertanja.

11. Baru pada awal bulan Mei 1968 Panitia dapat melakukan kegiatannya seperti biasa.
12. Achirnja pada tanggal 19 Nopember 1969, Panitia Khusus 3 RUU telah dapat menjelesaikan 2 (dua) diantara 3 RUU tersebut diatas, jaitu RUU tentang Pemilihan Umum dan RUU tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Mengenai komposisi keanggotaan Panitia Khusus 3 RUU dapat dituturkan, bahwa semula terdiri dari Wakil² Kelompok dan Golongan² jang ada dalam DPR-GR, jaitu :

Dalam komposisi tersebut tiap golongan mendapat 1 wakil, sedangkan kelompok² mendapat sedjumlah wakil jang seimbang dengan djumlah anggota kelompok.

I. Golongan Islam	1 orang
a. Kelompok N.U.	5 orang
b. Kelompok P.S.I.I.	2 orang
c. Kelompok PERTI	1 orang
II. Golongan Nasionalis	1 orang
a. Kelompok P.N.I.	5 orang
b. Kelompok I.P.K.I.	1 orang
c. Kelompok MURBA	1 orang
III. Golongan Kristen/Katholik	1 orang
a. Kelompok Katholik	1 orang
b. Kelompok Parkindo	2 orang
IV. Golongan Karya	1 orang
a. Kelompok ABRI	8 orang
b. Kelompok Materiil	4 orang
c. Kelompok Spirituil	6 orang
d. Kelompok Kerochianian	4 orang

Maka dengan demikian djumlah seluruh anggota Panitia adalah sebanyak 45 orang.

Berhubung adanya pembaharuan anggota² DPR-GR komposisi keanggotaan Panitia Khusus diubah dengan Surat Keputusan Pimpinan DPR-GR tanggal 23 Agustus 1969 No. 8/Pimp/1/69-70 dirubah sehingga menjadi sebagai berikut :

I. Fraksi P.N.I.	6 orang.
II. Fraksi MURBA	1 orang.
III. Fraksi IP-KI	2 orang.
IV. Fraksi N.U.	6 orang.
V. Fraksi P.S.I.I.	2 orang.
VI. Fraksi PERTI	1 orang.
VII. Fraksi P.M.I.	2 orang.
VIII. Fraksi Katholik	2 orang.
IX. Fraksi Parkindo	2 orang.
X. Fraksi ABRI	6 orang.
XI. Fraksi Karya Pembangunan A	4 orang.
XII. Fraksi Karya Pembangunan B	4 orang.
XIII. Fraksi Karya Pembangunan C	3 orang.
Semuanya berdjumlah	41 orang anggota.

Panitia Khusus 3 RUU bersama Pemerintah dalam waktu 10 bulan telah mengadakan rapat kerdja sebanyak 96 kali dan dapat menyelesaikan RUU tentang Pemilihan Umum. Sedianja RUU tersebut akan disahkan dalam rapat pleno tanggal 27-11-1967, akan tetapi karena pada waktu itu ada kelompok² jang mengusulkan agar pengesahan RUU tentang Pemilu dilakukan ber-sama² dengan pengesahan RUU tentang Susunan dan kedudukan MPR,DPR dan DPRD, maka setelah soal itu dibitjarakan dengan wakil² Kelompok, pengesahan RUU tentang Pemilu disetujui untuk ditunda hingga selesainya RUU tentang Susunan dan Keludukan MPR, DPR DPRD.

Dalam rangka pembahasan RUU Pemilu tersebut dapat dikatakan bahwa semua pihak, baik Pemerintah maupun semua Kelompok jang terdapat dalam DPR-GR telah banjak menjumbangkan pendapat pendirian dan konsepsinja masing² untuk kepentingan penyelesaian tugas membentuk 3 RUU tersebut.

Adapun mengenai perwakilan Daerah Irian Barat dalam rangka Pemilihan Umum tsb adalah sebagaimana ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 3 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang² No. 15 tahun 1969 tentang Pemi-

lihan Umum Anggota² Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat dan Undang² No. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, untuk Daerah Propinsi Irian Barat.

a. Sistim Pemilihan :

1. Ada jang menghendaki Sistim proportional representation.
2. Ada jang menghendaki Sistim Single member constituency.

Ada jang menghendaki menggunakan kombinasi antara kedua sistim tersebut diatas.

b. Stelsel Pemilihan.

1. Ada jang menghendaki Lisjten Stelsel (stelsel daftar).
2. Ada jang menghendaki Personen Stelsel (stelsel perseorangan).

c. Daerah Pemilihan.

1. Ada jang menghendaki Dati I sebagai Daerah Pemilihan.
2. Ada jang menghendaki Dati II sebagai Daerah pemilihan.
3. Ada jang menghendaki pembagian pertama pada Dati II, baru kemudian sisa dibagi setjara nasional.

d. Pengangkatan.

1. Ada jang menghendaki pengangkatan hanja untuk ABRI sadja.
2. Ada jang menghendaki pengangkatan untuk ABRI dan Non ABRI.

e. Utusan Daerah.

1. Ada jang menghendaki minimal 4, maksimal 6 orang (inclusive Gubernur/Kepala Daerah).
2. Ada jang menghendaki minimal 3, maksimal 6 orang. (inclusive (Gubernur/Kepala Daerah).
3. Ada jang menghendaki minimal 5, maksimal 7 atau 8 orang. (inclusive Gubernur/Kepala Daerah).
4. Ada jang menghendaki minimal 3, maksimal 5 orang. (exclusive Gubernur/Kepala Daerah).

f. Keanggotaan Gubernur di MPR.

1. Ada jang setuju dipilih sebagai Utusan Daerah.
2. Ada jang tidak setuju dipilih sebagai Utusan Daerah.

g. Utusan Golongan.

1. Ada jang menghendaki djaminan bagi Organisasi jang kalah.
2. Ada jang setuju djaminan bagi Golongan.
3. Ada jang setuju tanpa djaminan.

Tetapi disamping adanja „Crucial Points” jang berat² itu telah dapat ditjapai konsensus pada waktu itu. diantaranya ialah :

1. Djum'ah anggota DPR tidak boleh mengombro-ombro.
2. Ada balance/perimbangan jang baik antara djumlah perwakilan Pulau Djawa dan Luar Djawa.
3. Faktor djumlah penduduk diperhatikan.
4. Ada anggota jang diangkat disamping jang dipilih.
5. Tiap Kabupaten didjamin minimal mendapat 1 (satu) wakil.
6. Persjaraan mengenai domisilie tjalon diharapkan.

Adanja Crucial Points dan Consensus tersebut, ditambah lagi dengan telah dilampauinja batas waktu tentang diundangkannja Undang² Pemilu dan Undang² Susunan MPR, DPR, DPRD (menurut Ketetapan No. XI/MPRS/1966 harus sudah diundangkan pada bulan Djanuari 1967), maka pada waktu itu-lah terdjadi suatu peristiwa jang penting jang perlu mendapat perhatian dalam rangka „Law making proces”, jaitu dengan lahirnja satu forum permusjawaratan DPR-GR diluar ketentuan Peraturan Tata-tertib. Jang dimaksud disini ialah adanja pertemuan segi-tiga antara Pimpinan DPR-GR, Pimpinan Panitia Khusus 3 RUU dan Pemerintah, jang telah melahirkan „Paket Persetudjuan” mengenai :

1. Djumlah jang diangkat untuk MPR adalah $\frac{1}{3}$ dari se'uruh anggota.
2. Djumlah jang diangkat untuk DPR 100 anggota, sedang djumlah kursi untuk DPR adalah sebanyak 460.
3. Sistim pemilihan. proportional representation jang sederhana,
4. Stelsel pemilihan, lijsen-stelsel.
5. Daerah Pemilihan. Daerah Tingkat I.

Maka dengan adanja „Paket Persetudjuan” tersebut dapat dikatakan telah tertjapai pula suatu konsensus nasional dibidang pembuatan Undang², chusunja jang mengenai R.U.U. Pemilu

RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD; seperti yang diamanatkan oleh sidang umum ke-IV dan Sidang umum ke-V MPRS. Oleh karena kedua RUU tsb. adalah merupakan sarana konstitusional untuk terselenggaranya satu Pemilihan Umum untuk segera terbentuknya lembaga² Permusjawaratan/Perwakilan Rakyat dalam rangka kembali kepada pelaksanaan UUD 1945 setjara konsekwen.

Maka dengan demikian pembahasan RUU Pemilu dan RUU tentang susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD setelah dilakukan selama k.l. 3 tahun setjara non stop, akhirnya dapat diterima dan disahkan oleh DPR-GR. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat pleno DPR-GR tanggal 22 Nopember 1969.

Adapun alasan² yang menjebabkan pembahasan RUU Pemilihan Umum dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR dan DPRD memakan waktu demikian banjak, yaitu k.l. 3 tahun, dikarenakan berhubung pihak Panitia 3 RUU tidak luput pula dari kesulitan² yang mau tidak mau harus dihadapinya. a.l. karena menurut Parpol² dan Ormas² materi RUU yang bersangkutan banjak mengandung hal² yang berat dan prinsipil yang kemudian terkenal dengan „crucial point,” yang berkisar pada pokok² sebagai berikut :

a). Sistim Pemilihan :

1. Ada yang menghendaki Sistim proportional representation.
2. Ada yang menghendaki Sistim Single member constituency.
3. Ada yang menghendaki menggunakan kombinasi antara kedua sistim tersebut diatas.

b). Stelsel Pemilihan :

1. Ada yang menghendaki Lijsten Stelsel (stelsel daftar).
2. Ada yang menghendaki Personen Stelsel (stelsel perseorangan).

c). Daerah Pemilihan :

1. Ada yang menghendaki Dati I sebagai Daerah Pemilihan.
2. Ada yang menghendaki Dati II sebagai Daerah Pemilihan.
3. Ada yang menghendaki pembagian pertama pada Dati II, baru kemudian sisanya dibagi setjara nasional.

d). Pengangkatan :

1. Ada yang menghendaki pengangkatan hanya untuk ABRI saja.
2. Ada yang menghendaki pengangkatan untuk ABRI dan Non ABRI.

Achirnja pada tanggal 22 Nopember 1969 rapat pleno D.P.R.-G.R. menjetudjui kedua R.U.U. disahkan mendjadi U.U.

Demikian setjara ringkas sekedar penguraian tentang pembahasan dan pengesahan kedua RUU termaksud diatas.

7. SEKERTARIAT.

,Dengan dilantiknja Dewan Perwakilan Rakjat Cotong Rojong setelah diadakan refreshing maka dirasa bahwa susunan dan tjara bekerdja Sekretariat perlu disesuaikan dengan tjara bekerdja DPR-GR tersebut.

Sehubungan dengan itu maka baik terhadap struktur maupun personalianja diadakan perubahan². Tetapi mengenai tugas dan kewadjabannja itu sendiri pada hakaketnja tidak berbeda dengan apa yang ditentukan dalam Peraturan Tata-tertib lama.

Predikat Pimpinan Sekretariat DPR-GR yang dahulu disebut Sekertaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum maka dalam Peraturan Tata-tertib baru istilah tersebut diganti mendjadi Sekretaris Djenderal dan Wakil Sekretaris Djenderal.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab VII Djabatan Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum masing² didjabat oleh oleh Djoko Sumarjono S.H. dan Islan.

Setelah adanja pengchianatan G-30-S/PKI Wakil Sekretaris Umum Islan karena tersangkut didalamnya telah dipetjat dari djabatannja.

Sementara itu terhitung achir Desember 1968 atas permohonanja sendiri telah diberhentikan dengan hormat dari djabatan Negeri dengan pensiun (Surat Keputusan Presiden No. DI. 03/Kp/19-A/68 tanggal 20-12-1968) : pegawai tinggi diperbantuan Pimpinan D.P.R.-G.R. Sumarsono Pringgodiredjo SH, jaitu setelah ia lebih dahulu melakukan tugas Pds Sekertaris Sidang Umum ke-IV M.P.R.S. dan anggota Team Ahli dari Panitia Ad Hoc Badan Pekerdja M.P.R.S. mendjelang/selama Sidang Istimewa M.P.R.S., serta mengalami masa bebas tugas selama dua tahun.

Setelah Djoko Sumarjono SH mendjabat Sekum/Sekdjn selama 7 tahun dan mengingat permohonannya untuk pensiun maka dengan Keputusan Presiden R.I. No. 94/M tanggal 5 Djuli tahun 1969 Djoko Soemarjono SH diberhentikan dengan hormat dari djabatannya dan sebagai gantinya diangkat Kolonel CKH Sri Hardiman SH.

Serah terima djabatan dilakukan 16 Djuli 1969. Kemudian Djoko Soemarjono SH diperbantukan kepada Pimpinan DPR-GR. Berhubung dengan reorganisasi Sekertariat berdasarkan Surat Keputusan DPR-GR No. 22/Pimp/68-69 tanggal 19 Mei 1969 diadakan perubahan setjara besar-besaran.

Djumlah Biro jang tadinja ada 3 Biro diubah mendjadi 6. jaitu :

1. Biro I — Sekertariat Permusjawaratan.
2. Biro II — Tata-Usaha Permusjawaratan.
3. Biro III — Hubungan Masjarakat.
4. Biro IV — Kepegawaian.
5. Biro V — Keuangan.
6. Biro VI — Kerumah Tanggaan.

Sesuai dengan tugas jang harus dilaksanakan oleh masing² Biro maka Biro² tersebut meliputi Bagian² Sekertariat/ sbb. :

Biro I membawahi :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Sekertariat Bagian A | (Lembaga ² Negara Tertinggi, Luar Negeri, Pertahanan, dan Penerangan). |
| 2. Sekertariat Bagian B | (Hukum, Ketata-negaraan, Dalam Negeri). |
| 3. Sekertariat Bagian C | (Ekonomi dan Keuangan). |
| 4. Sekertariat Bagian D | (Industri dan Pembangunan). |
| 5. Sekertariat Bagian E | (Kesedjahteraan Rakyat). |
| 6. Sekertariat Komisi I | (Lembaga ² Negara Tertinggi dan Penerangan). |
| 7. Sekertariat Komisi II | (Hankam dan Luar Negeri). |
| 8. Sekertariat Komisi III | (Dalam Negeri dan Kehakiman). |
| 9. Sekertariat Komisi IV | (Perdagangan). |
| 10. Sekertariat Komisi V | (Pertanian, dan Pertambangan). |
| 11. Sekertariat Komisi VI | (Keuangan). |

12. Sekertariat Komisi VII (Perindustrian).
13. Sekertariat Komisi VIII (Perhubungan, Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik).
14. Sekertariat Komisi IX (Pendidikan dan Kebudayaan. Agama).
15. Sekertariat Komisi X (Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerdja, Transmigrasi/Koperasi).

Sekertariat Bagian atau Sekertariat Komisi dipimpin oleh seorang Sekertaris jang kedudukannja sama dengan Kepala Bagian Sekertariat DPR-GR.

Biro II meliputi :

1. Bagian Risalah.
2. Bagian Tik-Roneo.
3. Bagian Arsip-Ekspedisi.
4. Bagian Pertjetakan.

Biro III meliputi :

1. Bagian Hubungan Masjarakat.
2. Bagian Protokol.
3. Bagian Perpustakaan.
4. Bagian Dokumentasi.

Biro IV meliputi :

1. Bagian Pembinaan Kepegawaian.
2. Bagian Tata-usaha Kepegawaian.
3. Bagian Kesedjahteraan Kepegawaian.
4. Bagian Kepegawaian Anggota.

Biro V meliputi :

1. Bagian Pembukuan.
2. Bagian Anggaran.
3. Bagian Keuangan.
4. Bagian Perbendaharaan.
5. Bagian Perdjalan.

Biro VI meliputi :

1. Bagian Bangunan.
2. Bagian Perlengkapan.
3. Bagian Teknik.
4. Bagian Angkutan
5. Bagian Ketertiban-Keamanan.

Disamping Bagian² maka ada beberapa unit dan Bagian² atau Sekertariat² Panitia jang langsung berada dibawah Sekertaris Djenderal jaitu:

- a. Bagian Hukum.
- b. Bagian Perentjana/Pengawasan/Pemeriksaan.
- c. Sekertariat Musjawarah Pimpinan.
- d. Sekertariat Panitia Musjawarah.
- d. Sekertariat Panitia Anggaran.
- f. Sekertariat Panitia Rumah Tangga.
- g. Sekertariat pribadi Pimpinan DPR-GR.

Bagian selandjutnja menurut keperluannja dibagi lagi dalam sub² Bagian jang ditetapkan oleh Sekretaris Djenderal.

Dengan Keputusan DPR-GR No. 22/Pimp/I/1969-1970 ditundjuk Pedjabat² Pimpinan Sekretariat DPR-GR sebagai berikut :

1. S. Poerwadi (Kep. Biro II (lama) mendjadi Wakil Sekretaris Djenderal.
2. M.D. Djunaedi mendjadi Pd. Kepala Biro I (Sekretariat Permusjawaratan).
3. B.M. Sitompul mendjadi Pd. Kepala Biro II (Tata-usaha Permusjawaratan).
4. L. Mara mendjadi Pd. Kepala Biro III (Hubungan Masyarakat).
5. Said Sastradiredja mendjadi Pd. Kepala Biro IV (Kepegawaian).
6. Roza mendjadi Pd. Kepala Biro V (Keuangan).
7. Drs. Gondosutojo mendjadi Kepala Biro VI (Kerumah-Tangga).

Selain dari itu R. Suhadi Tjondrokusumo, Kepala Biro I (lama), dan Sdr. M. Oesin Kepala Biro III (lama) Sekertaris Djenderal.

Kemudian dengan Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 22/33/Pimp/69-60 telah diangkat Kepala² Bagian dan Sekertaris seluruhnja berdjumlah 48 orang.

BAB - IX

HAL-HAL CHUSUS

Maksud penjusunan hal-hal khusus didalam Bab IX ini ialah karena peristiwa-peristiwa yang diungkapkan dalam Bab ini menjangkut hal-hal khusus yang belum dikemukakan dalam Bab sebelumnya.

Dalam Bab IX dimuat :

- A. Gedung-gedung yang pernah dipergunakan DPR-RI
- B. Keanggotaan DPR pada Badan-badan Internasional
- C. Tamu-tamu Luar Negeri
- D. Delegasi DPR ke Luar Negeri
- E. Hubungan DPR dan Pers.

Dengan dimuat hal-hal tersebut diatas dalam Bab tersendiri, maka bagi para pembatja diharapkan akan lebih mudah mengikuti hal-hal khusus yang terdjadi dalam sedjarah DPR-RI.

A. Gedung-gedung yang pernah dipergunakan DPR-RI 1945 1970

Dalam perdjalan sedjarahnja DPR-RI sedjak K.N.P. sampai DPR-GR tahun 1970 telah berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnja dan dari satu gedung kegedung lain.

K.N.P. menggunakan gedung Kesenian Pasar Baru Djakarta ketika dilantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 29 Agustus 1945. Kemudian gedung tersebut dipergunakan sebagai tempat persidangan I. Sedangkan Sekertariatnja menggunakan gedung bekas Djawa Honkookai, didjalan Lapangan Banteng yang sekarang dipergunakan oleh Mahkamah Agung.

Sidang K.N.P. ke II diadakan pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1945 digedung bekas Hotel Binnenhof didjalan Kramat sebelah Pool Bus PPD (Perusahaan Pengangkutan Djakarta), sedangkan Sekertariat B.P.-K.N.P. pindah kedjalan Tjilatjap yang sekarang dipergunakan oleh Departemen P dan K.

Pada Sidang ke III K.N.P. tanggal 25 s/d 27 Nopember 1945, K.N.P. menempati sebagai ruang sidang suatu gedung didjalan Diponegoro didepan R.S.U.P. yang sekarang dipergunakan oleh S.M.A. P.S.K.D. (Persatuan Sekolah-sekolah Kristen Djakarta).

Berhubung gentingnja situasi dewasa itu karena diduduki-
nja Djakarta oleh Pasukan-pasukan Sekutu, maka Pemerintah
R.I. dipindahkan ke Jogjakarta, dan B.P.-K.N.P. beserta staf-
nja pindah ke Purworedjo yang menempati bekas Hotel „Van
Laar” didjalan Kutoardjo (sekarang djalan Brig Djen.
Katamso).

Pada sidang ke IV, K.N.P. diadakan di Solo yang dimulai pa-
da tanggal 28 Pebruari 1946 s/d 3 Maret 1946 menempati ge-
dung Republik Indonesia, yang djuga dipergunakan sebagai
gedung Gubernur.

Sidang selandjutnja, jaitu sidang ke V diadakan dikota Ma-
lang pada tanggal 25 Pebruari 1947 s/d 6 Maret 1947 digedung
bekas Sociteit. Ketika Belanda melantjarkan agresi ke-I (Clash
I), dan pasukan Belanda menduduki kota Kebumen, B.P.-K.-
N.P. beserta Sekretariatnja pindah ke Jogjakarta. Sekertari-
atnja menempati gedung P.M.I. (Palang Merah Indonesia) di-
Djalan Gondolaju, sedangkan rapat-rapat B.P.-K.N.P. semula
menggunakan pendopo Kraton, kemudian pindah kedjalan Ma-
lioboro No. 16 bekas gedung „Loge Theosofie” yang sebagian se-
belumnja sudah ditempati oleh Sekretariat Dewan Pertahanan
Nasional (D.P.N.) Sidang ke VI K.N.P. di Jogjakarta pada
tanggal 6 s/d 15 Desember 1949 diadakan di Siti-hinggil. B.P.-
K.N.P. menggunakan gedung ini sampai tanggal 15 Agustus
1950.

Pada masa Pemerintah R.I.S., Parlemen R.I.S. mengada-
kan sidang pertamanja digedung bekas Concordia didjalan Dr.
Wahidin No. 1 Djakarta (dahulu Sipayers Weg).

Gedung tersebut dahulu adalah sebuah Sociteit yang diberi
nama Sociteit „Concordia” khusus sebagai tempat hiburan/
pertemuan para Opsir Belanda, yang dibangun pada tahun 1835
kemudian mengalami beberapakali perbaikan.

Dengan terbentuknja Negara R.I.S. Gedung ini ditetapkan
untuk Gedung Parlemen oleh Menteri Negara R.I.S. Sultan
Hamid, karenanja diadakan perbaikan-perbaikan yang sedikit
banyak berupa penjesuaian dengan fungsinya yang baru. Ketika
Parlemen R.I.S. mengadakan sidangnya yang pertama pada
tanggal 16 Pebruari 1950, digedung tersebut keadaannya ma-
sih dalam perbaikan sehingga untuk beberapa waktu tak dapat
dipergunakan. Oleh karena itu, setelah dipergunakan hanya un-
tuk Pembukaan Sidang pertama sadja, maka rapat-rapat se-

landjutnja untuk sementara selama 2 minggu dilangsungkan di Hotel Des Indes (sekarang Hotel Duta Indonesia) ruangan atas.

Pada tahun 1964 Pimpinan DPR-GR merentjanakan peremadjaan atas gedung yang telah menjadi gedung DPR-GR itu. Rentjana tersebut mulai dilaksanakan pada awal tahun 1965 oleh Panitia Antar Departemen (Panardep), dan selama dalam proses peremadjaan, tepatnya pada bulan Pebruari 1965, DPR-GR berikut Sekretariatnya pindah dari Djalan Dr. Wahidin I (Lapangan Banteng) ke Senajan. DPR-GR dengan Sekretariatnya menempati bangunan-bangunan semi parmanen Senajan bekas KUPAG (Komando Pembangunan Asian Games) yang diperbaiki dan diperluas sehingga merupakan kompleks bangunan-bangunan darurat DPR-GR.

Menurut rentjana DPR-GR menempati bangunan-bangunan itu hanya untuk selama 2 tahun sampai peremadjaan gedung DPR-GR di Lapangan Banteng selesai. Dengan terjadinya peristiwa G-30-S/PKI pelaksanaan peremadjaan Gedung DPR-GR tersebut terhenti. Oleh karena gedung sementara DPR-GR di Senajan belum mempunyai ruangan untuk Sidang Pleno, maka untuk sementara rapat-rapat pleno DPR-GR mempergunakan Basket Hall Senajan. Hal ini berlangsung selama kira-kira 2 bulan. Ruangan rapat pleno tersebut dibangun dengan ukuran yang dapat memuat 250 orang anggota.

Dengan terhentinya proyek peremadjaan gedung DPR-GR di Lapangan Banteng setjara total, maka timbul masalah kebutuhan gedung DPR-GR yang amat mendesak sifatnya.

Pada tahun 1967 antara Pimpinan DPR-GR dengan Pd. Presiden Soeharto diadakan perundingan untuk memetjahkan masalah gedung DPR-GR, yaitu apakah DPR-GR akan tetap menggunakan Gedung DPR-GR di Lapangan Banteng ataukah pindah ke Gedung yang direntjanakan untuk Sidang Conefo (Conference of the New Emerging Forces) di Djalan Gatot Subroto Senajan..

Achirnja Pd. Presiden menetapkan, bahwa Gedung yang semula direntjanakan untuk Pembangunan Gedung Conefo yang letaknya di Djalan Gatot Subroto itu menjadi Gedung M.P.R. / D.P.R. dan DPR-GR segera dapat mempergunakan sebagian ruangan yang telah selesai.

Pada bulan Mei 1968 DPR-GR telah memindahkan sebagian kegiatannya ke Gedung bekas Conefo itu terutama untuk Si-

dang-sidang Pleno dan sebagian Sekertariat. Kegiatan-kegiatan untuk sidang-sidang Komisi dan sebagian Sekertariat-nja masih tetap menggunakan Gedung DPR-GR di Senajan. Sedangkan Gedung DPR-GR di Djalan Dr. Wahidin 1 (Lapangan Banteng)) telah diserahkan kepada Departemen Keuangan Gedung M.P.R./D.P.R. ini untuk pertama kalinya dipergunakan oleh MPRS guna melangsungkan Sidangnja jang ke-V bulan Maret 1968.

Gedung M.P.R./D.P.R. jang megah dan besar ini, ruangan Sidang Plenonja memuat sedjumlah 850 orang anggota, dan djuga tempat-tempat khusus untuk publik, Pemerintah, dan Corps Diplomatic.

B. Keanggotaan D.P.R. pada Badan-badan Internasional.

I. Inter Parliamentary Union.

Dalam rangka memupuk kerdja-sama Internasional, D.P.R. sedjak tahun 1954 telah mendjadi anggota Inter Parliamentary Union (I.P.U.).

Inter Parliamentary Union (I.P.U.) adalah satu Badan Internasional jang Non Government dan jang beranggotakan perorangan dari anggota effective Parlemen seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1889, atas inisiatif Anggota Parlemen Inggeris Willim Randal Cremer dan Anggota Parlemen Perantjis Frederic Passy.

Badan ini baru mempunjai sekertariat tetap pada tahun 1894.

Parlemen sebagai keseluruhan mungkin sadja merupakan suatu Group Nasional, tetapi seringkali keanggotaan dari Union Group diambil berdasarkan perseorangan, Seluruh anggota setjara otomatis adalah mendjadi anggota I.P.U. dalam Indonesian National Group.

Adapun tudjuan I.P.U. adalah untuk mempererat hubungan antara para anggota Parlemen didunia dan mempersatukan mereka didalam tindakan bersama untuk mendjalin serta memelihara partisipasi jang penuh dari masing-masing negara jang bersangkutan didalam membangun dan mengembangkan lembaga demokrasi jang kokoh dan djuga memadjukan kerdja sama dan perdamaian dunia.

Sehubungan dengan tudjuan ini, Uni mengemukakan pandangan atas semua masalah-masalah internasional untuk di-

petjahkan setjara parlementer.. Disamping itu djuga Uni mememadjukan saran-saran bagi perkembangan lembaga Parlemen dengan maksud untuk memperbaiki tjara kerdjanja serta meningkatkan martabat lembaga tersebut.

Keanggotaan dari pada I.P.U. sampai waktu ini terdiri dari beberapa anggota group Nasional dari anggota-anggota Parliamnet effective seluruh dunia, jaitu :

— Albania, America (United States of), Austria, Australia, Belgia, Brazil, Bulgaria. Cameroon, Canada, Ceylon, Chili, Kongo, (Democratic of the), Czechoslovakia, Denmark, Ethiopia, Finland, Franc, Germany (Federal Republic of), Great Britain, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland Israel, Italy, Ivory Coast, Japan, Jordan. Korea (Republic of), Kuwait Laos, Lebanon, Liberia. Luxemburg, Malawi, Malaysia, Mauritania, Monaco, Mongolia, Nepal, Netherlands New Zeland, Nicaragua, Niger, Norway, Paraguay, Philipines, Polans Rumania, Senegal, Sierra Leone, Singapura, Spain, Sweden, Swit Serland, Thalland, Turkey, United Arab Republic, USSR, Venezuela, Vietnam (Republic of), Yugoslavia.

Pusat daripada Inter Parliamentary Union pada dewasa ini berada di Genewa.

Adapun susunan Pengurus I.P.U. Group Indonesia sedjak tahun 1966 adalah sbb:

Tahun 1966	
K e t u a	H.A. Sjaichu
Wakil-wakil Ketua	Soebagio Reksodipuro S.H. Komodor (L) Daryaatmaka Sutarto Hadisudibjo Husein Kartasasmita
Sekdjn	: Njak Yusda
Wakil Sekdjn	: Mas Rivai
Anggota	: K.H. Gozali H. Mahboeb Djunaedi Ido Garnida A. Affandi

Tahun 1967 :

Ketua : H.A. Sjaichu
Wakil-wakil Ketua : Soebagio Reksodipuro S.H.
Komodor (L) Daryaatmaka
Harry Tjan S.H.
Drs. Lukman Harun
Prof. Dr. Latuimahallo

Sekdjn : Drs. Chalik Ali
Wakil Sekdjn : Nj. S. Saljo S.H.

Tahun 1968 :

Ketua : H.A. Sjaichu
Wakil-wakil Ketua : (tetap seperti susunan diatas)
Sekdjn : idem
Wakil Sekdjn :
Anggota-anggota :
Murtadji Bisri
Brig. Djen. H. Soedijono
F.C. Palaunsuka

Dan pada waktu tahun itu djuga terbentuk pengurus I.P.U.
Group Nasional Indonesia jang baru sbb. :

Ketua : Prof. Dr. H. Sjarif Thajeb
Badan executif dalam DPR-GR :
Ketua : Imron Rosjadi S.H.
Wakil Ketua : Brig Djen. Sudiono S.
Sekretaris I : Wartomo Dwidjojuwono
Sekretaris II : David Napitupulu
Bendahara : Drs. Lo. SH Ginting
Anggota : Drs. A. Siregar
Z.J. Manusama
Drs. Lukman Harun
Muh. Kasim A.S.
Husein Jusuf
Nj. S. Saljo S.H.
Maj. Djen. Djamin Gintings

Group Nasional Indonesia jang menghadiri Konperensi I.P.U.
adalah sbb. :

1. Inter Parliamentary Union Meeting di BEOGRAD tahun
1963.

Delegasi : H.A. Sjaichu
Manai Sopian
Ali Hanafiah
Brig. Djen. Latief Hendraningrat.

2. Inter Parliamentary Union Meeting di WARSAWA Tahun 1959.

Delegasi : H.A. Sjaichu
Sudarsono
Oei Hay Djoen
Mr. Djodi Gondakusumo.

3. Inter Parliamentary Council Meeting di Canberra 11 April — 16 April 1966.

Delegasi : Selamat Gintings (Ketua)
Abdullah Affandi (Angg.)

4. Meeting di DUBLIN, 19 s/d 25 April 1966.

Delegasi : Slamet Gintings.

5. Konperensi jang ke-55 I.P.U. di Taheran 27 Sept. s/d 4 Okt. 1966

Delegasi : Soebagio Reksodipoero S.H. (Ketua)
Soetarno Djatikusumo (Wk. Ketua)
Njak Yusda (Sekretaris)
Capt. (U) Moh. Busroh (Anggota)
Nj. D. Walandaw (Anggota)

6. Sidang I.P.U. di Palma de Mallorca (Spanjol), 27-3-1967 s/d 2-4-1967.

Delegasi : Soebagio Reksodipoero S.H. (Ketua)
Njak Yusda (Sekretaris)
Kom. (L) R.O. Daryaatmaka (Anggota)

7. Council Meeting di Genewa, 12 s/d 14 September 1967.

Delegasi : Njak Yusda (Ketua)
L.M. Sianturi (Anggota)
Kasim A. S.

8. Spring Session di Dakar, 15 April s/d 21 April 1968.

Delegasi : Kom. (L) R.O. Daryaatmaka.

9. Council Meeting di Wina, 7 April s/d 13 April 1969.

Delegasi : Brig. Djen. TNI. Djamin Gintings (Ketua)
Prof. Usep Ranuwidjaja S.H. (Anggota)

10. Konperensi ke-57 I.P.U. di New Delhi (India) 30 Oktober — 7 Nopember 1969.

Delegasi	: Djamin Gintings	(Ketua)
	Chalid Mawardi	(Anggota)
	A b a d i	(Anggota)
	Kol. TNI Soesman	(Anggota)

11. Council Meeting di Monaco, 30 Maret — 5 April 1970.

Delegasi	: LO. S.H. Ginting	(Ketua)
	Oesman J. Helmi	(Anggota)

II. Asian Parliamentary Union (A.P.U.)

Pada bulan September 1966, DPR-GR diundang ke Seoul (Korea Selatan) untuk menghadiri Konperensi Asian Parliamentary Union (A.P.U.) Kehadiran delegasi DPR-GR pada Konperensi tsb. hanya sebagai penindjau.

A.P.U. adalah suatu badan Internasional Non Government yang statusnja pun terlepas dari A.P.U. dan hanya beranggotakan dari Group-group Nasional dari Parlemen-parlemen di Asia. Badan ini dibentuk pada tahun 1965 ketika mengadakan sidangnja yang pertama pada tanggal 30 Nopember — 2 Desember 1965 di Tokyo.

Dalam Charter of the A.P.U. pasal 2 dinyatakan bahwa tudjuan dari A.P.U. adalah sbb.:

Perserikatan ini bertudjuan untuk mentjapai dan memelihara kemerdekaan penuh dan demokrasi sedjati, oleh karena hal ini akan memupuk perdamaian dan kemakmuran di Asia.

Untuk mentjapai tudjuan-tudjuan tersebut, maka perserikatan akan berusaha :

- a) dengan segala djalan berusaha mempererat persatuan bangsa-bangsa merdeka dan rakjat yang tjinta kemerdekaan di Asia;
- b) meningkatkan kerdja sama ekonomi dan tukar menukar kebudayaan dan tehnologi diantara bangsa-bangsa merdeka di Asia dan berusaha meningkatkan kesedjahteraan bersama;
- c) memusyawarahkan segala persoalan yang dapat mempengaruhi perdamaian dan keamanan di Asia dan melaksanakan keputusan-keputusan yang telah disetudjui.

DPR-GR baru menjadi anggota penuh badan internasional ini, ketika A.P.U. mengadakan Konferensinya di Bangkok pada bulan Desember 1967.

Group Nasional Indonesia telah menghadiri Konferensi A.P.U. sbb :

1. Sidang A.P.U. kedua di Seoul (Korea Selatan) pada 2 s/d 7 September 1966.

Delegasi	:	Husein Kartasasmita	(Ketua)
		H.A. Chamid Widjaja	(Anggota)
		F.C. Palaunsuka	(Anggota)

2. General Assembly A.P.U. ke-III di Bangkok, 26 Nopember s/d 6 Desember 1967.

Delegasi	:	Husein Kartasasmita	(Ketua)
		Brigdjen. Soedijono	(Anggota)
		Murtadji Bisri	(Anggota)
		F.C. Palaunsuka	(Anggota)

3. The Fourth Council Meeting of the A.P.U. di Bangkok 6 s/d 9 Agustus 1968.

Delegasi	:	Brig. Djen. Soedijono	(Ketua)
		F.C. Palaunsuka	(Anggota)

4. The Fourth General Assembly of the A.P.U. di Manila, 2 Desember s/d 9 Desember 1968.

Delegasi	:	H. Imron Rosjadi S.H	(Ketua)
		Wartomo Dwidjojuwono	(Anggota)
		LBG Surjadinata	(Anggota)
		David Napitupulu	(Anggota)
		Maj. (U) Emo Suwarina S.H.	(Anggota)

5. Council Meeting di Philipina, 18-20 Djuni 1969.

Delegasi	:	H. Imron Rosjadi S.H.	(Ketua)
		LBG Surjadinata	(Anggota)
		M.S. Kamawidjaja	(Anggota)

6. The fifth General Assembly of the APU di Taipeh, 24-28 Nopember 1969.

Delegasi : M.S. Kamawidjaja (Ketua)
B.M. Kuntjoro Jakti S.H. (Anggota)
A.P. Tanri (Anggota)
Drs. Junus Umar (Anggota)
Oetojo Oesman S.H. (Anggota)
Drs. Th. M. Gobel (Anggota)

7. Council Meeting di Taipeh (Taiwan), 2 Djuli — 4 Djuli 1970
Penindjau : Kol. KKO Sardjono Suprpto (Ketua)
Musjtari Jusuf L.A. (Anggota)

Pada dewasa ini (sampai bulan Agustus 1970) A.P.U. terdiri dari Group Nasional dari Negara-negara :

1. Indonesia
2. Djepang
3. Republik Korea
4. Philipina
5. Muangthai
6. Vietnam Selatan
7. Taiwan
8. Malaysia

Delegasi DPR ke P.B.B. :

Tahun 1967 : 1. Hardi S.H.
2. Kol. Sapardjo.
3. M. Hartono B.A.

Tahun 1968 : 1. Maruto Nitimihardjo
2. Drs. Murdono

Tahun 1969 : 1. Domo Pranoto
2. Drs. I.G.N. Gde Dakse
3. Eddy Abd. Manaf

Tahun 1970 : 1. H. Djen. Muhammad Surjopranoto
2. Sajuti Melik
3. Abd. Mukti
4. Achmad Sakarmawidjaja.

C. Kepala-kepala Negara Asing/Perdana Menteri dan tamu-tamu Luar Negeri jang mengundjungi dan berpidato di Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

Sedjak tahun 1950 telah tertjatat beberapa Kepala-kepala Negara, Perdana Menteri dan tamu-tamu Luar Negeri jang menjampaikan pidatonja didepan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

<u>Negara :</u>	<u>N a m a :</u>	Berpidato didepan D.P.R tanggal
1 Menteri Luar Negeri Philipina	: Djend. Charlos Romulo	16 - 5 - 1950
2. Perdana Menteri India	: Pandit Jawaharlal Nehru	7 - 6 - 1950
3 Presiden Philipina	: Elpido E. Quirino	17 - 7 - 1952
4. Ketua Sidang Umum P.B.B. Th. 1954	: Nj. Laksmi Pandit	1954
5. Perdana Menteri U.S.S.R.	: N. Crustjov	18 - 5 - 1957
6. Presiden India	: Dr. Rajendra Prasad	8 - 12 - 1958
7. Presiden R.D. Vietnam	: Ho Chi Min	27 - 2 - 1962
8. Presiden Rumania	: Gheor Che Gheerhiu Day	4 - 10 - 1962
9. Presiden Mexico	: Lopes Mateos	16 - 10 - 1962
10. Kepala Negara Kambodja	: Norodom Sihanuk	27 - 11 - 1962
11. Presiden Philipina	: Ferdinand Marcos	13 - 1 - 1963
12. Baginda Radja Saudi Arabia	: Faisal Ibnu Saud	5 - 6 - 1970

**Delegasi² Parlemen Luar Negeri jang mengundjungi D. P. R.
sedjak tahun 1945 — 1970.**

<u>Delegasi dari :</u>	<u>Dipimpin oleh :</u>	<u>Tiba tgl. :</u>
1. Birma	Kin Maung Tatt	21 Djuli 1951.
2. Djepang	Chcjiro Kuryama	17 Djanuari 1953.
3 Djepang	Y. Kogane	28 Agustus 1953.
4. U. S. A.	Walter H. Judd	8 Desember 1953.
5. Inggeris (atas undangan DPR)	Lord Wilnet	21 Djanuari 1954.
6. Tunisia	Moh. Tabar Amira	23 Pebruari 1954.
7. Djepang	Shichi Doyama	28 Agustus 1954.
8. Djepang	Raiyo Matamo	9 September 1954.



Djakarta, 16 Oktober 1967.

Keterangan Pemerintah Mengenai Nota Keuangan dan RAPBN tahun 1968 di DPR GR.
Oleh Pd. Presiden Soeharto di Senajan.

„Foto Deppen” 67-13049.

<u>Delegasi dari :</u>	<u>Dipimpin oleh :</u>	<u>Tiba Tgl. :</u>
9. R. R. T.	Misi Persahabatan	22 Agustus 1956.
10. Australia	Gorton John Grey	7 Desember 1956.
11. Turki (atas undangan D.P.R.)	Fatin Rustu Zerlu	9 Desember 1956.
12. Selandia Baru	D. J. Diddiford	1 Agustus 1957.
13. Djepang	Shigetaro Soyama	22 Agustus 1957.
14. Djepang	Maxtsu Her Meri	30 Agustus 1957.
15. Djepang	Janja Kaijume	28 Agustus 1957.
16. Tjekoslovakia	V. Don	25 Djanuari 1958.
17. Djepang	Mikio Miruta	16 Agustus 1958.
18. Philipina (atas undangan D.P.R.)	Senator Clare Mayo Kecto (Ketua Senat)	22 Septemb. 1959.
19. U. S. S. R. (atas undangan D.P.R.)	Muchitdinov	20 Oktober 1959.
20. Canada (atas undangan D.P.R.)	Muchener	9 Novemb. 1959.
21. Amerika Serikat/Senat. (atas undangan D.P.R.)	Allen Frear Delwars	11 Nopemb. 1959.
22. Amerika Representative (atas undangan D.P.R.)	John L. Pilchar	15 Nopemb. 1959.
23. Philipina (atas undangan D.P.R.)	Senator Palaez	Maret 1959.
24. Jugoslavia (atas undangan D.P.R.)	Veliko Vlachivis	10 Oktober 1960.
25. Djepang	Sivio Nahoma	Pebruari 1961.
26. R. R. T. (atas undangan D.P.R.)	Kuo Mo Jo (Ketua Kongres).	14 Djuni 1961.
27. Selandia Baru (atas undangan D.P.R.)	Eon John Rae	22 Pebruari 1962.
28. Philipina (atas undangan D.P.R.)	Cornelis Villareal (Ketua Parlemen)	10 Djuli 1962.
29. Rumania (atas undangan D.P.R.)	Steven Nocolou	8 Maret 1962.
30. Hongaria (atas undangan D.P.R.)	Mrs. Istvan Vass (Ketua Kongres).	24 Mei 1963.
31. Peru (atas undangan D.P.R.)	Maria Vellaran Riveri	10 Djuni 1963.
32. Australia	Justin Adaryd Ryne	4 Djuli 1963.
33. Polandia (atas undangan D.P.R.)	Czeslaw Wycech	5 Maret 1964.
34. R. D. Korea (atas undangan D.P.R.)	Tjoi Wen Tek (Ketua Kongres)	5 April 1964.
35. R. D. Vietnam (atas undangan D.P.R.)	Troung Chin (Ketua Kongres)	17 Agustus 1964.

<u>Delegasi dari :</u>	<u>Dipimpin oleh ;</u>	<u>Tib. tgl.</u>
36. R. D. Djerman (atas undangan DPR)	Dr. Dieckmann (Ketua Parlemen).	30 Nopemb. 1964
37. Djepang	Take Mori Kato	Septemb. 1964.
38. Kongres Rakjat Nas. RRT.	Lie Hsueh Feng	7 Agustus 1965.
39. Djepang	Utzunumia	Djuli 1965.
40. Federasi Djerman (atas undangan DPR)	Eugen Cerstansier (Ketua Parlemen)	20 Mei 1966.
41. Iran) Delegasi I.P.U.	Dr. Daftari	April 1966.
42. Jugo (atas undangan DPR) Djenderal Peko Dapcevic slavia		April 1966.
43. Australia	Donnald Chipp	11 Djuli 1967
44. Belanda (atas undangan DPR)	F J. M. V. Thiel/Prof. Dr. Manurs (Ketua Parlemen).	16 Agustus 1968
45. Pakistan (atas undangan DPR)	Fazal Elahi Choudhurry (Wk. Ketua Parlemen).	12 Agustus 1968.
46. Iran (atas undangan DPR)	Abdolla Riaz (Ketua Parlemen).	26 April 1969.
47. Inggris (atas undangan DPR)	J. D Cornin	13 Mei 1969.
48. Perantjis (atas undangan DPR)	Eugene Cludius Petit (Wk. Ketua Parlemen)	15 Agustus 1969.
49. Australia (atas undangan DPR)	Donnald Chipp	6 Djuli 1970.
50. Republik Korea (atas undangan DPR)	Dr. Hyo Sang Rhee (Ketua Parlemen)	4 Maret 1970.
51. Philipina (atas undangan DPR)	Jose B. Lural Jr. (Ketua Parlemen)	13 Agustus 1970.
52. Kambodja (atas undangan DPR)	Ong Sin (Ketua Senat)	16 Agustus 1970.
53. India (atas undangan DPR)	Dr. G. S. Dhillon (Ketua Lok Shaba)	12 September 1970. 1970.

D. Delegasi DPR ke Luar Negeri

(Ketjuali ke A.P.U. dan I.P.U. dan P.B.B.)

DPR telah mengadakan kunjungan-kunjungan Parlemen-ter ke beberapa negara untuk memenuhi undangan negara-negara jbs.

I. Delegasi DPR ke R.R.T. 8 September 1956 s/d 8 Oktober 1956.

Ketua Delegasi : Rh. Koesnan
Sekretaris : : Mr. Soemarsono Pringodiredjo
Islan sebagai Sekretaris II.
Anggota : 1. Drs. Ds. Matakupan.
2. Ibnu Parna
3. H. Senduk
4. Nunung Kusnadi
5. H. Hasan Basri
6. Nj. Lastari Sutrasno
7. K.H. Musta'in
8. Abdul Rasjid Faqih
9. Jusuf Adjitorop
10. Samanhadhi Sastrowidjojo
11. E.Z. Muttaqien

12. H.S. Muslich

13. H. Sjech Djalaluddin
14. Hutomo Supardan
15. Njak Diwan
16. Sahlan Ridwan
17. Supardi
18. Moh. Basah
19. Emong Wiratma Astrapradja
20. Gatot Mangkupradja
21. K.H. Abdul Azis
22. Silas Papare
23. Abdul Mutalib Daeng Talu

II. Delegasi DPR ke Sovjet Uni, Polandia Tjekoslovakia, Rumania, Libanon. Agustus — Nopember 1956.

Ketua Delegasi : Mr. Hardi
Sekretaris : Mr. Roesli
Anggota : 1. Sjaifudin Zuhri
2. K.H. Tjikwan

3. Nj. Sumari
4. Suhardjo
5. Nj. Sunarjo Mangunpuspito
6. Nj. Ch Salawati
7. Ir. Sakirman
8. Pandu Kartawiguna
9. Siradjudin Abas
10. M. Sondakh
11. F.C. Palaunsuka
12. Nj. Mahmudah Mawardi
13. Abdul Wachid Sujoso
14. Moh. Ali Pratamingkusumo
15. Abdulhajat
16. Mr. Memet Tanuwidjaja
17. Daeng Mohamad Ardiwinata
18. Kosasih Tanuwidjaja, Panitera
Seksi Luar Negeri.

III. Delegasi DPR ke Amerika Serikat Th. 1957

Ketua Delegasi : Mr. Sartono

Sekretaris : : Sunito

IV. Delegasi Gabungan MPRS/DPR-GR ke India, Sovjet Uni, Djerman Timur, Hongaria, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia, Tjekoslovakia tahun 1963.

Ketua Delegasi : Mr. Ali Sastroamidjojo (MPRS)
I.G.G. Subamia (DPR-GR).

Sekretaris : Mr. Djoko Sumarjono (DPR-GR)
Mr. Munadjat (MPRS)

Anggota : 1. Maj.Djen. Wilujo Puspojudo (MPRS)
2. H. Mirza Mustakin (MPRS)
3. Harsono Tjekroaminoto (MPRS)
4. Hasan Gajo (MPRS)
5. Samsir (MPRS)
6. M.B. Saka (DPR-GR)
7. E. Kiriwaib (DPR-GR)
8. K.H. Dahlan (DPR-GR)
9. Soetoko (DPR-GR)
10. Kasim (DPR-GR)
11. Dr. Zuchradi, Dokter Delegasi.

V. Delegasi DPR-GR ke Kambodja, R.R.T. dan Republik Demokrasi Korea Tgl. 2 September 1963 s/d 12 September 1963.

Ketua Delegasi : M.H. Lukman
Sekretaris : R.S. Poerwadi
Anggota : 1. Lek Kol. Isa Idris
2. Chamid Widjaja
3. Selamat Ginting
4. H. Machfudz Sjamsulhadi
5. M. Caley
6. Nungtjik A.R.
7. Drs. J. Piry
8. Drs. Sutanto Dirdjosuparto
9. Slamet Djojosemitro
10. Notosukardjo
11. Sumardi
12. Sarjono BA } Staf Sekretaris

VI. Delegasi DPR-GR ke Pakistan dan Djepang tahun 1965

Ketua Delegasi : I.G.G. Subamia
Sekretaris : Mr. Djoko Sumarjono.
Anggota : 1. Brig. Djen. Sugandhi.
2. Nj. Sumari.
3. Nj. Walandow.
4. K.H. Mudawari.
5. R.P.R. Situmeang.
6. Ludi Mara
7. Kosasi Suradipradja } Staf.
8. Djamhur Jusuf, Wartawan Antara
9. Soedio Gandarum, Kemlu.

VII. Delegasi DPR-GR ke Negeri Belanda, Belgia (informil) Inggris (informil), Swiss (informil), Djerman Barat, Perantjis dan Italia, pada achir September s/d awal Oktober 1967, terdiri dari :

Ketua Delegasi : Drs. Ben Mang Reng Say.
Sekretaris bi- Drs. Barlianta Harahap.
dang Ekonomi
merangkap Ang-
gota.

Sekretaris bi- J.C.T. Simorangkir S.H.
dang Politik me-
rangkap Ang-
gota :

Anggota 1. Nuddin Lubis.
2. Budi Dipojuwono.
3. Marzuki Jatim.

VIII. Delegasi DPR-GR ke Philipina (4 hari), Korea Selatan (5 hari), India (5 hari), Malaysia (3 hari), dan Djepang (4 hari), dimulai tgl. 3 Oktober 1967 s/d 27 Oktober 1967, terdiri dari :

Ketua Delegasi : H.A. Sjaichu.
Sekretaris : : J.B. Oetoro S.H.
Anggota : 1. Rasjid St. Radja Emas.
2. H. Usmar Ismail.
3. Fahmi Idris.

IX. Delegasi DPR-GR ke Australia dan New Zeland tgl. 4 s/d 25 Mei 1968.

Ketua Delegasi : Dr. Sjarif Thajeb.
Anggota : 1. Sutoko (merangkap Sekretaris).
2. Drs. Rachmat Muljomiseno.
3. Daan Jahja.
4. Djamawi Hadikusumo.
5. V.B. Dacosta.

X. Delegasi DPR-GR ke Amerika Serikat, Philipina (Delegasi Panitia Anggaran) dalam rangka study tour dibidang penjunanan Anggaran Belandja Negara tgl. 12 Djuli 1969 s/d 3 Agustus 1969.

Ketua Delegasi : Drs. Djunarsa .MA.
Anggota : 1. Drs. Barlianta Harahap.
2. L.B.G. Surjadinata.

XI . Delegasi DPR-GR ke Iran dan India (Delegasi Panitia Anggaran) dalam rangka study tour dibidang penjunanan Anggaran Belandja Negara tgl. 12 Djuli s/d 3 Agustus 1969.

Ketua Delegasi : Moenadir.
Anggota : 1. Dahrif Nasution
2. Drs. G.J. Simandjuntak.

Kedua Delegasi Panitia Anggaran seperti tersebut kemudian bergabung menjadi satu Delegasi di Djepang untuk maksud yang sama.

E. Sedjarah Hubungan antara DPR dan Pers.

Hubungan dan kerdja-sama antara Parlemen dan Pers sangat erat keduanya sama-sama merupakan alat kontrol yang mengabdikan pada masyarakat.

Selama masa 1945 - 1949, KNP yang berfungsi sebagai badan legislatif, juga telah mendapat perhatian pers. Perhatian Pers terhadap persidangan KNP terutama menondjol sekali ketika diadakan persidangan KNP ke V di Malang tahun 1947 dan persidangan KNP ke VI tahun 1949 di Jogjakarta. Hal ini disebabkan karena sidang tersebut membahas masalah yang dianggap sangat penting waktu itu, yakni masalah ratifikasi persetujuan Linggardjati serta K.M.B.

Pada permulaan terbentuknya Parlemen RIS tahun 1950, Kementerian Penerangan telah menundjuk Sdr. Parada Harahap untuk membina Pers di Parlemen.

Usaha-usaha Parada Harahap pada waktu itu untuk mendirikan Press Room di Parlemen mendapat bantuan dari Menteri Negara RIS Sultan Hamid II. Maka dibentuklah Press-Room Parlemen dengan ketuanya Parada Harahap sendiri.

Hasil dari peng-cover-an sidang-sidang Parlemen RIS dengan bantuan Panitia Parlemen, dihimpun oleh Panitia Penjiaran Parlemen dalam suatu bentuk "Ichtisar Parlemen" untuk kemudian disadjikan kepada Pers dan masyarakat.

Pada tahun 1951 Parada Harahap digantikan oleh Parlaungan Harahap dari Kementerian Penerangan yang bertugas mengkoordinir Wartawan-wartawan Parlemen di Press Room. Dan hal ini kemudian disusul oleh RRI yang memasang langsung telex yang menghubungkan Press Room dengan studio sehingga berita-berita Parlemen dapat lebih tjepat disiarkan RRI.

Dalam tugas mereka sehari-hari disamping meng-cover persidangan, maka diluar sidangpun para Wartawan mengadakan wawantjara dengan tokoh-tokoh Parlemen, "diwarung kopi" yang letaknya disebelah Press Room.

Pada priode 1950 - 1959 yang terkenal dengan priode Liberal, Parlemen merupakan pusat kegiatan dan arena pertjaturan politik. Mudah dimengerti bahwa pers menaruh perhatian besar

sekali terhadap lembaga ini. Para wartawan jang umumnja merupakan wartawan senior, aktif sekali mengcover berita-berita Parlemen.

Pada priode ini "Panitya Penjiaran Parlemen" jang membina Press Room terdiri dari lima orang jakni : Parlaungan Harahap sebagai Ketua; Tomasoa Sekretasis, anggota-anggota: Mustawa Sulaeman, Idris Sofjan dan Usulintang kesemuanja dari Kementerian Penerangan jang sehari-harinja bekerdja di Press Room Parlemen.

Pembinaan dan kerdja-sama antara Pers dan Parlemen berjalan lantjar. Kerdja-sama ini pada hakekatnja memang sangat diperlukan. Karena Parlemen sebagai Wakil Rakjat harus menjuarakan kehendak dan kepentingan rakjat, sedangkan tidak semua rakjat sempat pergi kegedung parlemen "melihat" wakilnja bekerdja menjuarakan suara mereka. Sebaliknya Parlemen merupakan sumber berita penting bagi Pers. Disinilah fungsi pers sebagai media komunikasi antara rakjat dan wakilnja. Oleh karena itu pada tahun 1958 Ketua Parlemen Mr. Sartono pada suatu rapat Panitia Rumah Tangga (PRT) mempunjai gagasan untuk mendirikan suatu Bagian Penerangan jang dibina oleh Sekretariat DPR sendiri.

Untuk mempererat hubungan antara Parlemen, dan Pemerintah. Pimpinan DPR setiap tahun mengadakan pertemuan Halal Bihalal jang terkenal dengan malam 3P. jakni Malam Pertemuan Parlemen, Pemerintah dan Pers. Pada malam tersebut bertemulah tokoh Pimpinan Redaksi, SSK/Kantor berita dengan para Anggota Parlemen dan tokoh-tokoh Pemerintahan.

Pada periode 1960-1965 jang dikenal dengan periode demokrasi terpimpin ber-angsur-angsur minat pers terhadap Parlemen agak berkurang.

Hal ini bertalian erat dengan sistim kerdja DPR-GR itu sendiri jang lebih banyak menitik beratkan kerdjanja dalam rapat-rapat Komisi dan Bagian jang sifatnja serba tertutup. Persoalan dibawa kerapat pleno terbuka setelah masalahnja menjadi masak dan kemudian diterima sidang setjara aklamasi.

Sementara itu pada tahun 1962 tugas koordinator wartawan jang tadinja didjabat oleh petugas-petugas Deppen dialihkan kepada Sekretariat DPR-GR dalam hal ini oleh bagian Promas (Protokol dan Humas) dimana kegiatan peng-cover-an sidang-sidang dilakukan oleh Bagian ini. Penjiaran berita kegiatan-ke-

giatan Parlemen dilakukan dengan membuat Press Release.

Pada tanggal 24 September 1965 Pimpinan DPR-GR memisahkan bagian PROMAS itu dan membentuk Bagian Protokol dan Bagian Hubungan Masyarakat setjara terpisah.

Dalam konsiderans pembentukan bagian Hubungan Masyarakat a.l. dinjatakan : bahwa DPR-GR sebagai lembaga demokrasi perlu dikenal dan dipahami setjara mendalam dan meluas oleh seluruh lapisan masyarakat baik tjara kerdjanja maupun hasil karyanja.

Bagian Humas inilah jang bertugas melajani Pers baik dengan menjediakan bahan-bahan rapat seperti RUU, text pidato, laporan penindjauan dll. maupun Press Release dari rapat-rapat terutama rapat-rapat Komisi jang sifatnja tertutup.

Seperti telah dikemukakan diatas, semasa periode demokrasi terpimpin minat Pers sangat berkurang terhadap DPR-GR. Demikianlah Bagian Humas mulai merintis usahanja dengan merarik minat Pers kembali terhadap DPR-GR.

Sedjak tahun 1967 para Wartawan jang bertugas di DPR mempunjai suatu Kordinator Wartawan DPR dengan Ketua jang pertama Sdr. Djamhur Jusuf dari Antara. Susunan ini di-ubah berhubung kepindahan tugas Sdr. tersebut keinstansi lain dan kemudian diperbaharui pada tanggal 29 Djanuari 1969 dengan Ketuanja Sdr. Hargo Saputro dari Berita Yudha.

Dalam pertemuannja dengan Pimpinan DPR-GR pada tanggal 1 Pebruari 1969 para wartawan tersebut telah mengadakan beberapa usul a.l. agar mereka diberi kesempatan hadir dalam sidang-sidang Komisi/Bagian jang sifatnja tertutup, pengikut sertaan para wartawan ke-daerah-daerah, mengikuti penindjauan dll. Sebagian dari usul-usul para Wartawan ini ada jang telah dipenuhi. Sementara itu tradisi malam 3P jang telah dimulai sedjak tahun limapuluhan terus didjalarkan.

Demikianlah sedikit uraian mengenai hubungan antara Parlemen dengan Pers di Indonesia.

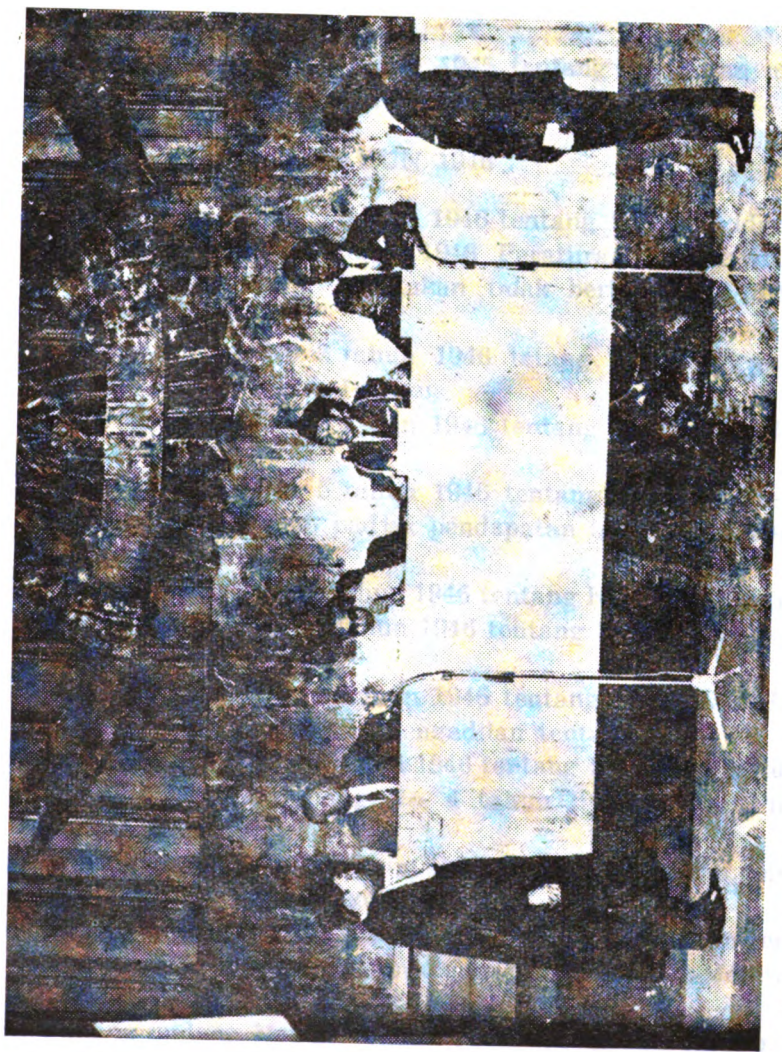
P E N U T U P

Demikianlah uraian sedjarah perkembangan DPR-RI selama Seperempat Abad ini, jang penulisanja dimulai dari tanggal 29 Agustus 1945 dan ditutup sampai tanggal 29 Agustus 1970.

Dalam sedjarah politik Indonesia jang mengiringi perkembangan djalannja Negara Republik Indonesia ini, sebagian tertjermin dalam sedjarah DPR. Derap sedjarah selama 25 tahun jang lalu dari pada DPR-RI ini akan mendjadi landasan untuk meneruskan perkembangannja lebih landjut, jang sudah barang tentu tidak bisa dilepaskan dari pada kedjadian² masa lalu.

Mudah-mudahan penulisan Seperempat Abad DPR-RI ini akan bermanfaat bagi para tjendikiawan sedjarah dan bagi masjarakat pada umumnja.

Sekian dan terima kasih.



Sulistio S.H. Pada waktu Dilantik (Pengangkatan Sumpah) Didapan Mahkamah Agung
Mendjadi Wk. Ketua DPRGR.

„Foto Humas DPRGR”.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

i PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 1945—1970.

TAHUN 1945.

1. Undang-undang No. 1 tahun 1945 tentang Peraturan mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah.

TAHUN 1946

1. Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1946 Peraturan tentang batas waktu pajak kohir dinjatakan tidak berlaku lagi (Stbl. 1882 No. 10).
3. Undang-undang No. 3 tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1946 tentang Pindjaman Nasional 1946.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1946 tentang Peraturan tentang penetapan tarif pajak pendapatan tahun 1946/1947 dan tambahan pajak.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1946 tentang Keadaan Bahaja.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Atjara Pidana guna pengadilan tentara.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1946 tentang Peraturan untuk merobah Undang-undang No. 4 tahun 1946 tentang Pindjaman Nasional.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1946 tentang Peraturan pembawaan uang dari satu ke lain daerah.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1946 tentang Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam peraturan Bea-Meterai ("Zegel-Verordening") 1921.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-desa Perdikan.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1946 tentang Peraturan

mengadakan perubahan dalam Stbl. 1907 No. 212 tentang Pemilihan Kepala Desa.

15. Undang-undang No. 15 tahun 1946 tentang Peraturan tentang Pokok Pajak Bumi 1946-1947.
16. Undang-undang No. 16 tahun 1946 tentang Pernyataan Keadan Bahaja diseluruh Indonesia.
17. Undang-undang No. 17 tahun 1946 tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia.
18. Undang-undang No. 18 tahun 1946 tentang Kewajiban menjimpan uang dalam Bank.
19. Undang-undang No. 19 tahun 1946 tentang Pengeluaran uang Republik Indonesia.
20. Undang-undang No. 20 tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.
21. Undang-undang No. 21 tahun 1946 tentang Menurunkan Tjukai Tembakau.
22. Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pentjataan Nikah, Talak dan Rudjuk.
23. Undang-undang No. 23 tahun 1946 tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 9 tahun 1946, mendjadi Undang-undang.
24. Undang-undang No. 24 tahun 1946 tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1946, mendjadi Undang-undang.

TAHUN 1947 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1947 tentang memperpanjang berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7, 8, 9, 11, dan 16 tahun 1946.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1947 tentang pengesahan Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25, dan 26 tahun 1946.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1947 tentang pengesahan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1947 tentang Bea Masuk dan Keluar, mendjadi Undang-undang.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1947 tentang Naturalisasi John Jordan.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1947 tentang Naturalisasi Sa-lim Basjir.

6. Undang-undang No. 6 tahun 1947 tentang Perubahan Undang-undang No. 3 tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1947 tentang Susunan dan Kuasaan Mahkamah Agung dan Kedjaksaan Agung.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1947 tentang memperpanjang waktu untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan kewarganegaraan Negara Indonesia.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1947 tentang Naturalisasi Frans Matheas Hesse.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1947 tentang mengadakan perubahan Aturan Bea Meterai 1921.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1947 tentang perubahan Tarif Pajak Potong (Stbl. 1936 No. 671).
12. Undang-undang No. 12 tahun 1947 tentang Pajak Radio.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1947 tentang Penetapan Tarif Pajak Pendapatan, Pajak Upah dan tambahan pokok pajak tahun 1947/1948.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I.
15. Undang-undang No. 15 tahun 1947 tentang memperpanjang waktu berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7, 8, 9, 11 dan 16 tahun 1946.
16. Undang-undang No. 16 tahun 1947 tentang pembentukan Haminte-Kota Surakarta.
17. Undang-undang No. 17 tahun 1947 tentang pembentukan Hamine-Koa Jogjakarta.
18. Undang-undang No. 18 tahun 1947 tentang Peraturan Istimewa Pajak Pendapatan terhadap upah.
19. Undang-undang No. 19 tahun 1947 tentang mengganti Undang-undang No. 10 tahun 1946 tentang „Pembawaan Uang” dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tanggal 29 Oktober 1946.
20. Undang-undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Djawa dan Madura.
21. Undang-undang No. 21 tahun 1947 tentang pemeriksaan perkara pidana diluar hadir terdakwa pada Pengadilan Negeri.
22. Undang-undang No. 22 tahun 1947 tentang pemindahan tempat kedudukan Pengadilan dan Kedjaksaan.

23. Undang-undang No. 23 tahun 1947 tentang penghapusan Pengadilan Radja (Zelf bestuursrechtspraak) di Djawa dan Sumatra.
24. Undang-undang No. 24 tahun 1947 tentang Naturalisasi Wilhelm Karl Gottfried Mewes.
25. Undang-undang No. 25 tahun 1947 tentang Naturalisasi George Wilhelm Agust Friedrichs.
26. Undang-undang No. 26 tahun 1947 tentang Naturalisasi Herman Oscar Gustav Fischer.
27. Undang-undang No. 27 tahun 1947 tentang Naturalisasi Curt Ulrich Gross.
28. Undang-undang No. 28 tahun 1947 tentang Tjukai Tembakau II.
29. Undang-undang No. 29 tahun 1947 tentang Tjukai Minuman Keras.
30. Undang-undang No. 30 tahun 1947 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1947 tentang Promes Negara, menjadi Undang-undang.
31. Undang-undang No. 31 tahun 1947 tentang Memperpanjang waktu berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo 31, 8, 9, 11 dan 16.
32. Undang-undang No. 32 tahun 1947 tentang Mendirikan dan menjelenggarakan Sekolah-sekolah Landjutan Negeri.
33. Undang-undang No. 33 tahun 1947 tentang UU Ketjelakaan tahun 1947.
34. Undang-undang No. 34 tahun 1947 tentang UU Ketjelakaan Perang.
35. Undang-undang No. 35 tahun 1947 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1947 tentang Komisariss Negara, menjadi Undang-undang.
36. Undang-undang No. 36 tahun 1947 tentang Susunan dan Atjara Pengadilan Tentara.
37. Undang-undang No. 37 tahun 1947 tentang memperpanjang waktu berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo 31, 8, 9, 11, dan 16.
38. Undang-undang No. 38 tahun 1947 tentang Undian-uang Negara.
39. Undang-undang No. 39 tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara.

40. Undang-undang No. 40 tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara.
41. Undang-undang No. 41 tahun 1947 tentang Kependjaraan Tentara.

TAHUN 1948

1. Undang-undang No. 1 tahun 1948 tentang Penambahan Undang-undang Kcadaan Bahaja.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1948 tentang Perdjangjian Persahabatan antara Republik Indonesia dengan Negara Keradjaan Mesir.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1948 tentang Organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1948 tentang Naturalisasi Joan Henry Joseph De Quinze .
5. Undang-undang No. 5 tahun 1948 tentang beberapa Peraturan-peraturan Istimewa mengenai Pentjataan Djiwa.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1948 tentang Memperpanjang waktu berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo 31, 8 jo 34, 11 dan 16.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1948 tentang pentjabutan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1947. .
8. Undang-undang No. 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan pemberian idzin pemakaian sendjata api.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1948 tentang Kedudukan hukum Anggota-anggota (Badan Pkerdja) Komite Nasional Pusat.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1948 tentang pemerintahan Sumatera.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1948 tentang Memperpanjang waktu lagi untuk mengadakan pernjjataan berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1948 tentang UU Kerdja tahun 1948.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1948 tentang perubahan „Vorstenlands Grondhuur Reglement”.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1948 tentang Bea Tambahan (Opsenten) atas Bea Masuk.
15. Undang-undang No. 15 tahun 1948 tentang menetapkan

Barang-barang yang dikenakan Bea Keluar 30% dari harganya.

16. Undang-undang No. 16 tahun 1948 tentang perubahan Aturan Bea Meterai 1921.
17. Undang-undang No. 17 tahun 1948 tentang perubahan Undang-undang Pajak Pendapatan 1932.
18. Undang-undang No. 18 tahun 1948 tentang memperpanjang waktu berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo 31 8 jo 34, 9 jo 34, 11 dan 16.
19. Undang-undang No. 19 tahun 1948 tentang Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kedjaksaan.
20. Undang-undang No. 20 tahun 1948 tentang perubahan dan tambahan Pajak Pembangunan I.
21. Undang-undang No. 21 tahun 1948 tentang Peraturan menambah dan mengubah Undang-undang No. 21 tahun 1947 tentang Pajak Radio.
22. Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang UU Pokok Pemerintahan Daerah.
23. Undang-undang No. 23 tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan tahun 1948.
24. Undang-undang No. 24 tahun 1948 tentang Memperpanjang waktu berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo 31, 8 jo 34, 9 jo 34, 11 dan 16.
25. Undang-undang No. 25 tahun 1948 tentang penetapan tarif pajak pendapatan tahun 1948—1949 dan tambahan pokok pajak.
26. Undang-undang No. 26 tahun 1948 tentang perubahan Undang-undang Pajak Pendapatan 1932.
27. Undang-undang No. 27 tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemilihan Anggota-anggotanya.
28. Undang-undang No. 28 tahun 1948 tentang Peraturan Alat Pembayaran Luar Negeri.
29. Undang-undang No. 29 tahun 1948 tentang Peraturan Pemberantasan penimbunan barang penting.
30. Undang-undang No. 30 tahun 1948 tentang pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya.
31. Undang-undang No. 31 tahun 1948 tentang Naturalisasi Joseph Cornelis de Groot.
32. Undang-undang No. 32 tahun 1948 tentang peredaran uang dengan perantara bank.

33. Undang-undang No. 33 tahun 1948 tentang Uang Berat Barang 1948.
34. Undang-undang No. 34 tahun 1948 tentang perubahan Daerah Pabean.
35. Undang-undang No. 35 tahun 1948 tentang Penurunan beberapa tarif Bea-Masuk.

TAHUN 1949

1. Undang-undang No. 1 tahun 1949 tentang penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Pendapatan.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1949 tentang kedudukan dan kekuasaan Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di Sumatera.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1949 tentang tarif pajak potong 1949
4. Undang-undang No. 4 tahun 1949 tentang perubahan Aturan Bea Meterai 1921.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1949 tentang penetapan tarif pajak pendapatan dan tambahan pokok pajak dan tarif pajak Upah untuk tahun 1949.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1949 tentang penambahan jumlah Anggota Komite Nasional Pusat.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1949 tentang penundjukan Pemangku-sementara jabatan Presiden Republik Indonesia.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1949 tentang perubahan UU No. 9 tahun 1948 tentang kedudukan hukum Anggauta-anggota (Badan Pekeraja) Komite Nasional Pusat).
9. Undang-undang No. 9 tahun 1949 tentang mengadakan Peraturan Istimewa Sidang ke-VI Komite Nasional Pusat.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1949 tentang pengesahan induk persetujuan bersama-sama rantjangan persetujuan dan segala pertukaran surat-menjurat mengenai penyerahan kedaulatan oleh Keradjaan Nederland kepada Republik Indonesia Serikat.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1949 tentang pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1949 tentang perubahan UU

No. 27 tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan pemilihan anggauta-anggautanja.

TAHUN 1950.

1. Undang-undang No. 1 tahun 1950 tentang peraturan-peraturan Pemerintah Pusat.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Djawa Timur.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang penambahan dan pelaksanaan UU No. 13 tahun 1948 tentang perubahan "Vorstenlandsch Grondhuur Reglement".
6. Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang tarip padjak potong 1950.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1950 tentang pemilihan Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi dan Daerah-daerah didalam lingkungannja.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1950 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1950 tentang Peraturan Daerah Pulihan.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1950 tentang penetapan tarip padjak pendapatan untuk tahun 1950.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Djawa Barat.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1950 tentang peraturan tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1950 tentang peraturan tentang pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1950 tentang peraturan tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat.
15. Undang-undang No. 15 tahun 1950 tentang peraturan ten-

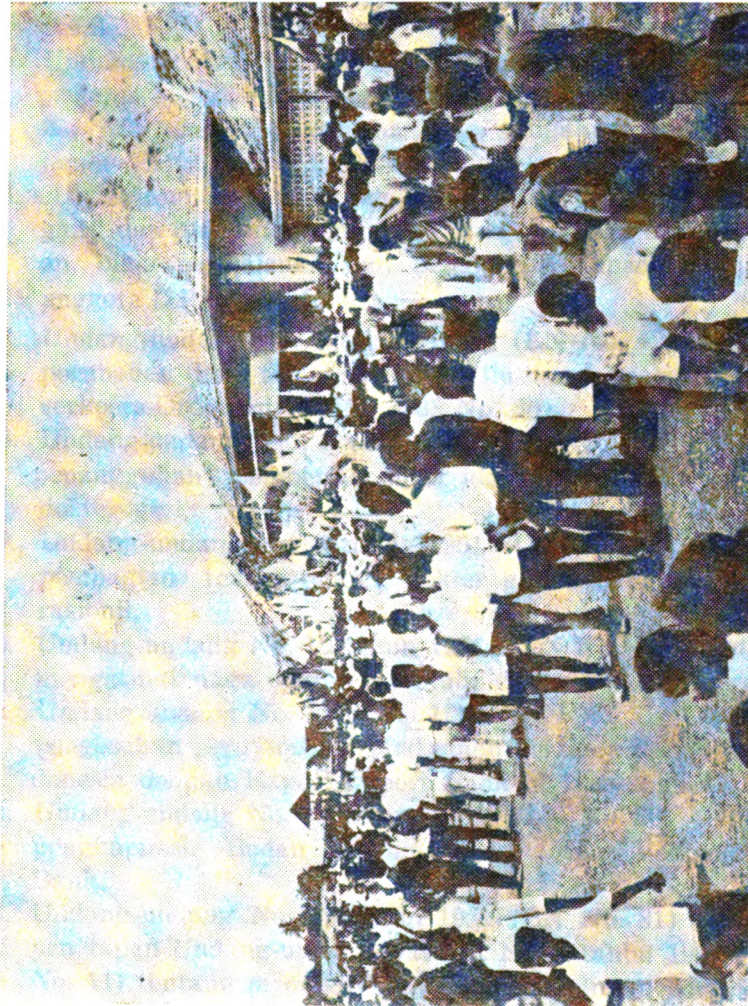
- tang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta.
16. Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang peraturan tentang pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogajakarta.
 17. Undang-undang No. 17 tahun 1950 tentang peraturan tentang pembentukan Daerah Kota Ketjil dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat.
 18. Undang-undang No. 18 tahun 1950 tentang perubahan UU No. 2 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Djawa Timur.
 19. Undang-undang No. 19 tahun 1950 tentang perubahan UU No. 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.
 20. Undang-undang No. 20 tahun 1950 tentang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**DAFTAR UNDANG-UNDANG DALAM MASA 1950-1970
TAHUN 1950 :**

1. Undang-undang No. 1 tahun 1950 (LN No. 30) tentang Susunan, kekuasaan dan dialan-pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1950 (LN No. 32) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1950 (LN No. 1) tentang penerbitan Berita Negara dan Lembaran Negara R.I.S. dan tentang mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunya undang-undang federal dan peraturan pemerintah, menjadi undang-undang.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1950 (LN No. 40) tentang permohonan grasi.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (LN No. 45) tentang penggantian kerugian Anggota-anggota D.P.R. — R.I.S.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1950 (LN No. 52) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1950 (LN No. 24) tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan, menjadi undang-undang.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1950 (LN No. 53) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1950 (LN No. 25) tentang hukum atjara pidana pada Pengadilan Tentara, menjadi undang-undang.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1950 (LN No. 56) tentang perubahan Konstitusi Sementara R.I.S. menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1950 (LN No. 67) tentang pindjaman Republik Indonesia pada Export-Import Bank off Washington.

TAHUN 1951 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1951 (LN No. 2) tentang pernyataan berlakunya UU Kerdja tahun 1948 No. 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1951 (LN No. 3) tentang pernyataan berlakunya UU Ketjelakaan tahun 1947 No. 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1951 (LN No. 4) tentang



Demonstrasi KAMI/KAPPI di depan gedung DPR-GR untuk menggulingkan Orde Lama.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

pernyataan berlakunya UU Pengawasan Perburuhan tahun 1948 No. 23 Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.

4. Undang-undang No. 4 tahun 1951 (LN Ni. 17) tentang memberi persetujuan kepada perdjandjian pindjaman antara Pemerintah Keradjaan Belanda dan Pemerintah R.I.S.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1951 (LN No. 18) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1950 (LN No. 48) tentang pengesahan dan pengakuan hutang terhadap Keradjaan Belanda, menjadi undang-undang.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1951 (LN No. 40) tentang gaji dan tundjangan kepada Ketua, tundjangan-tundjangan, biaya perjalanan dan penginapan kepada Anggota-anggota D.P.R. — R.I.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1951 (LN No. 42) tentang perubahan dan tambahan UU Lalu-lintas Djalan (Weg-verkeers-Ordonantie, Stbl. 1933 No. 86).
8. Undang-undang No. 8 tahun 1951 (LN No. 44) tentang penangguhan pemberian surat idzin kepada dokter dan dokter gigi.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1951 (LN No. 45) tentang pembagian tenaga dokter, dokter gigi dan bidan setjara rasionil.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1951 (LN No. 46) tentang mengatur tenaga dokter partikulier dalam keadaan perang.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1951 (LN No. 72) tentang pengesahan perdjandjian pindjaman pertama Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1951 (LN No. 80) tentang penghapusan Badan Hukum „Algemeene Volkscrediet Bank”.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1951 (LN No. 81) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1951 (LN No. 11) tentang menaikkan djumlah maksimum porto dan bea, menjadi undang-undang.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1951 (LN No. 84) tentang penggantian pajak bumi dengan pajak peralihan 1944
15. Undang-undang No. 15 tahun 1951 (LN No. 91) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 37 tahun 1950 (LN

- No. 79), ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1951 (LN No. 15) tentang Pajak Peralihan 1944, Upah 1932 dan Kekayaan 1932, menjadi undang-undang.
16. Undang-undang No. 16 tahun 1951 (LN No. 92) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 22 tahun 1950 (LN No. 37) tentang penurunan tjukei tembakau, menjadi undang-undang.
 17. Undang-undang No. 17 tahun 1951 (LN No. 100) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 21 tahun 1950 (LN No. 34) tentang pengeluaran uang kertas Rp. 230 miljun atas tanggungan R.I.S., menjadi undang-undang.
 18. Undang-undang No. 18 tahun 1951 (LN No. 101) tentang perubahan UU No. 15 tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo.
 19. Undang-undang No. 19 tahun 1951 (LN No. 102) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 32 tahun 1950 (LN No. 65) tentang penggabungan Pulau Weh kedalam Daerah Pabean Indonesia, menjadi undang-undang.
 20. Undang-undang No. 20 tahun 1951 (LN No. 107) tentang pemberian pembebasan tjukei guna pegawai-pegawai diplomatik atau konsuler dari negeri asing yang menjalankan tugasnya dinegeri ini.
 21. Undang-undang No. 21 tahun 1951 (LN No. 109) tentang penghapusan „Centrale Verkooporganisatie van Ondernemings-landbouwproducten (C.V.O.)”.
 22. Undang-undang No. 22 tahun 1951 (LN No. 117) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 29 tahun 1950 (LN No. 54) tentang Penetapan kedjahatan² dan pelanggaran² yang dilakukan dalam masa pekerdjaan oleh para pedjabat yang menurut pasal 148 Konstitusi R.I.S. dalam tingkat pertama dan tertinggi diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia, menjadi undang-undang.
 23. Undang-undang No. 23 tahun 1951 (LN No. 119) tentang penjerahan urusan penilikan pilem kepada Kementerian P.P.K.
 24. Undang-undang No. 24 tahun 1951 (LN No. 120) tentang nasionalisasi „De Javasche Bank”.

TAHUN 1952 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1952 (LN No. 10) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1951 (LN No. 10) tentang perubahan „Rechten-Ordennantie” (Stbl. 1882 No. 240 jo Stbl. 1931 No. 471), menjadi Undang².
2. Undang-undang No. 2 tahun 1952 (LN No. 28) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1950 (LN No. 20) tentang pindjaman darurat, menjadi undang².
3. Undang-undang No. 3 tahun 1952 (LN No. 37) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 22 tahun 1951 (LN No. 98) tentang memperpanjang waktu masih terbukanya dinas tahun-anggaran 1950, menjadi undang-undang.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1952 (LN No. 43) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 36 tahun 1950 (LN No. 78) tentang penetapan berlakunya Undang-undang, Undang-undang Darurat dan Ordonansi² mengenai masalah masalah pajak, dikeluarkan sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Undang-undang.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1952 (LN No. 44) tentang pembebasan bea masuk untuk barang-barang berupa kiriman-kiriman-hadiah yang bertudjuan kesedjahteraan rohani penduduk, maksud amal atau kebudajaan.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1952 (LN No. 46) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1951 (LN No. 25) untuk mengubah „Grondhuur-Ordonnantie (Stbl. 1918 No. 88)” dan „Vorstenlandsch Grondhuur-Reglement (Stbl. 1918 No. 20)”, menjadi undang-undang.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1952 (LN No. 50) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1951 (LN No. 86) tentang pemungutan pajak verponding atas tahun 1951, menjadi undang-undang.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1952 (LN No. 51) tentang pemungutan pajak verponding untuk tahun 1952.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1952 (LN No. 53) tentang mengadakan perubahan atas Ordonansi Pajak Perseroan 1925.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1952 (LN No. 55) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 39 tahun 1950 (LN

- No. 81) tentang tambahan pokok bea (opsenten) atas bea-bea masuk selama tahun 1951, menjadi undang-undang.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1952 (LN No. 56) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1952 (LN No. 12) tentang tambahan pokok bea (opsenten) atas bea-bea masuk selama tahun 1952, menjadi undang-undang.
 12. Undang-undang No. 12 tahun 1952 (LN No. 57) tentang pembaharuan bea-bea spesifik dan penggantinya dengan bea-bea ad valorem.
 13. Undang-undang No. 13 tahun 1952 (LN No. 58) tentang perubahan berselang dari jumlah opsenten atas beberapa pos dari tarif bea-bea masuk.
 14. Undang-undang No. 14 tahun 1952 (LN No. 66) tentang penundjukan Djawatan Regi Garam sebagai Perusahaan I.B.W. dengan nama baru „Perusahaan Garam dan Soda Negeri”.
 15. Undang-undang No. 15 tahun 1952 (LN No. 67) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1951 (LN No. 79) tentang Bursa, menjadi Undang-undang.
 16. Undang-undang No. 16 tahun 1952 (LN No. 68) tentang persetujuan Perdjudjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara India.
 17. Undang-undang No. 17 tahun 1952 (LN No. 69) tentang persetujuan Perdjudjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Pakistan.
 18. Undang-undang No. 18 tahun 1952 (LN No. 70) tentang persetujuan Perdjudjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Uni Birma.
 19. Undang-undang No. 19 tahun 1952 (LN No. 71) tentang persetujuan Perdjudjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Philipina.
 20. Undang-undang No. 20 tahun 1952 (LN No. 74) tentang pensiun pegawai negeri.
 21. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (LN No. 78) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 25 dan 34 tahun 1950 (LN No. 41 dan 74) tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai² R.I.S., menjadi undang-undang.
 22. Undang-undang No. 22 tahun 1952 (LN No. 85) tentang peraturan menghadapi kemungkinan hilangnya surat kepu-

tusan dan surat-surat pemeriksaan pengadilan.

23. Undang-undang No. 23 tahun 1952 (LN No. 88) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1950 (LN No. 4) tentang pungutan tambahan pokok pajak mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan tahun 1950, menjadi undang-undang.
24. Undang-undang No. 24 tahun 1952 (LN No. 89) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 35 tahun 1950 (LN No. 77) tentang pungutan tambahan pokok pajak mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan tahun 1951, menjadi undang-undang.

TAHUN 1953 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1953 (LN No. 4) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1951 (LN No. 90) tentang penimbunan barang-barang, sebagai undang².
2. Undang-undang No. 2 tahun 1953 (LN No. 5) tentang mengubah dan menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1953 (LN No. 18) tentang pembukaan Apotek.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1953 (LN No. 19) tentang Apotek Darurat.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1953 (LN No. 20) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1952 (LN No. 2) tentang kenaikan tarif pengenaan Pajak Perseroan untuk tahun dinas 1952, sebagai undang-undang.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1953 (LN No. 27) tentang pernyataan perlunya beberapa tanah partikelir dikembalikan menjadi tanah negeri.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1953 (LN No. 29) tentang pemilihan Anggota² Konstituante dan Anggota² Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1953 (LN No. 33) tentang penilaian persediaan uang emas dan bahan uang emas pada „De Javasche Bank”.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1953 (LN No. 36) tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas

- Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakjat R.I.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1953 (LN No. 37) tentang kedudukan keuangan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
 11. Undang-undang No. 11 tahun 1953 (LN No. 40) tentang peraturan-peraturan Pokok Bank Indonesia.
 12. Undang-undang No. 12 tahun 1953 (LN No. 42) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 (LN No. 5) tentang penerimaan Anggota Angkatan Perang R.I.S., sebagai undang-undang.
 13. Undang-undang No. 13 tahun 1953 (LN No. 43) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 (LN No. 84) tentang kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan, sebagai undang².
 14. Undang-undang No. 14 tahun 1953 (LN No. 44) tentang perlakuan terhadap Anggota Angkatan Perang yang diperhentikan dari Dinas ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan Dinas.
 15. Undang-undang No. 15 tahun 1953 (LN No. 45) tentang penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela.
 16. Undang-undang No. 16 tahun 1953 (LN No. 46) tentang kedudukan hukum Anggota Angkatan Perang.
 17. Undang-undang No. 17 tahun 1953 (LN No. 47) tentang akibat-akibat daripada UU tentang kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan.
 18. Undang-undang No. 18 tahun 1953 (LN No. 48) tentang penundjukan rumah-rumah sakit partikelir yang merawat orang-orang yang miskin dan orang² yang kurang mampu.
 19. Undang-undang No. 19 tahun 1953 (LN No. 53) tentang mengubah bea pemburuan yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 2 „Jacht-Ordonnantie Java en Madura 1940 (Stbl. 1939 No. 733)“.
 20. Undang-undang No. 20 tahun 1953 (LN No. 56) tentang pengesahan perdjandjian pimdjaman tambahan Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington.
 21. Undang-undang No. 21 tahun 1953 (LN No.58) tentang persetudjian Perdjandjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Suria.

22. Undang-undang No. 22 tahun 1953 (LN No. 69) tentang pembubaran Komisi Urusan Perburuhan.
23. Undang-undang No. 23 tahun 1953 (LN No. 70) tentang kewajiban melaporkan perusahaan.
24. Undang-undang No. 24 tahun 1953 (LN No. 74) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 18 tahun 1951 (LN No. 93) untuk membatasi masa berlakunya UU Pajak Peredaran 1950, sebagai undang-undang.
25. Undang-undang No. 25 tahun 1953 (LN No. 75) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1950 (LN No. 19) tentang mengadakan Pajak Peredaran 1950 dan Undang-undang Darurat No. 38 tahun 1950 (LN No. 80) tentang tambahan dan perubahan Undang-undang Pajak Peredaran 1950 sebagai Undang-undang
26. Undang-undang No. 26 tahun 1953 (LN No. 76) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1952 (LN No. 86) tentang larangan untuk mempergunakan dan memasukkan dalam peredaran uang perak lama, yang dikeluarkan berdasarkan „Indische Muntwet”, 1912 sebagai undang².
27. Undang-undang No. 27 tahun 1953 (LN No. 77) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1951 (LN No. 95) tentang penghentian berlakunya „Indische Muntwet 1912 dan penetapan peraturan baru tentang mata-uang sebagai undang-undang.
28. Undang-undang No. 28 tahun 1953 (LN No. 78) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1951 (LN No. 43) tentang memperpanjang waktu berlakunya opsenten atas beberapa matjam tjukai, sebagai undang².
29. Undang-undang No. 29 tahun 1953 (LN No. 79) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 21 tahun 1951 (LN No. 96) tentang pengenaan tambahan opsenten atas bensin dan sebagainya, sebagai undang-undang.
30. Undang-undang No. 30 tahun 1953 (LN No. 80) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1953 (LN No. 11) tentang pengenaan tambahan opsenten (extra-opsenten) atas bensin dan sebagainya selama tahun 1953, sebagai undang-undang.
31. Undang-undang No. 31 tahun 1953 (LN No. 81) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1950 (LN

- No. 12) tentang perubahan UU Post-spaarbank, sebagai undang-undang.
32. Undang-undang No. 32 tahun 1953 (LN No. 82) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 23 tahun 1951 (LN No. 103) tentang perubahan dan penambahan Ordonansi Pajak Peralihan tahun 1944, sebagai undang-undang.
 33. Undang-undang No. 33 tahun 1953 (LN No. 83) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1952 (LN No. 90) untuk pemungutan Pajak Verponding untuk tahun² 1953 dan berikutnya, sebagai undang-undang.
 34. Undang-undang No. 34 tahun 1953 (LN No. 84) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1951 (LN No. 87) tentang penilaian dari bagian² pendapatan dan kekayaan, baik yang berada dalam uang asing untuk pemungutan pajak peralihan, pajak upah, pajak perseroan dan pajak kekayaan dan tentang perubahan ordonansi pajak peralihan 1944, sebagai undang-undang.
 35. Undang-undang No. 35 tahun 1953 (LN No. 85) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1951 (LN No. 94) tentang pemungutan Pajak Pendjualan, sebagai undang-undang.
 36. Undang-undang No. 36 tahun 1953 (LN No. 86) tentang peraturan Bank Tabungan Pos.
 37. Undang-undang No. 37 tahun 1953 (LN No. 88) tentang penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

TAHUN 1954.

1. Undang-undang No. 1 tahun 1954 (LN No. 8) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1952 (LN No. 83) tentang perubahan dan penambahan „Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925” yang memberikan pula aturan kelengkapan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak ini, sebagai undang-undang.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1954 (LN No. 9) tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1954 (LN No. 10) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1953 (LN

- No. 7) tentang memungut opsenten atas bea masuk, sebagai undang-undang.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1954 (LN No. 11) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1951 (LN No. 39) tentang perubahan „Reglement A” yang dilampirkan pada „Rechten-Ordonnantie (Stbl. 1931 No. 417)”. sebagai undang-undang.
 5. Undang-undang No. 5 tahun 1954 (LN No. 16) tentang keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Rekonstruksi and Development).
 6. Undang-undang No. 6 tahun 1954 (LN No. 19) tentang Hak Angket D.P.R.
 7. Undang-undang No. 7 tahun 1954 (LN No. 21) tentang pemindahan kekuasaan Menteri Urusan Pegawai kepada Perdana Menteri berhubungan dengan penghapusan jabatan Menteri Urusan Pegawai.
 8. Undang-undang No. 8 tahun 1954 (LN No. 28) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 23 tahun 1950 (LN No. 38) tentang peraturan tambahan istirahat luar negeri, sebagai undang-undang.
 9. Undang-undang No. 9 tahun 1954 (LN No. 31) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 24 tahun 1952 (LN No. 104) tentang perubahan beberapa pos tarif bea-masuk, sebagai undang-undang.
 10. Undang-undang No. 10 tahun 1954 (LN No. 32) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1952 (LN No. 8) tentang mengadakan bea-keluar tambahan sementara, sebagai undang-undang.
 11. Undang-undang No. 11 tahun 1954 (LN No. 33) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 24 tahun 1950 (LN No. 39) tentang peraturan tambahan perdialanan keluar negeri, sebagai undang-undang.
 12. Undang-undang No. 12 tahun 1954 (LN No. 38) tentang pernyataan berlakunya UU No. 4 tahun 1950 R.I. dahulu tentang dasar² pendidikan dan pengadjaran disekolah untuk seluruh Indonesia.
 13. Undang-undang No. 13 tahun 1954 (LN No. 40) tentang

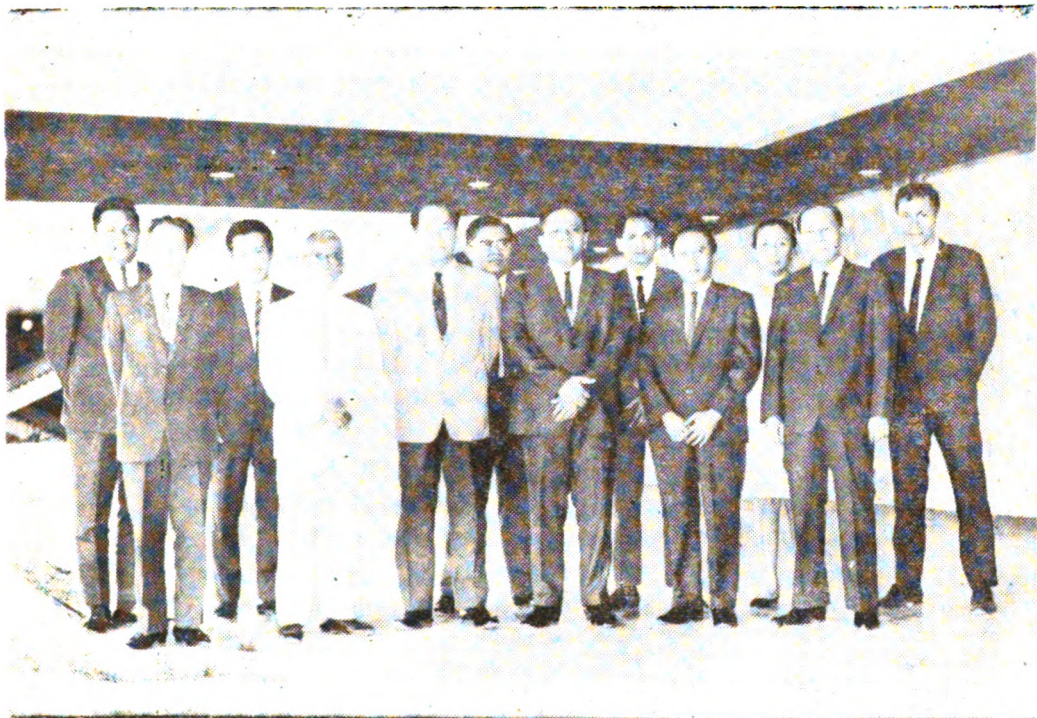
- perubahan UU No. 16 dan 17 tahun 1950 dari R.I. dahulu tentang pembentukan kota-kota Besar dan kota-kota Ketjil di Djawa.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1954 (LN No. 41) tentang penjabutan Ordonansi „Uitvoerverbod Plantenmateriaal Negara Sumatera Timur 1949 (Stbl. 1949 No. 159)“.
 15. Undang-undang No. 15 tahun 1954 (LN No. 59) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1951 (LN No. 26) untuk memperpanjang waktu berlakunya aturan-hukuman termaksud dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Stbl. 1948 No. 141), sebagai Undang-undang.
 16. Undang-undang No. 16 tahun 1954 (LN No. 60) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1951 (LN No. 122) untuk memperpanjang waktu berlakunya aturan-hukuman termaksud dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Stbl. 1948 No. 141), sebagai undang-undang.
 17. Undang-undang No. 17 tahun 1954 (LN No. 61) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1953 (LN No. 25) untuk memperpanjang waktu berlakunya aturan-hukuman termaksud dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Stbl. 1948 No. 141) untuk selandjutnja, sebagai undang-undang.
 18. Undang-undang No. 18 tahun 1954 (LN No. 62) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1954 (LN No. 12) guna menetapkan waktu berlakunya aturan-hukuman yang termaksud dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Stbl. No. 141) untuk selandjutnja, sebagai undang-undang.
 19. Undang-undang No. 19 tahun 1954 (LN No. 64) tentang peraturan penagihan penghasilan-lebih yang terhutang kepada Negara.
 20. Undang-undang No. 20 tahun 1954 (LN No. 68) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1953 (LN No. 54) tentang memperpanjang waktu berlakunya Peraturan² militer dalam pasal 34 ayat 5 (Stbl. 1939 No. 582), sebagaimana telah diubah dan atau ditambah kemudian, **sepanjang mengenai urusan perumahan**, sebagai undang-undang.
 21. Undang-undang No. 21 tahun 1954 (LN No. 69) tentang perdjandjian perburuhan antara serikat buruh dan madjikan.

22. Undang-undang No. 22 tahun 1954 (LN No. 75) tentang Undian.
23. Undang-undang No. 23 tahun 1954 (LN No. 77) tentang pentjabutan „Persbreidel-Ordonnantie (Stbl. 1931 No. 394 jo Stbl. 1932 No. 44) ”.
24. Undang-undang No. 24 tahun 1954 (LN No. 78) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1952 (LN No. 1) tentang pemindahan hak tanah² dan barang² tetap jang lainnja jang bertakluk kepada hukum Eropah, sebagai undang-undang.
25. Undang-undang No. 25 tahun 1954 (LN No. 79) tentang Perdjangjian² Pos Sedunia.
26. Undang-undang No. 26 tahun 1954 (LN No. 80) tentang pembayaran kembali Pindjaman Nasional 1946.
27. Undang-undang No. 27 tahun 1954 (LN No. 81) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1954 (LN No. 1) tentang mempersatukan opsenten jang berlaku dalam tahun 1953 atas tjukai dari beberapa djenis barang dalam pokoknja, kenaikan djumlah tjukai atas alkohol sulingan dalam negeri dan bir dan kenaikan bea-masuk atas bir, sebagai undang undang.
28. Undang-undang No. 28 tahun 1954 (LN No. 82) tentang Biaja Legalisasi Tanda-tangan.
29. Undang-undang No. 29 tahun 1954 (LN No. 84) tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia.
30. Undang-undang No. 30 tahun 1954 (LN No. 85) tentang Tanda-kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia.
31. Undang-undang No. 31 tahun 1954 (LN No. 87) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1954 (LN No. 22) tentang Pemungutan tambahan pembayaran atas pengiriman uang keluar negeri, sebagai undang-undang.
32. Undang-undang No. 32 tahun 1954 (LN No. 98) tentang penetapan berlakunja UU No. 22 tahun 1946 dari R.I. dahulu tentang pentjataan nikah, talak dan rudjuk diseluruh daerah luar Djawa dan Madura.
33. Undang-undang No. 33 tahun 1954 (LN No. 101) tentang pemakaian gelar Wakil Notaris Sementara.

34. Undang-undang No. 34 tahun 1954 (LN No. 103) tentang pemakaian gelar Akuntan (Accountant).
35. Undang-undang No. 35 tahun 1954 (LN No. 105) tentang pengesahan persetudjuan pindjaman tambahan antara Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington.
36. Undang-undang No. 36 tahun 1954 (LN No. 106) tentang penetapan tarip pajak Perseroan.
37. Undang-undang No. 37 tahun 1954 (LN No. 108) tentang persetudjuan Perdjudjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Keradjaan Thailand.
38. s/d 74. (37 UU) tentang Anggaran R.I. untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953, jang terdiri dari 19 UU mengenai Bagian-bagian dan 18 UU mengenai Bagian-bagian I.B.W.
75. Undang-undang No. 75 tahun 1954 (LN No. 150) tentang Atjara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
76. Undang-undang No. 76 tahun 1954 (LN No. 151) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1953 (LN No. 22) mengenai menaikkan djumlah maksimum pos dan bea, sebagai undang undang.

TAHUN 1955 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1955 (LN No. 10) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1954 (LN No. 5) tentang mentjabut sifat sebagai alat pembayaran jang sah dari uang kertas Pemerintah jang dikeluarkan sebelum penjerahan kedaulatan, sebagai undang-undang.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1955 (LN No. 16) tentang perubahan dan tambahan Ordonansi Bea-Statistik.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1955 (LN No. 17) tentang perubahan dan tambahan Ordonansi Bea Keluar-Umum 1949.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1955 (LN No. 19) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1952 (LN No. 59) tentang penjelesaian hutang Negara dizaman Revolusi, sebagai undang-undang.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1955 (LN No. 20) tentang mengubah UU No. 9 tahun 1953 (LN No. 36) tentang pem-



PANITIA PENJUSUN BUKU SEPEREMPAT ABAD SEDJARAH DPR.

Dari kiri kekanan : Husen Hadji S.H. Sumardi, Drs. Muslim Jasin, Mr. Sumarsono Pringgodiredjo, (Ex. SEK. DJEN. DPR), Mr. Rusli (Ex. SEK. DJEN. DPR), M.D. Djunaedi, Sri Hardiman S.H. (SEK. DJEN. sekarang), Rosida Amir, Mr. Djoko Sumarjono (Ex. SEK. DJEN. DPR), Nn. E. Chandra, R.S. Poerwadi (Wakil SEK. DJEN. sekarang) dan Ruslan Salamun.

FOTO HUMAS DPR-GR.

berian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota D.P.R.—R.I.

6. Undang-undang No. 6 tahun 1955 (LN No. 26) tentang biaja Surat Kenal Lahir dan Surat Kenal Mati.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1955 (LN No. 29) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 33 tahun 1950 (LN No. 66) untuk mentjabut kembali Undang-undang R.I.S. No. 6 tahun 1950 (LN No. 7) tentang pembentukan dja-batan Gubernur Militer Ibu Kota (Djakarta), sebagai undang-undang.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1955 (LN No. 35) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1950 (LN No. 69) tentang pentjabutan Peraturan Gadji Militer 1950, seperti jang termuat dalam Undang-undang Darurat R.I.S. No. 5 tahun 1950 (LN No. 6) dan diubah dengan Undang-undang Darurat R.I.S. No. 27 tahun 1950 (LN No. 49) sebagai undang-undang.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1955 (LN No. 43) tentang perubahan UU No. 3 jo No. 19 tahun 1950 dari R.I. tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1955 (LN No. 44) tentang perubahan nama Universiteit, Universitet dan Universitit, Faculteit, Fakultet dan Fakultit, mendjadi Universitas dan Fakultas.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1955 (LN No. 47) tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengamb- bil uang muka pada Bank Indonesia lebih daripada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ayat 2 UU Pokok Bank Indonesia tahun 1953.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1955 (LN No. 49) tentang penetapan Undang-undang No. 3 tahun 1954 (LN No. 6) tentang mengubah „Indonesische Comptabiliteitswet” (Stbl. 1925 No. 448) dan „Indonesische Bedrijvenwet” (Stbl. 1927 No. 419), sebagai undang-undang.

TAHUN 1956 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1956 (LN No. 2) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1950 (LN

- No. 31) tentang pemerintahan Djakarta-Raya, sebagai undang-undang
2. Undang-undang No. 2 tahun 1956 (LN No. 4) tentang perubahan UU No. 7 tahun 1953 (LN No. 29) tentang pemilihan Anggota² Konstituante dan Anggota² Dewan Perwakilan Rakyat.
 3. Undang-undang No. 3 tahun 1956 (LN No. 5) tentang pembebasan dokter Soegiri dari penggantian uang.
 4. Undang-undang No. 4 tahun 1956 (LN No. 12) tentang perubahan „Overschrijvings-tarief” yang dilampirkan pada ordonansi yang mengatur biaya balik-nama barang-barang tetap (Stbl. 1949 No. 282).
 5. Undang-undang No. 5 tahun 1956 (LN No. 13) tentang pengesahan penjertaan Pemerintah Republik Indonesia pada ordonansi Persetudjuan Timah Internasional 1953.
 6. Undang-undang No. 6 tahun 1956 (LN No. 14) tentang pembentukan Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia.
 7. Undang-undang No. 7 tahun 1956 (LN No. 18) tentang memperpanjang djangka waktu masa kerdia D.P.R.D. yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 dari R.I. dahulu.
 8. Undang-undang No. 8 tahun 1956 (LN No. 19) tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Ketjil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
 9. Undang-undang No. 9 tahun 1956 (LN No. 20) tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
 10. Undang-undang No. 10 tahun 1956 (LN No. 22) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1954 (LN No. 54) tentang dasar hukum keputusan Kepala Daerah Otonom dalam keadaan D.P.R. Daerah/D.P. Daerah tidak ada atau tidak dapat mendjalankan tugas kewadjabannja, sebagai undang-undang dan tentang peraturan pembagian kekuasaan dalam keadaan D.P.R. Daerah/Dewan Pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat mendjalankan tugas kewadjabannja.
 11. Undang-undang No. 11 tahun 1956 (LN No. 23) tentang pembelandjaan pensiun pegawai negeri 1956.
 12. Undang-undang No. 12 tahun 1956 (LN No. 25) tentang

- pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1956 (LN No. 27) tentang pembatalan hubungan Indonesia — Nederland berdasarkan Perdjudjian Konperensi Medja Bundar (K.M.B.).
 14. Undang-undang No. 14 tahun 1956 (LN No. 30) tentang pembentukan D.P.R. Daerah dan D.P. Daerah Peralihan.
 15. Undang-undang No. 15 tahun 1956 (LN No. 33) tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat.
 16. Undang-undang No. 16 tahun 1956 (LN No. 38) tentang perubahan dan penambahan Ordonansi Tjukai Tembakau (Stbl. 1932 No. 517).
 17. Undang-undang No. 17 tahun 1956 (LN No. 41) tentang perubahan dan tambahan „Indische Tariefwet” (Stbl. 1924 No. 487).
 18. Undang-undang No. 18 tahun 1956 (LN No. 42) tentang persetudjuan Konpersi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai berlakunya dasar² dari pada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama.
 19. Undang-undang No. 19 tahun 1956 (LN No. 44) tentang pemilihan Anggota D.P.R. Daerah.
 20. Undang-undang No. 20 tahun 1956 (LN No. 47) tentang perubahan Aturan Bea Meterai 1921.
 21. Undang-undang No. 21 tahun 1956 (LN No. 53) tentang penetapan Undang² Darurat No. 4 tahun 1955 (LN No. 18) tentang larangan untuk mengumpulkan uang logam yang sah dan larangan memperhitungkan agio pada waktu penukaran alat² pembayaran yang sah, sebagai undang-undang.
 22. Undang-undang No. 22 tahun 1956 (LN No. 54) tentang penetapan Undang² Darurat No. 30 tahun 1950 No. 57 (I N tentang penggantian kerugian Anggota² Senat R.I.S. sebagai undang-undang.
 23. Undang-undang No. 23 tahun 1956 (LN No. 63) tentang pengadilan dan atjara pidana khusus untuk Anggota Konstituante.
 24. Undang-undang No. 24 tahun 1956 (LN No. 64) tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

25. Undang-undang No. 25 tahun 1956 (LN No. 65) tentang pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
26. Undang-undang No. 26 tahun 1956 (LN No. 67) tentang keanggotaan Republik Indonesia pada Badan Keuangan Internasional (International Finance Corporation).
27. Undang-undang No. 27 tahun 1956 (LN No. 72) tentang mengadakan suatu tarif minimum dan maksimum dalam tarif bea-masuk.
28. Undang-undang No. 28 tahun 1956 (LN No. 73) tentang pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan.
29. Undang-undang No. 29 tahun 1956 (LN No. 74) tentang peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan mengenai tanah² perkebunan.
30. Undang-undang No. 30 tahun 1956 (LN No. 75) tentang pengubahan dan tambahan „Post-Ordonnantie 1935” (Stbl. 1934 No. 720).
31. Undang-undang No. 31 tahun 1956 (LN No. 76) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1955 (LN No. 24) tentang mengadakan opsenten atas tjukai bensin, sebagai undang-undang.
32. Undang-undang No. 32 tahun 1956 (LN No. 77) tentang perimbangan keuangan antara Negara dengan Daerah², yang berhak mengurus rumah tangganja sendiri.
33. Undang-undang No. 33 tahun 1956 (LN No. 78) tentang penghapusan ordonansi tahun 1946 No. 115 dan pembebasan bea meterai, pajak pendapatan dan pajak perseroan untuk hal-hal tertentu tentang pembesaran modal dari perseroan dan persekutuan.
34. Undang-undang No. 34 tahun 1956 (LN No. 79) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1955 (LN No. 51) tentang menghentikan berlakunya Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1955 (LN No. 24) tentang mengadakan opsenten atas tjukai bensin, sebagai undang-undang.
35. Undang-undang No. 35 tahun 1956 (LN No. 80) tentang pengubahan redaksi Bagian I Bab A dan Bagian II Bab A dari Pos 173 dari tarif bea masuk dan kenaikan djumlah bea dalam Bagian Pos jang tersebut terachir.

TAHUN 1957 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (LN No. 6) tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1957 (LN No. 15) tentang Perdjudjian Internasional mengenai Pemberitaan Djarak-Djahuh.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1957 (LN No. 16) tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang muka pada Bank Indonesia lebih daripada batas yang ditetapkan dalam pasal 19 ayat 2 UU Pokok Bank Indonesia 1953.
4. s/d 20. (17 UU) tentang mengubah dan menambah UU No. 38 s/d 48, 50 s/d 54 dan 56 tahun 1954 tentang penetapan Bagian-bagian dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953.
21. Undang undang No. 21 tahun 1957 (LN No. 41) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1952 (LN No. 87) tentang perubahan dan penambahan peraturan pemungutan pajak peralihan. pajak upah dan pajak keajaian. sebagai undang-undang.
22. Undang-undang No. 22 tahun 1957 (LN No. 42) tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.
23. Undang-undang No. 23 tahun 1957 (LN No. 45) tentang penetapan Undang undang Darurat No. 14 tahun 1952 (LN No. 42) tentang penundjukan Bagian Pembikinan Sera dan Vaksin daripada Lembaga Pasteur di Bandung mendjadi Perusahaan Negara dalam arti „Indische Bedrijvenwet” (Stbl. 1927 No. 419), sebagai undang-undang.
24. Undang-undang No. 24 tahun 1957 (LN No. 54) tentang pemasukan dan berlakunya Anggaran Belandja Negara.
25. Undang-undang No. 25 tahun 1957 (LN No. 66) tentang persetudjuan Negara Republik Indonesia terhadap Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional.
26. Undang-undang No. 26 tahun 1957 (LN No. 72) tentang penambahan UU No. 22 tahun 1957 (LN No. 42) tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.
27. Undang-undang No. 27 tahun 1957 (LN No. 87) tentang persetudjuan Perdjudjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Keradjaan Irak.

28. Undang-undang No. 28 tahun 1957 (LN No. 100) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1957 (LN No. 58) tentang menambah UU No. 21 tahun 1952 (LN No. 78) tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai² R.I.S., sebagai undang-undang.
29. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (LN No. 101) tentang Pedjabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden, jika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan.
30. Undang-undang No. 30 tahun 1957 (LN No. 102) tentang pembebasan saudara Untung dari penggantian uang.
31. s/d 67. (37 UU) tentang Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954, yang terdiri dari 19 UU mengenai Bagian-bagian dan 18 UU mengenai Bagian-bagian I.B.W.
68. Undang-undang No. 68 tahun 1957 (LN No. 143) tentang persetujuan Perdjandjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Keradjaan Afghanistan.
69. Undang-undang No. 69 tahun 1957 (LN No. 144) tentang persetujuan kebudayaan dan pendidikan antara Negara² Republik Indonesia dan Republik India.
70. Undang-undang No. 70 tahun 1957 (LN No. 145) tentang persetujuan kebudayaan antara Negara Republik Indonesia dan Republik Mesir.
71. Undang-undang No. 71 tahun 1957 (LN No. 153) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1954 (LN No. 67) tentang nasionalisasi „Bataviasche Verkeers Maatschappij N.V. (B.V.M.)”, sebagai undang-undang.
72. Undang-undang No. 72 tahun 1957 (LN No. 158) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 (LN No. 56), tentang pendjualan rumah² negeri kepada pegawai negeri, sebagai undang-undang.
73. Undang-undang No. 73 tahun 1957 (LN No. 159) tentang perubahan UU No. 1 tahun 1957 (LN No. 6) tentang Pokok² Pemerintahan Daerah.
74. Undang-undang No. 74 tahun 1957 (LN No. 160) tentang Keadaan Bahaja.
75. Undang-undang No. 75 tahun 1957 (LN No. 162) tentang Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

66. Undang-undang No. 76 tahun 1957 (LN No. 163) tentang perubahan UU No. 24 tahun 1954 (LN No. 78) mengenai pemindahan hak tanah² dan barang² tetap jang lainnja jang bertakluk kepada hukum Eropah dan UU No. 28 tahun 1956 (LN No. 73) mengenai pengawasan terhadap pemin-dahan hak atas tanah² perkebunan.
77. Undang-undang No. 77 tahun 1957 (LN No. 167) tentang persetudjuan mengenai warga-negara jang berada setjara tidak sah didaerah Republik Indonesia dan Republik Phi-lipina.
78. Undang-undang No. 78 tahun 1957 (LN No. 168) tentang perubahan sanon dan cius atas hak-hak orfpacht dan konsesi guna Perusahaan Kebun Besar.
79. Undang-undang No. 79 tahun 1957 (LN No. 170) tentang pengesahan pernjjataan keadaan perang sebagai jang telah dilakukan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957.
80. Undang-undang No. 80 tahun 1957 (LN No. 171) tentang persetudjuan Konpensasi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai pengupahan jang sama bagi buruh laki² dan wanita untuk pekerdjaan jang sama nilainja.

TAHUN 1958 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1958 (LN No. 2) tentang penghapusan tanah² partikelir.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1958 (LN No. 5) tentang persetudjuan Perdjangjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Tionkok mengenai soal dwikewarga-negaraan.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1958 (LN No. 8) tentang penempatan tenaga asing.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1958 (LN No. 13) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1953 (LN No. 51) tentang antjaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, penyerahan, penguasaan, kepunjaan persediaan atau dalam milik, penjinpanan, pengangkutan atau pem-bawaan kawat-tembaga dengan tidak mempunjai idzin. sebagai undang-undang.

5. Undang-undang No. 5 tahun 1958 (LN No. 14) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1957 (LN No. 51) tentang perpendjangan djangka waktu masa kerdja D.P.R. Daerah Peralihan dan Dewan Pemerintah Daerah peralihan, sebagai undang-undang.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1958 (LN No. 15) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1957 (LN No. 9) tentang perubahan UU Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, sebagai undang-undang.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1958 (LN No. 17) tentang peralihan tugas dan wewenang agraria.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1958 (LN No. 18) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1954 (LN No. 66)
tentang pengubahan nama Propinsi Sunda-Ketjil mendjadi Propinsi Nusa-Tenggara, sebagai undang-undang.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1958 (LN No. 20) tentang pindjaman Republik Indonesia dari Uni Republik² Soviet Sosialis.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1958 (LN No. 22) tentang pengesahan persetudjuan² perubahan dan tambahan antara Republik Indonesia dan Export-Import Bank of Washington.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1958 (LN No. 25) tentang kenaikan tarif uang rambu.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1958 (LN No. 29) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1957 (LN No. 1) tentang perubahan djumlah maksimum Anggota D.P. Daerah Peralihan jang dimaksud dalam pasal 5 UU No. 14 tahun 1956 (LN No. 30), sebagai undang-undang.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1958 (LN No. 31) tentang persetudjuan pampasan antara Republik Indonesia dan Djepang.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1958 (LN No. 33) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1957 (LN No. 5) tentang perubahan kedudukan wilajah Daerah² enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen, sebagai undang².
15. Undang-undang No. 15 tahun 1958 (LN No. 37) tentang pengesahan persetudjuan pindjaman antara Republik Indonesia dan Export-Import Bank of Washington.



Suasana Pres-Room Parlemen 17 Oktober 1953

Para Wartawan Sedang Menunggu Berita dari Sidang² Parlemen.

„Foto Deppen” 531017/FG 2-1.

16. Undang-undang No. 16 tahun 1958 (LN No. 42) tentang perubahan dan penambahan UU No. 2 tahun 1954 (LN No. 9) tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Undang-undang No. 17 tahun 1958 (LN No. 58) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1955 (LN No. 34) tentang pemungutan sumbangan dari pabrikan² rokok bagi Badan Urusan Tembakau (Krosok-Centrale). sebagai undang-undang.
18. Undang-undang No. 18 tahun 1958 (LN No. 59) tentang perubahan batas-batas Kota-pradja Sukabumi dan Daerah Swatantra tingkat II Sukabumi.
19. Undang-undang No. 19 tahun 1958 (LN No. 60) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 (LN No. 83) tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan ikatan dinas sukarela (militer sukarela), sebagai undang².
20. Undang-undang No. 20 tahun 1958 (LN No. 61) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 22 tahun 1957 (LN No. 79) tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, sebagai undang-undang.
21. Undang-undang No. 21 tahun 1958 (LN No. 62) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1957 (LN tentang Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan perubahan UU No. 25 tahun 1956 (LN No. 65) tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, sebagai undang-undang.
22. Undang-undang No. 22 tahun 1958 (LN No. 63) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1954 (LN No. 147) tentang perubahan „Krosok-Ordonnantie 1937” (Stbl. 1937 No. 604), sebagai undang-undang.
23. Undang-undang No. 23 tahun 1958 (LN No. 64) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1957 (LN No. 76) tentang perubahan UU No. 15 tahun 1956 (LN No. 33) mengenai pembentukan Daerah Swatantra tingkat I Irian Barat, sebagai undang-undang.
24. Undang-undang No. 24 tahun 1958 (LN No. 66) tentang perubahan batas-batas Kota-pradja Madiun dan Daerah Swatantra tingkat II Madiun.

25. s/d 54. (30 UU) tentang Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955, yang terdiri dari 19 UU mengenai Bagian-bagian dan 11 UU mengenai Bagian-bagian I.B.W
55. Undang-undang No. 55 tahun 1958 (LN No. 105) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1955 (LN No. 78) tentang peraturan sementara mengenai kedudukan Anggota Angkatan Perang dalam dinas ketentaraan sesudah akhir tahun 1955, sebagai undang-undang.
56. Undang-undang No. 56 tahun 1958 (LN No. 106) tentang perubahan UU No. 1 tahun 1950 (LN No. 30) tentang susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.
57. Undang-undang No. 57 tahun 1958 (LN No. 107) tentang penetapan Undang-undang No. 8 tahun 1952 (LN No. 39) mengenai pentjabutan Undang-undang Darurat No. 31 tahun 1950 (LN No. 63) dan menambah dan mengubah UU Pelabuhan-Berat-Barang (Goederengeld-Ordonnantie) beserta Peraturan Uang-Berat-Barang (Algemeen Goederengeld Reglement), sebagai undang-undang.
58. Undang-undang No. 58 tahun 1958 (LN No. 108) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 21 tahun 1957 (LN No. 77) tentang perubahan UU No. 12 tahun 1956 (LN No. 25) tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah, sebagai undang-undang.
59. Undang-undang No. 59 tahun 1958 (LN No. 109) tentang ikut-serta Negara Republik Indonesia dalam seluruh Kon-pensi Djenewa tanggal 12 Agustus 1949.
60. Undang-undang No. 60 tahun 1958 (LN No. 111) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 23 tahun 1957 (LN No. 80) tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra tingkat II dalam wilajah Daerah Swatantra tingkat I Maluku, sebagai undang-undang.
61. Undang-undang No. 61 tahun 1958 (LN No. 112) tentang penetapan undang-undang Darurat No. 19 tahun 1957 (LN No. 75) tentang pembentukan Daerah² tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau, sebagai undang-undang.
62. Undang-undang No. 62 tahun 1958 (LN No. 113) tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

63. Undang-undang No. 63 tahun 1958 (LN No. 114) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1957 (LN No. 61) tentang penetapan untuk membebaskan Bank Indonesia dari kewadajiban yang dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 1 UU Pokok Bank Indonesia 1953 selama enam bulan setelah berachirnja keputusan Dewan Moneter tanggal 2 Pebruari 1957 No. 23 yang diadakan berdasarkan pasal 16 ayat 3 UU Pokok Bank Indonesia 1953, sebagai undang².
64. Undang-undang No. 64 tahun 1958 (LN No. 115) tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
65. Undang-undang No. 65 tahun 1958 (LN No. 116) tentang pemberian tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma.
No. 77) tentang perubahan UU No. 1p tahun 1956 (LN
66. Undang-undang No. 66 tahun 1958 (LN No. 117) tentang Wadajib-Militer.
67. Undang-undang No. 67 tahun 1958 (LN No. 118) tentang perubahan batas-batas wilayah Kotapradja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang.
66. Undang-undang No. 68 tahun 1958 (LN No. 119) tentang persetudjuan Konpensi Hak-hak Politik Kaum Wanita.
69. Undang-undang No. 69 tahun 1958 (LN No. 122) tentang nembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
70. Undang-undang No. 70 tahun 1958 (LN No. 124) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1958 (LN No. 41) tentang tanda-tanda penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang, sebagai undang-undang.
71. Undang-undang No. 71 tahun 1958 (LN No. 125) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1958) (LN No. 46) tentang pengubahan UU Mata-Uang tahun 1953, sebagai undang-undang.
72. Undang-undang No. 72 tahun 1958 (LN No. 126) tentang pemungutan Pajak Verponding untuk tahun-tahun 1957 dan berikutnya.
73. Undang-undang No. 73 tahun 1958 (LN No. 127) tentang menjatakan berlakunja UU No. 1 tahun 1946 R.I. untuk

seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

74. Undang-undang No. 74 tahun 1958 (LN No. 128) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1957 (LN No. 57) tentang Pajak Bangsa Asing, sebagai undang².
75. Undang-undang No. 75 tahun 1958 (LN No. 131) tentang memperpanjang jangka waktu pembebasan Bank Indonesia dari kewajiban yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 UU Pokok Bank Indonesia 1953 dengan 12 (duabelas) bulan, setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dengan Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1957 (LN No. 61) jo UU No. 63 tahun 1958 (LN No. 114).
76. Undang-undang No. 76 tahun 1958 (LN No. 135) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1957 (LN No. 64) tentang kenaikan tarif tjukai atas bir, gula, saccharin dsb., dan kenaikan bea-masuk atas bir, sebagai undang-undang.
77. Undang-undang No. 77 tahun 1958 (LN No. 136) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 18 tahun 1957 (LN No. 70) tentang pembentukan Bank Tani dan Nelayan, sebagai undang-undang.
78. Undang-undang No. 78 tahun 1958 (LN No. 138) tentang penanaman Modal Asing.
79. Undang-undang No. 79 tahun 1958 (LN No. 139) tentang perkumpulan Koperasi.
80. Undang-undang No. 80 tahun 1958 (LN No. 144) tentang Dewan Perantjang Nasional.
81. Undang-undang No. 81 tahun 1958 (LN No. 145) tentang mentjabut UU No. 2 tahun 1954 (LN No. 9) jo UU No. 16 tahun 1958 (LN No. 42), dan menetapkan kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
82. Undang-undang No. 82 tahun 1958 (LN No. 152) tentang perpandjangan jangka waktu satu tahun daripada Keadaan Perang yang telah dinjatakan dengan Keputusan Presiden No. 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957 dan yang disahkan dengan UU No. 79 tahun 1957 (LN No. 170). untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

83. Undang-undang No. 83 tahun 1958 (LN No. 159) tentang Penerbangan.
84. Undang-undang No. 84 tahun 1958 (LN No. 160) tentang perubahan pasal-pasal 16 dan 19 UU Pokok Bank Indonesia 1953.
85. Undang-undang No. 85 tahun 1958 (LN No. 161) tentang Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1956—1960.
86. Undang-undang No. 86 tahun 1958 (LN No. 162) tentang nasionalisasi Perusahaan² Milik Belanda di Indonesia.
87. Undang-undang No. 87 tahun 1958 (LN No. 164) tentang perubahan UU No. 74 tahun 1958 (LN No. 128) tentang Pajak Bangsa Asing.

TAHUN 1959 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1959 (LN No. 3) tentang mentjabut Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1957 (LN No. 62) dan Undang-undang Darurat No. 24 tahun 1957 (LN No. 81) dan menetapkan UU Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1959 (LN No. 4) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 (LN No. 28) tentang peraturan pemberian pensiun dan onderstand kepada para anggota tentara Angkatan Darat, sebagaimana kemudian telah diubah/ditambah, pun Undang-undang Darurat No. 28 tahun 1950 (LN No. 50), Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1951 (LN No. 76), Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1952 (LN No. 75) dan undang-undang Darurat No. 6 tahun 1954 (LN No. 50), sebagai undang-undang.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1959 (LN No. 11) tentang persetudjuan kerdjasama Ilmiah, Pendidikan dan Kebudayaan antara Republik Indonesia dan Republik Tjekoslowakia.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1959 (LN No. 12) tentang mentjabut „Post-Ordonnantie 1935” (Stbl. 1934 No. 720), sebagaimana sudah beberapa kali diubah dan ditambah, terachir dengan UU No. 30 tahun 1956 (LN No. 75) dan menetapkan UU Pos.

5. Undang-undang No. 5 tahun 1959 (LN No. 13) tentang perubahan „Regeling van het beroep in belastingzaken” (Pasal 4 Stbl. 1927 No.29 jo. Stbl. 1949 No. 251).
6. Undang-undang No. 6 tahun 1959 (LN No. 15) tentang penjerahan tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam bidang Pemerintahan Umum, perbantuan pegawai negeri dan penjerahan keuangannya, kepada Pemerintah Daerah.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1959 (LN No. 18) tentang penghapusan peraturan umum korban perang yang dahulu disebut „Algemene Oorlogsongevallen-Regeling” (Stbl. 1942 No. 59 jo. Stbl. 1946 No. 48 yang diubah dan ditambah).
8. Undang-undang No. 8 tahun 1959 (LN No. 20) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1955 (LN No. 37) tentang perubahan pasal 4 ayat 1 UU No. 12 tahun 1953 (LN No. 42) mengenai penerimaan Anggota Angkatan Perang R.I.S., sebagai undang-undang.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1959 (LN No. 23) tentang pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprodjo dari kewajiban untuk menggantikan uang.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1959 (LN No. 24) tentang pembatalan hak-hak pertambangan.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1959 (LN No. 34) tentang mentjabut PP No. 4 dan 26 tahun 1950 (LN No. 15 dan No. 68). PP No. 14 tahun 1957 (LN No. 23), PP No. 4 tahun 1958 (LN No. 7) dan menetapkan UU Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pedjabat yang mendjalankan pekerjaan djabatatan Presiden Republik Indonesia.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1959 (LN No. 35) tentang Kedudukan keuangan Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda Republik Indonesia.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1959 (LN No. 38) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1957 (LN No. 82) tentang penghapusan monopoli garam dan pembikinan garam rakyat, sebagai undang-undang.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1959 (LN No. 56) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 40 tahun 1950 (LN No. 82) tentang Surat-surat Perdjalananan Republik Indonesia, sebagai undang-undang.

15. Undang-undang No. 15 tahun 1959 (LN No. 57) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1951 (LN No. 14) untuk mengubah dan menambah peraturan dalam Stbl. 1916 No. 47 mengenai idzin masuk dan idzin tinggal untuk bangsa asing ke/di Indonesia, sebagai undang².
16. -Undang-undang No. 16 tahun 1959 (LN No. 60) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1959 (LN No. 1) tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah, sebagai undang-undang.
17. Undang-undang No. 17 tahun 1959 (LN No. 61) tentang persetujuan Perdjudjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Keradjaan Iran.
18. Undang-undang No. 18 tahun 1959 (LN No. 62) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1958 (LN No. 137) tentang kedudukan hukum Apotek Darurat, sebagai undang-undang.
19. Undang-undang No. 19 tahun 1959 (LN No. 63) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 27 tahun 1957 (LN No. 84) tentang penagihan Pajak Negara dengan Surat-Paksa, sebagai undang-undang.
20. Undang-undang No. 20 tahun 1959 (LN No. 64) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1958 (LN No. 153) tentang perubahan dan tambahan UU No. 65 tahun 1958 (LN No. 116) tentang pemberian tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma, sebagai undang-undang.
21. Undang-undang No. 21 tahun 1959 (LN No. 65) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1958 (LN No. 154) tentang penggantian Peraturan Bintang Gerilja sebagai termaktub dalam PP No. 8 tahun 1949 R.I., sebagai undang-undang.
22. Undang-undang No. 22 tahun 1959 (LN No. 66) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 43 tahun 1950 (LN No. 85) tentang perubahan pasal 45 „Zegel-Verordening 1921”, sebagai undang-undang.
23. Undang-undang No. 23 tahun 1959 (LN No. 67) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959 (LN No. 19) tentang pemberian tanda-kehormatan Bintang Garuda, sebagai undang-undang.

24. Undang-undang No. 24 tahun 1959 (LN No. 69) tentang penarikan kembali Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 (LN No. 38) tentang pentjabutan dan penggantian UU No. 14 tahun 1953 (LN No. 44) tentang perlakuan terhadap Anggota Angkatan Perang yang diberhentikan dari ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas.
25. Undang-undang No. 25 tahun 1959 (LN No. 70) tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1950 R.I. dan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1955 (LN No. 52) tentang perubahan Perpu No. 3 tahun 1950 R.I. tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai undang-undang.
26. Undang-undang No. 26 tahun 1959 (LN No. 71) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955 (LN No. 53) tentang perpanjangannya jangka waktu berlakunya Peraturan² Daerah² Otonom di Djawa, sebagai undang².
27. Undang-undang No. 27 tahun 1959 (LN No. 72) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 (LN No. 9) tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, sebagai undang-undang.
28. Undang-undang No. 28 tahun 1959 (LN No. 73) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 4, 5 dan 6 tahun 1956 (LN No. 55, 56 dan 57) tentang pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapradja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai undang-undang.
29. Undang-undang No. 29 tahun 1959 (LN No. 74) tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.

TAHUN 1960 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1960 (LN No. 1) tentang perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1960 (LN No. 2) tentang Perdjudjian Bagi-Hasil.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1960 (LN No. 3) tentang pengesahan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1955 (LN No. 15) tentang penundjukan Pelabuhan Palembang menjadi Perusahaan Negara dalam arti „Indische Bedrijvenwet” (Stbl. 1927 No. 419) menjadi undang-undang.

4. Undang-undang No. 4 tahun 1960 (LN No. 15) tentang ,persetujuan Perdjudjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melaju.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1960 (LN No. 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1960 (LN No. 105) tentang Sensus.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1960 LN No. 109) tentang Statistik.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1960 (LN No. 123) tentang pembuatan Perdjudjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Kambodja.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1960 (LN No. 131) tentang Pokok-pokok Kesehatan.

TAHUN 1961 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1961 (LN No. 3) tentang penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Djanuari 1961, menjadi undang-undang.
(41 Undang-undang Darurat, 29 Perpu tahun 1959 dan 56 Perpu tahun 1960).
2. Undang-undang No. 2 tahun 1961 (LN No. 9) tentang pengeluaran dan pemasukan tanaman dan bibit tanaman.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1960 (LN No. 14) tentang persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 106 mengenai istirahat mingguan dalam perdagangan dan kantor².
4. Undang-undang No. 4 tahun 1961 (LN No. 15) tentang perubahan atau penambahan nama keluarga.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1961 (LN No. 21) tentang Perdjudjian Pos Sedunia dan persetujuan²nja.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1961 (LN No. 21) tentang mentjabut UU No. 2 tahun 1957 (LN No. 15) dan menetapkan UU Perdjudjian Internasional mengenai Pengiriman Berita Djarak Djauh di Djenewa tertanggal 21 Desember 1959.

7. Undang-undang No. 7 tahun 1961 (LN No. 22) tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1961.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1961 (LN No. 207) tentang Wadajib Kerdja Sardjana.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1961 (LN No. 214) tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1961 (LN No. 215) tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 1961 (LN No. 8) tentang Barang, mendjadi undang-undang.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1961 (LN No. 216) tentang tambahan atas lampiran UU No. 10 tahun 1959 (LN No. 24 — TLN No. 1759) tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1961 (LN No. 238) tentang Pembuatan Perdjangjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Tiosgkok.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1961 (LN No. 245) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1961 (LN No. 246) tentang Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara.
15. Undang-undang No. 15 tahun 1961 (LN No. 254) tentang Ketentuan² Pokok Kedjaksaaan Republik Indonesia.
16. Undang-undang No. 16 tahun 1961 (LN No. 255) tentang Pembentukan Kedjaksaaan Tinggi.
17. Undang-undang No. 17 tahun 1961 (LN No. 259) tentang perubahan UU No. 21 tahun 1952 (LN No. 78) tentang hak mengangkat atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.
18. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (LN No. 263) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.
19. Undang-undang No. 19 tahun 1961 (LN No. 273) tentang Persetudjuan atas tiga Kompensi Djenewa Tahun 1958 mengenai Hukum Laut.
20. Undang-undang No. 20 tahun 1961 (LN No. 288) tentang Pentjabutan atas tanah dan benda-benda jang ada diatasnja.
21. Undang-undang No. 21 tahun 1961 (LN No. 290) tentang Merek-Perusahaan dan Merek-Perniagaan.
22. Undang-undang No. 22 tahun 1961 (LN No. 302) tentang Perguruan Tinggi.

TAHUN 1962 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1962 (LN No. 2) tentang Karantina Laut.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1962 (LN No. 3) tentang Karantina Udara.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1962 (LN No. 4) tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja Tambahan dari Republik Indonesia untuk tahun 1960
4. Undang-undang No. 4 tahun 1962 (LN No. 5) tentang Penetapan Anggaran Tambahan Bagian-Bagian Perusahaan Negara berdasarkan I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun 1960.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1962 (LN No. 10) tentang Perusahaan Daerah.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1962 (LN No. 12) tentang W a b a h.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1962 (LN No. 25) tentang Pembuatan Perdjandjian Persahabatan dan Kerdjasama antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Tjekoslowakia.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1962 (LN No. 26) tentang Pembuatan Perdjandjian Persahabatan dan Kerdjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Hongaria.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1962 (LN No. 27) tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1962.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1962 (LN No. 28) tentang Penetapan Anggaran Bagian² Perusahaan Negara berdasarkan I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun 1962.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1962 (LN No. 48) tentang Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1962 (LN No. 58) tentang Bank Pembangunan Swasta.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1962 (LN No. 59) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1962 (LN No. 64) tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 1962 (LN No. 8) tentang

- pemanggilan dan pengerahan semua warganegara dalam rangka mobilisasi umum untuk kepentingan dan pertahanan Negara, menjadi undang-undang.
15. Undang-undang No. 15 tahun 1962 (LN No. 80) tentang penetapan Perpu No. 2 tahun 1962 (LN No. 18) tentang kewajiban Perusahaan Minjak memenuhi kebutuhan dalam negeri, menjadi undang-undang.
 16. Undang-undang No. 16 tahun 1962 (LN No. 81) tentang Pembuatan Perdjudjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan antara Republik Indonesia dan Djepang.
 17. Undang-undang No. 17 tahun 1962 (LN No. 88) tentang penetapan Perpu No. 3 tahun 1962 (LN No. 21) tentang penerimaan dan penggunaan warga-negara asing yang dengan sukarela turut serta, dalam perdjjoangan pembebasan Irian Barat, menjadi undang-undang.
 18. Undang-undang No. 18 tahun 1962 (LN No. 98) tentang perubahan/penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 1961.
 19. Undang-undang No. 19 tahun 1962 (LN No. 99) tentang Penetapan Anggaran Bagian² Perusahaan Negara berdasarkan I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1961.

TAHUN 1963

1. Undang-undang No. 1 tahun 1963 (LN No. 68) tentang penetapan Perpu No. 11 tahun 1962 (LN No. 49) tentang pemungutan sumbangan wadajib istimewa atas beberapa djenis barang, menjadi undang-undang.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1963 (LN No. 69) tentang penetapan Perpu No. 12 tahun 1962 (LN No. 50) tentang ketentuan dibidang fiskal mengenai pembayaran sumbangan wadajib istimewa, menjadi undang-undang.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1963 (LN No. 70) tentang penetapan Perpu No. 13 tahun 1962 (LN No. 51) tentang sumbangan wadajib istimewa tahun 1962 atas kendaraan bermotor, menjadi undang-undang.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1963 (LN No. 71) tentang penetapan Perpu No. 14 tahun 1962 (LN No. 52) tentang

pemungutan sumbangan wadajib istimewa atas kendaraan bermotor jang diimpor kedalam daerah pabean Indonesia, menjadi-undang-undang.

5. Undang-undang No. 5 tahun 1963 (LN No. 78) tentang Tanda Kehormatan Bintang Djas.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1963 (LN No. 79) tentang Tenaga Kesehatan.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1963 (LN No. 81) tentang Farmasi.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1963 (LN No. 90) tentang perubahan dan penambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belandja untuk tahun 1962.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1963 (LN No. 91) tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara Republik Indonesia untuk tahun 1963.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1963 (LN No. 91) tentang penetapan Bagian-Anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1963.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1963 (LN No. 93) tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara Republik Indonesia untuk tahun 1964.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1963 (LN No. 94) tentang penetapan Bagian-Anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1964.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1963 (LN No. 109) tentang penetapan Perpu No. 4 tahun 1962 (LN No. 24) tentang pengesahan „Perdjandjian Karya” antara Perusahaan Negara Pertamina dan Pan American Oil Co. untuk diri sendiri dan atas nama Pan American International Oil Corporation, menjadi undang-undang.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1963 (LN No. 110) tentang pengesahan „Perdjandjian Karya” antara PN Pertamina dengan PT Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic)/Texaco Overseas Petroleum Company (Topco): PN Permina dengan PT Stanvac Indonesia; PN Permigan dengan PT Shell Indonesia.

TAHUN 1964 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1964 (LN No. 3) tentang penetapan Perpu No. 6 tahun 1962 (LN No. 40) tentang Pokok² Perumahan, menjadi undang-undang.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1964 (LN No. 5~~1~~) tentang menjabut UU No. 36 tahun 1953 (LN No. 86) dan Perpu No. 4 tahun 1963 (LN No. 62) dan menetapkan UU Bank Tabungan Negara.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1964 (LN No. 54) tentang penetapan Perpu No. 16 tahun 1962 (LN No. 70) tentang sumbangan wadjib istimewa tahun 1962 atas bangunan, menjadi undang-undang.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1964 (LN No. 56) tentang penetapan Perpu No. 1 1963 (LN No. 11) (disempurnakan) tentang pelunasan tjukai tembakau oleh perusahaan² hasil tembakau dan pengeluaran hasil² tembakau dari perusahaan² itu kedalam peredaran bebas, menjadi undang-undang.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1964 (LN No. 59) tentang penetapan Perpu No. 6 tahun 1963 (LN No. 66) tentang Telekomunikasi, menjadi undang-undang.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1964 (LN No. 61) tentang penetapan Perpu No. 5 tahun 1963 (LN No. 63) tentang Surat Hutang Landreform, menjadi undang-undang.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1964 (LN No. 66) tentang menjabut Perpu No. 8 tahun 1963 (LN No. 102) dan Perpu No. 9 tahun 1963 (LN No. 106) dan menetapkan UU pemu-ngutan bea-bea, tjukai-tjukai dan sumbangan-sumbangan wadjib istimewa (SWI) di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1964 (LN No. 69) tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 1964 (LN No. 1) tentang perubahan dan tambahan UU No. 21 tahun 1959 (LN No. 65) mengenai Peraturan tentang Bintang Gerilja, menjadi undang-undang.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1964 (LN No. 72) tentang Gerakan Sukarelawan Indonesia.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1964 (LN No. 78) tentang pernjjataan Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya tetap

sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama **DJAKARTA.**

11. Undang-undang No. 11 tahun 1964 (LN No. 84) tentang pembentukan Pengadilan Tinggi di Palembang dan perubahan daerah hukum Pengadilan Tinggi di Medan dan di Jakarta.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1964 (LN No. 93) tentang pemutusan hubungan kerdja di Perusahaan Swasta.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1964 (LN No. 94) tentang penetapan Perpu No. 2 tahun 1964 (LN No. 7) tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU No. 47 Prp tahun 1960 (LN No. 151) tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara, mendjadi undang-undang.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1964 (LN No. 95) tentang penetapan Perpu No. 3 tahun 1964 (LN No. 8) tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah UU No. 25 tahun 1959 (LN No. 70) tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, mendjadi undang-undang².
15. Undang-undang No. 15 tahun 1964 (LN No. 96) tentang penetapan Perpu No. 4 tahun 1964 (LN No. 9) tentang pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah UU No. 7 Drt tahun 1956 (LN No. 58) tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, mendjadi undang-undang.
16. Undang-undang No. 16 tahun 1964 (LN No. 97) tentang Bagi Hasil Perikanan.
17. Undang-undang No. 17 tahun 1964 (LN No. 101) tentang larangan penarikan tjek kosong.
18. Undang-undang No. 18 tahun 1964 (LN No.106) tentang Wadjib Kerdja Tenaga Para-Medis.
19. Undang-undang No. 19 tahun 1964 (LN No. 107) tentang ketentuan² pokok kekuasaan kehakiman.
20. Undang-undang No. 20 tahun 1964 (No. LN 108) tentang perubahan dan tambahan UU No. 38 Prp tahun 1960 (LN No. 120) tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu.

21. Undang-undang No. 21 tahun 1964 (LN No. 109) tentang Pengadilan Landreform.
22. Undang-undang No. 22 tahun 1964 (LN No. 113) tentang perubahan dan tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925.
23. Undang-undang No. 23 tahun 1964 (LN No. 114) tentang perubahan dan tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944.
24. Undang-undang No. 24 tahun 1964 (LN No. 115) tentang perubahan dan tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932.
25. Undang-undang No. 25 tahun 1964 (LN No. 11) tentang perubahan dan tambahan Aturan Bea Meterai 1921.
26. Undang-undang No. 26 tahun 1964 (LN No. 117) tentang pemberian perangsang penanaman m o d a l.
27. Undang-undang No. 27 tahun 1964 (LN No. 118) tentang pemberian pembebasan Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan.
28. Undang-undang No. 28 tahun 1964 (LN No. 119) tentang pengetjualian beberapa matjam penjusutan² dan pengeluaran² tertentu dari laba perusahaan.
29. Undang-undang No. 29 tahun 1964 (LN No. 120) tentang pengeluaran Pindjaman Obligasi Pembangunan tahun 1964.
30. Undang-undang No. 30 tahun 1964 (LN No. 121) tentang pengeluaran Pindjaman Obligasi Konfrontasi tahun 1964.
31. Undang-undang No. 31 tahun 1964 (LN No. 124) tentang ketentuan² Pokok Tenaga Atom.
32. Undang-undang No. 32 tahun 1964 (LN No. 131) tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa.
33. Undang-undang No. 33 tahun 1964 (LN No. 137) tentang Dana Pertanggungan Wadajib Ketjelakaan Penumpang.
34. Undang-undang No. 34 tahun 1964 (LN No. 138) tentang Dana Ketjelakaan Lalu Lintas Djalan.
35. Undang-undang No. 35 tahun 1964 (LN No. 140) tentang perubahan dan tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara untuk tahun 1963.
36. Undang-undang No. 36 tahun 1964 (LN No. 141) tentang pungutan Istimewa atas Impor untuk pembiajaan pembangunan Djalan Raya Lintas Sumatera.

TAHUN 1965 :

1. Undang-undang Ni. 1 tahun 1965 (LN No. 2) tentang pembentukan Pengadilan Tinggi di Denpasar dan perubahan Daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makassar.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1965 (LN No. 19) tentang perubahan batas wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah UU No. 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur dan UU No. 16 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1965 (LN No. 25) tentang Lalu-lintas dan Angkutan Djalan Raya.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1965 (LN No. 32) tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Djompo.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1965 (LN No. 48) tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya dengan mengubah Undang-undang No. 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang pembangunan Daerah tingkat II di Kalimantan.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1965 (LN No. 49) tentang Pembentukan Daerah tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1965 (LN No. 50) tentang Pembentukan Daerah tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah tingkat II Tandjung Djabung dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1965 (LN No. 51) tentang Pembentukan Daerah tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin dan Daerah tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang No. 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1965 (LN No. 52) tentang Pembentukan Daerah tingkat II Batang dengan mengubah

Undang-undang No. 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

10. Undang-undang No. 10 tahun 1965 (LN No. 55) tentang Pembentukan Kotapradja Sabang dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt. tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1965 (LN No. 54) tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1962 tentang perubahan Undang-undang No. 2 Prp. tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 31) mendjadi undang-undang.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1965 (LN No. 55) tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1962 tentang pentjabutan Undang-undang Krisis Impir 1933 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 44) mendjadi undang-undang.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1965 (LN No. 70) tentang Pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum dan Mahkamah Agung.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1965 (LN No. 75) tentang Perkoperasian.
15. Undang-undang No. 15 tahun 1965 (LN No. 76) tentang Veteran Republik Indonesia.
16. Undang-undang No. 16 tahun 1965 (LN No. 78) tentang Pentjabutan Undang-undang No. 78 tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara tahun 1958 No. 138) jang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 15 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 42)
17. Undang-undang No. 17 tahun 1965 (LN No.79) tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1964 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (LN No. 41 tahun 1964) mendjadi undang-undang.
18. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (LN No. 83) tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.
19. Undang-undang No. 19 tahun 1965 (LN No. 84) tentang Desapradja sebagai bentuk peralihan untuk mempertjepat

terwudjudnja Daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia.

20. Undang-undang No. 20 tahun 1965 (LN No. 86) tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandjarmasin dan perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya.
21. Undang-undang No. 21 tahun 1965 (LN No. 101) tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bukittinggi dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan.
22. Undang-undang No. 22 tahun 1965 (LN No. 117) tentang Anggaran Moneter tahun Anggaran 1966.

TAHUN. 1966.

1. Undang-undang No. 1 tahun 1966 (LN No. 10 — TLN No. 2798) tentang Penarikan diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Internasional Bank for Reconstruction and Development).
2. Undang-undang No. 2 tahun 1966 (LN No. 22 — TLN No. 2804) tentang H y g i e n e.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1966 (LN No. 23 — TLN No. 2805) tentang Kesehatan Djiwa.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1966 (LN No. 31 — TLN No. 2810) tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Ambon dan perubahan daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makassar.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1966 (LN No. 32 — TLN No. 2811) tentang Persetudjuan-persetudjuan untuk menormalisasi hubungan antara Republik Indonesia dan Malaysia.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1966 (LN No. 33 — TLN No. 2812) tentang Pemberian pensiun, tundjangan bersifat pensiun dan tundjangan Kepada Militer Sukarela.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1966 (LN No. 34) tentang Persetudjuan antara Pemerintah Keradjaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang soal-soal keuangan.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1966 (LN No. 35) tentang Keanggotaan Republik Indonesia dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank).

9. Undang-undang No. 9 tahun 1966 (LN No. 36) tentang Keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development).
10. Undang-undang No 10 tahun 1966 (LN No. 38 — TLN No. 2813) tentang Kedudukan Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong mendjelang Pemilihan Umum.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1966) (LN No. 40 — TLN No. 2815) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1966 (LN No. 42) tentang Penetapan Anggaran Induk berserta Tambahan dan Perubahan Anggaran. Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1965
13. Undang-undang No. tahun 1966 (LN No. 43 — TLN No. 2817) tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Moneter tahun anggaran 1966, sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang No. 22 tahun 1965 (LN No. 117 — TLN No. 2793).
14. Undang-undang No. 14 tahun 1966) (LN No. 44) tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1967.

TAHUN 1967 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1967 (LN No. 1 — TLN No. 2818) tentang Penanaman Modal Asing.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1967 (LN No. 2 — TLN No. 2819) tentang Perubahan Undang-undang No. 9 tahun 1966 (LN No. 36) tentang Keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1967 (LN No. 6 — TLN No. 2821) tentang Dewan Pertimbangan Agung.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1967 (LN No. 7 — TLN No. 2822) tentang Penambahan Undang-undang No. 11 tahun 1966 (LN No. 40 — TLN No. 2815) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1967 (LN No. 8 — TLN No. 2823) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

6. Undang-undang No. 6 tahun 1967 (LN No. 10 — TLN No. 2824) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1967 (L NNo. 17 — TLN No. 2826) tentang Veteran Republik Indonesia.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1967 (LN No. 18 — TLN No. 2827) tentang Perubahan dan penjempurnaan tata tjara pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1967 (LN No. 19 — TLN No. 2828) tentang Mengubah Undang-undang No. 25 tahun 1959 (LN No. 70) jo Undang-undang No. 14 tahun 1964 (LN No. 95) dan Pembentukan Propinsi Bengkulu.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1967 (LN No. 21 — TLN No. 2830) tentang Perubahan dan tambahan atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter tahun Anggaran 1966, sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang No. 22 tahun 1965 dan telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 13 tahun 1966.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1967 (LN No. 22 — TLN No. 2831) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1967 (LN No. 23 — TLN No. 2832) tentang Pokok-pokok Perkoperasian.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1967 (LN No. 33 — TLN No. 2841) tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1968.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1967 (LN No. 34 — TLN No. 2842) tentang Pokok-pokok Perbankan.

TAHUN 1968 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1968 (LN No. 11) tentang Perubahan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 13 tahun 1967 (LN No. 33) tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1968.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1968 (LN No. 14 — TLN No. 2847) tentang Perubahan/ tambahan Undang-undang Pajak Pendjualan 1951.

3. Undang-undang No. 3 tahun 1968 (LN No. 26 — TLN No. 2849) tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada International Development Association.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1968 (LN No. 31 — TLN No. 2851) tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang No. 14 tahun 1950 (R.I. Jogjakarta) tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Barat.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1968 (LN No. 32 — TLN No. 2852) tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1968 (LN No. 33 — TLN No. 2853) tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1968 (LN No. 38 — TLN No. 2855) tentang Perubahan Pasal 3 Undang-undang No. 6 tahun 1962 tentang Wabah.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1968 (LN No. 39) tentang Perubahan dan tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1967.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1968 (LN No. 53 — TLN No. 2860) tentang Perubahan Pasal 7 „Indische Comptabiliteitswet” (Stbl. 1925 No. 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Drt. tahun 1954).
10. Undang-undang No. 10 tahun 1968 (LN No. 54 — TLN No. 2861) tentang Penjerahan Pajak-pajak Negara : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1968 (LN No. 55) tentang Charter of the Southeast Asian Ministers of Education Organization.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1968 (LN No. 62 — TLN No. 2864) tentang Pengadilan Tinggi di Manado dan perubahan daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makassar.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1968 (LN No. 63 — TLN No. 2865) tentang Bank Sentral.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1968 (LN No. 64 — TLN No. 2866) tentang Tanda Kehormatan Bintang JALASENA.
15. Undang-undang No. 15 tahun 1968 (LN No. 68 — TLN

- No. 2868) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan Triwulan I tahun 1969.
16. Undang-undang No. 16 tahun 1968 (LN No. 69 — TLN No. 2869) tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Atjeh dan perubahan daerah hukum Pengadilan Tinggi di Medan.
 17. Undang-undang No. 17 tahun 1968 (LN No. 70 — TLN No. 2870) tentang Bank Negara Indonesia 1946.
 18. Undang-undang No. 18 tahun 1968 (LN No. 71 — TLN No. 2871) tentang Bank Dagang Negara.
 19. Undang-undang No. 19 tahun 1968 (LN No. 72 — TLN No. 2872) tentang Bank Bumi Daya.
 20. Undang-undang No. 20 tahun 1968 (LN No. 73 — TLN No. 2873) tentang Bank Tabungan Negara.
 21. Undang-undang No. 21 tahun 1968 (LN No. 74 — TLN No. 2874) tentang Bank Rakjat Indonesia.
 22. Undang-undang No. 22 tahun 1968 (LN No. 75 — TLN No. 2875) tentang Bank Ekspor Impor Indonesia.
 23. Undang-undang No. 23 tahun 1968 (LN No. 76 — TLN No. 2876) tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 1968 (LN No. 49 — TLN No. 2858) tentang Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi, menjadi undang-undang.
 24. Undang-undang No. 24 tahun 1968 (LN No. 78 — TLN No. 2878) tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa.
 25. Undang-undang No. 25 tahun 1968 (LN No. 79 — TLN No. 2879) tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Republik Indonesia.

TAHUN 1969 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1969 (LN No. 8 — TLN No. 2884) tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan perubahan daerah hukum Pengadilan Tinggi di Djakarta.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1969 (LN No. 12 — TLN No. 2887) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1969 (LN No. 14 — TLN

No. 2889) tentang persetudjuan Kompensi Organisasi No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor.

4. Undang-undang No. 4 tahun 1969 (LN No. 17 — TLN No. 2891) tentang Pernyataan tidak berlakunya Undang-undang No. 2 tahun 1958 (LN No. 5) tentang Persetudjuan Perdjandjian antara Republik Indonesia dan R.R.T. mengenai soal Dwikewarga-negaraa.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1969 (LN No. 36 — TLN No. 2900) tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1969 (LN No. 37 — TLN No. 2901) tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1969 (LN No. 38 — TLN No. 2902) tentang penetapan berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1969 (LN No. 39 — TLN No. 2903) tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1968.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1969 (LN No. 40 — TLN No. 2904) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1969 (LN No. 16 — TLN No. 2890) tentang Bentuk-bentuk usaha Negara. menjadi Undang-undang.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1969 (LN No. 41 — TLN No. 2905) tentang Konvensi International Telecommunication Union di Montreux 1965.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1969 (LN No. 42 — TLN No. 2906) tentang Pensiun-Pegawai dan Pensiun-Djanda/Duda Pegawai.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1969 (LN No. 47 — TLN No. 2907) tentang Pembentukan Propensi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1969 (LN No. 53 — TLN No. 2911) tentang Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia di Wina tahun 1964.

14. Undang-undang No. 14 tahun 1969 (LN No. 55 — TLN No. 2912) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerdja.
15. Undang-undang No. 15 tahun 1969 (LN No. 58 — TLN No. 2914) tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat.
16. Undang-undang No. 16 tahun 1969 (LN No. 59 — TLN No. 2915) tentang Susunan dan kedudukan M.P.R., D.P.R. dan D.P.R. Daerah.

TAHUN 1970

1. Undang-undang No. 1 tahun 1970 (LN No. 1 — TLN No. 2918) tentang Keselamatan Kerdja.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1970 (LN No. 8 — TLN No. 2923) tentang Pentjabutan Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 (LN No. 82) tentang Larangan keanggotaan Partai Politik bagi Pedjabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1970 (LN No. 20 — TLN No. 2928) tentang Ketentuan-ketentuan pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1970 (LN No. 21 — TLN No. 2929) tentang Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1970 (LN No. 22 — TLN No. 2930) tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun anggaran 1970/1971.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1970 (LN No. 40 — TLN No. 2938) tentang Tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1969/1970.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1970 (LN No. 41 — TLN No. 2939) tentang Penghapusan Pengadilan Landreform.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1970 (LN No. 43 — TLN No. 2940) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1970 (LN No. 44 — TLN No. 2941) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944.

10. Undang-undang No. 10 tahun 1970 (LN No. 45 — TLN No. 2942) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Pajak Deviden 1959.
 11. Undang-undang No. 11 tahun 1970 (LN No. 46 — TLN No. 2943) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 1 tahun 1967 (LN No. 1 — TLN No. 2818) tentang Penanaman Modal Asing.
 12. Undang-undang No. 12 tahun 1970 (LN No. 47 — TLN No. 2944) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 6 tahun 1968 (LN No. 33 — TLN No. 2833) tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
 13. Undang-undang No. 13 tahun 1970 (LN No. 73 — TLN No. 2950) tentang Tata-tjara tindakan kepolisian terhadap Anggota²/Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.
 14. Undang-undang No. 14 tahun 1970 (LN No. 74 — TLN No. 2951) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
-

ICHTISAR DJUMLAH UNDANG-UNDANG

I. R. I. JOGJAKARTA : 1945 — 1950

1. 1945	1
2. 1946	24
3. 1947	41
4. 1948	35
5. 1949	12
6. 1950	20

djumlah semua : 133

II. R. I. S. dan R. I. : 1950 — 1970

1. 1950	8
2. 1951	24
3. 1952	24
4. 1953	37
5. 1954	76
6. 1955	12
7. 1956	35
8. 1957	80
9. 1958	87
10. 1959	29
11. 1960	9
12. 1961	22
13. 1962	19
14. 1963	14
15. 1964	36
16. 1965	22
17. 1966	14
18. 1967	14
19. 1968	25
20. 1969	16
21. 1970	14

djumlah semua : 617

DAFTAR MOSI, RESOLUSI DAN INTERPELASI DALAM MASA DPR - RIS.

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
1.	Mosi S. Harsono cs ttg. penggabungan daerah Djawa Timur.	diterima dengan suara 81:5 tgl. 2 Maret 1950
2.	Mosi Sosrodanukusumo cs ttg .penggabungan Daerah Madura	s. d. a.
3.	Mosi Mohd. Hasan cs ttg. penggabungan Daerah Sumatera Selatan	s. d. a.
4.	Mosi Endon cs ttg. penggabungan Djawa Tengah.	s. d. a.
5.	Mosi Yunar Nasution cs ttg. penggabungan daerah Asahan dan Labuan Ratu	diterima dengan suara 74:8 tgl. 2 Maret 1950
6.	Mosi Mr. Mohd. Yamin cs ttg. penggabungan daerah Pasundan	diterima dengan suara 81:5 tgl. 2 Maret 1950
7.	Mosi Siradjudin Abas cs. ttg. penggabungan daerah Padang	s. d. a.
8.	Mosi Yusup Rasidi cs ttg. penggabungan daerah Bangka	s. d. a.
9.	Mosi Amelz cs. ttg. penggabungan daerah Sabang	s. d. a.
10.	Mosi Kumun Kusumojudo cs. ttg. penggabungan daerah Dajak Besar	s. d. a.
11.	Mosi I. A. Mocis cs. ttg. penggabungan Daerah Kalimantan Timur	s. d. a.
12.	Mosi Abdullah Aidid cs ttg. penggabungan daerah Blitang.	s. d. a.
13.	Mosi Mr. Mohd. Yamin cs. ttg. Penjelesaian Persengketaan Irian.	diterima dengan aklamasi tgl. 11 Maret 1950.
14.	Mosi Mr. Mohd. Yamin sc. ttg. penggabungan daerah Riau	diterima dengan aklamasi tgl. 27 April 1950.
15.	Mosi Mr. Mohd. Yamin cs. ttg. penggabungan daerah Kotawaringin	s. d. a.
16.	Mosi Mr. Mohd. Yamin cs ttg. penggabungan daerah Sumatera	diterima dengan suara 73:11 tgl. 4 April 1950.
17.	Mosi Ir. Sakirman cs. ttg. penggabungan RRT dan Vietnam	ditolak dengan suara 38:49
18.	Mosi Sudarso cs. ttg. penggabungan Kalimantan Barat.	diterima dengan 50:1 suara tgl. 15-4-1950.
19.	Mosi Mohd. Natsir cs ttg. penggabungan integral	ditunda sampai habis reses
20.	Mosi K. Werdojo cs. ttg. perajaan 1 Mei	diterima dengan aklamasi tgl. 15-4-1950.

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
21.	Mosi Mohd. Natsir cs ttg. pengakuan Vietnam	diterima dengan 49:38 suara tgl. 3-6-1950.
22.	Mosi G. A. Moeis cs. ttg. penggabungan daerah Bandjar	diterima dengan 81:5 suara tgl. 2-3-1950.
23.	Mosi Iwa Kusumasumantri cs. ttg. Anggaran Belanda	diterima dengan 45:2 suara tgl. 13-6-1950.
24.	Mosi Siauw Giok Tjhan cs ttg. Dewan Pengawas Keuangan	diterima dengan aklamasi/ tgl. 23-6-1950.
25.	Mosi Ahem Erningpradja cs. ttg. pembubaran Barisan Pegawai Perkebunan	ditunda.

I N T E R P E L A S I

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Interpelasi Andi Gapa cs. ttg. perkembangan Politik di N. I. T. | diterima dengan suara bulat tgl. 13-4-1950. |
| 2. | Interpelasi Diapari cs. ttg. Daerah Bandjar | diubah djadi pertanjaan |

DAFTAR MOSI, RESOLUSI DAN INTERPELASI DALAM MASA D. P. R. SEMENTARA

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
1.	Mosi Hutomo Supardan dkk. ttg. pelaksanaan Mosi Wondo Amiseno dkk.	ditolak dengan 101:33 suara
2.	Mosi Ahem Erningpradja dkk. ttg. sekitar soal perburuhan.	diterima dengan 74:33 suara tgl. 25-9-1950.
3.	Mosi Mr. Mohd. Yamin dkk. ttg. penundukkan formateur oleh Presiden.	tidak sampai dibitjarakan karena sementara itu Peme- rintah telah diberi kepertja- jaan oleh D.P.R. s. d. a.
4.	Mosi Ngadiman Hardjosubroto dkk. ttg. tidak menjetudjui program Kabinet Baru.	ditjabut
5.	Mosi Mr. Tambunan dkk. ttg. Keputusan Menteri Luar Negeri mengenai Misi Irian.	Diterima dengan suara bulat
6.	Mosi K. Werdojo dkk. ttg. memasukkan Sdr. Silas Papare mendjadi Anggota DPR.	
7.	Mosi Peris Pardede dkk. ttg. pembatalan perdjandjian K. M. B.	Ditolak dengan suara kurang dari $\frac{1}{4}$.
8.	Mosi Bebas Daeng Lalo dkk. ttg. penjelesai- an soal gerilja Sulawesi Selatan.	Belum sampai dabitjarakan.
9.	Mosi Mh. Tauchid dkk. ttg. menindjau kem- bali putusan kenaikan padjak bumi.	Diterima dengan suara bulat tgl. 3-11-1950.
10.	Mosi Mh. Tauchid dkk. ttg. pembebasan te- wanan ² korban perdjungan.	s. d. a. tgl. 25-1-1950.
11.	Mosi Kabarsih dkk. ttg. nasionalisasi segala perusahaan listrik dan gas di Indonesia.	diterima dengan 120:19 suara tgl. 18-12-1950.
12.	Mosi K. Werdojo dkk. ttg. kenaikan tarip listrik.	Digabung dengan mosi Sidik Djojokusarto dkk.
13.	Mosi Sidik Djojokusarto dkk. ttg. kenaikan tarip listrik.	Ditolak dengan 89:64 suara tgl. 18-12-1950.
14.	Mosi Mh. Sadak dkk. ttg. Pembetulan Panitia Negara kenaikan tarip listrik dan menghenti- kan sewa instalasi.	Diterima dengan 93:0 suara tgl. 18-12-1950.
15.	Mosi S. Hadikusumo dkk. ttg. Pentjabutan Peraturan Pemerintah No. 39 th. 1950.	Diterima dengan 76:48 suara tgl. 22-1-1951.
16.	Mosi Kusnan dkk. ttg. memasukkan Irian Barat dengan segera kedalam wilayah R.I., penghapusan Uni Indonesia-Belanda dan penindjauan kembali hasil ² lain dari K.M.B.	Ditolak dengan 66:63 suara tgl. 9-1-1951.
17.	Mosi Mr. Djody Gondokusumo dkk. ttg. s.d.a.	Mosi ini diadakan pemu- ngutan suara karena seba- gian para pengusulnja menarik diri.

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
18.	Mosi Iwa Kusumasumantri dkk. ttg. sekitar kebidjaksanaan Pemerintah dalam hal menjelenggarakan Anggaran Belandja th. '50/'51.	Ditjabut kembali
19.	Mosi Sutardjo dkk. ttg. Pembentukan sebuah Panitia Negara untuk menindjau kembali U.U. Pokok Pemerintahan Daerah R.I. No. 22/1948.	Ditjabut kembali
20.	Mosi Rangkajo Rasuna Said dkk. ttg. memberhentikan berlakunja padjak peredaran.	Tidak diadakan pemungutan suara karena telah tertjapa pergetudjuan antara para pengusul dan Pemerintah. Ditjabut.
21.	Mosi Mr. Mohd. Yamin dkk. ttg. mendesak Pemerintah untuk mentjabut kembali Peraturan Kekuasaan Militer No. 1/1951 .	Ditjabut.
22.	Mosi K. Werdojo dkk. ttg. s. d. a.	Diterima dengan suara bulat tgl. 2-8-1951.
23.	Mosi Teuku Mhd. Hasan dkk. ttg. Panitia Negara Urusan Pertambangan.	Onbeslist.
24.	Mosi Bebasa Daeng Lalo dkk. ttg. pengangkatan R. Sudiro mendjadi Gubernur Sulawesi	Dianggap selesai tgl. 21-8-1951.
25.	Mosi Asrarudin dkk. ttg. nasionalisasi perusahaan B. V. M.	Ditolak dengan 64:50 suara tgl. 4-9-1951.
26.	Mosi Mr. Iwa Kusumasumantri dkk. ttg. Peraturan Pemerintah No. 10/1951 ttg. pemberian tundjangan luar biasa pada pegawai bangsa Asing.	Tidak mentjapai keputusan yang sah. Diserahkan kepada Panitia Permusjawaratan. Ditjabut oleh pengusulnja.
27.	Mosi Amelz dkk. ttg. sekitar keberangkatan Djema'ah Hadji Indonesia.	Ditolak dengan 91:21 suara tgl. 1-11-1951.
28.	Mosi Sumardi dkk. ttg. pembebasan semua tahanan.	Tidak dibitjarakan.
29.	Mosi Tan Po Goan dkk. ttg. pernjjataan tidak puas terhadap djawaban Pemerintah atas interpelasi Tan Po Goan mengenai penangkapan ² "Pembersihan".	Tidak dibitjarakan.
30.	Mosi Mh. Dalijono dkk. ttg. permintaan mengadakan peraturan ganti-rugi bagi korban ² penahanan dan penawanan yang ternjata tidak bersalah.	Diterima dengan suara bulat
31.	Mosi S. Utarjo dkk. ttg. pembagian beras untuk rakjat.	Ditjabut kembali.
32.	Mosi Mr. Sunario dkk. ttg. perdjandjian ² dengan negara lain.	
33.	Mosi Hutomo Supardan dkk. ttg. uang perak.	

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
34.	Mosi I.J. Kasimo dkk. ttg. memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk melandjutkan pekerdjaannya.	Diterima tgl. 19-6-1952.
35.	Mosi Z. Baharudin dkk. ttg. pernataan tidak pertjaja atas kebidjaksanaan Menteri Pertahanan dalam menjelesaikan pertikaian dalam Angkatan Perang.	Ditolak dengan 80:39 suara tgl. 15-10-1952.
36.	Mosi Manai Sophian dkk. ttg. mendesak kepada Pemerintah supaya mempertjepat berachirnja Misi Militer Belanda dan segera membentuk Panitia Negara.	Diterima dengan 91:54 suara tgl. 16-10-1952.
37.	Mosi I.J. Kasimo dkk. ttg. mendesak kepada Pemerintah supaya mempertjepat berachirnja M. M. B. dan segera membentuk Panitia Negara.	Ditjabut karena sudah diterima oleh Pemerintah.
38.	Mosi Abulhajat dkk. ttg. penghapusan monopoli garam	Diterima setjara aklamasi tgl. 28-7-1954.
39.	Mosi Mr. Djody Gondokusumo dkk. tgl. mendahulukan Undang ² Pokok Pertahanan dari segala Undang ² mengenai pertahanan.	Ditolak dengan 9:77 suara tgl. 6-9-1953.
40.	Mosi Iwa Kusumasumantri dkk. ttg. pembentukan Kementrian Angkatan Laut dan Angkatan Udara disamping Kementerian Pertahanan.	Belum ada keputusan.
41.	Mosi O. Rondonuwu dkk. ttg. segera mengadakan hubungan diplomasi dengan Sovjet Uni dalam tahun 1953.	Diterima dengan 82:43 suara tgl. 9-4-1953.
42.	Mosi Sugih Tjokrosumarto dkk. ttg. sekitar pembukaan Perwakilan di Sovjet Uni.	Ditjabut.
43.	Mosi Sutardjo Kartohadikusumo dkk. ttg. Pembentukan sebuah Panitia Pemeriksa ttg. tjara bekerdja Kantor Urusan Perumahan Djakarta dan Bagian Urusan Perumahan Pusat di Kementerian Sosial.	Diterima setjara aklamasi tgl. 17-11-1953.
44.	Mosi Mh. Sadak dkk. ttg. Pembekuan Keputusan Bersama Menteri Perekonomian Keuangan tgl. 22-1-1953 No. 817	Ditolak dengan 58:27 suara
45.	Mosi K. H. Tjikwan lkk. ttg. Peraturan Devisen.	Diterima dengan 97:0 suara tgl. 28-5-1953.
46.	Mosi Sidik Kertapati dkk. ttg. penghentian pelaksanaan pembagian tanah di Sumatera Utara	Ditjabut.

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
47.	Mosi Sutardjo Kartohadikusumo dkk. ttg. Pengangkatan Kepala Daerah Minahasa dan perubahan P. P. No. 29 tahun 1953.	Diterima dengan 84:0 suara tgl. 11-9-1953.
48.	Mosi Tan Po Goan dkk. ttg. Surat Djaksa Agung tgl. 10-10-1953 kepada P. W. I. Djakarta	Ditolak dengan 76:41 suara tgl. 8-12-1952.
49.	Mosi K. H. Tjikwan dkk. ttg. Perumusan Konsepsi ttg. Ekonomi Nasional.	Ditolak dengan 101:60 suara tgl. 29-4-1954.
50.	Mosi Mr. Burhanudin Harahap dkk. ttg. Penjabutan kembali P. P. No. 35 tahun 1953.	Ditolak dengan 101:69 suara tgl. 19-2-1954
51.	Mosi Maizir Achmadyns dkk. ttg. Pembagian Kalimantan menjadi 3 Daerah Otonom.	Belum dibitjarakan.
52.	Mosi Djuir Muhamad dkk. ttg. Penundjukan Atjeh sebagai Daerah Otonom.	Pembitjaraannja ditangguhkan.
53.	Mosi Yoenan Nasution dkk. ttg. mengajukan RUU Pembentukan DPRD dan Pemilihan Anggota DPRD.	Belum selesai.
54.	Mosi Moh. Tauchid dkk. ttg. penggantian politik pembelian padi mulai masa pembelian 1955.	Ditolak dengan 86:49 suara.
55.	Mosi Tan Po Goan dkk. ttg. pengeluaran orang ² asing dari Indonesia.	Ditolak dengan 99:48 suara tgl. 14-4-1955.
56.	Mosi Mr. Jusuf Wibisono dkk. ttg. pernyataan tidak pertjaja kepada Kabinet Ali Sastroamidjojo.	Ditolak dengan 115:92 suara tgl. 14-12-1954.
57.	Mosi Amelz dkk. ttg. tanda gambar P. K. I. dan orang ² tak berpartai.	Belum dibitjarakan.
58.	Mosi A. Z. Abidin dkk. ttg. mentjabut undang ² Darurat No. 16 tahun 1951 mengenai penyelesaian perselisihan perburuhan.	s. d. a.
59.	Mosi Asro Sastroatmodjo dkk. ttg. perbaikan kehidupan dan gaji pegawai Negeri.	Diterima tgl. 27-8-1954.
60.	Mosi Mr. Jusuf Wibisowo dkk. ttg. tidak pertjaja terhadap Kebidjaksanaan Menteri Keuangan.	Diterima tgl. 27-3-1954. Iandjut.
61.	Mosi Mr. Jusuf Wibisowo dkk. ttg. menasionalisasi tanah-tanah partikelir.	Tidak dibitjarakan lebih Iandjut.
62.	Mosi Sutardjo Kartohadikusumo dkk. ttg. supaya Kabinet Burhanudin Harahap menjerahkan kembali mandatnja.	Ditarik kembali karena Pemerintah akan menjerahkan mandatnja.
63.	Mosi A. A. Achsien dkk. ttg. pernyataan tidak pertjaja pada politik Pemerintah.	Ditjabut oleh pengusulnja.

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
64.	Mosi Z. Baharudin dkk. ttg. menjatakan tidak pertjaja akan kebikdaksanaan Menteri Per-tahanan.	Ditjabut oleh penguasinja.
65.	Usul mosi Siauw Giok Tjhan dkk. ttg. pengang-katan Anggota ² DPR dari Golongan Ketjil. (Tahun 1956).	Ditarik kembali karena Peme-rintah telah memberikan dja-minan untuk mengadakan koreksi.
66.	Usul mosi Hutomo Supardan dkk ttg. Ang-garan Belandja R.I. untuk tahun dinas 1956. Tentang pertanggungan djawab penggunaan dana ² rahasia).	Pembitjaraan ditangguhkan dan sedjak itu tidak masuk atjara lagi.
67.	Usul mosi Anwar Harjono dkk. ttg.. Undang ² Persetudjuan Perdjandjian Dwi kewargane-garaan dengan R.R.T.	Ditolak dengan 110:39 suara.
68.	Usul mosi Drs. J. Piry dkk. ttg. Anggaran Belandja R.I. Untuk tahun dinas 1957 (Tentang keuntungan Perusahaan Belanda).	Pembitjaraannya ditunda dan selandjutnja tidak pernah di-masukan atjara rapat-rapat.
69.	Usul mosi Mr. Memet Tanumidjaja dkk. ttg. Keterangan Pemerintah mengenai usaha ² nor-malisasi keadaan Negara.	Diubah mendjadi Usul Reso-lusi dan diteriam setjara aklamasi tgl. 29-11-1957.
70.	Usul mosi Abdulhajat dkk. ttg. Keterangan Pemerintah mengenai masalah Irian Barat.	Disetudjui tgl. 28-2-1958.
71.	Usul mosi Sukami Djojodiprodo dkk. ttg. Anggaran Belandja R.I. untuk tahun dinas 1959 (Tentang perbaikan nasib pegawai negeri).	Disetudjui dengan aklamasi tgl. 18-12-1958.
72.	Usul mosi R. Suprpto dkk. ttg. Anggaran Belandja R.I. untuk tahun dinas 1959 (Tentang padjak upah).	Ditarik kembali.
73.	Usul mosi Murtadji Bisri dkk. ttg. penjelesaian bandjir.	Ditarik kembali.
R E S O L O S I		
1.	Resolusi K. Werdojo dkk. ttg. mengirinkan Misi Parlemen keluar negeri berkenaan dengan soal Irian Barat.	Diterima dengan suara bulat tgl. 21-9-1950.
2.	Resolusi Diapari dkk. ttg. sekitar pemberonta-kan di Maluku Selatan.	Ditolak dengan suara 74:60.
3.	Resolusi Lobo dkk. ttg. pernjataan pendjela-san terhadap perbuatan Pemerintah Belanda jang tersimpan dalam tilgram Drees.	Ditjabut.
4.	Resolusi Latuharhary dkk. ttg. sekitar pem-berontakan di Maluku Selatan.	Diterima dengan suara 76:66 tgl. 9-10-1950.
5.	Resolusi Z. Baharudin dkk. ttg. pembebasan tahanan politik.	Ditjabut.

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
6.	Resolusi W. Wondoamiseno dkk. ttg. penetapan Hari Raja Idul Fitri.	Pembijtaraan akan ditetapkan oleh Panitia Permusjawaratan.
7.	Resolusi Amelz dkk. ttg. keberangkatan Djema'ah Hadji Indonesia.	Diubah menjadi usul mosi dan tidak mentjapai keputusan jang sah.
8.	Resolusi Hamid Algadrie dkk. ttg. sekitar perdjandjian perdamaian dengan Djepang di Francisco.	Tidak ada keputusan.
9.	Resolusi Iwa Kusumasumantri dkk. ttg. Anggaran Belandja Negara tahun 1950/1951 dan tahun 1952/1953.	Ditrima dengan 75:17 suara tgl. 3-7-1952.
10.	Resolusi Tjugito dkk. ttg. nasib buruh non-actief.	Diserahkan kepada Panitia Permusjawaratan kapan akan dibitjarakan.
11.	Resolusi Hutomo Supardan dkk. ttg. Sistim dalam penundjukan Pembentukan Kabinet.	Ditolak dengan 81:30 suara tgl. 29-2-1952.
12.	Resolusi Z. Arifin dkk. ttg. pentjabutan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1952.	Disetudjui tgl. 28-3-1952.
13.	Resolusi Subadio Sastrosatomo dkk. ttg. pembentukan Panitia Angket untuk menjelidiki soal disekitar AURI.	Belum dibitjarakan.
14.	Resolusi M.H. Lukman dkk. ttg. Pembatalan perdjandjian K.M.B.	Tidak dibitjarakan lebih lanjut.
15.	Resolusi A.N. Hadjarati dkk. ttg. memberikan persetudjuan atas tindakan ² Pemerintah mengenai pembubaran Uni Indonesia-Belanda.	Belum dibitjarakan.
16.	Resolusi Margono Djojohadikusumo dkk. ttg. untuk mengadakan angket tentang usaha memperoleh dan tjara mempergunakan devisen.	Disetudjui tgl. 23-3-1956.
17.	Usul resolusi Nj. Supeni Pudjobuntoro dkk. ttg. pentjegahan pertjobaan dan pemakaian bom atom.	Disetudjui setjara aklamasi tgl. 21-4-1956.
18.	Usul Resolusi Achmad Sjaichu dkk. ttg. pernyataan simpati terhadap perdjjuangan Rakjat Aldjazair.	s. d. a.
19.	Usul Resolusi Prof. Mr. Moh. Yamin dkk. ttg. Anggaran Belandja R.I. untuk tahun dinas 1956 (Tentang pernyataan bahwa seluruh Indische Staatsregeling 1925 tidak berlaku dalam R.I.).	Pembijtaraannya ditunda.
20.	Usul Resolusi Ir. Thaher Thajeb dkk. ttg. Anggaran R.I. untuk tahun dinas 1956 (Tentang pemisahan Anggaran Belandja untuk plan lima tahun dari Anggaran R.I. untuk tahun 1956).	Pembijtaraannya ditanggihkan. Sedjak itu tidak dimasukan atjara lagi.

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
21.	Usul Resolusi Nj. Supeni Pudjobuntoro dkk. ttg. pernyataan adhesi terhadap nasionalisasi Terusan Suez.	Disetudjui setjara aklamasi tgl. 10-8-1956.
22.	Usul Resolusi Seksi Luar Negeri ttg. pernyataan penghargaan, harapan dan kepertajaan akan usaha penyelesaian soal Irian Barat setjara damai.	Disetudjui setjara aklamasi tgl. 23-10-1956.
23.	Usul Resolusi Mursid Idris dkk. ttg. masalah pembebasan pedjuang Aldjazair.	Disetudjui setjara aklamasi tgl. 2-11-1956.
24.	Usul Resolusi Nj. Superi Pudjobuntoro dkk. ttg. masalah agresie oleh Israel Inggris dan Perantjis di Mesir.	Disetudjui setjara aklamasi tgl. 2-11-1956.
25.	Usul Resolusi Anwar Harjono dkk. ttg. masalah perjuangangan rakjat Hongaria.	Disetudjui dengan 102:29 suara tgl. 15-11-1956.
26.	Usul Reslusi Adam Malik dkk. ttg. penarikan mundur tentara asing dari wilayah negara lain.	Disetudjui dengan 71:0 suara tgl. 15-11-1956.
27.	Usul Resolusi Mr. Imron Rosjadi dkk. ttg. pernyataan menjokong delegasi Indonesia di PBB dalam membitjarakan masalah Irian Barat.	Disetudjui dengan aklamasi tgl. 15-2-1957.
28.	Usul Resolusi Runturambi dkk. ttg. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1957 (Tentang sekitar djandji Pemerintah).	Ditolak dengan 93:48 suara tgl. 20-12-1957.
29.	Usul Resolusi K. Werdojo dkk. ttg. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1957 (Tentang sekitar penjusunan Anggaran mengenai Perusahaan ²).	Ditolak dengan 91:10 suara tgl. 20-12-1957.
30.	Usul Resolusi Hutomo Supardan dkk. ttg. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1957 (Tentang perubahan sistim Anggaran Belanda jang praktis).	Pembitjaraan ditangguhkan. Selandjutnja tidak pernah masuk atjara lagi.
31.	Usul Resolusi Achmad Dara Sjahrudin dkk. ttg. pendjelasan terhadap tindakan Pemerintah mengenai pengeluaran ² Undang ² Darurat.	Sedjak tgl. 3-10-1957 tidak dimasukkan atjara lagi.
32.	Usul Resolusi Imron Rosjadi dkk. ttg intervensi bersendjata Inggris terhadap Negara Oman.	Disetudjui tgl. 27-8-1957.
33.	Usul Resolusi R. Abulhajat dkk. ttg. dukungan kepada delegasi Indonesia di PBB dalam memperjuangkan Irian Barat dalam sidang PBB ke-XII.	Disetudjui tgl. 23-9-1957.

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
34.	Usul Resolusi Asrarudin dkk. ttg. Keterangan Pemerintah ttg. usaha-usaha normalisasi keadaan negara. (tentang realisasi pemulihan kerdja sama Dwi-tunggal Sukarno-Hatta).	Ditarik kembali tgl. 29-11-'57.
35.	Usul Resolusi Mr. Memet Tanumidjaja dkk. ttg. Keterangan Pemerintah ttg. usaha? normalisasi keadaan negara. (tentang pembentukan Panitia Ad hoc untuk mentjari bentuk kerdja sama Sukarno-Hatta).	Diterima setjara aklamasi tgl. 29-11-1957.
36.	Usul Resolusi Lucas Kustarjo dkk. ttg. penundaan keberangkatan Presiden Sukarno keluar Negeri.	Ditarik kembali tgl. 11-12-57.
37.	Usul Resolusi Nj. Samari dkk. ttg. masalah beras.	Ditarik kembali tgl. 12-12-'57.
38.	Usul Resolusi Drs. J. Piry dkk. ttg. Rentjana Pembangunan Lima Tahun.	Ditarik kembali tgl. 11-11-'58.
39.	Usul Resolusi Anwar Harjono dkk. ttg. Keterangan Pemerintah mengenai masalah Irian Barat.	Ditolak dengan 16:93 suara tgl. 28-2-1958.
40.	Usul Resolusi Nj. Hafni Zahra Abuhanifah dkk. ttg. protes terhadap hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pemerintah Prantjis atas gadis Pahlawan Aldjazair.	Diterima dengan aklamasi tgl. 31-1-1958.
41.	Usul Resolusi Njono dkk ttg. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1959. (tentang kenaikan gaji pokok pegawai negeri setjara integral).	Disetudjui setjara aklamasi tgl. 18-12-1958.
42.	Usul Resolusi Nj. Mudikdio dkk. ttg. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1959. (tentang penurunan harga obat-obatan).	s.d.a.
43.	Usul Resolusi Moh. Noor Abdulgani dkk. ttg. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1959. (tentang memperkuat industri dalam negeri).	s. d. a.
44.	Usul Resolusi Sumardi Jatmosumarto dkk. ttg. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1959. (Tentang Koperasi Kopra).	Disetudjui setjara aklamasi tgl. 18-12-1958.
45.	Usul Resolusi R. P. Situmeang dkk. ttg. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1959. (tentang N.I.A.M.).	Atas permintaan pengusul pembijaraannya ditangguhkan. Selandjutnja tidak masuk atjara lagi.

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
46.	Usul Resolusi Tj. Oey Hay Djoen dkk. ttg. Anggaran Republik Inonesia untuk tahun dinas 1959. (tentang import-export minjak tanah dan penggunaan kapasitas perusahaan minjak tanah asing).	Disetudjui dengan aklamasi tgl. 18-12-1958.
47.	Usul Resolusi Sutomo (Bung Tomo) dkk. ttg. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1959. (tentang penjediaan anggaran belandja khusus bagi Daerah ² bahaja kelaparan (hongeroediem).	Disetudjui tgl. 18-12-1958.
48.	Usul Resolusi Sumardi Jatmosumarto dkk. ttg. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1959. (tentang desakan kongsi ² minjak tanah).	Disetudjui dengan aklamasi tgl. 18-12-1958.
49.	Usul Resolusi E. Wiratma Astapradja dkk. ttg. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1959. (tentang penindjauan kembali pene-tapan harga padi rakjat).	s d. a.
50.	Usul Resolusi A. mung Amran dkk. ttg. Ang-garan Republik Indonesia untuk tahun dinas 1959. (tentang penghapusan Djawatan Penge-ralahan Tenaga Rakjat).	Disetudjui dengan suara 110:32 tgl. 18-12-1958.
51.	Usul Resolusi Nj. Sumari dkk. ttg. kenaikan harga beras indjeksi.	Ditarik kembali.
52.	Usul Resolusi Nj. Supeni dkk. ttg. konperensi para Menteri Luar Negeri di Djenewa.	Disetudjui dengan aklamasi tgl. 20-5-1959.

I N T E R P E L A S I

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Interpelasi Mh. Dalijono dkk. ttg. korban Ma-diun "Affaire." | Diterima tgl. 23-1-1951. |
| 2. | Interpelansi Nj. Mudikdio dkk. ttg. kematiannja 16 tawanan D.I. di Nusakambangan. | Diterima tgl. 23-1-1951. |
| 3. | Intepelasi Sunardi dkk. ttg. larangan Pemerin-tah untuk memperingati tanggal 12 Nopember sebagai hari pemberontakan rakjat melawan Imperialisme Barat. | Interpelasi ini oleh Ketua di-kembalikan kepada interplan dengan permintaan supaya di-rubah mendjadi pertanyaan. |
| 4. | Interpelasi para Anggota Seksi Pertahanan mengenai interview Kepala Staf Angkatan Darat tgl. 22-12-1950. | Diterima tgl. 11-1-1951. |
| 5. | Interpelasi Iwa Kusumasumantri dkk. ttg. ter-lambatnja pemerintah mengajukan Rantjangan Belandja Negara kepada DPR. | Diterima tgl. 26-1-1951. |
| 6. | Interpelasi Tjugito dkk. ttg. nasib buruh non-actief. | Diterima dengan suara bulat tgl. 2-8-1951. |

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
7.	Interpelasi Djaetun dkk. ttg. pengusiran Wang Chih Yuen.	Ditolak dengan 51:72 suara tgl. 2-8-1951.
8.	Interpelasi Zainul Baharuddin dkk. ttg. sekitar pembebasan 950 tahanan politik.	Diterima dengan suara bulat tgl. 26-6-1951.
9.	Interpelasi W. Wondoamiseno dkk. ttg. sekitar Hari Raja Idul Fitri (1 Sjawal 1370).	Diterima dengan suara bulat tgl. 8-10-1951.
10.	Interpelasi Amelz dkk. ttg. Keberangkatan Djema'ah Hadji Indonesia.	Diterima dengan suara bulat tgl. 23-8-1951.
11.	Interpelasi Djekosudjono dkk. ttg. sekitar pertikaian antara Serikat Buruh Kereta Api dan Djawatan Kereta Api.	Ditjawab.
12.	Interpelasi Tan Po Goan dkk. ttg. penangkapan-penangkapan "pembersihan".	Diterima dengan suara bulat tgl. 26-9-1951.
13.	Interpelasi Mr. Djody Gondokusumo dkk. ttg. M. S. A.	Belum dibitjarkan.
14.	Interpelasi Sutardjo Kartohadikusumo dkk. ttg.. kebotjoran naskah udjian penghabisan S.M.P./S.M.A. tahun 1953.	Selesai tgl. 27-5-1953.
15.	Interpelasi Tjikwan dkk. ttg. tindakan ² Pemerintah disekitar soal ² perekonomian.	Ditolak dengan suara 76:41.
16.	Interpelasi Subadio Sastrosatomo dkk. ttg. A.U.R.I. dan P.P. tentang reorganisasi pertanian dan pimpinannya.	Selesai tgl. 27-8-1954.
17.	Interpelasi Arso Sastrosatomo dkk. ttg. kedudukan, kehidupan dan gadji pegawai negeri.	Pembitjaraan belum selesai
18.	Interpelasi S. Narto dkk. ttg. hasil usahannya Koordinator Tambang Minjak Sumatra Utara.	Disetudjui tgl. 28-1-1955.
19.	Interpelasi Amelz dkk. ttg. Pidato Presiden pada tanggal 9 Nopember 1954 di Palembang.	Disetudjui tgl. 6-4-1955.
20.	Interpelasi I.A. Moeis dkk. ttg. kebidjaksanaan Menteri Luar Negeri mengenai claim nasional tentang Irian.	Disetudjui tgl. 24-1-1956
21.	Interpelasi Amri Yaya dkk. ttg. Soal ² Urusan Pelajaran.	s. d. a.
22.	Interpelasi Rangkajo Rasuna Said dkk. ttg. tindakan ² Pemerintah, dilapangan ekonomi.	s. d. a.
23.	Interpelasi Ir. Sakirman dkk. tgg. politik Penanaman modal asing Pemerintah Burhanudin Harahap.	s. d. a.
24.	Interpelasi Djekosudjono dkk. ttg. kebidjaksanaan Menteri Perekonomian mengenai tambang minjak Sumatra Utara.	Tidak diadakan pembitjaraan lebih lanjut.

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
25.	Usul interpelasi Subadio Sastrosatomo dkk. ttg. krisis hukum dan krisis kewibawaan Pemerintah	Atas permintaan pengusul, pemitjaraannya ditangguhkan. Dianggap selesai setelah Kabinet Ali.
26.	Usul interpelasi Siauw Giok Tjhan dkk. ttg. soal pengangkatan Anggota ² DPR dari Golongan Ketjil.	Pemitjaraan berachir dengan perasaan tidak puas dari para interpelasi.
27.	Usul interpelasi Sutomo dkk. ttg. Peraturan K.S.A.D. No. P.K.M./001/1956.	Sedjak tgl. 31-10-1956 tidak masuk atjara lagi.
28.	Usul interpelasi Sutomo dkk. ttg. sekitar Konsepsi Presiden Sukarno.	Sedjak tgl. 15-3-1957 tidak masuk atjara lagi.
29.	Usul interpelasi Hutomo Supardan dkk. ttg. tindakan ² Gubernur Bank Indonesia Mr. Sjafrudin Prawiranegara.	Sedjak tgl. 7-2-1958 tidak masuk atjara lagi.
30.	Usul interpelasi Sutomo dkk. ttg. Golongan Fungsionil dalam D.P.R.	Dianggap selesai tgl. 6-3-1959.

DAFTAR USUL²

RESOLUSI dan INTERPELASI DALAM MASA DPR—GR

Urut No.	U r a i a n	K e t e r a n g a n
TAHUN SIDANG 1960/1961		
1.	Usul Pernyataan Pendapat Komisi "I" (Luar Negeri) ttg. Pemutusan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Belanda	Disetudjui tanggal 31 Agustus 1960.
2.	Usul Pernyataan Pendapat Komisi "I" (Luar Negeri) ttg. Kundjungan kapal Induk Belanda "Karel Doorman" ke Djcpang.	Disetudjui tanggal 31 Agustus 1960.
3.	Usul Resolusi Komisi "I" (Luar Negeri) ttg. Pemberian Restu berhubung dengan keberangkatan P. J. M. Presiden ke P. B. B.	Disetudjui tanggal 22 September 1960.
4.	Usul Resolusi Komisi "I" (Luar Negeri) ttg. bantuan terhadap perjuangn rakjat Aldjazair menentang imperialisme dan kolonialisme	Disetudjui tanggal 26 Januari 1961.
5.	Usul Pernyataan Pendapat Komisi "I" (Luar Negeri) ttg. Bantuan setia kawan terhadap perjuangan rakjat Angola.	Disetudjui tanggal 3 Djuli 1961.
TAHUN SIDANG 1961/1962		
1.	Usul Pernyataan Pendapat Komisi "I" (Luar Negeri) ttg. Pembebasan Irian Barat.	Disetudjui tanggal 13 Oktober 1961.
2.	Usul Pernyataan Pendapat Komisi "I" (Luar Negeri) ttg. Perlutjutan sendjata dan pertjobaan sendjata nuclir.	Disetudjui tanggal 13 Oktober 1961.
TAHUN SIDANG 1962/1963		
1.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Per-setudjuan Indonesia-Nederland mengenai penjerahan Irian Barat kepada R. I.	Disetudjui tanggal 1 September 1962.
2.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Deklarasi Ekonomi.	Disetudjui tgl. 1 April 1963.
3.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR mendukung kebidjaksanaan Presiden Pemimpin Besar Revolusi Dr. Ir. Sukarno untuk menghadapi K. T. T. di Manila dalam rangka peng-ganjanan neo-kolonialisme "Malaysia".	
TAHUN SIDANG 1963/1964		
1.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Susu-nan baru dan regrouping Kabinet Kerdja.	Disetudjui tanggal 12 Desem-ber 1963.

No. Urut	Uraian	Keterangan
2.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Mendukung sepenuhnya Komando Presiden ttg. Gerakan Sukarelawan untuk menggantang neo-kolonialisme "Malaysia".	Disetudjui tanggal 17 Maret 1964.
3.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Keterangan Pemerintah mengenai Kebidjaksanaan Pemerintah dalam beberapa bulan terakhir.	Disetudjui tanggal 30 April 1964.
4.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. menjongk perdjuangan Kemerdekaan dan menjamin keutuhan daerah Kambodja.	Disetudjui tanggal 18 Djuli 1964.
TAHUN SIDANG 1963/1964.		
1.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Keterangan Pemerintah mengenai situasi Politik dalam dan luar negeri.	Disetudjui tanggal 25 Sep- tember 1964.
2.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Amanat Tahunan Presiden/P. B. R. Tahun Viveri Pericoloso.	Disetudjui tanggal 25 Sep- tember 1964.
3.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Sikap Indonesia terhadap Olympic Games.	
4.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR. ttg. intervensi/agresi Belgia, Amerika Serikat dan Inggris di Kongo.	26 Djanuari 1961. 17 Desember 1964.
5.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. mendukung sepenuhnya Keputusan Presiden/P. B. R. ttg. keluarnya Indonesia dari P. B. B.	
6.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Indo Tjina.	
7.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Palestina.	
8.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Korea.	
9.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Agresi/Intervensi Angkatan Bersendjata AS terhadap Dminike.	
10.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. dukungan delegasi R. I. ke K. A. A. II	
TAHUN SIDANG 1965/1966.		
1.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Amanat Takari.	
2.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. masalah Kashmir di Pakistan.	Disetudjui tgl. 14-9-1965 Kep. No. 6/DPRGR/1/65.- 66.

No. Urut	U r a i a n	K e t g r a n g a n
3.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. KIAPMA (Konperensi Internasional Anti-Pangkalan Militer Asing).	Disetudjui tgl. 14-9-1965 kep. No. DPRGR/I/'65-'66.
4.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Petualangan Gerakan 30 September.	Disetudjui tgl. 15-11-1965
5.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Rhodesia Selatan.	Disetudjui tgl. 26-11-1965 Kep. No. 12/DPRGR/II/ 65-66.
6.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Konperensi Pertama Rakjat A. A. A.	Disetudjui tgl. 11-2-1966 Kep. No. 15/DPRGR/III/ 65-66.
7.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. deklarasi Tasjken.	Disetudjui tgl. 11-2-1966 Kep. No. 15/DPRGR/III/ 65-66.
8.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. siaran radio dan Pemberitaan Wartawan Hsien Hwa.	Disetudjui tgl. 11-2-1966 Kep. No. 15/DPRGR/III/ 65-66.
9.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Amanat Presiden tgl. 15-1-1966.	Disetudjui tgl. 18-2-1966 Kep. No. 16/DPRGR/III/ 65-66.
10.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR dengan adanya Perentjanaan dari Pemerintah Pilipina untuk mengadakan normalisasi hubungan diplomatik dengan Malaysia.	Disetudjui tgl. 18-2-1966.
11.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. agresi Amerika Serikat di Vietnam.	s. d. a.
12.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. masalah pendidikan sebagai akibat petualangan G. 30.S.	Disetudjui tgl. 16-3-1966.
13.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. kebidjaksanaan P. J. M. Presiden Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS yang dituangkan dalam surat Perintah tgl. 11 Maret '66.	Disetudjui tgl. 16-3-1966.
14.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. penghasilan pegawai Negeri, pradjurit, petugas negara, pekerdja dan buruh serta pensiunan.	Disetudjui tgl. 17-6-1966.
15.	Usul Resolusi DPR-GR ttg. Indonesia supaya kembali ke P.B.B.	Disetudjui tgl. 13-8-1966.
16.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Kebidjaksanaan Pemerintah untuk menormalisasi hubungan dengan Malaysia.	

No. Urut	U r a i a n	K e t g r a n g a n
-------------	-------------	---------------------

TAHUN SIDANG 1966/1967.

- | | | |
|-----|---|--------------------------------------|
| 1. | Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Pemerintah dan Pidato ² Presiden. | |
| 2. | Usul Resolusi DPR-GR ttg. Sidang Istimewa MPRS (dari Nuddin Lubis dkk). | Disetudjui tgl. 9-2-1967. |
| 3. | Usul Resolusi DPR-GR ttg. Pernyataan para Panglima ABRI tgl. 21 Pebruari 1966 (dari E. Moh. Mansjur dkk.). | |
| 4. | Usul Resolusi DPR-GR ttg. Pemilihan Pedjabat Presiden R.I. (dari Djamaludin Malik dkk). | Disetudjui tgl. 23-2-1967. |
| 5. | Usul Resolusi DPR-GR ttg. dukungan Rakjat Indonesia kepada perdjjuangan Negara Arab melawan agresi Israel. | Disetudjui tgl. 9-6-1967. |
| 6. | Usul Resolusi DPR-GR ttg. Hubungan Indonesia dengan R.R.T. | Disetudjui tgl. 16-6-1967. |
| 7. | Usul Interpelasi T. Zulfadli dkk. ttg. Kep. Pres No. 62/1967. | Djawab Pemerintah tanggal 30-6-1967. |
| 8. | Usul Interpelasi ttg. kedjadian di Atjeh Barat (dari Simorangkir dkk.). | Djawab Pemerintah tanggal 14-7-1967. |
| 9. | Usul Interpelasi (David Napitupulu dkk.) ttg. persoalan A.I.P. | Ket. Pem. tgl. 29-7-1967. |
| 10. | Usul Interpelasi ttg. bantuan Luar Negeri kepada Agama ² dan Badan ² keagamaan. di Indonesia (dari Drs. Lukman Harun dkk.). | Ket. Pem. tgl. 10-9-1968. |
| 11. | Usul Interpelasi ttg. kenaikan harga minjak bumi dan persoalan jang berhubungan dengan pemerintah umumnja. | Ket. Pem. tgl. 10-7-1968. |
| 12. | Usul Resolusi DPR-GR ttg. follow up Ketetapan MPRS XXIII/1969. | Ket. Pem. tgl. 29-7-1967. |

TAHUN SIDANG 1967/1968.

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| 1. | Usul Resolusi DPR-GR ttg. pemulihan kembali hubungan diplomatik R.I. dengan Malaysia pertukaran perwakilan R.I. dengan Singapura. | Disetudjui tgl. 25-8-1967. |
| 2. | Usul Resolusi DPR-GR ttg. dukungan Pidato Kenegaraan Pd. Presiden tgl. 16-8-1967. | Disetudjui tgl. 25-8-1967. |
| 3. | Usul Interpelasi (K.H. Munir Abisudjak) ttg. sikap politik Indonesia mengenai Israel khususnya sikap Indonesia dalam sidang darurat P. B. B. | |
| 4. | Usul Resolusi DPR-GR ttg. Penjegaran Lembaga Negara di Sidang Umum ke-V MPRS. | Disetudjui tgl. 29-2-1968. |

No. Urut	U r a i a n	K e t g r a n g a n
5.	Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Perjudian (Dari Nj. Zubaedah Muchtar dkk.).	belum selesai.
6.	Usul Resolusi Dra. Nj. Zubaedah Muchtar dkk. ttg. Penjegaran Pimp. DPR-GR.	belum selesai.

TAHUN SIDANG 1968/1969.

- | | | |
|-----|---|-------------------------------------|
| 1. | Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Tjampur Tangan Uni Sovjet dan Sekertaris ² nja terhadap Republik Sosialis Tjekoslawakia. | tgl. 31-8-1968. |
| 2. | Usul Resolusi DPR-GR ttg. Pembebasan Tugas/pemutusan hubungan kerdja/pemetjatan setjara massal terhadap kaum buruh (dari R.B. Sitohang dkk.). | Disetudjui tgl. 28-9-1968. |
| 3. | Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Pendidikan (dari Cosmas Batubara dkk.). | Disetudjui tgl. 3-12-1968. |
| 4. | Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Pendidikan (dari Hariadi Darmawan dkk.). | s. d. a. |
| 5. | Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Pelaksanaan Hukuman mati terhadap 2 orang pahlawan sukarelawan anggota ABRI oleh Negara Singapura. | Disetudjui tgl. 21-10-1968. |
| 6. | Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Perhubungan Laut. | Disetudjui tgl. 12-9-1968. |
| 7. | Usul Interpelasi Wajan Tjakranegara ttg. botjornja udjian SMP Negeri Th. 1968. | Ket. Pem. 18-11-1969. |
| 8. | Usul Resolusi DPR-GR ttg. Penduduk lidi Isrusale oleh Israel. | Disetudjui tgl. 5-12-1969. |
| 9. | Usul Perubahan (amandemen) dan Peraturan Tata Tertib DPR-GR pasal 38 dan 39 (Hartono S.H. dkk.). | belum selesai. |
| 10. | Usul Pernyataan Pendapat Ibrahim Usman dkk. ttg. PGPS/PP No. 12/1967. | Belum selesai |
| 11. | Usul minta keterangan kepada Pemerintah ttg. pembentukan Dwi Group dibeberapa Daerah di Djawa Barat. | Djawaban Pemerintah tgl. 23-5-1969. |
| 12. | Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Pelaksanaan penentuan Pendapat Rakjat di Irian Barat (dari H. Sjaichu dkk.). | Disetudjui tgl. 30-5-1969. |

No. Urut	U r a i a n	K e t g r a n g a n
-------------	-------------	---------------------

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 13. | Usul Pernyataan Pendapat Abdul Hadi Mandatuang S.H. dkk. ttg. surat edaran Wakil Perdana Menteri Bidang Umum No. 6/ES/1966 ttg. larangan mengangkat pegawai baru untuk diketjualikan bagi guru ² SD, SLTP dan SLTA. | Belum selesai. |
|-----|--|----------------|

TAHUN SIDANG 1969/1970.

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| 1. | Usul Pernyataan Pendapat Dra. Nj. M. Jusuf dkk. ttg. Penghentian kemaksiatan. | belum selesai. |
| 2. | Usul Pernyataan Pendapat DPR-GR ttg. Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (dari Subagio Reksodipuro S.H. dkk.). | Disetudjui tgl. 18-9-1969. |
| 3. | Usul Resolusi Nj. D. Sukahar dkk. ttg. masalah lektur/batjaan anak-anak. | belum selesai. |
| 4. | Usul Pernyataan Pendapat I. Moro dkk. ttg. Pelaksanaan Politik luar negeri jang bebas dan aktif berdasarkan kepada Pengabdian kepentingan nasional. | S. d. a. |
| 5. | Usul Resolusi Oesman J. Helmi dkk. ttg. tindakan hukum jang tegas tepat dan tjepat terhadap perbuatan korupsi dan Manipulasi perang Djepang Mexim/Manttrust dan P.N. Aneka Niaga jang meliputi djumlah k.l. Rp. 25 miljard 360 djuta 200 ribu. | S. d. a. |
| 6. | Usul Pernyataan Pendapat Ischak Moro dkk. ttg. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1969 adalah bertentangan dengan peraturan Hukum jang berlaku karenanja tidak sah. | S. d. a. |
| 7. | Usul Resolusi DPR-GR ttg. Usaha Pemberantasan Korupsi (dari Sajuti Melik dkk.). | Disetudjui tgl. 7-5-1970. |

DAFTAR POKOK² PEMBITJARAAN JANG BELUM SELESAI PEMBAHASANNJA DI D.P.R.

(dari Th. Sidang 1950 s/d tgl. 20 Djuni 1966 jaitu
sebelum berlakunja U.U. No. 10 tahun 1966).

No. Urut.	Nomor POKOK	U r a i a n :	KETERANGAN :
--------------	----------------	---------------	--------------

TAHUN SIDANG 1950 s/d 1954 :
Telah selesai semua

TAHUN SIDANG 1955 :

1. P. 19 RUU ttg. Urusan Perumahan.
(Am. Pres. tgl. 30-1-1954
No. 346 HK/54).
2. P. 41 RUU ttg. pengesahan perdjandji-
an mengenai pantjegahan padjak
ganda antara R.I. dan Keradjaan
Belanda.
(Am. Pres. tgl. 14-7-1954
No. 2267/HK/54).
3. P. 44 RUU ttg. Protokol pembubaran
Uni Indonesia-Belanda beserta
surat² para Ketua Delegasi R.I.
dan Delegasi Keradjaan Nederland
semuanja tertanggal 10-8-1954.
(Am. Pres. tgl. 16-8-1954
No. 3000 S/HK/54).
4. P. 63 RUU tentang persetudjuian² jang
dapat disahkan dengan tidak per-
lu disetudjuai dengan Undang².
(Am. Pres. tgl. 13-11-1954
No. 3/4/HK/54).
5. P. 109 RUU ttg. perubahan UU Pem-
bentukan Daerah² Propinsi/Da-
erah Istimewa setingkat Propinsi,
Kabupaten, Kota Besar dan Kota
Ketjil di Djawa.
(Am. Pres. tgl. 19-7-1954
No. 2019/HK/55).

TAHUN SIDANG 1956 s/d 1958 :
Telah selesai semua

No. Urut.	Nomor POKOK	U r a i a n :	KETERANGAN :
TAHUN SIDANG 1959/1960 :			
Telah selesai semua			
TAHUN SIDANG 1960/1961 :			
Telah selesai semua			
TAHUN SIDANG 1961/1962 :			
1.	P. 207	RUU ttg. Tabungan Terpimpin. (Am. Pres. tgl. 6-10-1961. No. 2798/HK/61).	Terhenti di Komisi F (lama).
2.	P. 221	RUU ttg. Pendidikan Pendahuluan Pertahanan Rakjat. (Am. Pres. tgl. 14-2-1962 No. 477/HK/62).	Tkt. V (lama). Panitia Musjawarah 23-5-1963 : belum ada persesuaian antara DPRGR dengan Pemerintah. Terhenti, Komisi mengusulkan
TAHUN SIDANG 1962/1963 :			
1.	P. 306	RUU ttg. penetapan Perpu No. 15 th. 1962 ttg. pengesahan dari pasal 16 ayat 6 UU No. 7 Drt. 1955 ttg. pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, sebagai UU. (Am. Pres. tgl. 3-10-1962 No. 2516/HK/62).	Tkt. V (lama) 23-11-1962 adanya Panitia Negara DPRGR dengan Pemerintah untuk membahas tindak pidana ekonomi dan membentuk RUU baru.
2.	P. 308	RUU ttg. penetapan Perpu No. 7 th. 1962 ttg. penggunaan dan pengawasan dana ² investasi sebagai UU. (Am. Pres. tgl. 8-10-62 No. 2517/HK/62).	Tkt. II (lama) 20-4-1963. Diberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk mengumpulkan bahan ² lebih lengkap.
3.	P. 309	RUU ttg. penetapan Perpu No. 8 th. 1962 ttg. Perdagangan barang ² dalam pengawasan, sebagai UU. (Am. Pres. tgl. 8-10-62 No. 2517/HK/1962).	Tkt. V (lama) 22-3-1963 di Komisi E.
4.	P. 310	RUU ttg. penetapan Perpu No. 9 h. 1962 ttg. Pengendalian harga, sebagai UU. (Am. Pres. tgl. 8-19-62 No. 2517/HK/62).	Tkt. V (lama) 22-3-1963.
5.	P. 317	RUU ttg. penetapan Perpu No. 17 th. 1962 ttg. perubahan dan tambahan UU No. 21 Prp. th. 1960 ttg. Bank Pembangunan Indonesia, sebagai UU. (Am. Pres. tgl. 15-1-1963 No. 998/HK/63).	Belum pernah dibicarakan

No. Urut.	Nomor POKOK	U r a i a n :	KETERANGAN :
6.	P. 321	RUU ttg. penetapan Perpu No. 2 th. 1963 ttg. Pelaksanaan Dekon dibidang import/eksport. Am. Pres. tgl. 13-7-63 No. 998/HK/1963).	Belum pernah dibitjarakan
7.	P. 322	RUU ttg. penetapan Perpu No 3 th. 1963 ttg. perubahan dan tambahan UU No. 4 Prp. th. 1959 dan pentjabutan UU No. 32 Prp. th. 1960 dan UU No. 34 Prp. th. 1960, sebagai UU. (Am. Pres. tgl. 13-7-1963 No. 998/HK/1963).	Belum pernah dibitjarakan
8.	P. 324	RUU ttg. Fakir miskin. (Am. Pres. tgl. 21-6-63 No. 1015/HK/63).	Tkt. V (lama) 26-11-1963
9.	P. 325	RUU ttg. pemberantasan perge- landangan dan pengemisan. (Am. Pres. tgl. 21-6-63 No. 1015/HK/63).	Tkt. V (lama) 26-11-1963
10.	P. 327	RUU ttg. Pemberantasan Pelatju- ran dan Perdagangan manusia. (Am. Pres. tgl. 21-6-63 No. 1015/HK/63).	Tkt. V (lama) 26-11-1963.
11.	P. 331	Usul Pernyataan Pendapat Men- dukung Kebidjaksanaan Presiden P. B. R. untuk menghadapi K. T. T. di Manila dalam rangka peng- ganjangan neo-kolonialisme Ma- laysia.	
1.	P. 427	TAHUN SIDANG 1963/1964 : RUU ttg. penetapan Perpu No. 5 th. 1964 ttg. nilai transaksi rupi- ah dan pembahasan atas import sebagai UU. (Am. Pres. tgl. tidak ada.)	Belum pernah dibitjarakan
2.	P. 440	RUU ttg. perdjandjian larangan pertjobaan nuclear diatmosfeer, diruang angkasa dan dibawah permukaan air. (Am. Pres. tgl. 27-4-64 No. 772/ HK/64).	Belum pernah dibitjarakan.

No. Urut.	Nomor POKOK	U r a i a n :	KETERANGAN :
TAHUN SIDANG 1964/1965 :			
1.	P. 511	RUU ttg. Perubahan dan tambahan peraturan Pajak Deviden (Am. Pres. tgl. 22-9-64 No. 1889/HK/64).	Belum pernah dibitjarakan.
2.	P. 520	RUU ttg. Hukum Atjara Pidana dalam lingkungan Peradilan Umum. (Am. Pres. tgl. 21-9-64 No. 1853/HK/64).	Tkt. V (lama) 10-12-1964.
3.	P. 521	Usul Pernyataan Pendapat ttg. Sikap Indonesia terhadap Olympic Games.	
4.	P. 523	RUU ttg. Perubahan Piagam PBB. (Am. Pres. belum ada).	Belum pernah dibitjarakan, belum ada Amanat Presidennja, belum diumumkan kepada Anggota.
5.	P. 529	Usul Pernyataan Pendapat ttg. mendukung sepenuhnya keputusan Presiden ttg. keluarnya Indonesia dari PBB. (Surat pengantar tgl. 11-1-65).	
6.	P. 533	RUU ttg. Bintang Dharma Karya Yasa ALRI. (Am. Pres. tgl. 9-2-65 No. 2541/HK/1965).	Tkt. V (lama) Komisi C, 24-5-1965.
7.	P. 534	RUU ttg. Bintang "Angkasa Yudha" ALRI. (Am. Pres. tgl. 9-2-65 No. 241/HK/'65).	Tkt. V (lama) Komisi C, 24-5-1965.
8.	P. 535	Usul Pernyataan Pendapat ttg. Indo-Tjina.	
9.	P. 536	Usul Pernyataan Pendapat ttg. Palestina. (Am. Pres. 15-5-1965)	Tkt. V (lama) 19-6-1965.
10.	P. 540	RUU ttg. Patent. No. 927/HK/'65).	
11.	P. 548	RUU ttg. Perubahan dan tambahan UU No. 13 Th. 1962 ttg. Ketentuan ² Pokok Bank Pembangunan Daerah (LN. No. 59/'62) (Am. Pres. tgl. 12-3-1965, No. 529/HK/'65).	Tkt. V (lama) 10-9-1965.

Urut. No.	POKOK Nomor	U r a i a n :	KETERANGAN :
12.	P. 552	RUU ttg. Pembentukan Dati II Rote (Nusa Tenggara Timur). (Usul Inisiatip I. S. Handokowidjojo dkk. Surat Pengantar tanggal 14-7-1965.	Tkt. V (lama) Komisi B. 19-7-1967.
13.	P. 553	RUU usul Inisiatip I. S. Hando-Dati II Gunung Mas, Katingan, widjojo dkk. ttg. Pembentukan Barito Timur dan Nurung Raya (S. P. 14-7-1965)	Tkt. V (lama) Komisi B. 19-7-1967.
14.	P. 554	RUU usul Inisiatip I.S. Handokowidjojo dkk. ttg. Pembentukan Dati II Kutai Tengah, Kutai Hulu dan Kutai Pantai. (S. P. tgl. 14-7-1965).	

TAHUN SIDANG 1965/1966 :

- | | | | |
|----|--------|--|----------------------------|
| 1. | P. 607 | Usul Pernyataan Pendapat ttg. Rhodesia Selatan. | |
| 2. | P. 609 | RUU ttg. Perubahan pasal 15. (1); 15a (3); 16 (1), (2); dan 17 Kitab Undang ² Hukum Pidana (Am. Pres. tgl. 28-12-1965 No. 2581/HK/'65). |)Belum mulai dibitjarakan. |
| 3. | P. 610 | RUU ttg. Pokok ² Perusahaan Daerah (Am. Pres. tgl. 7-12-1965 No. 2452/HK/'65). | |
| 4. | P. 611 | Usul Pernyataan Pendapat ttg. Konperensi Pertama Rakjat AAA. | |
| 5. | P. 612 | Usul Pernyataan Pendapat ttg. Deklarasi Tasjken. | |
| 6. | P. 613 | Usul Pernyataan Pendapat ttg. Siaran Radio dan Pemberitaan wartawan Hsien Hwa | |
| 7. | P. 614 | Usul Pernyataan Pendapat ttg. Amanat Presiden tg. 15-1-1966. | |
| 8. | P. 617 | Memorandum DPRGR ttg. Penertiban organisasi Internasional. | |
| 9. | P. 618 | Usul pernyataan Pendapat ttg. adanya perentjanaan dari Pemerintah Pilipina untuk mengadakan normalisasi hubungan Diplomatik dengan Malaysia. | |

No. Urut.	Nomor POKOK	U r a i a n :	KETERANGAN :
10.	P. 619	Usul Pernyataan Pendapat ttg. Agresi Pemerintah A. S. di Vietnam.	
11.	P. 623.	Usul Pernyataan Pendapat ttg. Kebidjaksanaan PJM Presiden Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS jang dituangkan dalam surat perintah tgl. 11 Maret 1966.	
12.	P. 624.	Usul Pernyataan Pendapat ttg. kebidjaksanaan PJM Presiden Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS jang dituangkan dalam pengumuman No. 5 tgl. 18 Maret 1966.	
13.	P. 626.	Panitia Ketjil ttg. Ekubang.	
14.	P. 627.	Panitia Ketjil ttg. Politik.	
15.	P. 631.	RUU tentang Pendidikan Agama. (Am. Pres. tgl. 9-5-'66 No. 632/HK/66).	Tkt. V (lama) 12-9-1966.
16.	P. 632.	RUU ttg. Perguruan Tinggi Agama Islam. (Am. Pres. tgl. 9-5-1966 No. 632/HK/'66).	s. d. a.
17.	P. 633.	RUU ttg. Zakat. (Am. Pres. tgl. 9-5-66 No. 632/HK/66).	Tkt. V (lama) 12-8-1966.
18.	P. 639	Usul Pertanjaan Pendapat ttg. Indonesia supaja kembali ke PBB.	
19.	P. 640	RUU ttg. Persetujuan Pos dan Telekomonikasi antara R. I. dan Rep. Demokrasi Korea. (Am. Pres. tgl. 27-5-66 No. 707/HK/66).	

**DAFTAR POKOK² PEMBITJARAAN
JANG BELUM SELESAI PEMBAHASANNJA DI DPR--GR**

(dari Th. Sidang 1966 s/d tgl. 28 Maret 1970 jaitu
sesudah berlakunja U.U. No. 10 tahun 1966).

No. Urut.	Nomor POKOK	U r a i a n :	KETERANGAN :
TAHUN SIDANG 1966/1967.			
1.	P. 718	RUU tentang Kepartaian, keor- masan dan Kekayaan. (Am. Pres. 24-11-1966 No. 1629/HK/1966).	Tk. IV tgl. 15-1-1970.
2.	P. 725	RUU ttg. Kesedjahteraan Anak (Am. Pres. tgl. 3-4-1967 No. 398/HK/1967).	Tk. I (lama) tgl. 18-4-1967.
3.	P. 726	RUU ttg. Pemberantasan Pela- tjuran dan Perdagangan Manusia	Tk. II (lama) tgl. 31-5-1967 'Am. Pres. tgl. 3-4-1967 No. 398/HK/1967
4.	P. 729	RUU Usul Inisiatip Slamet Su- kirmanto dkk. tentang Peradilan Tata Usaha Negara tgl. 22-4-'67).	Tk. II (lama) tgl. 12-6-1967.
5.	P. 730	RUU Usul Inisiatip Slamet Su- kirmanto dkk. tentang Pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tin- dak pidana korupsi.	Tk. II (lama) tgl. 12-6-1967.
6.	P. 735	RUU Inisiatip I. S. Handokowi- djojo dkk. tentang Pembentukan Kabupaten ² Halmahera Utara, Halmahera Selatan dan Kabupa- ten Sula. (tgl. 1-6-1967 No. 627/ Sek./1967).	Tk. I (lama) tgl. 18-7-1967.
7.	P. 737	RUU tentang Pokok ² Pernikahan Umat Islam (Am. Pres. tanggal 22-6-1967 No. R. 02/Pres/1967).	Tk. III/Djawaban Pemerintah tgl. 31-10-1968 (Babak I) tgl. 12-11-1968 (Babak II).
8.	P. 739	RUU Usul Inisiatip M.E. Subia- dinata dkk. ttg. Pokok Pendidikan Nasional. (S.P. tgl. 29-5-1967).	Tkt. III/Djawaban Pemerintah tgl. 6-9-1969.
9.	P. 740	RUU ttg. Ketentuan Pokok Pen- didikan (Am. Pres. tgl. 6-6-1967 No. R. 06/Pres/HK/'67).	Tkt. III/Djawaban Pemerintah tgl. 6-9-1969

No. Urut.	Nomor POKOK	U r a i a n :	KETERANGAN :
10.	P. 742	RUU Usul Inisiatip M. Amir Holle dkk. ttg. Pembentukan Propinsi Maluku Utara. (S.P. tgl. 28-6-1967).	Tkt. II (lama) tgl. 23-8-1967.
11.	P. 743	RUU Usul Inisiatip Drs. Rachmat Muljomiseno dkk. ttg. Bidang Usaha Bagi Orang Asing. (S.P. tgl. 23-6-1967).	Tkt. III (lama) tgl. 30-6-1967. (Pemetjahan dari P. 734 yang menjadi P. 743 dan P. 744).
12.	P. 744	RUU Usul Inisiatip Drs. Rachmatmuljomiseno dkk. ttg. Pengaturan Orang Asing. (S.P. tgl. 23-6-1967).	Tkt III (lama) Pemetjahan dari P. 734
13.	P. 749	RUU Usul Inisiatip F.C. Palaunsuka dkk. ttg. Pembentukan Propinsi Flores. (S.P. tgl. 14-7-1967).	Tkt. II (lama) tgl. 23-8-1967.
14.	P. 750	RUU Usul Inisiatip I.S. Handokowidjojo dkk. ttg. Pembentukan Kabupaten Lembata. (S.P. tgl. 14-7-1967).	Tkt II (lama) tgl. 23-6-1967.
15.	P. 759	RUU ttg. Pokok ² Perasuransian. (Am. Pres. tgl. 24-7-1967 No. R. 09/Pres/HK/1967). (akan diperbaharui).	Tkt. II tgl. 18-9-1968.

TAHUN SIDANG 1967/1968 :

1.	P. 801	RUU Usul Inisiatip Drs. Zulkifli dkk. ttg. Pembentukan Kabupaten ten ² Atjeh Tenggara dan Djempa. (S.P. tgl. 26-6-1967).	Tkt. I/Pendjelasan Pengusul. tgl. 17-8-1968.
2.	P. 808	Usul Interpelasi K.H. Munir Abisudjak dkk. ttg. sikap politik Indonesia mengenai Israel chususnya sikap Indonesia dalam sidang darurat P.B.B.	Tkt. I (lama) tgl. 9-9-1967.
3.	P. 814	RUU ttg. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah Swatantra. (Am. Pres. tgl. 7-10-1967. No. R. 19/Pres/NK/1967).	Tkt. IV 12-2-1970.

Urut. No.	POKOK Nomor	U r a i a n :	KETERANGAN :
4.	P. 816	Usul Resolusi Drs. Maman Achdijat dkk. ttg. Keterangan Pemerintah atas Interpelasi J.C.T. Simorangkir dkk. ttg. Kedjadian di Atjeh Barat.	Belum ada ketentuan lebih lanjut.
5.	P. 825	RUU ttg. Kedudukan dan Hubungan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. (Am. Pres. tgl. 16-3-1968 No. R. 36/Pres. HK/3/'68).	Tkt. IV (Fraksi ²) tgl. 25-9-'69.
6.	P. 826	RUU ttg. Daerah Swatantra. (Am. Pres. tgl. 16-3-1968. No. R. 36/Pres/HK/3/'68).	Pemb. Pendjadjagan/ Tk. IV tgl. 5-11-1969.
7.	P. 830	Usul Pernyataan Pendapat Dra. Nj. Zubaedah Muchtar dkk. ttg. Perdjuidian. (S.P. tgl. 1-6-1968).	Laporan Panitia Perumus dalam Pan. Musjawarah tanggal 6-9-1969 (sesudah tkt. III).
8.	P. 832	Usul Resolusi Dra. Nj. Zubaedah Muchtar dkk. ttg. Penjegaran Pimpinan DPR-GR. (S.P. tgl. 7-3-1968).	Tkt. III (djawaban Pengusul) tgl. 30-11-1968.

TAHUN SIDANG 1968/1969 :

1.	P. 905	RUU ttg. Pengesahan Perhitungan Anggaran tahun 1967. (Am. Pres. tgl. 15-8-1968. No. R. 06/P.U./HK/8/1968).	Tkt. IV tgl. 23-9-1968.
2.	P. 908	RUU ttg. Ketentuan Pokok Perkawinan. (Am. Pres. tgl. 7-9-1968. No. R. 010/P.U./HK/1968).	Tkt. III/djawaban Pemerintah tgl. 7-12-1968.
3.	P. 909	RUU ttg. Ketentuan ² Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Am. Pres. tgl. 13-8-1968. No. R. 05/P.U./HK/8/1968).	Tkt. IV 12-2-1970.
4.	P. 910	RUU ttg. Susunan, Kekuasaan dan Hukuman Atjara Mahk. Agung. (Am. Pres. tgl. 13-8-1968. No. R. 05/P.U./HK/8/1968).	Tkt. IV tgl. 12-2-1970.

Urut. No.	POKOK Nomor	U r a i a n :	KETERANGAN :
5.	P. 915	RUU Usul Inisiatip Kromo Lawi dkk. ttg. Lemb. Kearsipan Negara. (S.P. tgl. ... September 1968).	Tkt. IV 25-3-1969.
6.	P. 916	RUU ttg. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. (Am. Pres. tgl. 8-10-1968. No. R. 015/P.U./HK/10/1968).	Tkt. IV tgl. 12-2-1970.
7.	P. 921	RUU Usul Inisiatip Moh. Djazim dkk. ttg. Pentjabutan Pen. Pres. No. 7 tahun 1963 ttg. Pentjegahan, Pemogokan dan Penutupan (lock out) di Perusahaan ² , Djawatan ² dan Badan ² jang vital. (S.P. tgl. 17-10-1968).	Tkt. III/Djawaban Pengusul tgl. 3-12-1968. (sedang dimintakan penegasan kepada para pengusulnja).
8.	P. 926	RUU ttg. Penghapusan Pengadilan Landreform. (Am. Pres. tgl. 2-11-1968 No. R. 019/P. U./HK/11/1968).	Tkt. I tgl. 3-12-1968.
9.	P. 928	RUU Usul Inisiatip Ischak Moro dkk. ttg. Pembentukan Kabupaten Parigi/Mountong. (S. P. tgl. 11-11-1968).	Belum pernah dibitjarakan.
10.	P. 934	RUU Usul Inisiatip Zain Badjeber dkk. ttg. Pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan. (S. P. tgl. 28-11-1968).	Belum pernah dibitjarakan.
11.	P. 935	Usul Perubahan atas Peraturan Tata Tertib DPR-GR pasal 38 dan 39 dari Hartono SH. dkk. (S. P. tgl. 28-11-1968).	Belum pernah dibitjarakan.
12.	P. 936	Usul Pernyataan Pendapat Ibrahim Usman dkk. ttg. P. G. P. S./ P. P. No. 12 th. 1967 (S. P. tgl. 14-3-1969).	Tkt. III/Djawaban Pengusul tgl. 4-10-1969.
13.	P. 942	RUU ttg. Lumbung Desa. (Am. Pres. tgl. 24-5-1969 No. R. 04/P. U./V/1969).	Tkt. III/Djawaban Pemerintah tgl. 4-10-1969.
14.	P. 944	RUU ttg. Pokok ² Kesedjahteraan Sosial (Am. Pres. tgl. 14-6-1969. No. R. 05/P. U./VI/1969).	Tkt. IV tgl. 20-3-1970.

No. Urut.	Nomor POKOK	U r a i a n :	KETERANGAN :
15.	P. 945	Usul Pernyataan Pendapat Abdul Hadi Madatuang SH. dkk. ttg. Surat Edaran Wk. Perdana Menteri Bidang Umum No. 6/SE/1966 ttg. Larangan mengangkat Pegawai baru untuk di ketjualikan bagi Guru ² SD, SLTP, dan SLTA. (S. P. tgl. 12-6-1969).	Tkt. III/Djawaban Pengusul gl. 18-9-1969.

TAHUN SIDANG 1969/1970 :

- | | | | |
|----|-------|--|---|
| 1. | P. 3 | Usul Pernyataan Pendapat Dra. Nj. Maftuchah Jusuf dkk. ttg. Penghentian Kemaksiatan. (S.P. tgl. 15-8-1969). | Tkt. III/Pendapat Pemerintah tgl. 20-11-1969. |
| 2. | P. 4 | RUU Usul Inisiatip Ischak Moro dkk. ttg. Pembentukan Kabupaten Todjo/Una-Una. (S. P. tgl. 25-8-1969) | Belum pernah dibitjarakan. |
| 3. | P. 7 | Usul Resolusi Nj. D. Sukahar dkk. ttg. masalah Lektur dan Batjaan Anak-anak. (S. P. tgl. 12-9-1969). | Tkt. II, tgl. 12-11-1969. |
| 4. | P. 8 | RUU Usul Inisiatip Mansur Sangkala dkk. ttg. Pelajaran Niaga Nasional (S. P. tgl. 2-10-1969). | Tkt. I, tgl. 20-11-1969. |
| 5. | P. 9 | Usul Pernyataan Pendapat J. Naro dkk. ttg. Pelaksanaan Politik Luar Negeri yang bebas dan aktif berdasarkan kepentingan Nasional. (S. P. tgl. 2-10-69). | Tkt. I, tgl. 14-2-1970. |
| 6. | P. 10 | Usul Resolusi Oesman J. Helmi dkk. ttg. Tindakan Hukum yang tegas, tepat dan tjepat terhadap perbuatan korupsi dan manipulasi pampasan perang Djepang Mexim/Mantrust dan P. N. Aneka Niaga yang meliputi djumlah k. l. Rp. 25 miljard 360 djuta 200 ribu. (S. P. tgl. 17-11-1969). | Tkt. I, tgl. 14-2-1970. |

Urut. No.	POKOK Nomor	U r a i a n :	KETERANGAN :
7.	P. 12	Usul Pernjatan Pendapat Ischak Moro dkk. tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1969 adalah bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku, karenanya tidak sah.	Tkt. I, tgl. 26-3-1970.
8.	P. 14	RUU ttg. Tata Tjara Tindakan Kepolisian terhadap Anggota ² dan Pimpinan MPRS/DPRGR. (Am. Pres. tgl. 10-3-1970 No. R. 01/PU/III/1970).	Tkt. I, tgl. 28-3-1970.
9.	P. 15	RUU tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925. (Am. Pres. tgl. 14-3-1970. No. R. 02/PU/III/1970).	Tkt. I, tgl. 28-3-1970.
10.	P. 16	RUU tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. (Am. Pres. tgl. 14-3-1970. No. R. 02/PU/III/1970).	Tkt. I, tgl. 28-3-1970.
11.	P. 17	RUU tentang Perubahan dan Tambahan Undang ² Pajak Deviden 1959. (Am. Pres. tgl. 14-3-1970. No. R. 02/PU/III/1970).	Tkt. I, tgl. 28-3-1970.
12.	P. 18	RUU tentang Perubahan dan Tambahan Undang ² No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. (Am. Pres. tgl. 14-3-1970. No. R. 02/PU/III/1970).	Tkt. I, tgl. 28-3-1970.
13.	P. 19	RUU tentang Perubahan dan Tambahan Undang ² No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. (Am. Pres. tgl. 14-3-1970. No. R. 02/PU/III/1970).	Tkt. I tgl. 28-3-1970.
14.	P. 20	RUU Usul Inisiatip H. Murtadji Bisri dkk. tentang Pemberian Tundjangan yang bersifat Pensiun Kepada bekas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRGR. (tgl. 19-3-1970).	Belum pernah dibicarakan.

No. Urut	Nomor POKOK	U r a i a n	K e t e r a n g a n
15.	P. 21	RUU tentang Perubahan dan Tambahan atas ketentuan pasal 54 ayat (1) K.U.H.D. (S. 1847 : 23). (Am. Pres. tgl. 6-4-1970. No. R. 04/PU/IV/1970).	Belum pernah dibitjarakan.
16.	P. 22	RUU tentang Perubahan dan Tambahan atas APBN. tahun 1969/1970. (Am. Pres. tanggal 31-3-1970. No. R. 03/P.U./III/1970).	

IV. KEANGGOTAAN DPR-RI
A. DAFTAR ANGGOTA KOMITE NASIONAL PUSAT
Pleno Ke-VI di Jogjakarta

No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l u m a t
1.	Abdul Karim, H.	M a s j u m i	Surabaya
2.	Abdullah bin Nuh	"	Jogjakarta
3.	Abdul Fatah Hasan	"	Serang
4.	Abu Hanifah, Dr.	"	Sukabumi
5.	Ahmadin, H.	"	Jogjakarta
6.	Achmad Sanusi, H.	"	Sukabumi
7.	Aisjah Hilall	"	Jogjakarta
8.	Anwar Harjono	"	Jogjakarta
9.	Amin Djasuta, H.	"	Serang
10.	Badjuri Achmad	"	Malang
11.	Bagus Hadikusumo, Ki	"	Jogjakarta
12.	Benjamin, H. R.	"	Jogjakarta
13.	Buahanuddin Harahap	"	Jogjakarta
14.	Dahlan, H. M.	"	Pasuruan
15.	Darwis Thaib	"	Bukittinggi
16.	Djohar Arifin	"	S o l o
17.	Donggio, Moch.	"	Sidoredjo
18.	Fakih Oesman, Moch.	"	S o l o
19.	Farid Ma'roef	"	Jogjakarta
20.	Gaffar Ismail, A.	"	Bukittinggi
21.	Halim, K. A. H.	"	Purwokerto
22.	Hasan Aidid	"	T e g a l
23.	H a s i m, H.	"	Jogjakarta
24.	Dam Gozali, H.	"	S o l o
25.	Kafrawi, Moehammad	"	Surabaya
26.	Kamil Kartoprodjo	"	Tjirebon
27.	Kartosudarmo	"	Jogjakarta
28.	Kasmat, Mr. A.	"	Jogjakarta
29.	Kartosuwirjo, M.	"	G a r u t
30.	Mahmudah Masjhud, Nj.	"	S o l o
31.	Mashudi	"	Bodjonegoro
32.	Muljadi Djojomartono	"	S o l o
33.	Moezakkir, Abdulkahar	"	Jogjakarta
34.	O e d i n	"	Sumatera Tengah
35.	Oesman, H.	"	Jogjakarta
36.	Prawoto Mangkusasmito	"	Jogjakarta
37.	Pudjotomo, Nj.	"	Jogjakarta
38.	Roedjito, R.	"	Jogjakarta

No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l a m a t
39.	Roosbandi, Mr.	"	Jogyakarta
40.	Samapen Bakri	"	S e r a n g
41.	Saifudin Zuchri	"	Magelang
42.	S a l e h, Moh.	"	Jogyakarta
43.	Sardjan, Moechammad	"	K e d i r i
44.	Sjadli Hasan	"	B a n t e n
45.	S i g i t, Drs. A.	"	Jogyakarta
46.	Siswosoedarmo	"	S o l o
47.	Sjoekri, K. H. M.	"	M a l a n g
48.	Soedjono	"	Djakarta
49.	S u j o s o	"	K e d i r i
50.	Sumaatmadja, R. O.	"	Sukabumi
51.	Sunarjo Mangunpuspito, Nj.	"	Jogyakarta
52.	Soeprapto, R.	"	M a l a n g
53.	Surjana Prawira, R. S.	"	Purwakarta
54.	Surowijono, S.	"	M a l a n g
55.	Sutisna Sendjaja	"	M a l a n g
56.	Toha Machsoen	"	Lamongan
57.	Taufik Qurachman, Kyai	"	Jogyakarta
58.	Wachidah Sukidjo	"	Jogyakarta
59.	Wahid, H. Moechamad	"	Djombang
60.	Zainul Arifin	"	Jogyakarta
61.	Abdoel Sukiman	P. N. I.	Bodjonegoro
62.	Awibowo	"	Jogyakarta
63.	Danuasmoro R. W.	"	Jogyakarta
64.	Darjono, R. M.	"	Jogyakarta
65.	Djody Gondokusumo, Mr.	"	Jogyakarta
66.	Gatot Mangkupradja	"	Jogyakarta
67.	Hadikusumo, S.	"	Poerwokerto
68.	Hadiprabowo Mochasim Malagoa	"	Jogyakarta
69.	Isnaeni, Mh.	"	Jogyakarta
70.	Joesoepadi, Nj.	"	Jogyakarta
71.	Manai Sophiaan	"	Jogyakarta
72.	Maramis, A. J.	"	Djakarta
73.	Masjhoed Hardjokusumo	"	Semarang
74.	Njonoprawoto	"	M a l a n g
75.	Noer St. Iskandar	"	Djakarta
76.	Oetojo Koesoemo	"	P a t i
77.	Poeger, R.	"	Surabaya
78.	Queljo, P. de	"	Jogyakarta
79.	Ruspannji Atmowirono	"	S o l o
80.	Sabilal Rasjad glr. Dt. Bendaharo	"	Jogyakarta

No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l a m a t
81.	Sadji Sastro (Sardjo)	P. N. I.	Jogyakarta
82.	Safioedin Surjo Amidarmo	"	Surabaya
83.	Sjamsi Sastrowidagdo, Dr.	"	Malang
84.	Sardjono, Ir.	"	Surabaya
85.	Sarpan	"	Magelang
86.	Sartono, Mr.	"	Jogyakarta
87.	Sidik Djojokusarto	"	Kediri
88.	Sjamsudin St. Makmur	"	Jogyakarta
89.	Slamet Soedibjo, Dr.	"	Djakarta
90.	Soeharto, Dr. R.	"	Medan
91.	Sudarman Hadikusumo, Nj.	"	Jogyakarta
92.	Soehoed	"	Jogyakarta
93.	Sujono Hadinoto Brotokusumo, Mr.	"	Jogyakarta
94.	Sumanang, Mr.	"	Jogyakarta
95.	Soemosoediro, Ng.	"	Djakarta
96.	Soenarjo, Mr.	"	Jogyakarta
97.	Soepardjo, Nj.	"	Solo
98.	Soetardjo Hadisoetirto, Rd.	"	Jogyakarta
99.	Soetarman, Nj.	"	Jogyakarta
100.	Soetedjo Dirdjosebroto	"	Jogyakarta
101.	Soembadji, Dr.	"	Jogyakarta
102.	Tabrani, M.	"	Jogyakarta
103.	Tjokroatmodjo, Dr. S.	"	Jogyakarta
104.	Wahid St. Radja Lalo	"	Djakarta
105.	Waloejo, Ir.	"	Jogyakarta
106.	Assaat glr. Datuk Mudo	P. Sosialis	Jogyakarta
107.	Bambang Soeparto, K. Ng	"	Surabaya
108.	Dj a d i	"	Djakarta
109.	Djawoto	"	Djakarta
110.	Djohan Sjaroezah	"	Jogyakarta
111.	Djoeir Mohamad	"	Sumatera
112.	Joesoef Jahja	"	Djakarta
113.	Koesnaeni	"	Purwakarta
114.	Mardjoeki, R. N. M.	"	Jogyakarta
115.	Moedikdio, Nj.	"	Medan
116.	Moerady, T. A.	"	Djakarta
117.	Moewaladi, Mr.	"	Jogyakarta
118.	M o t i k; B. R.	"	Djakarta
119.	N a s e h	"	Tasikmalaja
120.	Noeroellah	"	Malang
121.	Rachim, A.	"	Jogyakarta
122.	Reksodipetro, Mr. S.	"	Djakarta

No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l a m a t
123.	R o e h a n	P. Sosialis	—
124.	Sadikoen, Dr. S.	"	Jogjakarta
125.	S a m i d i n	" (Partai)	P a l e m b a n g
126.	Samodro	"	Wates Jogjakarta
127.	Sardjono, S.	"	Jogjakarta
128.	S a s t r a	"	Tjirebon
129.	Soebadio Sastrosatomo	"	Jogjakarta
130.	Soedjono, R.	"	Jogjakarta
131.	Soegondo Djojopuspito	"	Jogjakarta
132.	S o e g r a	"	Djakarta
133.	Soehadi Hadikartono	"	S o l o
134.	Soekarto, R.	"	Poerwokerto
135.	Soemartojo	"	Djakarta
136.	Soetan Takdir Alisjahbana, Mr.	"	Djakarta
137.	T a m z i l, Mr.	"	Jogjakarta
138.	Tan Ling Djie, Mr.	"	Jogjakarta
139.	Tauchid, Moehammad	"	Jogjakarta
140.	Suprpto	"	—
141.	Wangsa Widjaja, I.	"	Jogjakarta
142.	Abidin, Prof. S, M,	P. B. I.	Jogjakarta
143.	A s m o e	"	P a t i
144.	Atim Soetopo	"	Jogjakarta
145.	Dalijono, Mr. Moh.	"	S o l o
146.	Djajoes	"	S o l o
147.	Djonhar	"	K e d i r i
148.	Enoch, Moch.	"	S u b a n g
149.	Fatkoer	"	Madloen
150.	Hartojo	"	S o l o
151.	I s b a n d i	"	Sarabaja
152.	I s k a k	"	Jogjakarta
153.	Moedjono, R.	"	Jogjakarta
154.	Moesirin	"	Jogjakarta
155.	N j o n o	"	Jogjakarta
156.	Oemar Sapari	"	Jogjakarta
157.	Prawirowirjono	"	Bodjonegoro
158.	S a d o n o	"	S o l o
159.	Sandjojo	"	Bodjonegoro
160.	Sardjono, Nj. Umi Suharti	"	Kepandjen
161.	Satrio, Dr.	"	Jogjakarta
162.	Sjamsoe Harjo Oedojo	"	Jogjakarta
163.	Soebarmin Adiwidjojo	"	Jogjakarta
164.	Soedarto Josohandoko	"	Jogjakarta

No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l a m a t
165.	Soedjoed	"	Madiun
166.	Soekanto	"	Jogjakarta
167.	Soemedi Mangunsandjojo	"	Jogjakarta
168.	Soenardi Adiwirjono	"	Jogjakarta
169.	Soenarjo Prodjowardojo	"	Jogjakarta
170.	Soengkono	"	K e d i r i
171.	Soepiman	"	K e d i r i
172.	Soewarti, Nn.	"	Jogjakarta
173.	Soewignjo Hadiatmodjo	"	Magelang
174.	Tjugito	"	M a d i u n
175.	Trimoerty, Nj. S. K.	"	Jogjakarta
176.	A i d i t, D N.	P. K. I.	Solo
177.	A l i, Moechammad	"	Banten
178.	A l i m i n	"	Solo
179.	Baharoedin	"	Solo
180.	Basiran	"	Modjokerto
181.	B a s u k i	"	Sukabumi
182.	Dirdjosoeprapto	"	P a t i
183.	Djoemiran	"	Djombang
184.	Djamaloedin	"	Basoeke
185.	Hasan Raid	"	Jogjakarta
186.	Hoetomo Soepardan	"	Madiun
187.	K o e b e s	"	Indramaju
188.	Lauw King Hoo	"	Djember
189.	N a h a r	"	K e d i r i
190.	Ngadiman Hardjosoesparto	"	Jogjakarta
191.	U t a r j o, S.	"	Magelang
192.	Prawiroasmoro	"	K e d i r i
193.	Prio Soejoto	"	Bodjonegoro
194.	Sanusi, Moech.	"	Djakarta
195.	Sardjono	"	Solo
196.	S l a m e t	"	P a t i
197.	Soedihijat	"	Jogjakarta
198.	Soedjadi	"	Magelang
199.	Soejitno	"	Madiun
200.	Soejitno Renohadiwirjo	"	M a l a n g
201.	Soekadis, R.	"	Sukabumi
202.	Soekimah Alirachman, Nj.	"	K e d i r i
203.	Soemarno	"	M a l a n g
204.	Soerip	"	Magelang
205.	Soerojo	"	D j o m b a n g
206.	Tarsono	"	Bodjonegoro

No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l a m a t
207.	T o h a , Moh.	P. K. I.	Tasikmalaja
208.	Abednego, M.	Parkindo	Jogjakarta
209.	Harahap, Ds. F.K.N.	"	Jogjakarta
210.	Ismail Reksoatmodjo	"	Jogjakarta
211.	Johannes, Drs. W.Z.	"	Jogjakarta
212.	Kumontoy, J. B.	"	Djember
213.	N a w a w i	"	Sumedang
214.	Probowinoto	"	Semarang
215.	Putuhena, Ir.	"	Jogjakarta
216.	Soetardjo Kertonadi, R.M.	"	M a l a n g
217.	Soemardi Dr. R.	"	Jogjakarta
218.	Sumarto R. y	"	Jogjakarta
219.	Tambunan, Mr. A.M.	"	Jogjakarta
220.	D a r g o , J.	P. K. R. I.	Jogjakarta
221.	Djaman Hasibuan	"	Kotaradja
222.	Djupri, A. J.	"	M a l a n g
223.	Harjadi, F. S.	"	M a l a n g
224.	Kindangen, Nj. A. M.	"	Makasar
225.	Pandiangan, A.	"	Pematang Siantar
226.	Sandjojo Sosroningrat	"	L a m p u n g
227.	Siregar, J. M.	"	Sibolga
228.	Soehardi, Mr. A. A.	"	Jogjakarta
229.	Soewarto, Ir.	"	S o l o
230.	Supardi, Ir.	"	Jogjakarta
231.	Suradi, Dr.	"	Djakarta
232.	Abikusuma Tjokrosujoso	P. S. I. I.	Jogjakarta
233.	Anwar Tjokroaminoto	"	—
234.	Arudji Kartawinata	"	—
235.	Damanhuri Djamil	"	—
236.	Drijowongso	"	Jogjakarta
238.	Kamrusid	"	—
237.	Harsono Tjokroaminoto	"	—
239.	Mat-tjie, A. S.	"	Palembang
240.	Rachman, W. A.	"	Lampung
241.	Sjahbudin Latef	"	—
242.	Sudibjo	"	—
243.	Wondoamiseno, W.	"	Jogjakarta
244.	Harmani, Mr.	P.I.R.	—
245.	Adam Malik	P. Murba	—
246.	Burham Djamil	"	—
247.	Gondowardjojo	"	—
248.	Maruto Nitimihardjo	"	—

No. urut	Nama	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	Alamat
249.	Ponidjo	P. Murba	—
250.	Pandu Kartawiguna	"	—
251.	Sajuti Melik	"	—
252.	Sastrosuprpto	"	—
253.	Sukarni	"	—
254.	Sultani	"	—
255.	Sultan Dewanis	"	—
256.	Taskandar	"	—
257.	Abdul Latief	Tidak berpartai	—
258.	Abdul Rachman	"	—
259.	Abdulmadjid, Mr.	"	—
260.	Achmad, R.	"	—
261.	Achmad Dipasuparto, Dr. K.	"	—
262.	Adam Bachtiar, Drs. H. S.	"	Djakarta
263.	Asmara Hadj	"	—
264.	Asmuni, H.	"	—
265.	Bahder Djohan, Dr.	"	Djakarta
266.	Basjuni, K.	"	—
267.	Baswedan, A. R.	"	—
268.	Barmawy Latief	"	Jogjakarta
269.	Budiarto Martoatmodjo, Mr. R.	"	Solo
270.	Buntaran, Dr. R.	"	Jogjakarta
271.	Chaerul Saleh	"	—
272.	Dachlan Abdullah, H.	"	Djakarta
273.	Dassaar, A. M.	"	—
274.	Diah, B. M.	"	Djakarta
275.	Djajaningrat, Nn. F. E.	"	—
276.	Djoko Said	"	Djakarta
277.	Dul Arnowo	"	—
278.	Faturachman	"	—
279.	Hadiprabowo, Nj. D. M.	"	—
280.	Halim, Dr. A.	"	—
281.	Handajaningrat, K. P. A. S.	"	Solo
282.	Harsoadi	"	Jogjakarta
283.	Ibnu Parna	"	—
284.	Iwa Kusuma Sumantri, Mr.	"	Jogjakarta
285.	Jusuf Wibisono, Mr.	"	Djakarta
286.	Kadarisman Notopradjarto, R.	"	Jogjakarta
287.	Kaffar, M. A.	"	Madiun
288.	Kaprawi	"	Jogjakarta
289.	Kartowijono, Nj. S.	"	Djakarta
290.	Kaslan	"	—

No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah	A l a m a t
291.	Kasman Singodimedjo, Mr.	Tidak berpartai	Djakarta
292.	Kartono, Dr. R.	"	"
293.	Kobarsjih	"	Jogjakarta
294.	Krissubanu	"	"
295.	Latuharhary, Mr. J.	"	"
296.	Mamahit, P.	"	Surabaya
297.	Mangunarskoro, Nj. Sri	"	Jogjakarta
298.	M a s d a n i	"	"
299.	M a s h u d	"	Djakarta
300.	Mochtar, R.	"	Magelang
301.	M u l j o	"	"
302.	M u n t o h a	"	"
303.	M u w a r d i, Dr.	"	"
304.	P r i j o n o, Dr. R.	"	"
305.	Rachman Tamin	"	"
306.	Sajuti Melik	"	Jogjakarta
307.	R u s l a n	"	"
308.	Sajuti Melok	"	"
309.	Sakirman, Ir.	"	"
310.	S a m. R. A. A.	"	"
311.	Sanusi Pane	"	"
312.	Sardjono Danudibroto, Dr.	"	"
313.	Sarwono Prawirohardjo, Prof. Dr. R.	"	"
314.	Sastrosuwirjo	"	"
315.	Siti Dahlah St. Makmur	"	Jogjakarta
316.	S j a h, Mr. Moh.	"	"
317.	S j a h r i r, Sutan	"	"
318.	S l a m e t	"	"
319.	S u r a s t o, Nj.	"	"
320.	Sosrodanukusumo, R. Kaharkusmen	Tidak berpartai	Djakarta
321.	Subandrio, Nj. Dr. Hurustiati	"	"
322.	Subianto, S.	"	"
323.	Subardjo, Mr. R.	"	"
324.	Sudijono Djojoprajitno	"	Jogjakarta
325.	Sudiro, Mbah	"	"
326.	Sudjono, Mr.	"	Djakarta
327.	Sugandi, Mr. R.	"	Jogjakarta
328.	Sugondo, Mr. R.	"	"
329.	Suwarsih Djojopuspito, Nj.	"	B a n d u n g
330.	S u j a t m a n	"	Jogjakarta
331.	S u j u d	"	"
332.	S u j u d i, Mr.	"	Semarang

No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah	A l a m a t
333.	Sukanti Surjotjondro, Nj.	Tidak berpartai	Djakarta
334.	Sukardjo Wirjopranoto	"	"
335.	Sukani Kartodiwirjo	"	Jogjakarta
336.	Sumarsono	"	"
337.	Sunarjati Sukemi, Nj.	"	Djakarta
338.	Sunarjo Kolopaking, Mr.	"	"
339.	Suparti, Nn.	"	"
340.	Surachman, Ir. R. P.	"	"
341.	Supomo, Prof. Mr. Dr.	"	"
342.	Suprpto, Mr.	"	"
343.	Surjohamidjojo, Pang.	"	Solo
344.	Suroso, R. P.	"	"
345.	Susilowati, Nn.	"	Jogjakarta
346.	Sutarman	"	"
347.	S u t a r t o	"	Sukabumi
348.	Sutjahjo, Mr.	"	"
349.	Sutjipto, Dr.	"	Jogjakarta
350.	Sutopo Wonobojo	"	"
351.	Suwarto	"	"
352.	Suwignjo Hadikusumo, R.	"	Djatinegara
353.	Tadjaludin	"	"
354.	Tan Malaka	"	"
355.	Tan Po Goan, Mr.	"	"
356.	Tjakraningrat. G. P. H.	"	"
357.	Oemijati Saroso, Nj. Sri	"	Jogjakarta
358.	Wahid Hasjim, K. H.	"	"
359.	Wiguna, P. K.	"	Jogjakarta
360.	Wikana	"	"
361.	Yamin, Mr. Muh.	"	Jogjakarta
362.	Zain Djambek, M.	"	"
363.	S u w i r j o	"	"
364.	Afandi, R. Moehammad	B u r u h	Jogjakarta
365.	Ahem Erningpradja	"	Djakarta
366.	Asraroesdin	"	Jogjakarta
367.	Bahroedin	"	M a l a n g
368.	Boejoeng Saleh	"	Jogjakarta
369.	Coerdian, E.	"	Djakarta
370.	Danuatmadja, Moh.	"	G a r u t
371.	Djojoprajitno	"	Magelang
372.	Danuhusudo, Dr. A. K. R. T.	"	Semarang
373.	Djojosumarto	"	Solo
374.	Djokosoedjono	"	Jogjakarta

No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah	A l a m a t
375.	Hadipranoto	"	S o l o
376.	Hadisoemarta	"	Jogjakarta
377.	Hartono Sastrahamidjaja	"	Jogjakarta
378.	K a b o e l, M.	"	M a l a n g
379.	K a m i d	"	Jogjakarta
380.	K a r d a n	"	Pekalongan
381.	R e d j o	B u r u h	Jogjakarta
382.	R i a t i	"	Surabaya
383.	Saikin	"	Jogjakarta
384.	Sardjana Surahudaja	"	Jogjakarta
385.	Sastradihardja, Moh.	"	Jogjakarta
386.	Soebandi, Rd.	"	Jogjakarta
387.	Soedjono	"	Bodjonegoro
388.	Soemardjo	"	Jogjakarta
389.	Soemarsono	"	Jogjakarta
390.	Soenarso, R.	"	M a d i u n
391.	S o e n i, Roro	"	Bodjonegoro
392.	Soeparna Sastradiredja	"	—
393.	Soepranoto	"	Djakarta
394.	Soeprapto	"	S o l o
395.	Soerjono	"	Bodjonegoro
396.	Soerjosoebroto	"	K e d i r i
397.	Soesanto, Rd.	"	Jogjakarta
398.	Werdojo, K.	"	Jogjakarta
399.	Widojoko, Md.	"	Rembang
400.	Wirosueboto, K. Gunawan	"	Jogjakarta
401.	Zachrie, Abdullah	"	Priangan
402.	Abdullatief, H.	T a n i	Pekalongan
403.	Abdulrachman Wangsadikarta	"	Djakarta
404.	A m b j a h	"	M a l a n g
405.	A s m o	"	Djember
406.	D a m i r i	"	K e d u
407.	Hasmosoewigno	"	—
408.	Darmosoemarto	"	Bondowoso
409.	Hadibroto	"	Jogjakarta
410.	Istiadjid	"	Jogjakarta
411.	K a s t o e r a	"	B a n d u n g
412.	Marsidik	"	K e d u
413.	Mashadidjojo	"	P a t i
414.	Moersid Safioedin	"	Pandeglang
415.	Hatawidjaja, K.	"	Tasikmalaja
416.	Niti Sumantri	"	B a n d u n g

No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah	A l a m a t
417.	O e t o m o	T a n i	Blora
418.	Poespoadmodjo, Moh. Padli	"	Probolinggo
419.	Rachman, A.	"	Djepara
420.	Ranie Soelaiman	"	Poerwokerto
421.	Ridwan, Moh.	"	K e d i r i
422..	Sadjarwo	"	Jogjakarta
423.	Sadjimo	"	Bodjonegoro
424.	Sjafie, Moh.	"	B a n d u n g
425.	Sajoga	"	Jogjakarta
426.	Sanairmihardja	"	Modjokerto
427.	Slamet Atmosoedibjo	"	Jogjakarta
428.	Soedirdjo, S.	"	Semarang
429.	Soedjono	"	Madiun
430.	Soegiarto	"	Jogjakarta
431.	Soehardi	"	K e d i r i
432.	Soejitno Padmowidagdo	"	Solo
433.	Soekanda	"	Tjirebon
434.	Sukoso Wirjosapoetro	"	Poerwokerto
435.	S o e m a r n o	"	Tjirebon
436.	Soendjoto	"	Surabaya
437.	Soeradiwidjaja	"	G a r u t
438.	Soesanto, H.	"	—
439.	T a k r i p	"	K e d i r i
340.	Tanoedibrata, R.	"	Djakarta
441.	Waranan, Suiitno	"	Djakarta
442.	Abdoel Hakim	Sumatera	Sibolga - Tapanuli
443.	Abdul Karim, M. S.	"	Langsa Atjeh
444.	Abdullah Joesoef	"	Siantar
445.	Abdulrahim Oesman, Dr.	"	Bukittinggi
446.	Abdoerrahman Sjihab, H.	"	Tapanuli
447.	Achmad Noer Nasoetion	"	Jogjakarta
448.	Agoes Salim	"	
449.	Ali Rahman	"	
450.	Ali Hasimy	"	Kutaradja-Atjeh
451.	A m e l z	"	
452.	Anwar, Mohamad	"	Palembang
453.	Alihamzah, H.	"	
454.	Arifin, A.	"	
455.	Bachtaroedin	"	
456.	B a s r i	"	Palembang
457.	Basunie Saropie	"	Palembang
458.	Chanafiah, Mochamad Ali	"	Bengkulen

No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah	A l a m a t
459.	Hasan Mukin	Sumatera	D j a m b i
460.	Herman Siahaan, C.	"	T. Tinggi
461.	Iskandar Tedjasukmana	"	Jogjakarta
462.	I s m a i l	"	T. Karang-Lampung
463.	Jahja Jacoeb	"	"
464.	Jusin, Achmad	"	T. Karang-Lampung
465.	Junan Nasution, M.	"	Kutaradja
466.	Joesoef Abdullah, Moh.	"	T. Tinggi
467.	Karim, Nj. Noerbaiti D.	"	Bukittinggi
468.	Kario Siregar	"	Jogjakarta
469.	Luat Siregar, Mr.	"	Jogjakarta
470.	Mangaradja Dhoetan	"	B. Tinggi
471.	Marzuki Jatim	"	B. Tinggi
472.	Moechtar Jahja	"	B. Tinggi
473.	Melanchton Siregar	"	P. Siantar
474.	Petroes Samosir	"	P. Siantar
475.	Poesposutjipto	"	Jogjakarta
476.	Rasuna Said, Rangkajo	"	Jogjakarta
477.	Saohoka, J. N.	"	Tebing Tinggi
478.	Sarwono Sastra Noetardjo	"	Langsa-Atjeh
479.	Siagian, M. L.	"	D e l i
480.	Simatupang	"	Semarang
481.	Sinaga, Dr. H.	"	Djakarta
482.	Siradjoeeddin Abbas, H.	"	Bukit Tinggi
483.	Slamet, R.	"	Pekan Baru
484.	Soehardjo	"	Lumbuklinggau
			Palembang
485.	Soetan Mansoer, A. R.	"	Jogjakarta
486.	Soetikno Padmosumarto	"	Kutaradja-Atjeh
487.	Tarigan, S. M.	"	Langsa-Atjeh
488.	Tjikwan, K. H.	"	Sumatera Barat
489.	Wasito, Dr.	"	Batang Taru-
			Tampanuli
490.	Zainal Abbidin Achmad	"	Jogjakarta
491.	Zainul Baharudin	"	Jogjakarta
492.	Charidji Kasuma, G. M.	Kalimantan	Jogjakarta
493.	Goesti Djohan	"	Jogjakarta
494.	Koesmuljono	"	—
495.	Machmud, A.	"	Djakarta
496.	Maizir Achmaddyns	"	Semarang
497.	Moeis, H. G. A.	"	Jogjakarta
498.	Samsi Gelib, Dr.	"	Sumedang

No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah	A l a m a t
499.	Tjilik Riwoet	Kalimantan	Jogjakarta
500.	Abdul Razak	Sulawesi	Jogjakarta
501.	Audi Penjami	"	Jogjakarta
502.	Andi Magga Amirullah	"	Semarang
503.	Bebasa Daeng Lalo	"	Djakarta
504.	Jasin, Moh.	"	Pekalngan
505.	Joenoës Mattalitti, Moh.	"	Madiun
506.	Kesyungan, E.	"	Surabaya
507.	Machmud L. Latjuba	"	Jogjakarta
508.	M e n d u r , A. L.	"	—
509.	Paath, V. R.	"	Djakarta
510.	Posik, W. J. D.	"	Djakarta
511.	Ratulangi. A. R. S. D.	"	Djakarta
512.	Ratulangi, Nona Zus	"	Djakarta
513.	Rondonuwu, O.	"	Jogjakarta
514.	Saad, Moh.	"	Djakarta
515.	Supit, A. J.	"	—
516.	Fretes, J. D. de	Maluku	Djakarta
517.	Jaups, R. J.	"	Djakarta
518.	P a d a n g , Moh.	"	M a l a n g
519.	Patty, A. J.	"	Jogjakarta
520.	Picaully, Dr. Joh.	"	—
521.	Samalo, Dr. L. G. J.	"	Jogjakarta
522.	Syaranammual, J. D.	"	Djakarta
523.	T a h i j a , A.	"	—
524.	I Gusti Gde Raka	Sunda-Ketjil	—
525.	Johannes, Ir. H.	"	Jogjakarta
526.	Leziangi Laxarus	"	Djakarta
527.	L o b o , I. R.	"	Jogjakarta
528.	P e l l o , A. S.	"	Jogjakarta
529.	Budja Wiria Tegehkari	"	—
530.	Inje Beng Hoat	Golongan Minoritet (Tionghoa)	—
531.	Liem Koen Hian	"	—
532.	Ong Eng Die, Dr.	"	—
533.	Siauw Giok Tjhan	"	Jogjakarta
534.	Tan Boen Aan, Ir.	"	Bondowoso
535.	Yap Tjwan Bing, Drs.	"	B a n d u n g
536.	Bajasub, A.	Golongan Minoritet (Arab)	—
537.	Hamid Algadrie	"	Djakarta
538.	Oemar bin Salim Hubeid	"	Surabaya
539.	H a g e , D.	Golongan Minoritet (Eropah)	Djakarta

DJUMLAH ANGGOTA KOMITE NASIONAL PUSAT

(Keadaan pada Pleno ke-VI di Jogjakarta)

I. WAKIL ² PARTAI :	363
1. M A S J U M I	60
2. PARTAI NASIONAL INDONESIA (P.N.I.)	45
3. PARTAI SOSIALIS	36
4. PARTAI BURUH INDONESIA (P.B.I.)	34
5. PARTAI KOMUNIS INDONESIA (P.K.I.)	32
6. PARKINDO	12
7. PARTAI KATOLIK R.I. (P.K.R.I.)	12
8. PARTAI SJARIKAT ISLAM INDONESIA (P.S.I.I.)	12
9. PARTAI INDONESIA RAYA (P.I.R.)	1
10. PARTAI MURBA	12
11. TIDAK BERPARTAI	107
II. WAKIL ² GOLONGAN :	78
12. GOLONGAN B U R U H	38
13. GOLONGAN T A N I	40
III. WAKIL ² DAERAH :	88
14. DAERAH S U M A T E R A	50
15. DAERAH KALIMANTAN	8
16. DAERAH SULAWESI	16
17. DAERAH M A L U K U	8
18. DAERAH SUNDA KETJIL	6
IV. GOLONGAN MINORITET :	10
19. T i o n g h o a	6
20. A r a b	3
21. E r o p a h	1

Djumlah	:	539
---------	---	-----

B. DAFTAR ANGGOTA SENAT R.I.S.

15 Pebruari — 16 Agustus 1950

No. urut	N a m a	Utusan dari	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ²
1.	Mr. Sumanang	Neg. Republik Indonesia (Jogja)	16-2-1950	
2.	Mr. Teuku Mohammad Hasan	— " —	16-2-1950	Terpilih sbg. Wakil Ketua Senat RIS.
3.	Sultan Kaharuddin	Neg. Indonesia Timor	16-2-1950	Mengundurkan diri.
4.	M. A. Pellaupessy	— " —	16-2-1950	Terpilih sbg. Ketua Senat RIS.
5.	Ir. R.H. Mohd. Enoch	Neg. Pasundan	16-2-1950	
6.	M. Ardiwinangun	— " —	16-2-1950	
7.	R. A. A. Soejadi	Neg. Djawa Timur	16-2-1950	
8.	Roeslan Wongsokoesoemo	— " —	16-2-1950	Mengundurkan diri.
9.	M. Gondosoewandito	Neg. Madura		
10.	R. Abdoerrasid Koesoemodiwirjo	— " —	16-2-1950	Mengundurkan diri.
11.	Mr. Djaidin Poerba	Neg. Sumatera Timur	16-2-1950	
12.	Ngeradjai Meliala	— " —	16-2-1950	
13.	Raden Hanan	Neg. Sumatera Selatan	20-2-1950	
14.	Bustan Urip	— " —	16-2-1950	
15.	Dr. R. V. Sudjito	Daerah Djawa Tengah	16-2-1950	
16.	Sarino Mangunpranoto	— " —	16-2-1950	
17.	Sulaiman Dzen	Daerah Bangka	16-2-1950	
18.	Mr. Tjoeng Tin Jan	— " —	16-2-1950	
19.	Aboebakar	Daerah Belitung	20-2-1950	
20.	Mohd. Saad	— " —	16-2-1950	
21.	Mohd. N o h	Daerah Riau	16-2-1950	
22.	Machmud	— " —	16-2-1950	Mengundurkan diri.
23.	A. Djaelani	Daerah Istimewa Kalimantan Barat	16-2-1950	
24.	R. Abubakar Ariadiningrat	— " —	16-2-1950	

No. urut	N a m a	Utusan dari	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ^a
25.	Mochran b. Hadji Ali	Daerah Dajak Besar	16-2-1950	
26.	Helmuth Kunum	— " —	16-2-1950	
27.	A. A. Rivai	Daerah Bandjar	5-4-1950	Pengganti tjalon anggota Hadji Raden.
28.	Mr. Boerhanoedin	— " —	16-2-1950	
29.	Mr. Tadjoeiddin Noor	Daerah Kalimantan Tenggara	16-2-1950	
30.	M. J a m a n i	— " —		Belum mengangkat sumpah.
31.	A.R. Djokoprawiro	Daerah Kalimantan Timur	16-2-1950	
32.	A.B.M. Jusuf	— " —	16-2-1950	

C. DAFTAR ANGGOTA D.P.R.—R.I.S.

15 Februari — 16 Agustus 1950

No. urut	N a m a	Utusan dari	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ^a
1.	Abdullah Jusuf	Neg. Republik Indonesia (Jogja)	17-2-1950	
2.	Ahem Erningpradja	— " —	17-2-1950	
3.	A m e l z	— " —	17-2-1950	
4.	Amri Jara	— " —	17-2-1950	
5.	Arudji Kartawinata	— " —	17-2-1950	Terpilih sbg. Wakil Ketua II DPR-RIS.
6.	B a s r i	— " —	17-2-1950	
7.	Benjamin, Hadji	— " —	17-2-1950	Meninggal dunia di Jogjakarta tgl. 4 Djuli 1950.
7a.	Hadikusomo, Ki Bagus	— " —	—	Pengganti Hadji Benjamin alm. Belum mengangkat sumpah.
8.	Goesti Abdul Moeis	— " —	17-2-1950	
9.	Hamid Algadrie	— " —	17-2-1950	
10.	Iwa Kusuma Sumantri, Mr.	— " —	17-2-1950	
11.	Jusuf Muda Dalam, Teuku	— " —	17-2-1950	
12.	Jusuf Wibisomo, Mr.	— " —	17-2-1950	
13.	Kasimo, I.J.	— " —	17-2-1950	
14.	Koesnan, Rh.	— " —	3-4-1950	
15.	Latuharhary, Mr. J.	— " —	17-2-1950	
16.	L o b o, I. R.	— " —	17-2-1950	
17.	Lukman Wiradinata, Mr.	— " —	17-2-1950	
18.	Manai Sophiaan	— " —	17-2-1950	
19.	Maruto Nitimihardjo	— " —	17-2-1950	
20.	Mohd. Dalijono, Mr.	— " —	17-2-1950	
21.	Mohd. Natsir	— " —	17-2-1950	
22.	Mohd. Noer El Ibrahimy	— " —	17-2-1950	
23.	Mohd. Padang	— " —	17-2-1950	

No urut	N a m a	Utusan dari	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ^a
24.	Mohd. Tauchid	— " —	17-2-1950	
25.	Moedikdio (Njonja)	— " —	17-2-1950	
26.	Muhd. Yamin, Mr.	— " —	17-2-1950	
27.	M u s t a f a	— " —	17-2-1950	
28.	Ngadiman Hardjosubroto	— " —	17-2-1950	
29.	Peris Pardede	— " —	17-2-1950	
30.	Rondonuwu, O.	— " —	17-2-1950	
31.	Said Ali, Sutan	— " —	17-2-1950	
32.	Sakirman, Ir.	— " —	17-2-1950	
33.	Saleh Umar	— " —		Relum mengangkat sumpaan.
34.	Sartono, Mr.	— " —	17-2-1950	Terpilih sbg. Ketua DPR RIS.
35.	Sarwono Sastro Sutardjo	— " —	17-2-1950	
36.	Siauw Giok Tjhan	— " —	17-2-1950	
37.	S i n a g a, Dr. H.	— " —	17-2-1950	
38.	Siradjuddin Abbas, Hadji	— " —	17-2-1950	
39.	Subadio Sastrosutomo	— " —	17-2-1950	
40.	Sujono Hadinoto, Mr.	— " —	17-2-1950	
41.	Sukiman Wirjosandjo Dr.	— " —	17-2-1950	
42.	Soenarjati Soekemi (Njonja)	— " —	17-2-1950	
43.	S u w a r t i (Nona)	— " —	17-2-1950	
44.	Tambunan, Mr. A. M.	— " —	17-2-1950	Terpilih sbg. Wakil Ketua I DPR-RIS.
45.	Tjokronegoro, Dr. A.	— " —	17-2-1950	
46.	Tjikwan, K. H.	— " —	17-2-1950	
47.	Werdojo, Karsono	— " —	17-2-1950	
48.	Yap Tjwan Bing, Drs.	— " —	20-2-1950	
49.	Yunan Nasution, M.	— " —	17-2-1950	
50.	Zainal Abidin Ahmad	— " —	17-2-1950	
51.	Andi Gappa	Neg. Indonesia Timur	17-2-1950	
52.	Andilolo, A. D.	— " —	17-2-1950	
53.	Bachmid, A. S.	— " —	17-2-1950	
54.	Dauhan, G. E.	— " —	17-2-1950	
55.	J a m c o, R.	— " —	24-2-1950	

No. urut	Nama	Utusan dari	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ²
56.	Lasut, R. C.	— " —	2-3-1950	
57.	Manoppo, A. C.	— " —	17-2-1950	
58.	Manuaba, I. B. P.	— " —	2-3-1950	
59.	Manteiro, L. E.	— " —	25-2-1950	
60.	Oli-i, T	— " —	25-2-1950	
61.	Pitoi, A. F. P.	— " —	17-2-1950	
62.	Pupella, E. U.	— " —	17-2-1950	
63.	Rotti, Ds. A.	— " —	17-2-1950	
64.	Sahettapy Engel, B.	— " —	17-2-1950	
65.	Sonda Daeng Mattajang	— " —	17-2-1950	
66.	Teng Tjin Leng, Mr.	— " —	17-2-1950	
67.	Waroh, A. (Njonja)	— " —	20-3-1950	
68.	Achsien, A. A.	Neg. Pasundan	—	Ditundjuk berda- sarkan Keputusan Badan Pekerdja K.N.P. No. 25A/ 1950 tanggal 25-5-1950
69.	Anwar Tjokroamincto	— " —	—	tentang "Peratur- an tentang Penundjukan
70.	Djerman Prawirawinata, R.	— " —	—	Anggota ² D.P.R. Sementara RIS Utusan Daerah Pasundan".
71.	Kadmirah Karnadidjaja	— " —	—	Belum mengang- kat sumpah.
72.	Mohd. Isa Anshary	— " —	—	
73.	Musirin Sosrosubroto	— " —	—	
74.	N a w a w i	— " —	—	
75.	Pandu Kartawiguna	— " —	—	
76.	Sunario, Mr.	— " —	—	
77.	Suparno, R.	— " —	—	
78.	Sutarto Hadisudibjo, R.H.	— " —	—	
79.	Abdurachman Wangsa- dikarta, R.	— " —	—	
80.	Abulhajat	— " —	—	
81.	Achmad Sumadi	— " —	—	
82.	Sidik Kartapati	— " —	—	
83.	Emon Bratadiwidjaja, R.	— " —	—	
84.	Jaman Sudjana Prawira	— " —	—	
85.	Wardi Kusnatalistra	— " —	—	

No. urut	N a m a	Utusan dari	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ^a
86.	S u m a r d i	Neg. Pasundan		
87.	Ateng Kartanahardja	Neg. Djawa Timur	17-2-1950	
88.	Arso Sosroatmodjo	— " —	17-2-1950	
89.	Augustin, Mr. W.	— " —	17-2-1950	Mengundurkan diri tgl. 16 April 1950.
90.	Djaswadi Suprpto, R.	— " —	17-2-1950	
91.	Dradjad Partoatmodjo, Dr.	— " —	17-2-1950	
92.	Indra Kasuma, Mr.	— " —	7-8-1950	
93.	Farid Alwi Isa, Hadji	— " —	17-2-1950	
94.	L a n g k a i, J.	— " —	17-2-1950	
95.	Pranoto, R. S.	— " —	24-7-1950	
96.	Said Bahreisj	— " —	17-2-1950	
97.	Saroso Harsono, R.	— " —	17-2-1950	
98.	Sudarnadi, M.	— " —	17-2-1950	
99.	Surjaningprodjo, R. T.	— " —	17-2-1950	
100.	Tan Boen Aan, Ir.	— " —	17-2-1950	
101.	Tjoa Sie Hwie, Mr.	— " —	17-2-1950	
102.	Bagioadi Mantjanegara, R.	Neg. Madura	17-2-1950	
103.	Kaharkusmen Sosrodanu- kusumo, Rd.	— " —	17-2-1950	
104.	Mohd. Ersat Trunodjojo	— " —	17-2-1950	
105.	Mohd. Machfud	— " —	17-2-1950	
106.	Mohd. Zainal Alim	— " —	17-2-1950	
107.	Nerus Ginting Suka	Neg. Sumatera Timur	17-2-1950	
108.	Muhd. N u h	— " —	17-2-1950	
109.	R a m l i, O. K.	Neg. Sumatera Timur	17-2-1950	
110.	S i n a g a, Philemon	— " —	17-2-1950	
111.	Ahmad Aznary. K. H.	Neg. Sumatera Selatan	17-2-1950	
112.	Mohd. Hasan	— " —	17-2-1950	
113.	Mohd. N u h	— " —	17-2-1950	
114.	Mohd. Saddak	— " —	17-2-1950	
115.	Adhisukmo, R. S.	Daerah Djawa Tengah	17-2-1950	
116.	Emor Djajadinata, R.	— " —	17-2-1950	
117.	E n d o n, Dr.	— " —	17-2-1950	
118.	Hidajat Prawirodiprodjo, R. M.	— " —	17-2-1950	
119.	Ibnutadji Prawirosudirdjo	— " —	17-2-1950	

No. urut	N a m a	Utusan dari	Sumpah/ dijandji	Keterangan lain ²
120.	Mohd. Iljas, Hadji	— " —	17-2-1950	
121.	Prawoto Sudibjo, S.	— " —	17-2-1950	
122.	Rondonuwu, A.	— " —	17-2-1950	
123.	Slamet Tirtosubroto, R.	— " —	17-2-1950	
124.	Sugih Tjokrosumarto, R.	— " —	17-2-1950	
125.	Trenggono, Dr. S. Hadibowo	— " —	17-2-1950	
126.	Th. van der Lee	— " —	—	Tjalon anggota Th. van der Lee belum menjerah- kan surat ² keper- tjajaannja (pemun- djukan sbg. ang- gota dan surat ke- terangan sebagai warganegara Indonesia).
127.	Abdul Samad	Daerah Bangka	17-2-1950	
128.	Jusuf Rasidi, A. M.	— " —	17-2-1950	
129.	Abdullah Aidit	Daerah Belitung	17-2-1950	
130.	Djohar, K. A.	— " —	17-2-1950	
131.	Achmad, Tengku	Daerah Riau	17-2-1950	
132.	Mohd. Noer	— " —	24-2-1950	Meninggal du- nia di Tandjung Pinang tgl. 21 Mei 1950.
133.	Djohan, Ade Mohd.	Daerah Istimewa Kalimantan Barat	17-2-1950	
134.	Palaunsoeka, F. C.	— " —	17-2-1950	
135.	Sudarso, Dr. M.	— " —	17-2-1950	
136.	Tjoeng Lin Sen	— " —	17-2-1950	
137.	Kunum Kusumojudo, E.	Daerah Dajak Besar	17-2-1950	
138.	Cyrillus Kersanegara, R.	— " —	—	Pengganti tjalon anggota Basuni, belum mengang- kat sumpah.
139.	Diapari, D. S.	Daerah Bandjar	22-3-1950	
140.	Idham Chalid	— " —	22-3-1950	
141.	Hasan Basri	— " —	22-3-1950	
142.	Andi Zainal Abidin	Daerah Kalimantan Tenggara	17-2-1950	

No. urut	N a m a	Utusan dari	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ²
143.	Gusti Djohan	— " —	17-2-1950	
144.	Moeis, I. A.	Daerah Kalimantan Timur	17-2-1950	
145.	Rasjid St. Radja Emas	— " —	17-2-1950	
146.	Mohd. Yatim Jacin	S a b a n g	22-3-1950	
147.	Ibrahim Sedar	Kotawaringin	22-3-1950	
148.	Mayor Polak, J.B.A.F.	Golongan Ketjil Eropah	5-4-1950	Diangkat dgn. Kep. Pres. RIS No. 84/1950 tgl. 23-2-1950.
149.	Schmitz, G. R.	— " —	6-3-1950	— " —
150.	S n e l, J. P.	— " —	6-3-1950	— " —
151.	Nieuwenhuysen, W. M.	— " —	23-5-1950	Diangkat dgn. Kep. Pres. RIS No. 94/1950 tgl. 26-2-1950.

DAFTAR ANGGOTA D. P. R. SEMENTARA

16 Agustus 1950 — 26 Maret 1956

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Asal perwakilan	Keterangan lain ²
1.	Abdullah Aidit	195 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 16-6-1954.
2.	Abdullah Jusuf	123 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
3.	Abdul Samad	194 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
4.	Abdulwahab Chasbullah, K.H.	9 D. P. A.		Sumpah tgl. 9-12-1950.
5.	Abdurachman Wangsa- dikarta, R.	232 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 18-8-1950.
6.	Abidin, Prof. S. M.	43 B P	— KNIP	Djandji tgl. 21-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 1-12-1954.
7.	A b o e b a k a r	29 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 18-9-1950.
8.	Abubakar Ariadining- rat, R.	33 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
9.	A b u l h a j a t	233 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 18-8-1950.
10.	Achmad, Tengku (lengkap: Achmad bin Tengku Atau, Tengku)	197 DPR	— RIS	Belum/tidak mengangkat sumpah. Mengundurkan diri tanggal 25-8-1950.
11.	Achmad Sumadi	228 DPR	— RIS	Djandji tgl. 22-8-1950
12.	Achsién, A. A.	216 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
13.	Adhisukmo, R. S.	192 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Djakarta tgl. 6-2-1954.
14.	Adnan, K.H. Mohd.	6 D. P. A.		Sumpah tgl. 16-8-1950.
15.	Ahem Erningpradja	111 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
16.	Ahmad Azhary, K. H.	179 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
17.	A m e l z	126 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
18.	Amri Jara	130 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
19.	Anak Agung Njoman Pantji Tisma	235 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 21-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 26-5-1951.
20.	Andi Gappa	144 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
21.	Andi Lolo, A. D.	147 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
22.	Andi Zainal Abidin, Mr.	206 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
23.	Anwar Tjokroaminoto	223 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 25-8-1950.
24.	Ardiwinangun	18 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
25.	Arso Sastroatmodjo	159 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.

No. Urut	N a m a	Angg. No.	perwakilan Asal		Keterangan lain ²
26.	Arudji Kartawinata	108 DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
27.	Asrarudin	45 B P	—	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 15-8-1955.
28.	Assaat, Mr.	42 B P	—	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
29.	Ateng Kartanahardja, Dr.	156 DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
30.	Bachmid, A. S.	139 DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
31.	Basri	129 DPR	—	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
32.	Baswedan, A. R.	47 B P	—	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
33.	Bebasa Daeng Lalo	48 B P	—	KNIP	Djandji tgl. 19-9-1950.
34.	Boerhannoedin, Mr.	37 SENAT	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
35.	Boerhannoedin Haharap, Mr.	49 B P	—	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 17-8-1955.
36.	Bustan Urip	24 SENAT	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 24-8-1955.
37.	Cyrikus Kersanegara, R.	236 DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 21-8-1950.
38.	Daijono, Mr. Mohd.	114 DPR	—	RIS	Djandji tgl. 21-8-1950.
39.	Daud Beureuh, Tengku	11 D. P. A.	—	RIS	Sumpah tgl. 25-10-1950.
40.	Dauhan, G. E.	152 DPR	—	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
41.	Dewantoro, Ki Hadjar	2 D. P. A.	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 31-3-1954.
42.	Disari, Dr. D. S.	203 DPR	—	RIS	Djandji tgl. 18-9-1950.
43.	Djaetun Dardjowijoto	50 B P	—	KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 31-10-1954.
44.	Djaidin Poerba, Mr.	21 SENAT	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
45.	Djaswadi Suprpto, R.	158 DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
46.	Djaelani, A.	32 SENAT	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
47.	Djerman Prawirawinata, R.	218 DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
48.	Djody Gondokusumo, Mr.	51 B P	—	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Non-aktif karena diangkat sbg. Menteri Kehakimaran terhitung mulai tanggal 1-8-1953. Mengundurkan diri tgl. 25-11-1954.
49.	Djuir Mohamed	53 B P	—	KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
50.	Djohan, Ade Mohd.	198 DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Asal perwakilan	Keterangan lain ²
51.	Djohan, Gusti	207 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
52.	Djohan Sjahroezah	70 B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
53.	D j o h a r, K. A.	196 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
54.	Djokoprawiro, A. R.	40 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
55.	Djokosoedjono	52 B P	— KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
56.	Dradjad Partoatmodjo, Dr.	157 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
57.	Emon Bratadiwidjaja, R.	230 DPR	— RIS	Djandji tgl. 21-8-1950.
58.	Emor Djajadinata, R.	183 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
59.	Enoch, Ir. R.H. Mohd.	17 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 16-5-1951
60.	Endon, Dr.	186 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
61.	Ersat Trunodjojo, Mohd.	173 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
62.	Farid Alwi Isa, H.	167 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
63.	Gondosuwandito, M.	20 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Dja- karta tanggal 2-6-1953.
64.	Hadikusumo, Ki Bagus	91 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 18-8-1950. Meninggal dunia di Jogja- karta tanggal 2-9-1954.
65.	Hadikusuma, S.	54 B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
66.	Hamid Algadrie, Mr.	117 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
67.	H a n a n, R.	23 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 3-10-1955.
68.	Harman, Mr.	55 B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Bandung tgl. 3-10-1951.
69.	Hasan, Mohd.	181 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
70.	Hasan Basri	204 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
71.	Hasan, Mr. Teuku Mohd.	15 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
72.	Helmuth Kunum	35 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
73.	Hidajat Prawirodipro- djo, R.M.	190 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
74.	Hindrosudarmo, R.	56 B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
75.	Hutomo Supardan	57 B P	— KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
76.	Ibnutadji Prawirosu- dirdjo	184 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
77.	Ibrahim Sedar	211 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
78.	Idam Chalid	205 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
79.	Iljas, H. Mohd.	189 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 25-10-1950. Mengundurkan diri tanggal 1-10-1955.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Asal perwakilan	Keterangan lain ²
80.	Indra Kasuma, Mr.	155 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
81.	Isa Anshary, Mohd.	217 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
82.	Iwa Kusuma Sumantri, Mr.	133 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 23-11-1954.
83.	Jaman Sudjanaprawira	231 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 7-6-1951.
84.	J a m a n i, Mohd.	39 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 25-9-1951.
85.	J a m c o, E.	149 DPR	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
86.	J u s u f, A.B.M.	41 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
87.	Jusuf Muda Dalam, Tengku	97 DPR	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
88.	Jusuf Rasidi, A.M.	193 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
89.	Jusuf Wibisono, Mr.	90 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
90.	KadmiraH Karnadidjaja	226 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Bandung tgl. 27-9-1952.
91.	Kasimo, I.J.	107 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 24-8-1955
92.	Kasman Singodimedjo, Mr.	58 B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
93.	Kobarsjih	59 B P	— KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
94.	Krissubanu	60 B P	— KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
95.	Kunum Kusumojudo, E.	202 DPR	— RIS	Djandji tgl. 18-9-1950.
96.	Koesnan, Rh.	109 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
97.	Langkai, J.	166 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
98.	Laoh, F.	10 D. P. A.	—	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 24-8-1955.
99.	Lasut, R. C. L.	142 DPR	— RIS	Djandji tgl. 8-9-1952.
100.	Latjuba, M. L.	61 B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 10-6-1955.
101.	Latuharhary, Mr. J.	130 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 1-5-1954.
102.	L o b o, I. R.	62 B P	— KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
103.	Luat Siregar, Mr.	119 DPR	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Djakarta tanggal 19-2-1953
104.	Lukman Wiriadinata Mr.	102 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 24-8-1955.
105.	Machfud, Mohd.	171 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Asal perwakilan	Keterangan lain ^a
106.	Maizir Achmaddyn's	63 B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
107.	Manai Sophian	96 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
108.	Manoppo, A. C.	141 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
109.	Manteiro, L. E.	148 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Non-aktif karena diangkat mendjadi Kepala Daerah Flores sedjak tanggal 1-4-1952.
110.	Mantjanegara, R.B.	170 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
111.	Manuaba, I. B. P.	140 DPR	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
112.	Margono Djojohadiku- sumo, R. M.	3 D. P. A.		Sumpah tgl. 16-8-1950.
113.	Maruto Nitimitardjo	106 DPR	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
114.	Mayor Polak, J.B.A.F.	214 DPR	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
115.	Mochran bin Hadji Ali	34 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
116.	Moeis, G.A.	118 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
117.	Moeis, I. A.	208 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
118.	Mudikdo, Njonja	100 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
119.	Musirin Sosrosubroto	221 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
120.	Mustapha	137 DPR	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950. Meninggal dunta di Djakarta tanggal 25-9-1953
121.	Natsir, Mohd.	89 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
122.	Nawawi	224 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
123.	Nerus Ginting Suka	175 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Djakarta tanggal 11-2-1955.
124.	Ngadiman Hardjosubroto	99 DPR	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 16-3-1951.
125.	Ngeradjai Meliala	22 SENAT	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
126.	Nieuwenhuysen, W. M.	215 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
127.	Noh, Mohd. (Riau)	31 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
128.	Noor, Ir. Pangeran Mohd.	7 D. P. A.		Sumpah tgl. 16-8-1950.
129.	Nuh, Mohd. (Sum. Sel.).	180 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
130.	Nuh, Mohd. (Sum. Timur).	177 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
131.	Nur el Ibrahimy, Mohd	92 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 18-9-1950.
132.	Olii, T.	138 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
133.	Padaug, Mohd.	131 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
134.	Palaunsoeka, F.C.	200 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
135.	Pandu Kartawiguna	222 DPR	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
136.	Pellaupessy, M. A.	14 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Asal perwakilan	Keterangan lain ²
137.	Peris Pardede	98 DPR	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
138.	Pitoh, F. A. P.	150 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
139.	Pranoto, R. S.	161 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
140.	Prawoto Mangkusasmito	86 B.P.	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
141.	Prawotosudibjo, S.	185 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Jogjakarta tgl. 21-12-1950.
142.	Pupella, E. U.	151 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
143.	Radjiman Wediodining rat, Dr.	4 D. P. A.	—	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Madiun tgl. 20-9-1952.
144.	Raka, I. G. G.	66 B P	— KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 25-11-1954.
145.	Ramli, O. K.	176 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
146.	Rasjid Sutan Radja Elmas	209 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
147.	Rasuna Said, Rangkajo	67 B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
148.	Rivai, A. A.	36 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
149.	Rondonuwu, A.	188 DPR	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Amsterdam (Negeri Belan- da tgl. 14-8-1955.
150.	Rondonuwu, O.	132 DPR	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
151.	R o t t i, Ds. A.	153 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
152.	S a a d, Mohd.	30 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
153.	Sabilal Rasjad	65 B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
154.	Saddak, R. Mohd.	178 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
155.	Sahetapy Engel, B.	143 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
156.	Said Ali, Sutan	127 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
157.	Said Bachreisj	162 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
158.	Sakirman, Ir	104 DPR	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
159.	Saleh Umar	95 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 20-11-1950.
160.	S a r d j o n o, S.	68 B P	— KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
161.	Sarino Mangunpranoto	26 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
162.	Saroso Harsono, R.M.	165 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
163.	S a r t o n o, Mr.	94 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
164.	Sarwono S. Sutardjo	124 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
165.	Schmitz, G. R.	212 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
166.	Setyabudhi, Dr. D. D.	12 D. P. A.	—	Belum/tidak mengangkat sumpah Meninggal dunia di Bandung tanggal 28-8-1950
167.	Siauw Giok Tjhan	115 DPR	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.

No. No.	N a m a	No. Angg.	Asal perwakilan	Keterangan lain ²
168.	Sidik Djojosukarto	69 B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Surabaya tanggal 8-9-1955.
169.	Sidik Kartapati	234 DPR	— RIS	Djandji tgl. 18-8-1950.
170.	Sinaga, Dr. H.	125 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 6-10-1954.
171.	Sinaga, Philemon	174 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
172.	Siradjuddin Abbas, H.	128 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 18-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 19-11-1954.
173.	S j a f e i, Mohd.	13 D. P. A.		Sumpah tgl. 18-11-1950.
174.	Sjamsuddin Sutan Mak- mur	80 B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 12-8-1955.
175.	Slamat Tirtosubroto, R.	182 DPR	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
176.	S n e l, J. P.	213 DPR	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
177.	Sonda Daeng Mattajang	145 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 18-8-1950.
178.	Sosrodanukumo, R.K.	169 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
179.	Subadio Sastrosatomo	101 DPR	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
180.	Sudarnadi, M.	164 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
181.	Sudarso, Dr. M.	199 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
182.	Sudijono Djojoprajitno	71 B P	— KNIP	Djandji tgl. 21-8-1950.
183.	Sudjito, Dr. R. V.	25 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
184.	Sugih Tjokrosumarto, R.	191 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
185.	Suhardi, Mr. A. A.	72 B P	— KNIP	Sumpah tgl. 21-8-1950. Mengundurkan diri tanggal tgl. 1-2-1955.
186.	Suhardjo	73 B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
187.	Soejadi, R. A. A.	19 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Surabaya tgl. 23-11-1953.
188.	Sujono Hadinoto, Mr.	93 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
189.	Sukiman Wirjosandjojo Dr.	88 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
190.	Sulaeman Dzen	27 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
191.	Sumanang, Mr.	16 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 13-3-1954.
192.	S u m a r d i	227 DPR	— RIS	Djandji tgl. 22-8-1950. Mengundurkan diri tanggal tgl. 22-7-1954.
193.	S u m a r t o	74 B P	— KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
194.	Sumartojo	75 B P	— KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Asal perwakilan	Keterangan lain ²
195.	Sunardi Adiwirjono	87 B P	— KNIP	Djandji tgl. 21-8-1950.
196.	Sunario, Mr.	219 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 27-11-1954.
197.	Sunarjati Sukemi, Njonja	135 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
198.	Sunarjo Mangunpuspito, Njonja	76 B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
199.	Sundjoto, R.	84 B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Jogjakarta tgl. 11-8-1955.
200.	Suparno, R.	220 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 18-8-1950.
201.	Surjaningprodjo, R.T.	160 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
202.	Suroso, R. Pandji	78 B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal tgl. 27-11-1954.
203.	Susilowati, Njonja	79 B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
204.	Sutardjo Kartohadikusumo	1 D. P. A.		Sumpah tgl. 16-8-1950.
205.	Sutarto Hadisudibjo, R.H.	225 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 18-8-1950.
206.	Suwarni Pringgodigdo, Njonja	8 D. P. A.		Sumpah tgl. 16-8-1950.
207.	Suwarti, Nena	103 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
208.	Syaranamual, J.D.	81 B P	— KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
209.	Tadjuddin Noor. Mr.	38 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
210.	Tambunan, Mr. A. M.	105 DPR	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
211.	Tan Boen Aan, Ir.	163 DPR	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
212.	Tan Po Goan, Mr.	82 B P	— KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
213.	Tauchid, Mahd.	113 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
214.	Tedjasukmana, R Iskandar	83 B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 15-8-1955.
215.	Teng Tjin Leng, Mr.	154 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
216.	Tjikwan, K.H.	122 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
217.	Tjoa Sio Hwie Mr.	168 DPR	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
218.	Tjoeng Lin Sen	201 DPR	— RIS	Belum/tidak mengangkat sumpah. Mengundurkan diri tanggal 11-1-1953.
219.	Tjoeng Tin Jan, Mr.	28 SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
220.	Tjrokronegoro, Dr. A.	112 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 1-4-1954.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Asal perwakilan	Keterangan lain ^a
221.	Trenggo, Dr. S Hadibowo	187 DPR	— RIS	Belum/tidak mengangkat sumpah. Mengundurkan diri tanggal 1-8-1950.
222.	Tjugito	77 B P	— KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
223.	Utarjo Purwosugito, S.	64 B P	— KNIP	Djandji tgl. 21-8-1950.
224.	Wardi Kusnatalistra	229 DPR	— RIS	Djandji tgl. 24-8-1950. Meninggal dunia di Tjimahi tgl. 4-1-1956.
225.	W a r o h, Njonja A.	146 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
226.	W e r d o j o, K.	110 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
227.	Wondoamiseno, W.	85 B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Djakarta tgl. 11-2-1952.
228.	Wurjaningrat, K.R.T.	5 D. P. A.		Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 17-4-1951.
229.	Yamin Mr. Mohd.	134 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 18-11-1954.
230.	Yap Tjwan Bing, Drs.	116 DPR	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 17-7-1954.
231.	Yatim Jacin, Mohd.	210 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
232.	Yunan Nasution, Mohd.	120 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
233.	Zainal Abidin Ahmad, H.	121 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 21-8-1950.
234.	Zainal Alim, Mohd.	172 DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
235.	Zainul Arifin	44 B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 25-11-1954.
236.	Zainul Baharuddin	46 B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.

KETERANGAN :

- I. DJUMLAH ANGGOTA D.P.R. — SEMENTARA 236
(pada waktu pelantikan tgl. 16-8-1950)
- II. ANGGOTA JANG MENGUNDURKAN DIRI/MENING-
GAL DUNIA DAN DIGANTI BERDASARKAN
UU No. 37 TAHUN 1953 (LN No. 88) ; 53
- III. ANGGOTA JANG MENGUNDURKAN DIRI DAN
TIDAK DIGANTI : 1
(Ir. R.H. Mohd. Enoch — Wakil PARKI)
- IV. ANGGOTA JANG NON-AKTIF KARENA DIANGKAT
MENDJADI KEPALA DAERAH FLORES
(ENDE) : 1
(L. E. Manteiro — Wakil P. KATOLIK)
- V. DJUMLAH ANGGOTA-PENGGANTI : 58
(diantaranja 5 orang sebagai pengganti ke-II,
jaitu :
1. Gege Rafiudin Sandjadirdja — No. 85
 2. H. Moh. Dja'far Zainuddin — No. 185
 3. I G. G. R a k a — No. 66
 4. Mr. Iwa Kusuma Sumantri — No. 133
 5. H. Sjamsuddin — No. 226
- IV. DJUMLAH ANGGOTA D.P.R. — SEMENTARA PADA
WAKTU PEMBUBARAN TGL. 26-3-1956 235
(lihat : III).
-

D. DAFTAR CHUSUS ANGGOTA-PENGGANTI

D. P. R. SEMENTARA

(Berdasarkan UU No. 37 tahun 1953 - LN No. 88)

No. urut	N a m a	No. Angg.	Fraksi	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ² .
T A H U N 1 9 5 4 :					
1.	Imam Sutardjo	137	P. Buruh	20-2-1954	Pengganti Mustapha.
2.	Dr. Buntaran Marto- atmodjo	62	Persatuan Progresif	20-2-1954	Pengganti Mr. Luat Siregar.
3.	D. N. Aidit	99	P. K. I.	20-2-1954	Pengganti Ngadiman Hardjosubroto.
4.	Gde Ngurah Rai	235	P. R. N.	20-2-1954	Pengganti Anak Agung Njoman Pandji Tisna.
5.	Ir. S. Dipokusumo	226	Parindra	20-2-1954	Pengganti Kadmirah Karnadidjaja.
6.	Hoesain Poeang Limboro	55	PIR-Hazai- rin	23-2-1954	Pengganti Mr. Har- mani.
7.	Dr. St. Z. A. Abidin	197	— " —	23-2-1954	Pengganti Tengku Achmad b. Tengku Atau.
8.	S. Mangunsarkoro	187	P. N. I.	23-2-1954	Pengganti Dr. Trenggono S. Hadibowo.
9.	Mr. R. Boedisoesetyo	19	PIR-Hazai- rin	24-2-1954	Pengganti R.A.A. Soejadi.
10.	S. Narto Muljohadi- pramudji	20	Masjumi	26-2-1954	Pengganti M. Gon- dosoewandito.
11.	Nj. Lastari Sutrasno	192	P. N. I.	27-2-1954	Pengganti R.S. Adhisukmo.
12.	Jakin Intan Permata	85	P. S. I. I.	19-3-1954	Pengganti Wondoamiseno. Mengundurkan diri tgl. 20-5-1954.
13.	H. Abdurrachman Sjihab	185	Masjumi	24-3-1954	Pengganti S. Prawo- to Sudibjo. Meninggal dunia di Medan tgl. 7-2-1955.
14.	Ahmad Nino Hadjarati	5	Parindra	24-3-1954	Pengganti K.R.T. Wurjaningrat.
15.	Silas Papare	4	Persatuan Progresif	24-3-1954	Pengganti Dr. Radjiman Wedio- diningrat.

No. urut	N a m a	No. Angg.	Fraksi	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ² .
16.	Tio Kiang Soen	201	PIR-Hazairir	13-4-1954	Pengganti Tjoeng Lin Sen
17.	Mr. Soebagio Rekso-dipoero	16	P. N. I.	14-4-1954	Pengganti Mr. Sumanang.
18.	R. Djadi Wirosubroto	112	BTI.	30-4-1954	Pengganti Dr. A. Tjokronegoro
19.	B. M. D i a h	2	—	30-6-1954	Pengganti Ki Hadjar Dewantoro.
20.	Mr. Chr. Soplanit	136	PIR-Wongso	16-8-1954	Pengganti Mr. J. Latuharhary
21.	N j o t o	195	P. K. I.	16-8-1950	Pengganti Abdullah Aidit.
22.	M. H. Lukman	227	P. K. I.	16-8-1954	Pengganti Soemardi
23.	Tony W e n	116	P. N. I .	18-8-1954	Pengganti Drs. Yap Tjwan Bing.
24.	Dr. H. Ali Akbar	91	Masjumi	5-11-1954	Pengganti Ki Bagus Hadikusumo.
25.	Drs. J.L.W.R. Rhemrev	12	Masjumi	11-11-1954	Pengganti Dr. D.D. Setyabudhi.
26.	Bachtaruddin	50	P. K. I.	30-11-1954	Pengganti Djaetun Dirdjowoyo.
27.	Chairuddin Sjahadat	219	P. N. I.	4-12-1954	Pengganti Mr. Sunario.
28.	Mr. Sundoro Budhyarto Martoatmodjo	133	Persatuan Progresif	4-12-1954	Pengganti Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Mengundurkan diri tgl. 1-10-1955.
29.	Saladin Sarumpaet	125	Parkindo	8-12-1954	Pengganti Dr. H. Sinaga.
30.	Ismael Lengah	134	—	8-12-1954	Pengganti Mr. Muhd. Yamin.
31.	Made Toyasastra	66	P. R. N.	8-12-1954	Pengganti I G. G. Raka. Mengundurkan diri tgl. 23-8-1955
32.	H. Saifuddin Zuhri	44	N. U.	8-12-1954	Pengganti. Zainul Arifin.
33.	R. P. Soenarjo Gondokoesoemo	78	Parindra	8-12-1954	Pengganti. R.P. Soeroso.
34.	Maridie Danoekoesoema	51	P. R. N.	9-12-1954	Pengganti Mr. Djody Gondokusumo.

No. urut	N a m a	No. Angg.	Fraksi	Sumpah/djandji	Keterangan lain ² .
35.	H. Rusli Abdul Wahid	128	Perti	9-12-1954	Pengganti Hadji Siradjuddin Abbas.
36.	Baheramsjah St. Indra	43	P. Buruh	13-12-1954	Pengganti Prof. S. M. Abiddin.

TAHUN 1955 :

37.	M.J. Oentoe	72	P. Katolik	1-4-1955	Pengganti Mr. R. A. A. Suhardi.
38.	Dr. B. Sitepu Pandebes	175	Demokrat	16-6-1955	Pengganti Nerus Ginting Suka.
39.	Mohammad Ismail Napu	61	Masjumi	20-7-1955	Pengganti Machmud Latjuba
40.	Gogo Rafiudin Sendjadirdjo	85	P. S. I. I.	21-7-1955	Pengganti Jakin Intan Permata.
41.	H. Mohammad Dja'far Zainuddin	185	Masjumi	1-8-1955	Pengganti Hadji Abdurrachman Sjhab.
42.	I G. G. R a k a	66	P.R.N.	7-10-1955	Pengganti Made Toyasastra.
43.	J.D. Massie	10	P. R. N.	7-10-1955	Pengganti F. Laoh.
44.	Ir. Soewarto	107	P. Katolik	7-10-1955	Pengganti I. J Kasimo.
45.	Anwar Harjono	49	Masjumi	7-10-1955	Pengganti Mr. Boerhanoeddin Harahap.
46.	Radjiman Nasution glr.. Kumala Pontas	84	Parindra	7-10-1955	Pengganti R. Soendjoto.
47.	Noeroelhah	102	P. S. I.	7-10-1955	Pengganti Mr. Lukman Wiriadinata.
48.	P.M. Tangkilisan	45	P. Buruh	7-10-1955	Pengganti Asraroedin.
49.	Moestafa Kamil Oesman	80	PIR-Hazairin	7-10-1955	Pengganti Sjamsuddin St. Makmur.
50.	St. Muchtar Abidin	83	P. Buruh	7-10-1955	Pengganti R. Iskandar Tedjasukmana.
51.	Max Maramis	188	P. N. I.	17-10-1955	Pengganti alm. A. Rondonuwu.
52.	Teuku Teungoh Hanafiah	23	PIR-Hazairin	17-10-1955	Pengganti R. Hanan
53.	Andi Baso Rachim	24	PIR-Hazairin	17-10-1955	Pengganti Bustan Urip.
54.	Hadji Zainul Arifin	189	N. U.	17-10-1955	Pengganti K.H. Muhd. Iljas.
55.	Mr. Sunario	69.	P.N.I.	17-10-1955	Pengganti Sidik Djojosukarto

No. urut	N a m a	No. Angg.	Fraksi	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ^a .
56.	Mr. Iwa Kusuma Sumantri	133	Persatuan Progresif	20-10-1955	Penggnati Mr. Sundoro Budhyarto Martootatmodjo.
57.	H. Sjamsudin	226	Parindra	7-11-1955	Pengganti Ir. S. Dipokusumo.

T A H U N 1956 :

58. W i k a n a 229 P.K.I.	11-2-1956	11-2-1956	Pengganti Wardi Kusnatalistra.
-------------------------------	-----------	-----------	--------------------------------

ICHTISAR DJUMLAH ANGGOTA D.P.R. SEMENTARA

I.	Bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung (D.P.A.) ..	13
II.	„ „ Senat Republik Indonesia Serikat	29
III.	„ „ Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat (BP-KNP)	46
IV.	„ „ Dewan Perwakilan Rakjat R. I. S.	148

Djumlah Anggota DPR Sementara 236

(Pada waktu pelantikan tgl. 16 Agustus 1950)

E. DAFTAR ANGGOTA D.P.R. — HASIL PEMILIHAN UMUM

26 Maret 1956 — 22 Djuli 1959

No. urut	N a m a	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ² .
1.	Abdoellah Afandi, R.	127	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
2.	Abdul Azis, K.R.H.	112	A.K.U.I. Djawa Timur	24-3-1956	
3.	Abdul Aziz Dijar	106	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
4.	Abdul Hakim	88	Masjumi Sumatera Utara	24-3-1956	
5.	Abdul Rasjid Faqih	138	Masjumi Sulawesi Tenggara/ Selatan	24-3-1956	
6.	Abdul Wachid Soejoso	109	Masjumi Djawa Timur	24-3-1956	
7.	Abdullah Gathmyr	69	N. U. Sumatera Selatan	24-3-1956	
8.	Abdulmutalib Daeng Talu	172	PIR-Hazairin Nusa Tenggara Timur	24-3-1956	
9.	Abdulrozak	156	P. N. I. Sumatera Selatan	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 1-6-1957.
10.	Abdulwahab Chasbullah, K.H.	73	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
11.	Abulhajat, R.	55	(tjalon) P.K.I. Djawa Tengah	24-3-1956	Meninggal dunia di Djakarta tanggal 15-9-1958.
12.	Achmad Ghozali, K.	130	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
13.	Achmad Siddiq, K.	131	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
14.	Achmad Sjaichu	114	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
15.	Achsien, H. A. A.	199	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
16.	Adam Malik	84	P. Murba	16-4-1956	
17.	Ahem Erningradja	249	P. N. I. Djawa Barat	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 12-7-1959.
18.	Achmad, Muh.	181	P. N. I. Djawa Barat	24-3-1956	

No. urut	N a m a	No. Angg.	Wakil dari/ Fraksi	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ² .
19.	Ahmad Dara Sjahruddin	243	Masjumi Sulawesi Tenggara/ Selatan	24-3-1956	
20.	Aidit, D. N.	256	P. K. I. Djawa Tengah	11-6-1956	
21.	A k i b, H. Mochd.	144	Masjumi Sulawesi Tenggara/ Selatan	24-3-1956	
22.	Ali Akbar, Dr. H.	15	Masjumi Sumatera Tengah	24-3-1956	
23.	Ali Pratamingkoesoemo, R. T. A. Moh.	123	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
24.	Ali Sastroamidjojo, Mr.	38	P. N. I. Djawa Timur	24-3-1956	Non-aktif sedjak tgl. 24-3-1956; Mengundurkan diri tgl. 20-6-1957.
25.	A m b i o, Dr.	124	P. N. I. Djawa Timur	24-3-1956	
26.	Amir Anwar	204	P. K. I. Djawa Barat	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 28-11-1956.
27.	Amung Amran	202	P. N. I. Djawa Barat	24-3-1956	
28.	Andi Sewang Daeng Muntu, H.	137	Masjumi Sulawesi Tenggara/ Selatan	24-3-1956	
29.	Anuarbek	170	Masjumi Nusa Tenggara Barat	24-3-1956	
30.	Anwar Harjono	8	Masjumi Djawa Timur	24-3-1956	
31.	Anwar Musaddad, H.	227	N. U. Djawa Tengah	24-3-1956	
32.	Anwar Tjokroaminoto, H.	75	P. S. I. I. Sumatera Selatan	24-3-1956	
33.	Anwar Zain, Moh.	236	Masjumi Djawa Timur	24-3-1956	
34.	Ardiwinangun, M.	179	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
35.	Ardiwinata, Daeng Moh.	241	IP-KI Djawa Barat	24-3-1956	
36.	Arudji Kartawinata	57	P. S. I. I. Djawa Barat	24-3-1956	Terpilih sbg. Wakil Ketua II D.P.R.
37.	Asmah Sjachrunie, Nj.	239	N. U. Kalimantan Selatan	24-3-1956	

No. urut	N a m a	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan djandji	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ² .
38.	A s m u n i	183	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
39.	Asraroeidin	87	P. Buruh Djawa Tengah	24-3-1956	
40.	Assegaff, Hussein Saleh	139	N. U. Sulawesi Tenggara/ Selatan	24-3-1956	
41.	Astrapradja, R. Emong Wiratma	177	P. R. D. Djawa Barat	24-3-1956	
42.	Atmodarminto	216	Grinda Djawa Tengah	24-3-1956	
43.	Bachtaroeddin	30	P. K. I. Sumatera Tengah	24-3-1956	Meninggal dunia di Djakarta tgl. 24-6-1956.
44.	Bafadhal, M. O.	162	Masjumi Sumatera Tengah	24-3-1956	
45.	Balja Umar, Hadji Achmad	234	Masjumi Djawa Tengah	24-3-1956	
46.	Basah R. Moh	198	P3 R. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
47.	Bili, S. D.	99	P. N. I. Nusa Tenggara Timur	24-3-1956	
48.	Boerhanoedin, Mr.	9	N. U. Djawa Barat	24-3-1956	Non-aktif sedjak tgl. 24-3-1956 ; Mengundurkan diri tgl. 30-3-1956.
49.	Boerhanoedin Harahap, Mr.	52	Masjumi Djawa Tengah	24-3-1956	
50.	C a l e y, M.	98	Parkindo Nusa Tenggara Timur	24-3-1956	
51.	Chamid Widjaja, A.	21	N. U. Nusa Tenggara Barat	24-3-1956	
52.	Dachlan, K. H. Moh.	53	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
53.	Dalijono, Mr. Moh.	233	Masjumi Djawa Tengah	24-3-1956	
54.	Darsono, Rd.	176	P. N. I. Djawa Barat	24-3-1956	
55.	Daud Badaruddin	247	Masjumi Sumatera Selatan	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 15-6-1956.

No. urut	N a m a	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan djangji	Sumpah/ 24-3-1956	Keterangan lain ² .
56.	Djadi Wirosubroto	223	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
57.	Djadil Abdullah	158	Masjumi Sumatera Selatan	24-3-1956	
58.	Djadja Wiriasumita	109	N. U. Djawa Barat	24-3-1956	
59.	Djaja Rachmat, R.T.	193	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
60.	Djalaluddin, Dr. Sjech Hadji	163	P. P. T. I. Sumatera Tengah	24-3-1956	
61.	Djerman Prawira Winata, R.	180	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
62.	Djody Gondokusumo, Mr.	64.	P. R. N. Djawa Barat	24-3-1956	
63.	Djoenaidi Abdoel Azis, K.H. Mochd.	56.	N. U. Djakarta Raya	24-3-1956	Meninggal dunia tgl. 28-10-1958 di Djakarta.
64.	Djokosoedjono	34	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
65.	Djumhur Hakim	175	P. N. I. Nusa Tenggara Barat	24-3-1956	
66.	Djunah Pardjaman, Nj.	192	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
67.	Doedi Soemawidjaja	185	P. N. I. Djawa Barat	24-3-1956	
68.	Fadil Dasuki, Muh.	190	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
69.	Fakih Usman, K. H.	67	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
70.	Fatah Jasin, H.	134	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	Non-aktif sedjak tgl. 24-3-1956. Mengundurkan diri tgl. 11-4-1956.
71.	Gatot Mangkupradja, R.	186	Gerakan Pem- bela Pantjasila Djawa Barat	24-3-1956	
72.	Hadikusumo, S.	2	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
73.	Hadisoenarto, R. S.	220	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 22-7-1956.
74.	H a g e, D.	268	—	5-12-1956	Diangkat sbg. Wakil Golongan Ketjil Eropah.

No. urut	N a m a	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan djandji	Sumpah/ 24-3-1956	Keterangan lain ² .
75.	Hamid Algadrie, Mr.	18	P. S. I. Nusa Tenggara Barat	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 4-6-1957.
76.	Hanafiah, Moh.	238	N. U. Kalimantan Selatan	31-3-1956	
77.	Handokowidjojo, I. S.	128	P. N. I. Djawa Timur	24-3-1956	
78.	Hardi, Mr.	80	P. N. I. Djakarta Raya	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 1-9-1958.
79.	Hariadi Jadipranoto, R. Ng.	219	P. R. N. Djawa Tengah	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 2-5-1958.
80.	Harsono Tjokroaminoto	121	P. S. I. I. Sulawesi Tenggara/ Selatan	24-3-1956	
81.	Hartojo Prawirosudarmo	93	tjalon P. K. I. Djawa Barat	24-3-1956	
82.	Hasan Basri, H.	3	Masjumi Kalimantan Selatan	24-3-1956	
83.	Hulman Lumban Tobing, Dr. N.	12	P. N. I. Sumatera Utara	24-3-1956	
84.	Hutomo Supardan	92	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
85.	Ibnu Parna	208	P. Acoma Djawa Barat	24-3-1956	
86.	Idham Chalid, H.	37	N. U. Djawa Barat	24-3-1956	Non-aktif sedjak tgl. 24-3-1956. Mengundurkan diri tgl. 28-3-1956.
87.	Ido Garnida, R.	182	P. R. I. M. Djawa Barat	24-3-1956	
88.	Iljas, K.H. Moh.	235	N. U. Djawa Tengah	24-3-1956	Non-aktif sedjak tgl. 24-3-1956. Mengundurkan diri tgl. 11-4-1956.
89.	Imam Soetardjo	81	P. Buruh Djawa Timur	24-3-1956	
90.	Imban, Z.	246	P. S. I. I. Sulawesi Utara/ Tengah	24-3-1956	
91.	Imron Rosjadi, Mr.	253	N. U. Djawa Barat	11-4-1956	
92.	Isa, Dr. Moh.	155	P. N. I. Sumatera Selatan	24-3-1956	

No. urut	N a m a	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan	Sumpah/ djangji	Keterangan lain ² .
93.	Isa Anshary, Muh.	200	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
94.	Ismail Napu	5	Masjumi Sulawesi Utara/ Tengah	24-3-1956	
95.	Ismangoen Poedjo- widagdhø	19	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
96.	Isnaeni, Mh.	254	P. N. I. Djawa Timur	13-4-1956	
97.	Jahja Siregar	248	Masjumi Sumatera Utara	24-3-1956	
98.	Jusuf Adjitorop	149	P. K. I. Sumatera Utara	24-3-1956	
99.	Jusuf Wibisono, Mr.	91	Masjumi Djawa Timur	24-3-1956	Non-aktif sedjak tgl. 24-3-1956. Mengundurkan diri tgl. 5-6-1956.
100.	Kape, L.	171	P. Katolik Nusa Tenggara Timur	24-3-1956	
101.	Karubuy, A. B.	260	— Irian Barat	24-8-1956	Diangkut sbg. Wakil Irian Barat.
102.	Kasimo, I. J.	25	P. Katolik Djawa Timur	24-3-1956	
103.	Kasman Singodimedjo, Mr. R. H.	59	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
104.	Katamsi Sutisna Sendjaja	206	IP-KI Djawa Barat	24-3-1956	
105.	Kiagus Alwi	169	Masjumi Nusa Tenggara Barat	24-3-1956	
106.	Koesnan, Rh.	13	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
107.	Koot, J. R.	270	—	18-12-1956	Diangkat sbg. Wakil Golongan Ketjil Eropah.
108.	Lastari Soetrasno, Nj.	44	P. N. I. Djawa Timur	24-3-1956	
109.	Leimena, Dr. J.	65	Parkindo Maluku	24-3-1956	
110.	Lie Po Yoe	271	—	18-12-1956	Diangkut sbg. Wakil Golongan Ketjil Tionghoa.
111.	Lucas Kustarjo, R.	242	IP-KI Djawa Barat	24-3-1956	

No. urut	N a m a	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan djandji	Sumpah/ 24-3-1956	Keterangan lain ² .
112.	Lukman, M. H.	48	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
113.	Mahmudah Mawardi, Nj.	85	N. U. Djawa Tengah	24-3-1956	
114.	Manai Sophiaan	27	P. N. I. Sulawesi Tenggara/ Selatan	24-3-1956	
115.	Mangunsarkoro, S.	33	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	Meninggal dunia di Djakarta tgl. 8-6-1957.
116.	Maniudin Brodjotrano	105	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
117.	Mansjur, E. Moh.	203	P. N. I. Djawa Barat	24-3-1956	
118.	Mansur Daud Datuk Palimo Kajo, H.	160	Masjumi Sumatera Tengah	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 26-11-1956.
119.	Manuaba, I.B.P.	41	P. N. I. Nusa Tenggara Barat	24-3-1956	
120.	Mariam Kanta Sumpena, Njaju H.	195	N. U. Djawa Tengah	24-3-1956	
121.	Ma'rifat Mardjani	159	P e r t i Sumatera Tengah	24-3-1956	
122.	Marijamah Djoenaidie, Nj. S.	207	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
123.	Masjhur Azhari, K.H.	154	Masjumi Sumatera Selatan	24-3-1956	
124.	Masjhur Rifai, H.	97	Masjumi Kalimantan Barat	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 9-11-1957.
125.	Masjhur, K.H.	50	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
126.	Matakupan, Drs. D.S.	89	P. Katolik Nusa Tenggara Timur	24-3-1956	
127.	Mawardi Noor	150	Masjumi Sumatera Utara	24-3-1956	
128.	Memet Tanumidjaja, Mr.	201	P3 R. I. Djawa Timur	24-3-1956	
129.	Misbach, K.H.	110	Masjumi Djawa Timur	24-3-1956	
130.	Moedawari, H.	111	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
131.	Moedikdio, Nj.	26	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	

No. urut	N a m a	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ² .
132.	Moeis, G. A.	60	Masjumi Kalimantan Selatan	24-3-1956	
133.	Moeljadi Notowardojo	126	P. N. I. Djawa Timur	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 1-12-1956.
134.	Moenadir	103	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
135.	Moeslich, H. S.	214	N. U. Djawa Tengah	24-3-1956	
136.	Moesta'in, K. H.	132	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
137.	Mooy, Chr. J.	174	Parkindo Nusa Tenggara Timur	24-3-1956	
138.	Munir Abisudjak, H.	83	N. U. Djawa Tengah	24-3-1956	
139.	Mursid Idris	96	P. N. I. Kalimantan Barat	24-3-1956	
140.	Murtadji Bisri	104	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
141.	Muslich, K. H.	225	N. U. Djawa Tengah	24-3-1956	
142.	Muttaqien, E. Z.	188	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
143.	Natsir, Moh.	90	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
144.	Njak Diwan	153	Perti Sumatera Utara	27-3-1956	
145.	N j o n o	252	P. K. I. Djawa Tengah	31-3-1956	
146.	N j o t o	42	P. K. I. Djawa Timur	24-3-1956	
147.	Noor, Moh.	142	Masjumi Sulawesi Tenggara/ Selatan	24-3-1956	
148.	Noor Abdulgani, Moh.	133	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
149.	Notosukardjo	232	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
150.	Nungtijk A. R.	157	P. K. I. Sumatera Selatan	24-3-1956	
151.	Nunung Kusnadi, A.	194	P. S. I. I. Djawa Barat	24-3-1956	

No. urut	N a m a	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan	Sumpah/ djangji	Keterangan lain ² .
152.	Nur El Ibrahimy, Moh.	82	Masjumi Sumatera Utara	27-3-1956	
153.	Oei Tjeng Hien	263	—	5-12-1956	Diangkat sbg. Wakil Golongan Ketjil Tionghoa.
154.	Osa Maliki	178	P. N. I. Djawa Barat	24-3-1956	
155.	Padang, Muh.	258	— Irian Barat	9-8-1956	Diangkat sbg. Wakil Irian Barat.
156.	Palaunsoeka, F. C.	6	Persatuan Daya Kalimantan Barat	24-3-1956	
157.	Pandee Kartawigoena	205	Murba Djawa Barat	24-3-1956	
158.	Partoadiwidjojo	230	P. S. I. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
159.	Peris Pardede	22	P. K. I. Djawa Barat	24-3-1956	
160.	Pirry, Drs. J.	167	P. K. I. Djawa Timur	24-3-1956	
161.	Poeger, R.	129	P. N. I. Djawa Timur	24-3-1956	
162.	Prawoto Mangkusasmito	36	Masjumi Djawa Tengah	24-3-1956	
163.	Princen, Hadji J.C.	265	—	5-12-1956	Diangkat sbg. Wakil Golongan Ketjil Eropah.
164.	du Puy, R. Ch. M.	266	—	5-12-1956	Diangkat sbg. Wakil Gol. Ketjil Eropah.
165.	Rahmah El Junusiah, Nj.	164	Msjumi Sumatera Tengah	27-3-1956	
166.	Rambitan, B. J.	10	P. N. I. Sulawesi Utara Tengah	24-3-1956	
167.	Rasjid Sutan Radja Emas	32	P. N. I. Djawa Timur	24-3-1956	
168.	Rhemrev, Drs. J.L.W.R.	269	—	5-12-1956	Diangkat sbg. Wakil Golongan Ketjil Eropah.
169.	Ridwan Sjachrani	240	N. U. Kalimantan Selatan	24-3-1956	
170.	Roem, Mr. Moh.	70	Masjumi Djawa Timur	24-3-1956	Non-aktif sedjak tgl. 24-3-1956. Mengundurkan diri tgl. 1-6-1956.

No. urut	N a m a	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan djandji	Sumpah/ 24-3-1956	Keterangan lain ² .
171.	Roestamadji, Dr. R.	210	P. R. I. Djawa Tengah	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 31-12-1956.
172.	de Rozari, A. Bl.	165	P. Katholik Nusa Tenggara Timur	24-3-1956	Non-aktif sedjak tgl. 26-3-1956. Mengundurkan diri tgl. 20-4-1956.
173.	Runturambi	54	(tjalon) P. K. I. Djawa Timur	24-3-1956	
174.	Rusli Abdul Wahid, H.	16	P e r t i Sumatera Tengah	24-3-1956	Non-aktif sedjak tgl. 26-3-1956. Mengundurkan diri tgl. 1-17-1956.
175.	Saalah Jusuf Sutan Mangkuto	161	Masjumi Sumatera Tengah	24-3-1956	
176.	Sjafi'ie, H.	136	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 5-8-1958.
177.	Sahar gelar Soetan Besar	152	Masjumi Sumatera Utara	24-3-1956	
178.	Sahlan Ridwan, H.	224	N. U. Djawa Tengah	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 8-2-1958.
179.	Saifuddin, K. H. Muh.	140	N. U. Sulawesi Tenggara/ Selatan	24-3-1956	
180.	Saifuddin Zuhri	31	N. U. Djawa Tengah	24-3-1956	
181.	Sakirman, Ir.	43	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 5-12-1956.
182.	Salawati, Nj. Ch.	141	P. K. I. Djakarta Raya	24-3-1956	
183.	Saleh Soerjaningprodjo, R. Moh.	113	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
184.	Saleh Umar, M.	61	P. N. I. Sumatera Utara	3-4-1956	
185.	Sarino Mangunpranoto	221	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	Non-aktif sedjak tgl. 26-3-1956. Mengundurkan diri tgl. 15-4-1956.
186.	Sartono, Mr.	1	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	Terpilih sbg. Ketua DPR.
187.	Sastra	191	P. S. I. Djawa Barat	24-3-1956	

No. . urut	Nama	No. Wakil dari/ Angg. Daerah-pemilihan djandji	Sumpah/ 24-3-1956	Keterangan lain ² .
188.	Selamat Ginting	148 P. N. I.	24-3-1956	
		Sumatera Utara		
189.	Semanhadi Sastrowi- djojo	116 P. N. I.	24-3-1956	
		Djawa Timur		
190.	Senduk, H.	143 Parkindo	24-3-1956	
		Sulawesi Tenggara/ Selatan		
191.	Siauw Giok Tjhan	24 Baperki	24-3-1956	
		Djawa Tengah		
192.	Sidik Kertapati	58 P. K. I.	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 2-1-1958.
		Djawa Barat		
193.	Silas Papare	—	9-8-1956	Diangkat sbg. Wakil Irian Barat.
		Irian Barat		
194.	Singgih Tirtosudiro	39 P. K. I.	24-3-1956	
		Djawa Tengah		
195.	Siradjuddin Abbas, H.	14 Perti	24-3-1956	
		Sumatera Tengah		
196.	Siregar, M.	151 Parkindo	24-3-1956	
		Sumatera Utara		
197.	Siswoio	211 P. K. I.	24-3-1956	
		Djawa Tengah		
198.	Sjahboeddin Latif	20 P. S. I. I.	24-3-1956	
		Sulawesi Utara Tengah		
199.	Sjarif Usman	78 Masjumi	24-3-1956	
		Djakarta Raya		
200.	Soeatmadji, Dr. R.	119 P. N. I.	24-3-1956	
		Djawa Timur		
201.	Soebadio Sastrosatomo	244 P. S. I.	24-3-1956	
		Djawa Timur		
202.	Soebagio Relksodipoero. Mr	45 P. N. I.	24-3-1956	
		Djawa Barat		
203.	Soedarsono	79 P. N. I.	24-3-1956	
		Djawa Tengah		
204.	Soediman	209 P. N. I.	24-3-1956	Meninggal dunia di Djakarta tgl. 28-9- 1957.
		Djawa Tengah		
205.	Soedjono	71 (tjalon) P. K. I.	24-3-1956	
		Djawa Timur		
206.	Soedjono Prawiro- soedarso, R.	135 R. Soedjono		Mengundurkan diri tgl. 16 5-1957.
		Prawirosoedarso dkk. Djawa Timur		
207.	Soedrasman	245 P. N. I.	24-3-1956	
		Djawa Tengah		

No. urut	N a m a	No. Wakil dari/ Angg. Daerah-pemilihan djandji	Sumpah/ 24-3-1956	Keterangan lain ²
208.	Soejoedi, Mr.	228 P. N. I.	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 31-8-1956
		Djawa Tengah		
209.	Soekamsi Djojadi- prodjo	222 P. N. I.	24-3-1956	
		Djawa Tengah		
210.	Soelaeman Widjojo- soebroto	197 N. U.	24-3-1956	
		Djawa Barat		
211.	Soemardi Jatmo- soemarto	255 P. N. I .	16-4-1956	
		Djawa Tengah		
212.	Soemari, Nj.	218 P. N. I.	24-3-1956	
		Djawa Tengah		
213.	Soemitro Kolopaking, R. A. A.	251 IP-KI	24-3-1956	
		Djawa Tengah		
214.	Soenardjo, Prof. Drs.	250 N. U.	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 1-10-1958
		Djawa Tengah		
215.	Soepardi	118 (tjalon) P. K. I.	24-3-1956	
		Djawa Timur		
216.	Soepeni Poedjoboentoro. Nj.	68 P. N. I.	24-3-1956	
		Djawa Timur		
217.	Soeprapto, R.	117 Masjumi	24-3-1956	
		Djawa Timur		
218.	Soeprapto, Mr. soeseno	101 (tjalon) P. K. I.	24-3-1956	
		Djawa Timur		
219.	Soeroso Pringgosoese- soesanto	187 P. N. I.	24-3-1956	
		Djawa Barat		
220.	Soesilo Prawiro- soesanto	221 P. N. I.	24-3-1956	
		Djawa Tengah		
221.	Soetarto Hadiso- diby, R.H.	23 P. Katholik	24-3-1956	
		Nusa Tenggara Timur		
222.	Soetojo Mertodi- moeljo	95 P. N. I.	24-3-1956	
		Djawa Timur		
223.	Soetoko Djojoso- ebroto	226 P. N. I.	24-3-1956	
		Djawa Tengah		
224.	Soetomo alias Bung Tomo	94 P. R. I.	24-3-1956	
		Djawa Timur		
225.	Soewono	120 P. N. I.	24-3-1956	
		Djawa Timur		
226.	Soleman, Moh.	145 Masjumi	24-3-1956	
		Maluku		
227.	Sondakh, M.	146 Parkindo	24-3-1956	
		Sulawesi Utara/ Tengah		
228.	Subamia, I G. G.	168 P. N. I.	24-3-1956	
		Nusa Tenggara Barat		

No. urut	N a m a	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan djangji	Sumpah/ 24-3-1956	Keterangan lain ²
229.	Sudisman	77	P. K. I. Djawa Timur	24-3-1956	
230.	Sudjito	108	P. K. I. Djawa Timur	24-3-1956	
231.	Sudjojono, S.	213	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 25-9-1958.
232.	Sudjono Hardjosudiro Mr.	72	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
233.	'Sudojo	115	P. K. I. Djawa Timur	24-3-1956	
234.	Sugitha, I Made	166	P. S. I. Nusa Tenggara Barat	27-3-1956	
235.	Suhaimi Rachman	28	P. K. I. Djawa Barat	24-3-1956	
236.	Suhardjo	100	P. S. I. I. Djawa Barat	24-3-1956	
237.	Suharti Suwarto, Nj.	51	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
238.	Sukatno	40	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
239.	Sukiman Wirjo- sandjojo Dr. H.	35	Masjumi Djawa Tengah	24-3-1956	
240.	Sumarto, H. J.	229	P. Katholik Djawa Tengah	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 5-4-1956.
241.	Sunarjo Mangun- puspito, Nj.	217	Masjumi Djawa Tengah	24-3-1956	
242.	Sundari Abdul- rachman, Nj.	212	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
243.	Supeno Hadisiswojo	49	P. K. I. Djawa Timur	24-3-1956	
244.	Sutijah Surya Hadi, Nj.	215	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
245.	Suzanna Hamdani, Nj.	257	P. S. I. Djawa Barat	29-6-1956	
246.	Tambing, W. L.	147	Parkindo Sulawesi Tenggara/ Selatan	24-3-1956	
247.	Tambunan, Mr. Dr. A.M.	66	Parkindo Sumatera Utara	24-3-1956	
248.	Tan Eng Hong	264	—	5-12-1956	Diangkas sbg. Wakil Golongan Ketjil Tionghoa.

No. urut	N a m a	No.	Wakil dari/ Angg. Daerah-pemilihan djandji	Sumpah/ 24-3-1956	Keterangan lain ²
249.	Tan Kiem Liong	262	—	5-12-1956	Diangkas sbg. Wakil Golongan Ketjil Tionghoa.
250.	Thaher, S. M.	196	P. N. I. Djawa Barat	24-3-1956	
251.	Thaher Thajeb, Ir.	47	P. K. I. Sumatera Utara	24-3-1956	
252.	Thajib Abdullah, Moh.	173	Masjumi Nusa Tenggara Timur	24-3-1956	
253.	Tjikwan, K. H.	4	Masjumi Sumatera Selatan	24-3-1956	
254.	Tjoo Tik Tjoen	107	P. K. I. Djawa Timur	24-3-1956	
255.	Tjugito	237	P. K. I. Djawa Timur	24-3-1956	
256.	Tjung Tin Jan, Mr.	261	—	12-12-1956	Diangkat sbg. Wakil Golongan Ketjil Tionghoa.
257.	Udin Sjamsudin	7	Masjumi Sumatera Utara	24-3-1956	
258.	Umi Sardjono, Nj.	86	(tjalon) P.K.I. Djawa Timur	24-3-1956	
259.	Utarjo, S.	62	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 27-4-1957.
260.	Uwes Abubakar	184	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
261.	Wahib, K.H. Moh.	102	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
262.	W a s i s	125	P. N. I. Djawa Timur	24-3-1956	
263.	Wens, E. F.	267	—	5-12-1956	Diangkat sbg. Wakil Golongan Ketjil Eropah.
264.	Werdojo, K.	76	Permai Djawa Timur	24-3-1956	
265.	Wilopo, Mr.	63	P. N. I. Djawa Barat	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 1-12-1956.
266.	Wongsonegoro, Mr.	74	PIR-Wongso Djawa Tengah	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 1-1-1957.
267.	Yamin, Prof. Mr. H. Muh.	29	Gerakan Pem- bela Pantjasila Djawa Barat	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 1-7-1958

No. urut	N a m a	No. Wakil dari/ Angg. Daerah-pemilihan djandji	Sumpah/ 24-3-1956	Keterangan lain ² .
268.	Yunan Nasution, Moh.	46 Masjumi Djakarta Raya	24-3-1956	
269.	Zainal Abidin Ahmad, H.	11 Masjumi Sumatera Tengah	24-3-1956	Terpilih sbg. Wakil Ketua III D.P.R.
270.	Zainal Arifin Tanamas	122 N. U. Djawa Tengah	24-3-1956	
271.	Zainal Arifin, H.	17 N. U. Sumatera Utara	24-3-1956	Terpilih sbg. Wakil Ketua I D.P.R.
272.	Ang Tjiang Liat	272 —	26-2-1957	Diangkat sbg. Wakil Golongan Ketjil Tionghoa.

E. DAFTAR CHUSUS ANGGOTA-PENGGANTI
D.P.R. — HASIL PEMILIHAN UMUM
26 Maret 1956 — 22 Djuli 1959

No. urut	N a m a	No. Wakil dari/ Angg. Daerah-pemilihan djandji	Sumpah/ Sumpah/	Keterangan lain ² .
T A H U N 1956 :				
1.	Ajip Muchamad Dzukhri	37 N. U. Djawa Barat	20-4-1956	Pengganti H. Idham Chalid.
2.	Mohamad Amin Iskandar	9 N. U. Djawa Barat	21-4-1956	Pengganti Mr. Boerhanoed'n.
3.	R. G. Doeriat	229 P. Katholik Djawa Tengah	14-6-1956	Pengganti H. J. Sumarto.
4.	Sutjipto	221 P. N. I. Djawa Tengah	20-6-1956	Pengganti Sarino Mangun- pranoto.
5.	R. Noerjahman	235 N. U. Djawa Tengah	20-6-1956	Pengganti K. H. Moh. Iljas. — Mengundurkan diri tgl. 7-7-1958.
6.	A. Basjid	247 Masjumi Sumatera Selatan	29-6-1956	Pengganti Daud Badarudin.
7.	Muhammad Sardjan	70 Masjumi Djawa Timur	29-6-1956	Pengganti Mr. Moh. Roem.
8.	Nj. Hafni Zahra Abu Hanifah	91 Masjumi Djawa Timur	13-7-1956	Pengganti Mr. Jusuf Wibisono. — Mengundurkan diri tgl. 1-7-1958.
9.	Nj. Hadinijah Hadi	134 N. U. Djawa Timur	13-7-1956	Pengganti H. Fatah Jasin.
10.	V. B. S a k a	165 P. Katholik Nusa Tenggara Timur	17-7-1956	Pengganti A. Bl. de Rozari.
11.	Anwar Kadir	30 P. K. I. Sumatera Tengah	3-8-1956	Pengganti Bachtaroeddin, almarhum.
12.	Pamudji	220 P. N. I. Djawa Tengah	7-8-1956	Pengganti R. S. Hadisoenarto. — Mengundurkan diri tgl. 5-2-1958.
13.	T. S. Mardjohan	16 Perti Sumatera Tengah	10-10-1956	Pengganti H. Rusli Abdul Wahid.
14.	Rs. Wirjosepoetro	228 P. N. I. Djawa Tengah	23-10-1956	Pengganti Mr. Soejoedi.

No. urut	N a m a	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan	Sumpah/ djangji	Keterangan lain ² .
15.	R. Atmadi Wreksoatmodjo	210	P. R. I. Djawa Tengah	28-1-1957	Pengganti Dr. R. Ruestamadji.
16.	R. P. R. Situmeang	204	P. K. I. Djawa Barat	28-1-1957	Penggnati Amir Anwar.
17.	O. Suriapranata	63	P. N. I. Djawa Barat	28-1-1957	Pengganti Mr. Wilopo.
18.	Tj. Oey Hay Djoen	43	P. K. I. Djawa Tengah	28-1-1957	Pengganti Ir. Sakirman.
19.	Abdullah Mutlik	126	P. N. I. Djawa Timur	30-1-1957	Pengganti Moeljadi Notowardojo.
20.	B. P. H. Poeroebojo	74	PIR-Wongso Djawa Tengah	18-2-1957	Pengganti Mr. Wongsonegoro.
21.	Sudjarwo Haryowisastro	62	P. K. I. Djawa Tengah	23-5-1957	Pengganti S. Utarjo.
22.	Mr. Gele Harun	156	P. N. I. Sumatera Selatan	25-6-1957	Pengganti Abdulrozak.
23.	R. Soehardjo alias Bedjo	135	R. Soedjono Prawirosoedarso dkk. Djawa Timur	25-6-1957	Pengganti R. Soedjono Prawirosoedarso.
24.	Wijono Soerjokoesoemo	18	P. S. I. Nusa Tenggara Barat	16-7-1957	Pengganti Mr. Hamid Algadrie.
25.	Asmadi Tirtooetomo	38	P.N.I. Djawa Timur	12-8-1957	Pengganti Mr. Ali Sastroamidjojo
26.	S. Martosoewito	33	P. N. I. Djawa Tengah	13-8-1957	Pengganti S. Mangunsarkoro
27.	Soelardi	209	P. N. I. Djawa Tengah	19-11-1957	Pengganti Soediman
28.	Ja'cob Mahmud	97	Maspimi Kalimantan Barat	6-12-1957	Pengganti H. Massjkur Rifai

T A H U N 1958 :

29.	Eddie Abdarrachman Martalogawa	58	P. K. I. Djawa Barat	24-1-1958	Pengganti Sidik. Kertapati.
30.	S. Danoesoegito	220	P. N. I. Djawa Tengah	28-2-1958	Pengganti Pamudji.
31.	Josotaruno Ichsan Noer	224	N. U. Djawa Tengah	5-5-1958	Pengganti H. Sahlan Ridwan
32.	R. W. Probosuprodjo	219	P. R. N. Djawa Tengah	12-6-1958	Pengganti R. Ng. Hariadi Jadi-pranoto.
33.	H. Zain Alhabsji	235	N. U. Djawa Tengah	4-8-1958	Pengganti R. Noer-jahman.

No. urut	N a m a	No. Wakil dari/ Angg. Daerah-pemilihan djandji	Sumpah/ 15-9-1958	Keterangan lain ² .
34.	Umar Salim Hubeis	91 Masjumi Djawa Timur	15-9-1958	Pengganti Nj. Hafni Zahra Abu Hanifah.
35.	Winoto Danuasmoro	29 Gerakan Pem- bela Pantjasila Djawa Barat	15-9-1958	Pengganti Prof. Mr. H. Muh. Yamin
36.	Husein Kartasasmita	80 P. N. I. Djakarta Raya	15-9-1958	Pengganti Mr. H a r d i.
37.	M. Soentoro	136 N. U. Djawa Timur	20-10-1958	Pengganti H. Sjafi'ie.
38.	Abdoel Djalil	250 N. U. Djawa Tengah	19-11-1958	Pengganti Prof. Drs. Soenardjo.
39.	Usman Mufti Widjaja	55 (tjalon) P.K.I. Djawa Tengah	19-12-1958	Pengganti Abul- hajat almarhum.
40.	K a s i m	213 P. K. I. Djawa Tengah	19-12-1958	Pengganti S. Sudjojono.

T A H U N 1956 :

41.	H. A. Mursjidi	56 N. U. Djakarta Raya	26-3-1959	Pengganti K.H. Djoenaidi Abdoel Aziz alm.
42.	Oemar Amin Husin	160 Masjumi Sumatera Tengah	25-5-1959	Pengganti H. Mansur Daud Datuk Palimo Kajo.

I C H T I S A R

DJUMLAH ANGGOTA D.P.R. — HASIL PEMILIHAN UMUM

I.	Hasil Pemilihan Umum	257	(terpilih)
II.	Wakil ² Irian Barat	3)	(diang-
III.	Wakil ² Golongan Ketjil Eröpah	6)	kat oleh
IV.	Wakil ² Golongan Ketjil Tionghoa	6)	Peme- rintah).

Djumlah : 272

**F. DAFTAR ANGGOTA D.P.R. - DALAM RANGKA
UNDANG - UNDANG DASAR 1945**

23 Djuli 1959 — 24 Djuni 1960

(Berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959
(LN No. 76 — TLN No. 1815) jo. Penetapan Presiden No. 3
tahun 1960 (LN No. 24 — TLN No. 1954).

No. Urut	N a m a	No. Fraksi dalam Angg. D.P.R.	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ²
1.	Aboellah Afandi, R.	127 N. U.	28 7-1959	
2.	Abdul Aziz Dijar	106 N. U.	23-7-1959	
3.	Abdul Djalil	250 N. U.	23-7-1959	
4.	Abdul Hakim	88 Masjumi	23-7-1959	
5.	Abdul Rasjid Faqih	138 Masjumi	23-7-1959	
6.	Abdul Wachid Soejoso	109 Masjumi	23-7-1959	
7.	Abdullah Gathmyr	69 N. U.	12-8-1959	
8.	Abdullah Mutlik	126 P. N. I.	23-7-1959	
9.	Abdulmutalib Daeng Talu	172 P.I.R-Hazairin	1-8-1959	
10.	Abdulwahab Chasbullah, K.H.	73 N. U.	23-7-1959	
11.	Achmad Ghozali, K.	130 N. U.	14-8-1959	
12.	Achmad Siddiq, K.	131 N. U.	23-7-1959	
13.	Achmad Sjaichu	114 N. U.	23-7-1959	
14.	Achsien, H.A.A.	199 N. U.	23-7-1959	
15.	Adam Malik	84 Nasional Progresif (Murba)	23-7-1959	Mengundurkan diri tgl. 1-12-1959.
16.	Achmad, Muh.	181 P. N. I.	23-7-1959	
17.	Ahmad Dara Sjahrudin	243 Masjumi	23-7-1959	
18.	A i d i t, D.N.	256 P. K. I.	23-7-1959	
19.	Ajip Muchamad Dzukhri	37 N. U.	23-7-1959	
20.	A k i b. H. Moehd.	144 Masjumi	23-7-1959	
21.	Ali Akbar, Dr. H.	15 Masjumi	23-7-1959	
22.	Ali Pratamingkoesoemo, R.T.A. Moh.	123 N. U.	23-7-1959	
23.	A m b i o, Dr.	124 P. N. I.	23-7-1959	
24.	Amung Amran	202 P. N. I.	23-7-1959	
25.	Andi Sewang Daeng Muntu, H.	137 Masjumi	23-7-1959	
26.	Ang Tjiang Liat	272 Nasional Pro- gresif (Baperki)	23-7-1959	
27.	Anuarbek	170 Masjumi	23-7-1959	
28.	Anwar Harjono	8 Masjumi	23-7-1959	
29.	Anwar Kadir	30 P. K. I.	23-7-1959	

No. Urut	N a m a	No. Fraksi dalam Angg. D. P. R.	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ²
30.	Anwar Musaddad, H.	227 N. U.	23-7-1959	
31.	Anwar Tjokroaminoto, H.	75 P. S. I. I.	23-7-1959	
32.	Anwar Zain, Moh.	236 Masjumi	23-7-1959	
33.	Ardiwinangun, M.	179 Masjumi	23-7-1959	
34.	Ardiwinata, Daeng Moh.	241 IP-KI	7-8-1959	
35.	Arudji Kartawinata	57 P. S. I. I.	23-7-1959	Ditetapkan sbg. Wakil Ketua II.
36.	Asmadi Tirtooetomo	38 P. N. I.	23-7-1959	
37.	Asmah Sjachrunie, Nj.	239 N. U.	23-7-1959	
38.	A s m u n i	183 Masjumi	23-7-1959	
39.	Asraroeidin	87 Pendukung Pro-klamasi (P. Buruh)	23-7-1959	
40.	Assegaff, Hussein Saleh	139 N. U.	23-7-1959	
41.	Astrapradja, R. Emong Wiratma	177 Pendukung Pro-klamasi (P. R. D.)	23-7-1959	
42.	Atmadi Wreksoatmodjo, R.	210 —	1-8-1959	
43.	Atmodarminto	216 Nasional Pro-gresif (Grinda)	23-7-1959	
44.	Bafadhal, M.O.	162 Masjumi	23-7-1959	
45.	Balja Umar, Hadji Achmad	234 Masjumi	23-7-1959	
46.	Basah, R. Moh.	198 P3 R. I.	23-7-1959	
47.	Basjid, A.	247 Masjumi	23-7-1959	
48.	B i l i , S.D.	99 P. N. I.	23-7-1959	
49.	C a l e y , M.	93 Parkindo	23-7-1959	
50.	Chamid Widjaja, A.	21 N. U.	23-7-1959	
51.	Dachlan, K.H. Moh.	53 N. U.	7-8-1959	
52.	Dalijono, Mr. Moh.	233 Masjumi	28-7-1959	
53.	Danoesoegito, S.	220 P. N. I.	23-7-1959	
54.	Darsono, Rd.	176 P. N. I.	23-7-1959	
55.	Djadi Wirosubroto	223 P. K.I.	23-7-1959	
56.	Djadil Abdullah	158 Masjumi	23-7-1959	
57.	Djadja Wiriasumita	189 N. U.	23-7-1959	
58.	Djaja Rachmat, R.T.	193 Masjumi	23-7-1959	
59.	Djalaluddin, Dr. Sjech Hadji	163 P.P.T.I.	23-7-1959	
60.	Djerman Prawira Winata R.	180 Masjumi	12-8-1959	
61.	Djody Gondokusumo, Mr.	64 Nasional Pro-gresif (P. R. N.)	23-7-1959	
62.	Djokosoedjono	34 P. K. I.	23-7-1959	
63.	Djumbuh Hakim	175 P. N. I.	23-7-1959	
64.	Djunah Pardjaman, Nj.	192 Masjumi	23-7-1959	
65.	Doedi Soemawidjaja	185 P. N. I.	23-7-1959	
66.	Doeriat, R.G.	229 P. Katholik	23-7-1959	

No. Urut	N a m a	No. Fraksi dalam Angg. D. P. R.	Sumpah/ djangji	Keterangan lain ²
67.	Fadil Dasuki, Muh.	190 Masjumi	23-7-1959	
68.	Fakih Usman, K.H.	67 Masjumi	23-7-1959	
69.	Gatot Mangkupradja, R.	186 G. P. P.	23-7-1959	
70.	Gele Harun, Mr.	156 P. N. I.	23-7-1959	
71.	Hadikusumo, S.	2 P. N. I.	23-7-1959	
72.	Hadinijah Hadi, Nj.	134 N. U.	23-7-1959	
73.	H a g e, D.	268 —	23-7-1959	
74.	Hanafiah, Moh.	238 N. U.	10-8-1959	
75.	Handokowidjojo, I.S.	128 P. N. I.	23-7-1959	
76.	Harsono Tjokroaminoto	121 P. S. I. I.	23-7-1959	
77.	Hartojo Prawirosudarmo	93 Pembangunan	23-7-1959	
78.	Hasan Basri, H.	3 Masjumi	23-7-1959	
79.	Hulman Lumban Tobing Dr. Natiar	12 P. N. I.	23-7-1959	
80.	Husein Kartasasmita	80 P. N. I.	23-7-1969	
81.	Hutomo Supardan	92 P. K. I.	23-7-1959	
82.	Ibnu Parna	208 Nasional Pro- gresif (P. Acoma)	10-8-1959	
83.	Ido Garnida, R.	182 Pendukung Pro- klamasi (P.R.I.M.)	23-7-1959	
84.	Imam Soetardjo	81 Pendukung Pro- klamasi (P. Buruh)	23-7-1959	
85.	I m b a n, Z.	246 P. S. I. I.	23-7-1959	
86.	Imron Rosjadi, Mr.	253 N. U.	23-7-1959	
87.	I s a, Dr. Moh.	155 P. N. I.	23-7-1959	
88.	Isa Anshary, Muh.	200 Masjumi	23-7-1959	
89.	Iskandar, Moh. Amin	9 N. U.	23-7-1959	
90.	Ismail Napu	5 Masjumi	23-7-1959	
91.	Ismanggoen Poedjowi- dagdho	19 P. N. I.	23-7-1959	
92.	Isnaeni, Mh.	254 P. N. I.	23-7-1959	
93.	Ja'cob Mahmud	97 Masjumi	23-7-1959	
94.	Jahja Siregar	248 Masjumi	23-7-1959	
95.	Josotaruno Ichsan Noer	224 N. U.	23-7-1959	
96.	Jusuf Adjitorop	149 P. K.I.	28-7-1959	
97.	K a p e, L.	171 P. Katholok	23-7-1959	
98.	K a s i m	213 P. K. I.	23-7-1959	
99.	Karabuy, A.B.	260 Persatuan	23-7-1959	
100.	Kasimo, I.J.	25 P. Katholik	23-7-1959	
101.	Katamsi Sutisna Sendjaja	206 IP-KI	23-7-1959	
102.	Kiagus Alwi	169 Masjumi	23-7-1959	
103.	Koesnan, Rh.	13 P. N. I.	23-7-1959	
104.	K o o t. J.R.	270 Parkindo	23-7-1959	
105.	Lastari Soetrasno, Nj.	44 P. N. I.	23-7-1959	

No. Urut	N a m a	No. Fraksi dalam Angg. D. P. R.	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ²
106.	Lie Po Yoe	271 P. N. I.	23-7-1959	
107.	Lucas Kustarjo, R.	242 IP-KI	23-7-1959	
108.	Lukman, M.H.	48 P. K.I.	23-7-1959	
109.	Mahmudah Mawardi, Nj.	85 N. U.	23-7-1959	
110.	Manai Sophiaan	27 P. N. I.	23-7-1959	
111.	Maniudin Brodjotrano	105 N. U.	23-7-1959	
112.	Mansjur, E. Moh.	203 P. N. I.	23-7-1959	
113.	Manuaba, I.B.P.	41 P. N. I.	23-7-1959	
114.	Mardjohan. T.S.	16 Perti	23-7-1959	
115.	Mariam Kanta Supena, Njaju H.	195 N. U.	23-7-1959	
116.	Ma'rifat Mardjani	159 Perti	23-7-1959	
117.	Marijahmah Djoenaidie Nj. S.	207 N. U.	23-7-1959	
118.	Martalogawa. Eddie Abdurachman	58 P. K. I.	23-7-1959	
119.	Martosoewito, S.	33 P.N. I.	23-7-1959	
120.	Masjhur Azhari, K.H.	154 Masjumi	23-7-1959	
121.	Masjkur, K.H.	50 N. U.	23-7-1959	
122.	Matakupan, Drs. D. S.	89 P. Katholik	23-7-1959	
123.	Memet Tanumidjaja, Mr.	201 P3 R. I.	23-7-1959	
124.	Misbach. K.H.	110 Masjumi	23-7-1959	
125.	Moedawari, H.	111 N. U.	23-7-1959	
126.	Moedikdio. Nj.	26 P. K. I.	23-7-1959	
127.	Moeis, G.A.	60 Masjumi	23-7-1959	
128.	Moenadir	103 P. N. I.	23-7-1959	
129.	Moeslich, H.S.	214 N. U.	23-7-1959	
130.	Moes'ta'in, K.H.	132 N. U.	23-7-1959	
131.	Mooy, Chr. J.	174 Parkindo	23-7-1959	
132.	Munir Abisudjak, H.	83 N. U.	23-7-1959	
133.	Mursid Idris	96 P. N. I.	23-7-1959	
134.	Mursjidi, H.A.	56 N. U.	23-7-1959	
135.	Murtadji Bisri	104 N. U.	23-7-1959	
136.	Muslich. K.H.	225 N. U.	23-7-1959	
137.	Muttaqien, E.Z.	188 Masjumi	23-7-1959	
138.	Njak Diwan	153 Perti	23-7-1959	
139.	N j o n o	252 P. K. I.	23-7-1959	
140.	N j o t o	42 P. K. I.	23-7-1959	
141.	Noor Abdulgani, Moh.	133 N. U.	23-7-1959	
142.	No'osukardjo	232 P. N. I.	23-7-1959	
143.	Nunggtjik A.R.	157 P. K. I.	23-7-1959	
144.	Nunung Kusnadi, A.	194 P. S. I. I.	23-7-1959	
145.	Nur El Ibrahimy, Moh.	82 Masjumi	23-7-1959	
146.	Oei Tjeng Hien	263 Masjumi	23-7-1959	

No. Urut	N a m a	No. Fraksi dalam Angg. D. P. R.	Sumpah/djandji	Keterangan lain ²
147.	Oemar Amin Husin	160 Masjumi	23-7-1959	
148.	Tj. Oey Hay Djoen	43 P. K. I.	23-7-1959	
149.	Osa Maliki	178 P. N. I.	23-7-1959	
150.	P a d a n g, Muh.	258 Persatuan	23-7-1959	
151.	Palaunsoeka, F.C.	6 P. Katholik	23-7-1959	
		(Persatuan Daya)		
152.	Pandoe Kartawigoena	205 Nasional Pro-gresif (Murba)	23-7-1959	
153.	Partoadiwidjojo	230 P. S. I. I.	23-7-1959	
154.	Peris Pardede	22 P. K. I.	23-7-1959	
155.	P i r y. Drs. J.	167 P. K. I.	23-7-1959	
156.	P o e g e r, R.	129 P. N. I.	23-7-1959	
157.	Poeroebojo, B. P.H.	74 Nasional Pro-gresif (PIR- Wongso)	23-7-1959	
158.	Princen, Hadji J.C.	265 IP-KI	23-7-1959	
159.	Probosuprodjo, R.W.	219 Nasional Pro-gresif (P. R. N.)	23-7-1959	
160.	du Puy, R. Ch. M.	266 Masjumi	23-7-1959	
161.	Rambitan, B.J.	10 P. N. I.	23-7-1959	
162.	Iasjid Sutan Radja Emas	32 P. N. I.	23-7-1959	
163.	Rhemrev, Drs. J.L.W.R.	269 Masjumi	23-7-1959	
164.	Ridwan Sjachrani	240 N. U.	23-7-1959	
165.	Runturambi	54 Pembangunan	23-7-1959	
166.	Saalah Jusuf Sutan Mangkuto	161 Masjumi	23-7-1959	
167.	Sahar gelar Soetan Besar	152 Masjumi	23-7-1959	
168.	Saifuddin, K.H. Muh.	140 N. U.	23-7-1959	
169.	Saka, V.B.	165 P. Katholik	23-7-1959	
170.	Salawati, Nj. Ch.	141 P. K. I.	23-7-1959	
171.	Saleh Soerjaningprodjo, R. Moh.	113 N. U.	23-7-1959	Mengundurkan diri tgl. 12-10-1959.
172.	Saleh Umar, M.	61 P. N. I.	16-12-1959	
173.	Sardjan, Muhammad	70 Masjumi	23-7-1959	
174.	Sartono, Mr.	1 P. N. I.	23-7-1959	Ditetapkan sbg. Ketua D.P.R.
175.	S a s t r a	191 P. S. I.	23-7-1959	
176.	Selamat Ginting	148 P. N. I.	23-7-1959	
177.	Semanhadi Sastrowidjojo	116 P. N. I.	23-7-1959	
178.	Senduk, H.	143 Parkindo	1-8-1959	
179.	S'auw Giok Tjhan	24 Nasional Pro-gresif (Baperki)	23-7-1959	
180.	Silas Papare	259 Persatuan	23-7-1959	
181.	Singgih Tirtosudiro	39 P. K. I.	23-7-1959	
182.	Siradjuddin Abbas, H.	14 Perti	23-7-1959	
183.	Siregar, M.	151 Parkindo	23-7-1959	

No. Urut	N a m a	No. Fraksi dalam Angg. D. P. R.	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ²
184.	Siswojo	211 P. K. I.	23-7-1959	
185.	Situmeang, R.P.R.	204 P. K. I.	23-7-1959	
186.	Sjahboeddin Latif	20 P. S. I. I.	23-7-1959	
187.	Soeatmadji, Dr. R.	119 P. N. I.	23-7-1959	
188.	Soebadio Sastrosatomo	244 P. S. I.	23-7-1959	
189.	Soebagio Reksodipoero, Mr.	45 P. N. I.	23-7-1959	
190.	Soedarsono	79 P. N. I.	23-7-1959	
191.	Soedjono	71 Pembangunan	23-7-1959	Mengundurkan diri tgl. 11-8-1959.
192.	Soedrasman	245 P. N. I.	23-7-1959	
193.	Soehardjo alias Bedjo, R.	135 Nasional Pro- gresif (R. Soedjono Pra- wirosoedarso dkk.)	23-7-1959	
194.	Soekamsi Djojoadiprodjo	222 P. N. I.	23-7-1959	
195.	Soelaeman Widjojoes- broto	197 N. U.	28-7-1959	
196.	Soelardi	209 P. N. I.	23-7-1959	
197.	Soemardi Jatmosoemarto	255 P. N. I.	23-7-1959	
198.	Soemari, Nj.	218 P. N. I.	23-7-1959	
199.	Soemitro Kolopaking, R.A.A.	251 IP-KI	23-7-1959	
200.	Soepardi	118 Pembangunan	23-7-1959	
201.	Soepeni, Nj.	68 P. N. I.	23-7-1959	
202.	Soeprapto. R.	117 Masjumi	28-7-1959	
203.	Soeprapto, Mr.	101 Pembangunan	23-7-1959	
204.	Soeroso Pringgosoeseño	187 P. N. I.	7-8-1959	Meninggal dunia di Tjisarua tgl. 2-11- 1959.
205.	Soesilo Prawirosoesanto	231 P. N. I.	23-7-1959	
206.	Soetarto Hadisoedibyo, R.H.	23 P. Katholik	23-7-1959	
207.	Soetojo Mertodimoeljo	95 P.N.I.	23-7-1959	
208.	Soetoko Djojoesebroto	226 P. N. I.	23-7-1959	
209.	Soetomo alias Bung Tono	94 Pendukung Pro- klamasi (P. R. I.)	23-7-1959	
210.	Soewono	120 P. N. I.	14-8-1959	
211.	Soleman, Moh.	145 Masjumi	23-7-1959	
212.	Sondakh, M.	146 Parkindo	23-7-1959	
213.	Subamia, IG. G.	168 P. N. I.	23 7-1959	
214.	Sudisman	77 P. K. I.	23-7-1959	
215.	Sudjarwo Haryowisast- ro	62 P. K. I.	23-7-1959	
216.	S u d j i t o	108 P. K. I.	23-7-1959	

No. Urut	N a m a	No. Fraksi dalam Angg. D. P. R.	Sumpah/djandji	Keterangan lain ²
217.	Sudjono Hardjosudiro, Mr.	72 Masjumi	23-7-1959	
218.	S u d o j o	115 P. K. I.	23-7-1959	
219.	Sugitha, I Made	166 P. S. I.	23-7-1959	
220.	Suhaimi Rachman	28 P. K. I.	23-7-1959	
221.	Suhardjo	100 P. S. I. I.	23-7-1959	
222.	Suharti Suwanto, Nj.	51 P. K. I.	23-7-1959	
223.	S u k a t n o	40 P. K. I.	7-8-1959	
224.	Sukiman Wirjosandjo- jo, Dr. H.	35 Masjumi	28-7-1959	
225.	Sunarjo Mangunpuspito, Nj.	217 Masjumi	23-7-1959	
226.	Sundari Abdulrachman, Nj.	212 P. K. I.	23-7-1959	
227.	Supeno Hadisiswojo	49 P. K. I.	23-7-1959	
228.	Suriapranata, O.	63 P. N. I.	23-7-1959	
229.	Sutijah Surya Hadi, Nj.	215 P. N. I.	23-7-1959	
230.	Sutjipto	221 P. N. I.	23-7-1959	
231.	Suzanna Hamdani, Nj.	257 P. S. I.	23-7-1959	
232.	Saifuddin Zuhri	31 N. U.	23-7-1959	
233.	Tambing, W.L.	147 Parkindo	23-7-1959	
234.	Tambunan, Mr. Dr. A.M.	66 Parkindo	23-7-1959	
235.	Tan Kiem Liong	262 N. U.	23-7-1959	
236.	Thaher, S.M.	196 P. N. I.	23-7-1959	
237.	Thaher Thajeb, Ir.	47 P. K. I.	23-7-1959	
238.	Thajib Abdullah Moh.	173 Masjumi	23-7-1959	
239.	Tjikwan, K.H.	4 Masjumi	23-7-1959	
240.	Tjoo Tik Tjoen	107 P. K. I.	23-7-1959	
241.	Tjugito	237 P. K. I.	23-7-1959	
242.	Tjung Tin Jan, Mr.	261 P. Katholik	23-7-1959	
243.	Udin Sjamsudin	7 Masjumi	23-7-1959	
244.	Umar Salim Hubeis	91 Masjumi	23-7-1959	
245.	Umi Sardjono, Nj.	86 Pembangunan	23-7-1959	
246.	Usman Mufti Widjaja	55 Pembangunan	23-7-1959	
247.	Uwes Abubakar	184 Masjumi	23-7-1959	
248.	Wahib, K.H. Moh.	102 N. U.	23-7-1959	
249.	W a s i s	125 P. N. I.	23-7-1959	
250.	W e n s, E.F.	267 —	23-7-1959	
251.	Werdojo, K.	76 Nasional Pro- gresif (Permai)	23-7-1959	
252.	Wijono Soerjokoesoemo	18 P. S. I.	23-7-1959	
253.	Winoto Danuasmo	29 Nasional Pro- gresif (Gerakan Pembela Pantjasila)	28-7-1959	
254.	Wirjosepoetro, Rs.	228 P. N. I.	23-7-1959	

No. Urut	N a m a	No. Fraksi dalam Angg. D. P. R.	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ²
255.	Yunan Nasution, Moh.	46 Masjumi	23-7-1959	
256.	Zain Alhabsji, H.	235 N. U.	23-7-1959	
257.	Zainal Abidin Ahmad, H.	11 Masjumi	23-7-1959	Ditetapkan sbg. Wakil Ketua III
258.	Zainal Arifin Tanamas	122 N. U.	23-7-1959	
259.	Zainul Arifin, H.	17 N. U.	23-7-1959	Ditetapkan sbg. Wakil Ketua I.

I C H T I S A R

DJUMLAH ANGGOTA D.P.R. — DALAM RANGKA U.U.D. 1945

I. DJUMLAH ANGGOTA D.P.R. — DALAM RANGKA

U.U.D. 1945 259

yang telah mengangkat sumpah/menjatakan djandji
menurut Pasal 2 Penetapan Presiden No. 1 tahun
1959 (LN no. 76 — TLN No. 1815).

II. DJUMLAH ANGGOTA D.P.R. — DALAM RANGKA

U.U.D. 1945 4

yang mengundurkan diri/meninggal dunia

255

III. DJUMLAH ANGGOTA-PENGGANTI D.P.R. — DALAM

RANGKA U.U.D. 1945 7

DJUMLAH SEMUA : 262

DAFTAR CHUSUS ANGGOTA-PENGGANTI
D. P. R. — DALAM RANGKA U. U. D. 1945

23 Djuli 1959 — 24 Djuni 1960

No. Urut	N a m a	No. Fraksi dalam Angg. D. P. R.	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ²
TAHUN 1959 :				
1.	Rd. Rusli Tjandra- dinata	249 P. N. I.	15-8-1959	Pengganti Ahem Erningpradja (jg. mengundurkan diri dari keanggo- taan DPR-Hasil Pe- milihan umum tgl. 12-7-1959).
2.	Djamhari	71 P. K. I.	15-8-1959	Pengganti Soe- djono. (anggota Fraksi Pembangunan)
3.	R. Wiwoho Purbohadi- djojo	36 Masjumi	31-10-1959	Pengganti Prawoto Mangku- sasmito.
4.	Mahfud Sjamsulhadi	136 N. U.	11-12-1959	Pengganti M. Soentoro.
5.	S u g i a r t o	84 Nasional Pro- gresif (Murba)	27-1-1960	Pengganti Adam Malik.
6.	Kandjun Koesnomi- hardjo	113 N. U.	3-2-1960	Pengganti R. Moh. Saleh Surjaning- prodjo.
7.	Rd. Wachju Mh. Enoch	187 P. N. I.	4-2-1960	Pengganti Soeroso Pringgosoese- no almarhum.

KETERANGAN :

I. Anggota D.P.R. jang mengundurkan diri/diganti :

1. Ahem Erningpradia sbg. Anggota DPR-Hasil Pemilihan Umum pada tgl. 1-7-1959
2. Prawoto Mangkusasmito belum mengangkat sumpah sbg. Anggota D.P.R. — dalam rangka U. U. D. 1945 — mengundurkan diri pada tgl. 14-8-1959
3. M. Soentoro belum mengkat sumpah sbg. Anggota D.P.R. — dalam rangka U.U.D. 1945 — mengundurkan diri pada tgl. 3-8-1959

II. Anggota D. P. R. jang mengundurkan diri/tidak diganti :

1. Dr. J. Leimena belum mengangkat sumpah sbg. Anggota D.P.R. — dalam rangka U.U.D. 1945 — mengundurkan diri pada tgl. 10-8-1959
2. Tan Eng Hong belum mengangkat sumpah sbg. Anggota D.P.R. — dalam rangka U.U.D. 1945 — mengundurkan diri pada tgl. 22-8-1959

III. Anggota D.P.R. jang belum mengangkat sumpah/tidak mendjadi Anggota D.P.R. — dalam rangka U.U.D. 1945

1. Mr. Boerhanoeddin Harahap— anggota Fraksi Masjumi (No. 52) ;
2. Mr. R.H. Kasman Singodi-medjo — anggota Fraksi Masjumi (No. 59) ;
3. Sjarif Usman — anggota Fraksi Masjumi (No. 78) ;
4. Mohamad Natsir — anggota Fraksi Masjumi (No. 90) ;
5. K.R.H. Abdul Azis — anggota Fraksi A. K. U. I. (No. 112) ;
6. Mohamad Noor — anggota Fraksi Masjumi (No. 142) ;
7. Mawardi Noor — anggota Fraksi Masjumi (No. 150) ;
8. Nj. Rahman El Junusiah — anggota Fraksi Masjumi (No. 164) ;

G. DAFTAR ANGGOTA D. P. R.-G. R.

25 Juni 1960 — 31 Desember 1966

(Berdasarkan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960
(LN No. 78 — TLN No. 2015) jo. Kep. Pres. No. 156 tahun 1960
tgl. 24-6-1960 dan No. 160A tahun 1960 tgl. 11-7-1960).

No. Urut	N a m a	No. Diangkat dari Angg. Partai/Karya	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ²
1.	Abdoellah Afandi, R.	54 N. U.	25-6-1960	
2.	Abdoellah Soetan Bandaharo Pandjang	256 Tjendekian/Pendidik (Murba)	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
3.	Abdul Aziz, O. K. H.	221 Alim Ulama Islam (Aldjamijatul Waslijah)	25-6-1960	
4.	Abdul Aziz Dijar	50 N. U.	25-6-1960	
5.	Abdul Djalil, K.H.	209 Alim Ulama Islam (N U)	25-6-1960	
6.	Abdul Thalib (Kolonel)	130 AB — AD	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 5-11-1960
7.	Abdulgani, H. (Kapten)	281 AB — AD	8-11-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 26-3-1964.
8.	Abdullah	171 Tani (BTI)	25-6-1969	Dianggap berhenti tgl. 1 4-1966.
9.	Abdullah Gathmyr	53 N. U.	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 5-7-1966.
10.	Abdulrachman Setjowibowo (K.B. Pol.)	153 AB — AK	25-6-1960	
11.	Abdulwahab Chasbullah, K. H.	45 N. U.	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 5-7-1966.
12.	Abubakar Jusuf, H.	164 T a n i (Pertanu)	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 16-6-1966.
13.	Abu Jazid Bustomi (Kolonel)	129 AB — AD	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat gl. 27-6-1963.
14.	Achmad Aini Chatib, K. H.	218 Alim Ulama (P. S. I. I.)	25-6-1960	

No. Urut	N a m a	No. Diangkat dari Angg. Partai/Karya	Sumpat; djandji	Keterangan lain ²
15.	Achmad Chatib, Tb. K. H.	212 Alim Ulama Islam (P. S. I. I.)	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 19-3-1965.
16.	Achmad Ghozaly, K.H.	208 Alim Ulama Islam (N. U.)	25-6-1960	
17.	Achmad Soemadi (Let Kol. Udara)	147.AB — AU	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 25-5-1966.
18.	Achsien, H. A. A.	52 N. U.	25-6-1960	
19.	Adipoetro, S. (Kolonel Udara)	146 AB — AU	25-6-1960	
20.	Agus Sudono Darmo-husudo	204 Buruh (Gas-biindo)	25-6-1960	
21.	Ahmad Dahlan Ranuwihardjo	241 Pemuda (G. P. I. I.)	25-6-1960	
22.	Achmad, Muh	1 P. N. I.	25-6-1960	
23.	A i d i t, D. N.	94 P. K. I.	25-6-1960	Mengundurkan diri tgl. 25-7-1961.
24.	Ajip Muchamad Dzukhri	59 N. U.	25-6-1960	
25.	Ali Pramingkoesoemo, R. T. A. Moh.	55 N. U.	25-6-1960	Meninggal dunia di Malang tgl. 6-10-1963.
26.	Aminah Hidajat, Nj. Ratu H.	250 Wanita (IP-KI)	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 16-7-1966.
27.	Aminuddin Aziz	240 Pemuda (G. P. Ansor)	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 21-9-1965.
28.	Amung Amran	159 Tani (Petani)	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 16-6-1966.
29.	Andi Mattalatta (Kolonel)	132 AB — AD	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 5-11-1960.
30.	Anwar Kadir	95 P. K. I.	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
31.	Anwar Musaddad, H.	274 N. U.	29-7-1960	
32.	Anwar Tjokroaminoto, H.	116 P. S. I. I.	25-6-1960	
33.	Arudji Kartawinata	117 P. S. I. I.	25-6-1960	Diangkat sbg. Wakil Ketua/ Ketua DPR-GR.

No. Urut	N a m a	No. Diangkat dari Angg. Partai/Karya	Sumpah/djandji	Keterangan lain ²
34.	Asa Bafagih	268 Wartawan (N. U.	25-6-1960	Mengundurkan diri tgl. 15-10-1960
35.	Asmadi Tirtotoetomo	2 P. N. I.	25-6-1960	
36.	Asmah Sjachrunie, Nj.	275 N. U.	9-8-1960	
37.	A s m u	182 T a n i (BTI)	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
38.	Asjwawi, K.H.	215 Alim Ulama Islam (Perti)	25-6-1960	
39.	Asjro Effendi	161 T a n i (Petani)	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 16-6-1966.
40.	Assegaff Hussein Saleh	62 N. U.	25-6-1960	
41.	Bachtiar Salim Ha'oho	200 Buruh (KBKI)	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat: tgl. 16-6-1966.
42.	Badarussamsi (Koloneł)	128 AB — AD	25-6-1960	Meninggal dunia di Semarang tgl. 30-1-1962.
43.	B i l i , S. D.	25 P. N. I.	25-6-1960	
44.	Boesroh, Moh. (Letnan Udara II/Kapten Udara)	152 AB — AU	25-6-1960	
45.	C a l e y , M.	110 Parkindo	25-6-1960	
46.	Chamid Widjaja, H. A.	51 N. U.	25-6-1960	
47.	Conterius, Pastor A.	232 Alim Ulama Katholik	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 1-1-1963.
48.	Danoesoegito	41 P. N. I.	25-6-1960	
49.	Darjaatmaka, R.O. (Maj./Let. Kol./Kol. Laut)	144 AB — AL	25-6-1960	
50.	Darsono, Rd.	21 P. N. I.	25-6-1960	
51.	D a t u k , A. M.	199 Buruh (KBKI)	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat: tgl. 2-4-1964.
52.	Dimjati, K. H. A.	226 Alim Ulama Islam (N U)	25-6-1960	
53.	Djadi Wirosubroto	98 P. K. I.	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
54.	Djadja Wiriasumita	56 N. U.	25-6-1960	Meninggal dunia di Tasikmalaja tgl. 11-1-1965.

No. Urut	N a m a	No. Diangkat dari Angg. Partai/Karya	Sumpah/djandji	Keterangan lain ²
55.	Djalaluddin, Dr. Sjech H.	214 Alim Ulama Islam (P. P. T. I.)	25-6-1960	
56.	Djamhari	165. T a n i (BTI)	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
57.	Djawoto	269 Wartawan (PWI)	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-10-1965
58.	Djokosudjono	277 P. K. I.	6-9-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
59.	Djumhur Hakim	3 P. N. I.	25-6-1960	
60.	Doedi Soemawidjaja	4 P. N. I.	25-6-1960	Mengundurkan diri tgl. 1-7-1960.
61.	Fanggidaej, Nj. Francisca	248 Wanita	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
62.	Gele Harun, Mr.	253 Tjendekia- wan/Pendidik (PNI)	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 16-6-1966.
63.	Gozali, K. H.	219 Alim Ulama Islam (Perti)	25-6-1960	
64.	Hadikusumo, S.	5 P. N. I.	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 16-6-1966.
65.	Hadinijah Hadi, Nj.	63 N. U.	25-6-1960	
66.	Hadiwinarso, R. S. (Kolonel Laut)	139 AB—AL	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 1-3-1961.
67.	Handokowdjojo, I. S.	6 P. N. I.	25-6-1960	
68.	Hardiman Sumardanus Kapten/Major/Let. Kol. Laut)	145 AB—AL	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 21-5-1965.
69.	Hardojo	237 Pemuda (CGMI	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
70.	Harsono Tjokroaminoto, H.	118 P. S. I. I.	25-6-1960	
71.	Hartojo Prawirosudarmo	166 T a n i (BTI	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.

No. Urut	N a m a	No. Diangkat dari Angg. Partai/Karya	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ²
72.	Hasan Kasim (Kolonel/Brig. Djen.)	131 AB—AD	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 16-6-1966.
73.	Herman Mu' tashim wan/Pendidik (PNI)	180 T a n i (Pertanu)	25-6-1960	
74.	Husein Kartasasmita, R.	260 Pengusaha Nasional (PNI)	25-6-1960	
75.	Husin Hifni, K. H.	210 Alim Ulama Islam (NU)	25-6-1960	
76.	Hutomo Supardan	83 P. K. I.	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 11-4-1964.
77.	Ibrahim Husni, K. H.	222 Alim Ulama Islam (NU)	25-6-1960	
78.	I d h a m	217 Alim Ulama Islam (P.S.I.I.)	25-6-1960	
79.	Ido Garnida	243 P e m u d a	25-6-1960	
80.	I m b a n, Z.	119 P. S. I. I.	25-6-1960	
81.	Indo Soebagio, R. (Let. Kol./Kol. KKO)	141 AB — AL	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 1-9-1962.
82.	I s a, Dr. M.	7 P. N. I.	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 2-5-1964.
83.	Ischaak Moro	202 Buruh (Gobsi)	25-6-1960	
84.	Iskandar Sulayman, R. H.	223 Alim Ulama Islam (N. U.)	25-6-1960	Meninggal dunia di Djakarta tgl. 12-4-1963
85.	Ismangoen Poedjowi- dagdho	160 T a n i (Petani)	25-6-1960	
86.	Isnaeni, Mh.	8 P. N. I.	25-6-1960	
87.	J a g u s	169 T a n i	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
88.	Jahoedihardjo, Soedomo (Major/Kolonel Udara)	149 AB — AU	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 25-5-1966.
89.	Joebaar Ajoeb	267 Seniman (Lekra)	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
90.	John Lie (Let. Kol./Kol. Laut)	140 AB — AL	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 16-1-1961.

No. Urut	N a m a	No. Diangkat dari Angg. Partai/Karya	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ^a
91.	Josotaruno Ichsan Noer	64 N. U.	25-6-1960	
92.	Junus Anis, K. H. M.	280 Alim Ulama Islam (Muhammadijah)	16-9-1960	
93.	Jusuf Adjitorop, Mr.	100 P. K. I.	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
94.	Jusuf Tauzirie, K. H.	216 Alim Ulama Islam (P. S. I. I.)	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 16-6-1966.
95.	K a h a r, Dachlan	227 Alim Ulama Islam (P. S. I. I.)	25-6-1960	
96.	Kandjun Koesnomihardjo	75 N. U.	25-6-1960	
97.	Kartinah Kurdi. Nj.	183 T a n i (BTI)	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
98.	K a s i m	92 P. K. I.	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
99.	K o e s n a n, Rh.	9 P. N. I.	25-6-1960	
100.	K o o t, J. R.	108 Parkindo	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 21-9-1966.
101.	Lastari Soetrasno, Nj.	244 Wanita (PNI)	25-6-1960	
102.	Latief Hendraningrat, Abdul (Kol./Brig. Djen.)	127 AB — AD	25-6-1960	
103.	Latuihamallo, Prof. Dr. P. D.	229 Alim Ulama Protestan (Parkindo)	25-6-1960	
104.	Lie Po Yoe	10 P. N. I.	25-6-1960	Pergantian nama dari „Lie Po Yoe” mendjadi „Budi Dipojawono”
105.	Lukman, M. H.	82 P. K. I.	25-6-1960	Diangkat sbg. Wakil Ketua DPR-GR. Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
106.	Maemunah Bahrok, Ni.	251 Wanita (PNI)	25-6-1960	
107.	Mahbub Djunaedi, H.	278 N. U.	13-9-1960	
108.	Mahfud Sjamsulhadi	58 N. U.	25-6-1960	Meninggal dunia di Surabaya tgl. 19-5-1965.

No. Urut	N a m a	No. Diangkat dari Angg. Partai/Karya	Sumpah/ djandji	Keterangan lain ²
109.	Mahmudah Mawardi, Nj. H.	57 N. U.	25-6-1960	
110.	Manai Sophiaan	11 P. N. I.	25-6-1960	Non-aktif sedjak tgl. 12-2-1964. Dibebaskan dengan hormat tgl. 31-10-1964.
111.	Manckin, M. R. (Let. Muda Udara I)	150 AB — AU	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 25-5-1966.
112.	Maniudin Brodjotruno	68 N. U.	25-6-1960	
113.	Mansjur, E. Moh.	12 P. N. I.	25-6-1960	
114.	Manuaba, I. B. P.	13 P. N. I.	25-6-1960	
115.	Mariam Kanta Sumpena, Njaju H.	73 N. U.	25-6-1960	
116.	Marijamah Djoenaidie, Nj. S.	76 N. U.	25-6-1960	
117.	Marhaban, Sjech	228 Alim Ulama Islam (P. S. I. I.)	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 16-6-1966.
118.	Martalogawa, Eddie Abdurachman	102 P. K. I.	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
119.	Martosoewito, S.	14 P. N. I.	25-6-1960	
120.	Marzoeki Jatim	276 Alim Ulama Islam (P. S. I. I.)	11-8-1960	
121.	Masjkur, K. H.	46 N. U.	25-6-1960	
122.	M a s t r a, B. P.	235 Alim Ulama Hindu-Bali	25-6-1960	
123.	Matakupan, Drs. D. S	112 P. Katholik	25-6-1960	
124.	Memet Tanumidjaja, Nj. Titi	246 Wanita (Kowani)	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 3-11-1965.
125.	Moechari Hadisardjono	259 Kooperasi (NU)	25-6-1960	
126.	Moedawari, H.	74 N. U.	25-6-1960	
127.	Moedikdio, Nj.	103 P. K. I.	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.

No. Urut	N a m a	No. Fraksi dalam Angg. Partai/Karya	Keterangan lain ²
128.	Moeis Hassan, A.	172 T a n i (Petani)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Non-aktif sedjak tanggal 30-6-1962. Dibebaskan dengan hormat tgl. 28-9-1963.
129.	Moenadir	15 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960.
130.	Moersalin, D. M. Kom. (L)	143 AB - AL	Diangkat sbg. Wk. ketua D.P.R.-G.R. Dibebaskan dengan hormat tgl. 6-6-1968 (karena mendjadi Menteri Tenaga kerdja).
131.	Moersid Idris	16 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hor- mat dengan Kep. Pres. No 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
132.	Moeslich. H. S.	71 N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hor- mat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
133.	Moesta' in, R. K. H.	48 N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Meninggal dunia di Kotabaru (Irian Barat) tgl. 15-1-1964.
134.	Mongan, C.	173 T a n i (Petani)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Keputusan Presiden No. 155 tahun 1967 tgl. 27-9-1967.
135.	M o o y, Chr. J.	107 Parkindo	Sumpah tgl. 25-6-1960
136.	Mu'amil Effendi SH. Brig. Djen.	134 ABRI — AD	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
137.	Munir Abisudjak, K. H.	61 N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960
138.	Mursjidi, H. A.	65 N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 58 tahun 1965 tgl. 19-3-1965.

No. Urut	N a m a	No. Diangkat dari Angg. Partai/Karya	Keterangan lain ²
135.	Murtadji Bisri	188 B u r u h (Sarbumusi)	Sumpah tgl. 25-6-1960
140.	Muslich, K. H.	211 Alim Ulama Islam (N U)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 58 tahun 1965 tgl. 19-3-1965
141.	Njak Diwan	122 P e r t i	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 140 jo No. 141 tahun 1966 tgl.16-6-1966.
142.	N j o n o	189 B u r u h (Sobsi)	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
143.	N j o t o	96 P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
144.	Noor Abdulgani, H. Moh.	69 N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Meninggal dunia di Surabaya tgl. 25-1-1970.
145.	Notosukardjo	17 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960
146.	Nungtjik, A. R.	78 P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
147.	Nunung Kusnadi, A.	120 P. S. I. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 1. 9-2-1968.
148.	Napitupulu, Mano- nga Maj. (P)	142 ABRI — AL	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 186 tahun 1963 tgl. 5-9-1963.
149.	Obaj Suhantaatmadja	158 ABRI — OKD/ O P R	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967.

No. Urut	N a m a	No. Diangkat dari Angg. Partai/Karya	Keterangan lain ²
150.	Osa Maliki	18 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
151.	Palaunsoeka, F. C.	114 P. Katholik	Sumpah tgl. 25-6-1960
152.	Pandoe Kartawigoena	123 P. Murba	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 490 tahun 1961 tgl. 29-8-1961. terhitung mulai tgl. 1-8-1961.
153.	Pelupessy, L. Let. Kol.	136 ABRI — AD	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 59 tahun 1964 tgl. 26-3-1964.
154.	Peris Pardede	104 P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
155.	P i r y, Drs. J.	77 P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
156.	Poeger, Rd.	19 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
157.	Poeger, Gde	261 Pengusaha Nasional	Sumpah Hindu tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
158.	Rachmatullah, K. H.	213 Alim Ulama Islam (PNI)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
159.	Rambitan, B. J.	20 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960
160.	Rasjid St. Radja Emas	184 B u r u h (KBM)	Sumpah tgl. 25-6-1960

No. Urut	N a m a	No. Diangkat dari Angg. Partai/Karya	Keterangan lain ²
161.	Ridwan Sjahrani, H.	60 N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
162.	Rompas, Ds. P. H.	230 Alim Ulama Protestan (Parkindo)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
163.	Rumamah, Nj.	176 T a n i (BTI)	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 86 tahun 1964 gl. 11-4-1964.
164.	Ramaseuw, H. L.	270 Wakil Irian Barat	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
165.	Runturambi, F.	191 B u r u h (Sobs.)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
166.	Rusli Tjandradinata	186 B u r u h (KBM)	Sumpah tgl. 25-6-1960
167.	Sahlan Ridwan, K. H.	225 Alim Ulama Islam (NU)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 21 tahun 1967 gl. 14-2-1967.
168.	Saifuddin, K. H. Muh	70 N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
169.	Saifuddin Zuhri, K. H.	272 N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 173 tahun 1963 tgl. 30-8-1963.
170.	Sajuti Melik	262 Angkatan '45	Sumpah tgl. 25-6-1960
171.	S a k a, V. B.	111 P. Katholik	Djandji tgl. 25-6-1960

No. Urut	N a m a	No. Diangkat dari Angg. Partai/Karya	Keterangan lain ²
172.	Salawati, Ch. Njonja	90 P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berherti tgl. 1-4-1966.
173.	Saleh Umar, M.	22 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 155 tahun 1967 tgl. 27-9-1967.
174.	Sardjono	279 Alim Ulama Islam (Muhamma- dijah)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
175.	Sardjono, S.	174 Tani (BTI)	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
176.	Sario KBPol. II	156 ABRI — AK	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 102 tahun 1964 tgl. 2-5-1964.
177.	Sarino Mangunpra- noto	23 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 382 tahun 1962 tgl. 27-12-1962, terhitung mulai tgl. 11-8-1962.
178.	Sastrodikoro	181 Tani (Petani)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Meninggal dunia di Djakarta tgl. 18-11- 1966.
179.	Se d a, Drs. Ek. Frans	115 P. Katholik	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 344 tahun 1964 tgl. 31-12-1964.
180.	Selamat Ginting	24 P. N. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
181.	Semanhadi Sastro- widjojo	187 B u r u h (KBM)	Sumpah tgl. 25-6-1960

No. Urut	N a m a	No. Diangkat dari Angg. Partai/Karya	Keterangan lain ²
182.	S e n d u k, H.	106 Parkindo	Sumpah tgl. 25-6-1960 Meninggal dunia di Djakarta tgl. 14-12-1963.
183.	Setiati Surasto, Njonja	194 B u r u h (Sobsi)	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 183 tahun 1964 tgl. 28-7-1964.
184.	Siagian, Gajus	266 Seniman (LKN)	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 205 tahun 1964 tgl. 24-8-1964.
185.	Siauw Giok Tjhan	258 K o p e r a s i (Baperki)	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966. Diganti oleh Rahardjodi- kromo, Brig. Djen.
186.	Sidik Kertapati	263 Angkatan '45 (BTI)	Diandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966. Diganti oleh Laupase Malao, Kolonel.
187.	Singgih Tirto- sudio	84 P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 86 tahun 1964 tgl. 11-4-1964.
188.	S i r a d j. Achmad Dasuki	163 T a n i (BTI)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
189.	Siradjuddin Abbas, Hadji	121 P e r t i	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
190.	Siregar, M.	105 Parkindo	Sumpah tgl. 25-6-1960
191.	S i s w o j o	99 P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
192.	Sitohang, R. B.	201 B u r u h (KBM)	Sumpah tgl. 25-6-1960

No. Urut	N a m a	No. Diangkat dari Angg. Partai/Karya	Keterangan lain ²
193.	Situmeang, R. P. R.	79 P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
194.	Sjharuddin St. Pamuntjak	271 B u r u h (KBM)	Sumpah tgl. 25-6-1960
195.	Sjaichu, H. A.	49 N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diangkat sbg. Wakil Ketua DPR-GR (Kep. Pres. No. 180 tahun 1963 tgl. 3-9-1963) dan sbg. Ketua DPR-GR (Kep. Pres. No. 112 tahun 1966 tgl. 23-5-1966).
196.	Sja'roni, K. A. H.	220 Alim Ulama Islam (Perti)	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 60/M tahun 1969 tgl. 9-5-1969.
197.	Slamet Djojosu- mitro	206 Buruh (Sobri) (Murba)	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
189.	Soeatmadji, Dr. R.	26 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
199.	Soebagio Reksodi- poero SH.	27 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960
200.	Soedarsono	28 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Meninggal dunia di Djakarta tgl. 29-6-1962.
201.	Soedomo Jahoedi- hardjo Maj. (U)	149 ABRI — AU	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 114 tahun 1966 tgl. 25-5-1966.
202.	S o e h a r n o	162 T a n i (Petani)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966

No. Urut	N a m a	No. Diangkat dari Angg. Partai/Karya	Keterangan lain ²
203.	Soejono Prawiro- bismo SH. AKBPol.	154 ABRI — AK	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 148 tahun 1962 tgl. 19-4-1962.
204.	Soekamsi Djojadi- prodjo	185 B u r u h (KBM)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
205.	Soekardja, Dr. Brig. Djen.	125 ABRI — AD	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 110 tahun 1966 tgl. 10-5-1966.
206.	S o e k o t j o, S. Major (U)	151 ABRI — AU	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 258 tahun 1960 tgl. 14-10-1960.
207.	Soelaeman Widjojo- subroto	66 N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
108.	S o s l a r d i	330 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
209.	S o e m a d i Major	138 ABRI — AD	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 102 tahun 1966 tgl. 10-5-1966.
210.	Soemantri	178 T a n i (Petani)	Sumpah tgl. 25-6-196
211.	Soemardi Jatmo- soemarto	257 Koperasi (PNI)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 110 tahun 1968 tgl. 16-6-1968.

No. Urut	N a m a	No. Diangkat dari Angg. Partai/Karya	Keterangan lain ²
212.	S o e m a r i Njonja	31 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
213.	Soemartono, Drs. AKBPol.	155 ABRI — AK	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 102 tahun 1964 tgl. 2-5-1964.
214.	S o e p a r d i	264 Veteran	Sumpah tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
215.	S o e p e n i Njonja	32 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 80/M. tahun 1961 tgl. 8-2-1961, terhitung mulai tgl. 18-9-1960.
216.	Soepeno Hadisiswojo	273 P. K. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 86 tahun 1964 tgl. 11-4-1964.
217.	Soeprapto SH. Dr.	255 Tjendekiawan/ Pendidik (HSI)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
218.	Soepratiknjo SH.	157 ABRI — AK	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 135 tahun 1966 tgl. 8-6-1966.
219.	Soerjo Argawisastra Let. Kol. (U)	148 ABRI — AU	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 114 tahun 1966 tgl. 25-5-1966.
220.	Soerachman, Ir.	167 T a n i (Petani)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.

No. Urut	N a m a	No. Diangkat dari Angg. Partai/Karyu	Keterangan lain ²
221.	Soesilo Prawiro- atmodjo	170 T a n i (BTI)	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
222.	Soesilo Prawiro- soesanto	33 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
223.	Soetarto Hadiso- dibyo, R. H.	113 P. Ka'helik	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
244.	Soetojo Mertodi- moeljo	34 P. N. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
225.	Soetoko Djojo- soebroto	35 P. N. I.	Diberhentikan dengan Diberhentikan dengan Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
226.	S o e w a r d i	238 P e m u d a (PNI)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
227.	S o e w o n o	36 P. N.I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
228.	Sondakh, Ds. M.	231 Alim Ulama Protes'an (Parkindo)	Sumpah tgl. 25-6-1960
229.	Subamia, I G. G.	37 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diangkat sbg. Wakil Ketua DPR-G-R dengan Kep. Pres No. 339 tahun 1960 tgl. 26-12-1960.

No. Urut	N a m a	No. Diangkat dari Angg. Partai/Karya	Keterangan lain ²
			Diangkat sbg. Ketua DPR-GR dengan Kep. Pres. No. 38 tahun 1966 tgl. 21-2-1966. Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
230.	Sibijanto, Tuk	193 B u r u h (Sobsi)	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1960.
231.	Subroto Ario Mataram — Let. Kol.	265 Veteran	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
232.	Sudarman, Dra. S. M. Njonja	247 W a n i t a (PNI)	Sumpah tgl. 25-6-1960
233.	Sudhali Atmo- hudiono	179 T a n i (Pecani)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
234.	S u d j i s m a n	97 P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
235.	Sudjarwo Haryowi- sastro	190 B u r u h (Sobsi)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
236.	S u d j i t o	85 P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
237.	S u d o j o	81 P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
238.	Sudrasman	29 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.

No. Urut	N a m a	No. Diangkat dari Angg. Partai/Karya	Keterangan lain ²
239.	Suhaimi Rachman	86 P. K. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
240.	Suhanti Alimar- kaban, Njonja	177 T a n i (BTI)	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 86 tahun 1964 tgl. 11-4-1964.
241.	Suharti Suwarti Njonja	89 P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
242.	S u k a t n o	93 P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
243.	Sunario, R. SH.	254 Tjendekiawan/ Pendidik (NU)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1966 tgl. 9-2-1968.
244.	S u n a r j o	168 T a n i (Petani)	Sumpah tgl. 25-6-1960
245.	Sundari Abdurrach- man, Njonja	80 P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
246.	Suriapranata, O.	38 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960
247.	S u p i t, Karel	198 B u r u h (Sobsi)	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
248.	Sutamto Dirdjosu- parto, Drs.	239 P e m u d a (PNI)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
249.	Sutarno Djatiku- sumo	205 B u r u h (Sarbumusi)	Sumpah tgl. 25-6-1960
250.	Sutijah Surya Hadi, Njonja	39 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 110 tahun 1968 tgl. 16-6-1966
251.	Sutjipto	40 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960
252.	T a m b i a g, W. L.	109 Parkindo	Sumpah tgl. 25-6-1960

No. Urus	N a m a	No. Diangkat dari Angg. Partai/Karya	Keterangan lain ²
253.	Tan Kiem Liong	72 N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Ganti nama mendjadi Mohamad Hasan. Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 341 tahun 1964 tgl. 31-12-1964.
254.	Thaher, S. M.	236 P e m u d a (PNI)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
255.	Thaher Thajeb, Ir.	87 P. K. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
256.	Thaha Ma'roef, Moh.	224 Alim Ulama Islam (NU)	Sumpah tgl. 25-6-1960
257.	Ting Suwarni, Nona	196 B u r u h (Sobsi)	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
25j.	Tj. Oey Hay Djoen	88 P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
259.	Tjoe Tik Tjoen	91 P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 86 tahun 1964 gl. 11-4-1964.
260.	T j u g i t o	101 P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
261.	Tobing, Dr. N. H. L.	252 Tjendekiawan/ Pendidik (PNI)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967.
262.	T r i m o	175 T a n i (BTI)	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
263.	Tuti Noor Bandijah Njonja	195 B u r u h (Sobsi)	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.

No. Urut	N a m a	No. Diangkat dari Angg. Partai/Karya	Keterangan lain ²
264.	Usman Mufti Widjaja	192 B u r u h (PKI)	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
265.	Umi Sardjono Njonja	246 Wanita (Gerwani)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
266.	Wachju Mh. Enoch, Rd.	44 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960
267.	Wahid Hasjim, S. A. Njonja	245 Wanita (NU)	Sumpah tgl. 25-6-1960
268.	Wajan Gede, I. B.	234 Alim Ulama Hindu	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
269.	Wartomo Dwidjoju- wono	207 B u r u h (Gasbiindo)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat sbg. Wakil Buruh (Gasbiindo) dan diangkat lagi sbg. Wakil Roch. Islam (P. S. I. I.) No. anggota 228, dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
270.	W a s i s	42 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960
271.	W e r d o j o, K.	197 B u r u h (Sobsi)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
272.	Wibisono, Jusuf SH.	203 B u r u h Gasbiindo)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
273.	Widjajasaputra, Ch. Pastor	233 Alim Ulama Katholik	Sumpah tgl. 25-6-1960 Meninggal dunia di Djakarta tgl. 15-10-1963.
274.	Wilujo Puspojudo Brig. Djen.	126 ABRI — AD	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diangkat sbg. Wakil Ketua MPRS dengan Kep. Pres. No. 292 tahun 1960 tgl. 9-11-1960.

No. Urut	N a m a	No. Diangkat dari Angg. Partai/Karya	Keterangan lain²
275.	Winoto Danuasmoro	124 Partindo	Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 130 tahun 1963 tgl. 27-6-1963. Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968, dan tidak diganti.
276.	Wirjosepattro, Ss.	43 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
277.	Wonojudo, Dr. Brig. Djen.	133 ABRI — AD	Sumpah tgl. 25-6-1960
278.	W o r a n g , H.V. Brig. Djen.	135 ABRI — AD	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
279.	Yusda, N.	242 P e m u d a (NU)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
280.	Zain Alhabsji, H.	67 N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
281.	Zainul Arifin, H.	47 N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Dizundjuk sbg. Aeting Ketua DPR-GR tgl. 25-6-1960 dan diangkat sbg. Ketua DPR-GR (tetap) dengan Kep. Pres. No. 241 tahun 1960 tgl. 20-9-1960. Meninggal dunia di Jakarta tgl. 2-3-1963.

KETERANGAN :

I. Dengan Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 31/Pimp./III/65-66 tgl. 30 Maret 1966, 62 Anggota DPR-GR yang mewakili P.K.I. dan Ormas-ormasnja dianggap berhenti, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (LN No. 79. — TLN No. 2016).

Jang diganti diantara 62 orang, jaitu :

1. Siauw Giok Tjhan (Wakil Karya Koperasi — Baperki) No. angg. 258, diganti oleh Rahardjodikromo — Brig. Djen. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
2. Sidik Kertapati (Wakil Karya Angkatan 45) No. angg. 263, diganti oleh Laupase Malao, Kolonel (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
3. Ranoë Soenardi, Let. Kol. (L) (Wakil Karya ABRI — AL) No. angg. 145, diganti oleh Soekardjo Saroso, Kol. (L) (Kep. Pres. No. 97 tahun 1966 tgl. 5-5-1966).

II. Dengan surat Pimpinan DPR-GR kepada Presidium Kabinet Dwikora, Menteri/Sekertaris Negara dan Pimpinan MPRS No. D2. 01/K/652 DPR-GR/1966 tgl. 4 April 1966, 3 Anggota DPR-GR jang mewakili P. Murba dan Ormasnja (Sobri) dianggap berhenti.

III. Djumlah Anggota DPR-GR jang dianggap berhenti/ tidak diganti tetap : 62 orang.

DAFTAR CHUSUS ANGGOTA-TAMBAHAN D.P.R. — G.R.

TAHUN 1960 — 1966

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain ²
1.	Acmad M. P.	289	Karya Buruh (KBKI)	Sumpah tgl. 11-11-1963 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 380 tahun 1962 tgl. 27-12-1962
2.	Moch. Hartono B. A.	288	Karya Buruh (Sarbumusi)	Sumpah tgl. 12-10-1963 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 173 tahun 1963 tgl. 20-8-1963
3.	M. Said Budairy	282	Karya Pemuda (GP Ansor)	Sumpah tgl. 9-9-1963 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 173 tahun 1963 tgl. 20-8-1963
4.	A. L. Marany	283	Wakil Irian Barat	Sumpah tgl. 28-5-1963 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 105 tahun 1963 tgl. 28-5-1963
5.	L. Jouwe	294	— " —	Sumpah tgl. 28-5-1963 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 105 tahun 1963 tgl. 28-5-1963
6.	M. B. Ramandey	285	— " —	Sumpah tgl. 28-5-1963 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 105 tahun 1963 tgl. 28-5-1963
7	Cl. Kiriwaib	286	— " —	Sumpah tgl. 28-5-1963 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 105 tahun 1963 tgl. 28-5-1963
8	J. Tarumasely	287	— " —	Sumpah tgl. 1-6-1963 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 105 tahun 1963 tgl. 28-5-1963
9.	Dan Sulaeman SH.	290	Karya Tjendekiawan/ Pendidik	Sumpah tgl. 18-11-1963 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 224 tahun 1963 tgl. 29-10-1963
10.	Adi S. Moewardi SH.	291	Karya Tjendekiawan/ Pendidik	Sumpah tgl. 18-11-1963 Diangkat dengan Kep. Pres. No 224 tahun 1963 tgl. 29-10-1963

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain ²
11.	Nj. Samidjah Soegiarto	294	Karya Buruh (KBKI)	Djandji tgl. 14-8-1964. Diangkat dengan Kep. Pres. No. 182 tahun 1964 tgl. 27-7-1964
12.	Parenrengi Tanri	292	IP-KI	Sumpah tgl. 30-5-1964 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 136 tahun 1964 tgl. 27-5-1964
13.	Achmad Soekarmadidjaja	293	IP-KI	Sumpah tgl. 30-5-1964 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 136 tahun 1964 tgl. 27-5-1964
14.	Dr. Awaludin Djamin MPA AKB Pol.	295	Karya AB-AK	Sumpah tgl. 3-10-1964 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 243 tahun 1964 tgl. 19-9-1964
15.	Domopranoto KBPol.	296	Karya AB-AK	Sumpah tgl. 4-11-1964 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 243 tahun 1964 tgl. 19-9-1964
16.	Drs. G. S. Rubay	297	Karya Tani (Petani)	Sumpah tgl. 6-4-1965. Diangkat dengan Kep. Pres. No. 22 tahun 1965 tgl. 30-1-1965
17.	Dase Durasid	298	Karya Tjendekiawan/ Pendidik	Sumpah tgl. 6-4-1965. Diangkat dengan Kep. Pres. No. 22 tahun 1965 tgl. 30-1-1965
18.	Soehardjo	299	Karya Tani (Gertasi)	Sumpah tgl. 5-6-1965 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 130 tahun 1965 tgl. 18-5-1965
19.	Nj. E. N. Romainum Ajamiseba	300	Wakil Irian Barat	Sumpah tgl. 3-3-1966 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 315 tahun 1965 tgl. 21-10-1965
20.	Godlib Mirino	301	Wakil Irian Barat	Sumpah tgl. 14-3-1966 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 315 tahun 1965 tgl. 21-10-1965

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain ²
21.	Asmara Hadi	302	Partindo	Sumpah tgl. 14-3-1966 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 37A tahun 1966 jo No. 38 tahun 1966 tgl. 21-2-1966 Mendjadi Wakil Ketua D.P.R. - G.R.
22.	Sjarif Thajeb, Dr. Brig. Djen. TNI	303	Karya AB-AD	Sumpah tgl. 14-3-1966 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 37A tahun 1966 jo No. 38 tahun 1966 tgl. 21-2-1966 Mendjadi Wakil Ketua D.P.R. - G.R.
23.	Dr. Nasroen Iskandar	304	Karya Angkatan '45	Sumpah tgl. 7-7-1966 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966

DAFTAR CHUSUS ANGGOTA-TAMBAHAN DPR-GR

T A H U N 1 9 6 7

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain ²
1.	H. Imron Rosjadj SH.	97	N. U.	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 7 tahun 1967 tgl. 27-1-1967
2.	H. Achmad Sjahri	98	N. U.	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
3.	H. Usmar Ismail	99	N. U.	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
4.	Moh. Joenoes Loebis	101	N. U.	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
5.	Drs. Ek. Arfah Muzahar	102	N. U.	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
6.	Drs. Mardji'in Sjam	103	N. U.	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
7.	Rachmat Muljomiseno	104	N. U.	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
8.	Moh. Sjah Manaf	105	N. U.	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
9.	Drs. Ek. Moh Junus Umar	106	N. U.	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
10.	H. Soripada Sihombing	141	P. Katholik	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
11.	Drs. C. Salombe	142	P. Katholik	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
12.	Rufinus Lahur	144	P. Katholik	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
13.	F. X. Soedijono SH.	143	P. Katholik	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
14.	Harry Tjan SH.	145	P. Katholik	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
15.	Nj. F. Doeriat	146	P. Katholik	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
16.	J. C. T. Simorangkir SH.	131	Parkindo	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
17.	Sabam Sirait	132	Parkindo	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
18.	Soegaib	133	Parkindo	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
19.	J. H. D. Tahamata	135	Parkindo	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain ²
20.	H. T. Arjana Prawira- dinata	51	IP-KI	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
21.	Soewojo Setyosewojo	52	IP-KI	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
22.	Mohd. Kasim As.	53	IP-KI	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
23.	Wajan Tjakeranegara	56	IP-KI	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
24.	Drs. Thajeb Moh. Gobel	112	PS II	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
25.	Bustaman SH.	113	PS II	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
26.	Nj. S. Muljati Qahar	114	PS II	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
27.	Nj. Dra. Zubaedah Mughtar	115	PS II	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
28.	Drs. Muh. Abdul Gani MA	116	PS II	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
29.	Taufiq Rusjadi Tjokroaminoto	117	PS II	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
30.	Drs. Ek. Bartianta Harahap	118	PS II	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
31.	Eddy Abdul Maraf B. Sc.	122	Perti	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
32.	H. Kuasini Sebil	124	Perti	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
33.	Maroeto Nitimihardjo	57	P Murba	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
34.	Sugiarto Murbantoko	58	P. Murba	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
35.	Elkana Tobing SH.	59	P. Murba	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
36.	Mansurudin Bogok	60	P. Murba	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
37.	H. Moh. Munasir	307	Karya Tani (Pertanu)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
38.	H. Hamid Baidowi	308	Karya Tani (Pertanu)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
39.	Sjamsudin	309	Karya Tani (MKGR)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
40.	Moestafa Soepangat	310	Karya Tani (Pantiasila)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
41.	Kamaluddin Jamin	327	Karya Buruh (S o k s i)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.

No. No.	N a m a	Agg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain ²
42.	Oetojo Oesman SH.	328	Karya Buruh (S o k s i)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
43.	Sodoegaon Sinambela	329	Karya Buruh (S o k s i)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
44.	Dominicus Hardjomuljono	330	Karya Buruh (S o k s i)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
45.	Emon Suparman	331	Karya Buruh (Gasbiindo)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
46.	Muhamad Djazim	332	Karya Buruh (Sarbumusi)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
47.	Darius Marpaung	333	Karya Buruh (Kespekri)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
48.	Sjamsoe Harja Udaja	334	Karya Buruh (S o b r i)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
49.	Dr. H. Ali Akbar	335	Karya Buruh (KBIM)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
50.	Drs. Hasbullah	341	Karya Pengusaha Nasional (M.E.I.)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
51.	Prof. Dr. Ismail Sunny SH. MCL.	339	Karya Koperasi (Kosgoro)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
52.	Mohd. Dahrif Nasution	342	Karya Nelajan (Sernemi)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
53.	Dr. R. Soejono Martosewojo MD. MPH.	262	Karya Tjendekiawan/ (IDI)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
54.	Dr. Emil Salim	263	Karya Tjendekiawan/ (ESEI)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
55.	Ir. S. Dipokusumo	264	Karya Tjendekiawan/ (PII)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
56.	Nj. Suwarmilah Sulaeman SH.	265	Karya Tjendekiawan/ (Persahi)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
57.	Harjono Tjitrosoebono SH.	266	Karya Tjendekiawan/ (Persahi)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
58.	Drs. Bintoro Tjokroamidjojo	267	Karya Tjendekiawan/ (Persahi)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
59.	Ali A. Adi SH.	268	Karya Tjendekiawan/ (Ikah?)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
60.	Slamet Sukirnanto	279	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
61.	T. Zulfatli	280	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
62.	Fahmi Idris	281	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
63.	Mar'ie Muhamad	282	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain ²
64.	Firdaus Wadjdi	283	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
65.	Soegeng Sarjadi	284	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
66.	Cosmas Batubara	285	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
87.	A. Lim Bian Khoen	286	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
68.	C. J. S. Simandjuntak	287	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
69.	David Napitupulu	288	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
70.	Yozar Anwar	290	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
71.	Salam Sumangat	291	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
72.	M. Jusuf Hasjim	242	Karya Pemuda (GP Ansor)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
73.	H. A. Chalid Mawardi	243	Karya Pemuda (GP Ansor)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
74.	Ignatius Grey Graitto	245	Karya Pemuda (Katholik)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
75.	Nj. Alfijah Munir	252	Karya Wanita (Muslimat)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
76.	Nj. Aisjah Aminy SH.	253	Karya Wanita (Kawi)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
77.	Nj. Martina Notowidagdo SH.	254	Karya Wanita (Dharma Pertiwi)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
78.	Nj. Tuti Harahap Sudjanadiwirja SH.	255	Karya Wanita (P. W. K. I.)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
79.	M. E. Subiadinata	269	Karya Tjendekiawan/ Pendidik (PGRI)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
80.	Drs. Jacob Oetama	277	Karya Wartawan (PWI)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
81.	Nono Anwar Makarim	278	Karya Wartawan (IPMI)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
82.	Drs. H. Asrul Sani	274	Karya Seniman (Lesbumi)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
83.	Djarnawi Hadikusuma	216	Karya Roch. Islam (Muhammadiyah)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
84.	Nj. Dra. Maftuchah Jusuf	217	—"	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain ²
85.	Drs. Lukman Harum	218	—"	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
86.	Daris Tamimi	219	—"	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
87.	M. S. Kamawidjaja	220	—"	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
88.	Sumidjan Wignjowardojo	221	—"	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
89.	Moh. Fachrur Rozi	222	—"	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
90.	Drs. Moh. Djazman	223	—"	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
91.	Umaruddin Sjamsuddin BA.	224	—"	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
92.	Ds. P. W. T. Simandjuntak	228	Karya Roch. Kristen	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
93.	Kusno Utomo Maj. Djen.	165	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
94.	Iman Sardjono Let., Kol. (L)	173	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
95.	J. Salatun Kom. (U)	181	Karya ABRI-AU	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
96.	Drs. Poerwata KBPol.	189	Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
97.	Zain Badjeber	100	N. U.	Sumpah tgl. 7-2-1967 Diangkat s. d. a.
98.	Tgk. M. Saleh	121	Perti	Sumpah tgl. 7-2-1967 Diangkat s. d. a.
99.	Tan Husni Abdullah	54	IP-KI	Sumpah tgl. 7-2-1967 Diangkat s. d. a.
100.	Mahir Mahar	134	Parkindo	Sumpah tgl. 7-2-1967 Diangkat s. d. a.
101.	Wim Tulung BA.	55	IP-KI	Sumpah tgl. 7-2-1967 Diangkat s. d. a.
102.	Azhar Bokry	123	Perti	Sumpah tgl. 18-2-1967 Diangkat s. d. a.
103.	Muh. Jusuf Effendy Nasution	244	Karya Pemuda (Pantjasila)	Sumpah tgl. 18-2-1967 Diangkat s. d. a.
104.	M. Zamroni	289	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 3-6-1967 Diangkat s. d. a.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Partai/Karya Wakil	Keterangan lain ²
105.	Frans Kalangi S.H.	231	Karya Roch. Katholik	Belum mengangkat sumpah Diangkat s. d. a. Diberhentikan dengan hor- mat dengan Kep. Pres. No. 81 tahun 1967 tgl. 8-6-1967 dan diganti oleh J.B. Oetoro S.H.
106.	Ariadi Hardjosoewignjo	45	P. N. I.	Sumpah tgl. 10-6-1967 Diangkat dengan Keputu- san Presiden No. 79 tahun 1967 tgl. 7-6-1967
107.	La Ode Hadi	46	P. N. I.	Sumpah tgl. 10-6-1967 Diangkat s. d. a.
108.	Tedjakusuma S.H.	47	P. N. I.	Sumpah tgl. 10-6-1967. Diangkat s. d. a.

DAFTAR CHUSUS ANGGOTA-TAMBAHAN D.P.R. - G.R.

T A H U N 1 9 6 8

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
1.	Ir. Suwarno	147	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat dengan Keputusan Presiden No. 58 tahun 1968 tgl. 9-2-1968
2.	Abdulwahab Bakri S.H.	148	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
3.	Sukardjan Soedarjadi B.A.	353	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
4.	Ir. Haditirto	354	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
5.	A. H. Ma'mur	356.	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
6.	Dr. Sulastomo	357	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
7.	J. Johny Naro SH.	358	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
8.	Ir. Beddu Amang	359	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
9.	Malikus Suparto SH.	360	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
10.	N a i m u n	362	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
11.	Soeripto B.A.	363	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
12.	Drs. A. Dahlan Siregar	364	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
13.	Harun Umar	365	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
14.	Achmad Sajoethie	366	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
15.	Bambang Soebandiono	370	Sekber/Non Afiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
16.	B.M. Kuntjoro Jakti SH.	371	Sekber/Non Afiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
17.	S u h a r i	374	Sekber/Non Afiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
18.	Sudarmadi M. Sc.	373	Sekber/Non Afiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain ²
19.	Soelistio SH.	376	Sekber/Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a. Mendjadi Wakil Ketua DPR-GR
20.	Daan Jahja	377	Sekber/Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
21.	Sjamsul Basri	378	Sekber/Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
22.	Ir. Sugeng Sundjaswadi	380	Sekber/Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
23.	Drs. Sukadji MA.	381	3 — Non (ABRI- Affiliasi-Massal)	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
24.	Soewondo Darsono Kol.	383	ABRI — AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
25.	Soekardi Kol.	384	ABRI — AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
26.	Naflun Hamam Kol.	385	ABRI — AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
27.	Moch. Susman Kol.	386	ABRI — AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
28.	Andi Achmad Rifai Brig. Djen.	389	ABRI — AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
29.	Dr. Soehardi Maj. Djen.	393	ABRI — AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
30.	Dr. Azil Widjajakusuma	394	ABRI — AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
31.	Dr. H. Moh. Sukmadi Kom. (L)	395	ABRI — AL	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
32.	R. Indro Soebagio Maj. Djen. KKO	396	ABRI — AL	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
33.	Drs. Muchrodji Major (L)	397	ABRI — AL	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
34.	Sukarton SH. Major (L)	398	ABRI — AL	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
35.	Achmad Dipo Kol. (L)	400	ABRI — AL	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
36.	S. Rusman Sumomintardjo Kol. (U)	401	ABRI — AU	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
37.	Susanto Let. Kol. (U)	402	ABRI — AU	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
38.	Abdullah Elansary Let. Kol. (U)	403	ABRI — AU	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
39.	Surasaputra Kol. (U)	404	ABRI — AU	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain ²
40.	Suwita Hardiwardaja (Kol. (U).	405	ABRI — AU	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
41.	Drs. Djoenarsa Brig. Djen. Pol.	408	ABRI — AK	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
42.	Drs. Sjafaroeddin Tan Pono AKB Pol.	410	ABRI — AK	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
43.	R. Suwardja Atmasaputra Brig. Djen. Pol.	411	ABRI — AK	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
44.	Soerjono Kom. Pol.	412	ABRI — AK	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
45.	S a m i o n o	413	H a n s i p	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
46.	Nj. Gedong Bagoes Oka	276	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
47.	S u j o n o	361	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
48.	Drs. G. Sugiharso	367	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
49.	G. A. Sugiharto	372	Sekber/Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
50.	Dr. Isjwari	379	3 — Non	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
51.	Wiratmo Sukito	382	3 — Non	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
52.	T. Sabiki Soerohardjono AKB Pol.	409	ABRI — AK	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
53.	Nj. T. O. Ihromi SH.	352	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
54.	Harsono B. S.	373	Sekber/Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
55.	Arifin Tambunan SH. Let. Kol.	387	ABRI — AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
56.	Drs. A.D. Patianom Kol.	388	ABRI — AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
57.	G. H. Mantik Kol.	390	ABRI — AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
58.	Steve Hetarihon Let Kol.	392	ABRI — AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
59.	Dr. Fuad Hassan	355	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 17-2-1968 Diangkat s. d. a.
60.	Soemarsono	369	Sekber/Non Affiliasi	Sumpah tgl. 17-2-1968 Diangkat s. d. a.
61.	Drs. J.B. Moerdopo	351	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 17-2-1968 Diangkat s. d. a.

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain ²
62.	W a r t o n o	368	Sekber/Non Affiliasi	Sumpah tgl. 17-2-1968 Diangkat s. d. a.
63.	Dr. Ben Mboi Major	391	ABRI — AD	Sumpah tgl. 17-2-1968 Diangkat s. d. a.
64.	Soerachman Brig. Djen.	414	V e t e r a n	Sumpah tgl. 28-2-1968 Diangkat s. d. a.
65.	Drs. Masfar Djamin Major (L)	399	ABRI — AL	Sumpah tgl. 8-5-1968 Diangkat s. d. a.
66.	Hadji Soejatno Let. Muda Udara I	406	ABRI — AU	Sumpah tgl. 24-8-1968 Diangkat s. d. a. (ralat Kep. Pres.)
67.	Drs. Soejono Soentahir KB Pol.	407	ABRI — AK	B e l u m mengangkat sumpah. Diberhentikan dengan hor- mat dengan Kep. Pres. No. 53/M tahun 1968 tgl. 20-11-1968.

ICHTISAR DJUMLAH ANGGOTA D. P. R. - G. R.

I.	Tahun 1960-1966 :	djumlah Anggota DPR-GR	281
		ditambah antar waktu	23
		djumlah semua :	304
II.	Tahun 1967	djumlah Anggota DPR-GR	242
		ditambah (berdasarkan :	108
		UU No. 10 tahun 1966 jo.	
		Keputusan Presiden No. 7	
		tahun 1967 tgl. 27-1-1967)	
		djumlah semua :	350
III.	Tahun 1968	djumlah Anggota DPR-GR	347
		ditambah (berdasarkan :	67
		Keputusan Presiden No. 58	
		tahun 1968 tgl. 9-2-1968)	
		djumlah semua :	414

G. DAFTAR CHUSUS ANGGOTA-PENGGANTI D.P.R.-G.R.

T A H U N 1 9 6 0 — 1 9 6 6

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain ²
1.	Steven Latuihamallo	4	P. N. I.	Sumpah tgl. 3-8-1960 Pengganti Doedi Soemawidjaja (Kep. Pres. No. 168 tahun 1960 tgl. 21-7-1960).
2.	R. Soedjono Komodor (U)	151	Karya ABRI-AU	Sumpah tgl. 7-11-1960 Pengganti S. Soekotjo, Major (U). (Kep. Pres. No: 259 tahun 1960 tgl. 14-1-1960).
3.	Roeslan Roesli Kol. (CPM)	130	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 8-11-1960 Pengganti Abdul Thalib, Kol. (Kep. Pres. No. 281 tahun 1960 tgl. 5-11-1960).
4.	Tallu Rachim Major	132	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 8-11-1960 Pengganti Andi Mattalatta, Kol. (Kep. Pres. No. tgl. 5-11-1960). 281 tahun 1960
5.	Moh. Sofjan Anrazad Let. Kol.	140	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 6-2-1961 Pengganti John Lie, Let. Kol (Kep. Pres. No. 17 tahun 1961 tgl. 16-1-1961).
6.	R.O. Soenardi Let. Kol. Dch.	139	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 27-4-1961 Pengganti R.S. Hadiwinarso, Kol. (Kep. Pres. No. 120 tahun 1961 tgl. 11-4-1961).
7.	Mas Ripaie	32	P.N.I.	Sumpah tgl. 15-6-1961 Pengganti Nj. Soepeni. (Kep. Pres. No. 196 tahun 1961 tgl. 8-5-1961).
8.	Sugiarto Murbantoko	123	P. Murba	Djandji 'gl. 20-9-1961 Pengganti Pandu Kartawiguna. (Kep. Pres. No: 490 tahun 1961 tgl. 29-8-1961),

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain ^a
9.	Moh. Ali Chanafiah	94	P.K.I.	Sumpah tgl. 22-9-1961 Pengganti D.N. Aidit (Kep. Pres. No. 490 tahun 1961 tgl. 29-8-1961).
10.	M. T. Harjono Brig. Djen.	128	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 23-7-1962 Pengganti Badurussamsi, Kol. (Kep. Pres. No. 125 tahun 1962 tgl. 29-3-1962).
11.	Andi Mattalatta Kol.	132	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 23-7-1962 Pengganti Tallu Rachm. Maj. (Kep. Pres. No. 125 tahun 1962 tgl. 29-3-1962).
12.	Drs. Mochamad Kamal Kol.	141	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 9-10-1962 Pengganti R. Indro Soe- bagio, Let. Kol. KKO (Kep. Pres. No. 280 tahun 1962 tgl. 22-8-1962).
13.	P a m u d j i	23	P.N.I.	Sumpah tgl. 11-3-1963. Pengganti Sarino Mangua- pranoto (Kep. Pres. No. 382 tahun 1962 tgl. 27-12-1962).
14.	T. Soelaiman Mahmoed	154	Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 16-3-1963 Pengganti Soejono SH, AKBPOL. (Kep. Pres. No. 148 tahun 1962 tgl. 19-4-1962).
15.	H. Nuddia Lubis	47	N.U.	Sumpah tgl. 9-9-1963 Pengganti H. Zainul Ari- fin. (Kep. Pres. No. 173 tahun 1963 tgl. 30-8-1963).
16.	Drs. Sutanto Martopra- sono	268	Karya Warta- wan	Sumpah tgl. 9-9-1963. Pengganti Asa Bafagth. (Kep. Pres. No. 173 tahun 1963 tgl. 30-8-1963).
17.	A. G a n i Kol. Inf.	126	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 12-10-1963 Pengganti Wilujo Puspo- judo, Brig. Djen. (Kep. Pres. No. 130 tahun 1963 tgl. 27-6-1963).

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain ²
18.	Soebijono Kol. (CAD)	129	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 12-10-1963 Pengganti Abu Jadjit Bus- tomi Brig. Djen. (Kep. Pres. No. 130 tahun 1963 tgl. 27-6-1963).
19.	H. Umar Burhan	272	N.U.	Sumpah tgl. 12-10-1963 Pengganti K.H. Saifuddin Zuhri (Kep. Pres No. 173 tahun 1963 tgl. 30-8-1963).
20.	Asmuransjah	172	Karya Tani (Petani)	Sumpah tgl. 17-12-1963 Pengganti A. Moeis Has- san (Kep. Pres. No. 206 tahun 1963 tgl. 28-9-1963).
21.	Soedarsono Let. Kol. (L)	142	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 30-1-1964 Pengganti Manonga Napi- tupulu, Let. Kol. (L). (Kep. Pres. No. 186 tahun 1963 tgl. 5-9-1963).
22.	Muh. Nadjib Abdul- wahab Chasbullah	55	N.U.	Sumpah tgl. 30-1-1964 Pengganti R.T. Moh. Al. Pratamingkoesoemo (Kep. Pres. No. 268 tahun 1963 tgl. 26-12-1963).
23.	Nj. D. Walandouw	106	Parkindo	Sumpah tgl. 29-4-1964 Pengganti H. Senduk (Kep. Pres. No. 75 tahun 1964 tgl. 8-4-1964):
24.	Abdullah Baraba	91	P.K.I.	Djandji tgl. 20-5-1964 Pengganti Tjoo Tik Tjoen (Kep. Pres. No. 86 tahun 1964 tgl. 11-4-1964).
25.	Soeratno	83	P.K.I.	Djandji tgl. 20-5-1964 Pengganti Hutomo Supar- dan. (Kep. Pres No. 86 tahun 1964 tgl. 11-4-1964).
26.	W i k a n a	273	P.K.I.	Djandji tgl. 20-5-1964 Pengganti Soepeno Hadi- siswojo. (Kep. Pres. No. 86 tahun 1964 tgl. 11-4-1964).

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain
27.	Alimarhaban Harsono	177	Karya Tani (BTI)	Djandji tgl. 20-5-1964 Pengganti Nj. Suharti Alimarhaban. (Kep. Pres. No. 86 tahun 1964 tgl. 11-4-1964).
28.	Pulung Djunaedi	176	Karya Tani (BTI)	Djandji tgl. 20-5-1964 Pengganti Nj. Rumamah. (Kep. Pres. No. 86 tahun 1964 tgl. 11-4-1964).
29.	H. Sughandi Kol.	130	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 20-5-1964 Pengganti Abdul Thalib, Kol. (Kep. Pres. No. 59 tahun 1964 tgl. 26-3-1964).
30.	H. Sullam Sjamsun Let. Kol.	223	Karya Roch. Islam (N.U.)	Sumpah tgl. 20-5-1964 Pengganti R.P.H. Iskandar Sulaiman. (Kep. Pres. No. 44 tahun 1964 tgl. 20-2-1964).
31.	Abdul Muluk Lubis	136	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 25-5-1964 Pengganti L. Pelupessy. (Kep. Pres. No. 59 tahun 1964 tgl. 26-3-1964).
32.	H a n a p i	84	P.K.I.	Djandji tgl. 30-5-1964 Pengganti Singgih Tirtosoediro. (Kep. Pres. No. 86 tahun 1964 tgl. 11-4-1964).
33.	Drs. Soedijono AKB Pol.	155	Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 30-5-1964 Pengganti Drs. Soemartono, AKBPol. (Kep. Pres. No. 102 tahun 1964 tgl. 2-5-1964).
34.	Drs. Sugiarto AKB Pol.	156	Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 30-5-1964 Pengganti Sario, Kom. Pol. II (Kep. Pres. No. 102 tahun 1964 tgl. 2-5-1964).
35.	Soejoso Poegoeh Kom. (L)	139	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 4-6-1964 Pengganti R.O. Soenardi Let. Kol. (Kep. Pres. No. 114 tahun 1964 tgl. 4-6-1964).

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Waktu Partai/Karya	Keterangan lain ²
36.	Pastor Th. Hardjawa- sita pr.	232	Karya Roch. Katholik	Sumpah tgl. 4-6-1964 Pengganti Pastor A. Con- terius. (Kep. Pres. No. 138 tahun 1964 tgl. 28-3-1964).
37.	V.B. da Costa SH.	233	Karya Roch. Katholik	Sumpah tgl. 4-6-1964 Pengganti Pastor Ch. Wi- djajaseputra (Kep. Pres. No. 138 tahun 1964 tgl. 28-5-1964).
38.	Sapardjo Lét. Kol.	281	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 13-6-1964 Pengganti H. Abdul Gani, Kapt. (Kep. Pres. No: 5) tahun 1964 tgl. 26-3-1964)
39.	H. Djen. Moch. Soerjo- pranoto	48	N.U.	Sumpah tgl. 13-7-1964 Pengganti R.K.H. Moesta' in (Kep. Pres. No. 154 tahun 1964 tgl. 18-6-1964).
40.	Nj. Kartini Gs.	28	P.N.I.	Sumpah tgl. 13-7-1964 Pengganti alm. Soedarso- no. (Kep. Prés. No: 155 tahun 1964 tgl. 18-6-1964).
41.	Drs. H. A. Soedjendro	199	Karya Buruh (KBKI)	Sumpah tgl. 14-8-1964 Pengganti M.A. D a t a k (Kep. Pres. No. 70 jo No. 128 tahun 1964 tgl. 2-4-1964 dan tgl. 27-7-1964).
42.	Ir. Sukirman	194	Karya Buruh (Sobsi)	Djandi tgl. 14-8-1964 Pengganti Nj. Setiati Su- rasto (Kep. Pres. No. 18 tahun 1964 tgl. 28-7-1964).
43.	Zaikadir	94	P.K.I.	Djandji tgl. 14-8-1964 Pengganti Moh. Ali Cha- nafiah. (Kep. Pres No: 183 tahun 1964 tgl. 28-7-1964).

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain ²
44.	Manonga Napitulu Let. Kol. (L)	140	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 14-8-1964 Pengganti Sofjan Anrazad Maj. (L). (Kep. Pres. No. 192 tahun 1964 tgl. 5-8-1964).
45.	Silas Tokoro	285	Wakil Irian Barat	Sumpah tgl. 9-10-1964 Pengganti M.B. Ramandey (Kep. Pres. No. 172 tahun 1964 tgl. 16-7-1964)
46.	Manuel Waromi	286	— „ —	Sumpah tgl. 9-10-1964 Pengganti Clemens Kiri- waib. (Kep. Pres. No. 172 tahun 1964 tgl. 16-7-1964).
47.	Usep Ranawidjaja SH.	266	Karya Seniman (LKN)	Sumpah tgl. 2-11-1964 Pengganti Gajus Sagian (Kep. Pres. No. 205 tahun 1964 tgl. 24-8-1964).
48.	A. Nawawi Saleh	7	P.N.I.	Sumpah tgl. 20-11-1964 Pengganti Dr. M. Isa (Kep. Pres. No. 278 tahun 1964 tgl. 31-10-1964).
49.	Achmad Siala	11	P.N.I.	Sumpah tgl. 20-11-1964 Pengganti Maai Sophiaan (Kep. Pres. No. 281 tahun 1964 tgl. 31-10-1964).
50.	H. Djamaluddin Malik	72	N.U.	Sumpah tgl. 15-1-1965 Pengganti Mch. Hasan (dahulu Tan Kiem Liong) (Kep. Pres. No. 341 tahun 1964 tgl. 31-12-1964).
51.	Drs. B. Mang Reng Say	115	P. Katholik	Sumpah tgl. 15-1-1965 Pengganti Drs. Ek. Frans Seda. (Kep. Pres. No. 344 tahun 1964 tgl. 31-12-1964).
51.	K. Tb. A. Suhari Chatib	212	Karya Roch. Islam (PSII)	Sumpah tgl. 6-4-1965 Pengganti K.H. Tb. Ach- mad Chatib. (Kep. Pres. No. 58 tahun 1965 tgl. 19-3-1965).

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain ²
53.	Drs. Basirun Nugroho Kom. Pol. II	155	Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 6-4-1965 Pengganti Drs. Soedijono AKBPol. (Kep. Pres. No. 65 tahun 1965 tgl 24-3-1965).
54.	Ranu Soenardi Let. Kol. (L)	145	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 16-8-1965 Pengganti Hardiman Su- mardanus Kapten (P). (Kep. Pres. No. 135 tahun 1965 tgl. 21-5-1965).
55.	H. Muhammad Baidlowi	58	N.U.	Sumpah tgl. 15-11-1965 Pengganti alm. Mahfud Sjamsulhadi. (Kep. Pres. No. 289 tahun 1965 tgl 21-5-1965).
56.	Lukmanul Hakim	56	N.U.	Sumpah tgl. 22-11-1965 Pengganti alm. Djadja Wi- riasumita. (Kep. Pres. No. 289 tahun 1965 tgl. 21-5-1965).
57.	Moh. Amin Holle	240	Karya Pemuda (GP Ansor)	Sumpah tgl. 4-12-1965 Pengganti Aminuddin Azis. (Kep. Pres. No. 289 tahun 1965 tgl. 21-5-1965).
58.	Manaf Lubis Kol.	127	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 31-1-1966 Pengganti Abdul Latief Hendraningrat, Kol. (Kep. Pres. No. 372 tahun 1965 tgl. 10-12-1965).
59.	Nj. Dorkas Tokoro Hanasbey	258	Wakil Irian Barat	Sumpah tgl. 3-3-1966 Pengganti Silas Tokoro. (Kep. Pres. No. 215 tahun 1965 tgl. 21-10-1965).
60.	Sudjono Humardani Kol.	128	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 14-5-1966 Pengganti M.T. Harjono, Brig. Djen. (Kep Pres. No. 102 tahun 1966 tgl. 10-5-1966).
61.	Djojopranoto BA Kol.	138	—,—	Sumpah tgl. 14-5-1966 Pengganti Soemadi, Kapt. (Kep. Pres. No. 102 tahun 1966 tgl. 10-6-1966).

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain ²
62.	Gusti Endeng Let. Kol. (U)	147	Karya ABRI-AU	Sumpah tgl. 2-6-1966 Pengganti Achmal Sumadi, Let. Kol. (U) (Kep. Pres No. 114 tahun 1966 tgl. 25-5-1966).
63.	Suhartono Major (U)	148	„	Pengganti Soerjo Argawi- sastra Major (U). (Kep. Pres. No. 114 tahun 1966 tgl. 25-5-1966).
64.	Abubakar Saleh Let. Kol. (U)	149	Karya ABRI-AU	Sumpah tgl. 2-6-1966 Pengganti Soedomo Jahoe- dihardjo, Major (U). (Kep. Pres. No. 114 tahun 1966 tgl. 25-5-1966).
65.	E. Suwarma SH. Kapten (U)	150	„	Sumpah tgl. 2-6-1966 Pengganti M.R. Manckin, Let. Muda (U) I. (Kep. Pres. No. 114 tahun 1966 tgl. 25-5-1966).
66.	Sami Rahardjo SH. Kol.	125	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 2-6-1966 Pengganti Dr. Soekardja, Kol. (Kep. Pres. No. 110 tahun 1966 tgl. 10-5-1966)
67.	Dono Indarto Komodor (U)	151	Karya ABRI-AU	Sumpah tgl. 16-6-1966 Pengganti R. Soedjono, Laks. Muda (U). (Kep. Pres. No. 114 tahun 1966 tgl. 25-5-1966).
68.	L.M. Sianturi AKB Pol.	157	Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 16-6-1966 Pengganti Pratiknjo SH. (Kep. Pres. No. 135 tahun 1966 tgl. 8-6-1966).
69.	A.J.M. Pieter Brig. Djen. Pol.	295	Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 16-6-1966 Pengganti Dr. Awaloedin Djamin Drs. MPA. AKBPol. (Kep. Pres. No. 135 tahun 1966 tgl. 8-6-1966).
70.	Soekardjo Saroso Kol. (L)	145	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Ranu Soenardi, Let. Kol. (L). (Kep. Pres. No. 97 tahun 1966 tgl. 5-5-1966).

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain ²
71.	Soegiarto Major Inf.	205	Karya Veteran	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Subroto Ario Mataram Let. Kol. (Kep. Pres. No. 139 tahun 1966 tgl. 9-6-1966).
72.	H a r d i SH.	5	P.N.I.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti S. Hadikusumo (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
73.	Drs. I.G.N. Gde Djaksa	167	Karya Tani (Petani)	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Ir. Soerachman Kep. Pres. No: 141 tahun 966 tgl. 16-6-1966).
74.	A b a d i	37	P.N.I.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti I.G.G. Subamia: (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
75.	Nj. R. Soeradji	24	P.N.I.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Selamat Ginting. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
76.	S. Riva'i	7	P.N.I.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti A. Nawawi Sa- leh. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
77.	S u t o k o	19	P.N.I.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti R. Poeger (Kep. Pres No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
78.	Nj. Kartomo	28	P.N.I.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Nj. Kartini Gs. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
79.	Mustafa Miga	31	P.N.I.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Nj. Soemari (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
80.	Adipranoto	33	P.N.I.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Soesilo Prawi- rosoesanto. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain ²
81.	Rasjid St. Tengah Hari	36	P.N.I.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Soewono (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl 16-6-1966).
82.	Kromolawi	43	P.N.I.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Rs. Wirjosepoe- tro. (Kep. Pres. No: 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
83.	Ibus Nasjri	60	N.U.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti H. Ridwan Sjah- roni (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
84.	Nj. Machsunah H. Ab- dul Chaliq	71	N.U.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti H.S. Mocslich. (Kep. Pres. No: 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966)
85.	K.H. Abdullah Jusuf	62	N.U.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Hussein Saleh Assegaff. (Kep. Pres: No: 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
86.	Aroepalla	70	N.U.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti K.H. Muh: Sai- fuddin (Kep. Pres. No: 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
87.	Drs. Maman Achdijat	164	Karya Tani (Pertanu)	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti H. Abubakar Jusuf. (Kep. Pres. No: 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
88.	K.H. Roesli Abdulwahid	121	Perti	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti H. Siradjuddin Abbas (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
89.	H. Abdurachman	122	Perti	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Nja' Diwan. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan. lain ²
90.	Gurawan Permadhi	159	Karya Tani (Petani)	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Amung Amran. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
91.	M.S. Soebijanto	161	„	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Asjro Effendi. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
92.	H. Marsjid Alamsjah	162	„	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Soeharno. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
93.	Nj. Gani Surjokusumo	179	„	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Sudhali Atmo- hudiono (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
94.	Drs. Soerjadi	236	Karya Pemuda (PNI)	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti S.M. Thaher. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
95.	Thamrin Ramakampali	239		Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Drs. Sutanto Dirdjosuparto. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
96.	Alaudin Samah	200	Karya Buruh (KBM)	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Bachtiar Salim Haloho. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
97.	Nn. Mutih Haditomo	253	Karya Tjendekia- wan/Pend. (PNI)	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Gele Harun SH. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
98.	Ismail Raharjo SH.	290	Karya Tjendekia- wan/Pend. (Persadja)	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Dan Soelaiman SH. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
99.	Adnan Buyung Nasution SH.	291	Karya Tjendekia- wan/Pend. (Persadja)	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Adi S. Moewar- di SH. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain ²
100.	Laupase Malao Kol.	263	Karya Angkatan '45	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Sidik Kartapati (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
101.	Drs. Warsito Let. Kol.	131	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Hasan Kasim, Kol. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
102.	Wartomo Dwidjojuwono	228	Karya Roch. Islam (PSII)	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Sjech Marhaban (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
103.	Abdul Hamid Margana	216	Karya Roch. Islam (PSII)	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti K.H. Jusuf Tau- ziri (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966)
104.	Rahardjodikromo Brig. Djen.	258	Karya Koperasi (Gerkopin)	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Siauw Giok Tjhan. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
105.	Moh. Ali Ubaid	45	N.U.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti K.H. Abdulwa- hab Chasbullah. (Kep. Pres. No. 153 tahun 1966 tgl. 5-7-1966).
106.	Taufik Gathmyr	53	N.U.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti H. Abdullah Gathmyr. (Kep. Pres. No. 153 tahun 1966 tgl. 5-7-1966)
107.	Muchtar Anwar	207	Karya Buruh (Gasbiindo)	Sumpah tgl. 27-7-1966 Pengganti Wartomo Dwi- djojuwono (diangkat lagi sbg. Wakil Karya Roch. Islam/PSII -- Angg. No. 228) (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
108.	Nj. Dewi Asiah Rai Abin	250	IP-KI	Sumpah tgl. 27-7-1966 Pengganti Nj. Ratu H. Aminah Hidajat (Wakil Karya Wanita IP-KI). Kep Pres. No. 158 tahun 1966 tgl. 16-7-1966).

Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain*
109.	Mochamad Usman	238	Karya Pemuda (PNI)	Sumpah tgl. 8-8-1966 Pengganti Soewardi (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
110.	Nj. Sri Rochmani Lasmindar	249	Karya Wanita (Kowani)	Sumpah tgl. 19-8-1966 Pengganti Nj. Titi Memet Tanumidjaja. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966, yang telah diralat).
111.	Soedirman Maj. Djen.	135	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 19-9-1966 Pengganti H.V. Worang, Let. Kol. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
112.	L.B.G. Surjadinata (dahulu Lie Beng Giok)	108	Parkindo	Sumpah tgl. 26-6-1966 Pengganti J.R. Koot. (Kep. Pres. No. 204 tahun 1966 tgl. 21-9-1966).

G. DAFTAR CHUSUS ANGGOTA-PENGGANTI

TAHUN 1967 — 1970

No. urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain ²
1.	H. Achmad Fauzy	89	N.U.	Sumpah tgl. 18-2-1967 Pengganti Njaju H. Mari- am Kanta Sumpena. (Kep. Pres. No. 21 tahun 1967 tgl. 14-2-1967).
2.	Drs. Chalik Ali	91	N.U.	Sumpah tgl. 18-2-1967 Pengganti Kandjun Koes- nomihardjo. (Kep. Pres. No. 21 tahun 1967 tgl. 14-2-1967).
3.	Rahardjo Prodjopradoto Kol.	149	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 18-2-1967 Pengganti Sami Rahardjo SH. Kol. (Kep. Pres. No. 21 tahun 1967 tgl. 14-2-1967).
4.	H. Iskandar Widyapranata Let. Kol. Purn.	160	— „ —	Sumpah tgl. 18-2-1967 Pengganti Abdul Muluk Lubis Let.Kol. (Kep. Pres. No. 21 tahun 1967 tgl. 14-2-1967).
5.	Chamdan Abdul Djalil	193	Karya Roch. Isiam (NU)	Sumpah tgl. 18-2-1967 Pengganti K.H. Abdul Djalil. (Kep. Pres. No. 21 tahun 1967 tgl. 14-2-1967)
6.	Sodri Siswodarsono	209	— „ —	Sumpah tgl. 18-2-1967 Pengganti K.H. Salsan Ridwan. (Kep. Pres. No. 21 tahun 1967 tgl. 14-2-1967).
7.	Taufik Susanto Kol. (L)	172	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 15-3-1967 Pengganti Soekardjo Saroso Kol. (L). (Kep. Pres. No. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967).
8.	O e m a r d i Let. Kol. (U)	177	Karya ABRI-AU	Sumpah tgl. 15-3-1967 Pengganti Dr. Abubakar Saleh Let. Kol. (U). (Kep. Pres. No. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967).

No. urut	N a m a	Angg. Wakil No. Partai/Karya	Keterangan lain ²
9.	HMA Soedijono S. Brig. Djen.	190 Karya Hansip Hanra	Sumpah tgl. 15-3-1967 Pengganti Obaj Suhanta- atmadja. (Kep. Pres. No. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967).
10.	Drs. Zulkifli	206 Karya Roch. Islam (N.U.)	Sumpah tgl. 15-3-1967 Pengganti K.H. Ibrahim Husni. (Kep. Pres. No. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967).
11.	Abdulhadi Madatoeang SH.	256 Karya Tjendekia wan/Pend. (PNI)	Sumpah tgl. 15-3-1967 Pengganti Dr. N. Hulman Lumban Tobing (Kep. Pres. No. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967).
12.	Drs. Achmad Siregar	246 Karya Pemuda (PNI)	Sumpah tgl. 15-3-1967 Pengganti Nj. Lastari Soc- trasno (Wakil Karya Wa- nita). (Kep. Pres. No. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967).
13.	Soetrisno SH. Major (L)	167 Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 15-3-1967 Pengganti Manonga Na- pitupulu Kol. (L). (Kep. Pres. No. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967).
14.	Daud Simbiring	24 P.N.I.	Sumpah tgl. 15-3-1967 Pengganti Nj. R. Soeradji- (Kep. Pres. No. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967).
15.	J.B. Oetoro SH.	231 Karya Roih. Katholik	Sumpah tgl. 15-3-1967 Pengganti Frans X. Ka- langi SH. (belum mengang- kat sumpah sbg. Anggota DPR-GR). (Kep. Pres. No. 81 tahun 1967 tgl. 8-6-1967).
16.	Soegeng Tirtosiswojo	41 P.N.I.	Sumpah tgl. 3-4-1967 Pengganti alm. S. Danoe- soegito. (Kep. Pres. No. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967).

urut No.	N a m a	Angg. Wakil No. Partai/Karya	Keterangan lain ²
17.	I Made Wedastera Suyasa	304 Karya Tani (Petani)	Sumpah tgl. 15-4-1967 Pengganti alm. Sasiro- dikoro. (Kep. Pres. No. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967).
18.	Herdin Panggabean SH.	259 Karya Tjendekia- wan/Pend. (Persadja)	Sumpah tgl. 15-6-1967 Pengganti Ismail Rahar- djo SH. (Kep. Pres. No. 81 tahun 1967 tgl. 8-6-1967).
19.	Soegeng Soetopo Marsigit SH.	260 — „ —	Sumpah tgl. 15-6-1967 Pengganti Adnan Buyung Nasution SH. (Kep. Pres. No. 81 tahun 1967 tgl. 8-6-1967).
20.	R. Soetopo Koesoemo- dirdjo	257 Karya Tjendekia- wan/Pend. (PNI)	Sumpah tgl. 15-6-1967 Pengganti Nn. Mutiah Ha- ditomo. (Kep. Pres. No. 81 tahun 1967 tgl. 8-6-1967).
21.	Muzakir T.B.N.	198 Karya Roch. Islam (PPTI)	Sumpah tgl. 8-9-1967 Pengganti Dr. Sjech H. Djalaluddin. (Kep. Pres. No. 135 tahun 1967 tgl. 2-9-1967).
22.	Djakfar Makruf	2 P.N.I.	Sumpah tgl. 16-10-1967 Pengganti Asmadi Tirta- celomo. (Kep. Pres. No. 155 tahun 1967 tgl. 27-9-1967).
23.	Islan Soebroto	14 P.N.I.	Sumpah tgl. 16-10-1967 Pengganti alm. S. Marto- soewito. (Kep. Pres. No. 155 tahun 1967 tgl. 27-9-1967).
24.	M. T. Siregar	22 P.N.I.	Sumpah tgl. 16-10-1967 Pengganti M. Saleh Umar. (Kep. Pres. No. 155 tahun 1967 tgl. 27-9-1967).
25.	Sumarno Danu Adisumarto	300 Karya Tani (Petani)	Sumpah tgl. 16-10-1967 Pengganti C. Mongan. (Kep. Pres. No. 155 tahun 1967 tgl. 27-9-1967).

No. urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain ^a
26.	Mustafa Ahmad	215	Karya Roch. Islam (Perti)	Belum mengangkat sumpah Pengganti K.H. Asjmawi. (Kep. Pres. No. 101 tahun 1967 tgl. 7-7-1967). Diberhentikan dengan hor- mat dengan Kep. Pres. No. 60/M tahun 1969 tgl. 9-5-1969 dan diganti oleh Mustari Jusuf L.A. Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Djakfar Makruf. (Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968).
27.	Soendoro Hardjoami- djojo SH.	2	P. N. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Moersid Idris. (Kep. Pres. s.d.a.).
28.	Mas Soedijono	16	P. N. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Osa Maliki. (Kep. Pres. s.d.a.).
29.	Dudy Singadilaga SH. MPA	18	P. N. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti R. Darsono. (Kep. Pres. s.d.a.).
30.	Abdul Madjid	21	P. N. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Sudarman Tjitrosendjojo (Kep. Pres. s.d.a.).
31.	Drs. R. Soejanto	29	P. N. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Soelardi. (Kep. Pres. s.d.a.).
32.	Soebekti	30	P. N. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Mas Ripie (Kep. Pres. s.d.a.).
33.	Supiandi Nataatmadja	32	P. N. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Soetojo Mertodimuljo. (Kep. Pres. s.d.a.).
34.	Ir. Kaslan A. Tohir	34	P. N. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti R. Abdoellah Afandi BA. (Kep. Pres. s.d.a.).
35.	Achmad Siddiq	70	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti H. Muhamad Daidlowi. (Kep. Pres. s.d.a.).
36.	Drs. Umi Hasanah	74	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti H. Muhamad Daidlowi. (Kep. Pres. s.d.a.).

No. urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain ²
37.	K. H. Mochtar Rosjidi	80	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti H. Josotaruno Ichsan Noer. (Kep. Pres. s.d.a.).
38.	H. Hoesin Saleh	81	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti K.H.A. Mursjidi. (Kep. Pres. s.d.a.).
39.	Drs. Jahja Chumaidi Hassan	82	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Soelaiman Widjojosebroto. (Kep. Pres. s.d.a.).
40.	R. Soedarno	83	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti H. Zain Alhah- sji. (Kep. Pres. No. 57 ta- hun 1968 tgl. 9-2-1968).
41.	R. Isam Abdurachim	84	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Maniudin Brodiotruno. (Kep. Pres. s.d.a.).
42.	H. Muchtar Chudlory	87	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Nj. Machsun h H. Abdul Chaliq. (Kep. Pres. s.d.a.).
43.	D o e r m a n SH.	94	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti H. Anwar Muaaddad. (Kep. Pres. s.d.a.).
44.	Oesman J. Helmi	107	P. S. I. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti H. Anwar Ijokroaminoto. (Kep. Pres. s.d.a.).
45.	H.E. Mochtar Mihardja	108	P. S. I. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Arudji Katawinata. (Kep. Pres. s.d.a.).
46.	Endang Saeffullah Wiradipradja SH.	111	P. S. I. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti H.A. Nunung Kusnadi. (Kep. Pres. s.d.a.).
47.	Kaboel Arifin SH. Brig. Djen.	151	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti H. Abdul Manaf Lubis, Kol. (Kep. Pres. s.d.a.).

No. Urut	N a m a	Anggo. Wakil. No. Partai/Karya	Keterangan lain ²
48.	Mansjoer Brig. Djen.	156 —"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Andi Mattalatta, Brig. Djen. (Kep. Pres. s.d.a.).
49.	M. Muchlas Rowi Brig. Djen.	158 —"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Mu'amil Effendi SH. Brig. Djen. (Kep. Pres. s.d.a.).
50.	Sardjono Soeptapto Kol. (KKO)	166 Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Soejoso Poegoch, Komodor (L). (Kep. Pres. s.d.a.).
51.	R. Moertamadji Komodor (L)	168 —"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Drs. Mochamad Kamal Kol. (Kep. Pres. s.d.a.).
52.	Abdul Basit Kol. (L)	169 —"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Soedarsono, Kol. (L). (Kep. Pres. s.d.a.).
53.	Sumitro Komodor (U)	178 Karya ABRI-AU	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti E. Suwarma SH., Major (U). (Kep. Pres. s.d.a.).
54.	Sutan Aswar Let. Kol. (U)	175 —"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti S. Domo Indar- to, Komodor (U). (Kep. Pres. s.d.a.).
55.	H. Bambang Soetisna SH. KBPol.	183 Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti T. Soelaiman Mahmoed, AKBPOL. (Kep. Pres. s.d.a.).
56.	Drs. H. Tatang Soelja Let. Kol.	185 —"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Drs. Sugiarto Ruslan, Brig. Djen. Pol. (Kep. Pres. s.d.a.).
57.	Soetowo Hadiwidjojo Let. Kol.	190 Karya Hansip	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti H.M.A. Soedi- jono S., Brig. Djen. (Kep. Pres. s.d.a.).
58.	K. H. Saifuddin Zuhri	193 N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Hamdan Abdul Djalil (Kep. Pres. s.d.a.).

No. Urut	N a m a	Anggo. Wakil No. Partai/Karya	Keterangan lain ²
59.	Drs. Amat Asmawi	194 —"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti K.H. Husin Hifni (Kep. Pres. s.d.a.).
60.	Hamim Hamzah	195 —"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti K.H. Muslich. (Kep. Pres. s.d.a.).
61.	Sardju Ismunandar	197 P. N. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti K.H. Rachmat- ullah. (Kep. Pres. s.d.a.).
62.	Winarso Sate	198 Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Muzakir T.B.N. (Kep. Pres. s.d.a.).
63.	Drs. Marzuki Njakman	201 P. S. I. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti I d h a m. (Kep. Pres. s.d.a.).
64.	H. Bakri Arief	202 —"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti K.H. Achmad Aini Chatib. (Kep. Pres. s.d.a.).
65.	Abdulahak Idris	207 N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti H. Sullam Sjamsun Let. Kol. (Kep. Pres. s.d.a.).
66.	Tb. Anis Fuad Saleh Ma'mun	210 N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti K.H.A. Dimjati. (Kep. Pres. s.d.a.).
67.	Abd. Madjid	211 P. S. I. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Dachlan Kahar. (Kep. Pres. s.d.a.).
68.	Oesman Muttaqien	213 P. H. I. (Muhammadiyah)	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Marzoeqi Jatim. (Kep. Pres. s.d.a.).
69.	Abdul Mu'thi SH.	215 —"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti K.H. Junus Anis (Kep. Pres. s.d.a.).
70.	Suratman	251 Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Nj. Samidjah Soegiarto. (Kep. Pres. s.d.a.).
71.	Nj. Halichah Agus	252 N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Nj. Alfijah Moenir. (Kep. Pres. s.d.a.).

No. Urut	N a m a	Anggo. Wakil No. Partai/Karya	Keterangan lain ²
72.	H. Harun Al Rasjid	258 N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti R. Soenarjo SH. (Kep. Pres. s.d.a.).
73.	Dr. Suhadi Mangku- suwondo	263 3 — Non	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Dr. Emil Salim. (Kep. Pres. s.d.a.).
74.	Ir. Soetomo Adisasmito	264 —"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Ir. S. Dipoku- kusumo. (Kep. Pres. s.d.a.).
75.	Djamil Ali SH.	266 —"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Harjono Tjitrosoebono SH. (Kep. Pres. s.d.a.).
76.	R.J. Sukirman SH. M. Sc.	267 —"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Drs. Bintoro Tjokroamidjojo. (Kep. Pres. s.d.a.).
77.	Nj. Suwarni Saljo SH.	268 —"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Ali A. Adi SH. (Kep. Pres. s.d.a.).
78.	Rohali Sani	280 Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti T. Zulfatli. (Kep. Pres. s.d.a.).
79.	Drs. Moh. Hariadi Darmawan	281 —"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Fahmi Idris. (Kep. Pres. s.d.a.).
80.	Moh. Hatta Mustafa	284 —"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Soegeng Sar- jadi. (Kep. Pres. s.d.a.).
81.	A. Rahman Tolleng	290 —"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Yozar Anwar (Kep. Pres. s.d.a.).
82.	Djamaludin S. Tarigan	303 N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Herman Mu'tashin. (Kep. Pres. s.d.a.).
83.	Drs. Sidik Gondo- warsito	304 P. N. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti I Made Wedas- tera Suyasa. (Kep. Pres. s.d.a.).
84.	Muzamil Chalimi	306 P. S. I. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Soehardjo (Kep. Pres. s.d.a.).

No. Urut	N a m a	Anggo. Wakil No. Partai/Karya	Keterangan lain ²
85.	Mansjur Sangkala	309 Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Sjamsudin BA. (Kep. Pres. s.d.a.).
86.	Soewantijo Soediro- atmodjo	312 P. N. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Soekarni. Djojoadiprodjo. (Kep. Pres. s.d.a.).
87.	Ibrahim Usman	320 P. M. I. (Gasbiindo)	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Jusuf Wibisono SH. (Kep. Pres. s.d.a.).
88.	Ir. Abd. Rachman Rangkuti	330 Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti D. Hardjumuljono. (Kep. Pres. s.d.a.).
89.	Maizir Achmaddyn's	335 P. M. I. (KBIM)	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Dr. H. Ali Akbar. (Kep. Pres. s.d.a.).
90.	H. M. Anshary Sjams	338 N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Moechari Hadiansardjono. (Kep. Pres. s.d.a.).
91.	Achmad Gani	341 3 — Non	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Drs. Hasbullah. (Kep. Pres. s.d.a.).
92.	Drs. I. B. Oka Punyatmadja	233 Karya Hindu Dharma	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Bagus Putu Mastra. (Kep. Pres. s.d.a.).
93.	R. G. Doeriat	138 P. Katholik	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti R.H. Soetarto Hadisoedibyo. (Kep. Pres. s.d.a.).
94.	M. W. Datubara	141 —"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti H. Soripada Sihombing. (Kep. Pres. s.d.a.).
95.	H. T. Sitompoe Kol.	161 Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Moh. Isa Edris. Kol. (Kep. Pres. s.d.a.).

No. Urut	N a m a	Anggoi Wakil No. Partai/Karya	Keterangan lain ²
96.	Drs. Lo S. H. Ginting	229 P. Katholik	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Pastor Th. Hardjawasita (Kep. Pres. s.d.a.).
97.	A. M. D. Jusuff	269 Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti M. E. Subiadi- nata. (Kep. Pres. s.d.a.).
98.	J. J. Socharno	316 —"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Drs. H. A. Sudjendro. (Kep. Pres. s.d.a.).
99.	M. Lenggoe	25 P. N. I	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti S. D. Billi. (Kep. Pres. s.d.a.).
100.	Drs. S. G. B. Tampubolon	50 IP — KI	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Nj. Dewi Asiah Reis Ab'n. (Kep. Pres. s.d.a.).
101.	J. L. L. Taulu	54 IP — KI	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Tan Husni Abdullah. (Kep. Pres. s.d.a.).
102.	C. Radjagoekgoek Kol. Inf.	165 Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Kusno Utomo, Maj. Djen. (Kep. Pres. s.d.a.).
103.	Dr. S. I. Matulesya Kol. (U)	181 Karya ABRI-AU	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti J. Salatun, Komodor (U). (Kep. Pres. s.d.a.).
104.	J. Ch. B. Syauta KBPol.	187 Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti A.J.M. Pieter. (Kep. Pres. s.d.a.).
105.	Drs. Z. J. Manusama	226 Parkindo	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Ds. P.H. Rom- pas M. Th. (Kep. Pres. s.d.a.).
106.	M. F. Siregar M. Sc	240 Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Ido Garnida. (Kep. Pres. s.d.a.).
107.	Djamin Gintings Maj. Djen.	271 Karya Angk.'45	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Laupase Malao. (Kep. Pres. s.d.a.).

No. Urut	N a m a	Anggo. Wakil No. Partai/Karya	Keterangan lain ²
108.	Jakob S. H. L. Tobing	283 Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968. Pengganti Firdaus Wadjdi. (Kep. Pres. s.d.a.).
109.	B. K. J. Tambunan	326 Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Achmad M.P. (Kep. Pres. s.d.a.).
110.	X. S. M. Ondang	333 Parkindo	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Darius Marpaung (Kep. Pres. s.d.a.).
111.	Husaein Jusuf	60 P. Murba	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti Mansurudin Bogok. (Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968).
112.	Abdurrachim Mustafa	67 N. U.	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti H.A. Chamid Widjaja. (Kep. Pres. s.d.a.).
113.	Ismail Mokobombang	110 P. S. I. I.	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti H. Zakaria Imban. (Kep. Pres. s.d.a.).
114.	R. S. Soegiono Kol. (L)	172 Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti Taufik Susanto Kol. (L). (Kep. Pres. s.d.a.).
115.	Hartono SH.	238 Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti Ahmad Dahlan Ranuwardja. (Kep. Pres. s.d.a.).
116.	Ahmad Zamzami Djamhari	239 N. U.	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti Njak Yusda. (Kep. Pres. s.d.a.).
117.	Dr. Mochamad Natzir Said SH.	327 Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti Kamaludin Jamin (Kep. Pres. s.d.a.).
118.	Sahet M. Nainggolan SH.	58 P. Murba	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti Sugiarto Murbantoko. (Kep. Pres. s.d.a.).
119.	Dr. M. Sirait	261 3 — Non	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti Dase Durasid. (Kep. Pres. s.d.a.).

No. Urut	N a m a	Anggo. Wakil No. Partai/Karya	Keterangan lain ²
120.	Prof. Dr. Ida Bagus Mantra	232 Karya Hindu Dharma	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti I. Bagus Wajan Gede. (Kep. Pres. s.d.a.).
121.	M. Hamzah Karim	102 N. U.	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti Drs. Ek. Arfah Muzahar. (Kep. Pres. s.d.a.).
122.	Abdul Wahab Radjab	214 P. M. I. (Muhammadiyah)	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti S a r d j o n o. (Kep. Pres. s.d.a.).
123.	Soeprapto M. Ed.	329 Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti S. Sinambela. (Kep. Pres. s.d.a.).
124.	L. E. Manteiro	137 P. Katholik	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti Drs. D.S. Mata- kupan. (Kep. Pres. s.d.a.).
125.	J. Soeparmo	146 —,—	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti Nj. F. Doeriat. (Kep. Pres. s.d.a.).
126.	Andi Mappasala	323 P. M. I. (Gasbiindo)	Sumpah tgl. 28-2-1968 Pengganti Muchtar Anwar. (Kep. Pres. s.d.a.).
127.	Drs. W.F. Sumampow Brig. D'en. Pol.	184 Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 7-3-1968 Pengganti Drs. Basirun, AKBPOL. Nugroho (Kep. Pres. s.d.a.).
128.	Nn. Soegyarti Wirjo- hardjo SH.	250 P. N. I.	Sumpah tgl. 7-3-1968 Pengganti Nj. Maemunah. Bahrok (Kep. Pres. s.d.a.).
129.	Drs. Apul Siahaan	293 —,—	Sumpah tgl. 29-4-1968 Pengganti Ismangoen Poedjowidagho. (Kep. Pres. No. 111 tahun 1968 tanggal 16-3-1968).
130.	Drs. Djuffrie Soesetyo	39 —,—	Sumpah tgl. 29-4-1968 Pengganti Nj. Sutijah Surya Hadi. (Kep. Pres. No. 110 thn. 1968 tgl. 16-3-1968).

No. Urut	N a m a	Anggo. Wakil No. Partai/Karya	Keterangan lain ²
131.	Alibasjah Bintang	31 —,—	Sumpah tgl. 29-4-1968 Pengganti Mustafa Miga. (Kep. Pres. No. 110 tahun 1968 tgl. 16-3-1968).
132.	Ir. M. Soebagyo Dirdjoreksoatmodjo	336 —,—	Sumpah tgl. 29-4-1968 Pengganti Soemardi Jatmo- soemarto. (Kep. Presiden No. 110 tahun 1968 tanggal 16-3-1968).
133.	Dr. Soetjipto Gondo- amidjojo	26 —,—	Sumpah tgl. 29-4-1968 Pengganti Dr. R. Soeat- madji. (Kep. Pres. No. 111 th. 1968 tgl. 16-3-1968).
134.	A. Moeis Hassan	229 —,—	Sumpah tgl. 29-4-1968 Pengganti Asmuransjah. (Kep. Pres. No. 111 tahun 1968 tgl. 16-3-1968).
135.	Drs. Surono	340 —,—	Sumpah tgl. 8-5-1968 Pengganti Dr. R. Husein Kartasasmita. (Kep. Pres. No. 111 tahun 1968 tgl. 16-3-1968).
136.	M. Saleh Sirun	350 Wakil Irian Barat	Sumpah tgl. 8-5-1968 Pengganti Godlib Mirino. (Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968).
137.	I G. G. Raka Wiratma	5 P. N. I.	Sumpah tgl. 8-5-1968 Pengganti Hardi SH. (Kep. Pres. No. 110 tahun 1968 tgl. 16-3-1968).
138.	H. Abdussjukur	35 —,—	Sumpah tgl. 15-5-1968 Pengganti Soetoko Djojo- subroto. (Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968).
139.	Salman Sapo	59 P. Murba	Sumpah tgl. 31-5-1968 Pengganti Elkana Tobing SH. (Kep. Pres. No. 172 tahun 1968 tgl. 15-3-1968).
140.	A. B. Karubuy	343 Wakil Irian Barat	Sumpah tgl. 29-6-1968 Pengganti H.L. Rumaseuw. (Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968).

No. Urut	N a m a	Anggo. Wakil No. Partai/Karya	Keterangan lain²
141.	Ir. G. M. Tampubolon	264 3 — Non	Sumpah tgl. 10-8-1968 Pengganti Ir. Soetomo Adisasmita. (Kep. Pres. No. 214 th. 1968 tgl. 2-7-1968).
142.	Frans Sikoway	343 Wakil Irian Barat	Sumpah tgl. 10-8-1968 Pengganti A.L. Marany. (Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968).
143.	T. Mb. Gebze	347 —,—	Sumpah tgl. 10-8-1968 Pengganti M. Waromi. (Kep. Pres. s.d.a.).
144.	W. M. Zonggonao	348 —,—	Sumpah tgl. 10-8-1968 Pengganti J. Tarumasely. (Kep. Pres. s.d.a.).
145.	Daranin	36 P. N. I.	Belum mengangkat sumpah Pengganti Rasjid St. Tengah Hari (Kep. Presiden No. 111 tahun 1968 tanggal 16-3-1968). Kemudian diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 190 tahun 1968 tgl. 10-6-1968, diganti oleh Nazar Moenek Datuk Bandaro Putih.
146.	Nazar Moenek Datuk Bandaro Putih	36 —,—	Sumpah tgl. 14-8-1968 Pengganti Daranin. (Kep. Pres. No. 190 tahun 1968 tgl. 10-6-1968).
147.	Mochamad Hadrawie Zairim	317 —,—	Sumpah tgl. 13-9-1968 Pengganti Alaudin Samah. (Kep. Pres. No. 16/M. tahun 1968 tgl. 27-8-1968).
148.	Drs. Husein Darman	3 —,—	Sumpah tgl. 11-10-1968 Pengganti H. Djumhur Hakim. (Kep. Pres. No. 16/M tahun 1968 tgl. 27-8-1968).
149.	Andi Mappatunru BA.	109 P.S. I. I.	Sumpah tgl. 11-11-1968 Pengganti H. Harsono Tjokroaminoto. (Kep. Pres. No. 14/M tgl. 21-8-1968).

No. Urut	N a m a	Anggo. Wakil No. Partai/Karya	Keterangan lain ²
150.	Drs. Jusuf Z. A. (Zainal Abidin)	201 —,—	Sumpah tgl. 31-10-1968 Pengganti Drs. Marzoeki Njakman. (Kep. Pres. No. 14/M tahun 1968 tgl. 21-8-1968).
151.	Dr. Jetty Rizali Noor	253 Kesatuan Aksi	Belum mengangkat sumpah Pengganti Nj. Aisjah Ami- ny SH. (Kep. Pres. No. 57 thn. 1968 tgl. 9-2-1968). Kemudian diberhentikan dengan hormat dgn. Kep.- Pres. No. 14/M thn. 1969 tgl. 20-1-1969 dan diganti oleh Nj. D. Sukahar.
152.	Drs. Bahrum Rangkuti Kol. (Tit.) Laut	170 Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 11-1-1969 Pengganti D.M. Moersa- lin, Laks. Muda (L). (Kep. Pres. No. 54/M thn. 1968 tgl. 20-11-1968).
153.	Abdullah Kadir KBPol.	407 Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 11-1-1969 Pengganti Drs. Soejono Soentahir, KBPOL. (Kep. Pres. No. 53/M thn. 1968 tgl. 20-11-1968).
154.	H. Asa Bafagih	88 N. U.	Sumpah tgl. 29-1-1969 Pengganti H. Djamaluddin Malik. (Kep. Pres. No. 15/ M. tahun 1969 tgl. 22-1-1969).
155.	Drs. Nj. M. Wahjudi	254 Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 10-5-1969 Pengganti Nj. Martina Notowidagdo SH. (Kep. Pres. No. 42/M thn. 1969 tgl. 25-3-1969).
156.	Z. Rachiman Kol. (U)	405 Karya ABRI-AU	Sumpah tgl. 10-5-1969 Pengganti Soewita Hadi- wardaja, Kol. (U). (Kep. Pres. No. 43/M thn. 1969 tgl. 28-3-1969).
157.	H. Dahlan Ibrahim	51 IP-KI	Sumpah tgl. 10-5-1969 Pengganti Tjetjep Arjana Prawiradinata. (Kep. Pres. No. 44/M thn. 1969 tgl. 3-4-1969).

No. Urut	N a m a	Anggo. Wakil No. Partai/Karya	Keterangan lain ²
158.	Mohamad Buang Bc. Hk.	121 Perti	Sumpah tgl. 10-5-1969 Pengganti Tgk. M. Saleh. (Kep. Pres. No. 60/M thn. 1969 tgl. 9-5-1969).
159.	Iskandar Sarumala BBM.	123 —,—	Sumpah tgl. 10-5-1969 Pengganti Azhar Bokry. (Kep. Pres. No. 60/M thn. 1969 tgl. 9-5-1969).
160.	Judoparipurno SH.	124 —,—	Sumpah tgl. 10-5-1969 Pengganti H. Kuasini Sabil (Kep. Pres. No. 60/M thn. 1969 tgl. 9-5-1969).
161.	Musjtari Jusuf L. A.	199 Perti	Sumpah tgl. 10-5-1969 Pengganti Mustafa Ahmad (belum mengangkat sumpah) (Kep. Pres. No. 60/M tahun 1969 tgl. 9-5-1969).
162.	Rusnaizur BA.	203 —,—	Sumpah tgl. 10-5-1969 Pengganti K.H. Gozali. (Kep. Pres. s.d.a.).
163.	T. S. Mardjohan	204 —,—	Sumpah tgl. 10-5-1969 Pengganti Sja'roni K.A.H. (Kep. Pres. s.d.a.).
164.	Suyono Kertartodigdo Palagan	147 Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 22-5-1969 Pengganti Ir. Soewarno. (Kep. Pres. No. 61/M thn. 1969 tgl. 9-5-1969).
165.	Soomarno	238 Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 22-5-1969 Pengganti Hartono SH. (Kep. Pres. No. 61/M thn. 1969 tgl. 9-5-1969).
166.	Nj. D. Sukahar	253 Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 22-5-1969 Pengganti Dr. Jetty Rizali Noor. (belum mengangkat sumpah). (Kep. Pres. No. 61/M tahun 1969 tgl. 9-5-1969).
167.	Drs. Hendrobudijanto	353 —,—	Sumpah tgl. 22-5-1969 Pengganti Soekardjan Soe- darjadi BA. (Kep. Pres. s.d.a.).

No. Urut	N a m a	Anggo. Wakil No. Partai/Karya	Keterangan lain²
168.	Soewandi SH.	355 —,—	Sumpah tgl. 22-5-1969 Pengganti Dr. Fuad Hassan. (Kep. Pres. s.d.a.).
169.	Abdulkadir Jusuf	359 —,—	Sumpah tgl. 22-5-1969 Pengganti Ir. Beddu Amang. (Kep. Pres. s.d.a.).
170.	Drs. Sukarno MA.	363 —,—	Sumpah tgl. 22-5-1969 Pengganti T. Soeripto BA. (Kep. Pres. s.d.a.).
171.	Moh Yar Dt. Tuma Alam	364 —,—	Sumpah tgl. 22-5-1969 Pengganti Drs. A. Dachlan Siregar. (Kep. Pres. s.d.a.).
172.	E d d i w a n	373 Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 22-5-1969 Pengganti S. Harsono B.S. (Kep. Pres. s.d.a.).
173.	Drs. Sumiskun	381 3 — Non	Sumpah tgl. 22-5-1969 Pengganti Drs. Sukadji MA. (Kep. Pres. s.d.a.).
174.	Tjokorda Rai Sudharta	232 Karya Hindu Dharma	Sumpah tgl. 5-6-1969 Pengganti Prof. Dr. Mantra. (Kep. Pres. s.d.a.).
175.	Sudjati	334 Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 5-6-1969 Pengganti Sjamsoe Haya Udaja. (Kep. Pres. s.d.a.).
176.	Mohamad Hasan	83 N. U.	Sumpah tgl. 12-6-1969 Pengganti R. Soedarmo. (Kep. Pres. No. 73/M thn. 1969 tgl. 31-5-1969).
177.	Soewondopranoto Ir. Djen. Pol.	182 Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 12-6-1969 Pengganti Abulrachman Setjowibowo, Brig. Djen. Pol. (Kep. Pres. No. 62/M tahun 1969 tgl. 9-5-1969).
178.	Martono	339 Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 12-6-1969 Pengganti Prof. Dr. Ismail Suny SH. (Kep. Pres. No. 61/M tahun 1969 tgl. 9-5-1969)

No. Urut	N a m a	Anggo. Wakil No. Partai/Karya	Keterangan lain ²
179.	T. Mochtar SH.	244 IP-KI	Sumpah tgl. 26-9-1969 Pengganti M.J. Effendi Nasution. (Kep. Pres. No. 108/M. thn. 1969 tgl. 28-8-1969).
180.	R. B. N. Djajadiningrat Laksa. Muda (L)	400 Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 17-10-1969 Pengganti Achmad Dipo, Kol. (L). (Kep. Pres. No. 119/M thn. 1969 tgl. 29-9-1969).
181.	M. Bukit	326 Karya Sekber/ Non Affiliasi	Belum mengangkat sumpah Pengganti BKJ. Tambunan. (Kep. Pres. No. 61/M thn. 1969 tgl. 9-5-1969). Kemu- dian diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 88/M tahun 1970 tgl. 23-7-1970 dan diganti oleh Kapiten P u r b a.
182.	Sutjipto Danukusumo Ir. Djen. Pol	184 Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 3-1-1970 Pengganti Drs. W.F. Su- mampow, Brig Djen. Pol. (Kep. Pres. No. 141/M. thn. 1969 tgl. 14-11-1969).
183.	Prapto Prajitno Kol.	285 Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 3-1-1970 Pengganti Nailun Hamam, Kol. (Kep. Pres. No. 143/ M th. 1969 tgl. 14-11-1969)
184.	Njak Adam Kamil Brig Djen.	390 Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 3-1-1970 Pengganti G.H. Mantik, Kol. (Kep. Pres. s.d.a.).
185.	Ismail S. Bauw	350 Wakil Irian Barat	Sumpah tgl. 30-4-1970 Pengganti M. Saleh Sirua. (Kep. Pres. No. 30/M tahun 1970 tgl. 28-2-1970).
186.	Kapiten Purba	326 Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 28-8-1970 Pengganti M. Bukit (belum mengangkat sumpah). (Kep. Pres. No. 88/M tahun 1970 tgl. 23-7-1970).
187.	T a h e r SH. AKBPol.	183 Karya ABRI-AK	Pengganti Bambang Soe- tiana SH. KBPol. (Kep. Pres. No. 108/M tahun 1970 tgl. 30-7-1970).

No. urut	N a m a	Angg. Wakil No. Partai/Karya	Keterangan lain ²
188.	Abdul Aziz Dja'far	85 N. U.	Sumpah tgl. 31-8-1970 Penggantt H. Moch, Noor Abdulgani. (Kep. Pres. No. 109/M tahun 1970 tgl. 30-7-1970).
189.	J. Palekahelu	130 Parkindo	Sumpah tgl. 19-9-1970 Pengganti M. Caley. (Kep. Pres. No. 107/M tahun 1970 tgl. 30-7-1970).
190.	R. Soesanto Manggas- towo Laksda (L)	169 Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 19-9-1970 Pengganti Abdul Basi, Kol. (L). (Kep. Pres. No. 123/M tahun 1970 tgl. 29-8-1970).
191.	Drs. H. Moch. Kamal Komodor (L)	171 Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 19-9-1970 Pengganti R.O. Darja- atmaka, Komodor (L). (Kep. Prs. s.d.a.).
192.	Dr. Idris P. Siregar Kol. Kes. (L)	398 Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 19-9-1970 Pengganti Sukarton Mar- mosudjono SH., Maj. (L). (Kep. Prs. s.d.a.).
193.	T. Ramli Let. Kol. (L)	399 Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 19-9-1970 Pengganti Drs. Masfar Djamin Let. Kol. (L). (Kep. Prs. s.d.a.).
194.	Alwie Achmad	99 N. U	Sumpah tgl. 23-9-1970 Pengganti H. Usmar Ismail. (Kep. Pres. No. 114/M tahun 1970 tgl. 11-8-1970).
195.	M. Oesman Rahman Kol. (L)	172 Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 30-9-1970 Pengganti R.S. Soegiono, Kol. (L). (Kep. Prs. s.d.a.).
196.	Drs. Frans S. Odjan	245 P. Katholik	Sumpah tgl. 29-10-1970 Pengganti Ignatius Grey Graitto. (Kep. Pres. No. 136/M thn. 1970 tgl. 17-10-1970).

DAFTAR ISI :

1. Pendahuluan oleh Ketua Team/Sek. Djen. D.P.R.- G.R. Sri Hardjuman S. H	III
2. Sambutan-sambutan :	
a. Presiden R.I. Djenderal Soeharto	IX
b. Ketua M.P.R.S. Abdul Haris Nasution	XI
c. Ketua D.P.R.-G.R. H.A. Sjaichu	XIII
d. Men. Pen. R.I. Boediardjo	XV
e. Men. P. dan K. Mashuri S.H.	XVII
f. Men. Penghubung MPRS/DPR-GR/DPA H.M.S. Mintaredja S.H.	XIX

3. BAB I

(KOMITE NASIONAL PUSAT DAN BADAN PEKERDJA KOMITE NASIONAL PUSAT).

§. 1. PEMBENTUKAN.

a. Komite Nasional Pusat	1
b. Badan Pekerdja K.N.P.	8

§. 2. KEANGGOTAAN.

a. Komite Nasional Pusat	12
b. Badan Pekerdja K.N.P.	18

§. 3. KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG.

a. Kedudukan dan tugas	26
b. Hak ² dan kewadjiban	29
c. Hubungan dengan Pemerintah	32
d. Kedudukan Hukum	35
e. Kedudukan Keuangan	37

§. 4. PERATURAN TATA-TERTIB DAN PELAKSANAANNJA.

a. Badan Pekerdja K.N.P.	42
b. Komite Nasional Pusat	47

§. 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH.

a. Permulaan Perdjjuangan Fisik	49
b. Timbulnja partai-partai politik	53
c. Perdjjuangan Indonesia melawan Belanda : — Persetudjuan Linggardjati dan Perang	56

Kolonial pertama	56
— Persetudjuan Renvile dan Perang Kolonial	
Kedua	60
— Konperensi Medja Bundar	64
— Sekitar Pemberontakan Madiun	66
§. 6. HASIL-HASIL PEKERDJAAN.	
a. Badan Pekerdja K.N.P.	68
b. Komite Nasional Pusat	80
§. 7. SEKRETARIAT	84
4. BAB II	
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAN	
SENAT RIS.	
§. 1. Pembentukan	92
§. 2. Keanggotaan :	
a. Sjarat ² , djumlah anggota, dsb.	94
b. Pimpinan	97
§. 3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG.	
a. D.P.R. dan Senat R.I.S.	99
b. Ketua dan Anggota	103
c. Hubungan dengan Dewan Pengawas Ke- uangan/Mahkamah Agung	106
§. 4. PERATURAN TATA-TERTIB DAN PELAK- SANAANNJA.	
a. Penjusunan	107
b. Peraturan Tata-tertib D.P.R.-R.I.S.	108
c. Peraturan Tata-tertib Senat R.I.S.	110
§. 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH	
a. Likwidasi R.I.S. dan Pembentukan kembali Negara Kesatuan R.I.	112
b. Kedjadian lain-lain	118
§. 6. HASIL-HASIL PEKERDJAAN	119
§. 7. SEKRETARIAT	132

5. B A B III

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SEMENTARA, 16 AGUSTUS 1950 — 26 MARET 1956.

§. 1. PEMBENTUKAN	135
§. 2. KEANGGOTAAN	136
§. 3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG.	
a. Kedudukan dan Tugas	140
b. Hak ² dan Kewajiban	141
c. Hubungan D.P.R.S. dengan Pemerintah ...	143
d. Kedudukan hukum Anggota D.P.R.S.	155
e. Kedudukan Keuangan Anggota D.P.R.S. ...	159
§. 4. PERATURAN TATA TERTIB DAN PELAKSANAANNJA.	
a. Penetapan Peraturan Tata tertib	161
b. Tentang Djenis, nama dan susunan Badan ² Perlengkapan	162
c. Tentang Tugas Badan ² Perlengkapan	164
d. Tjara pemitjaraan dalam rapat pleno	166
§. 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH.	
a. Demonstrasi 17 Oktober 1952	169
b. Konperensi Asia - Afrika, 18 s/d 24 April 1955)	172
§. 6. HASIL-HASIL PEKERDJAAN.	
a. Usul Undang-undang tentang Pemilihan Umum	174
b. Irian Barat	176
c. Rantjangan Anggaran Belandja	179
d. Pelaksanaan Hak Angket	182
e. Usul Mosi	184
§. 7. SEKRETARIAT.	
a. Pembentukan	184
b. Perkembangan	185

6. BAB IV .

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT HASIL PEMILIH-
AN UMUM, 26 MARET 1956 — 22 DJULI 1959.**

§. 1. PEMBENTUKAN	189
§. 2. KEANGGOTAAN	192
§. 3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG.	
a. Kedudukan Keuangan	195
b. Hubungan D.P.R. Hasil Pemilihan Umum dengan Pemerintah	196
§. 4. PERATURAN TATA-TERTIB DAN PELAK- SANAANNJA	199
§. 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH.	
a. Pembatalan Perdjudjian K.M.B.	200
b. Usaha ² pengembalian Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia	201
c. Pergolakan didaerah-daerah	202
d. Usaha ² menjatukan Dwitunggal Sukarno- Hatta	204
e. Konsepsi Presiden	205
f. Pembahasan Penetapan U.U.D. 1945 Dalam Konstituante	209
§. 6. HASIL-HASIL PEKERDJAAN	213
§. 7. SEKRETARIAT.	

7. BAB V

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT PEMILIHAN
UMUM BERLANDASKAN U.U.D. 1945, 22 DJULI
1959 S/D 29 DJULI 1960**

§. 1. PEMBENTUKAN	219
§. 2. KEANGGOTAAN	222
§. 3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG D.P.R./ ANGGOTA	223
§. 4. PERATURAN TATA-TERTIB DAN PELAK- SANAANNJA.	
a. Penjusunan Peraturan Tata-tertib	226

b. Pembentukan Komisi ² dan Panitia ²	228
c. Penetapan Anggaran Belandja	229
d. Pembentukan Undang-undang	229
e. Wewenang D. P. R.	230
f. Tjara mengambil Keputusan	231
g. Ketentuan Tentang Tahun Sidang	233
§. 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH	
a. Lahirnja Manipol	233
b. Pemerintah Menetapkan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959	234
c. Pertentangan antara D. P. R. dan Pemerintah	234
§. 6. HASIL-HASIL PEKERDJAAN	239
§. 7. SEKRETARIAT.	240
8. BAB VI	
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG ORDE LAMA, 24 DJUNI 1960 S/D 15 NOPEMBER 1965.	
§. 1. PEMBENTUKAN	241
§. 2. KEANGGOTAAN	
a. Djumlah dan Mutasi	243
b. Golongan dan Sub Golongan	247
c. Pimpinan	249
§. 3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG.	
a. Kedudukan	250
b. Tugas dan wewenang	252
c. Hubungan antara D. P. R. - G. R. dengan Lembaga-lembaga Negara lainnja	253
d. Kedudukan Keuangan	255
§. 4. PERATURAN TATA-TERTIB PELAKSA- ANNJA	
a. Pembuatan dan perubahan ² nja	258
b. Djenis, Djumlah Badan ² Pelengkapan	258
c. Tjara pemitjaraan dalam Badan ² Perleng- kapan	260
d. Tjara pemitjaraan dalam rapat ² pleno	262

e. Tjara menggunakan hak budget dan hak ² lain	266
§. 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH.	
a. Sengketa Irian Barat	267
b. Konfrontasi R. I. - Malaysia	276
c. Sekitar Konprensi Asia Afrika ke-II	279
d. Gerakan 30 September	283
§. 6. HASIL-HASIL PEKERDJAAN	294
§. 7. SEKRETARIAT.	309
9. BAB VII	
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG RO- JONG MINUS P. K. I., 15 NOPEMBER 1965 S/D 19 NOPEMBER 1966)	
§. 1. PEMBENTUKAN	315
§. 2. KEANGGOTAAN	
a. Djumlah dan Mutasi	315
b. Pimpinan	318
§. 3. KEDUDUKAN, TUGAS, HAK DAN WEWE- NANG; HUBUNGAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN	
a. Kedudukan, Tugas hak dan Wewenang	322
b. Hubungan D. P. R. - G. R. dengan Lembaga- lembaga Negara lainnja	323
c. Kedudukan Keuangan	325
§. 4. PERATURAN TATA-TERTIB DAN PELAK- SANAANNJA	
a. Proses Penjusunan Peraturan Tata-tertip D. P. R. - G. R.	327
b. Djumlah dan Susunan Komisi ² D.P.R.-G.R.	328
§. 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH	
a. Situasi gawat ditanah air	331
b. Nota politik KAMI dan Panitia Politik DPR-GR.	337
c. Pernjataan A. B. R. I. tgl. 5 Mei 1966 dan Surat Presiden tgl. 4 Mei 1966	341

d. Sidang Umum ke-IV M.P.R.S.	348
e. Pernyataan Pendapat D.P.R. - G.R. tentang Keterangan Pemerintah dan Pidato-pidato Presiden	352
§. 6. HASIL-HASIL PEKERDJAAN	361
a. Undang-undang No. 5 Tahun 1966 (Lembar- an Negara No. 32-TLN No. 2811) Tentang Persetujuan Untuk Normalisasi Hubungan Antara Republik Indonesia Dan Malaysia ...	366
b. Undang-undang No. 10 Tahun 1966 (Lem- baran Negara No. 38-TLN No. 2831) Ten- tang Kedudukan M.P.R.S. dan D. P. R. - G. R. menjelang Pemilihan Umum	367
c. Pernyataan Pendapat Mengenai Amanat Presiden Tanggal 15 Djanuari 1966	369
d. Pernyataan Pendapat D. P. R. - G. R. Me- ngenai Surat Perintah 11 Maret 1966	370
e. Pernyataan Pendapat D. P. R. - G. R. ten- tang Pengumuman Presiden No. 5 Tang- gal 18 Maret 1966	372
f. Pernyataan Pendapat D. P. R. - G. R. Me- ngenai Indonesia Aktif Kembali Dalam P.B.B.	373
 10. B A B VIII	
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG RO- JONG DALAM ZAMAN ORDE BARU, 19 NOPEM- BER 1966 S/D 29 AGUSTUS 1970.	
§. 1. PEMBENTUKAN	377
§. 2. KEANGGOTAAN	378
§. 3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG.	
a. Kedudukan, tugas dan wewenang	387
b. Kedudukan Keuangan	389
§. 4. PERATURAN TATA-TER'TIB DAN PELAK- SANAANNJA.	
a. Penjusunan	392
b. Djenis, djumlah Badan Kelengkapan	394

c. Tjara melaksanakan Musjawarah untuk Mufakat	396
§. 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH.	
a. Pelengkap Nawaksara	401
b. Penjerahan Kekuasaan Pemerintah dari Presiden Soekarno Setjara Sepihak Kepada Pengemban TAP IX/MPRS	402
c. Disekitar Sidang Umum Istimewa M.P.R.S.	405
d. Pemulihan Hubungan Diplomatik R. I. — Malaysia	425
e. Misi Djenderal Soeharto keluar negeri dan Sidang Umum ke-V M.P.R.S.	426
f. Rentjana Pembangunan Lima Tahun dan Perubahan Tahun Anggaran	429
g. Persoalan Irian Barat	432
§. 6. HASIL-HASIL PEKERDJAAN D.P.R.-G.R. ...	435
§. 7. SEKRETARIAT	456
11. BAB IX HAL-HAL CHUSUS.	
a. Gedung-gedung jang pernah dipergunakan D.P.R.-R.I. 1945 — 1970.	460
b. Keanggotaan D. P. R. pada Badan-badan Internasional	463
c. Kepala-kepala Negara Asing/Perdana Menteri dan tamu-tamu Luar Negeri jang mengundang dan berpidato di Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia	470
d. Delegasi D.P.R. Keluar Negeri	473
e. Sedjarah Hubungan antara D.P.R. dan Pers	477
12. PENUTUP	480
13. LAMPIRAN-LAMPIRAN.	
— Produk Perundang-undang D.P.R.-R.I. 1945 — 1970	481
— Ichtilisar djumlah Undang-undang	537
— Daftar Mosi, Resolusi dan Interpelasi dalam masa D.P.R.-RIS.	538

— Daftar Mosi, Resolusi dan Interpelasi dalam masa D. P. R. S.	540
— Daftar Usul ² Resolusi dan Interpelasi dalam masa DPR-GR.	551
— Daftar Pokok ² Pembicaraan yang belum selesai pembahasannya di D.P.R. (dari tahun sidang 1950 s/d 20 Juni 1966 yaitu sebelum berlakunya U.U. No. 10 tahun 1966).	557
— Daftar Pokok ² Pembicaraan yang belum selesai pembahasannya di DPR - GR (dari tahun sidang 1966 s/d 28 Maret 1970) yaitu sesudah berlakunya U.U. No. 10 tahun 1966).	563
— KEANGGOTAAN DPR-RI.	
a. Daftar Anggota Komite Nasional Pusat, (Pleno ke-VI di Jogjakarta).	570
b. Daftar Anggota Senat R.I.S., 15 Februari s/d 16 Agustus 1950	584
c. Daftar Anggota D.P.R.-R.I.S., 15 Februari s/d 16 Agustus 1950	586
d. Daftar Anggota D.P.R. Sementara, 16 Agustus 1950 s/d 26 Maret 1956	592
Daftar khusus anggota Pengganti DPR hasil Pemilihan Umum.	621
e. Daftar Anggota D. P. R. Hasil Pemilihan Umum, 26 Maret 1956 s/d 22 Juli 1959	606
f. Daftar Anggota DPR dalam rangka U.U.D. 1945, 23 Juli 1959 s/d 24 Juni 1960	624
Daftar khusus anggota Pengganti D.P.R.	632
g. Daftar Anggota D.P.R.-G.R., 25 Juni 1966 s/d 31 Desember 1966	634
— Daftar Khusus Anggota Tambahan D.P.R.-G.R. tahun 1960 s/d 1966	657
— Daftar Khusus Anggota Tambahan D.P.R. - G.R. tahun 1967	660
— Daftar Khusus Anggota Tambahan D.P.R. - G.R. tahun 1968	666
— Daftar Khusus Anggota Pengganti D.P.R. - G.R., 1960 — 1966	670
— Daftar Khusus Anggota Pengganti D.P.R. - G.R., 1967 — 1970	683



3 9015 05099 7561



Digitized by Google



3 9015 05099 7561



